

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
17. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disebut KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk

mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

BAB II

RPJMD Tahun 2025-2029

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota terpilih hasil Pemilihan Wali Kota Tahun 2024.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPD;
 - b. RTRW;
 - c. RPJMN;
 - d. RPJPD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. KLHS RPJMD.
- (4) Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota sekitar.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
- b. pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD Tahun 2025-2029;
- c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD Tahun 2025-2029;
- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD Tahun 2025-2029; dan
- e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD Tahun 2025-2029.

Bagian Kedua
Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. bab I berisi Pendahuluan;
 - b. bab II berisi Gambaran Umum Daerah;
 - c. bab III berisi Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. bab IV berisi Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. bab V berisi Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RPJMD Tahun 2025-2029;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.
- (4) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD Tahun 2025-2029

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode tahun berikutnya belum tersusun, penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJPD dan RPJMN.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2026 dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA :
(8-169/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Oleh karena itu, untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan daerah serta agar pelaksanaan pembangunan daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif, dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD merupakan dokumen perencanaan Kota Semarang untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2025-2029 yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RPJMD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis, serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya dokumen RPJMD dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) , yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 173

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang sistematis dan terorganisir untuk merancang, mengelola, dan mengarahkan pembangunan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan pembangunan sangat penting dan signifikan dalam menentukan arah perkembangan daerah yang bersangkutan. Selain untuk menjadikan pembangunan lebih terarah, perencanaan pembangunan juga dapat berfungsi sebagai standar atau alat ukur untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Perencanaan yang baik dilakukan berdasarkan pada data, fakta, dan informasi yang valid, akurat, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah untuk mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis di daerah, provinsi, maupun nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang memuat target-target pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mengembangkan potensi serta menangani permasalahan yang ada. Oleh karena itu, visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD yang merupakan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih harus menunjukkan arah pembangunan yang bisa mencerminkan keberhasilan dalam mengembangkan potensi maupun menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Sebagaimana telah diketahui bersama, pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia telah melantik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih atas nama Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dan Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T. menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Periode Tahun 2025-2030.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RPJMD

dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi seluruh alur pembangunan di Kota Semarang.



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam upaya menghadapi berbagai tren dinamika global yang dipicu oleh megatren global seperti dinamika geopolitik dan geoekonomi, perubahan demografi, urbanisasi global, perubahan iklim, revolusi teknologi, dan beberapa tren dunia yang berdampak pada pembangunan di Kota Semarang, perencanaan yang disusun dituntut untuk mampu memitigasi dan beradaptasi dengan cepat dengan segala potensi yang dimiliki. Respon terhadap dinamika yang serba cepat ini memerlukan percepatan pembangunan dalam berbagai aspek namun tetap memperhatikan keberlanjutan dengan menyeimbangkan faktor ketahanan sumber daya alam dan budaya agar tetap tangguh dalam menghadapi setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang.

Sejumlah tantangan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, teknologi, budaya, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi perkembangan kondisi di

daerah juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang tepat dan akurat. Dalam proses penyusunannya, RPJMD juga memperhatikan arahan dan sinergi kebijakan yang mendukung cita-cita besar bangsa Indonesia, yaitu visi Indonesia Emas 2045. Untuk mendukung tercapainya cita-cita tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 telah menetapkan 8 (delapan) Misi Pembangunan, 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan dengan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan, yang mana Indikator Utama Pembangunan (IUP) tersebut bersifat imperatif kepada Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia dan Kota Semarang telah menetapkan 63 (enam puluh tiga) IUP yang terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) IUP Imperatif dan 4 (empat) IUP Mandiri yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Kota Semarang terus mengembangkan usahanya untuk menjadi sebuah kota yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya serta memiliki kapasitas yang unggul baik masyarakat maupun sistem kotanya. Upaya tersebut dapat didorong melalui keikutsertaan Kota Semarang dalam jaringan internasional seperti World Bank Group (*Capital Investment Planning*) yang dapat membuka peluang kolaborasi dengan berbagai kota dan lembaga-lembaga internasional lainnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi tantangan perkotaan. Jejaring yang dikembangkan tersebut diharapkan akan memperkuat koneksi yang akan membuka kesempatan adanya dukungan dari lembaga atau organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan perencanaan pembangunan pada khususnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

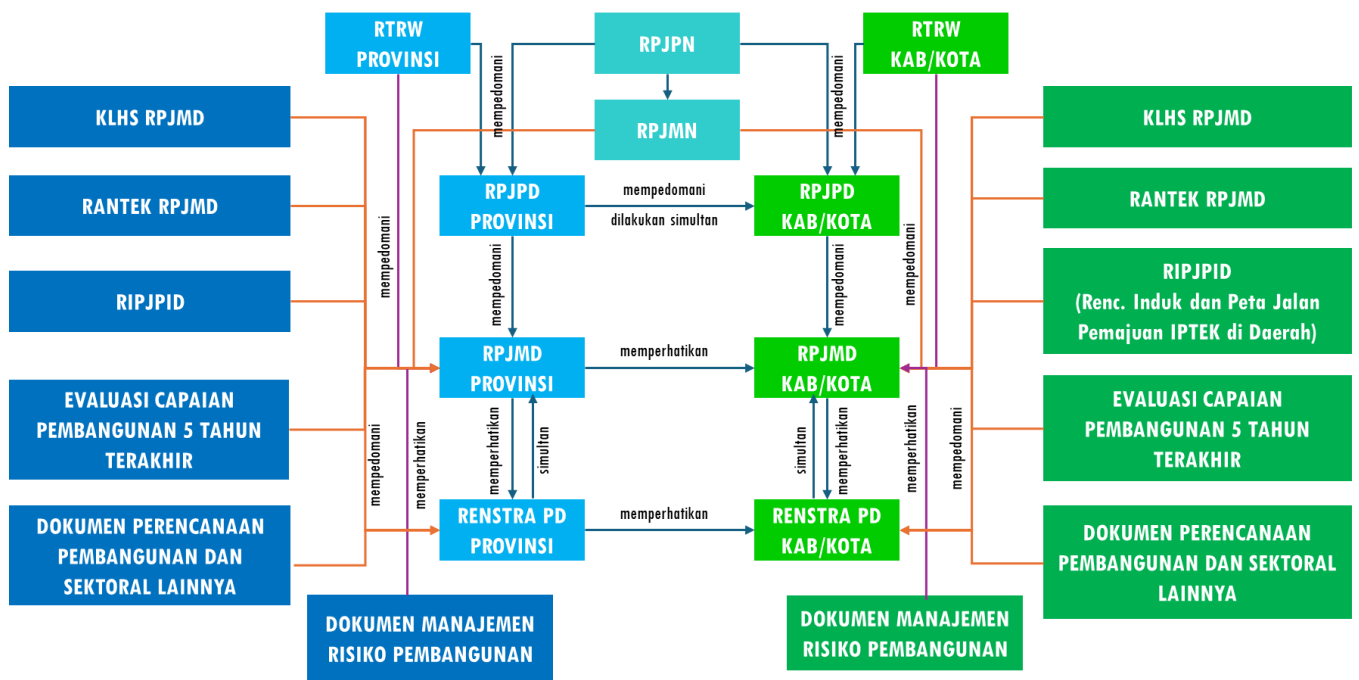
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik pada lingkup Kota Semarang, provinsi maupun nasional.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama atas penjabaran kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJPD Kota Semarang tahun 2025-2045. Pada tahap ini, RPJMD tahun 2025-2029 diprioritaskan untuk mewujudkan visi Kota Semarang melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun fokus kebijakannya yaitu untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Semarang yang berkualitas, mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, serta mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dokumen RPJMD disusun simultan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan kemudian dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi seluruh alur pembangunan di Kota Semarang.



Gambar 1.2 Hubungan antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPJMD mempedomani pada hasil evaluasi RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis bukti. Hal ini juga sejalan dengan prinsip perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Berkaitan dengan dokumen kewilayahan, penyusunan RPJMD juga memperhatikan RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031. Penyusunan RPJMD memperhatikan dokumen RTRW yang di dalamnya berisi tentang pola pengembangan zonasi kewilayahan. Hal ini untuk menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan pembangunan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kota Semarang berdasarkan potensi wilayahnya serta menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kota Semarang. Selain itu, penyusunan RPJMD juga telah mempertimbangkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi serta kompensasi program dan kegiatan. Sehingga, rencana pembangunan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 telah berprinsip pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan. Penyusunan RPJMD juga mempedomani Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJ-PID) yang merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan riset dan inovasi serta pemanfaatannya guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, serta daya saing daerah. Sedangkan untuk penyelenggaraan perkotaan, penyusunan RPJMD juga mempedomani Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) yang merupakan rencana pentahapan penyediaan layanan Perkotaan beserta strategi pendanaan indikatif yang merupakan bagian dari dokumen rencana pembangunan daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang.

Penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 juga memperhatikan kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Aspek keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yaitu dengan melakukan penyelarasan terhadap arah kebijakan terutama untuk wilayah Kota Semarang. Selain itu, penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, terutama pada Agenda Pembangunan dan Arah Pembangunan Wilayah, sehingga dapat diselaraskan dengan target-target pembangunan RPJMD Kota Semarang. Selain itu, dalam penyusunannya, RPJMD ini juga memperhatikan dokumen-dokumen sektoral lainnya yang berkaitan dengan target-target pembangunan daerah. Keterkaitan antar dokumen rencana pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.2.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan jangka menengah Kota Semarang pada periode tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholders* baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang secara berkesinambungan. Tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah, melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
2. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah sampai dengan tahun 2029 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
4. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan perubahan RPJMD Kota Semarang, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJMD, meliputi gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu

strategis. Gambaran umum kondisi daerah meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Gambaran keuangan daerah memuat penjelasan mengenai realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029. Permasalahan dan isu strategis memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan diselesaikan hingga masa periode pembangunan jangka menengah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini membahas mengenai visi misi, tujuan dan sasaran dan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah. Visi misi, tujuan, dan sasaran menguraikan visi dan misi Wali kota dan Wakil Wali kota Semarang ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah. Strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah menjelaskan strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjelaskan program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan perangkat daerah. Program perangkat daerah memuat indikasi program serta pagu indikatif program untuk mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 dan sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi indikator kinerja utama daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB V PENUTUP

Memuat pedoman transisi yang diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta kaidah pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Kota Semarang ditetapkan sebagai kota metropolitan kelima terbesar di Indonesia sekaligus sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kota ini memiliki beragam keharmonisan budaya serta kekayaan potensi daerah yang bertransformasi menjadi simpul ekonomi Jawa. Perpaduan unik antara sejarah dan modernitas di berbagai aspek menjadikan Kota Semarang berkembang secara pesat. Perkembangan ini tercermin di berbagai sektor mulai dari pembangunan jalan tol, revitalisasi pelabuhan, hingga sistem transportasi yang semakin modern. Di sektor pariwisata, kekayaan budaya dan sejarah Kota Semarang menjadi daya tarik utama, dengan kawasan kota lama, wisata religi, serta kuliner khas yang semakin dikenal luas. Perekonomian pun tumbuh dengan pesat, didukung oleh sektor perdagangan, jasa dan UMKM yang menjadi motor penggerak utama. Selain itu, kehadiran institusi pendidikan dan pusat riset turut berperan dalam mencetak sumber daya manusia unggul, serta mendorong inovasi di berbagai sektor. Dengan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki, Kota Semarang terus bertransformasi menjadi kota yang maju, berdaya saing, dan inklusif, menjadikannya salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan budaya di Indonesia. Adapun capaian transformasi ini dapat dilihat melalui aspek-aspek berikut:

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

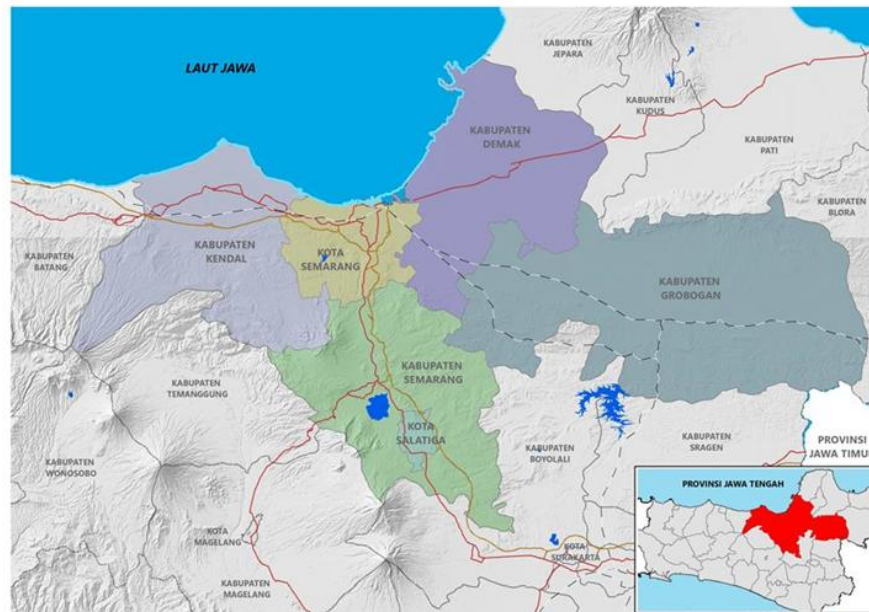
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis aspek geografi Kota Semarang memberikan pemahaman mendalam tentang karakteristik lokasi dan wilayahnya, termasuk potensi pengembangan serta tingkat kerentanannya terhadap bencana alam. Kota Semarang memiliki topografi yang beragam, terdiri dari daerah pesisir, dataran rendah, hingga perbukitan, sehingga mempengaruhi tata ruang kota serta pola pembangunan. Letaknya yang strategis sebagai pusat ekonomi di Jawa Tengah juga menjadikannya sebagai simpul perdagangan dan jasa yang vital. Namun, kondisi geografis ini juga membawa tantangan, seperti risiko banjir rob di kawasan pesisir dan tanah longsor di wilayah perbukitan. Sementara itu, aspek demografi memberikan gambaran mengenai dinamika kependudukan di Kota Semarang, termasuk tingkat pertumbuhan, komposisi usia, serta distribusi penduduk. Perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu mencerminkan perkembangan ekonomi dan sosial, yang turut memengaruhi kebijakan pembangunan kota. Kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa wilayah mendorong perlunya perencanaan yang lebih matang dalam penyediaan infrastruktur, fasilitas publik, serta perumahan yang layak.

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran sentral dan strategis di Indonesia, khususnya Regional Kedungsepur (Kendal – Demak – Ungaran – Semarang – Purwodadi). Kota Semarang memiliki luas sebesar 373,78 km² yang terbagi menjadi 16 kecamatan dengan 177 kelurahan. Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kota Semarang mencapai

1.702.379 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 4.534,07 jiwa/km². Kota Semarang adalah kota ekonomi, budaya dan komersial yang penting di Indonesia serta menjadi wilayah metropolitan terbesar ke-5 di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.1 Peta Kota Semarang dan Sekitarnya

Kota Semarang terletak di pantai utara Pulau Jawa, di lokasi pusat yang strategis dan merupakan penghubung utama bagi jaringan transportasi domestik yaitu transportasi udara, air dan darat. Dari segi transportasi air, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menjadi pintu gerbang internasional ke Jawa Tengah untuk angkutan penumpang dan barang. Kemudian, dari segi transportasi udara Kota Semarang memiliki kekhasan tersendiri berupa konsep bandara terapung pertama di Indonesia. Jaringan transportasi darat, jalur kereta api yang berada pada empat jalur rute ke barat pantura menuju Jakarta, ke timur menuju Surabaya, poros tengah mengelilingi Jawa Tengah dan DIY, serta memiliki jalan nasional tol trans jawa. Oleh karena itu, posisinya yang penting secara regional dan nasional menjadi peluang untuk dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kota secara berkelanjutan.

Kota Semarang juga merupakan bagian dari segitiga pusat pertumbuhan regional JOGLOSEMAR bersama dengan Yogyakarta dan Solo. Posisi strategis dan fungsi Kota Semarang sebagai pusat aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan kemudian berdampak pada perkembangan pembangunan yang ada di Kota Semarang. Hal tersebut menciptakan daya tarik bagi penduduk pendatang untuk beraktivitas di dalamnya.

Posisi dan peran strategis terkait potensi air di Kota Semarang bersumber dari sungai-sungai yang mengalir di Kota Semarang, antara lain Kali Garang, Kali Pengkol, Kali Kreo, Kali Banjir Kanal Timur, Kali Babon, Kali Sringin, Kali Kripik, Kali Dungadem dan lain sebagainya. Kali Garang yang bermata air di Gunung Ungaran, alur sungainya memanjang ke arah Utara hingga mencapai Pegangan tepatnya di Tugu Soeharto, bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali Kripik. Sungai-sungai tersebut dikelola dalam 11 DAS, yaitu DAS Tugu, DAS Babon, DAS Banjir Kanal Barat, DAS Banjir Kanal Timur, DAS Barat,

DAS Bringin, DAS Blorong, DAS Plumbon, DAS Silandak, DAS Tengah dan DAS Timur yang terbagi ke dalam 4 sistem besar drainase, yaitu:

1. Sistem Drainase Mangkang, terdiri atas 2 (dua) sub sistem meliputi: Sub Sistem Sungai Mangkang (Sungai Mangkang Kulon, Mangkang Wetan dan Plumbon); dan Sub Sistem Sungai Bringin (Sungai Bringin, Sungai Randugarut, Sungai Karanganyar dan Sungai Tapak).
2. Sistem Drainase Semarang Barat, terdiri dari 4 (empat) sub sistem: Sub Sistem Sungai Tugurejo (Sungai Jumbleng, Sungai Buntu, Sungai Tambakharjo dan Sungai Tugurejo); Sub Sistem Sungai Silandak; Sub Sistem Sungai Siangker (meliputi saluran Madukoro, Sungai Tawang, Sungai Karangayu, Sungai Ronggolawe dan Sungai Siangker); dan Sub Sistem Bandar Udara Ahmad Yani (Saluran Lingkar Selatan Barat yang meliputi Sungai Seling, Sungai Simangu, Sungai Tawang dan Sungai Banteng).
3. Sistem Drainase Semarang Tengah, terdiri dari 8 (delapan) sub sistem meliputi: Sub Sistem Sungai Banjir Kanal Barat (Sungai Kripik, Sungai Kreo dan Sungai Garang), Sub Sistem Sungai Bulu (Saluran Jl. Hasanudin, Saluran Jl. Brotojoyo, Saluran Panggung Kidul dan Saluran Bulu Lor), Sub Sistem Sungai Semarang, Sub Sistem Sungai Simpang Lima, Sub Sistem Sungai Banger, Sub Sistem Sungai Bandarharjo, Sub Sistem Sungai Asin, Sub Sistem Sungai Baru.
4. Sistem Drainase Semarang Timur, terdiri dari 5 (lima) sub sistem meliputi: Sub Sistem Banjir Kanal Timur (Sungai Candi, Sungai Bajak, dan Sungai Kedungmundu), Sub Sistem Sungai Tenggong, Sub Sistem Sungai Sringin, Sub Sistem Sungai Babon (Sungai Gede, Sungai Meteseh, Sungai Jetak dan Sungai Sedor), Sub Sistem Sungai Pedurungan.

Kota Semarang juga memiliki polder, waduk, dan embung yang terdistribusi di beberapa daerah di Kota Semarang. Waduk Jatibarang memiliki volume paling besar dalam menyediakan air baku dan sekaligus berperan sebagai pengendali banjir di Kota Semarang. Saat ini, peran Waduk Jatibarang semakin meluas, selain sebagai penyedia air baku dan pengendali banjir, waduk ini juga dimanfaatkan sebagai sektor pariwisata di Kota Semarang. Lokasinya yang dekat dengan objek wisata Goa Kreo, menjadi salah satu pendukung pengembangan pariwisata. Selain Waduk Jatibarang, waduk dan embung lainnya juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pariwisata, seperti Waduk Diponegoro dan Embung Bukit Semarang Baru. Selain itu, potensi sumber daya air di Kota Semarang juga ditunjang dengan ketersediaan cadangan air tanah. Cekungan Air Tanah (CAT) di Kota Semarang terdapat pada akuifer dangkal dan dalam, terdapat di wilayah bagian selatan dan cenderung daerah yang tinggi seperti Tembalang, Ngaliyan dan Mijen merupakan kecamatan dengan cekungan air tanah paling luas dan potensial.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kota Semarang memiliki beragam potensi besar untuk pengembangan daerah. Perkembangan infrastruktur dan letaknya yang strategis menjadikan kota ini sebagai pusat ekonomi, pariwisata, pertanian, dan budaya yang potensial. Dengan memanfaatkan kemampuan sumber daya alam serta

sumber daya manusia yang dimiliki, maka pengembangan wilayah Kota Semarang dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Selain itu, Kota Semarang memiliki kekayaan karakteristik kehidupan sosial yang berasal dari perpaduan etnis, budaya, dan agama dari masyarakat Jawa, Tionghoa, Arab, dan Melayu yang menjadi daya tarik khas. Potensi sosial berupa keragaman etnis, budaya dan agama masyarakat Kota Semarang dapat dikemas dalam industri kreatif yang mengedepankan inklusi sosial, yaitu mencakup keterbukaan, toleransi dan interaksi sosial.

Rencana kawasan budidaya bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kota Semarang. Rencana pola ruang ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, partisipatif, dan berwawasan lingkungan sebagai berikut:

- Kawasan hutan produksi dengan luas kurang lebih 2.171 ha berupa kawasan hutan produksi tetap;
- Kawasan perumahan meliputi:
 - Perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi perumahan pusat kota yaitu di BWK I, BWK II, BWK III, BWK V.
 - Perumahan dengan kepadatan sedang meliputi perumahan di BWK IV, BWK VI, BWK VII, BWK X khusus Kecamatan Tugu.
 - Perumahan dengan kepadatan rendah meliputi perumahan di BWK VIII, BWK IX dan BWK X khusus Kecamatan Ngaliyan.;
- Kawasan perdagangan dan jasa meliputi, perdagangan dan jasa skala regional/nasional/internasional, perdagangan dan jasa skala kota, perdagangan dan jasa skala BWK, perdagangan dan jasa skala lingkungan. Pengembangan kawasan perkantoran meliputi kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
- Pengembangan kawasan pendidikan berupa rencana pengembangan kawasan pendidikan tinggi dan pendidikan unggulan di wilayah Kota;
- Rencana kawasan industri: Kecamatan Tugu, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Mijen, Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Genuk;
- Pengembangan kawasan olah raga;
- Rencana kawasan wisata: wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;
- Rencana kawasan transportasi;
- Kawasan pertahanan keamanan;
- Rencana kawasan peruntukan pertanian:
 - Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 2.893 ha meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Tembalang, Gunungpati, Ngaliyan, Mijen, dan Tugu.
 - Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 2.102 ha meliputi Kecamatan Tembalang, Gunungpati, Mijen, dan Ngaliyan;
- Pengembangan fasilitas peternakan;
- Kawasan peruntukan perikanan: perikanan tangkap, perikanan budaya, dan pengolahan Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Tugu;
- Kawasan pelayanan umum meliputi kawasan fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, serta fasilitas keamanan dan keselamatan;

- Rencana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) meliputi RTNH lingkungan bangunan, RTNH skala sub-kawasan dan kawasan, RTNH wilayah kota, dan RTNH fungsi tertentu.

Sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan dapat dilihat melalui interaksi ekonomi wilayah. Sejak tahun 2013, secara sektoral rata-rata distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi Kota Semarang berada pada sektor industri pengolahan, diikuti dengan sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta informasi dan komunikasi.

Upaya pengembangan ekonomi lokal yang dilakukan pemerintah, seperti pengembangan UMKM dan sektor pariwisata, belum mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian Kota Semarang. Hal ini tercermin dari jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Semarang tahun 2024 sebanyak 24.296 orang, padahal proyeksi di tahun 2045 idealnya wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang mencapai 284.608 jiwa. Artinya, dalam 20 tahun ke depan, Kota Semarang perlu menarik wisatawan mancanegara hingga 260.312 jiwa. Selain itu, Kota Semarang yang merupakan kota metropolitan memiliki proporsi UMKM non pertanian yang sudah mencapai 99,7%. Namun, skala UMKM masih didominasi skala mikro sehingga memiliki kapasitas yang rendah dan sangat rentan terhadap guncangan. Kondisi ini menyebabkan UMKM di Kota Semarang sulit untuk berkembang dan bersaing dengan pengusaha besar. Rasio kewirausahaan daerah Kota Semarang juga masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 3,34%, sedangkan di negara maju dapat mencapai 10 – 12% dari total penduduk. Pengembangan ekonomi lokal, khususnya sektor ekonomi kreatif dapat menjadi solusi yang kolaboratif dan menjadi daya dorong bagi perekonomian kota. Jika tidak menjadi perhatian khusus, dikhawatirkan UMKM dan pariwisata di Kota Semarang akan terus tertinggal dan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Kota Semarang terus berinovasi dengan menghadirkan berbagai pilihan wisata baru, seperti wisata edukasi seperti museum interaktif atau taman sains, wisata religi, wisata alam, dan wisata kuliner. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan minat wisatawan yang semakin beragam. Selain itu, upaya promosi gencar dilakukan melalui berbagai platform media, baik *online* maupun *offline*. Kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, agen perjalanan, dan media, juga diintensifkan untuk meningkatkan awareness dan menarik wisatawan. Kota Semarang ingin memastikan bahwa semua orang mengetahui tentang berbagai potensi wisata yang ditawarkannya. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan daya tarik wisata di Kota Semarang diantaranya, mengadakan pelatihan pengemasan atraksi dan paket wisata untuk Masyarakat pelaku wisata, merintis wisata baru yang dikelola Masyarakat dan mendorong investasi, mengadakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata untuk Masyarakat pelaku wisata, meningkatkan pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata sesuai prioritas, meningkatkan jangkauan promosi dengan kombinasi media *offline* dan *online*.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu instrumen penilai kelayakan kebijakan, rencana, atau program (KRP) dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebanyak 196 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) relevan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang sesuai KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029. Dari 196 indikator, sebanyak 138 indikator telah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2022, 38 indikator belum tercapai, 4 indikator belum dilaksanakan, serta 16 indikator belum ada data.

a. Daya Dukung Lahan

Informasi daya dukung lahan dapat dianalisis menggunakan kemampuan lahan. Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, drainase dan kondisi lingkungan hidup lain. Menurut UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, tutupan lahan didefinisikan sebagai garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan. Sedangkan menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 7645 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Penutup Lahan, penutup lahan diartikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut. Tutupan lahan dikelompokkan ke dalam beberapa kelas berdasarkan kemiripan kenampakan biofisik di permukaan bumi, yaitu hutan, permukiman, badan air, pertanian tanah kering, pertanian tanah basah, semak belukar, dan tanah terbuka.

Dalam perhitungan IKL, Kota Semarang menyesuaikan data yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari luas hutan dan non hutan. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2022 tentang perhitungan IKLH. Dalam kurun tahun 2018 hingga 2024, kondisi lingkungan di Kota Semarang terus mengalami perbaikan IKLH. Nilai Indeks Kualitas Lahan di Kota Semarang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Adapun untuk meningkatkan indeks kualitas lahan, perlu meningkatkan tutupan lahan hijau. Terlebih dengan adanya rencana pengurangan ruang terbuka hijau terutama dari kawasan mangrove berpotensi meningkat di masa yang akan datang seiring dengan rencana pengembangan jalan tol/*harbour* tol yang melintasi Kabupaten Kendal sampai dengan pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan melewati sepanjang pesisir Kecamatan Tugu dan Kecamatan Semarang Barat. Terdapat 8 komponen kota hijau yaitu *green planning and design*, *green community*, *green open space*, *green building*, *green energy*, *green transportation*, *green water*, dan *green waste*. Dari delapan komponen tersebut, Kota Semarang masih belum optimal dalam mewujudkan tiga komponen yaitu *green energy*, *green open space*, dan *green transportation*.

Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang secara khusus mengamanatkan

perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasarkan nilai indeks kualitas lahan Kota Semarang pada tahun 2023 menunjukkan nilai 31,63 yang masuk dalam kategori kurang. Nilai tersebut juga menurun dari tahun 2022 yang mencapai 33,28.

Kota Semarang sebagai kota metropolitan didominasi oleh penggunaan lahan berupa perumahan sebesar 36,64% yang tersebar di seluruh wilayah pada tahun 2022. Namun, Kota Semarang masih memiliki kawasan pertanian di wilayah pinggirannya sebesar 20,88% yang tersebar di Kecamatan Tugu, Genuk, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati dan Tembalang. Selain itu, persentase ruang terbuka hijau Kota Semarang juga masih rendah hanya sebesar 10,16% dan paling banyak tersebar di Kecamatan Gunungpati. Sementara itu, wilayah pusat kotanya didominasi oleh perdagangan jasa dan perumahan. Sebagai kota metropolitan, penggunaan lahan campuran di Kota Semarang masih tergolong rendah yaitu kurang dari 1,00%. Padahal, penggunaan lahan campuran (*mixed use development*) merupakan salah satu aspek pendukung kota kompak dalam pembangunan kota berkelanjutan yang berorientasi pada suatu pengembangan kawasan dengan berbagai fungsi seperti hunian, komersial, perkantoran, dan sarana pendukung lainnya yang dikembangkan dan dibangun dalam satu kawasan.

Perkembangan lahan terbangun Kota Semarang selama 20 tahun terakhir menggambarkan pola yang cenderung tidak terencana. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan lahan terbangun yang mulai cenderung ke wilayah pinggiran seperti ditunjukkan pada kondisi ini juga dibuktikan dari jumlah penduduk yang semakin tinggi di wilayah pinggiran, seperti Kecamatan Tembalang. Data juga menunjukkan selama 2016 hingga 2021, terjadi penambahan luas permukiman sebesar 90%. Hal ini berimplikasi pada lahan lainnya menunjukkan penurunan yang signifikan lebih dari 5%, seperti perkebunan, sawah, semak belukar, tambak, badan air dan lahan terbuka. Penggunaan lahan jenis perkebunan merupakan kawasan yang paling banyak mengalami penurunan, yaitu sebesar 42,37% selama 2016 hingga 2021.

b. Daya Dukung Pangan

Daya dukung dan daya tampung pangan menggunakan pendekatan daya dukung lahan setara beras, yang merupakan perbandingan antara ketersediaan lahan setara pangan dan beras dengan kebutuhan lahan setara beras. Kebutuhan lahan yang tinggi untuk aktivitas menyebabkan tingginya alih fungsi lahan khususnya lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Dampaknya, Kota Semarang belum mampu menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara mandiri. Daya dukung dan daya tampung lahan pangan setara beras Kota Semarang pada tahun 2022 berstatus defisit dan terjadi penurunan kemampuan lingkungan dalam penyediaan pangan, sementara ke depannya dengan peningkatan jumlah penduduk yang bermukim dan beraktivitas di kota, maka akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan.

Berdasarkan proyeksi daya dukung pangan Kota Semarang tahun 2029 maka kondisinya defisit sebesar 94.413,78 ton/tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Semarang lebih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhannya. Dengan rincian ketersediaan pangan sebesar 9.991,66 ton/tahun dan kebutuhan pangan di Kota Semarang mencapai 104.405,44 ton/tahun. Berikut adalah skenario daya dukung pangan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Skenario Daya Dukung Pangan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029
1	Ketersediaan Pangan	Ton/Tahun	13.076,46	12.305,26	11.534,06	10.762,86	9.991,66
2	Kebutuhan pangan	Ton/Tahun	100.679,71	101.611,14	102.542,57	103.474,01	104.405,44
3	Selisih	Ton/Tahun	-87.603,25	-89.305,88	-91.008,51	-92.711,15	-94.413,78
4	Rasio BAU	Angka	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10

Sumber: KLHS Kota Semarang, 2024

Status daya dukung pangan Kota Semarang, berdasarkan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Tahun 2021 yang dilakukan melalui analisis sistem grid didapatkan hasil bahwa status daya dukung pangan pada status belum mampu swasembada pangan/defisit. Penyebab belum tercapainya swasembada pangan antara lain:

1. Jumlah penyedia pangan mayoritas berada pada kelas rendah dan sangat rendah;
2. Ketersediaan lahan pangan < Kebutuhan Lahan Pangan;
3. Masih adanya kemiskinan dan ketidakcukupan konsumsi dan kualitas konsumsi pangan;
4. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran penerapan pola hidup sehat.

Tabel 2.2 Potensi Daya Dukung Pangan Kota Semarang Tahun 2029

NO	KECAMATAN	KETERSEDIAAN (TON/TAHUN)	KEBUTUHAN (TON/TAHUN)	SELISIH (TON/TAHUN)	DAYA DUKUNG PANGAN	BELUM TERLAMPAUI	TERLAMPAUI
1	Banyumanik	330,80	8.836,06	-8.505,26	Terlampau	0,85%	99,15%
2	Candisari	0,00	4.657,94	-4.657,94	Terlampau	0,00%	100,00%
3	Gajah Mungkur	0,00	3.471,45	-3.471,45	Terlampau	0,00%	100,00%
4	Gayamsari	0,00	4.337,63	-4.337,63	Terlampau	0,00%	100,00%
5	Genuk	210,42	8.160,82	-7.950,40	Terlampau	0,00%	100,00%
6	Gunungpati	3.696,60	6.206,74	-2.510,14	Terlampau	41,85%	58,15%
7	Mijen	3.572,30	5.541,40	-1.969,10	Terlampau	46,40%	53,60%
8	Ngaliyan	996,40	8.963,55	-7.967,15	Terlampau	17,24%	82,76%
9	Pedurungan	0,00	12.107,25	-12.107,25	Terlampau	0,00%	100,00%
10	Semarang Barat	0,00	9.199,54	-9.199,54	Terlampau	0,00%	100,00%
11	Semarang Selatan	0,00	3.830,62	-3.830,62	Terlampau	0,00%	100,00%
12	Semarang Tengah	0,00	3.401,22	-3.401,22	Terlampau	0,00%	100,00%
13	Semarang Timur	0,00	4.095,50	-4.095,50	Terlampau	0,00%	100,00%
14	Semarang Utara	0,00	7.262,62	-7.262,62	Terlampau	0,00%	100,00%
15	Tembalang	1.185,14	12.250,84	-11.065,70	Terlampau	2,72%	97,28%
16	Tugu	0,00	2.082,28	-2.082,28	Terlampau	0,00%	100,00%
	Grand Total	9.991,66	104.405,44	-994.413,78	Terlampau	0,00%	100,00%

Sumber: KLHS Kota Semarang, 2024

Berdasarkan hasil analisis KLHS tahun 2024, seluruh kecamatan di Kota Semarang memiliki status daya dukung pangan terlampaui seperti ditunjukkan pada tabel diatas.

c. Daya Dukung Air

Daya Dukung Air Permukaan yang ditinjau dari ketersediaan air dan kebutuhan air yang terdapat pada suatu wilayah dengan membandingkan ketersediaan air permukaan berdasarkan debit andalan wilayah sungai yang melalui suatu wilayah dan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan kegiatan ekonomi berbasis lahan. Perhitungan daya dukung air ini mengacu dari hasil dan pedoman dari Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Untuk melihat potensi ketersediaan sumber daya air penggunaan informasi neraca air menjadi penting untuk melihat volume serta distribusi air tersebut pada suatu wilayah. Variabel penutupan lahan merupakan komponen yang paling mempengaruhi tinggi-rendahnya indeks jasa lingkungan hidup penyedia air. Hal tersebut dikarenakan adanya lahan terbangun akan mengurangi kemampuan lahan dalam menyerap air permukaan sehingga berimplikasi pada penurunan indeks jasa lingkungan hidup penyedia air.

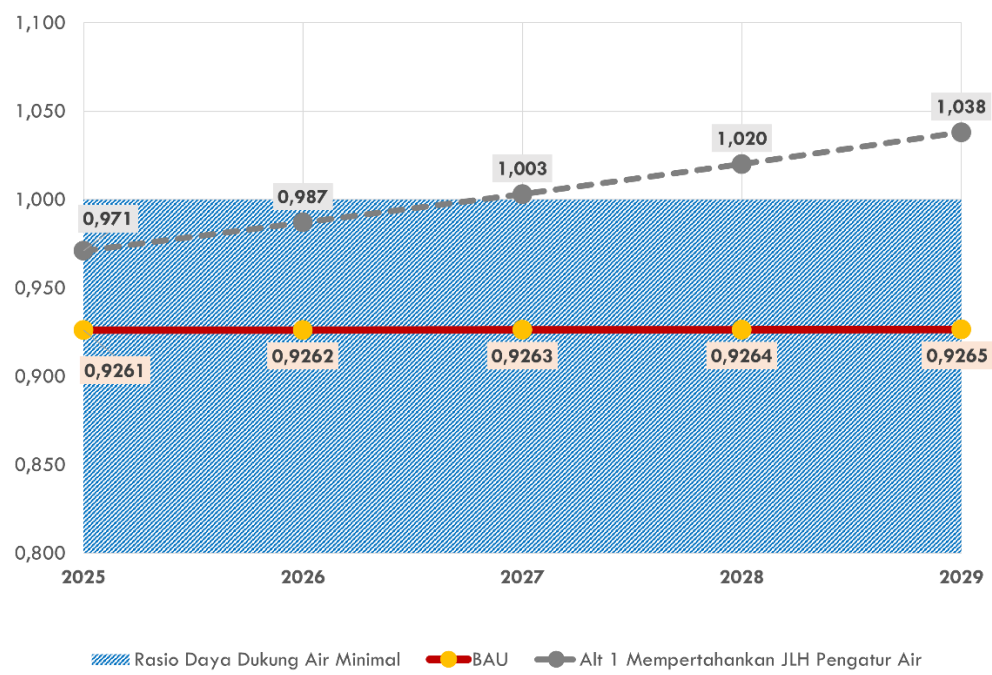
Berdasarkan kondisi eksisting DDDTLH Kota Semarang tahun 2022, jumlah ketersediaan air 223 juta m3, dengan kebutuhan air sebesar 241 juta m3. Defisit air sebesar 17 juta m3. Dari 16 kecamatan di Kota Semarang, 4 kecamatan dengan status DDA surplus/belum terlampaui, sedangkan 12 Kecamatan dengan status DDA defisit/terlampaui. Secara keseluruhan daya dukung air Kota Semarang tetap defisit pada tahun 2029 dengan perkiraan defisit air sebesar 15.846.113,32 m3. Jika dibandingkan dengan daya dukung air pada tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan yang tidak signifikan hanya sebesar 0,0006 dan tetap dalam kondisi defisit. Secara rasio daya dukung air (ketersediaan dibagi dengan kebutuhan) menunjukkan proyeksi daya dukung air Kota Semarang dengan skenario *business as usual* (BAU) sebesar 0,9265. Jika diasumsikan perubahan daya dukung air baik dari ketersediaan air maupun dari kebutuhan air adalah linier selama kurun waktu 2025- 2029 maka dapat dibuat model daya dukung air tahunan selama periode RPJMD Kota Semarang. Secara umum perubahan rasio daya dukung air tidak mengalami perubahan yang signifikan dari 2025 sampai dengan 2029 hanya meningkat 0,0001 per tahun.

Tabel 2.3 Skenario Daya Dukung Air Kota Semarang Tahun 2025-2029

INDIKATOR	2022	2025	2026	2027	2028	2029
Skenario <i>Bussiness as Usual</i> (BAU)						
Ketersediaan air permukaan	223.635.446,51	213.353.079,30	209.925.623,57	206.498.167,83	203.070.712,10	199.643.256,36
Kebutuban air	241.554.139,20	230.383.523,70	226.659.985,19	222.936.446,69	219.212.908,19	215.489.369,69
DDAir BAU	0,9258	0,9261	0,9262	0,9263	0,9264	0,9265
Skenario Mempertahankan Jasa Lingkungan Hidup (JLH)						
Ketersediaan	223.635.446,51	223.635.446,51	223.635.446,51	223.635.446,51	223.635.446,51	223.635.446,51
Kebutuhan air	241.554.139,20	230.383.523,70	226.659.985,19	222.936.446,69	219.212.908,19	215.489.369,69
DDAir Mempertahankan JLH Pengatur Air	0,926	0,971	0,987	1,003	1,020	1,038

Sumber: KLHS Kota Semarang, 2024

Rasio daya dukung air Kota Semarang akan mencapai nilai ≥ 1 atau surplus pada tahun 2029. Dengan kondisi tersebut maka, ketersediaan air permukaan yang ada dapat memenuhi kebutuhan air.



Gambar 2.2 Daya Dukung Air Kota Semarang

d. Daya Tampung Air

Perhitungan kebutuhan air dilakukan berdasarkan kegiatan ekonomi dengan berbasis lahan. Dalam hal ini, lahan yang dihitung kebutuhannya hanya terbatas pada penutupan lahan berupa persawahan, perkebunan, kebun campuran, dan tegalan / ladang / pertanian lahan kering. Perlu diketahui bahwa perbandingan kebutuhan air untuk tipe penutupan tersebut adalah “Persawahan, Perkebunan, Kebun campuran, dan Lahan Kering = 4 : 1,5 : 1,5 : 1”.

Jika dilihat dari distribusi kebutuhan air setiap kecamatan, maka wilayah administrasi Kecamatan Gunungpati dan Mijen memiliki kebutuhan air yang cukup tinggi yaitu masing-masing sekitar 15% dari total kebutuhan air seluruh Kota Semarang. Secara total kebutuhan air Kota Semarang mencapai 241.554.139,20 m3/tahun. Kondisi daya tampung air Kota Semarang pada kondisi eksisting berada pada kondisi defisit. Analisis kualitas dan daya tampung air di Kota Semarang, pada musim kemarau kondisi sungai tercemar lebih banyak daripada musim hujan. Pada musim hujan, dengan debit air yang tinggi, bahan pencemaran lebih rendah daripada pada saat musim kemarau. Rata-rata Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Semarang tahun 2022 adalah 33,76 (kategori kurang) meningkat menjadi 46 pada tahun 2023 (kategori kurang).

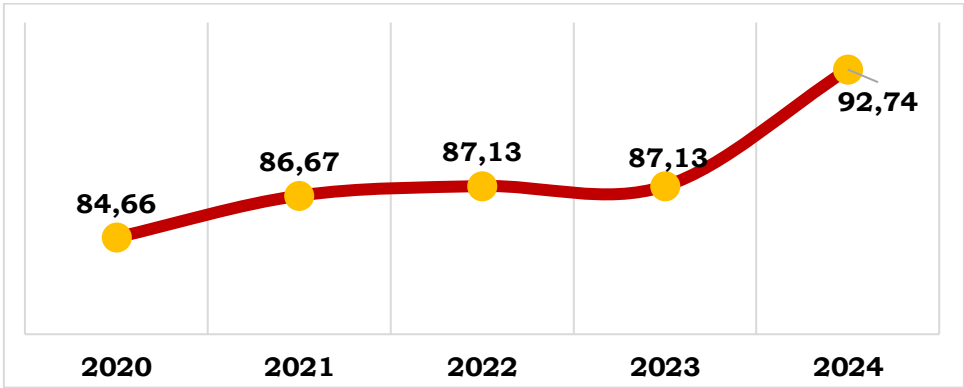
2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Indeks Ketahanan Pangan

Hasil perhitungan indeks ketahanan pangan (IKP) didasarkan atas sembilan sub-indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan yang memberikan gambaran peringkat pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Komposit sub-indikator indeks ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih.
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun.
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).
9. Angka harapan hidup pada saat lahir.

Perkembangan IKP Kota Semarang sejak tahun 2018 terus mengalami peningkatan, meskipun tidak begitu signifikan. Komponen kunci dari indeks ini untuk skala kota melibatkan aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, karena kota tidak menghasilkan pangan secara langsung, melainkan mengandalkan pasokan pangan dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya yang menjadi daerah pendukung kota tersebut. Berikut ini merupakan capaian indeks ketahanan pangan dari tahun ke tahun.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 2.3 Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024 (Angka)

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, tren IKP Kota Semarang mengalami peningkatan. Saat pandemi Covid-19, IKP Kota Semarang mengalami penurunan, namun Kota Semarang mampu pulih dari pandemi dan bahkan mencapai tingkat IKP tertinggi sepanjang periode pada tahun 2024 dengan angka 92,74. Melihat tren ini, Pemerintah Kota Semarang menargetkan IKP untuk terus peningkatan setiap tahun mengingat jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya demi menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mengurangi beban masyarakat akan kebutuhan dasar.

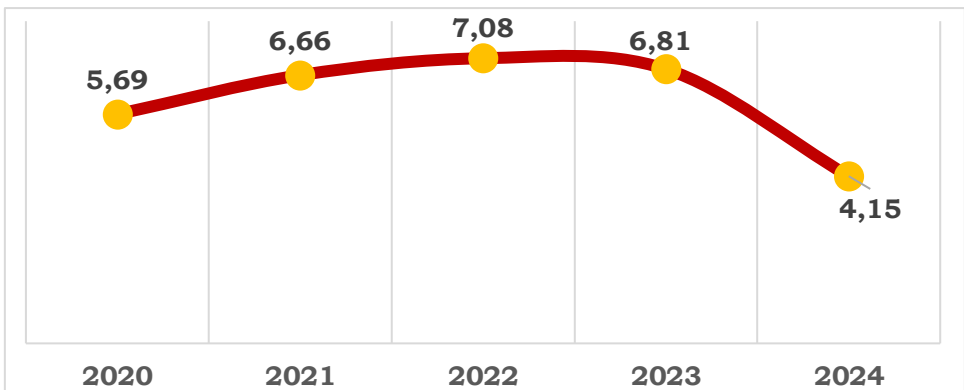
Salah satunya dengan mendorong partisipasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Semarang dalam menciptakan ketahanan pangan melalui *urban farming* dan penanaman komoditas pangan. Dengan adanya PKK dapat mempromosikan *urban farming* ke setiap rumah tangga. Selain itu, *urban farming* dapat menekan angka inflasi komoditas pangan dan memperpendek rantai pasok pangan yang akan memungkinkan konsumen mendapatkan bahan pangan segar serta mengurangi kebutuhan proses pengawetan dan pendinginan.

Beberapa program dan kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan Kota Semarang seperti *urban farming* dengan memanfaatkan lahan di perkotaan untuk berkebun, penanaman komoditas pangan guna mendorong masyarakat untuk menanam komoditas pangan seperti cabai dan bawang, serta Program Pasar Murah PAK RAHMAN untuk menekan inflasi komoditas cabai dan bawang. Kolaborasi dengan PKK, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan perguruan tinggi turut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan. Dengan perguruan tinggi, bentuk kolaborasi yang telah dilakukan adalah dilakukannya berbagai penelitian mengenai bidang ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan tidur sebagai langkah *urban farming*. Beberapa penelitian telah dilakukan seperti varietas benih padi untuk wilayah pesisir dan mina padi. Selain kolaborasi dengan perguruan tinggi dan berbagai instansi di Pemerintah Kota, kolaborasi lain juga dilaksanakan dengan instansi vertikal seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Adapun hasil kolaborasi ini di antaranya adalah strategi pengembangan mijen sebagai kawasan budidaya ikan air tawar, riset strategi inovatif pengembangan kampung sawah mijen yang terintegrasi dan berkelanjutan, riset *smart farming* biosalin untuk lahan sawah dengan salinitas tinggi, serta kajian peningkatan produksi bawang merah mendukung pertanian berkelanjutan berbasis *smart farming* di Kota Semarang.

Selain itu, dengan keterbatasan lahan yang ada di Kota Semarang, maka Pemerintah Kota juga mendorong lahan-lahan yang tidak terpakai seperti lahan bengkok milik pemerintah dapat digunakan sebagai *urban farming*. Upaya penanaman di lahan tidur ini selain mendorong ketahanan pangan juga merupakan upaya konservasi tanah. Dalam jangka panjang, upaya kolaborasi penelitian dan pemanfaatan lahan tidur untuk *urban farming* ini diharapkan dapat menciptakan model pertanian perkotaan yang berkelanjutan, yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Selain itu, optimalisasi sistem logistik daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi distribusi pangan juga menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk dapat mencakup seluruh penduduk Kota Semarang. Pada sisi pemanfaatan pangan, aksi terhadap penurunan *Food Loss and Food Waste* (FLW) juga didorong untuk menciptakan iklim transformasi sistem pangan baik dari hulu hingga hilir.

b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*) atau PoU merupakan indikator yang menggambarkan persentase populasi yang mengalami keterbatasan dalam memperoleh makanan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Tingkat ketidacukupan konsumsi pangan di Kota Semarang berada di atas rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah, yang tercatat sebesar 12,34%. Bahkan, angka ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada di angka 10,21%. Adapun capaian prevalensi ketidacukupan pangan di Kota Semarang dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut.



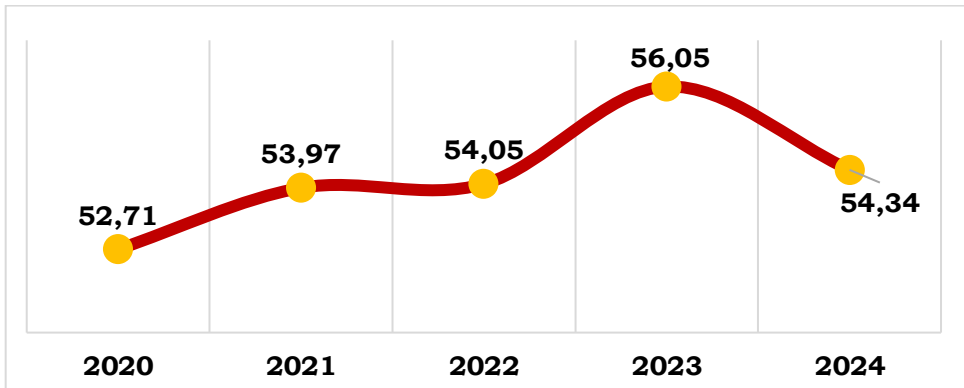
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2024

Gambar 2.4 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Persen)

Pada Tahun 2024, angka PoU menunjukkan bahwa sekitar 4,15% dari populasi Kota Semarang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Upaya untuk menurunkan angka prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti peningkatan produksi pangan lokal, penguatan program bantuan sosial bagi kelompok rentan, pemberdayaan ekonomi masyarakat agar memiliki daya beli yang lebih baik, serta pengembangan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan distribusi pangan. Selain itu, edukasi mengenai pola konsumsi yang sehat dan berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat secara jangka panjang.

c. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas layanan dasar bagi masyarakat kota. Kota Semarang telah mencatat kemajuan dalam penyediaan akses air siap minum perpipaan dalam beberapa tahun terakhir. Adapun capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut.



Sumber: Disperkim Kota Semarang, 2025

Gambar 2.5 Akses Rumah Tangga Perkotaan dengan Air Siap Minum Perpipaan Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Persen)

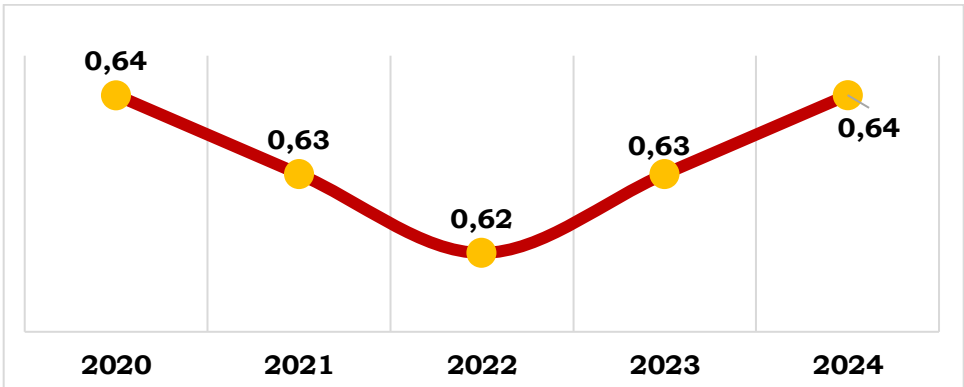
Pada tahun 2020, cakupan layanan mencapai 52,71%, kemudian mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 56,06% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 54,34%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan cakupan layanan. Penurunan akses ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan ekspansi jaringan perpipaan, permasalahan teknis

dalam distribusi air, keterbatasan sumber daya air baku, hingga faktor eksternal seperti perubahan iklim yang memengaruhi ketersediaan air. Selain itu, perlu diperhatikan juga aspek manajemen dan pemeliharaan infrastruktur agar pelayanan tetap optimal.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Nilai Pemenuhan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota

Peningkatan nilai pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota dari tahun ke tahun mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan. Adapun capaian nilai pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan mengikuti grafik sebagai berikut.



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Gambar 2.6 Nilai Pemenuhan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan indikator ini adalah penguatan kebijakan lingkungan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Pemerintah Kota Semarang terus mendorong penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam setiap kebijakan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya alam. Dengan pendekatan ini, pertumbuhan kota dapat dikendalikan agar tidak melebihi kapasitas ekosistem yang ada, sehingga dapat meminimalkan tekanan terhadap lingkungan.

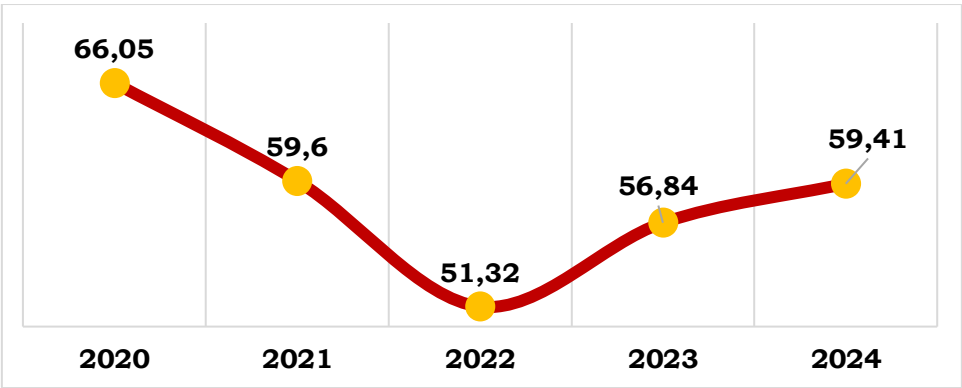
Upaya mitigasi perubahan iklim juga menjadi salah satu aspek yang mendukung peningkatan daya dukung lingkungan. Peningkatan ruang terbuka hijau, rehabilitasi kawasan pesisir, serta penanaman vegetasi di daerah rawan banjir menjadi strategi utama dalam menekan dampak pemanasan global yang berpengaruh terhadap cuaca ekstrem dan kenaikan muka air laut. Selain itu, pengembangan kawasan hijau perkotaan dan program penghijauan berbasis masyarakat turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan serapan karbon, serta menurunkan suhu perkotaan yang semakin meningkat.

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan ukuran atau nilai yang memberikan gambaran kondisi lingkungan hidup pada lingkup spasial dan periode tertentu. Terjadi kecenderungan peningkatan IKLH Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2020-2024 sebesar 1,84 dan pada tahun 2024

IKLH Provinsi Jawa Tengah mencapai 69,46 (angka sementara dari KLHK) dengan rincian IKA sebesar 52,03; IKU sebesar 87,73; IKL sebesar 48,37 dan IKAL sebesar 78,67.

Berikut ini disajikan angka IKLH Kota Semarang dari Tahun 2020-2024 berdasarkan hasil konversi dari Kementerian KLHK.



Sumber: DLH Kota Semarang, 2025

Gambar 2.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

IKLH Kota Semarang pada tahun 2024 yaitu sebesar 59,41 atau tergolong dalam kategori sedang. Berdasarkan indeks penyusunnya, diketahui bahwa IKA dan IKL merupakan aspek yang tergolong rendah atau kurang. Kualitas air sungai di Kota Semarang dihitung pada saat musim kemarau, dari 56 titik pemantauan kualitas air terdapat 9 titik dalam kondisi cemar ringan, 22 titik dalam kondisi cemar sedang, dan 25 titik dalam kondisi cemar berat. Dengan semakin meningkatnya intensitas kegiatan di Kota Semarang, dikhawatirkan akan semakin banyak bahan pencemar dan limbah yang masuk ke saluran drainase dan berakhir di sungai. Salah satu penyebab utama menurunnya kualitas air adalah pencemaran dari limbah domestik. Diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan pengolahan limbah, pengendalian pencemaran industri, konservasi daerah resapan air, serta edukasi masyarakat dalam menjaga kebersihan sumber air. Dengan manajemen air yang lebih baik, kualitas air dapat terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Pertumbuhan kota yang pesat sering kali mengorbankan lahan pertanian dan ruang terbuka hijau untuk dijadikan kawasan permukiman, industri, serta infrastruktur. Akibatnya, tanah yang sebelumnya subur dan mampu menyerap air hujan dengan baik berubah menjadi kawasan kedap air, sehingga meningkatkan risiko banjir dan menurunkan daya dukung lingkungan.

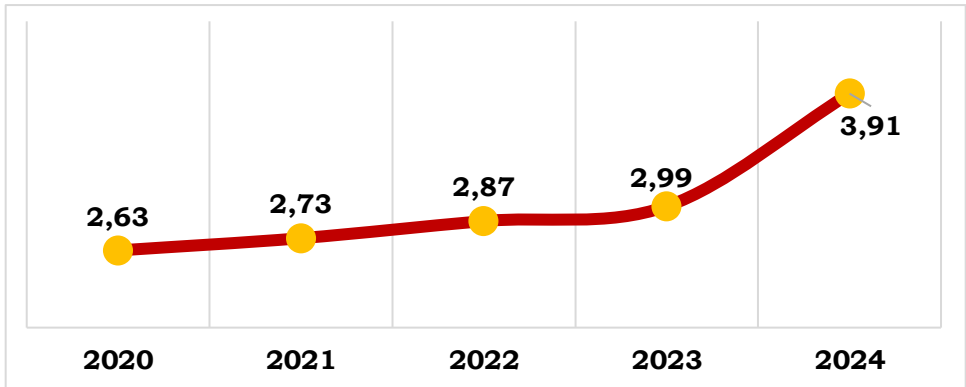
Selain itu, pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah domestik, serta penggunaan bahan kimia dalam pertanian juga menjadi penyebab utama menurunnya kualitas lahan. Pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah dengan zat beracun seperti logam berat, pestisida, dan bahan kimia lainnya. Tanah yang tercemar akan kehilangan kesuburannya, sulit digunakan untuk pertanian, dan bahkan dapat membahayakan kesehatan manusia jika tercemar dalam jangka panjang. Erosi dan degradasi tanah akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan juga berkontribusi pada rendahnya kualitas lahan, sehingga dapat

mengurangi vegetasi alami yang menyebabkan tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi oleh air dan angin.

Sementara itu, IKU di Kota Semarang tergolong baik walaupun mengalami penurunan di tahun 2020. Indeks kualitas udara di Kota Semarang dihitung berdasarkan kualitas udara ambians di wilayah permukiman, kawasan industri, dan padat lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyumbang tertinggi unsur pencemaran udara di Kota Semarang berada pada kawasan transportasi sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau pada sepanjang jalur jalan perlu diperhatikan untuk menurunkan dampak pencemaran udara pada kawasan transportasi. Dalam kurun waktu tahun 2016-2023, nilai IKL cenderung mengalami penurunan setiap tahun, sementara nilai IKU berfluktuasi namun pada tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan ke arah positif. Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa komponen yang diperkirakan belum mampu mengangkat nilai IKLH adalah komponen air dan lahan. Oleh sebab itu perlu adanya upaya-upaya peningkatan nilai kualitas air dan lahan untuk meningkatkan nilai kualitas lingkungan hidup di Kota Semarang.

c. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2023-2042 diketahui bahwa pada saat ini penggunaan saluran drainase difungsikan bukan hanya sebagai penyalur air hujan atau air banjir, tetapi juga sebagai penampung atau penyalur air limbah domestik (rumah tangga). Pengolahan limbah domestik secara umum dibagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu *on-site system* dan *off-site system*. Dalam penanganan air limbah domestik khususnya di Kota Semarang, masyarakat telah melakukan berbagai upaya, di antaranya pada skala permukiman setiap rumah tangga di Kota Semarang rata-rata sudah mempunyai sistem pengolahan air limbah domestik setempat dengan menggunakan tangki septik. Adapun yang diolah dalam tangki septik adalah limbah dari toilet, sedangkan limbah dari kegiatan cuci dan mandi di buang ke saluran drainase lingkungan. Selanjutnya upaya lain yang sudah dilakukan adalah kerja bakti untuk membersihkan saluran drainase lingkungan juga dilakukan secara mandiri, pengelolaan IPAL skala permukiman, tersedianya 11 perusahaan swasta penyedot lumpur tinja, perusahaan yang sering digunakan oleh masyarakat Kota Semarang seperti Doremon dan Rodamas. Persentase capaian jumlah rumah tangga di Kota Semarang yang menggunakan tangki septik individu aman (yang pernah disedot dan dibuang di IPLT) sebesar 2,13 % (9.349 KK). Ditambah, Persentase capaian jumlah rumah tangga terkoneksi ke tangki septik komunal atau individu di Kota Semarang sudah mencapai 94,38% atau mencapai 414.976 KK.



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2025

Gambar 2.8 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Persen)

Gambaran Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Semarang sebagai berikut:

1. Keberadaan Kawasan Kumuh di Kota Semarang disebabkan oleh beberapa faktor seperti permukiman yang semakin padat serta kemunculan fenomena *urban sprawl* atau perluasan wilayah perkotaan yang tidak terkendali. Lokasi permukiman kumuh di Kota Semarang sesuai dengan SK Wali kota Semarang No. 050/275 Tahun 2021 tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Semarang meliputi 45 kelurahan di 13 kecamatan, dengan luas total sebesar 431,54 Ha.
2. Kesehatan Masyarakat Kesehatan masyarakat cenderung menjadi faktor pendorong utama dalam pengelolaan Air Limbah Domestik. Infrastruktur sarana dan prasarana pengelolaan Air Limbah Domestik yang kurang layak menciptakan bahaya kesehatan masyarakat dan menimbulkan penyakit-penyakit infeksi air seperti disentri dan kolera. Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021, Diare dan gastroenteritis yang diduga berasal dari infeksi termasuk ke dalam Sepuluh Besar Penyakit Puskesmas Tahun 2021 dengan jumlah kasus sebanyak 73.990 kasus.
3. Perlindungan Lingkungan Kondisi lingkungan yang perlu perlindungan atau sudah tampak terdegradasi cenderung mendorong pengelolaan air limbah domestik ke arah yang lebih baik. Pemulihan kembali lingkungan melalui penanganan limbah rumah 116 tangga sangat diperlukan guna menjaga kelestarian lingkungan dalam jangka Panjang.
4. Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Persentase capaian jumlah rumah tangga di Kota Semarang yang menggunakan tangki septik individu aman (yang pernah disedot dan dibuang di IPLT) Tahun 2024 hanya sebesar 2,13%. Selain itu total masyarakat yang terlayani adalah 8.819 KK atau sekitar 2,19% dari jumlah penduduk Kota Semarang. Masih rendahnya persentase pelayanan air limbah tersebut yang mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur sanitasi di Kota Semarang.

d. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Jumlah timbulan sampah pada tahun 2024 sebanyak 1.189,71 ton/hari atau 434.243,97 ton/tahun. Dengan jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2024 mencapai 1.702.379 jiwa, maka timbulan sampah per kapita

sebesar 0,70 kg/orang. Jumlah timbulan sampah pada tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Timbulan Sampah Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan sampah harian	Ton	1.276,74	1.180,14	1.181,06	1.182,29	1.189,71
2.	Timbulan sampah tahunan	Ton	466.010,79	430.749,75	431.085,22	431.534,65	434.243,97
3	Jumlah Penduduk	orang	1.685.909	1.687.222	1.688.981	1.696.366	1.702.379
4	Timbulan sampah per kapita	(kg/orang/hari)	0,76	0,70	0,70	0,70	0,70
5	Jumlah Pendaur Ulang Sampah	ton/tahun	18.364,44	25.459,75	60.774,61	108.332,04	117.631,87
6	Pengolahan	ton/tahun	3.277,70	343,10	297,48	317,55	317,55
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	4,64	5,99	14,17	25,18	27,16

Sumber: KLHS Kota Semarang, 2024

Berdasarkan data DLH Kota Semarang, serapan sampah dari unit-unit bank sampah dan program inisiasi pengelolaan sampah lainnya baru sebesar 0,12% dari volume sampah Kota Semarang. Pada tahun 2024, sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah mencapai 27,16 % dengan komposisi yaitu sebesar 27,08% sampah didaur ulang, dan 0,08% dilakukan pengolahan pada fasilitas pengolahan sampah. Kota Semarang memiliki 1 buah fasilitas pembuangan akhir sampah (TPA) yang menjadi lokasi pembuangan sampah akhir yaitu TPA Jatibarang yang berlokasi di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen. TPA Jatibarang memiliki luas area 46,18 Ha, telah beroperasi sejak tahun 1990 hingga sekarang, dan memiliki daya tampung sebesar 4,15 juta m3 sampah. TPA Jatibarang memiliki luas area keseluruhan 46,18 ha yang terdiri dari luas landfill (zona aktif) 23,27 ha, luas landfill (zona tidak aktif) 3,00 ha, luas IPAL / kolam lindi 4,60 ha, luas tempat pengolahan sampah 4,00 ha, luas kantor 0,02 ha, dan luas lainnya 11,13 ha. Total sampah yang diproses di TPA Jatibarang pada Tahun 2022 sebesar 315.725 ton/tahun sehingga tingkat pelayanan sampah di TPA Jatibarang sebesar 73,24% dari volume timbulan sampah yang ada di Kota Semarang (Jakstrada, 2023).

e. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Menanggapi kebijakan nasional dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan beberapa upaya baik dalam pengurangan maupun penanganan sampah. Dalam hal pengurangan sampah, telah diterbitkan Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Pelaku usaha yang meliputi hotel, restoran dan sejenisnya serta toko modern dilarang menyediakan kantong plastik, pipet minum plastik, atau *styrofoam*. Kota Semarang juga mendorong pembentukan dan operasional Bank Sampah dan TPS 3R untuk mengurangi sampah, sehingga pada Tahun 2024 ini telah terbentuk 664 bank sampah dan 19 TPS 3R yang tersebar di seluruh wilayah Kota Semarang. Di sisi lain, saat ini sudah ada lima TPST yang sudah didirikan oleh perguruan tinggi dan kawasan permukiman seperti BSB dan Gemah.

Mengingat pengurangan dan penanganan sampah sangat terkait erat dan saling mempengaruhi, maka dipandang penting untuk menyusun kajian pengelolaan sampah di tingkat hulu. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui status pengurangan sampah saat ini, skenario dan proyeksi pengurangan sampah yang optimal dengan tanpa mengurangi kelayakan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Berbasis kajian ini diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang komprehensif dan strategis tentang pengurangan dan penanganan sampah yang harmonis. Timbulan sampah di Kota Semarang saat ini diperkirakan mencapai 3,69 liter per orang per hari, setara dengan sekitar 0,57 kg/orang/hari, termasuk sampah sejenis rumah tangga dari sumber-sumber non-domestik. Angka-angka ini tidak bereda jauh dari standar timbulan sampah per kapita untuk kota dengan penduduk di atas 1 juta yakni sebesar 0,6 Kg/orang/hari. Dengan jumlah penduduk mendekati 2 juta jiwa, angka timbulan ini kemungkinan di bawah angka sebenarnya.

Data perkiraan timbulan sampah Kota Semarang yang digunakan DLH Kota Semarang pada tahun 2020 mencapai 1.270 ton sampah per hari. Angka ini menggunakan rerata timbulan per kapita sebesar 0,7 Kg/orang/hari. Pemerintah Kota Semarang menyadari bahwa pembagian tanggung jawab pengelolaan sampah membutuhkan bantuan pemerintah. Hal ini setidaknya tercermin dalam bentuk dukungan dan fasilitasi untuk penyediaan TPST dan TPS 3R di kawasan, serta pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. Demikian pula, pemerintah daerah dapat membentuk BLUD persampahan setingkat unit kerja pada OPD untuk mengelola sampah.

Selain itu, perlu adanya kolaborasi yang dilakukan dengan PKK dan organisasi lainnya dalam upaya pengelolaan sampah, terutama pada sisi hulu, agar beban di sisi hilir dapat diminimalkan. Dengan keterlibatan masyarakat, khususnya melalui edukasi dan gerakan pengurangan sampah dari rumah tangga, diharapkan dapat terbentuk budaya memilah dan mengolah sampah sejak dari sumbernya. Kolaborasi ini juga dapat memperkuat program bank sampah, pengomposan mandiri, serta kampanye pengurangan plastik yang berkelanjutan, sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih efektif dan berdampak positif bagi lingkungan dan keberlanjutan wilayah Kota Semarang yang lebih lestari dan hebat.

2.1.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perubahan iklim global. Dampak dari perubahan iklim dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat, seperti meningkatnya bencana hidrometeorologi, perubahan pola musim, serta kenaikan muka air laut. Untuk menangani dampak ini, diperlukan aksi mitigasi dan adaptasi guna meningkatkan ketahanan atau resiliensi masyarakat terhadap perubahan iklim. Pada tahun 2023, emisi GRK di Kota Semarang tercatat sebesar 6.371,43 Gg CO₂eq, dengan penyumbang terbesar yaitu sektor pengadaan dan penggunaan energi mencapai 61,66% atau setara dengan 3.928,81 Gg CO₂eq, sektor limbah sebesar 35,61% setara dengan 2.269,13 Gg CO₂eq. Sementara itu untuk sektor IPPU dan AFOLU

kontribusinya relatif kecil yaitu sebesar 2,53% untuk sektor IPPU dan 0,20% untuk sektor AFOLU.

Dalam konteks ketahanan terhadap bencana, nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Semarang pada tahun 2024 sebesar 94,31, yang masuk dalam kategori sedang. Kota Semarang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana, seperti penurunan tanah (8-9 cm/tahun), banjir, rob, gerakan tanah, longsor, dan kekeringan. Faktor topografi Kota Semarang yang terdiri dari wilayah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi semakin meningkatkan risiko bencana. Kerawanan terhadap penurunan muka tanah terutama terjadi di wilayah utara Kota Semarang, meliputi Kecamatan Gayamsari, Genuk, Semarang Timur, dan Semarang Utara. Penurunan muka tanah ini berkontribusi terhadap peningkatan risiko banjir dan rob, serta dapat diperparah oleh beberapa faktor seperti beban bangunan, eksploitasi air tanah secara berlebihan, aktivitas tektonik, konsolidasi alami tanah alluvium, serta pembangunan infrastruktur berskala besar. Berdasarkan aspek tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim, terdapat 17 kelurahan yang tergolong tidak rentan, 1 kelurahan agak rentan, dan 159 kelurahan dalam kategori sedang.

a. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif

Besaran emisi Gas Rumah Kaca Kota Semarang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2023 mengalami tren naik sebesar 13,97% atau 781,21 Gg CO₂eq. Tren kenaikan tersebut dipengaruhi oleh sektor pengelolaan limbah dengan kenaikan sebesar 43,18% atau setara dengan 684,32 Gg CO₂eq. Selain itu peningkatan tersebut juga disebabkan oleh sektor pengadaan dan penggunaan energi, terjadi peningkatan pada konsumsi gas alam untuk industri energi sebesar 21,86% atau setara dengan 328,61 Gg CO₂eq. Sedangkan untuk sektor AFOLU dan Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) mengalami tren turun sebesar 178,55% atau setara dengan 28,64 Gg CO₂eq untuk sektor AFOLU dan 8,66 Gg CO₂eq (5,11%) untuk sektor IPPU.

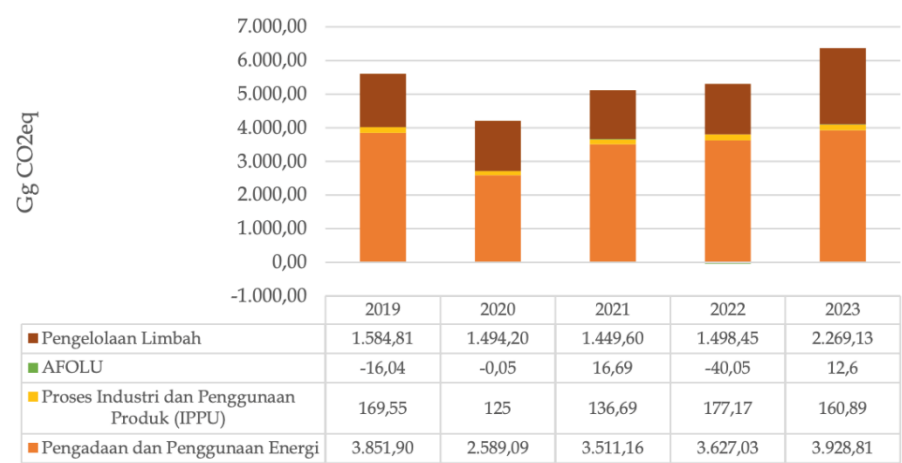
Tabel 2.5 Total Emisi GRK Berdasarkan Sektor

NO	SEKTOR	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Pengadaan dan Penggunaan Energi	Gg CO ₂ eq	3.851,90	2.589,09	3.511,16	3.627,03	3.928,81	3.928,81
2	Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	Gg CO ₂ eq	169,55	125,00	136,69	177,17	160,89	160,89
3	AFOLU	Gg CO ₂ eq	-16,04	-0,05	16,69	-40,05	12,60	12,60
4	Pengelolaan limbah	Gg CO ₂ eq	1.584,81	1.494,20	1.449,60	1.498,45	2.269,13	2.269,13
	Total	Gg CO ₂ eq	5.590,22	4.208,24	5.114,14	5.262,60	6.371,43	6.371,43

Sumber: Hasil Perhitungan Sign Smart, 2024

Dalam kurun waktu 2019-2023, emisi tertinggi dihasilkan pada tahun 2023 sebesar 6.371,43 Gg CO₂eq, sedangkan di tahun 2020 terjadi penurunan karena adanya pandemi COVID-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat maka terjadi penurunan emisi menjadi 4.208,24 Gg CO₂eq di tahun 2020. Selain adanya pembatasan kegiatan masyarakat penurunan tersebut terjadi juga permasalahan kebocoran sumur gas pada PLTGU

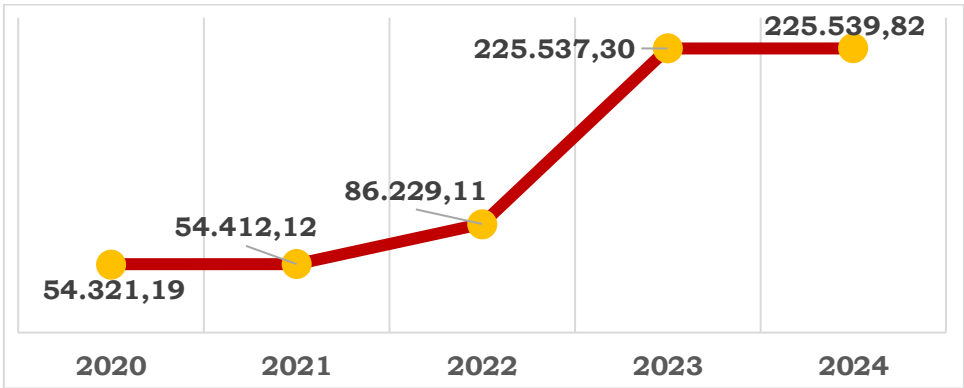
Semarang sehingga suplai produksi listrik menjadi turun. Kemudian pada tahun 2021 terjadi kebijakan perubahan penggunaan BBM dengan tidak menggunakan bahan bakar premium dan beralih ke pertalite dan pertamax. Berikut ditampilkan total emisi berdasarkan sektor di Kota Semarang.



Gambar 2.9 Grafik Tren Emisi GRK Kota Semarang Tahun 2019-2023 (GgCO2eq)

Emisi Gas Rumah Kaca Kota Semarang tahun 2023 mencapai 6.371,43 Gg CO2eq dengan proporsi sumber emisi terbesar dari sektor pengadaan dan penggunaan energi mencapai 61,66% atau setara dengan 3.928,81 Gg CO2eq, sektor limbah sebesar 35,61% setara dengan 2.269,13 Gg CO2eq. Sementara itu untuk sektor IPPU dan AFOLU kontribusinya relatif kecil yaitu sebesar 2,53% untuk sektor IPPU dan 0,20% untuk sektor AFOLU. Kategori kunci Emisi Gas Rumah Kaca yaitu kegiatan yang berpotensi menyumbang emisi paling besar di Kota Semarang. Jika diurutkan berdasarkan penyumbang emisi terbesar meliputi:

- a. Industri energi 34,00%
- b. Limbah cair industri 31,96%
- c. Transportasi 13,44%
- d. Pembuangan sampah padat 5,28%
- e. Permukiman 5,09%
- f. Limbah cair domestik 3,17%
- g. Pelumas 2,99%
- h. Industri manufaktur 1,48%



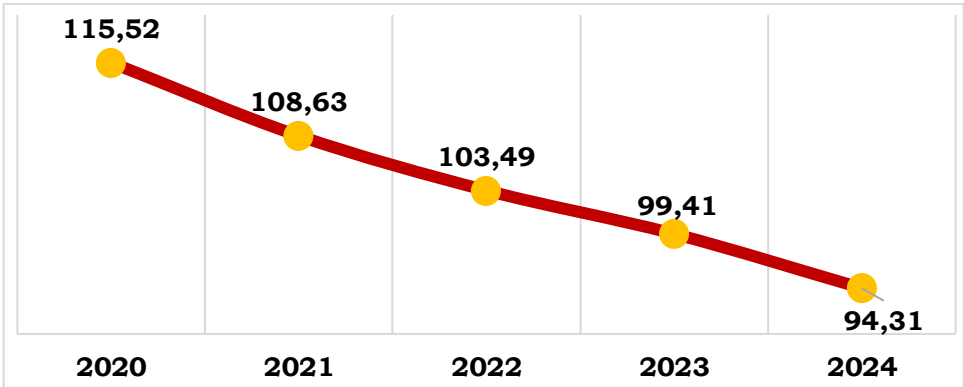
Sumber: Aksara Bappenas, 2024

Gambar 2.10 Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Ton CO2eq)

Secara akumulasi berdasarkan AKSARA BAPPENAS, total capaian kontribusi penurunan emisi GRK di Kota Semarang sejak tahun 2010 hingga tahun 2024 yang disetujui mencapai 225.539,82 ton CO₂eq. Angka ini mencerminkan kinerja penurunan emisi GRK yang dilaporkan oleh pemerintah serta pihak non-pemerintah di Kota Semarang melalui pelaksanaan beberapa kegiatan mitigasi di 8 (delapan) sektor, yaitu air limbah, blue carbon, energi, industri (IPPU), kehutanan dan lahan gambut, persampahan, pertanian, dan transportasi.

b. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana Kota Semarang menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan peningkatan ketangguhan Kota Semarang dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai jenis bencana, baik melalui upaya mitigasi struktural maupun non-struktural. Penurunan indeks risiko bencana ini juga mengindikasikan bahwa kapasitas daerah dalam mengelola kebencanaan semakin membaik, mencakup aspek kesiapsiagaan, respons, hingga rehabilitasi pascabencana. Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang telah diimplementasikan secara konsisten oleh pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi sosial. Upaya mitigasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak langsung dari bencana, tetapi juga untuk membangun sistem ketahanan yang berkelanjutan agar risiko bencana dapat diminimalisir di masa mendatang. Adapun capaian indeks risiko bencana Kota Semarang dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:



Sumber: BPBD Kota Semarang, 2025

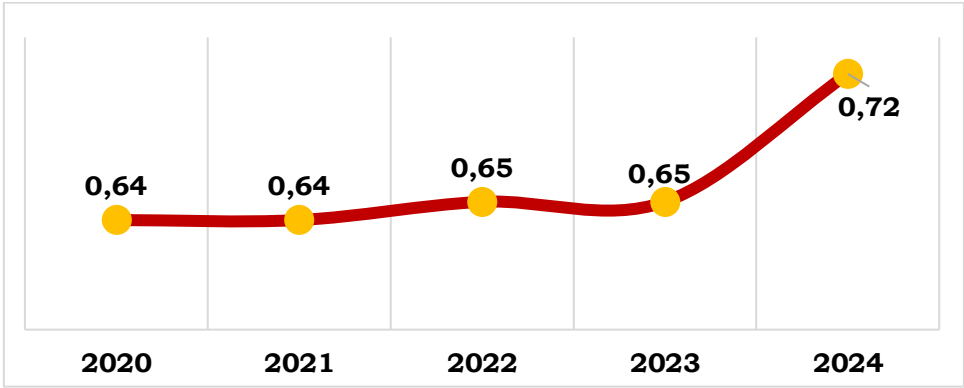
Gambar 2.11 Indeks Risiko Bencana Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Merujuk pada Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Semarang tahun 2023-2027 Kota Semarang sangat berpotensi memiliki beberapa bahaya bencana yang meliputi sembilan potensi bencana yaitu bencana banjir, banjir bandang, banjir rob, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta tanah longsor. Kota Semarang menghadapi berbagai tantangan kebencanaan yang signifikan, terutama terkait dengan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan kebakaran. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat 503 kejadian bencana yang tercatat, meliputi tanah longsor (206 kejadian), pohon tumbang (82 kejadian), Rumah Roboh (70 kejadian), kebakaran (69 kejadian), bencana banjir (45 kejadian), puting beliung (26 kejadian), rob (3 kejadian),

dan rumah amblas (1 kejadian). Bencana tanah longsor dan banjir menjadi masalah utama yang patut mendapat perhatian di Kota Semarang, karena memiliki intensitas kejadian yang cukup sering terjadi di Kota Semarang. Faktor utama penyebabnya adalah curah hujan tinggi yang menyebabkan pergerakan tanah, serta kondisi geografis daerah yang memicu kejadian banjir dan tanah longsor sering terjadi di Kota Semarang khususnya di wilayah Kecamatan Candisari, Gajahmungkur, Tembalang, Banyumanik, Semarang Utara, dan Semarang Timur.

c. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks ketahanan daerah (IKD) merupakan instrumen lain untuk mengukur kapasitas daerah dalam menangani bencana yang dihitung melalui *City Resilience Index (CRI)* dan *Urban Community Resilience Assessment (UCRA)*. Fokus prioritas dalam penilaian IKD terdiri dari penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko, perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, pendidikan dan pelatihan kebencanaan, serta logistik kebencanaan. Adapun capaian IKD Kota Semarang adalah sebagai berikut:



Sumber: BPBD Kota Semarang, 2025

Gambar 2.12 Indeks Ketahanan Daerah
Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Berdasarkan data, dapat dilihat bahwa ketahanan Kota Semarang di tahun 2024 dalam menanggulangi bencana berada pada kategori yang cukup baik, terlebih terdapat peningkatan nilai IKD, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kapasitas daerah dalam mengelola kebencanaan juga semakin baik. Peningkatan nilai IKD yang berbanding terbalik dengan penurunan Indeks Risiko Bencana menunjukkan bahwa Kota Semarang semakin tangguh dalam menghadapi bencana. Kondisi ini mencerminkan efektivitas berbagai strategi mitigasi yang telah diterapkan, baik melalui pendekatan struktural maupun non-struktural. Upaya mitigasi struktural terlihat dari pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana yang semakin masif, seperti penguatan sistem drainase, pembangunan tanggul dan polder di daerah pesisir. Modernisasi sistem peringatan dini dan pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari langkah strategis dalam mengurangi dampak bencana. Selain itu, pendekatan non-struktural juga semakin diperkuat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, simulasi evakuasi, serta keterlibatan komunitas lokal dalam perencanaan mitigasi telah membangun kesadaran kolektif untuk menghadapi risiko yang ada.

2.1.1.7. Demografi

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan demografi Kota Semarang selama 20 tahun terakhir cenderung fluktuatif dan meningkat. Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2024 yang tercatat pada BPS mencapai 1.702.379 jiwa. Secara rinci, jumlah penduduk dengan data pilah laki-laki dan perempuan terkait dengan *sex ratio* per wilayah serta kepadatan penduduk terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Kepadatan dan Jumlah Penduduk Kota Semarang Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin.

NO	KECAMATAN	PENDUDUK			%	SEX RATIO (%)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Km ²)
		LAKI-LAKI (Jiwa)	PEREMPUAN (Jiwa)	JUMLAH (Jiwa)			
1	Banyumanik	71.721	73.649	145.370	8,54	97,38	4.888,03
2	Candisari	37.933	38.996	76.929	4,52	97,27	12.020,16
3	Gajahmungkur	28.490	29.518	58.008	3,41	96,52	6.210,71
4	Gayamsari	35.616	36.191	71.807	4,22	98,41	11.544,53
5	Genuk	64.650	64.269	128.919	7,57	100,59	4.962,24
6	Gunungpati	51.360	51.523	102.883	6,04	99,68	1.765,63
7	Mijen	41.664	41.748	83.412	4,90	99,8	1.475,80
8	Ngaliyan	71.796	72.546	144.342	8,48	98,97	3.357,57
9	Pedurungan	98.724	100.700	199.424	11,71	98,04	9.446,90
10	Semarang Barat	74.940	77.394	152.334	8,95	99,68	7.026,48
11	Semarang Selatan	32.476	33.833	66.309	3,90	95,99	11.144,37
12	Semarang Tengah	27.467	29.651	57.118	3,36	92,63	11.047,97
13	Semarang Timur	33.558	35.343	68.901	4,05	94,95	12.712,36
14	Semarang Utara	58.435	59.865	118.300	6,95	97,61	10.386,30
15	Tembalang	96.945	97.486	194.431	11,42	99,45	4.926,05
16	Tugu	16.962	16.930	33.892	1,99	100,19	1.204,83
TAHUN 2024		842.737	859.642	1.702.379	100	98,03	4.555
TAHUN 2023		839.836	856.530	1.696.366	100	98,05	4.539
TAHUN 2022		835.754	853.227	1.688.981	100	97,69	4.520
TAHUN 2021		835.404	851.818	1.687.222	100	98,07	4.515
TAHUN 2020		835.138	850.771	1.685.909	100	98,16	4.511

Sumber: Dispendukcapil (data diolah), 2025

Dari sebaran penduduk per kecamatan dan luas wilayah Kota Semarang sebesar 373,78 km², kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2024 berada di wilayah Kecamatan Semarang Timur dengan kepadatan penduduk sebesar 12.712,36 jiwa/km², sedangkan wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tugu dengan kepadatan penduduk sebesar 1.204,83 jiwa/km².

Mengikuti pola peningkatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, prediksi demografi di masa depan menunjukkan bahwa Kota Semarang kemungkinan akan mengalami perubahan signifikan dalam struktur penduduknya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tren ini antara lain adalah urbanisasi, kebijakan ekonomi, dan perubahan sosial. Di masa depan,

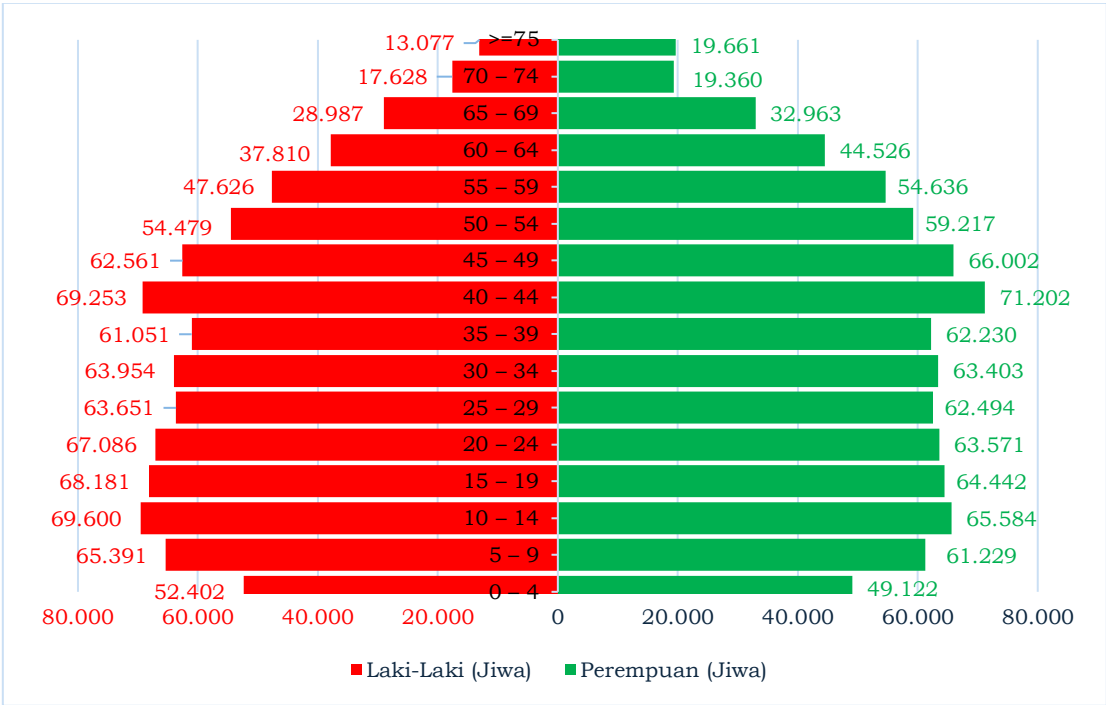
pertumbuhan penduduk yang lebih stabil atau bahkan meningkat dapat membawa tantangan dan peluang baru bagi Kota Semarang.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI (Jiwa)	PEREMPUAN (Jiwa)	JUMLAH (JIWA)	PERSEN
0 – 4	52.402	49.122	101.524	5,96
5 – 9	65.391	61.229	126.620	7,44
10 – 14	69.600	65.584	135.184	7,94
15 – 19	68.181	64.442	132.623	7,79
20 – 24	67.086	63.571	130.657	7,68
25 – 29	63.651	62.494	126.145	7,41
30 – 34	63.954	63.403	127.357	7,48
35 – 39	61.051	62.230	123.281	7,24
40 – 44	69.253	71.202	140.455	8,25
45 – 49	62.561	66.002	128.563	7,55
50 – 54	54.479	59.217	113.696	6,68
55 – 59	47.626	54.636	102.262	6,01
60 – 64	37.810	44.526	82.336	4,84
65 – 69	28.987	32.963	61.950	3,64
70 – 74	17.628	19.360	36.988	2,17
>=75	13.077	19.661	32.738	1,92
TOTAL	842.737	859.642	1.702.379	100

Sumber: Dispendukcapil, 2024

Jika dilihat pada tabel 2.7, sebaran penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2024 sejumlah 1.207.375 jiwa (70,92%), dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) sejumlah 495.004 jiwa (29,08%). Perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100 menghasilkan Rasio Beban Ketergantungan (*dependency ratio*), yang mana Rasio Beban Ketergantungan diartikan sebagai beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif. Rasio Beban Ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2024 sebesar 40,99%. Artinya setiap 10.000 penduduk produktif menanggung sebanyak 4.099 penduduk yang tidak produktif.



Sumber: Dispendukcapil, 2024

Gambar 2.13 Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2024 (Jiwa)

b. Komposisi Penduduk

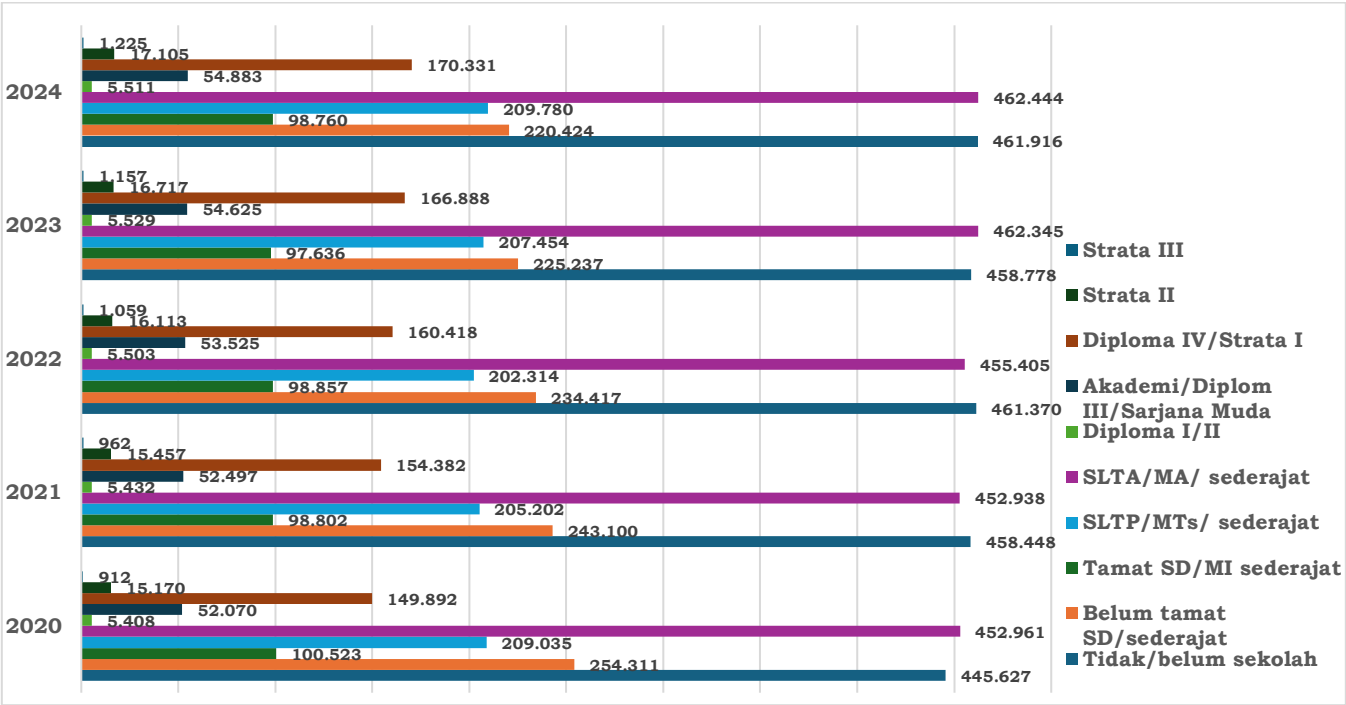
Kota Semarang memiliki proporsi usia produktif yang cenderung dominan selama 10 tahun terakhir dengan rasio jenis kelamin yang cukup seimbang. Kota Semarang juga diprediksi turut mendapatkan bonus demografi. Namun, kondisi kependudukan Kota Semarang di masa depan perlu diwaspadai melihat penduduk usia tua semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dari perubahan bentuk piramida penduduk yang semakin dominan pada rentang 35 – 49 tahun. Rasio ketergantungan juga menunjukkan hal yang serupa, bahwa kecenderungannya semakin meningkat. Melihat kondisi tersebut, maka kebutuhan lapangan pekerjaan dan pembangunan yang ramah lansia perlu menjadi prioritas di masa depan.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020-2024

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	Unit	JUMLAH				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tidak/belum sekolah	Angka (%)	445.627 (26,43%)	458.448 (27,17%)	461.370 (27,32%)	458.778 (27,04%)	461.916 (27,13%)
2	Belum tamat SD/ sederajat	Angka (%)	254.311 (15,08%)	243.100 (14,41%)	234.417 (13,88%)	225.237 (13,28%)	220.424 (12,95)
3	Tamat SD/MI sederajat	Angka (%)	100.523 (5,96%)	98.802 (5,86%)	98.857 (5,85%)	97.636 (5,76%)	98.760 (5,80%)
4	SLTP/MTs/ sederajat	Angka (%)	209.035 (12,4%)	205.202 (12,16%)	202.314 (11,98%)	207.454 (12,23%)	209.780 (12,32%)
5	SLTA/MA/ sederajat	Angka (%)	452.961 (26,87%)	452.938 (26,85%)	455.405 (26,96%)	462.345 (27,26%)	462.444 (27,17%)
6	Diploma I/II	Angka (%)	5.408 (0,32%)	5.432 (0,32%)	5.503 (0,33%)	5.529 (0,33%)	5.511 (0,32)

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	Unit	JUMLAH				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Akademi/Diplom III/Sarjana Muda	Angka (%)	52.070 (3,09%)	52.497 (3,11%)	53.525 (3,17%)	54.625 (3,22%)	54.883 (3,22%)
8	Diploma IV/Strata I	Angka (%)	149.892 (8,89%)	154.382 (9,15%)	160.418 (9,50%)	166.888 (9,84%)	170.331 (10,01%)
9	Strata II	Angka (%)	15.170 (0,90%)	15.457 (0,92%)	16.113 (0,95%)	16.717 (0,99%)	17.105 (1,00%)
10	Strata III	Angka (%)	912 (0,05%)	962 (0,06%)	1.059 (0,06%)	1.157 (0,07%)	1.225 (0,08%)
Jumlah		Angka	1.685.909	1.687.222	1.688.981	1.696.366	1.702.379

Sumber: Dispendukcapil (data diolah) 2025



Gambar 2.14 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020-2024 (Jiwa)

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang pada tahun 2020-2024 jumlahnya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak yaitu penduduk dengan lulusan SLTA/MA/sederajat dengan jumlah 452.961 jiwa (26,87%) di tahun 2020 yang meningkat sebesar 462.444 jiwa (27,17%) di tahun 2024. Sedangkan, jumlah tingkat pendidikan penduduk paling sedikit yaitu penduduk lulusan Strata III dengan jumlah 912 jiwa (0,05%) tahun 2020 yang meningkat menjadi 1.225 jiwa (0,08%) tahun 2024. Di Kota Semarang, masih terdapat penduduk kategori tidak/belum sekolah dalam kurun waktu 5 tahun jumlahnya sebesar 445.627 jiwa (26,43%) pada tahun 2020 yang meningkat menjadi 461.916 jiwa (27,13%) pada tahun 2024.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian Tahun 2024

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (Jiwa)	%	NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (Jiwa)	%
1	Karyawan Swasta	519.913	30,54	21	Bidan	693	0,04
2	Mengurus Rumah Tangga	203.571	11,96	22	Pelaut	527	0,03
3	Wiraswasta	83.255	4,89	23	Pembantu Rumah Tangga	498	0,03
4	PNS/TNI/POLRI	44.326	2,60	24	Apoteker	415	0,02
5	Buruh Tani/Perkebunan	27.069	1,59	25	Pendeta	364	0,02
6	Pensiunan	15.788	0,93	26	Tukang Batu	337	0,02
7	Buruh Harian Lepas	15.210	0,89	27	Mekanik	279	0,02
8	Guru	14.442	0,85	28	Pengacara	224	0,01
9	Pedagang	9.158	0,54	29	Tukang Jahit	205	0,01
10	Petani/Pekebun	7.179	0,42	30	Industri	183	0,01
11	Karyawan BUMN	6.835	0,40	31	Wartawan	177	0,01
12	Dosen	4.365	0,26	32	Biarawan/ Biarawati	168	0,01
13	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	3.837	0,23	33	Seniman	155	0,01
14	Dokter	3.416	0,20	34	Notaris	151	0,01
15	Perawat	3.116	0,18	35	Konsultan	147	0,01
16	Nelayan/Perikanan	1.713	0,10	36	Konstruksi	137	0,01
17	Karyawan Honorer	1.558	0,09	37	Transportasi	133	0,01
18	Perdagangan	1.089	0,06	38	Lainnya	999	0,07
19	Karyawan BUMD	950	0,06	39	Belum/Tidak Bekerja	489.447	28,75
20	Sopir	921	0,05	40	Pelajar/Mahasiswa	239.429	14,06
JUMLAH						1.702.379	100%

Sumber: Dispendukcapil, diolah 2025

Berdasarkan mata pencapaian, penduduk Kota Semarang tahun 2024 sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta (30,54%), mengurus rumah tangga (11,96%), wiraswasta (4,89%), PNS/TNI/POLRI (2,60%), dan sebagainya. Sementara itu, penduduk yang belum atau tidak bekerja sebesar 28,75% serta pelajar/mahasiswa sebesar 14,06%.

Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kota Semarang diproyeksikan mencapai 1.722.421 jiwa, meningkat sebesar 3,49% menjadi 1.782.575 jiwa pada tahun 2030. Dalam 20 tahun mendatang, jumlah penduduk diproyeksikan sebesar 0,80% pada tahun 2045, sebanyak 1.874.716 jiwa. Berikut ini adalah proyeksi penduduk tahun 2025-2045:

Tabel 2.10 Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045

NO	JENIS KELAMIN	SATUAN	Jumlah Penduduk Tahun 2024	PROYEKSI PENDUDUK (Orang)				
				2025	2030	2035	2040	2045
1	Laki-Laki	Jiwa	842.737	851.637	879.536	899.978	912.660	917.689
2	Perempuan	Jiwa	859.642	870.784	903.039	928.926	947.208	957.027
3	Total	Jiwa	1.702.379	1.722.421	1.782.575	1.828.904	1.859.868	1.874.716
4	Rasio	Persen	98,03	97,80	97,40	96,90	96,40	95,90

Sumber: Dispendukcapil, diolah 2025

Laju pertumbuhan rata-rata sebesar 0,47% per tahun mencerminkan dinamika demografi yang relatif stabil. Hal ini memberi peluang bagi

Pemerintah Kota Semarang untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan, tanpa dibebani lonjakan penduduk yang ekstrem. Secara komposisi, jumlah penduduk perempuan terus mendominasi, dengan rasio jenis kelamin yang menurun dari 98,03 pada tahun 2024 menjadi 95,9 pada tahun 2045. Perubahan ini menuntut penyesuaian kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender, khususnya dalam penyediaan layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan perempuan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas perempuan.

Struktur usia yang diperkirakan akan tetap didominasi oleh kelompok usia produktif hingga sekitar tahun 2040 menandai peluang bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan, pelatihan vokasi, dan perluasan lapangan kerja menjadi prioritas penting dalam strategi pembangunan menengah dan jangka panjang. Selain itu, pertumbuhan penduduk perlu diimbangi dengan pengelolaan ruang dan infrastruktur yang efisien. Pemerintah Kota Semarang perlu mengarahkan strategi tata ruang untuk mencegah ketimpangan pertumbuhan antarwilayah, dengan memperkuat konektivitas antar kecamatan, pengembangan kawasan permukiman terencana, serta peningkatan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan transportasi publik.

Dalam jangka panjang, arah pembangunan harus berlandaskan pada daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ekologi kota. Dengan pertambahan sekitar 172 ribu penduduk hingga tahun 2045, Kota Semarang dituntut untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tidak mengancam kualitas lingkungan hidup maupun ketahanan kota terhadap risiko bencana seperti banjir, rob, dan penurunan muka tanah.

Peningkatan jumlah penduduk ini akan memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan kota. Pertama, tekanan terhadap kebutuhan infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi, dan transportasi akan semakin tinggi. Ketersediaan hunian yang layak menjadi tantangan besar, khususnya di kawasan padat penduduk. Kedua, sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi akan mengalami peningkatan beban, menuntut peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas serta tenaga pelayan publik.

Selain itu, pertumbuhan penduduk juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan lapangan kerja dan ruang ekonomi. Jika tidak diimbangi dengan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif, potensi pengangguran dan ketimpangan sosial dapat meningkat. Dari sisi lingkungan, urbanisasi yang tak terkendali bisa memicu penurunan kualitas lingkungan hidup, seperti pencemaran air dan udara, serta berkurangnya ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, proyeksi penduduk ini harus dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan penguatan pelayanan publik secara berkelanjutan, agar pertumbuhan kota tetap seimbang dengan kualitas hidup masyarakat.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merujuk pada kondisi saat penduduk suatu daerah atau wilayah hidup dalam keadaan yang baik secara fisik, sosial, maupun mental. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat selama periode 2020-2024 mencakup berbagai aspek yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana masyarakat mengalami perubahan positif di berbagai sektor. Hasil dari evaluasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut melalui berbagai uraian berikut ini.

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemajuan dan peningkatan kualitas hidup suatu masyarakat. Hal ini merefleksikan kondisi ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memberikan peluang yang lebih baik bagi setiap individu untuk berkembang. Salah satu elemen penting dalam mencapai kesejahteraan ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan terus berkembang akan menciptakan lebih banyak peluang, tidak hanya untuk meningkatkan produksi dan investasi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Aspek kesejahteraan ekonomi mencakup berbagai faktor, seperti peningkatan produktivitas yang akan mendorong efisiensi dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja yang dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, terciptanya lebih banyak pekerjaan akan berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan rumah tangga, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli dan standar hidup masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak akan memberikan manfaat maksimal jika tidak diimbangi dengan distribusi kekayaan yang adil dan merata.

Ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kekayaan dapat menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar dan menghambat tercapainya kesejahteraan yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dalam aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada sektor-sektor lain yang mendukung pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Sebagai contoh, ketidaksetaraan dalam pendapatan dapat membatasi kemampuan sebagian masyarakat untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, yang pada gilirannya memperburuk kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Begitu juga dengan akses terhadap layanan kesehatan, di mana kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah mungkin kesulitan untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak, yang berdampak pada kesehatan fisik dan produktivitas mereka. Oleh karena itu, saat ketimpangan ekonomi dapat teratasi, maka tentu akan berkontribusi pada peningkatan pembangunan manusia secara keseluruhan.

Selain itu, ketimpangan sosial yang timbul akibat ketidaksetaraan ekonomi berpotensi menambah masalah sosial yang lebih kompleks, seperti

kemiskinan yang terperangkap dan kesulitan akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat harus mencakup upaya-upaya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga berdampak positif pada seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, pencapaian kesejahteraan ekonomi di Kota Semarang, bisa dilihat melalui beberapa indikator. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai indikator-indikator pencapaian kesejahteraan ekonomi di Kota Semarang selama periode 2020-2024, yang mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara langsung.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

LPE menggambarkan tingkat perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu, dengan mengukur seberapa banyak nilai barang dan jasa yang dihasilkan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara kumulatif, laju pertumbuhan ekonomi dihitung sebagai persentase dari selisih PDRB antara satu periode dan periode berikutnya, yang memberikan gambaran tentang kecepatan pertumbuhan ekonomi tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu indikator utama yang sangat penting dalam mengevaluasi kondisi kesehatan ekonomi suatu wilayah, serta untuk memperkirakan potensi kemakmuran jangka panjang yang dapat dicapai. Berikut ini disajikan angka LPE Kota Semarang yang dibandingkan dengan kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari Tahun 2020-2024.

Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang, Kota Besar Setara Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024

NO	KAB/KOTA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Semarang	%	-1,85	5,16	5,73	5,79	5,62
2	Bandung	%	-2,28	3,76	5,41	5,07	4,99
3	Surabaya	%	-4,85	4,29	6,51	5,70	5,76
4	Medan	%	-1,98	2,62	4,71	5,04	5,07
5	Makassar	%	-1,27	4,47	5,40	5,31	5,56
6	Yogyakarta	%	-2,42	5,09	5,15	5,08	5,05
7	Jawa Tengah	%	-2,65	3,33	5,31	4,98	4,95
8	Nasional	%	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS, 2025

LPE di Kota Semarang mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023, mencerminkan daya tahan dan perkembangan positif di berbagai sektor ekonomi. Tren ini menunjukkan bahwa Kota Semarang terus mengalami kemajuan dalam aktivitas perdagangan, jasa, industri, serta sektor pendukung lainnya yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dengan angka LPE turun menjadi 5,62%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dinamika ekonomi global maupun tantangan domestik yang mempengaruhi aktivitas ekonomi di kota ini. Faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi dunia, perubahan kebijakan perdagangan, serta fluktuasi nilai tukar dapat berdampak pada investasi dan daya beli masyarakat. Sementara itu, faktor internal seperti perubahan kebijakan daerah, perlambatan sektor unggulan, serta perubahan

pola konsumsi dan produksi juga bisa menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan LPE.

Meskipun mengalami perlambatan, angka pertumbuhan sebesar 5,62% tetap mencerminkan ekonomi yang masih berkembang. Namun, tren penurunan ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk lebih proaktif dalam merancang kebijakan dan strategi guna menjaga stabilitas serta meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi. Penguatan sektor-sektor unggulan seperti perdagangan, jasa pariwisata, industri kreatif, dan UMKM menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Selain itu, mendorong investasi, meningkatkan infrastruktur, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam mempercepat pertumbuhan. Dalam menghadapi tantangan ini, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah yang tepat, Semarang tetap memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai pusat ekonomi yang dinamis dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik, terlihat bahwa tiga sektor terbesar yang menopang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ini di antaranya adalah jasa perusahaan, jasa pendidikan, informasi dan komunikasi. Pencapaian ini menunjukkan adanya penguatan di sektor-sektor yang mendukung teknologi, dan pariwisata, yang menjadi pilar penting dalam perkembangan ekonomi Kota Semarang. Lima tahun terakhir, tiga sektor terbesar yang menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang adalah transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta penyediaan akomodasi makan dan minum. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Semarang semakin bergeser ke arah sektor jasa dan digital, seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk, perkembangan teknologi informasi, serta pertumbuhan industri pariwisata dan kuliner.

Dominasi sektor transportasi dan pergudangan mencerminkan peran strategis Kota Semarang sebagai pusat logistik dan distribusi di Jawa Tengah, didukung oleh infrastruktur yang berkembang, seperti pelabuhan, bandara, serta jaringan jalan tol dan kereta api. Sektor informasi dan komunikasi yang terus tumbuh menunjukkan peningkatan penetrasi digitalisasi dan peran teknologi dalam mendorong aktivitas ekonomi, baik dalam skala lokal maupun global. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum menandakan kuatnya daya tarik wisata, peningkatan mobilitas bisnis, serta gaya hidup masyarakat yang semakin mengutamakan konsumsi di sektor ini.

Tren ini mengindikasikan bahwa Kota Semarang memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi berbasis jasa dan digital. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan, diperlukan strategi yang adaptif, seperti peningkatan investasi di sektor transportasi dan logistik, percepatan transformasi digital bagi pelaku usaha, serta penguatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif agar semakin menarik bagi wisatawan dan investor.

Sebagai kota yang berkembang pesat, Kota Semarang memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan daya saingnya di tingkat regional, maupun nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, Kota Semarang berpotensi untuk terus memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, dan memperkuat sektor-sektor unggulan. Namun, meskipun laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi memberikan dampak positif, penting juga untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, agar ketimpangan sosial tidak semakin besar dan kesejahteraan yang inklusif dapat tercapai.

b. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita secara relatif menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB per Kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan proyeksi jumlah penduduk pada pertengahan tahun di daerah tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per Kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut:

Tabel 2.12 PDRB per Kapita Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB ADHB	Rp Miliar	188.731,69	204.871,00	227.619,17	248.902,61	267.551,35
2	PDRB ADHK	Rp Miliar	137.601,98	144.704,57	152.999,37	161.849,11	170.947,72
3	PDRB/Kapita (ADHB)/Tahun	Rp Juta	114,18	123,67	137,12	149,94	156,57
4	PDRB/Kapita (ADHK)/Tahun	Rp Juta	83,25	87,35	92,17	97,50	100,04

Sumber: Bappeda (Data diolah), 2025

Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif, tercermin dari peningkatan nilai PDRB per Kapita. Pada tahun 2024, PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 156,57 juta per jiwa per tahun, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) yang telah memperhitungkan inflasi berada di angka Rp 100,04 juta per jiwa per tahun. Capaian ini mencerminkan keberlanjutan pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta peningkatan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang. Peningkatan PDRB per kapita ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Semarang terus mengalami perbaikan, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tersebar secara merata di berbagai lapisan penduduk. Akses terhadap lapangan pekerjaan yang lebih baik, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan produktivitas ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan ini. Semakin banyak penduduk yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi juga menunjukkan bahwa perekonomian daerah semakin inklusif dan berdaya saing.

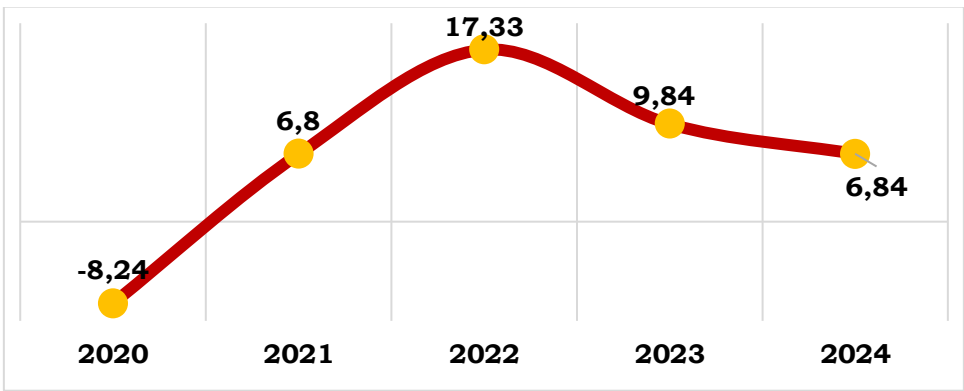
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor unggulan yang menjadi pilar utama perkembangan Kota Semarang terus menunjukkan performa yang kuat. Sektor transportasi dan pergudangan semakin

berkembang seiring dengan peran strategis Kota Semarang sebagai pusat logistik dan distribusi di Jawa Tengah. Sektor informasi dan komunikasi mengalami kemajuan pesat dengan adopsi digitalisasi yang semakin luas, mendorong transformasi ekonomi berbasis teknologi. Selain itu, sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman terus tumbuh, didorong oleh meningkatnya daya tarik wisata, serta mobilitas masyarakat yang semakin tinggi.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi juga menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan PDRB per Kapita. Kebijakan yang mendukung pemulihan sektor UMKM, peningkatan daya beli masyarakat, serta investasi di bidang infrastruktur telah memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Perkembangan ini mencerminkan bahwa Kota Semarang terus bergerak menuju ekonomi yang lebih stabil, produktif, dan kompetitif. Pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir yang terjadi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi pusat ekonomi yang semakin maju, berdaya saing baik di tingkat regional maupun nasional.

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Jasa

Sektor perdagangan dan jasa merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian daerah, berkontribusi secara signifikan terhadap LPE. Pertumbuhan sektor ini mencerminkan tingkat konsumsi masyarakat, efisiensi distribusi barang dan jasa, serta daya saing industri di tingkat lokal maupun global. Dalam beberapa tahun terakhir, LPE sektor perdagangan dan jasa menunjukkan peningkatan yang didorong oleh perkembangan infrastruktur, digitalisasi ekonomi, serta pertumbuhan daya beli masyarakat. Kemunculan berbagai pusat perdagangan modern, perkembangan *e-commerce*, serta meningkatnya peran sektor jasa dalam pariwisata dan industri kreatif menjadi faktor utama yang memperkuat pertumbuhan ekonomi di sektor ini. Adapun capaian LPE sektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang adalah sebagai berikut.



Sumber: BPS Kota Semarang, 2025

Gambar 2.15 LPE Sektor Perdagangan dan Jasa Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Persen)

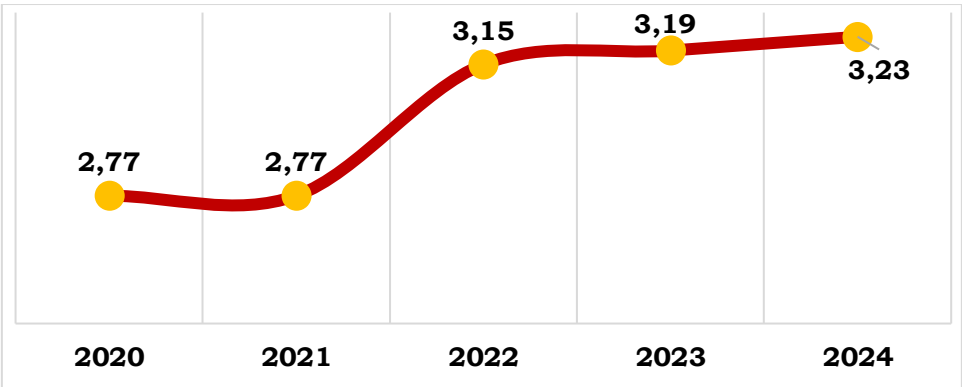
Capaian LPE sektor perdagangan dan jasa bernilai fluktuatif. Sektor perdagangan dan jasa merupakan salah satu kontributor utama dalam struktur ekonomi daerah, dengan peran yang semakin berkembang seiring perubahan pola konsumsi dan dinamika pasar. Namun, dalam periode 2020–2024, LPE sektor ini mengalami tren yang fluktuatif, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. Tahun 2020 menjadi titik awal

perlambatan signifikan akibat pandemi yang berdampak pada sektor perdagangan dan jasa. Penurunan aktivitas bisnis, pembatasan mobilitas, serta ketidakpastian ekonomi global menghambat pertumbuhan sektor ini. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi pada tahun 2021 dan 2022, sektor perdagangan dan jasa mulai menunjukkan perbaikan, ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, serta adaptasi bisnis dalam menghadapi tantangan baru.

Meskipun mengalami pemulihan, fluktuasi tetap terjadi pada tahun 2023 dan 2024 akibat berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan ekonomi, inflasi, serta dinamika pasar global. Persaingan yang semakin ketat, pergeseran tren konsumsi, dan tantangan dalam distribusi barang serta jasa turut memengaruhi pergerakan LPE pada sektor ini. Kondisi yang tidak menentu ini menuntut pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam menjaga stabilitas sektor perdagangan dan jasa. Penguatan daya saing, optimalisasi ekosistem digital, serta strategi diversifikasi usaha menjadi kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah. Dengan langkah-langkah yang tepat, sektor ini diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhannya dan tetap menjadi motor penggerak ekonomi daerah dalam jangka panjang.

d. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum

Sektor penyediaan akomodasi makan minum merupakan salah satu pilar penting dalam struktur ekonomi Kota Semarang, terutama dalam mendukung industri pariwisata dan jasa di Kota Semarang. Rasio PDRB sektor ini menunjukkan kontribusi yang fluktuatif dalam periode 2020–2024, dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, mobilitas wisatawan, serta daya beli masyarakat. Adapun capaian rasio PDRB penyediaan akomodasi makan minum mengikuti tabel sebagai berikut.



Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

Gambar 2.16 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Persen)

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap sektor ini. Pembatasan perjalanan dan penurunan aktivitas ekonomi menyebabkan okupansi hotel turun drastis, sementara banyak pelaku usaha kuliner harus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi masyarakat. Namun, di tengah keterbatasan tersebut, digitalisasi mulai berkembang pesat, dengan meningkatnya pemanfaatan layanan pesan-antar dan reservasi *online* yang membantu sebagian usaha bertahan. Memasuki tahun 2021 dan 2022, sektor ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pelonggaran kebijakan perjalanan dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas

wisata kembali menggerakkan industri perhotelan dan kuliner. Berbagai restoran dan kafe mulai kembali beroperasi dengan konsep yang lebih adaptif, termasuk penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan diversifikasi layanan berbasis teknologi. Selain itu, meningkatnya *event* wisata dan bisnis di Kota Semarang turut mendorong permintaan akan akomodasi dan jasa makanan, mempercepat pemulihan sektor ini.

Pada tahun 2023–2024, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB semakin menguat seiring dengan pertumbuhan jumlah wisatawan serta semakin banyaknya *event* skala besar yang diselenggarakan di kota ini. Ekspansi bisnis perhotelan dan kuliner terlihat dari bertambahnya jumlah hotel di kawasan strategis, serta semakin berkembangnya wisata kuliner sebagai daya tarik utama Kota Semarang. Kuliner khas seperti lumpia, tahu gimbal, dan wedang tahu semakin populer, memperkaya pengalaman wisata bagi pengunjung dari berbagai daerah. Meskipun demikian, fluktuasi mungkin dapat tetap terjadi akibat faktor eksternal seperti inflasi, perubahan tren konsumsi, serta meningkatnya persaingan dengan kota-kota lain dalam menarik wisatawan. Penerbitan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas merupakan komitmen dan upaya pemerintah dalam penguatan sektor ini, termasuk di dalamnya pengembangan destinasi wisata berbasis pengalaman, penyelenggaraan event-event internasional serta atraksi yang dapat meningkatkan lama tinggal dan akumulasi belanja wisatawan di Kota Semarang, peningkatan standar layanan di industri perhotelan dan kuliner, serta kebijakan yang mendukung investasi dan pengembangan pariwisata berkualitas di sektor ini. Perhotelan dan kuliner dapat menjadi media penyerap potensi pendapatan dari multiplier effect penyelenggaraan event, maka dengan langkah yang tepat, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman di Kota Semarang diharapkan dapat terus tumbuh dan menjadi salah satu motor utama penggerak ekonomi daerah.

e. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin menggambarkan proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di Kota Semarang, angka penduduk miskin cenderung menunjukkan tren penurunan dari tahun 2016 hingga 2024, meskipun sempat mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021. Kenaikan ini dipengaruhi oleh dampak buruk dari wabah pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya perekonomian, memengaruhi pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga turut memperburuk kondisi ketidaksetaraan sosial.

Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin meningkat menjadi 4,56%, tetapi mulai menunjukkan penurunan sampai tahun 2024. Penurunan kemiskinan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 terjadi karena intervensi kebijakan hal yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dari masa terpuruknya pasca pandemi Covid-19, mulai dari pemberian bantuan sosial, relaksasi kredit/pembiayaan/pajak, juga *re-focusing* anggaran di Kota Semarang baik yang bersumber dari dana transfer maupun APBD untuk penanganan Covid-

19 pada bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pemanfaatan mekanisme padat karya. Berikut ini disajikan persentase penduduk miskin Kota Semarang yang dibandingkan dengan kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dari Tahun 2020-2024.

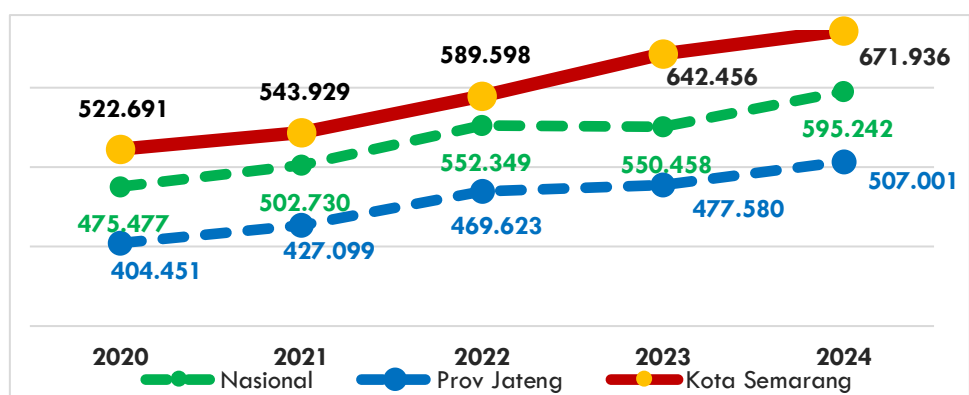
Tabel 2.13 Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2020 – 2024

NO	KAB/KOTA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Semarang	%	4,34	4,56	4,25	4,23	4,03
2	Bandung	%	3,99	4,25	4,37	4,25	3,87
3	Surabaya	%	5,02	5,23	4,72	4,65	3,96
4	Medan	%	8,01	8,34	8,07	8,00	7,94
5	Makassar	%	4,54	4,82	4,58	5,07	4,97
6	Yogyakarta	%	7,27	7,69	6,62	6,49	6,00
7	Jawa Tengah	%	11,84	11,25	10,93	10,77	10,47
8	Nasional	%	10,19	9,71	9,57	9,36	9,03

Sumber: BPS, 2025

Dari tabel, dilihat bahwa penurunan kemiskinan di Kota Semarang tidak sesignifikan Kota lainnya yang jika dirata-rata tren penurunannya berada di angka 0,32. Capaian penurunan kemiskinan di Kota Semarang juga tidak lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan tingkat Nasional yang mencapai 0,30% dan 0,33%. Walaupun demikian, adanya tren penurunan ini menunjukkan bahwa Kota Semarang sedang berada di jalur yang tepat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk terus melanjutkan tren positif ini dan meningkatkan angka penurunan kemiskinan, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk menjaga keberlanjutan kebijakan yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat, terutama di sektor-sektor yang berfokus pada pengentasan kemiskinan.

Penurunan persentase penduduk miskin di Kota Semarang menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang tingkat kemiskinan, kita perlu melihat lebih jauh ke dalam konsep garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Garis kemiskinan direpresentasikan sebagai garis batas ukuran seseorang dikategorikan ke dalam kelompok miskin atau tidak. Dilihat dari perbandingan garis kemiskinan antara Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, terlihat bahwa batas ukuran kemiskinan di Kota Semarang lebih tinggi jika dibandingkan dengan ukuran Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Artinya orang miskin di Kota Semarang, belum tentu tergolong miskin jika diukur menggunakan garis kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Adapun grafik garis kemiskinan mengikuti gambar berikut.

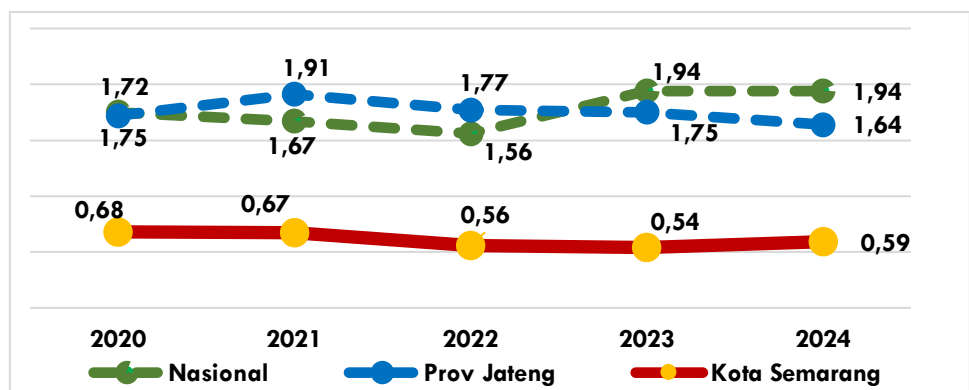


Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.17 Grafik Garis Kemiskinan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

f. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Gambaran indeks kedalaman kemiskinan Kota Semarang selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan terhadap garis kemiskinan di Kota Semarang lebih rendah, dibandingkan dengan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Artinya upaya untuk mengentaskan warga miskin di Kota Semarang akan lebih mudah dilakukan karena kesenjangan terhadap garis kemiskinan tidak terlalu jauh. Berikut disajikan angka indeks kedalaman kemiskinan.



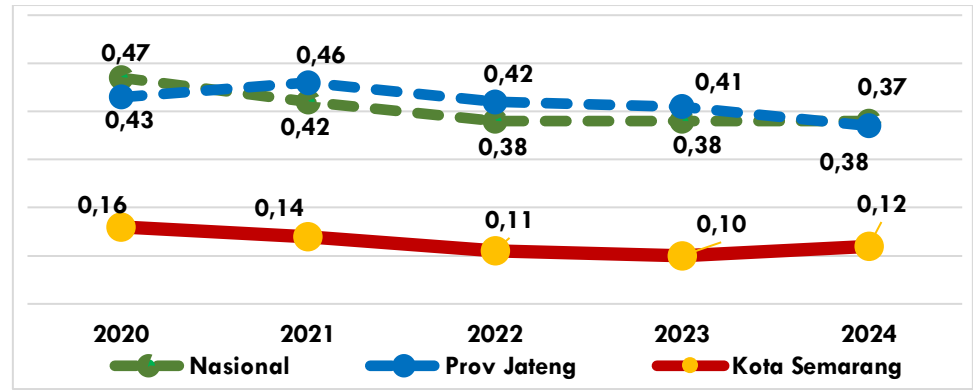
Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.18 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Semarang, Provinsi Jateng, dan Nasional (Angka)

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama tahun 2020 sampai tahun 2024, terlihat bahwa indeks keparahan kemiskinan Kota Semarang menduduki peringkat terbawah jika dibandingkan dengan indeks keparahan kemiskinan yang diraih Provinsi Jawa Tengah dan pada tingkat nasional. Artinya, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di kota ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain, baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun tingkat nasional.

Indeks keparahan kemiskinan yang rendah di Kota Semarang menunjukkan bahwa meskipun masih ada kelompok penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, distribusi pengeluaran di antara mereka lebih merata. Dengan kata lain, ketimpangan antara mereka yang paling miskin

dan yang sedikit lebih mampu di kalangan penduduk miskin lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain, baik pada tingkat provinsi, maupun nasional. Capaian indeks keparahan kemiskinan yang terjadi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional terlihat pada gambar sebagai berikut.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.19 Indeks Keparahana Kemiskinan Kota Semarang, Provinsi Jateng, dan Nasional

Meski nilai indeks keparahan kemiskinan Kota Semarang tercatat paling rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional, namun terjadi peningkatan indeks sebesar 0,02 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin relatif lebih rendah, ada sedikit peningkatan dalam kesenjangan pengeluaran di kalangan kelompok miskin. Artinya, meskipun secara keseluruhan distribusi pengeluaran di antara mereka lebih merata, ada beberapa kelompok masyarakat miskin yang mungkin mengalami kesulitan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang menyebabkan sedikit peningkatan ketimpangan.

Peningkatan kecil pada indeks keparahan kemiskinan ini bisa menjadi indikator bahwa meskipun upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan, masih ada tantangan dalam menjangkau kelompok yang paling rentan dan membutuhkan bantuan lebih besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memastikan bahwa bantuan dan program pemberdayaan ekonomi dapat lebih efektif dalam meratakan pengeluaran di seluruh lapisan masyarakat miskin, dan mencegah ketimpangan yang lebih besar di masa depan.

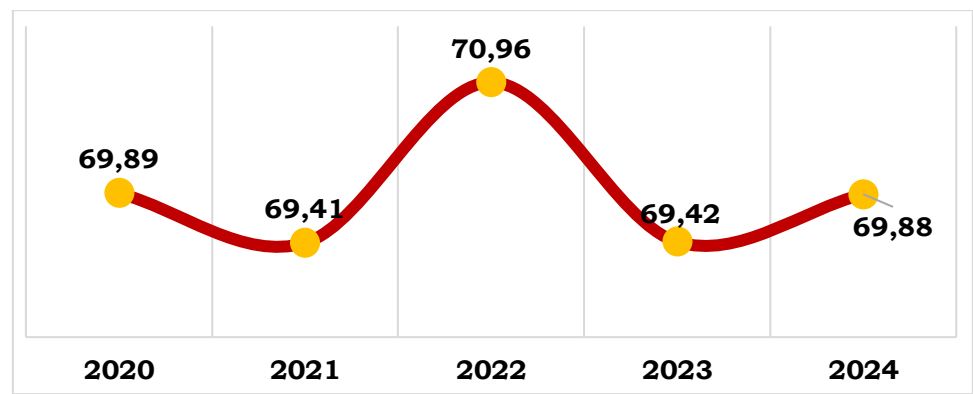
Di Kota Semarang, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan, baik yang didanai oleh pemerintah pusat maupun daerah. Beberapa program unggulan tersebut antara lain JAMKESMASKOT yang menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin, serta RASKIN yang menyediakan beras dengan harga terjangkau bagi warga miskin. Selain itu, ada juga program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal warga miskin.

Selain fokus pada bantuan langsung, Pemerintah Kota Semarang juga terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai

program pemberdayaan ekonomi dan akses pendidikan. Kemiskinan juga menjadi salah satu target utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya Tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan, yang bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Pencapaian ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan, di mana setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan di Semarang harus terus diperkuat dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi yang ada, agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan efektif.

g. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan ekonomi atas populasi usia kerja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan kesejahteraan sosial. Semakin tinggi TPAK, maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja pada daerah tersebut. Dalam kurun 2020-2024, TPAK berfluktuasi dalam rentang 69-71%. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pasar tenaga kerja di kota ini relatif stabil. Kondisi ini mencerminkan keseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan partisipasi masyarakat dalam dunia kerja, meskipun tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan sektor industri, dan kebijakan ketenagakerjaan.



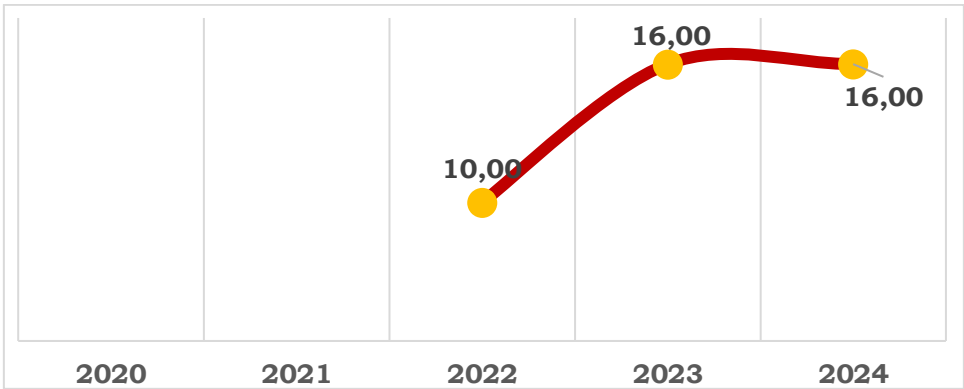
Sumber: BPS Kota Semarang, 2025

Gambar 2.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Pada tahun 2024, angka TPAK berada pada 69,88%, lebih rendah dari angka TPAK Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,74%. Hal ini menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja di level kota, yang akan berdampak pada peningkatan kapasitas ekonomi secara keseluruhan.

Peningkatan TPAK di Kota Semarang dapat memberikan peluang lebih besar dalam menarik investasi, karena investor cenderung tertarik pada daerah dengan angkatan kerja yang lebih besar dan siap untuk bekerja. Selain itu, meningkatnya TPAK juga bisa mencerminkan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja, yang lebih kompeten dan siap beradaptasi dengan berbagai kebutuhan dunia usaha. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya bersama antara pemerintah kota dan berbagai pihak terkait dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan, serta pengembangan sektor-sektor yang berpotensi menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dengan meningkatnya kualitas tenaga kerja dan

TPAK yang mendekati angka provinsi atau bahkan melebihi angka tersebut, Kota Semarang memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang lebih kompetitif, tidak hanya dalam menarik investasi, tetapi juga dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 2.21 Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari ULD Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Peningkatan TPAK juga dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Unit Layanan Disabilitas (ULD) memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi tenaga kerja yang lebih luas, khususnya bagi penyandang disabilitas. Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari ULD di Kota Semarang semakin meningkat. Dengan menyediakan aksesibilitas, pelatihan keterampilan, serta dukungan karier yang tepat, ULD mampu membuka lebih banyak peluang kerja bagi kelompok yang selama ini kurang terwakili di pasar kerja. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), karena semakin banyak individu yang sebelumnya menghadapi hambatan fisik, sosial, atau lingkungan, kini dapat berkontribusi secara produktif dalam dunia kerja. Melalui kolaborasi dengan lembaga pelatihan kerja, sektor industri, dan pemerintah, ULD juga membantu menjembatani kebutuhan pasar kerja dengan potensi yang dimiliki penyandang disabilitas. Dengan demikian, ULD tidak hanya menjadi fasilitator akses pekerjaan, tetapi juga pendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan—sekaligus memperluas basis angkatan kerja nasional secara menyeluruh.

Atas dasar angka TPAK di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kesempatan kerja secara inklusif dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan. Hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha maupun kalangan industri, baik itu melalui intervensi pada pendidikan formal, maupun informal yang berbasis vokasi. Dengan demikian, diharapkan kompetensi pencari kerja dapat meningkat dan tingkat angkatan kerja yang memperoleh pekerjaan dapat semakin besar.

h. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah suatu indikator yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah atau negara. Indikator ini sangat penting

untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja di suatu tempat, karena semakin tinggi TPT, semakin besar pula jumlah individu yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan meskipun telah aktif mencari pekerjaan. Dengan memantau TPT, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang seberapa besar kesempatan kerja yang tersedia di wilayah tersebut.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali sektor perekonomian dan ketenagakerjaan. Selama pandemi, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, sementara yang lain terpaksa mengalami pengurangan jam kerja atau bahkan perubahan signifikan dalam cara mereka bekerja. Banyak sektor industri yang terdampak, dan banyak bisnis yang terpaksa menutup operasional mereka sementara waktu atau mengurangi kapasitasnya. Akibatnya, banyak individu yang terpaksa menghadapi situasi sulit, seperti tidak dapat bekerja atau menghadapi ketidakpastian dalam jam kerja dan pendapatan.

Dalam lingkup Kota Semarang, TPT dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 naik tajam menjadi sebesar 9,57% karena pandemi Covid-19 dan kembali menurun di tahun 2021 menjadi sebesar 9,54% dan di tahun 2022 telah mencapai 7,60%. Pada tahun 2023, TPT di Kota Semarang semakin turun menjadi 5,99% dan tahun 2024 kembali menurun menjadi 5,82%. Adapun tren TPT Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dari tahun ke tahun mengikuti tabel sebagai berikut.

Tabel 2.14 Perkembangan TPT di Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

NO	KAB/KOTA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Semarang	%	9,57	9,54	7,60	5,99	5,82
2	Bandung	%	8,18	11,19	11,46	8,83	7,40
3	Surabaya	%	5,76	9,79	9,68	6,76	4,91
4	Medan	%	8,53	10,74	10,81	8,67	8,30
5	Makassar	%	15,92	13,18	11,82	10,60	9,71
6	Yogyakarta	%	4,80	9,16	9,13	6,07	5,80
7	Jawa Tengah	%	4,44	6,48	5,95	5,13	4,78
8	Nasional	%	5,23	7,07	6,49	5,32	4,91

Sumber: BPS, 2025

TPT di Kota Semarang pada tahun 2024 adalah 5,82%. Persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Akan tetapi, angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kota-kota besar setara. Hal ini menunjukkan bahwa persentase jumlah penganggur di Kota Semarang lebih rendah daripada kota-kota besar setara. Meski demikian, masih banyak langkah konkret yang perlu diambil untuk menurunkan angka TPT, mulai dari hulu hingga hilir. Salah satu langkah utama adalah memastikan bahwa tenaga kerja yang ada memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, yang dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan formal, maupun informal melalui pelatihan-pelatihan, baik di BLK maupun LPK Swasta. Selain itu, penting juga untuk memfasilitasi proses penempatan tenaga kerja ke dunia usaha dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Upaya ini memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, seperti dunia usaha

dan lembaga pendidikan, untuk saling berkomunikasi dan mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja secara lebih tepat. Hal ini akan menciptakan suatu "link and match" yang lebih baik, di mana pelatihan dan keterampilan yang diberikan dapat selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri. Selain itu, penting juga untuk melakukan pendataan yang lebih akurat terhadap pekerja sektor non-formal, seperti mereka yang bekerja di platform belanja daring, ojek *online*, dan sektor informal lainnya.

Pendataan yang tepat ini menjadi sangat penting mengingat tren ekonomi yang kini lebih banyak bergerak ke sektor non-formal. Sektor ini dinilai lebih praktis dan menguntungkan, khususnya di kota-kota besar seperti Kota Semarang, di mana masyarakat memiliki mobilitas yang tinggi dan lebih mengutamakan kemudahan, serta fleksibilitas dalam bekerja. Oleh karena itu, jika sektor non-formal berkembang pesat, ini bisa menjadi strategi cadangan bagi pemerintah kota untuk mengurangi angka pengangguran, dengan memberdayakan individu-individu yang menganggur untuk bekerja dalam sektor tersebut.

TPT di Kota Semarang jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Jawa Tengah menunjukkan bahwa angka nya masih lebih tinggi. Selain dampak dari pandemi Covid-19, tingginya TPT di Kota Semarang juga dipengaruhi oleh faktor struktural, salah satunya adalah jumlah masyarakat dengan tingkat pendidikan SMA dan perguruan tinggi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini menciptakan situasi di mana banyak individu yang memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup tinggi cenderung lebih selektif dalam memilih pekerjaan. Masyarakat pada kriteria tersebut mungkin enggan menerima pekerjaan yang dianggap tidak sesuai dengan keahlian atau pendidikan yang telah diperoleh, sehingga tingkat pengangguran di Kota Semarang menjadi lebih tinggi daripada di kabupaten atau kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini diperburuk dengan rendahnya persentase pekerja di sektor pertanian Kota Semarang pada tahun 2023, yang hanya mencatatkan angka 2,24%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, di mana sektor pertanian masih menyerap lebih dari 30% tenaga kerja, bahkan di atas 40% tenaga kerja. Adapun capaian TPT di Kota Semarang dan beberapa kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah mengikuti uraian sebagai berikut.

Tabel 2.15 Perkembangan TPT di Kota Semarang dan Kabupaten Lain di Jawa Tengah dari 2020-2024

NO	KAB/KOTA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Semarang	%	9,57	9,54	7,60	5,99	5,82
2	Grobogan	%	4,50	4,38	4,40	4,02	3,23
3	Rembang	%	3,69	4,83	1,76	2,06	2,84
4	Wonogiri	%	4,27	2,43	1,95	1,92	2,40

Sumber: BPS, 2025

Penurunan pengangguran di Kota Semarang memerlukan strategi yang lebih terarah dan berbasis pada karakteristik penduduk usia kerja yang didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas (SMA/SMK) dan perguruan tinggi. Dengan latar belakang pendidikan yang relatif tinggi, banyak pencari kerja di Kota Semarang memiliki ekspektasi terhadap pekerjaan yang sesuai

dengan kompetensi akademik, maupun keterampilan yang mereka miliki. Hal ini menyebabkan mereka cenderung enggan mengambil pekerjaan dengan tingkat keterampilan rendah atau pekerjaan yang dianggap kurang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa lapangan kerja yang tersedia tidak hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga memiliki kualitas yang sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang ada.

Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan menengah hingga tinggi, seperti sektor keuangan, teknologi informasi, manajemen bisnis, pariwisata, serta jasa profesional lainnya. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi memiliki akses terhadap pelatihan dan sertifikasi yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Selain itu, peluang kerja yang lebih berbasis inovasi dan kewirausahaan juga harus dikembangkan agar tenaga kerja yang memiliki kompetensi akademik dan keterampilan praktis dapat lebih mudah terserap ke dalam sektor yang sesuai dengan bidang keahlian mereka.

Di sisi lain, pelatihan yang berorientasi pada ekonomi digital, seperti *digital marketing*, desain *user interface* berbasis *user experience*, analisis data, dan kewirausahaan berbasis *platform* digital, harus diperbanyak agar anak muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja modern. Selain itu, keterampilan teknis berbasis permintaan pasar, seperti barista, *event organizer*, dan *content creator*, juga perlu mendapat perhatian lebih, mengingat sektor jasa dan pariwisata di Kota Semarang memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta menjadi pusat pengembangan keterampilan modern juga menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan ini. BLK dan LPK Swasta harus dapat menyediakan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan dunia usaha di Kota Semarang, seperti digital marketing, analisis data, bisnis berbasis teknologi, manajemen pariwisata, dan layanan jasa lainnya dalam mendukung perwujudan Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa.

BLK dan LPK Swasta ke depan juga harus mampu untuk mengembangkan proses pelatihan kerja yang bersifat fleksibel dan tidak terpaku pada pelatihan yang hanya bisa dilakukan di suatu tempat saja, melainkan perlu dicarikan cara agar memungkinkan proses pelatihan secara *remote* berbasis *artificial intelligence* untuk menjangkau peserta pelatihan yang lebih banyak dengan biaya atau anggaran yang lebih rendah. Dengan demikian, harapannya angka penempatan tenaga kerja lokal dapat semakin tinggi dan menekan angka pengangguran di Kota Semarang. Selain itu, pemerintah perlu menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan, komunitas profesional, serta organisasi bisnis, untuk membuka lebih banyak lowongan kerja yang sesuai dengan karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan dan keterampilan dari masyarakat Kota Semarang.

Selain menciptakan peluang kerja di sektor formal, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis wirausaha yang menarik

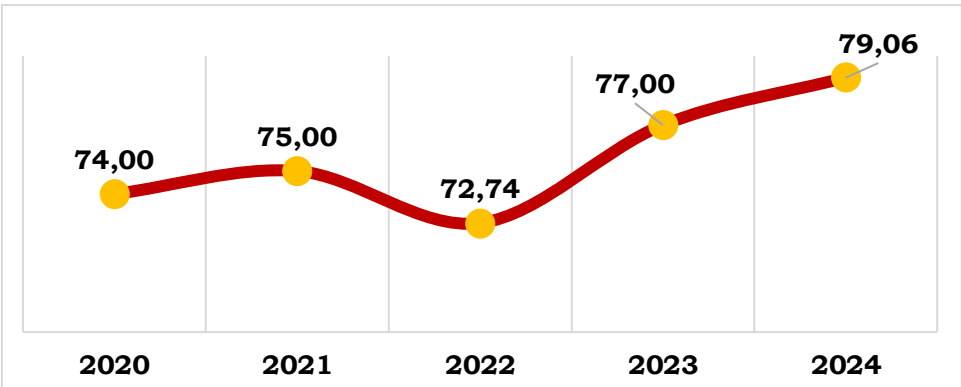
bagi lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi. Program inkubasi bisnis, pendampingan usaha, serta akses pendanaan bagi wirausahawan muda perlu diperkuat agar semakin banyak lulusan yang berani menciptakan lapangan kerja sendiri, daripada sekadar menjadi pencari kerja. Selain itu, skema penempatan tenaga kerja juga harus diperkuat dengan membuka lebih banyak program magang, *apprenticeship*, atau kerja praktik yang memungkinkan pencari kerja memperoleh pengalaman sebelum memasuki dunia kerja secara penuh. Pemerintah juga perlu mendorong terbentuknya ekosistem kerja yang lebih fleksibel dan mendukung *gig-economy*. Saat ini, banyak anak usia kerja yang lebih memilih pekerjaan berbasis proyek atau *remote* dibandingkan pekerjaan tetap di kantor. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang dapat memfasilitasi skema kerja fleksibel, baik melalui regulasi yang mendukung tenaga kerja lepas maupun dengan penyediaan *platform* digital yang dapat mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja berbasis proyek.

Di sisi lain, untuk menghadapi dinamika dunia kerja yang semakin kompetitif, Pemerintah Kota Semarang harus berperan aktif dalam membentuk mentalitas kerja generasi muda, khususnya *fresh graduate*. Banyak lulusan baru yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap gaji dan jabatan, tetapi kurang memahami pentingnya proses, ketekunan, dan keterampilan dalam membangun karier yang sukses. Dibutuhkan berbagai upaya nyata agar generasi muda tidak hanya berorientasi pada gaji saat memulai bekerja, tetapi melihat pekerjaan sebagai batu loncatan untuk membangun karier yang lebih baik.

Dengan pendekatan yang lebih menyesuaikan karakteristik tenaga kerja di Kota Semarang, kebijakan ketenagakerjaan dapat lebih efektif dalam menurunkan angka pengangguran. Melalui penyediaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan keterampilan berbasis kebutuhan dunia usaha, serta dorongan terhadap inovasi dan kewirausahaan, Kota Semarang dapat menciptakan ekosistem tenaga kerja yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

i. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Sertifikasi kompetensi menjadi indikator penting dalam meningkatkan profesionalisme, keahlian, dan produktivitas tenaga kerja, terutama dalam menghadapi persaingan global dan perkembangan industri berbasis teknologi. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi menunjukkan efektivitas berbagai program pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan standar usaha yang terus berkembang. Adapun capaian indikator ini adalah sebagai berikut.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2024

Gambar 2.22 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Persen)

Peningkatan persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi pada tahun 2021 hingga mencapai 75% menandakan adanya perbaikan dalam sistem pelatihan, dorongan dari pemerintah, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi dalam meningkatkan daya saing di pasar kerja. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022, tren kembali menunjukkan perbaikan pada tahun 2023 dan 2024, di mana persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi terus meningkat hingga mencapai 79,06%. Hal ini menandakan bahwa upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja semakin efektif, baik melalui program sertifikasi yang lebih luas, maupun peningkatan akses terhadap pelatihan berbasis keterampilan.

Implikasi dari peningkatan indikator ini sangat signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan ekonomi Kota Semarang. Dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang memiliki sertifikasi, daya saing sumber daya manusia semakin meningkat, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih mudah beradaptasi dengan kebutuhan dunia usaha yang terus berkembang. Selain itu, peningkatan jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

j. Rasio Gini

Tabel 2.16 Perkembangan Rasio Gini Kota Semarang, Kota Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

NO	KAB/KOTA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Semarang	Angka	0,380	0,430	0,440	0,400	0,430
2	Makassar	Angka	0,400	0,400	0,400	0,380	0,360
3	Yogyakarta	Angka	0,420	0,460	0,520	0,450	0,450
4	Bandung	Angka	0,400	0,430	0,460	0,460	0,430
5	Surabaya	Angka	0,340	0,350	0,390	0,420	0,380
6	Medan	Angka	0,320	0,400	0,400	0,373	0,356
7	Jawa Tengah	Angka	0,360	0,370	0,370	0,370	0,370
8	Nasional	Angka	0,390	0,380	0,380	0,380	0,380

Sumber: BPS, 2025

Rasio Gini digunakan untuk memberikan gambaran terkait tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan di Kota Semarang. Pendekatan melalui Rasio Gini dilakukan dengan mengidentifikasi pola pengeluaran suatu masyarakat, baik pada masyarakat taraf rendah, sedang maupun tinggi. Ketimpangan penduduk Kota Semarang pada kurun waktu

2020-2024 ditunjukkan pada tabel 2.16. Rasio Gini Kota Semarang meningkat menjadi 0,430 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi meningkat antara kelompok-kelompok masyarakat. Pemerintah Kota Semarang terus melakukan berbagai upaya yang cukup efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam menentukan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kota dalam menciptakan pemerataan ekonomi, sehingga ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi dapat dikurangi secara signifikan.

Tabel 2.17 Ketimpangan Pendapatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	40% Penduduk Berpendapatan Rendah	%	17,17	15,71	15,12	16,49	16,49*
2	40% Penduduk Berpendapatan Menengah	%	37,92	35,04	34,41	35,97	35,97*
3	20% Penduduk Berpendapatan Tinggi	%	44,91	49,25	50,57	47,55	47,55*

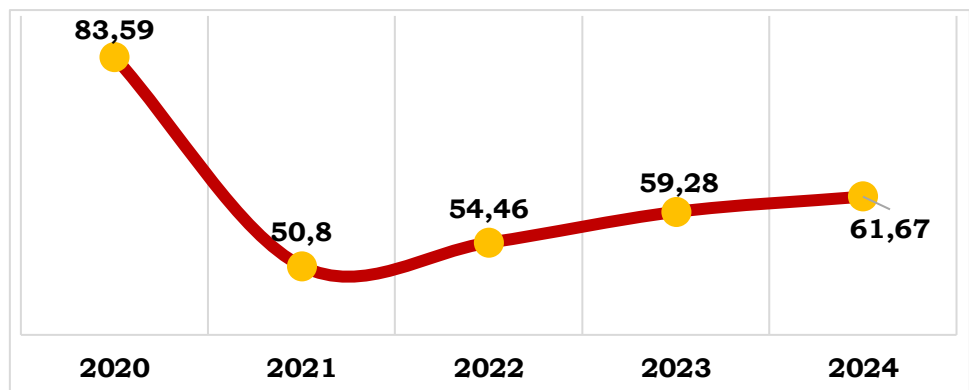
Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati bagian pendapatan sebesar 16,49% lebih tinggi daripada tahun 2022 sebesar 15,12%. Selain itu, untuk 40% penduduk lapisan menengah terjadi peningkatan bagian pendapatan yaitu dari 34,41% pada tahun 2022 menjadi 35,97% pada tahun 2023. Sedangkan, 20% penduduk lapisan atas, terjadi penurunan bagian pendapatan yaitu 50,57% pada tahun 2022 menjadi 47,55% tahun 2023.

Secara total, kelompok pendapatan menengah dan tinggi menguasai 83,52% distribusi pendapatan masyarakat di Kota Semarang. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dampak kemajuan pembangunan lebih dirasakan untuk penerima pendapatan kelompok sedang dan tinggi. Idealnya untuk kelompok penerima pendapatan sedang dan tinggi mampu mentransfer ke kelompok penerima pendapatan rendah sehingga akan lebih merata.

k. Persentase Masyarakat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Kota Semarang telah mencapai angka yang cukup tinggi pada tahun 2020 yaitu 83,59%. Namun, pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, menyebabkan peningkatan jumlah penduduk kurang mampu dan menurunnya angka pemenuhan kebutuhan dasar. Meski demikian, Pemerintah Kota Semarang terus menggalakkan berbagai upaya dan program strategis untuk meringankan beban masyarakat, serta terus meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mereka. Adapun capaian persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah sebagai berikut:



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Gambar 2.23 Persentase Masyarakat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2020-2024 (Persen)

Dalam aspek ketahanan pangan, berbagai program telah diimplementasikan guna menurunkan angka prevalensi ketidakcukupan pangan. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap lapisan masyarakat dapat memperoleh akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat serta menekan beban ekonomi yang ditanggung oleh keluarga kurang mampu. Selain itu, upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) juga terus dilakukan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan perbaikan hunian yang lebih layak dan sehat, masyarakat dapat hidup dengan lebih bermartabat serta memiliki kondisi lingkungan yang mendukung kesejahteraan mereka. Hingga tahun 2024, persentase luasan kawasan kumuh di Kota Semarang telah berhasil ditekan hingga menyisakan 18,78%, sementara jumlah unit RTLH yang telah mendapat bantuan rehabilitasi mencapai 1.691 unit.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, Pemerintah Kota Semarang juga melaksanakan berbagai program guna memperkuat daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha. Program ini mencakup penyediaan pelatihan wirausaha bagi pemuda dan masyarakat umum, serta pendampingan bagi UMKM agar dapat naik kelas. Berkat upaya ini, hingga tahun 2024, sebanyak 17,40% UMKM telah berhasil meningkatkan skala usahanya, yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Di sisi lain, berbagai langkah juga dilakukan untuk meningkatkan angka penempatan kerja dan menekan tingkat pengangguran. Program *walk-in interview* yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan berbagai perusahaan telah membuka peluang kerja bagi banyak pencari kerja. Selain itu, upaya dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis juga telah dijalankan guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Melalui pendekatan dialogis, tingkat perselisihan yang dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama mencapai 70,63% pada tahun 2024, menunjukkan efektivitas dalam menciptakan stabilitas ketenagakerjaan di Kota Semarang.

Meskipun berbagai capaian positif telah diraih, Pemerintah Kota Semarang tidak boleh berhenti di titik ini. Upaya untuk memastikan seluruh masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan inovatif. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan akses pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, penyediaan lapangan

pekerjaan yang lebih luas, serta penguatan sektor ekonomi kreatif perlu terus ditingkatkan. Dengan komitmen yang kuat dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat, Kota Semarang dapat semakin maju dan sejahtera, serta menjadi kota yang inklusif bagi seluruh warganya.

1. Indeks Pembangunan Manusia

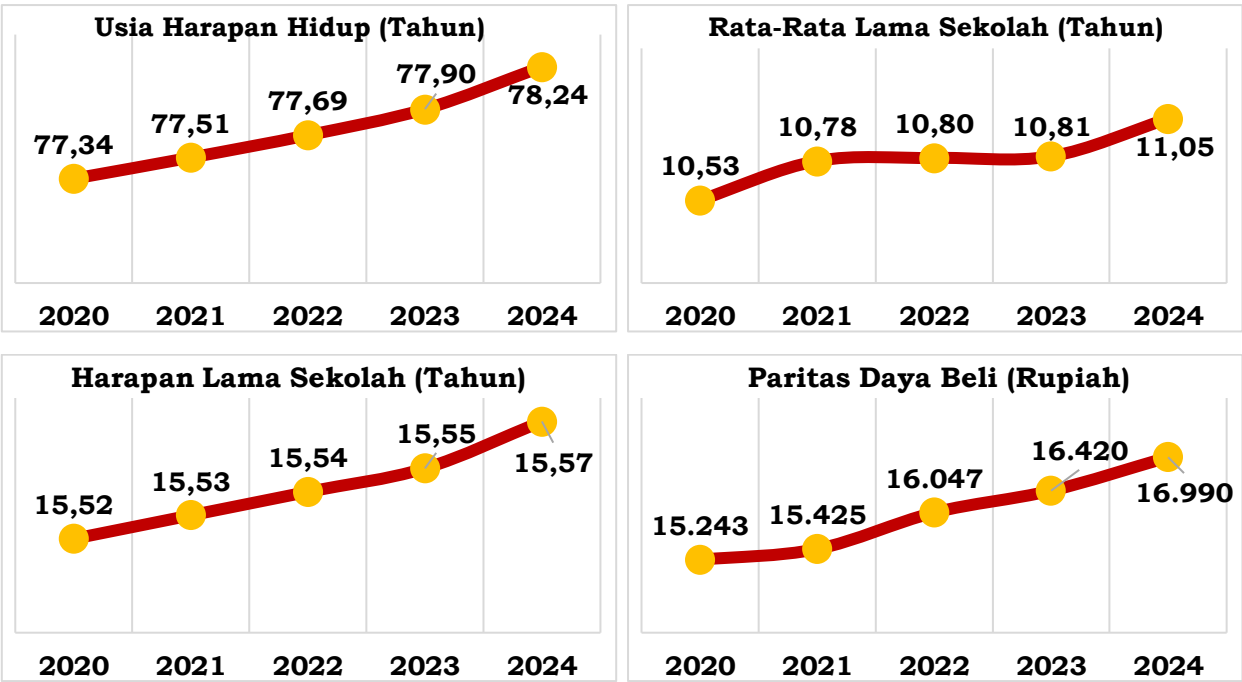
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak di suatu wilayah tertentu. Indikator ini merupakan implikasi dari kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Adapun capaian IPM di Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional mengikuti tabel sebagai berikut.

Tabel 2.18 IPM Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

NO	KOTA/ PROVINSI/ NASIONAL	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Semarang	Angka	83,05	83,55	84,08	84,43	85,24
2	Bandung	Angka	81,51	81,96	82,50	83,04	83,75
3	Surabaya	Angka	82,23	82,31	82,74	83,99	84,69
4	Medan	Angka	80,98	81,21	81,76	82,61	83,23
5	Makassar	Angka	82,25	82,66	83,12	83,52	83,90
6	Yogyakarta	Angka	86,61	87,18	87,69	88,61	89,10
7	Jawa Tengah	Angka	71,87	72,16	72,79	73,39	74,93
8	Nasional	Angka	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02

Sumber: BPS, 2025

Secara umum, dalam lima tahun terakhir dari tahun 2020 hingga 2024, pembangunan manusia di Kota Semarang terus mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2020. Penurunan tersebut terjadi dari angka 83,19 pada tahun 2019 menjadi 83,05 pada tahun 2020, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak langsung pandemi Covid-19. Namun, setelah tahun 2020, IPM mengalami kenaikan setiap tahun. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi dampak pandemi, meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial masyarakat, serta mengoptimalkan berbagai program pembangunan yang berfokus pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Selain itu, kenaikan yang konsisten ini juga menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya, melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang lebih baik, serta program-program pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif. Berbagai langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan IPM, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan yang lebih merata di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Adapun skor-skor dari indikator pembentuk IPM sejak tahun 2020-2024 mengikuti tabel sebagai berikut.



Sumber: BPS Kota Semarang, 2025

Gambar 2.24 Perkembangan Capaian Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2020-2024

Berdasarkan data capaian indikator pembentuk IPM yang terlampir, dapat diamati bahwa setiap komposit indikator yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi selalu mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan pembangunan yang berfokus pada perbaikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks Kota Semarang, hasil yang positif ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam berbagai bidang yang menjadi pondasi utama pembangunan.

Di sektor kesehatan, misalnya, tercatat adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat, yang berkontribusi pada turunnya angka kematian dan meningkatnya harapan hidup. Selain itu, upaya-upaya peningkatan fasilitas kesehatan dan program kesehatan preventif di berbagai level juga berperan dalam memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat. Sementara itu, di bidang pendidikan, Kota Semarang berhasil memperluas akses dan kualitas pendidikan yang semakin merata, baik di tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Pemerintah Kota Semarang terus berupaya meminimalisir kesenjangan dalam akses pendidikan dengan menyediakan berbagai program beasiswa, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah. Semua upaya ini memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan tingkat melek huruf dan partisipasi pendidikan. Di sektor ekonomi, Kota Semarang mengalami perkembangan yang signifikan, dengan terus berkembangnya sektor-sektor perdagangan dan jasa, konstruksi dan industri pengolahan yang memacu pertumbuhan ekonomi kota. Kebijakan yang mendukung investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan sektor UMKM juga turut membantu memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang terus ditingkatkan, seperti aksesibilitas transportasi dan konektivitas antar daerah, juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi penduduk setempat.

Secara keseluruhan, peningkatan IPM Kota Semarang menunjukkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi telah berjalan dengan baik, menciptakan sinergi yang mendukung tercapainya kesejahteraan yang lebih merata. Pencapaian ini tentu saja merupakan hasil dari kerja keras pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kota yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Dengan melanjutkan upaya peningkatan di ketiga sektor ini, Kota Semarang memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi model pembangunan kota yang berkelanjutan.

IPM Kota Semarang menunjukkan hasil yang menggemblirakan, dengan capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah maupun rata-rata IPM Nasional. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan yang dilakukan di Kota Semarang telah berjalan dengan baik dan berhasil menciptakan kemajuan yang signifikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan posisi IPM yang lebih tinggi dari provinsi lainnya, Kota Semarang menunjukkan keberhasilan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Namun, meskipun capaian IPM Kota Semarang cukup membanggakan, masih ada tantangan yang perlu dihadapi, terutama ketika dibandingkan dengan kota-kota lain yang memiliki IPM lebih tinggi. Salah satunya adalah Kota Yogyakarta, yang pada tahun 2024 berhasil mencatatkan IPM sebesar 89,10, lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Semarang. Pencapaian ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Semarang sudah berada di jalur yang tepat, ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut, terutama dalam aspek yang dapat mendorong kualitas hidup masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi.

Perbandingan dengan Kota Yogyakarta juga bisa menjadi momentum bagi Kota Semarang untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah dijalankan. Setiap kota memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, namun dengan melihat keunggulan yang dimiliki oleh kota lain, seperti dalam hal pendidikan, layanan kesehatan, atau peningkatan sektor ekonomi, Semarang dapat menggali peluang untuk memperbaiki dan mengoptimalkan program pembangunan yang ada. Dengan langkah-langkah strategis dan komprehensif, bukan tidak mungkin Kota Semarang dapat mencapai IPM yang lebih tinggi lagi, bahkan mengungguli kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Sebagaimana sudah dijelaskan, komposit pembentuk indikator IPM adalah AHH, RLS, HLS dan PPP. Adapun pertumbuhan AHH di Kota Semarang pada tahun 2024 sebesar 0,34 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan kota besar setara Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar yang masing-masing tumbuh 0,33 tahun, 0,19 tahun, 0,23 tahun, dan 0,09 tahun. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian nasional, pertumbuhan AHH Kota Semarang lebih besar dari pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah dan nasional yang pertumbuhannya sebesar 0,24 dan 0,26 tahun pada tahun 2024. Berikut disajikan data terkait dengan AHH dan pertumbuhan AHH Kota Semarang Tahun 2020-2024.

Tabel 2.19 Pertumbuhan AHH Kota Semarang, Kota Besar Setara, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

NO	KAB/ KOTA	AHH (Tahun)					PERTUMBUHAN AHH (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Semarang	77,34	77,51	77,69	77,90	78,24	0,09	0,17	0,18	0,21	0,34
2	Bandung	74,28	74,46	74,75	75,04	75,37	0,14	0,18	0,29	0,29	0,33
3	Surabaya	74,18	74,18	74,47	74,75	74,94	0,05	0,00	0,29	0,28	0,19
4	Medan	73,14	73,23	73,58	73,93	74,16	0,16	0,09	0,35	0,35	0,23
5	Makassar	72,09	72,13	72,4	72,69	72,78	0,09	0,04	0,27	0,29	0,09
6	Yogyakarta	74,65	74,76	74,83	74,91	75,11	0,09	0,11	0,07	0,08	0,20
7	Jawa Tengah	74,37	74,47	74,57	74,69	74,93	0,14	0,10	0,10	0,12	0,24
8	Nasional	71,47	71,57	71,85	72,13	72,39	0,13	0,10	0,28	0,28	0,26

Sumber: BPS, 2025

Pertumbuhan AHH yang signifikan ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan layanan kesehatan, fasilitas medis, serta program kesehatan preventif dan promotif. Misalnya, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dengan perbaikan kualitas fasilitas layanan kesehatan seperti pembangunan gedung rawat inap di RSUD KRMT Wongsonegoro, rehabilitasi dan pembangunan puskesmas baru, serta edukasi kesehatan masyarakat yang semakin baik, semua berkontribusi pada penurunan angka kematian dan perbaikan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pertumbuhan peningkatan AHH yang lebih baik ini juga mencerminkan kesuksesan berbagai program sosial dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kualitas hidup, seperti peningkatan sanitasi, akses air bersih, serta perbaikan kondisi lingkungan hidup yang berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa Kota Semarang telah berhasil menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan memberikan akses yang lebih baik bagi warganya untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Dengan terus berfokus pada peningkatan sektor kesehatan dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, Kota Semarang berpotensi untuk terus meningkatkan AHH warganya di masa yang akan datang.

Pada tabel 2.20 menunjukkan pertumbuhan RLS Kota Semarang sebesar 0,24 tahun pada tahun 2024. Kenaikan tersebut lebih besar dibandingkan dengan kenaikan kota setara lain. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan RLS Kota Semarang lebih tinggi dari pertumbuhan nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang hanya mencapai 0,08 dan 0,01 tahun.

Tabel 2.20 Pertumbuhan RLS Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

NO	KAB/KOTA	RLS (Tahun)					PERTUMBUHAN RLS (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Semarang	10,53	10,78	10,80	10,81	11,05	0,01	0,25	0,02	0,01	0,24
2	Bandung	10,75	10,99	11,00	11,06	11,07	0,11	0,24	0,01	0,06	0,01
3	Surabaya	10,49	10,50	10,51	10,70	10,89	0,01	0,01	0,01	0,19	0,19
4	Medan	11,39	11,48	11,50	11,62	11,79	0,01	0,09	0,02	0,12	0,17

NO	KAB/KOTA	RLS (Tahun)					PERTUMBUHAN RLS (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5	Makassar	11,21	11,43	11,55	11,56	11,57	0,11	0,22	0,12	0,01	0,01
6	Yogyakarta	11,46	11,72	11,89	12,11	12,12	0,01	0,26	0,17	0,22	0,01
7	Jawa Tengah	7,69	7,75	7,93	8,01	8,02	0,18	0,06	0,18	0,08	0,01
8	Nasional	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85	0,17	0,06	0,15	0,08	0,08

Kenaikan RLS yang signifikan di Kota Semarang ini mencerminkan beberapa faktor positif, seperti peningkatan fasilitas pendidikan, keberhasilan program-program pemerintah yang mendukung akses pendidikan yang lebih merata, serta adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu, mungkin ada juga peran sektor swasta atau lembaga pendidikan non-formal yang turut mempercepat laju peningkatan RLS di Kota Semarang.

Namun, meskipun ada kenaikan yang cukup signifikan, masih banyak yang perlu diperhatikan, karena capainnya masih di bawah beberapa kota setara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya seperti kesenjangan antar wilayah, kualitas pendidikan di tiap tingkat, dan pemerataan kesempatan belajar bagi semua lapisan masyarakat. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus berupaya untuk menjaga dan mempercepat laju pertumbuhan RLS ini agar dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan manusia di Kota Semarang.

Pertumbuhan HLS Kota Semarang sebesar 0,02 tahun pada tahun 2024, Kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Bandung dan Yogyakarta. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, pertumbuhan HLS Kota Semarang lebih kecil dari pertumbuhan provinsi dan nasional. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Medan dan Makassar pertumbuhan HLS lebih besar di antara keduanya. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi peningkatan pertumbuhan nilai HLS. Data terkait HLS ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21 Pertumbuhan HLS Kota Semarang, Kota Besar Setara Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

NO	KAB/KOTA	HLS (Tahun)					PERTUMBUHAN HLS (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Semarang	15,52	15,53	15,54	15,55	15,57	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
2	Bandung	14,20	14,21	14,23	14,24	14,30	0,01	0,01	0,02	0,01	0,06
3	Surabaya	14,80	14,81	14,83	14,85	14,87	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
4	Medan	14,74	14,75	14,77	14,78	14,79	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
5	Makassar	15,57	15,58	15,59	15,61	15,62	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
6	Yogyakarta	17,43	17,60	17,61	17,62	17,66	0,15	0,17	0,01	0,01	0,04
7	Jawa Tengah	12,70	12,77	12,81	12,85	12,86	0,02	0,07	0,04	0,04	0,01
8	Nasional	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21	0,03	0,10	0,02	0,05	0,06

Sumber: BPS, 2025

Pertumbuhan HLS Kota Semarang yang lebih kecil dibandingkan dengan Bandung dan Yogyakarta, serta capaian provinsi dan nasional, menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, laju peningkatan harapan lama sekolah di Semarang masih belum secepat kota-kota lainnya. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas dan akses pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, atau adanya tantangan struktural yang

menghambat perkembangan sistem pendidikan. Peningkatan yang lebih lambat dibandingkan dengan Bandung, Yogyakarta, provinsi dan nasional dapat menjadi indikator bahwa masih ada ketimpangan atau kendala di Kota Semarang yang perlu diatasi. Mungkin ada kekurangan dalam fasilitas pendidikan, kurangnya keterjangkauan bagi kelompok masyarakat tertentu, atau kurangnya perhatian terhadap kualitas pendidikan.

Di sisi lain, fakta bahwa pertumbuhan HLS Kota Semarang lebih besar dibandingkan dengan Medan dan Makassar bisa menjadi indikator positif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun laju pertumbuhannya lebih kecil dari kota-kota besar lainnya seperti Bandung dan Yogyakarta, Kota Semarang tetap berada di atas beberapa kota besar lainnya dalam hal peningkatan harapan lama sekolah, sehingga bisa diartikan sebagai sinyal bahwa upaya pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Semarang mulai memberikan dampak meskipun laju peningkatannya masih terbatas.

Pemerintah Kota Semarang perlu fokus pada pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, khususnya di wilayah yang masih kurang berkembang. Program-program yang meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, seperti beasiswa, pelatihan guru, dan peningkatan fasilitas pendidikan di daerah kurang terjangkau, dapat berperan besar dalam mempercepat pertumbuhan HLS. Selain kuantitas, kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama. Upaya untuk meningkatkan kualitas kurikulum, metode pengajaran, dan fasilitas belajar perlu diperhatikan agar bukan hanya lama sekolah yang meningkat, tetapi juga kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Untuk mempercepat laju peningkatan HLS, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting. Pendanaan bersama dan program yang lebih inklusif akan mempercepat pencapaian target pendidikan.

Tabel 2.22 Pengeluaran Per Kapita Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

NO	KAB/KOTA	PENGELUARAN PER KAPITA (Ribu Rp)					PERTUMBUHAN PENGELUARAN PER KAPITA (Ribu Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Semarang	15.243	15.425	16.047	16.420	16.990	-307	182	622	373	570
2	Bandung	16.887	16.996	17.639	18.236	18.795	-367	109	643	597	559
3	Surabaya	17.755	17.862	18.345	18.977	19.666	-99	107	483	632	689
4	Medan	14.890	14.999	15.503	15.674	16.069	-143	109	504	171	395
5	Makassar	16.873	17.097	17.406	17.889	18.386	-116	224	309	483	497
6	Yogyakarta	18.678	18.801	19.319	19.920	20.603	-447	123	518	601	683
7	Jawa Tengah	10.930	11.034	11.377	11.835	12.276	-172	104	343	458	441
8	Nasional	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341	-286	143	323	420	442

Sumber: BPS, 2025

Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita Kota Semarang sebesar 16.420 ribu rupiah/orang/tahun, lebih kecil dibandingkan dengan kota besar setara Bandung, Surabaya, Makassar dan Yogyakarta namun lebih besar dibanding dengan Kota Medan. Pengeluaran per kapita Kota Semarang lebih besar dari pengeluaran per kapita di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 11.835 ribu

rupiah/orang/tahun dan pengeluaran per kapita nasional yang sebesar 11.899 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2023.

Di Kota Semarang, pengeluaran per kapita tercatat mengalami penurunan sebesar 307 ribu rupiah per orang per tahun pada masa pandemi. Penurunan ini dapat dimaklumi mengingat banyaknya sektor ekonomi yang terhenti atau terhambat akibat pembatasan sosial, penurunan aktivitas bisnis, dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan mereka. Banyak individu yang kehilangan pekerjaan atau pendapatannya berkurang, sementara sektor-sektor usaha, seperti pariwisata, restoran, dan perdagangan, juga mengalami penurunan tajam dalam aktivitasnya. Semua faktor ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis, yang terlihat jelas dalam penurunan pengeluaran per kapita.

Mengacu pada data yang ada, pengeluaran per kapita di Kota Semarang mulai menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setelah tahun 2020. Berdasarkan tabel yang tersedia, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan berturut-turut pada tahun 2021-2024 dengan nominal angka peningkatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita mengalami kenaikan sebesar 182 ribu rupiah per orang per tahun. Meskipun nominal kenaikan ini terbilang moderat, namun ini merupakan indikasi awal bahwa masyarakat mulai kembali menggerakkan roda perekonomian melalui konsumsi, meskipun masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti ketidakpastian ekonomi yang masih menyelimuti.

Pada tahun 2022, peningkatan pengeluaran per kapita mengalami lonjakan yang cukup besar, yakni sebesar 622 ribu rupiah per orang per tahun. Lonjakan ini mencerminkan adanya perbaikan yang signifikan dalam daya beli masyarakat. Peningkatan yang besar ini bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemulihan sektor-sektor yang terdampak pandemi, program bantuan sosial atau stimulus ekonomi dari pemerintah yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta kembalinya kepercayaan konsumen untuk berbelanja dan mengkonsumsi barang dan jasa. Dengan meningkatnya pengeluaran masyarakat, ekonomi mulai bergerak lebih dinamis, menciptakan lebih banyak peluang bagi bisnis lokal untuk berkembang.

Kemudian, pada tahun 2023 dan 2024, pengeluaran per kapita masih terus meningkat, kenaikan yang tercatat pada tahun 2024 sebesar 570 ribu rupiah per orang per tahun yang menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kota Semarang telah benar-benar pulih dan bahkan mengalami penguatan lebih lanjut. Peningkatan pengeluaran ini dapat diartikan sebagai tanda bahwa daya beli masyarakat semakin tinggi, yang pada gilirannya mencerminkan bahwa kondisi ekonomi secara keseluruhan telah membaik. Semakin tingginya pengeluaran per kapita ini juga dapat menjadi indikator bahwa masyarakat Kota Semarang semakin sejahtera, dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan lebih baik dan juga memiliki kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih berkualitas.

Peningkatan pengeluaran per kapita ini tidak hanya mencerminkan pemulihan ekonomi, tetapi juga berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pengeluaran per kapita, semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk mengakses berbagai produk dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya, masyarakat bisa lebih banyak berbelanja kebutuhan sehari-hari, mengakses layanan kesehatan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pendidikan, atau bahkan berlibur dan menikmati fasilitas rekreasi yang turut mendorong ekonomi kreatif dan pariwisata.

Namun, meskipun ada tren positif yang tercatat, penting untuk mencermati bahwa peningkatan pengeluaran per kapita tidak selalu merata di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kota Semarang perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memperhatikan segmen-segmen yang mungkin belum merasakan dampak positif dari pemulihan ekonomi ini. Sebagai contoh, masyarakat di daerah pinggiran atau yang bergantung pada sektor yang belum pulih sepenuhnya, seperti sektor informal, mungkin belum merasakan manfaat yang signifikan dari peningkatan daya beli ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mendorong inklusivitas dalam pemulihan ekonomi dan memastikan bahwa program-program sosial serta bantuan yang tepat sasaran dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, peningkatan pengeluaran per kapita di Kota Semarang pasca-pandemi adalah sebuah sinyal positif yang menggambarkan bahwa perekonomian Kota Semarang sudah mulai bangkit. Masyarakatnya semakin mampu untuk mengkonsumsi lebih banyak, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk menjaga tren positif ini, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pemerataan manfaat pemulihan ekonomi dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor.

Sebagai penutup, berbagai Indikator perekonomian dan sosial di Kota Semarang menunjukkan tren yang sangat positif dalam beberapa tahun terakhir. LPE mencatatkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan tahun 2020, sementara tingkat kemiskinan dan TPT semakin menurun dari tahun ke tahun. Rasio Gini yang menggambarkan ketimpangan pendapatan juga menunjukkan perbaikan, dan IPM semakin mendekati angka ideal, mencerminkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun, meskipun sudah ada kemajuan yang menggembirakan, masih ada pekerjaan rumah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk memastikan bahwa tren positif ini dapat terus berlanjut. Upaya peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sektor kesehatan, dan peningkatan akses ke lapangan pekerjaan yang layak menjadi fokus utama untuk mempertahankan dan memperbaiki angka-angka ini. Selain itu, kebijakan yang mendorong pemerataan ekonomi, termasuk pengurangan kesenjangan antara wilayah dan kelompok masyarakat, sangat penting agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata. Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara sektor pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, Kota Semarang dapat terus memperbaiki indikator-indikator tersebut,

meningkatkan kualitas hidup warganya, dan menjadi kota yang lebih sejahtera dan inklusif bagi semua.

m. Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya adalah kondisi yang menggambarkan sejauh mana masyarakat dapat mengakses dan menikmati kualitas hidup yang tinggi dalam aspek sosial dan kebudayaan. Indikator kesejahteraan sosial budaya terdiri dari beberapa aspek yang menjadi tolak ukur dalam menilai pencapaian tersebut. Capaian pada periode 2020-2024 mencerminkan usaha dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk mencapai kesejahteraan sosial budaya yang lebih merata dan berkelanjutan. Beberapa aspek utama yang menjadi indikator kesejahteraan sosial budaya meliputi akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, partisipasi sosial, keadilan sosial, pelestarian budaya, dan pemerataan ekonomi.

Pencapaian dalam sektor pendidikan pada periode ini menunjukkan perkembangan yang signifikan, dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah. Selain itu, pendidikan tentang nilai-nilai budaya juga semakin diutamakan dalam kurikulum, memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada generasi muda tentang pentingnya melestarikan kebudayaan lokal. Di sektor kesehatan, capaian pada periode 2020-2024 terlihat dalam semakin meratanya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk melalui program-program Pemerintah Kota Semarang seperti *Universal Health Coverage* atau UHC.

Partisipasi sosial masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya juga menunjukkan angka yang meningkat. Berbagai program pemberdayaan masyarakat dan kebijakan yang mendukung keterlibatan aktif dalam kegiatan budaya telah mempererat hubungan antar individu dan kelompok, serta mendorong terciptanya suasana sosial yang lebih inklusif dan saling menghargai. Selain itu, pelestarian dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya semakin diperhatikan dalam kebijakan pemerintah dan lembaga budaya. Berbagai kegiatan seperti festival budaya, pelatihan kesenian tradisional, serta pelestarian situs sejarah dan tradisi lokal menjadi bagian penting dalam usaha untuk mempertahankan identitas budaya bangsa.

Secara keseluruhan, capaian kesejahteraan sosial budaya pada periode 2020-2024 mencerminkan kemajuan yang positif dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera, dan berbudaya. Namun, tantangan ke depan tentu masih perlu untuk dihadapi, terutama dalam memastikan keberlanjutan pencapaian tersebut dan mengatasi kesenjangan yang mungkin masih ada di beberapa wilayah di Kota Semarang. Indikator kesejahteraan sosial budaya melibatkan beberapa aspek utama dengan capaian pada tahun 2020-2024 mengikuti berbagai uraian sebagai berikut.

Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemajuan dan peningkatan kualitas hidup suatu masyarakat. Hal ini merefleksikan kondisi ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memberikan peluang yang lebih baik bagi setiap individu untuk berkembang. Salah satu elemen penting dalam mencapai kesejahteraan ekonomi adalah tercapainya

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan terus berkembang akan menciptakan lebih banyak peluang, tidak hanya untuk meningkatkan produksi dan investasi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Aspek kesejahteraan ekonomi mencakup berbagai faktor, seperti peningkatan produktivitas yang akan mendorong efisiensi dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja yang dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, terciptanya lebih banyak pekerjaan akan berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan rumah tangga, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli dan standar hidup masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak akan memberikan manfaat maksimal jika tidak diimbangi dengan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kekayaan dapat menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar dan menghambat tercapainya kesejahteraan yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dalam aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada sektor-sektor lain yang mendukung pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Sebagai contoh, ketidaksetaraan dalam pendapatan dapat membatasi kemampuan sebagian masyarakat untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, yang pada gilirannya memperburuk kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Begitu juga dengan akses terhadap layanan kesehatan, di mana kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah mungkin kesulitan untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak, yang berdampak pada kesehatan fisik dan produktivitas mereka. Oleh karena itu, saat ketimpangan ekonomi dapat teratasi, maka tentu akan berkontribusi pada peningkatan pembangunan manusia secara keseluruhan.

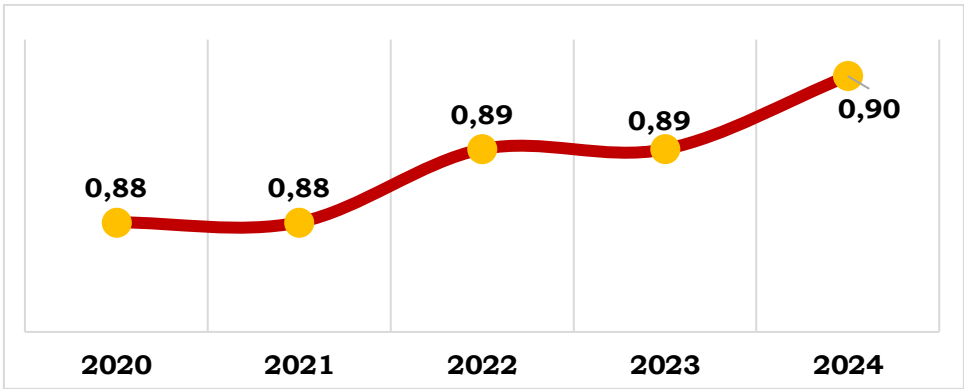
Selain itu, ketimpangan sosial yang timbul akibat ketidaksetaraan ekonomi berpotensi menambah masalah sosial yang lebih kompleks, seperti kemiskinan yang terperangkap dan kesulitan akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat harus mencakup upaya-upaya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga berdampak positif pada seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, pencapaian kesejahteraan ekonomi di Kota Semarang, bisa dilihat melalui beberapa indikator yang mencakup laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, Rasio Gini, dan indeks pembangunan manusia. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai indikator-indikator pencapaian kesejahteraan ekonomi di Kota Semarang selama periode 2020-2024, yang mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara langsung.

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

a. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan di Kota Semarang menunjukkan tren yang semakin meningkat, mencerminkan keberhasilan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan ini tidak

terlepas dari berbagai program strategis yang diterapkan oleh pemerintah daerah, tenaga medis, serta dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat. Adapun capaian indeks kesehatan di Kota Semarang dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut.



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Gambar 2.25 Indeks Kesehatan Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan ini adalah semakin baiknya fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Kota Semarang terus mengembangkan infrastruktur kesehatan dengan menambah jumlah rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang tersebar di berbagai wilayah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, modernisasi alat kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga medis juga turut mendukung pelayanan yang lebih optimal. Selain dari segi fasilitas, program kesehatan masyarakat yang terus digalakkan menjadi faktor pendorong utama. Pemerintah kota secara konsisten melaksanakan program vaksinasi, layanan kesehatan gratis bagi kelompok rentan, serta kampanye pola hidup sehat yang melibatkan masyarakat luas. Upaya ini bertujuan untuk tidak hanya mengobati penyakit, tetapi juga mencegah munculnya berbagai masalah kesehatan yang dapat menghambat kualitas hidup warga.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan juga semakin meningkat. Edukasi mengenai pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, serta pentingnya olahraga secara rutin telah mendorong perubahan gaya hidup yang lebih baik. Masyarakat kini lebih peduli terhadap kesehatan mereka sendiri dan keluarga, sehingga turut membantu menekan angka kasus penyakit yang sebelumnya cukup tinggi di beberapa wilayah. Di sisi lain, faktor lingkungan juga berperan penting dalam peningkatan indeks kesehatan ini. Semakin baiknya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai telah membantu mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kurang higienis. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada kesehatan masyarakat, seperti penyediaan fasilitas kebugaran, taman kota, jalur pedestrian yang nyaman, dan jalur sepeda turut memberikan dampak positif dalam mendorong masyarakat untuk lebih aktif secara fisik.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang lebih sehat. Program-program kesehatan yang dirancang dengan baik, ditambah dengan dukungan teknologi dan inovasi di bidang medis, semakin memperkuat fondasi

kesehatan masyarakat di Kota Semarang. Dengan tren yang terus meningkat ini, Kota Semarang semakin membuktikan diri sebagai kota yang tidak hanya berkembang secara ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup penduduknya.

Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan di beberapa wilayah. Meskipun fasilitas kesehatan terus bertambah, masih ada daerah tertentu yang membutuhkan peningkatan dalam hal ketersediaan tenaga medis, alat kesehatan, serta infrastruktur penunjang. Perlu adanya strategi yang lebih merata untuk memastikan bahwa setiap warga, baik di pusat kota maupun di daerah pinggiran, mendapatkan layanan kesehatan yang setara. Selain itu, meskipun kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat meningkat, masih ada tantangan dalam mengubah kebiasaan yang berisiko bagi kesehatan, seperti pola makan tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, serta rendahnya kesadaran terhadap pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kampanye edukasi kesehatan perlu terus diperkuat dengan pendekatan yang lebih inovatif dan berbasis komunitas agar dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Dari segi lingkungan, meskipun akses air bersih dan sanitasi telah mengalami peningkatan, tetap diperlukan upaya untuk menjaga keberlanjutan dan kualitasnya. Program pengelolaan limbah, pengurangan polusi udara, serta penghijauan kota perlu terus dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang. Dengan terus melakukan perbaikan dan inovasi di berbagai aspek ini, Kota Semarang memiliki peluang besar untuk tidak hanya mempertahankan peningkatan indeks kesehatan, tetapi juga menjadi model kota sehat yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.

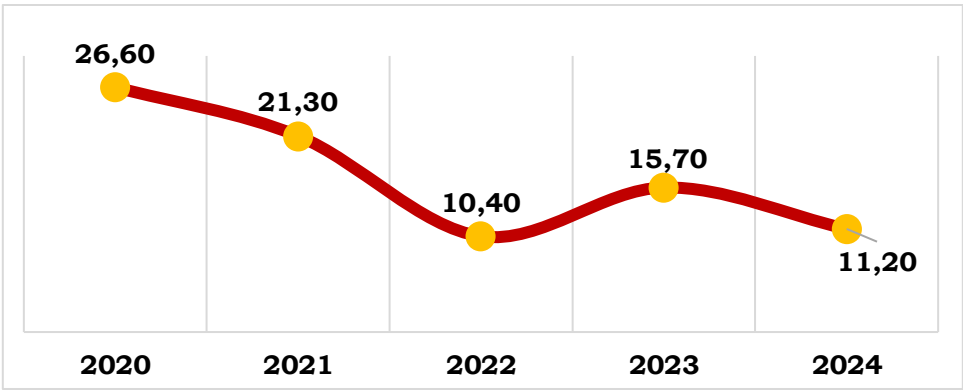
b. Prevalensi Stunting

Di tengah kemajuan urbanisasi dan modernisasi yang pesat, Kota Semarang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan terkait kesehatan masyarakat. Salah satu isu yang terus menjadi perhatian utama adalah prevalensi stunting pada anak-anak. Stunting, yang mengacu pada kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak, yang berujung pada kualitas hidup yang rendah di masa depan. Berdasarkan data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Semarang masih menjadi masalah yang serius, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menguranginya. Meskipun ada penurunan prevalensi stunting dalam beberapa tahun terakhir, namun angka ini masih perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat dampaknya yang dapat mempengaruhi generasi emas di masa depan.

Pemerintah Kota Semarang telah meluncurkan sejumlah inisiatif dan program yang dirancang untuk menanggulangi stunting yang di antaranya adalah Rumah Pelita. Rumah ini merupakan daycare sebagai wujud implementasi penanganan stunting yang memadukan lima pilar dasar penanganan, yang di antaranya adalah komitmen pimpinan, sosialisasi dan komunikasi, konvergensi dan koordinasi program pusat dan daerah,

ketahanan pangan dan gizi, serta pemantauan evaluasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak yang rentan terhadap stunting, baik di rumah tangga dengan status ekonomi rendah, maupun yang ada di daerah akses terbatas ke pangan bergizi.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pendidikan gizi bagi ibu hamil dan menyusui sebagai bagian dari upaya preventif. Upaya peningkatan akses ke layanan kesehatan juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi stunting. Hasil dari upaya ini, meskipun progresnya tidak selalu linear, menunjukkan penurunan prevalensi stunting dari tahun ke tahun. Data yang tercatat dari SSGI menggambarkan adanya penurunan yang signifikan dalam angka prevalensi stunting, meskipun tantangan untuk menurunkannya lebih lanjut masih terus dihadapi. Secara keseluruhan, meskipun langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan hasil yang positif, penurunan prevalensi stunting di Kota Semarang masih memerlukan upaya bersama yang berkelanjutan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Melalui kolaborasi yang lebih kuat, diharapkan Kota Semarang dapat mencapai target penurunan stunting yang lebih signifikan, serta menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Adapun angka prevalensi stunting dari tahun ke tahun mengikuti data sebagai berikut.



Sumber: SSGI, 2025

Gambar 2.26 Prevalensi Stunting Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Persen)

Pada tahun 2024, prevalensi stunting di Kota Semarang tercatat sebesar 11,2%. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka ini masih jauh dari harapan, yaitu 0%, untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Kota Semarang masih memiliki tugas besar untuk menurunkan angka stunting lebih lanjut. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi stunting di Kota Semarang antara lain ketidakmerataan distribusi sumber daya dan layanan kesehatan, serta pola makan yang tidak seimbang, terutama di kalangan keluarga dengan pendapatan rendah. Keterbatasan akses terhadap makanan bergizi dan pengetahuan gizi yang kurang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Pada tahun 2025 ini, delapan sekolah di Kota Semarang sudah mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis sebagai program untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Adapun sekolah yang menjadi pilot project ini meliputi tingkat Taman Kanak-Kanak

hingga Sekolah Menengah. Di sisi lain, untuk mengatasi stunting, peningkatan ekonomi keluarga, penyuluhan kesehatan yang lebih luas, dan perbaikan infrastruktur kesehatan di daerah-daerah yang kurang terlayani sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan sangat berpengaruh dalam menurunkan prevalensi stunting.

Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, seperti memperluas program pemberian makanan bergizi, edukasi gizi untuk ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan akses layanan kesehatan, diharapkan Kota Semarang dapat mengurangi angka stunting secara signifikan. Hal ini akan berdampak positif pada kesejahteraan anak-anak di kota ini dan mendukung generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

c. Indikator Terkait Tuberkulosis

Terdapat peningkatan cakupan penemuan kasus TBC di Kota Semarang. Masalah utama yang dihadapi adalah ketidakmerataan distribusi layanan kesehatan. Banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan perawatan karena jauh dari pusat layanan kesehatan atau karena masalah biaya. Selain itu, meskipun ada program pengobatan gratis, tingkat keberhasilan pengobatan TBC masih perlu ditingkatkan, karena sebagian pasien kesulitan dalam mengikuti pengobatan yang berlangsung lama.

Program deteksi dini dan pengobatan gratis yang ada telah menunjukkan hasil positif dengan lebih banyak penderita TBC yang terdeteksi dan dirawat. Namun, masih ada tantangan dalam meningkatkan angka keberhasilan pengobatan, terutama karena ketidakpatuhan pasien dalam melanjutkan terapi hingga selesai. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut, seperti memperkuat penyuluhan kepada masyarakat dan meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah yang kurang terlayani. Adapun capaian cakupan penemuan dan pengobatan TBC, serta angka keberhasilan kasus TBC, mengikuti beberapa uraian sebagai berikut.

Tabel 2.23 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TBC
Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TBC	%	62,10	93,90	98,10	96,72	103,70
2	Angka Keberhasilan Kasus TBC	%	78,40	81,80	81,80	99,80	81,50

Sumber: DKK Kota Semarang, 2025

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC yang mencapai 103,70%, tetapi angka keberhasilan pengobatan hanya 81,50%. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kasus yang terdeteksi dan jumlah pasien yang berhasil sembuh. Angka penemuan dan pengobatan kasus TBC yang melebihi 100% menandakan bahwa lebih banyak kasus terdeteksi daripada jumlah kasus TBC yang diperkirakan. Hal ini dapat terjadi berkat adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan akses yang lebih baik pada layanan kesehatan. Namun, angka keberhasilan pengobatan yang hanya 81,50% menunjukkan bahwa meskipun banyak penderita TBC yang ditemukan, tidak semua dari mereka berhasil menyelesaikan pengobatan dengan tuntas.

Beberapa implikasi dari adanya capaian pada dua indikator ini adalah kemungkinan adanya ketidakpatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Pasien yang merasa sudah merasa lebih baik atau kurang merasa gejalanya bisa saja menghentikan pengobatannya sebelum selesai, yang berisiko menyebabkan kekambuhan atau resistensi obat. Selain itu, angka keberhasilan yang lebih rendah ini juga bisa mencerminkan adanya kendala dalam kualitas pelayanan kesehatan, seperti akses yang terbatas ke obat-obatan yang tepat atau pemantauan pengobatan yang kurang intensif. Selain itu, situasi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan dan memastikan bahwa pengobatan diberikan secara konsisten dan berkualitas. Di sisi lain, perlu ada evaluasi terhadap sistem kesehatan untuk melihat apakah semua pasien mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari segi edukasi, akses, maupun pemantauan secara berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun penemuan kasus meningkat, perhatian khusus harus diberikan pada penguatan sistem pengobatan untuk memastikan angka keberhasilan yang lebih tinggi di masa depan.

Peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, terutama puskesmas dan posyandu di daerah yang sulit dijangkau, perlu dilakukan agar pemeriksaan dan pengobatan dapat lebih merata. Selain itu, penyuluhan tentang pentingnya pengobatan tuntas dan deteksi dini TBC harus digencarkan, terutama di kalangan masyarakat yang kurang memiliki pemahaman tentang penyakit ini. Dalam hal ini, kolaborasi yang erat antara pemerintah, tenaga medis, organisasi masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memperkuat infrastruktur kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan bahwa masyarakat tidak merasa ragu atau terstigma dalam mengakses pengobatan TBC. Dengan komitmen yang berkelanjutan dan sinergi antara berbagai pihak, Kota Semarang dapat terus mengurangi angka kasus TBC dan pada akhirnya mencapai target untuk menekan prevalensi penyakit ini secara signifikan. Hal ini akan berdampak positif pada kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan kota yang lebih sehat secara keseluruhan.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan di Kota Semarang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun yang mencerminkan kemajuan signifikan dalam sektor Pendidikan.

Tabel 2.24 Indeks Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	RLS	Tahun	10,53	10,78	10,80	10,81	11,05
2	HLS	Tahun	15,52	15,53	15,54	15,55	15,57
3	Indeks Pendidikan	Angka	0,782	0,791	0,791	0,792	0,801

Sumber: BPS diolah, 2025

Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari semakin banyaknya anak-anak yang mengakses pendidikan, tetapi juga dari kualitas pendidikan yang terus membaik. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap tren positif ini antara lain adalah peningkatan akses pendidikan di seluruh wilayah, yang

membuat lebih banyak anak, termasuk dari keluarga kurang mampu atau daerah pinggiran yang mendapatkan kesempatan untuk belajar.

Selain itu, kualitas pengajaran yang semakin baik juga menjadi kunci utama dalam perbaikan indeks pendidikan. Dengan program peningkatan kompetensi bagi para guru melalui sertifikasi kompetensi, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, proses pendidikan menjadi lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Hal ini memberikan dampak langsung pada pencapaian hasil belajar yang lebih baik bagi para siswa.

Peningkatan fasilitas pendidikan seperti pengembangan SMP 45 Semarang, perubahan SMP Filial Negeri 20 menjadi SMP Negeri 48, maupun rehabilitasi SMP 16 Semarang juga berkontribusi pada peningkatan nilai RLS dan HLS yang juga dapat pula mendukung indeks pendidikan. Upaya ini juga berperan besar dalam mendukung perbaikan indeks pendidikan di Kota Semarang. Fasilitas yang lebih baik, seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, dan akses internet, memungkinkan siswa untuk belajar dengan lebih nyaman dan mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Pemerintah yang terus berupaya menyediakan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung pendidikan turut memberikan kontribusi terhadap pencapaian ini seperti beasiswa untuk siswa kurang mampu maupun sekolah swasta gratis.

b. Rerata Skor Literasi dan Numerasi

Skor literasi dan numerasi tersedia pada Rapor Pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rapor Pendidikan dirilis sejak tahun 2022. Adapun capaian skor literasi dan numerasi dari tahun ke tahun mengikuti tabel sebagai berikut.

Tabel 2.25 Skor Literasi dan Numerasi Peserta Didik Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor Literasi SD Sederajat	Angka	NA	NA	65,230	65,225	75,305
2	Skor Literasi SMP Sederajat	Angka	NA	NA	57,370	54,240	70,100
3	Skor Numerasi SD Sederajat	Angka	NA	NA	42,050	64,180	69,840
4	Skor Numerasi SMP Sederajat	Angka	NA	NA	42,460	65,540	79,015

Sumber: Kemendikbud RI diolah, 2025

Berdasarkan data yang dihimpun dari Rapor Pendidikan dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, rerata kemampuan literasi SD umum di Kota Semarang memiliki angka yang lebih tinggi jika dibandingkan SD lainnya, dengan rerata kemampuan literasi SD untuk semua jenjang baik itu umum, keagamaan, SLB dan kesetaraan adalah sebesar 75,305. Angka ini meningkat dari tahun 2023 yang hanya mencapai 65,225. Kemampuan numerasi SD kesetaraan di Kota Semarang memiliki angka yang lebih besar daripada SD lainnya, dengan rerata kemampuan numerasi SD untuk semua jenjang baik umum, keagamaan, SLB dan kesetaraan yang mencapai 69,84. Angka ini meningkat dari tahun 2023 yang hanya mencapai 64,18.

Dari kemampuan numerasi pada tahun 2024 terlihat bahwa rerata kemampuan literasi SMP umum lebih besar dibandingkan jenjang lainnya, dengan skor rerata literasi SMP pada semua jenjang baik itu umum, keagamaan, SLB dan kesetaraan yang mencapai 79,015. Angka ini meningkat

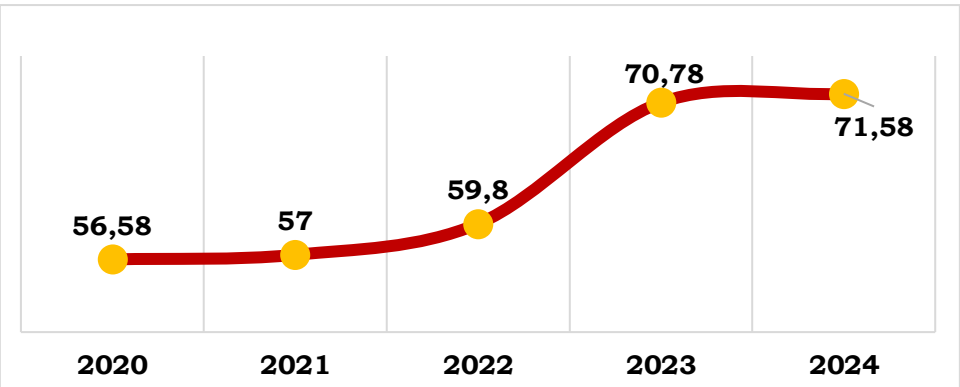
dari tahun 2023 yang hanya mencapai 65,54. Kemampuan numerasi SMP umum di Kota Semarang memiliki angka yang lebih besar daripada SMP lainnya, dengan rerata kemampuan numerasi SMP untuk semua jenjang baik umum, keagamaan, SLB dan kesetaraan yang mencapai 70,10. Angka ini meningkat dari tahun 2023 yang hanya mencapai 54,24. Peningkatan skor literasi dan numerasi pada jenjang SD maupun SMP mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan dan program pendidikan yang telah diterapkan, baik oleh pemerintah daerah, sekolah, maupun pihak terkait lainnya.

Faktor utama yang mendorong peningkatan ini adalah meningkatnya kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan serta penggunaan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif. Selain itu, dukungan dari sarana dan prasarana yang lebih baik, seperti perpustakaan yang memadai, akses terhadap teknologi pendidikan, serta lingkungan belajar yang kondusif, juga berperan besar dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dan berhitung. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa kurikulum yang diterapkan semakin relevan dengan kebutuhan peserta didik, terutama dalam memperkuat keterampilan dasar yang menjadi pondasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan adanya tren positif ini, Kota Semarang semakin memperkuat posisinya sebagai kota yang memiliki perhatian tinggi terhadap kualitas pendidikan. Ke depan, diharapkan peningkatan ini terus berlanjut dengan inovasi dan kebijakan yang semakin efektif dalam mendukung terciptanya generasi yang cerdas, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan global.

Walau demikian, perlu upaya lebih lanjut agar skor literasi dan numerasi dapat terus meningkat, sehingga seluruh peserta didik di Kota Semarang memiliki keterampilan dasar yang lebih kuat dalam membaca dan berhitung. Peningkatan ini penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mampu memahami teks dan angka secara akademis, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja di masa depan.

c. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Berdasarkan data yang dihimpun dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, IPLM Kota Semarang menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Semarang dalam memperkuat akses masyarakat terhadap sumber-sumber informasi melalui berbagai fasilitas perpustakaan yang ada. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari berbagai program yang diluncurkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas literasi masyarakat, termasuk penyediaan buku, pelatihan literasi digital, serta pengembangan perpustakaan di berbagai kecamatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.



Sumber: Perpustakaan Nasional RI (2023)

Gambar 2.27 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

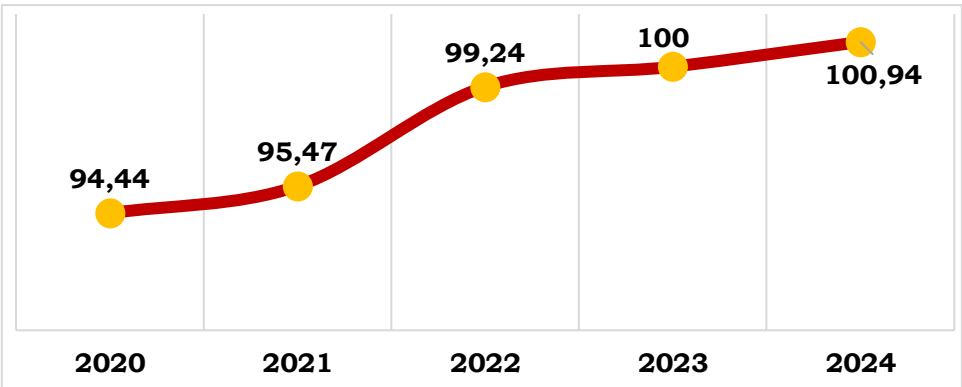
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa capaian pada tahun 2024 adalah 71,58%, naik 0,80 dari tahun 2023. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Semarang hingga tahun 2024 telah mengakomodir masyarakat akan kebutuhan membaca, baik secara offline melalui layanan terpadu, perpustakaan keliling, kunjungan inlist, maupun daring melalui fitur Si-Booky. Meskipun demikian, peningkatan literasi masyarakat tetap harus dilakukan. Hal ini dikarenakan literasi masyarakat merupakan kunci untuk perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan literasi, kita dapat memberdayakan individu untuk membuat keputusan yang lebih baik, berkontribusi lebih banyak pada masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Upaya ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan individu.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan di Kota Semarang mencakup upaya Pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang layak dan terjangkau. Program ini diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan warga Kota Semarang melalui sistem jaminan sosial kesehatan yang terintegrasi. Jaminan sosial kesehatan di Semarang berfokus pada penerapan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan sebagai lembaga penyelenggara. Melalui program ini, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan akses kesehatan antarlapisan masyarakat, dengan memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh peserta, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal.

Pemerintah Kota Semarang terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ini, baik melalui penyuluhan dan sosialisasi yang lebih masif, maupun kebijakan yang memudahkan akses kepesertaan bagi mereka yang kurang mampu. Adapun capaian cakupan jaminan sosial kesehatan adalah sebagai berikut.



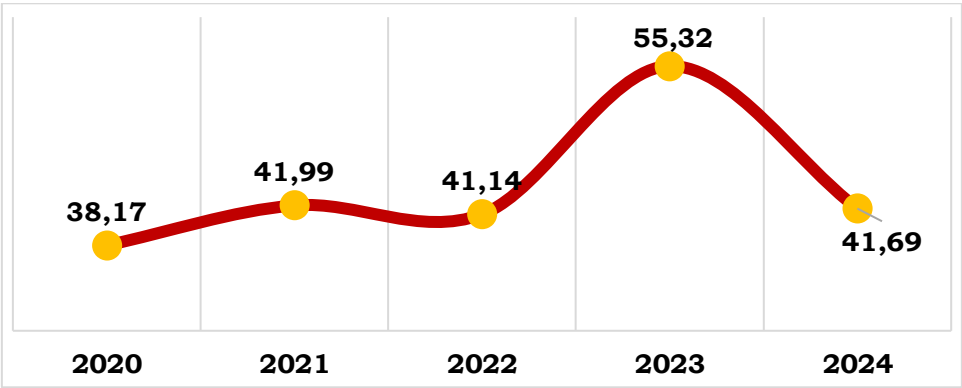
Sumber: DKK Kota Semarang, 2025

Gambar 2.28 Cakupan Jaminan Sosial Kesehatan Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Semarang mencapai angka 100,94%, yang artinya lebih dari 100% dari total jumlah penduduk terdaftar sebagai peserta. Namun, meskipun cakupan kepesertaan terlihat tinggi, angka peserta aktif hanya mencapai 81,37%, sementara peserta non-aktif tercatat sebesar 19,57%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah orang yang terdaftar JKN dan jumlah orang yg Kepesertaan JKN benar-benar aktif. Angka peserta non-aktif yang cukup tinggi ini mengindikasikan bahwa meskipun banyak orang yang terdaftar sebagai peserta JKN, tidak semua orang dapat mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

b. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan sosial bagi para pekerja di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja melalui berbagai program jaminan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Di Kota Semarang, upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan ini menjadi sangat relevan mengingat jumlah angkatan kerja yang terus berkembang dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat guna memastikan semua pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun capaian jaminan sosial tenaga kerja di Kota Semarang mengikuti tabel sebagai berikut.



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pemuda Kota Semarang, 2024

Gambar 2.29 Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Semarang menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka kepesertaan mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, dengan capaian sebesar 55,32% dibandingkan tahun 2022 yang hanya 41,14%. Akan tetapi, pada tahun 2024 terjadi penurunan cakupan kepesertaan yang cukup besar, dengan angka yang turun menjadi 41,69%. Penurunan ini mencerminkan tantangan yang masih dihadapi dalam memperluas perlindungan sosial bagi tenaga kerja, terutama di sektor tertentu seperti pekerja rentan dan informal.

Penurunan tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan pada tahun sebelumnya, masih banyak pekerja yang belum terjangkau oleh program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran sebagian pekerja dan pemberi kerja tentang pentingnya perlindungan sosial, serta adanya kendala dalam pelaksanaan pembayaran iuran yang mungkin tidak diikuti dengan konsistensi atau kepatuhan yang tinggi. Selain itu, tingginya angka PHK juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan angka cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Semarang pada tahun 2024. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, diketahui bahwa angka PHK pada tahun 2024 mencapai 3.909 orang. Meningkat tajam jika dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 2.791 orang. Hal ini sebagai dampak dari adanya perang Rusia yang menyebabkan barang yang diproduksi oleh pekerja di Kota Semarang menjadi tidak laku, sehingga beban perusahaan menjadi lebih besar dan menyebabkan angka PHK menjadi tinggi.

PHK yang tinggi mengakibatkan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan dan secara otomatis terputus dari perlindungan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Banyak di antara mereka yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta, sehingga mempengaruhi angka cakupan kepesertaan. Bagi pekerja yang terkena PHK, proses transisi dari status pekerja aktif ke pencari kerja sering kali menemui berbagai hambatan, termasuk ketidakpastian mengenai status kepesertaan mereka dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Banyak dari mereka yang mungkin belum tahu atau tidak dapat mengakses informasi mengenai cara melanjutkan kepesertaan setelah kehilangan pekerjaan. Ditambah lagi, ketidakmampuan untuk membayar iuran secara mandiri sering kali menjadi faktor utama setiap masyarakat tersebut tidak dapat melanjutkan perlindungan sosial Jamsostek.

Oleh karena itu, selain upaya untuk merambah sektor informal dan pekerja rentan, penting juga bagi Pemerintah Kota Semarang dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perhatian lebih pada pekerja yang terkena dampak PHK. Program yang mendukung pekerja dalam transisi menuju pekerjaan baru, seperti mempermudah pendaftaran kembali ke dalam program Jamsostek atau memberikan subsidi iuran untuk mereka yang menganggur, bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi penurunan cakupan ini.

Selanjutnya, selain untuk pekerja formal, ke depan, sangat dibutuhkan upaya yang lebih maksimal dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota

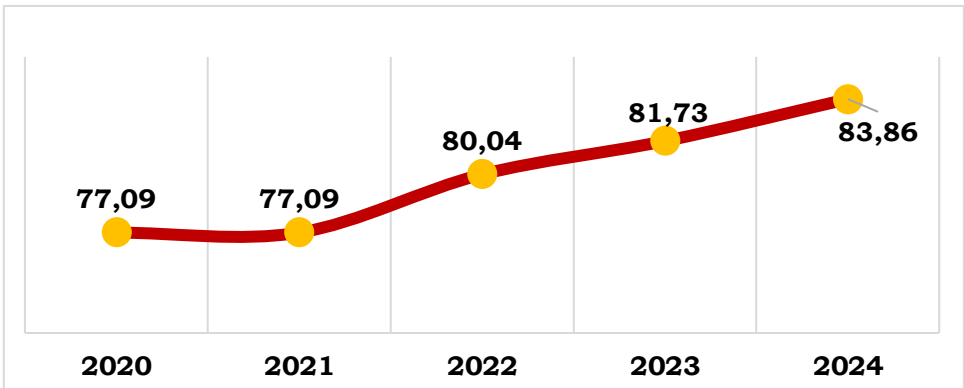
Semarang untuk memastikan perlindungan sosial ini dapat merambah lebih luas, terutama bagi sektor informal dan pekerja rentan.

Pemerintah Kota Semarang bersama dengan penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan harus berkolaborasi lebih erat untuk meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat, serta membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif yang memungkinkan pekerja pada sektor formal dan pekerja rentan dapat memperoleh jamsostek melalui pembayaran iuran dengan skema APBD.

Hasil dari pendataan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, diketahui bahwa terdapat 8.747 orang yang merupakan pekerja rentan dan ke depan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang tentang perlindungan pekerja rentan melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan penyusunan Keputusan Wali Kota Semarang tentang penetapan jenis pekerja rentan dan data pekerja rentan, untuk kemudian dapat dianggarkan bertahap setiap tahun mengikuti kemampuan fiskal di Kota Semarang, maupun dengan keterlibatan pegawai pemerintah dalam Gerakan PNS Peduli.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Indeks Kerukunan Umat Beragama



Sumber: Badan Kesbangpol Kota Semarang, 2025

Gambar 2.30 Indeks Kerukunan Agama Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

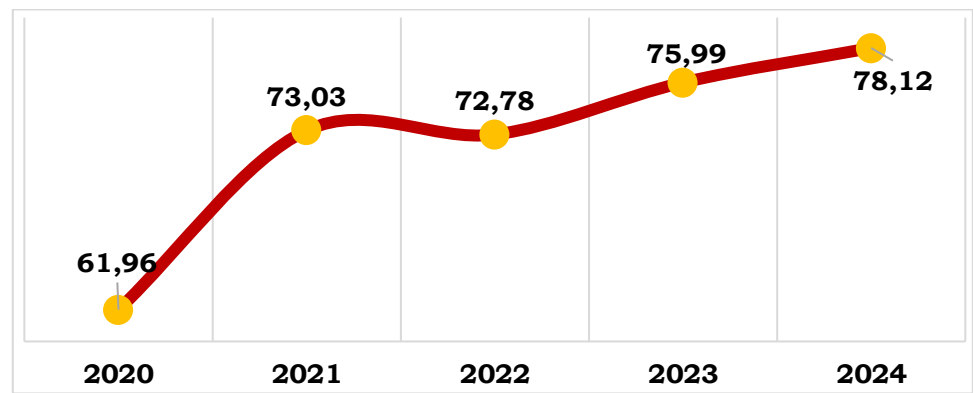
IKUB Kota Semarang mengalami peningkatan dari 80,04 pada tahun 2022 menjadi 81,73 pada tahun 2023 dan 83,86 pada tahun 2024. Adanya peningkatan IKUB ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah mampu mendukung kebebasan beragama dan melindungi hak-hak minoritas, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan inklusif. Peningkatan IKUB ini juga turut mengindikasikan bahwa masyarakat semakin mampu hidup berdampingan secara harmonis, meskipun memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda.

Pemerintah daerah perlu terus memperkuat kebijakan yang mendukung kerukunan, seperti program-program yang memfasilitasi dialog antar agama dan pencegahan konflik. Selain itu, aktivitas lintas agama yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang juga harus lebih sering diadakan, guna mempererat hubungan antar umat beragama.

b. Nilai Kemajuan Kebudayaan

Nilai Kemajuan Kebudayaan adalah nilai upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memajukan kebudayaan daerah untuk mengukur kinerja

pembangunan kebudayaan. Sebagai kota yang memiliki sejarah panjang dan beragam kebudayaan, Kota Semarang telah lama menjadi salah satu pusat kebudayaan di Jawa Tengah. Oleh karena itu, nilai kebudayaan Kota Semarang mencakup berbagai dimensi yang menggambarkan keberagaman dan dinamisnya kehidupan budaya di Kota Semarang ini. Capaian nilai kemajuan kebudayaan di Kota Semarang berdasarkan hasil perhitungan mandiri mengikuti uraian sebagai berikut.



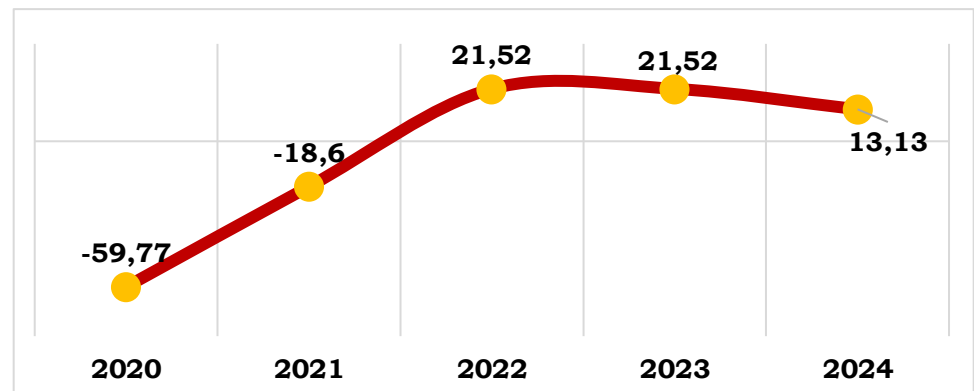
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Gambar 2.31 Nilai Kemajuan Kebudayaan Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Nilai Kemajuan Kebudayaan Kota Semarang menggambarkan peningkatan dari 2020 sampai 2024 mengacu pada apresiasi dan pelestarian budaya Kota Semarang yang semakin baik. Hal ini terlihat dari upaya revitalisasi kawasan bersejarah seperti Kota Lama, serta pengakuan berbagai warisan budaya tak benda (WBTB) kota ini. Selain itu, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan juga menjadi indikator positif kemajuan budaya Semarang.

c. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata

Persentase peningkatan kunjungan wisata adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan pertumbuhan jumlah wisatawan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya yang memberikan gambaran tentang perkembangan sektor pariwisata di suatu daerah dan dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran, daya tarik destinasi wisata, serta dampak berbagai kebijakan atau *event* terhadap jumlah wisatawan yang berkunjung. Capaian persentase peningkatan kunjungan wisata ditunjukkan pada table berikut.



Sumber: Disbudpar Kota Semarang, 2025

Gambar 2.32 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Persen)

Persentase peningkatan kunjungan wisata dari tahun ke tahun menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan dibandingkan dengan tahun 2021, di mana sektor pariwisata masih terpuruk akibat dampak pandemi COVID-19. Seiring dengan pelonggaran kebijakan perjalanan dan pemulihan ekonomi, wisatawan kembali berdatangan, menyebabkan peningkatan yang tajam. Namun, pada tahun 2024, angka pertumbuhan kunjungan wisata mengalami perlambatan, dengan tingkat peningkatan hanya sebesar 13,13%. Fenomena ini menunjukkan bahwa setelah fase pemulihan yang pesat, pertumbuhan sektor pariwisata mulai mengalami stabilisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi perlambatan ini antara lain perubahan tren perjalanan wisatawan, daya beli masyarakat, kondisi ekonomi global, serta persaingan dengan destinasi wisata lain. Selain itu, tingkat kejenuhan pasar dan pola preferensi wisatawan yang semakin selektif dalam memilih destinasi juga dapat berperan dalam perubahan angka kunjungan.

Meskipun demikian, perlambatan ini tidak berarti sektor pariwisata mengalami kemunduran, melainkan menjadi tantangan untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, serta seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat strategi pengembangan destinasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memanfaatkan pemasaran digital untuk menarik lebih banyak wisatawan. Upaya seperti diversifikasi produk wisata, peningkatan infrastruktur, serta penyelenggaraan *event* berskala nasional dan internasional dapat menjadi solusi untuk mempertahankan daya tarik Kota Semarang sebagai destinasi wisata unggulan. Dengan langkah yang tepat, sektor pariwisata tetap dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

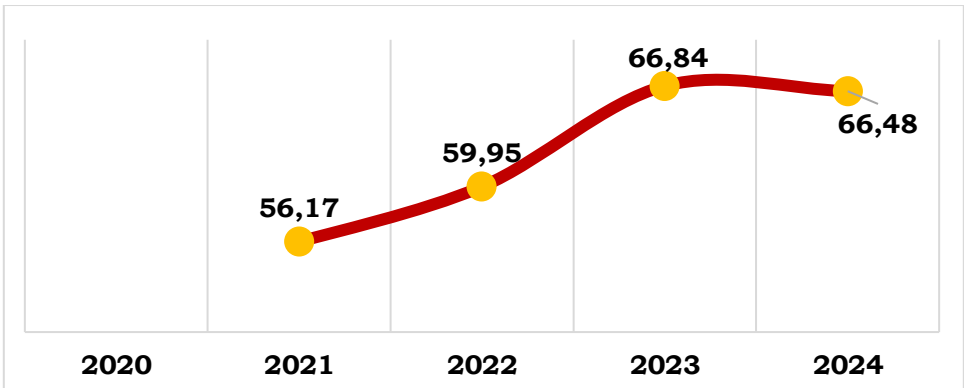
2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Kota Semarang menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif yaitu pembangunan yang merata dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kelompok tertentu, guna menciptakan tatanan sosial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan, dengan menekankan penguatan peran keluarga sebagai fondasi masyarakat, pemberdayaan perempuan dan laki-laki secara setara, menjamin pembangunan yang layak bagi anak-anak sampai dengan lanjut usia, memperhatikan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus, serta penghormatan terhadap keberagaman tanpa diskriminasi. Pembangunan inklusif di Kota Semarang didukung oleh pencapaian beberapa indikator yang menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pembangunan.

a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga iBangga digunakan untuk menggambarkan tingkat peran dan fungsi keluarga dalam masyarakat, serta bagaimana kondisi keluarga dapat berkontribusi terhadap pembangunan suatu daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 3 Tahun 2022, yang mengatur mengenai sistem penilaian pembangunan keluarga. Nilai iBangga diukur sejak tahun 2021, memiliki peran penting dalam mengklasifikasikan

status pembangunan keluarga di suatu wilayah, yang dapat digolongkan ke dalam kategori tangguh, berkembang, atau rentan. Penilaian ini berdasarkan tiga dimensi utama yang mencakup ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Adapun capaian iBangga Kota Semarang mengikuti tabel sebagai berikut.



Sumber: BKKBN RI, 2025

Gambar 2.33 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

iBangga di Kota Semarang mengalami peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya, namun pada tahun 2024 cenderung menurun sedikit menjadi 66,48. Meskipun ada penurunan, angka ini tidak terlalu signifikan dan masih berada dalam rentang yang cukup baik, yaitu di angka 66,00. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, kualitas kehidupan keluarga di Kota Semarang secara keseluruhan masih berada pada tingkat yang memadai dan stabil. Penurunan kecil ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi sosial-ekonomi, ketimpangan dalam distribusi program-program pemberdayaan keluarga, atau hambatan dalam implementasi kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga. Namun, karena penurunan ini tidak terlalu besar, hal ini juga mencerminkan bahwa keluarga di Kota Semarang masih cukup tangguh dan mampu menjaga kesejahteraan mereka meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan yang relatif kecil, angka 66,48 tetap menunjukkan bahwa pembangunan keluarga di Kota Semarang berada pada jalur yang cukup baik. Ini memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut guna memastikan bahwa keluarga-keluarga di Kota Semarang tetap dapat berkembang secara mandiri, harmonis, dan bahagia. Pemerintah dan lembaga terkait dapat terus berfokus pada peningkatan kualitas hidup keluarga dengan memperkuat program-program yang mendukung ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga agar dapat menghadapi tantangan yang ada dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

b. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan

antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

IPG Kota Semarang mulai mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, hal ini disebabkan karena AHH perempuan merupakan satu-satunya variabel IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan AHH laki-laki, sedangkan variabel komposit lainnya lebih rendah. Pada tahun 2021, IPG kembali meningkat menjadi sebesar 95,67% dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 95,93% dan 2023 mencapai 95,96%. Pencapaian IPG Kota Semarang selalu melebihi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kota lain yang setara, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional mengikuti tabel sebagai berikut.

Tabel 2.26 Perbandingan IPG Kota Semarang dengan Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

NO	KAB/KOTA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Semarang	Angka	95,49	95,67	95,93	95,96	96,37
2	Bandung	Angka	94,68	94,72	94,81	95,24	94,87
3	Surabaya	Angka	93,58	93,90	94,21	95,36	95,53
4	Medan	Angka	94,00	93,76	93,85	94,13	94,49
5	Makassar	Angka	94,47	94,44	94,52	94,65	94,99
6	Yogyakarta	Angka	98,16	98,32	98,48	98,47	98,65
7	Jawa Tengah	Angka	92,18	92,48	92,83	92,87	93,00
8	Nasional	Angka	91,06	91,27	91,63	91,85	91,85

Sumber: BPS Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Kota Semarang memiliki angka realisasi IPG yang termasuk tinggi yaitu 96,37% dibanding kota setara yang angkanya di bawah realisasi Kota Semarang dan hanya mengalahkan Yogyakarta yang angkanya mencapai 98,65%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang telah berhasil mencapai tingkat kesetaraan dan keadilan gender yang lebih baik jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Pencapaian ini mencerminkan adanya upaya yang lebih signifikan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender ke dalam kebijakan publik dan sosial, serta memperlihatkan kemajuan dalam memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

Dengan adanya kebijakan yang mendukung, masyarakat di Kota Semarang kini dapat merasakan manfaat dari lingkungan yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan mendapatkan hak-haknya secara setara. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah dengan melalui program-program penyuluhan yang menyasar berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga pekerja, dengan tujuan untuk menghilangkan stereotip dan diskriminasi berbasis gender.

c. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Semarang yang terus menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun adalah sebuah indikator positif dari perubahan sosial yang sedang berlangsung di kota ini. Penurunan IKG ini mencerminkan usaha kolektif yang berhasil menciptakan peluang yang lebih setara bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai sektor kehidupan. Hal ini bukan hanya sekedar angka, tetapi juga menggambarkan

transformasi yang lebih dalam dalam pola pikir masyarakat, kebijakan pemerintah, dan implementasi program-program yang mendukung kesetaraan gender. Adapun capaian indikator ketimpangan gender mengikuti tabel sebagai berikut

Tabel 2.27 Indeks Ketimpangan Gender Kota Semarang, Kota Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

NO	KAB/KOTA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Semarang	Angka	0,160	0,140	0,270	0,170	0,140
2	Bandung	Angka	0,390	0,350	0,360	0,275	0,244
3	Surabaya	Angka	0,160	0,206	0,230	0,128	0,171
4	Medan	Angka	0,320	0,320	0,280	0,232	0,160
5	Makassar	Angka	0,330	0,1980	0,188	0,186	0,356
6	Yogyakarta	Angka	0,170	0,270	0,244	0,151	0,167
7	Jawa Tengah	Angka	0,370	0,380	0,370	0,336	0,308
8	Nasional	Angka	0,490	0,470	0,460	0,447	0,421

Sumber: BPS, 2024

Di Kota Semarang, semakin banyak perempuan yang memiliki akses untuk mengenyam pendidikan dengan lebih mudah dan merata. Bahkan, dalam banyak kasus, perempuan kini mendominasi jumlah lulusan di tingkat perguruan tinggi, yang secara tidak langsung mengurangi ketimpangan dalam bidang akademis.

Dalam dunia kerja, perempuan semakin diakui kontribusinya, baik sebagai pekerja di sektor formal maupun sebagai pelaku usaha. Program pemberdayaan ekonomi yang mendukung perempuan untuk mandiri secara finansial dan berpartisipasi aktif dalam sektor ekonomi telah memperlihatkan hasil yang sangat menggembirakan. Banyak perempuan di Kota Semarang yang kini memimpin usaha mereka sendiri, baik itu usaha kecil, menengah, ataupun besar, yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Berbagai pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, serta kebijakan yang mendukung perempuan dalam dunia kerja dan kewirausahaan semakin memperkuat posisi perempuan dalam perekonomian lokal.

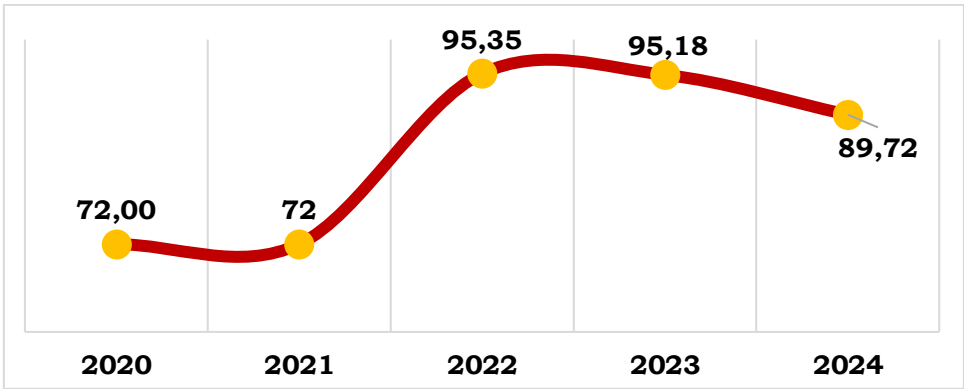
Selain itu, partisipasi perempuan pada lembaga legislatif juga meningkat dari periode sebelumnya. Pada periode 2019-2024, partisipasi perempuan hanya mencapai 18%, sedangkan pada periode 2024-2029, partisipasi perempuan meningkat mencapai 26%. Partisipasi aktif ini tidak hanya mendukung kesetaraan gender, tetapi juga memperkaya kebijakan dengan perspektif yang lebih inklusif dan beragam.

Secara keseluruhan, penurunan indeks ketimpangan gender di Kota Semarang adalah sebuah langkah maju yang menunjukkan bahwa kota ini semakin menuju masyarakat yang inklusif dan setara. Dengan terus mendukung dan memperkuat langkah-langkah tersebut, Kota Semarang bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam menciptakan kesetaraan gender yang lebih baik.

d. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi merupakan alat ukur yang memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Indeks ini diukur oleh Badan Pusat Statistik pada tingkat Nasional dan Provinsi sampai tahun 2021, yang kemudian diukur pada tingkat Kabupaten/Kota pada tahun 2020. Melalui

penilaian terhadap kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi, indeks ini mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun capaian indeks demokrasi di Kota Semarang adalah sebagai berikut.



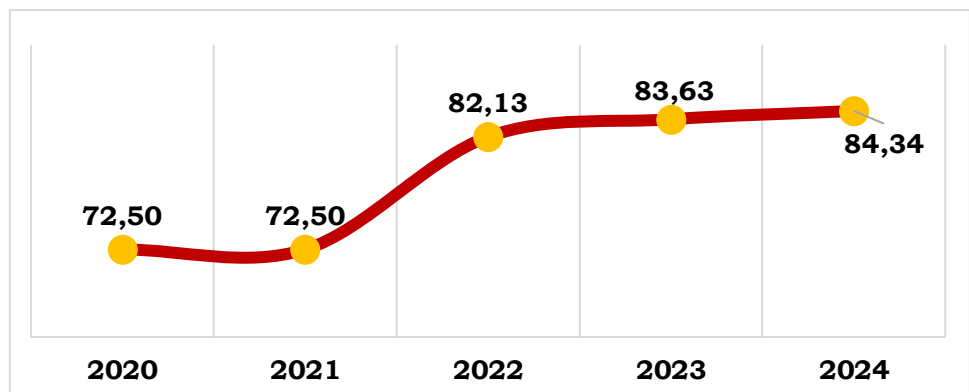
Sumber: Badan Kesbangpol, 2025

Gambar 2.34 Indeks Demokrasi Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Indeks Demokrasi di Kota Semarang mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu peristiwa yang turut berkontribusi terhadap penurunan ini adalah demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada 26 Agustus 2024, dalam rangka menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh, sehingga menciptakan catatan negatif terhadap stabilitas demokrasi di kota ini. Selain itu, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan juga menjadi faktor signifikan dalam penurunan indeks demokrasi. Hingga Juli 2024, tercatat 59 kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang, menjadikannya salah satu dari lima daerah dengan angka kasus tertinggi di Jawa Tengah, bersama dengan Demak, Purwokerto, Banyumas, dan Pati. Kondisi ini mencerminkan tantangan dalam perlindungan hak-hak sipil, khususnya bagi kelompok rentan. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kota Semarang terus berkembang sebagai pusat ekonomi dan budaya, masih terdapat aspek sosial dan politik yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

e. Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Nilai IP2WK di Kota Semarang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini mencerminkan semakin luas dan mendalamnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila dan wawasan kebangsaan, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam interaksi sosial di tengah keberagaman yang tinggi. Semangat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan semakin kuat di masyarakat, menunjukkan bahwa berbagai program pembinaan dan edukasi yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif. Adapun capaian IP2WK dari tahun ke tahun mengikuti tabel sebagai berikut.



Sumber: Badan Kesbangpol, 2025

Gambar 2.35 Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

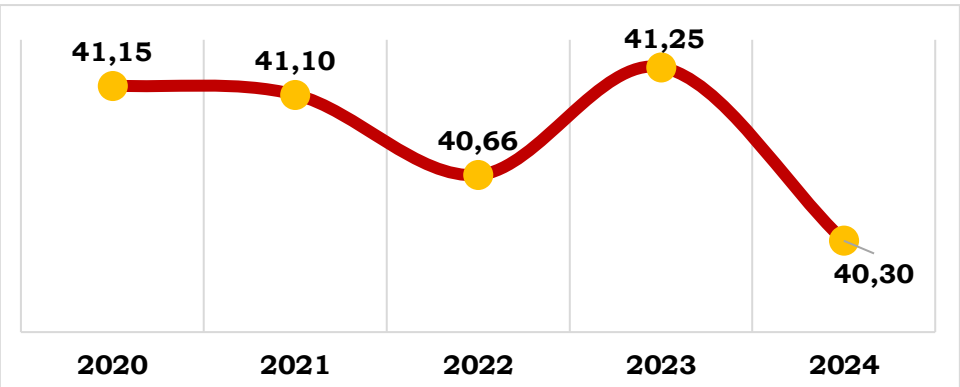
Beberapa tujuan dari Gerakan Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah berhasil diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini tidak lepas dari berbagai kegiatan yang secara aktif mendorong peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai kebangsaan. Program seperti *Fun Game* Kebangsaan, Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara, serta Dialog Kebangsaan telah menjadi sarana efektif dalam membangun semangat nasionalisme.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Kota Semarang menghadapi beragam tantangan sekaligus peluang dalam persaingannya dengan kota-kota lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk dapat memahami lebih dalam mengenai kekuatan dan potensi yang dimiliki Semarang dalam bersaing di berbagai sektor, sangat penting untuk mengidentifikasi sejumlah faktor utama yang mempengaruhi daya saing kota ini. Berbagai aspek, baik yang berhubungan dengan infrastruktur, sektor ekonomi, kualitas hidup, maupun kebijakan pemerintah, memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana Kota Semarang mampu bersaing dan berkembang. Oleh karena itu, penting untuk melihat beberapa indikator utama yang menjadi fokus utama, yang tidak hanya mencerminkan kondisi saat ini, tetapi juga memberikan gambaran tentang potensi yang dapat terus berkembang di masa depan.

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

SDM memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu daerah, menjadi salah satu pendorong utama yang menentukan arah dan kemajuan ekonomi. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2020, komposisi penduduk Kota Semarang berdasarkan kelompok usia muda, usia produktif, dan usia lanjut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kondisi ini menandakan bahwa Kota Semarang telah memasuki fase bonus demografi, yakni suatu keadaan di mana tingkat ketergantungan penduduk berada pada titik terendah. Bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non-produktif (<15 tahun dan >64 tahun), sehingga beban yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif menjadi lebih ringan. Berikut ini disajikan angka ketergantungan Kota Semarang dari Tahun 2020-2024.



Sumber: Dispendukcapil, 2024

Gambar 2.36 Angka Ketergantungan Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Secara numerik, rasio ketergantungan penduduk Kota Semarang pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 40,30%, yang berarti berada di bawah ambang batas 50%. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada dalam usia produktif, memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Namun, untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal, faktor kualitas penduduk harus diperhatikan, termasuk tingkat pendidikan, keterampilan, profesionalisme, dan kreativitas. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kota Semarang dapat memaksimalkan potensi tenaga kerja produktifnya, mengurangi beban ketergantungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Keberlanjutan produktivitas dan penguatan struktur ekonomi penting untuk memastikan pertumbuhan yang stabil, tangguh, dan berdaya saing. Hal ini mendukung peningkatan kapasitas produksi, penyerapan investasi, serta penciptaan lapangan kerja. Daya saing daerah dipengaruhi oleh kebijakan, infrastruktur, inovasi, dan kualitas SDM. Untuk itu, strategi pembangunan perlu difokuskan pada sektor unggulan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Pengukuran daya saing menjadi dasar penyusunan kebijakan guna memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah, termasuk sektor industri, pertanian, jasa dan sektor lainnya. PDRB dapat dibedakan menjadi dua jenis utama yang di antaranya adalah PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) dan PDRB atas harga konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan dari Rp 191.352,04 Miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 267.561,35 Miliar pada tahun 2024. Peningkatan PDRB ADHK juga sejalan dengan peningkatan PDRB ADHB yang menunjukkan peningkatan dari Rp 137.601,90 Miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 170.947,72 Miliar pada tahun 2024. Kontribusi tiga sektor terbesar pada PDRB ADHB disumbangkan berturut-turut oleh Kategori Industri Pengolahan (rata-rata persentase lima tahun terakhir sebesar 28,62%), Konstruksi (rata-rata persentase lima tahun terakhir 26,87%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (rata-rata persentase lima tahun terakhir sebesar 13,52%). Selain itu, kontribusi terbesar pada PDRB ADHK disumbangkan berturut-turut oleh Kategori Industri Pengolahan (rata-rata persentase lima tahun terakhir sebesar 25,90%), Konstruksi (rata-rata persentase lima tahun terakhir 24,42%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (rata-rata persentase lima tahun terakhir sebesar 14,26%). Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK serta kontribusi per kategorinya berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28 Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Berlaku

NO	KATEGORI/ SUB KATEGORI	NILAI/ KONTRIBUSI	PDRB ADH BERLAKU TAHUN 2020 – 2024 (Rp Miliar)				
			2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai (Rp Miliar)	1.610,97	1.721,15	1.833,00	1.940,69	2.012,80
		Kontribusi kategori (%)	0,85	0,84	0,81	0,78	0,75
B	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (Rp Miliar)	359,64	373,92	370,33	390,36	406,27
		Kontribusi kategori (%)	0,19	0,18	0,16	0,16	0,15
C	Industri Pengolahan	Nilai (Rp Miliar)	54.010,54	58.895,09	65.643,04	71.637,30	75.860,97
		Kontribusi kategori (%)	28,62	28,75	28,87	28,78	28,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (Rp Miliar)	210,72	213,14	213,61	233,13	250,51
		Kontribusi kategori (%)	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (Rp Miliar)	147,83	163,72	166,12	171,83	185,08
		Kontribusi kategori (%)	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	Nilai (Rp Miliar)	49.078,35	55.385,71	59.872,60	65.835,44	71.898,52
		Kontribusi kategori (%)	26,00	27,03	26,33	26,45	26,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai (Rp Miliar)	25.511,98	27.650,59	30.005,77	32.584,49	34.642,42
		Kontribusi kategori (%)	13,52	13,50	13,20	13,09	12,95
H	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (Rp Miliar)	4.435,88	4.776,12	9.485,98	11.485,75	12.311,60
		Kontribusi kategori (%)	2,35	2,33	4,17	4,61	4,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (Rp Miliar)	5.233,22	5.665,45	6.970,48	7.961,83	8.654,44
		Kontribusi kategori (%)	2,77	2,77	3,07	3,20	3,23
J	Informasi dan Komunikasi	Nilai (Rp Miliar)	18.085,59	18.886,96	19.604,74	21.282,49	23.360,87
		Kontribusi kategori (%)	9,58	9,22	8,62	8,55	8,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (Rp Miliar)	8.155,86	8.718,46	9.524,47	9.891,71	10.126,61
		Kontribusi kategori (%)	4,32	4,26	4,19	3,97	3,78
L	Real Estate	Nilai (Rp Miliar)	5.407,70	5.685,16	6.090,51	6.576,52	6.990,13

NO	KATEGORI/ SUB KATEGORI	NILAI/ KONTRIBUTSI	PDRB ADH BERLAKU TAHUN 2020 – 2024 (Rp Miliar)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Kontribusi kategori (%)	2,87	2,77	2,68	2,64	2,61
M	Jasa Perusahaan	Nilai (Rp Miliar)	1.324,33	1.379,62	1.538,79	1.710,03	1.922,43
		Kontribusi kategori (%)	0,70	0,67	0,68	0,69	0,72
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (Rp Miliar)	5.774,58	5.821,37	6.054,64	6.438,38	7.100,97
		Kontribusi kategori (%)	3,06	2,84	2,66	2,59	2,65
O	Jasa Pendidikan	Nilai (Rp Miliar)	5.567,51	5.659,48	5.777,47	6.157,22	6.829,06
		Kontribusi kategori (%)	2,95	2,76	2,54	2,47	2,55
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (Rp Miliar)	1.823,71	1.850,88	1.919,12	2.061,14	2.239,06
		Kontribusi kategori (%)	0,97	0,90	0,84	0,83	0,84
Q	Jasa Lainnya	Nilai (Rp Miliar)	1.993,28	2.024,17	2.302,68	2.551,17	2.759,62
		Kontribusi kategori (%)	1,06	0,99	1,01	1,02	1,03
TOTAL PDRB ADHB		Jumlah (Rp Miliar)	191.352,04	188.731,7	227.373,36	248.909,48	267.551,35
TOTAL KONTRIBUTSI KATEGORI THD PDRB		(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

Sedangkan untuk Nilai PDRB ADHK, perkembangan dari tahun 2020-2024 serta kontribusi per kategorinya terlihat sebagai berikut ini.

Tabel 2.29 Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Harga Konstan

NO	KATEGORI/ SUB KATEGORI	NILAI / KONTRIBUTSI	PDRB ADH KONSTAN TAHUN 2020 – 2024 (Rp Miliar)				
			2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai (Rp Miliar)	1.106,08	1.141,64	1.169,22	1.184,14	1.188,58
		Kontribusi kategori (%)	0,80	0,79	0,76	0,73	0,70
B	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (Rp Miliar)	173,67	179,61	170,72	174,76	181,70
		Kontribusi kategori (%)	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11
C	Industri Pengolahan	Nilai (Rp Miliar)	36.020,69	37.990,51	40.131,85	41.796,24	42.812,37
		Kontribusi kategori (%)	26,18	26,25	26,23	25,82	25,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (Rp Miliar)	171,50	173,22	171,12	184,76	196,01
		Kontribusi kategori (%)	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (Rp Miliar)	123,68	131,24	132,79	136,25	138,59
		Kontribusi kategori (%)	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
F	Konstruksi	Nilai (Rp Miliar)	34.031,87	36.235,04	36.666,19	38.714,97	41.759,68
		Kontribusi kategori (%)	24,73	25,04	23,96	23,92	24,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai (Rp Miliar)	19.756,74	21.039,60	21.865,39	22.939,43	23.886,14
		Kontribusi kategori (%)	14,36	14,54	14,29	14,17	13,97
H	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (Rp Miliar)	3.184,25	3.424,05	6.128,51	6.775,97	7.212,63
		Kontribusi kategori (%)	2,31	2,37	4,01	4,19	4,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (Rp Miliar)	3.770,08	4.039,33	4.859,46	5.482,66	5.867,40
		Kontribusi kategori (%)	2,74	2,79	3,18	3,39	3,43
J	Informasi dan Komunikasi	Nilai (Rp Miliar)	18.654,55	19.479,19	20.217,45	21.909,64	23.814,61
		Kontribusi kategori (%)	13,56	13,46	13,21	13,54	13,93

NO	KATEGORI/ SUB KATEGORI	NILAI / KONTRIBUSI	PDRB ADH KONSTAN TAHUN 2020 – 2024				
			(Rp Miliar)				
			2020	2021	2022	2023	2024
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (Rp Miliar)	5.457,98	5.560,38	5.581,21	5.681,71	5.762,17
		Kontribusi kategori (%)	3,97	3,84	3,65	3,51	3,37
L	Real Estate	Nilai (Rp Miliar)	4.334,92	4.497,48	4.728,54	5.053,43	5.351,24
		Kontribusi kategori (%)	3,15	3,11	3,09	3,12	3,13
M	Jasa Perusahaan	Nilai (Rp Miliar)	873,42	900,15	957,00	1.026,95	1.133,59
		Kontribusi kategori (%)	0,63	0,62	0,63	0,63	0,66
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (Rp Miliar)	3.996,12	3.937,30	4.010,14	4.177,13	4.504,35
		Kontribusi kategori (%)	2,90	2,72	2,62	2,58	2,63
O	Jasa Pendidikan	Nilai (Rp Miliar)	3.283,67	3.287,61	3.351,58	3.564,40	3.895,27
		Kontribusi kategori (%)	2,39	2,27	2,19	2,20	2,28
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (Rp Miliar)	1.197,89	1.212,98	1.246,53	1.314,03	1.410,47
		Kontribusi kategori (%)	0,87	0,84	0,81	0,81	0,83
Q	Jasa Lainnya	Nilai (Rp Miliar)	1.464,88	1.475,25	1.610,90	1.731,83	1.832,90
		Kontribusi kategori (%)	1,06	1,02	1,05	1,07	1,07
TOTAL PDRB ADHK		Jumlah (Rp Miliar)	137.601,90	144.704,57	152.995,4	161.848,30	170.947,72
TOTAL KONTRIBUSI KATEGORI THD PDRB		(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

2.1.3.4. PDRB per Kapita

Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK serta kontribusi per kategorinya berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30 PDRB per Kapita Kota Semarang Tahun 2020-2024

URAIAN	PDRB (Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (Miliar)	188.731,69	204.871,00	227.619,17	248.902,61	267.551,35
PDRB ADHK (Miliar)	137.601,98	144.704,57	152.999,37	161.849,11	170.947,72
PDRB/Kapita (ADHB)/Th (Juta)	114,18	123,67	137,12	149,94	156,57
PDRB/Kapita (ADHK)/Th (Juta)	83,25	87,35	92,17	97,50	100,04

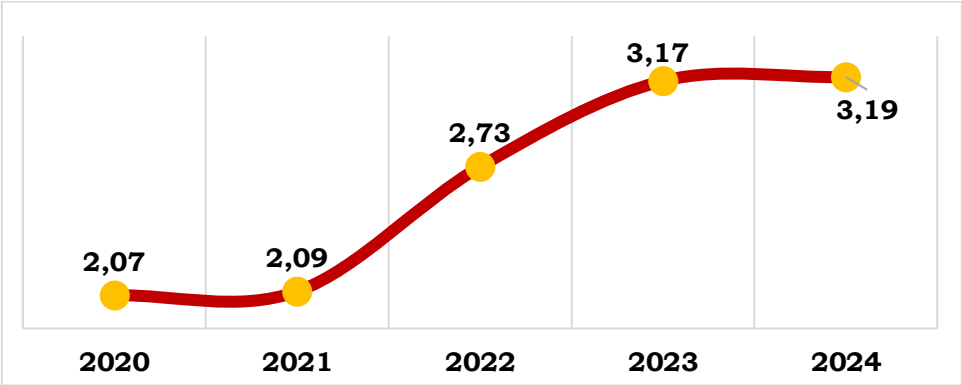
Sumber: BPS, Dispendukcapil, 2025

Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan dari Rp 137.601,98 Miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 267.551,35 Miliar pada tahun 2024. Peningkatan PDRB ADHK juga sejalan dengan peningkatan PDRB ADHB yang menunjukkan peningkatan dari Rp 137.601,90 Miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 170.947,72 Miliar pada tahun 2024. Kontribusi tiga sektor terbesar pada PDRB ADHB disumbangkan berturut-turut oleh Kategori Industri Pengolahan (rata-rata persentase lima tahun terakhir sebesar 28,67%), Konstruksi (rata-rata persentase lima tahun terakhir 26,54%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (rata-rata persentase lima tahun terakhir sebesar 13,25%). Selain itu, kontribusi terbesar pada PDRB ADHK disumbangkan berturut-turut oleh Kategori Industri Pengolahan (rata-rata persentase lima tahun terakhir sebesar 25,90%), Konstruksi (rata-rata persentase lima tahun terakhir 24,42%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (rata-rata persentase lima tahun terakhir sebesar 14,27%).

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB), yang tidak memperhitungkan inflasi, tercatat sebesar Rp 156,57 juta per jiwa per tahun pada 2024. Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK), yang telah disesuaikan dengan inflasi, mencapai Rp 100,04 juta per jiwa per tahun di tahun yang sama. Data ini juga menunjukkan tren peningkatan PDRB per kapita secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan asumsi distribusi kemakmuran yang merata. Selain itu, pertumbuhan PDRB per kapita juga mencerminkan bahwa penduduk Kota Semarang semakin memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih tinggi, serta adanya peningkatan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Secara umum, peningkatan PDRB per kapita yang berkelanjutan menandakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkesinambungan, sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan pendapatan. Hal ini sejalan dengan penurunan Rasio Gini di Kota Semarang pada tahun ini, yang tercatat turun sebesar 0,04. Dengan tren positif pertumbuhan PDRB, baik dalam ADHK maupun ADHB, sejak pandemi, maka PDRB per kapita ke depan ditargetkan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

2.1.3.5. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan di Kota Semarang masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 3,34% dari total penduduk. Angka ini masih jauh dibandingkan dengan negara-negara maju, di mana rasio kewirausahaan dapat mencapai kisaran 10–12%. Rendahnya tingkat kewirausahaan ini mencerminkan masih terbatasnya jumlah masyarakat yang berani dan mampu terjun ke dunia usaha, baik dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun sektor bisnis lainnya yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut ini disajikan rasio kewirausahaan di Kota Semarang.



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Gambar 2.37 Rasio Kewirausahaan Kota Semarang 2020-2024 (Persen)

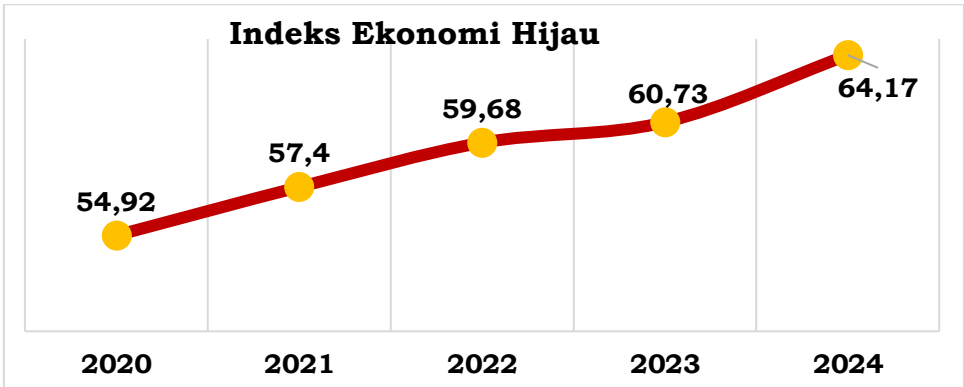
Untuk meningkatkan rasio kewirausahaan, pengembangan ekonomi lokal perlu menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan daerah. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah ekonomi kreatif. Melalui ekonomi kreatif, berbagai industri seperti seni, budaya, desain, teknologi digital, serta sektor kuliner dan pariwisata dapat tumbuh lebih pesat, memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

Dampak lebih lanjut dari rendahnya kewirausahaan adalah meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Jika masyarakat tidak memiliki cukup akses terhadap peluang usaha atau pekerjaan, maka tingkat kesejahteraan akan menurun. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komprehensif untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha di Kota Semarang, mulai dari peningkatan akses permodalan, pemberian pelatihan kewirausahaan, hingga penguatan ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan UMKM dan industri kreatif. Dengan langkah yang tepat, Kota Semarang dapat meningkatkan jumlah wirausahawan dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih dinamis serta berdaya saing tinggi. Peningkatan rasio kewirausahaan tidak hanya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, tetapi juga akan memberikan manfaat sosial yang luas, seperti berkurangnya ketimpangan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.3.6. Penerapan Ekonomi Hijau

a. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu negara, wilayah, atau perusahaan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas ekonominya. Indeks ini berfungsi sebagai indikator dalam menilai efektivitas upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kota Semarang sebagai salah satu kota yang terus berkembang juga turut berupaya meningkatkan nilai indeks ekonomi hijau dengan berbagai program dan kebijakan yang mendukung ekonomi hijau. Berikut ini disajikan perkembangan capaian indikator Indeks Ekonomi Hijau Kota Semarang dari tahun ke tahun, yang mencerminkan sejauh mana kota ini telah bergerak menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.



Sumber: DLH Kota Semarang, Dispertan Kota Semarang, BPS Kota Semarang, 2024
Gambar 2.38 Indeks Ekonomi Hijau Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Berdasarkan data yang ada di atas, dapat diketahui bahwa tren peningkatan capaian Indeks Ekonomi Hijau terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang sudah meletakkan konsennya terhadap penerapan praktik ekonomi yang lebih berkelanjutan yang mengedepankan investasi berbasis teknologi hijau, energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kota Semarang telah menggalakkan penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Berdasarkan data dari

Kementerian ESDM Tahun 2024, terdapat potensi transisi energi baru terbarukan yang terdiri dari:

- Potensi Angin (*Onshore*) sebesar 59,2 MW;
- Potensi Surya sebesar 6,5 GWp;
- Potensi Air sebesar 1 MW;
- Potensi Biomassa dari Sampah Kota sebesar 42,6 MW; dan
- Sampah Kota Teoritis sebesar 141,9 MW

Beberapa pengembangan yang telah dilakukan antara lain:

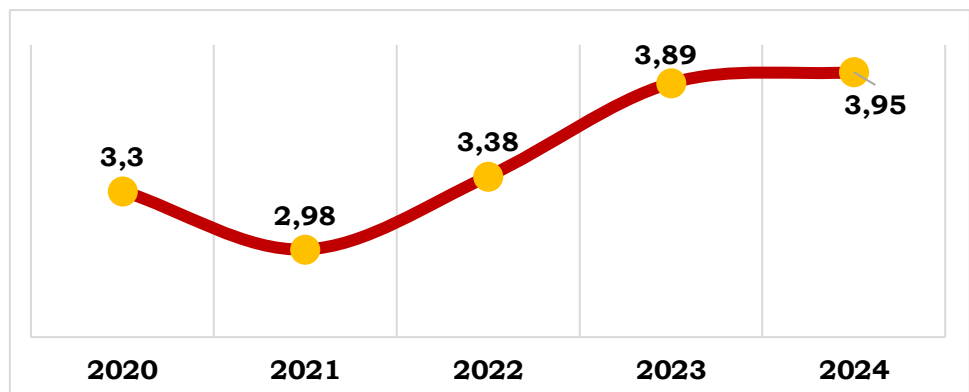
- PLTS *Rooftop* Balaikota Semarang
- PLTS dan PLT Angin Kampung Kuliner Pujasera Energi, Kec. Semarang Barat
- PLT Angin PAUD dan SD Mangunharjo, Kec. Tugu
- PLTS pada Kampung Tematik Hasta Karya dan Dung Tungkul, Kec. Tembalang
- PLTS Waduk Jatibarang
- PLTS Terapung Tambaklorok

Dengan peningkatan Indeks Ekonomi Hijau dari tahun ke tahun turut mengindikasikan bahwa ekonomi semakin mampu menciptakan pertumbuhan yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, kebijakan dan strategi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Semarang secara tidak langsung dapat dikatakan berhasil dalam mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Selain itu, meningkatnya kesadaran tentang isu lingkungan pada masyarakat juga dinilai menjadi salah satu masukan meningkatnya permintaan untuk produk dan jasa yang ramah lingkungan. Secara keseluruhan, adanya peningkatan indeks ekonomi hijau dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa adanya kemajuan dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dengan fokus pada keberlanjutan dan inovasi hijau.

2.1.3.7. Transformasi Digital

a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Semarang yang selalu meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan upaya yang konsisten dan berkelanjutan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi administrasi pemerintahan. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah kota dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu aspek utama yang menjadi fokus dalam reformasi SPBE di Kota Semarang adalah digitalisasi berbagai layanan publik. Pemerintah Kota Semarang terus berupaya untuk menggantikan proses administratif konvensional dengan sistem berbasis elektronik yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir birokrasi yang rumit, mengurangi praktik korupsi, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun capaian indeks SPBE dari tahun ke tahun mengikuti tabel sebagai berikut.



Sumber: Diskominfo Kota Semarang, 2025

Gambar 2.39 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Peningkatan Indeks SPBE Kota Semarang mencerminkan kemajuan dalam transformasi digital melalui penguatan infrastruktur teknologi, integrasi antarinstansi, dan peningkatan kualitas SDM. Layanan publik menjadi lebih efisien, cepat, dan transparan, memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan secara digital. Selain mendorong koordinasi internal pemerintah dan partisipasi publik, SPBE juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan. Meski menunjukkan tren positif, tantangan seperti keamanan data dan kesenjangan digital masih perlu diatasi. Secara keseluruhan, SPBE menjadi fondasi penting bagi pembangunan pemerintahan yang modern, inovatif, dan responsif di Kota Semarang.

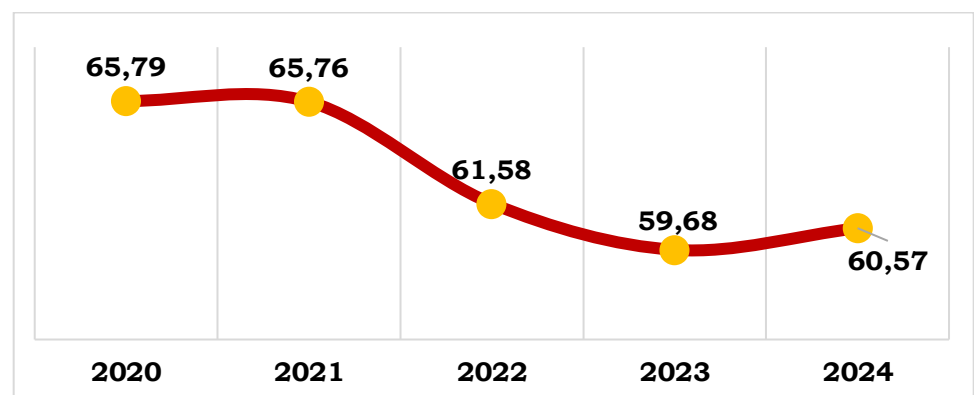
2.1.3.8. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen utama dalam penyusunan PDRB dari sisi pengeluaran yang mencerminkan tingkat investasi dalam berbagai sektor ekonomi. PMTB berperan penting dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas produksi, efisiensi ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan aset produktif lainnya. Secara umum, PMTB mencakup berbagai bentuk investasi dalam aset tetap, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun individu. Investasi ini meliputi pembangunan bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan, serta berbagai jenis infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Selain itu, PMTB juga mencakup pengadaan mesin dan peralatan yang mendukung kegiatan industri, manufaktur, serta sektor jasa lainnya.

Di Kota Semarang, PMTB menjadi salah satu indikator penting dalam menilai perkembangan ekonomi dan tingkat investasi yang dilakukan dalam berbagai sektor. Peningkatan PMTB menunjukkan adanya kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi kota, serta komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sebaliknya, jika PMTB mengalami stagnasi atau penurunan, hal ini dapat menjadi indikator adanya perlambatan investasi yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di masa depan. Berikut ini disajikan data mengenai perkembangan PMTB Kota Semarang dalam kurun waktu

2020-2024, yang mencerminkan tren investasi dan arah pembangunan ekonomi di kota ini.



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Gambar 2.40 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Persen)

Selain infrastruktur fisik, PMTB juga mencerminkan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Investasi dalam teknologi dan peralatan modern dapat meningkatkan efisiensi produksi serta mendorong daya saing industri lokal. Sektor manufaktur dan jasa yang berkembang dengan dukungan infrastruktur yang kuat akan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Namun, dalam pelaksanaannya, PMTB perlu diarahkan agar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan inklusivitas ekonomi. Investasi yang dilakukan harus mampu menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, baik dari segi peningkatan kualitas hidup, penciptaan lapangan kerja, maupun pengurangan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dalam mengalokasikan investasi agar dapat memberikan dampak positif yang luas dan merata bagi seluruh masyarakat.

Dengan adanya investasi yang terus meningkat dalam PMTB, diharapkan Kota Semarang dapat semakin berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat regional maupun nasional. Pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

b. Ekspor Barang dan Jasa

Kegiatan ekspor barang dan jasa di Kota Semarang merupakan salah satu strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal di pasar global. Untuk mendukung hal ini, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk melalui kegiatan promosi produk unggulan dan peningkatan kualitas SDM pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya ini bertujuan agar produk-produk lokal dapat lebih dikenal di tingkat nasional maupun internasional, serta mampu memenuhi standar ekspor yang dibutuhkan oleh pasar global.

Berikut ini disajikan data mengenai perkembangan ekspor barang dan jasa Kota Semarang dalam kurun waktu 2020-2024, yang mencerminkan pertumbuhan dan tren perdagangan luar negeri di kota ini.

Tabel 2.31 Ekspor Barang dan Jasa Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Ekspor (US\$)	3.084.439.326,82	1.117.549.543,14	1.242.337.131,00	2.130.728.974,61	1.322.895.045,28

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa nilai ekspor Kota Semarang mengalami fluktuasi naik turun dari tahun ke tahun, sehingga dapat mengancam pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa di Indonesia, Kota Semarang memiliki potensi besar dalam sektor ekspor, baik dari produk kreatif, hingga hasil pertanian dan perikanan. Namun, berbagai faktor seperti persaingan global yang semakin ketat, perubahan kebijakan perdagangan internasional, serta kendala infrastruktur dan logistik turut mempengaruhi daya saing produk lokal di pasar global.

Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan strategi yang komprehensif dan inovatif guna mendorong pertumbuhan ekspor dari Kota Semarang. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan daya saing produk ekspor. Hal ini dapat dicapai melalui inovasi dalam desain, proses produksi yang lebih efisien, serta penerapan standar internasional agar produk-produk lokal mampu memenuhi kebutuhan pasar global. Selain itu, diversifikasi produk ekspor juga perlu diperhatikan agar Kota Semarang tidak hanya bergantung pada satu jenis industri, tetapi memiliki portofolio ekspor yang lebih luas dan beragam.

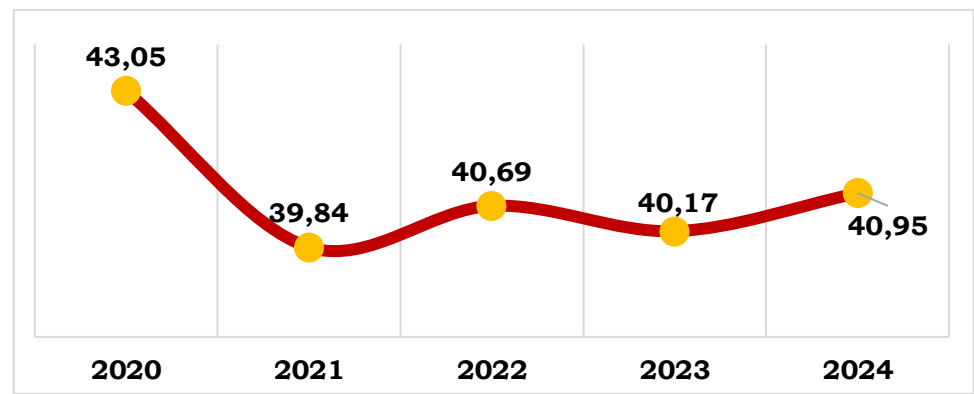
Dukungan bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang memiliki potensi ekspor, juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan nilai ekspor Kota Semarang. Program pelatihan ekspor, bantuan permodalan, serta fasilitasi dalam mengurus sertifikasi dan regulasi internasional dapat membantu pelaku usaha untuk lebih mudah menembus pasar luar negeri. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran global juga harus didorong agar produk-produk asal Semarang dapat lebih dikenal di kancah internasional.

Di sisi lain, infrastruktur dan sistem logistik juga harus diperbaiki untuk mendukung peningkatan ekspor. Efisiensi distribusi barang melalui pelabuhan dan jalur transportasi harus diperhatikan agar biaya logistik dapat ditekan dan waktu pengiriman menjadi lebih cepat. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta akademisi juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan kebijakan yang mendukung ekosistem ekspor yang lebih berdaya saing. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan ekspor dari Kota Semarang dapat kembali meningkat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan menjadikan Semarang sebagai salah satu kota eksportir unggulan di Indonesia.

c. Total Kredit terhadap PDRB

Total Kredit / PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga

intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut. Adapun capaian indikator total kredit terhadap PDRB dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Regional III, 2025

Gambar 2.41 Total Kredit terhadap PDRB Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Persen)

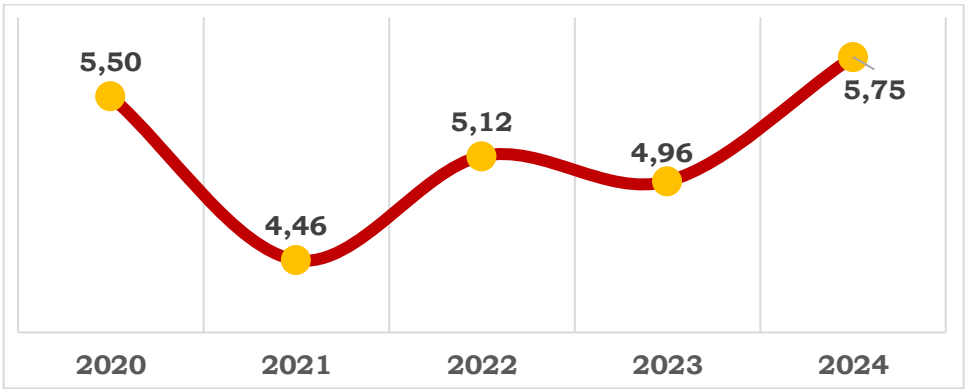
Penurunan rasio total kredit terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting yang mencerminkan dinamika ekonomi suatu daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penyaluran kredit perbankan lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa alasan, salah satunya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) itu sendiri. Ketika aktivitas ekonomi daerah melambat—misalnya karena penurunan harga komoditas utama, lesunya sektor industri andalan, atau menurunnya daya beli masyarakat—PDRB akan tumbuh lebih lambat, atau bahkan negatif. Akibatnya, meskipun penyaluran kredit mungkin tidak terlalu banyak berubah, rasio kredit terhadap PDRB akan terlihat menurun karena pembagi PDRB menjadi lebih kecil atau tumbuh lebih lambat dari pembilang (total kredit). Dapat dilihat dari tren pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang terhambat pada angka 5%, belum dapat menyentuh hingga angka 6% hingga akhir tahun 2024.

Selain faktor pertumbuhan ekonomi, penurunan permintaan kredit dari sektor riil juga menjadi penyebab signifikan. Dunia usaha cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil pinjaman baru ketika prospek ekonomi tidak menentu, atau jika kapasitas produksi yang ada sudah mencukupi sehingga tidak memerlukan investasi tambahan. Suku bunga kredit yang tinggi juga dapat membuat biaya pinjaman terasa memberatkan, sehingga mengurangi minat perusahaan dan individu untuk mengajukan kredit. Di sisi lain, perbankan sendiri mungkin menerapkan kebijakan pemberian kredit yang lebih ketat jika mereka melihat adanya peningkatan risiko kredit bermasalah (NPL) atau jika mereka harus memenuhi regulasi perbankan yang mengharuskan mereka menjaga rasio permodalan dan likuiditas.

Perlunya peran pemerintah sebagai regulator sekaligus penjamin bagi pelaku usaha dalam mengajukan kredit kepada perbankan, serta dukungan pada aktivitas ekonomi baik dari aktivitas utama maupun aktivitas penunjang menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berkemakmuran. Intervensi dalam bentuk kebijakan dan pelatihan substansial dalam kelancaran arus kredit dari perbankan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi menjadi kunci optimalisasi kredit terhadap pertumbuhan PDRB.

d. *Return On Asset (RoA)*



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

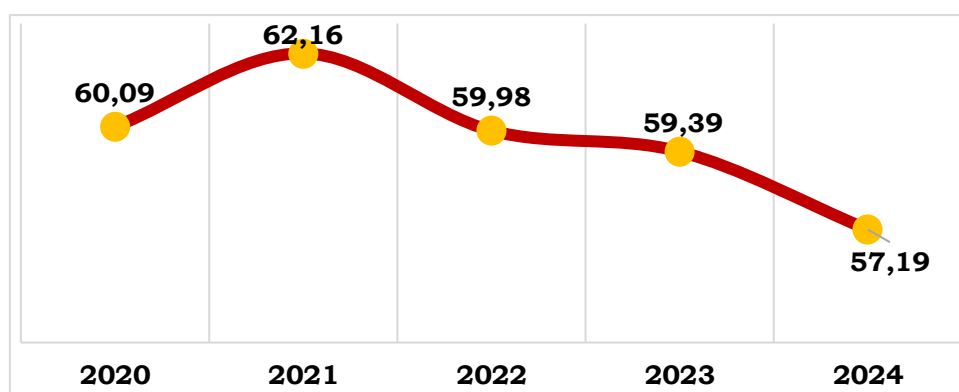
Gambar 2.42 *Return On Asset* Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Persen)

Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Selama 5 tahun terakhir, kinerja ROA BUMD selalu berada pada rentang angka 4%-5%. Masing-masing BUMD memiliki dinamikanya sendiri dalam mengelola bisnis mereka. PT BPS memiliki dinamika dalam pengelolaan bisnis Rumah Potong Hewan, yang saat ini sedang dalam proses transformasi model bisnis menuju BUMD Pangan. PDAM Tirta Moedal mengalami Penurunan ROA karena terkait kewenangan pengelolaan SPALD-T yang programnya direncanakan mulai tahun 2027. Selanjutnya diperlukan regulasi terkait penyesuaian tarif yang konsepnya mengarah kepada tarif tunggal. PT BPR Bank Pasar memiliki standar ROA 1,25% untuk predikat sehat, sehingga diperlukan peningkatan standar terkait ROA pada BUMD Perbankan sehingga mendapatkan return yang lebih. PT Taman Satwa Semarang memiliki ROA yang negatif dikarenakan sesuai dengan rencana bisnis perusahaan tersebut yang sedang dilakukan revitalisasi pada aset Semarang Zoo.

Dari 4 BUMD yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang, terdapat 2 BUMD yang memiliki ROA negatif (PT BPS dan PT Taman Satwa) dengan dinamika yang berbeda. PT BPS sedang mengalami transformasi dan restrukturisasi model bisnis menuju BUMD Pangan, dan PT Taman Satwa sedang dalam proses revitalisasi aset pada tahun 2026 dan diperkirakan akan kembali operasional pada tahun 2027. Adapun BUMD yang berkinerja tinggi pada tahun 2024 adalah PDAM Tirta Moedal yang menyentuh angka ROA 8,5% pada tahun 2024. PT BPR Bank Pasar sendiri masih diperlukan optimalisasi bisnis untuk meningkatkan ROA.

e. *Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB*

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) / PDRB (%) menggambarkan Tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan Tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. Adapun capaian indikator total dana pihak ketiga terhadap PDRB dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Regional III, 2025

Gambar 2.43 Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Persen)

Pergerakan dari total dana pihak ketiga terhadap PDRB bergerak secara konstan, dimana memiliki rentang nilai sebesar 57%-60%. Adapun sejak tahun 2021, total dana pihak ketiga selalu menurun hingga pada angka 57,19% di tahun 2024. Hal ini diakibatkan oleh program pemulihan ekonomi dimana banyak dana dialihkan kepada masyarakat untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Adapun pengalihan dana tersebut mampu mendongkrak ekonomi Kota Semarang, yang kemudian ditunjukkan oleh LPE yang selalu meningkat hingga tahun 2024. Keseimbangan dana pihak ketiga menjadi penting untuk menjaga dana bergulir di bank dan masyarakat. Ketika dana berada pada pihak ketiga (dalam hal ini, perbankan), dana akan digunakan untuk investasi dan pembangunan di sektor-sektor produktif, namun pertumbuhan ekonomi yang dicapai relatif berada di sektor tertentu dan tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Namun, apabila terdapat keseimbangan DPK, maka ekonomi dapat tumbuh menyeluruh di semua sektor dan tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan.

Dana pihak ketiga—yang merupakan simpanan masyarakat di perbankan (seperti tabungan, giro, dan deposito)—menjadi sumber utama likuiditas bagi lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit. Dari perspektif *supply-leading*, peningkatan DPK memberi bank kapasitas lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini, akumulasi dana masyarakat di sistem keuangan bisa menjadi katalis pertumbuhan PDRB.

Namun, dari sisi *demand-following*, pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan pelaku usaha, yang kemudian meningkatkan simpanan mereka di bank, sehingga DPK meningkat. Jadi, PDRB bisa menjadi pendorong naiknya DPK. Sama seperti hubungan kredit dan PDRB, relasi antara DPK dan pertumbuhan ekonomi bisa bersifat dua arah, dan kekuatannya sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, literasi keuangan, dan insentif penyimpanan.

Pemerintah daerah selaku katalis dari pertumbuhan ekonomi, berperan dalam mengatur regulasi terkait pendanaan di sektor-sektor ekonomi produktif serta meningkatkan literasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Adanya regulasi yang tertib akan mendorong masyarakat untuk menggunakan likuiditas DPK untuk kegiatan ekonomi produktif, dan literasi

masyarakat yang cukup akan membuat masyarakat menaruh dana-nya pada DPK untuk kebutuhan investasi, sehingga menekan kebutuhan konsumtif.

f. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (40% Bawah)

Distribusi pengeluaran kelompok 40% penduduk terbawah di Kota Semarang menunjukkan tren yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, kelompok ini menyumbang 15,71% dari total pengeluaran, kemudian mengalami penurunan menjadi 15,12% pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 16,49% pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan pada tahun 2022 mencerminkan meningkatnya ketimpangan ekonomi, yang mungkin disebabkan oleh dampak lanjutan pandemi atau keterbatasan akses kelompok rentan terhadap peluang ekonomi.

Namun, peningkatan pada tahun 2023 menjadi indikator positif terhadap membaiknya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah serta keberhasilan intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung kelompok tersebut. Meningkatnya distribusi pengeluaran ini juga mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai lebih inklusif, meskipun secara persentase masih berada di bawah ambang ideal untuk mencerminkan distribusi yang benar-benar merata. Adapun capaian indikator distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia (40% bawah) dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (40%) Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (40%)	%	NA	15,71	15,12	16,49	16,49*

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2025

Peningkatan distribusi pengeluaran kelompok 40% terbawah perlu terus diperkuat melalui kebijakan pro-rakyat, seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial, pelatihan keterampilan, dan pengembangan infrastruktur dasar di wilayah rentan. Upaya ini penting guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang tidak hanya tinggi secara agregat, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.1.3.9. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah perkotaan di Kota Semarang diarahkan untuk mewujudkan kota yang modern, dinamis, dan berdaya saing tinggi, dengan menempatkannya sebagai pusat perdagangan dan jasa yang maju. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional, sehingga pengembangan kota ini tidak hanya berfokus pada peningkatan sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan agar tetap inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai pusat perdagangan, Kota Semarang terus berupaya meningkatkan daya saing dengan membangun infrastruktur yang memadai, menyediakan fasilitas bisnis yang modern, serta menciptakan lingkungan investasi yang kondusif bagi pelaku usaha. Pengembangan kawasan-kawasan strategis, seperti pusat bisnis, kawasan industri, serta pusat perbelanjaan modern, menjadi bagian dari upaya ini agar Kota Semarang semakin menarik

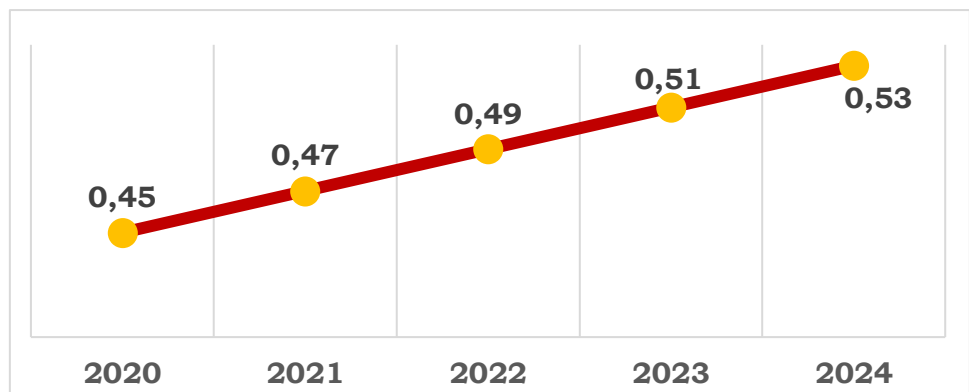
bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan berkembangnya sektor perdagangan, diharapkan akan tercipta lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Di sisi lain, sektor jasa juga menjadi tulang punggung utama dalam pembangunan Kota Semarang. Dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan profesional, sektor jasa terus berkembang, mencakup bidang keuangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, teknologi informasi, dan berbagai layanan berbasis digital lainnya. Kota Semarang berusaha untuk menjadi pusat layanan yang kompetitif, dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperkuat ekosistem bisnis berbasis teknologi, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan inovasi di sektor jasa. Namun, dalam pengembangannya, Kota Semarang juga berkomitmen untuk menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari kemajuan yang dicapai. Pemerintah Kota Semarang terus berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan akses terhadap layanan publik yang berkualitas, serta menciptakan ruang-ruang publik yang ramah bagi semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lanjut usia.

Selain itu, konsep kota berkelanjutan menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Pengelolaan lingkungan yang baik, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya menjadi prioritas utama. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mendukung mobilitas yang lebih hijau, mengurangi emisi karbon, meningkatkan ruang terbuka hijau, serta mengelola tata kota yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. Dengan kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang kuat, keberlanjutan lingkungan, serta inklusivitas sosial, Kota Semarang diharapkan dapat berkembang menjadi kota metropolitan yang maju, nyaman, dan berdaya saing tinggi. Melalui perencanaan dan strategi yang tepat, kota ini tidak hanya akan menjadi pusat perdagangan dan jasa yang unggul, tetapi juga menjadi tempat yang layak huni bagi seluruh masyarakatnya, mencerminkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara harmonis.

a. Angka Pemenuhan Kinerja Sistem Infrastruktur Strategis

Nilai ini dihitung berdasarkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah serta tingkat pengembangan kawasan strategis, yang menjadi indikator utama dalam menilai seberapa baik infrastruktur mendukung mobilitas, aksesibilitas, dan pertumbuhan kawasan prioritas di Kota Semarang. Kawasan-kawasan ini meliputi pusat ekonomi, permukiman, dan daerah pengembangan lainnya yang didorong untuk meningkatkan daya tarik investasi serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Semarang



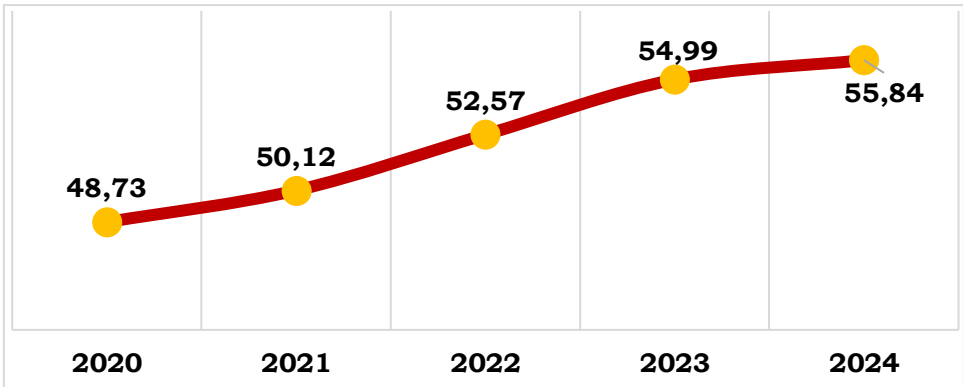
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024
Gambar 2.44 Angka Pemenuhan Kinerja Sistem Infrastruktur Strategis Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Angka pemenuhan kinerja sistem infrastruktur strategis di Kota Semarang pada Tahun 2024 yang mencapai 0,53 mencerminkan capaian dalam pengembangan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kota. Investasi yang berkelanjutan, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, menjadi faktor kunci dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya pendanaan yang cukup dan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kota Semarang, meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan kawasan strategis, serta menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih layak huni. Melalui langkah-langkah strategis ini, Kota Semarang dapat terus meningkatkan kinerja infrastrukturnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing kota di tingkat nasional maupun global.

b. Tingkat Pemenuhan Infrastruktur Konektivitas Wilayah

Infrastruktur jalan dan jembatan memiliki peran vital dalam menunjang mobilitas masyarakat serta memperlancar arus barang dan jasa. Di berbagai daerah, termasuk Semarang, upaya perbaikan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan terus dilakukan guna memastikan konektivitas yang lebih baik dan meningkatkan daya saing wilayah. Perbaikan jalan menjadi prioritas dalam mengatasi berbagai permasalahan seperti kerusakan akibat cuaca, beban kendaraan yang berlebihan, serta kondisi jalan yang sudah usang. Jalan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan biaya transportasi. Oleh karena itu, rehabilitasi jalan dengan pengaspalan ulang, perbaikan drainase, serta pelebaran jalan di titik-titik kemacetan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transportasi.

Selain jalan, jembatan juga memainkan peran penting dalam menjaga konektivitas antarwilayah, terutama di daerah yang dilalui sungai atau medan sulit. Perbaikan dan pembangunan jembatan baru dilakukan untuk menggantikan jembatan yang mengalami kerusakan struktural atau tidak lagi mampu menampung volume kendaraan yang meningkat. Dengan adanya jembatan yang kokoh dan aman, akses antar daerah menjadi lebih lancar, mendukung aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun capaian tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah mengikuti grafik sebagai berikut.



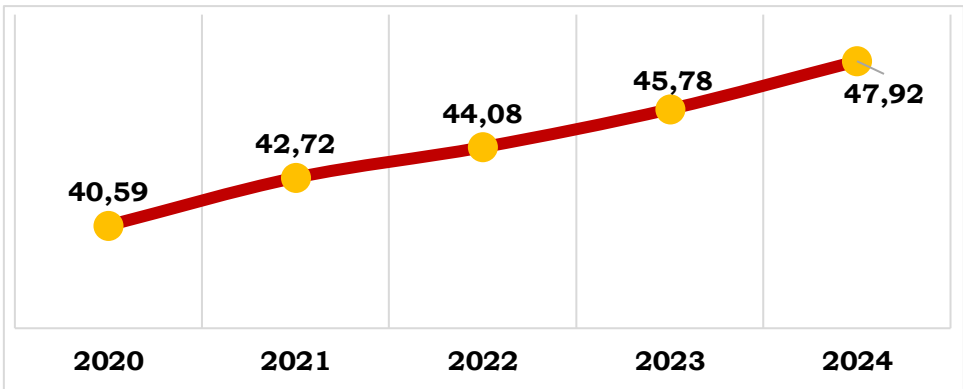
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Gambar 2.45 Tingkat Pemenuhan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Persen)

Pemerintah daerah bersama dengan berbagai pemangku kepentingan harus terus berupaya mempercepat proses perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan agar dampaknya bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Dengan konektivitas yang semakin baik, diharapkan arus transportasi menjadi lebih efisien, aktivitas ekonomi semakin berkembang, serta keselamatan pengguna jalan semakin terjamin. Selain itu, perbaikan infrastruktur ini juga berperan dalam meningkatkan daya tarik investasi dan pariwisata, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih merata. Pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan sinergi antara pemerintah, swasta, serta masyarakat, cita-cita untuk memiliki jaringan transportasi yang handal dan berkelanjutan dapat terwujud demi kesejahteraan bersama.

c. Tingkat Pengembangan Kawasan Strategis

Pengembangan kawasan strategis merupakan langkah penting dalam meningkatkan daya saing suatu daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kawasan strategis adalah wilayah dengan nilai penting dari sisi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, pengelolaan dan percepatan pembangunan di kawasan ini menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



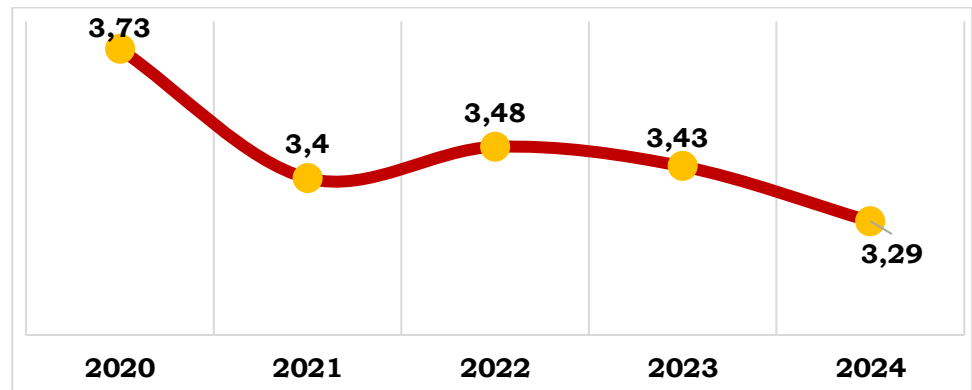
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Gambar 2.46 Tingkat Pengembangan Kawasan Strategis Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Persen)

Tingkat pengembangan kawasan strategis meningkat dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan terus berupaya mempercepat pengembangan kawasan strategis dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, serta menarik

investasi. Pengembangan kawasan strategis di Kota Semarang didorong oleh peningkatan konektivitas, infrastruktur, dan kebijakan investasi yang mendukung. Pemerintah daerah terus mendorong kemudahan perizinan, pembangunan fisik, dan kemitraan publik-swasta guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pertumbuhan pesat sektor perdagangan dan jasa tercermin dari berkembangnya kawasan seperti Simpang Lima, Jalan Pemuda, dan Kota Lama. Ini turut mendorong sektor UKM, ekonomi kreatif, dan penciptaan lapangan kerja. Pengembangan juga memperhatikan aspek keberlanjutan melalui penerapan konsep smart city, ruang hijau, dan efisiensi layanan publik. Meski dihadapkan tantangan seperti keterbatasan anggaran dan koordinasi, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan. Secara keseluruhan, kawasan strategis menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Semarang.

d. Persentase Kawasan Banjir dan Rob



Sumber: DPU Kota Semarang, 2025

Gambar 2.47 Persentase Kawasan Banjir dan Rob Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Persen)

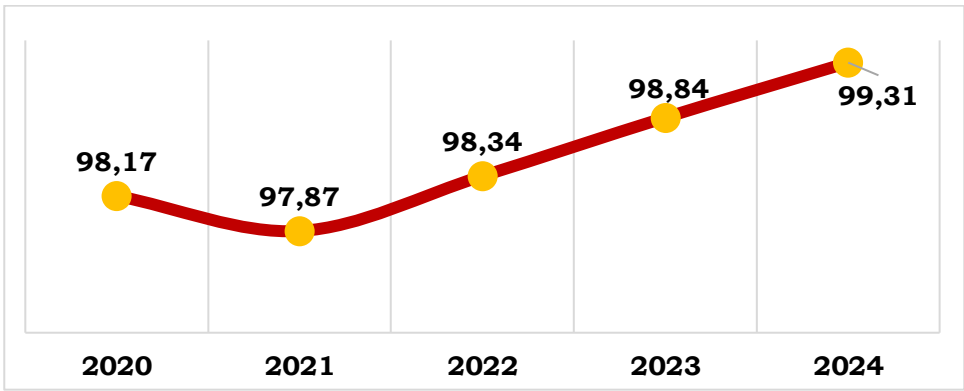
Tingkat kawasan yang terdampak banjir dan rob di Kota Semarang terus menjadi perhatian utama dalam upaya pengendalian bencana dan pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif. Persentase kawasan yang mengalami banjir dan rob cenderung mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh faktor curah hujan, kondisi drainase, penurunan muka tanah (*land subsidence*), serta pasang surut air laut. Wilayah pesisir utara Kota Semarang, seperti Semarang Utara, Genuk, dan Tugu, masih menjadi daerah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap rob akibat intrusi air laut yang semakin meluas. Sementara itu, daerah dengan topografi rendah di Semarang bagian tengah dan timur kerap menghadapi banjir saat curah hujan tinggi, terutama di wilayah yang memiliki sistem drainase kurang optimal.

Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa persentase kawasan banjir dan rob di Kota Semarang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dan mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dan berbagai pemangku kepentingan semakin efektif dalam mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Kota Semarang. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program strategis, seperti pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan rob, perbaikan sistem drainase, serta peningkatan kapasitas polder dan pompa air di wilayah rawan genangan. Selain itu, proyek tanggul laut di pesisir utara, serta optimalisasi ruang terbuka hijau dan daerah resapan air,

juga turut berkontribusi dalam menekan risiko banjir dan rob di berbagai kawasan.

Selain aspek infrastruktur, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan sistem drainase juga semakin meningkat, didukung oleh berbagai program edukasi dan partisipasi aktif dalam upaya pengelolaan air. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem perkotaan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama dalam keberlanjutan penurunan kawasan terdampak banjir dan rob. Pemerintah Kota Semarang terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mengurangi persentase kawasan terdampak banjir dan rob, seperti pembangunan tanggul laut dan sistem polder di kawasan pesisir, revitalisasi drainase di daerah perkotaan, serta percepatan pembangunan Tol Semarang-Demak yang berfungsi sebagai tanggul pengaman pantai. Selain itu, program konservasi lingkungan dan peningkatan kapasitas sistem peringatan dini juga menjadi bagian dari strategi mitigasi untuk menekan dampak banjir dan rob. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan persentase kawasan terdampak banjir dan rob di Kota Semarang dapat terus berkurang, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi, kenyamanan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan kota di masa depan.

e. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Gambar 2.48 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Persen)

Proyeksi pertumbuhan penduduk Kota Semarang tahun 2045 diperkirakan akan mencapai 1,8 juta jiwa. Dengan jumlah yang terus bertambah, kebutuhan akan hunian menjadi semakin mendesak. Namun, keterbatasan lahan dan lonjakan harga properti berdampak pada semakin sulitnya akses masyarakat terhadap perumahan yang memadai. Hal ini mendorong sebagian warga, terutama kelompok berpenghasilan rendah, untuk bermukim di kawasan permukiman informal atau permukiman kumuh dengan kondisi yang tidak layak huni. Permukiman ini umumnya memiliki infrastruktur yang minim, akses air bersih yang terbatas, sanitasi yang buruk, serta fasilitas publik yang kurang memadai.

Berdasarkan data pada gambar 2.48, diketahui bahwa persentase hunian layak di Kota Semarang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman telah memberikan hasil yang positif. Berbagai program dan kebijakan, seperti peremajaan kawasan permukiman, bantuan renovasi rumah tidak layak huni, serta pengembangan hunian yang lebih

terjangkau dan berkelanjutan, telah berkontribusi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak dan nyaman. Peningkatan ini juga mencerminkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah, pengembang properti, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan hunian yang lebih berkualitas. Selain itu, berbagai infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, sistem drainase, ketersediaan air bersih, serta fasilitas umum lainnya, terus mengalami perbaikan sehingga meningkatkan standar hunian di Kota Semarang. Dengan semakin tingginya persentase hunian layak, diharapkan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat. Hunian yang layak tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga berdampak pada aspek kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Kota Semarang terus berkomitmen untuk mempertahankan tren positif ini dengan mendorong pembangunan perumahan yang berorientasi pada keberlanjutan, ketahanan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat di masa depan.

2.1.3.10. Stabilitas Ekonomi Makro

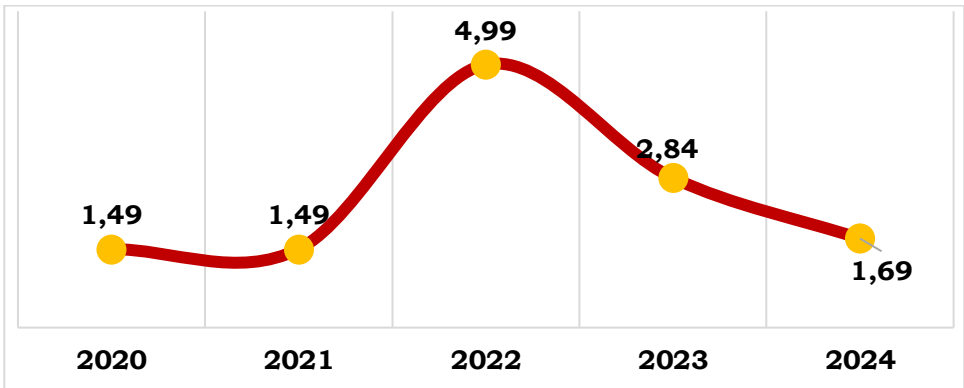
Stabilitas ekonomi makro penting untuk menjaga keseimbangan fiskal, moneter, dan sektor keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pengelolaan anggaran yang sehat, pengendalian inflasi, serta stabilisasi nilai tukar dan suku bunga, iklim usaha tetap kondusif dan kepercayaan investor terjaga. Stabilitas ini juga mendukung pembiayaan sektor produktif, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan UMKM, sehingga manfaat pembangunan dirasakan lebih merata. Secara keseluruhan, stabilitas ekonomi makro menjadi fondasi utama bagi pembangunan yang adil dan tangguh menghadapi tantangan global.

a. Tingkat Inflasi

Inflasi di Kota Semarang yang mengalami naik turun mencerminkan dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Fluktuasi inflasi dapat terjadi karena adanya perubahan dalam pola konsumsi masyarakat, biaya produksi, distribusi barang dan jasa, serta kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah. Pada periode tertentu, inflasi mengalami kenaikan yang bisa disebabkan oleh meningkatnya permintaan barang dan jasa, terutama saat momen tertentu seperti hari besar keagamaan, libur panjang, atau ketika daya beli masyarakat sedang meningkat. Faktor lain yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi adalah gangguan dalam rantai pasokan, seperti kenaikan harga bahan baku, kenaikan harga energi dan bahan bakar, atau kelangkaan barang akibat faktor eksternal seperti bencana alam atau krisis global.

Sebaliknya, ketika inflasi menurun, hal ini bisa menunjukkan bahwa harga-harga kembali stabil atau bahkan mengalami penurunan. Penurunan inflasi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pengendalian harga dari pemerintah, peningkatan produksi yang memenuhi kebutuhan pasar, atau turunnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan permintaan terhadap barang dan jasa menurun. Namun, jika inflasi turun terlalu drastis hingga mendekati deflasi, hal ini bisa menjadi tanda perlambatan ekonomi, di mana masyarakat cenderung menunda konsumsi dan investasi karena

ekspektasi harga akan terus turun. Berikut adalah perbandingan laju inflasi di Kota Semarang.



Sumber: BPS Kota Semarang, 2025

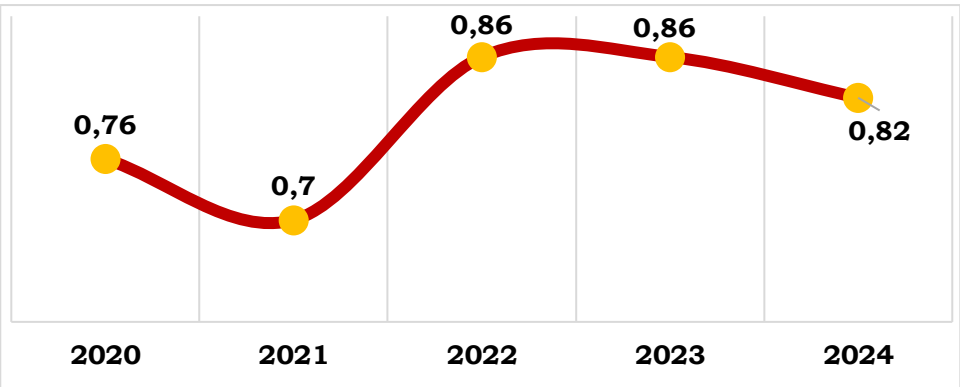
Gambar 2.49 Tingkat Inflasi Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Fluktuasi inflasi di Kota Semarang juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi nasional dan kondisi ekonomi global. Misalnya, perubahan kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia, nilai tukar mata uang, serta harga komoditas internasional seperti minyak dan pangan dapat berdampak pada harga-harga di tingkat lokal. Selain itu, faktor sosial dan politik juga dapat berpengaruh, seperti kebijakan upah minimum, regulasi perpajakan, serta kebijakan perdagangan yang mempengaruhi arus barang dan jasa di pasar.

Dalam konteks Kota Semarang, memahami pola fluktuasi inflasi menjadi penting untuk menyusun strategi ekonomi yang efektif. Pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan dan analisis secara berkala untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan inflasi naik atau turun, serta merancang kebijakan yang dapat meredam dampak negatif dari fluktuasi tersebut. Dengan pendekatan yang tepat, Kota Semarang dapat terus menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

b. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Kota Semarang, sebagai pusat perekonomian di Jawa Tengah, memiliki dinamika tersendiri dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dari sektor perpajakan. Rasio ini mencerminkan sejauh mana pendapatan pajak daerah berkontribusi terhadap total nilai ekonomi yang dihasilkan di wilayah tersebut, sekaligus menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam menggali potensi penerimaan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Adapun capaian indikator rasio pajak daerah terhadap PDRB dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:



Sumber: Bapenda Kota Semarang, 2024

Gambar 2.50 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB dari tahun 2020 ke 2024 yang menjadi 0,82 dari 0,76 dapat menjadi indikasi bahwa Kota Semarang semakin mandiri dalam pembiayaan daerah tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini dapat terjadi karena adanya optimalisasi pemungutan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang menjadi sumber utama penerimaan pajak. Pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, pajak hotel, serta pajak kendaraan bermotor menjadi kontributor signifikan dalam struktur pendapatan daerah yang turut mempengaruhi rasio ini.

Sebaliknya, apabila rasio pajak daerah terhadap PDRB mengalami stagnasi atau penurunan, hal ini bisa mengindikasikan berbagai tantangan dalam pengelolaan fiskal daerah. Faktor-faktor seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, rendahnya tingkat kepatuhan pajak, atau adanya kebijakan insentif pajak yang diberikan kepada pelaku usaha bisa menjadi penyebab berkurangnya kontribusi pajak terhadap PDRB. Dalam situasi ini, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perpajakan, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, serta menggali sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.

Sebagai kota dengan sektor perdagangan, jasa, dan industri yang terus berkembang, Kota Semarang memiliki peluang besar untuk meningkatkan rasio pajak daerah terhadap PDRB melalui berbagai strategi. Digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan transparansi dalam pengelolaan pajak, serta insentif yang seimbang antara menarik investasi dan menjaga pendapatan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga rasio pajak yang sehat. Dengan pengelolaan yang tepat, pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, rasio pajak daerah yang stabil dan meningkat akan memperkuat kapasitas fiskal Kota Semarang dalam mendanai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi investasi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebijakan perpajakan yang efektif dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis harus terus dijaga agar Kota Semarang dapat terus berkembang sebagai kota yang maju dan mandiri secara fiskal.

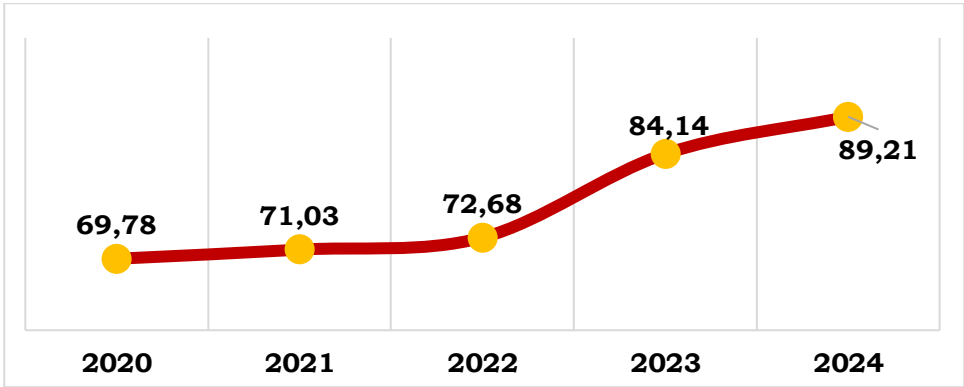
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana suatu institusi mampu mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik. Dengan menitikberatkan pada efisiensi tata laksana, optimalisasi struktur organisasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan pengawasan, indeks ini menjadi tolok ukur dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan responsif.

Dalam implementasinya, reformasi birokrasi tidak hanya bertumpu pada perbaikan prosedur administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penggerak utama perubahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan turut menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih modern dan adaptif. Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui indeks ini, pemerintah dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan sekaligus mendorong inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan demikian, reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif, melainkan sebuah upaya berkelanjutan dalam membangun pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Adapun capaian indeks reformasi birokrasi di Kota Semarang dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut.



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Semarang, 2025

Gambar 2.51 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

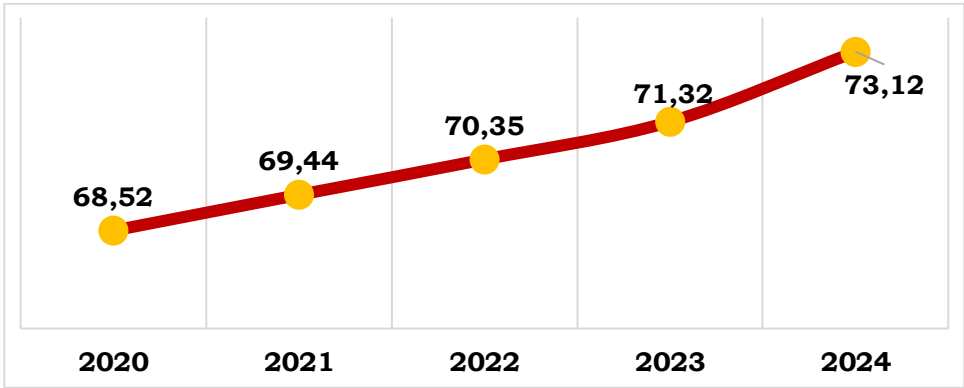
Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Semarang yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pemerintah kota secara konsisten melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Peningkatan ini mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kemajuan ini juga menjadi indikasi bahwa berbagai kebijakan dan program reformasi birokrasi yang diterapkan telah memberikan dampak positif. Mulai dari digitalisasi layanan publik, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan pengawasan internal, pengembangan *merit system*

hingga peningkatan kompetensi aparatur sipil negara, semua langkah tersebut berkontribusi terhadap pencapaian yang lebih baik.

Selain itu, tren peningkatan indeks ini menunjukkan bahwa Kota Semarang semakin adaptif terhadap tuntutan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan reformasi, tetapi juga menggambarkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha, dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, diharapkan Pemerintah Kota Semarang dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, juga semakin adaptif dalam melakukan pelayanan publik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik termasuk dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang responsif, adaptif dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efisien, dan inovatif.

b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kota Semarang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kinerja pemerintahan. Dengan implementasi E-SAKIP yang dapat diakses pada secara daring, Kota Semarang menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Adapun capaian nilai SAKIP Kota Semarang dari tahun ke tahun mengikuti grafik sebagai berikut.



Sumber: Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah, 2025

Gambar 2.52 Nilai SAKIP Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Peningkatan nilai SAKIP dari tahun ke tahun menjadi bukti nyata bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja di Kota Semarang semakin terintegrasi dan berorientasi pada hasil. Setiap Organisasi Perangkat Daerah, dituntut untuk menyusun program kerja yang lebih terukur, berbasis kinerja, dan selaras dengan visi pembangunan daerah. Selain itu, optimalisasi penggunaan teknologi dalam sistem pelaporan e-SAKIP telah memberikan kemudahan dalam pemantauan kinerja secara *real-time*. Hal ini memungkinkan setiap kebijakan dan program kerja dapat dievaluasi dengan lebih cepat dan tepat, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Capaian indeks SAKIP yang terus meningkat juga menunjukkan bahwa Kota Semarang semakin mampu menjalankan prinsip efektivitas anggaran. Dengan fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, efisiensi penggunaan sumber daya

dapat ditingkatkan, sekaligus memastikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan warga. Keberhasilan dalam peningkatan indeks SAKIP tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan terus memperkuat sistem pengukuran kinerja serta komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, Kota Semarang semakin siap menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

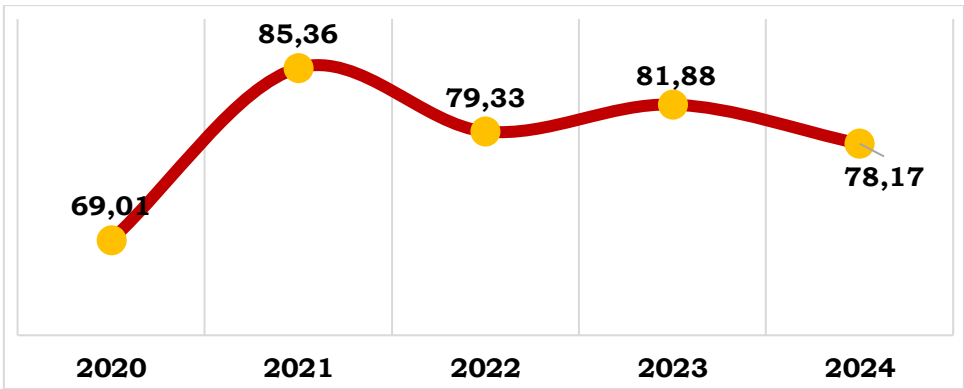
Ke depan, peningkatan Indeks SAKIP di Kota Semarang memerlukan penguatan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Penguatan budaya kinerja berbasis hasil menjadi kunci utama agar setiap kebijakan yang dijalankan tidak hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Transformasi sistem kerja yang lebih transparan dan akuntabel akan mendorong efektivitas pelaksanaan program serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal. Penguatan sistem perencanaan dan pengendalian yang semakin efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD menjadi tantangan ke depan yang harus terus diupayakan.

Digitalisasi dan integrasi sistem juga menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan kinerja. Dengan pemanfaatan teknologi yang lebih terintegrasi, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan sistem yang lebih canggih tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat transparansi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Pelatihan dan penguatan kompetensi dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip manajemen kinerja yang lebih efektif akan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan reformasi birokrasi. Aparatur yang profesional dan memiliki pemahaman yang kuat terhadap akuntabilitas kinerja akan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat juga perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan dampak yang nyata. Dengan sistem pengawasan yang lebih transparan, masyarakat dapat berperan aktif dalam menilai efektivitas layanan publik serta memberikan umpan balik yang konstruktif bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, serta sektor swasta, akan menjadi elemen penting dalam memperkuat inovasi di bidang pelayanan publik. Pendekatan yang lebih terbuka dan partisipatif akan menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran, serta mempercepat terwujudnya pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan berbagai upaya tersebut, Kota Semarang akan semakin mampu meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan, menjadikannya sebagai kota yang lebih transparan, efisien, dan inovatif dalam melayani masyarakat.

c. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi. IPKD menjadi cerminan dari kualitas tata kelola keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Adapun capaian IPKD Kota Semarang dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut ini.



Sumber: Kemendagri, 2025

Gambar 2.53 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Dalam implementasinya, IPKD dihitung berdasarkan beberapa aspek utama, seperti kualitas perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, efektivitas optimalisasi pendapatan asli daerah, efisiensi belanja daerah, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta kinerja pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dengan adanya IPKD, pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi terhadap sejauh mana daerah mampu mengelola keuangan dengan baik serta mengidentifikasi kendala yang perlu diperbaiki.

Fluktuasi dalam IPKD Kota Semarang mencerminkan adanya dinamika dalam manajemen keuangan daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perubahan kebijakan fiskal, efektivitas pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan administrasi keuangan menjadi faktor utama yang menentukan naik turunnya indeks ini. Selain itu, kondisi ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi nasional, serta dampak dari kebijakan pemerintah pusat juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IPKD.

Naiknya IPKD menandakan bahwa tata kelola keuangan daerah semakin baik, yang dapat diartikan sebagai adanya peningkatan dalam perencanaan anggaran, optimalisasi pendapatan daerah, serta efektivitas dalam realisasi belanja. Sebaliknya, turunnya IPKD mengindikasikan adanya kendala atau tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti penurunan pendapatan, inefisiensi dalam belanja, atau lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Fluktuasi dalam IPKD juga dapat menjadi refleksi dari bagaimana pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih baik dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

Untuk meningkatkan IPKD di Kota Semarang, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja agar setiap alokasi anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Perencanaan yang matang akan membantu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Optimalisasi pendapatan asli daerah juga menjadi kunci dalam meningkatkan stabilitas keuangan daerah. Pemerintah perlu menggali potensi sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat, seperti memanfaatkan aset daerah secara lebih produktif, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan pendapatan yang lebih kuat, Kota Semarang dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan memiliki fleksibilitas lebih dalam membiayai program pembangunan. Selain itu, efisiensi dalam belanja daerah harus menjadi perhatian utama. Pengeluaran pemerintah perlu diarahkan pada kegiatan yang benar-benar produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah serta mencegah terjadinya pemborosan atau penyalahgunaan anggaran.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Aparatur pemerintah daerah perlu dibekali dengan keterampilan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan berbasis teknologi serta standar akuntansi yang berlaku. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih profesional, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran dapat berjalan lebih efektif. Tidak kalah penting adalah penguatan sistem pengawasan dan evaluasi. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap program yang telah direncanakan dieksekusi dengan baik serta dilakukan monitoring secara berkala. Mekanisme pengawasan yang kuat akan membantu dalam mengidentifikasi permasalahan sejak dini dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Melalui strategi yang menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, Kota Semarang dapat meningkatkan stabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan tata kelola yang lebih baik, pembangunan kota dapat berjalan lebih optimal, kesejahteraan masyarakat meningkat, serta daya saing daerah semakin kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

d. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Penilaian Indeks ini atas dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022. Kemenhukham merilis IRH setiap tahun sejak tahun 2022. Indeks Reformasi Hukum di Kota Semarang yang

terus meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan kemajuan signifikan dalam upaya perbaikan sistem hukum di wilayah tersebut. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah kota, lembaga peradilan, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan efektif. Setiap tahunnya, perbaikan-perbaikan yang dilakukan di Kota Semarang berfokus pada beberapa aspek penting, seperti peningkatan kualitas layanan hukum, pemenuhan hak asasi manusia, penegakan hukum yang bebas dari korupsi, serta pemerataan akses terhadap keadilan. Selain itu, peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum serta penguatan sistem peradilan juga menjadi prioritas dalam reformasi hukum di kota ini. Adapun capaian indeks reformasi hukum dari tahun ke tahun mengikuti tabel sebagai berikut.

Tabel 2.33 Indeks Reformasi Hukum Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020*	2021*	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	NA	NA	69,80	77,19	97,24

**Kementerian Hukum dan HAM tidak merilis data tahun 2020 dan 2021*

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM, 2025

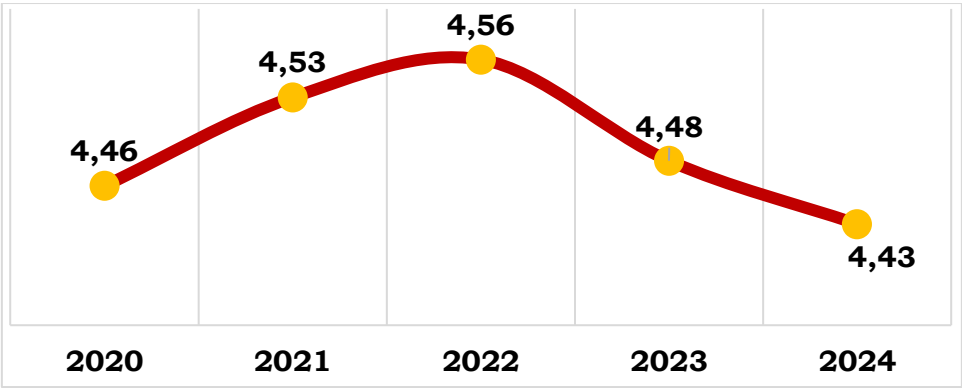
Salah satu faktor yang turut berperan dalam peningkatan Indeks Reformasi Hukum di Semarang adalah upaya untuk meningkatkan transparansi dalam proses peradilan. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses hukum, memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk mengikuti perkembangan perkara, serta memperkenalkan sistem pengaduan publik yang efisien untuk menangani laporan keluhan terkait penegakan hukum. Selain itu, Kota Semarang juga berupaya untuk memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, sistem hukum di kota ini menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Komitmen untuk memperbaiki kualitas hukum dan menegakkan hukum secara adil ini juga turut mendukung terciptanya rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Masyarakat yang merasa dilindungi oleh hukum dan mendapatkan akses yang adil akan semakin memperkuat fondasi pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif. Namun, meskipun terjadi peningkatan yang signifikan, tantangan tetap ada. Di beberapa sektor, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan mengurangi praktik korupsi yang kadang masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi, memperbarui kebijakan, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mendukung reformasi hukum yang lebih berkelanjutan. Secara keseluruhan, peningkatan Indeks Reformasi Hukum di Kota Semarang menjadi indikasi positif bahwa kota ini semakin menuju sistem hukum yang lebih baik, dan ini tentu memberikan dampak positif bagi pembangunan kota, kesejahteraan masyarakat, serta terciptanya keadilan sosial.

e. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik di Kota Semarang yang berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Hal ini

menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penurunan ini dapat menjadi indikator bahwa terdapat kendala dalam aspek pengambilan kebijakan, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta adaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Adapun capaian indikator indeks pelayanan publik adalah sebagai berikut.



Sumber: Kemenpan RB, 2025

Gambar 2.54 Indeks Pelayanan Publik Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Salah satu kemungkinan penyebab turunnya indeks pelayanan publik adalah meningkatnya kompleksitas layanan publik yang membutuhkan inovasi dan respons yang lebih cepat dari pemerintah daerah. Seiring dengan pertumbuhan kota dan meningkatnya jumlah penduduk, permintaan terhadap layanan publik juga semakin tinggi, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sistem pelayanan agar tetap optimal. Beban pelayanan yang semakin besar menuntut adanya penyesuaian dalam mekanisme kerja, baik dari segi efisiensi birokrasi, pemanfaatan teknologi, maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang menangani layanan publik secara langsung. Jika sistem tidak berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat, maka efektivitas pelayanan dapat menurun, menyebabkan ketidakpuasan dan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Selain itu, perubahan regulasi atau kebijakan pelayanan yang belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif juga dapat mempengaruhi kualitas layanan. Jika terdapat peralihan sistem atau mekanisme baru yang membutuhkan penyesuaian, masyarakat mungkin mengalami masa transisi yang menyebabkan persepsi terhadap pelayanan menjadi kurang baik. Proses adaptasi ini bisa memerlukan waktu yang tidak sebentar, terutama jika perubahan tersebut menyangkut tata kelola administrasi yang kompleks, pengintegrasian layanan lintas sektor, atau penerapan teknologi baru yang membutuhkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hambatan dalam penyesuaian ini bisa berdampak pada kelambatan proses pelayanan, meningkatnya keluhan publik, dan penurunan kepuasan terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Faktor eksternal, seperti tantangan ekonomi, dinamika sosial, atau dampak jangka panjang dari pandemi, juga dapat berkontribusi terhadap penurunan indeks ini. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, misalnya, dapat berpengaruh terhadap alokasi anggaran pemerintah daerah untuk sektor pelayanan publik, sehingga ketersediaan sumber daya untuk mendukung layanan menjadi terbatas. Selain itu, meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Semarang dapat memperbesar

tekanan terhadap sistem layanan publik, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, serta layanan sosial lainnya. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas layanan, maka masyarakat akan merasakan penurunan kualitas dalam akses dan kecepatan pelayanan yang diberikan.

Di sisi lain, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Semakin berkembangnya teknologi dan akses informasi membuat masyarakat lebih sadar akan hak-hak mereka dalam menerima pelayanan publik yang berkualitas. Standar pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan layanan berbasis digital. Masyarakat kini lebih menginginkan layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Jika inovasi layanan tidak berkembang sejalan dengan harapan masyarakat, maka tingkat kepuasan dapat mengalami penurunan meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya peningkatan layanan. Kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas pelayanan yang diterima dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan indeks pelayanan publik.

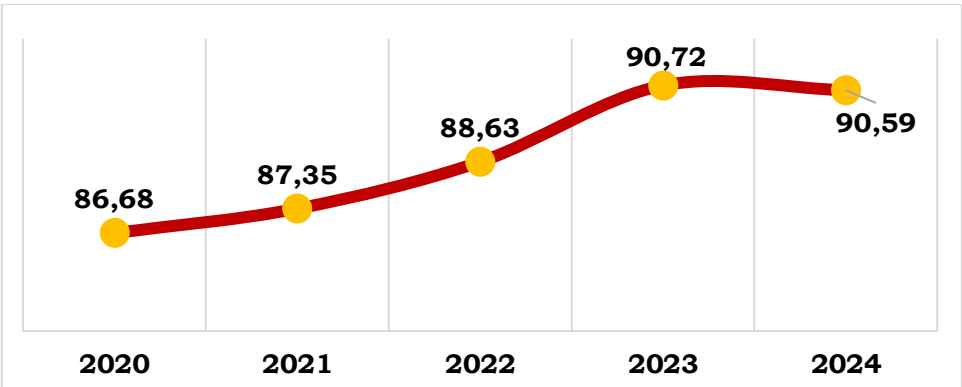
Untuk mengatasi tren penurunan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah penting agar aparatur yang bertugas dalam layanan publik memiliki keterampilan, profesionalisme, serta pemahaman yang lebih baik terhadap sistem pelayanan modern. Percepatan digitalisasi layanan juga perlu diperluas dan dioptimalkan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat, tanpa harus mengalami hambatan birokrasi yang berbelit. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Infrastruktur layanan publik, seperti pusat layanan terpadu, fasilitas kesehatan, serta sistem transportasi pendukung, perlu terus diperbarui agar mampu menampung permintaan yang semakin besar. Pemerintah Kota Semarang juga perlu memperkuat keterlibatan masyarakat dalam evaluasi layanan, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan melalui rembug warga dan musrenbang, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kota Semarang dapat kembali meningkat, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, serta menciptakan sistem pelayanan yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa sebagaimana tertuang pada dokumen RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045.

f. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi atau unit pelayanan publik. IKM ini berfungsi sebagai cermin dari kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh lembaga atau pemerintah daerah, serta

memberikan gambaran yang jelas tentang pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima.

Dengan menggunakan IKM, instansi atau pemerintah dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dalam pelayanan publik yang diberikan. Hasil dari survei kepuasan ini menjadi informasi yang penting untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pelayanan yang lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan umpan balik yang konstruktif bagi perbaikan pelayanan. Secara keseluruhan, IKM bukan hanya sekedar alat ukur, tetapi juga sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah dan penyedia layanan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta untuk membangun hubungan yang lebih baik antara instansi dengan masyarakat. Adapun capaian IKM mengikuti grafik sebagai berikut.



Sumber: Bagian Organisasi, 2024

Gambar 2.55 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Pada tahun 2024, capaian indeks kepuasan masyarakat adalah 90,59. Meskipun capaian 2024 menurun, tetapi dalam 2 tahun terakhir capaian IKM selalu diatas 90. Hal ini mengindikasikan Pemerintah Kota Semarang selalu meningkatkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat. Berdasarkan data di atas, terlihat bahwaPa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang setiap tahun mengalami kenaikan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin naiknya indeks kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat Kota Semarang dari tahun 2015 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan skor mulai dari 75 pada 2015 menjadi 90,72 pada 2023 dapat dilihat pada grafik di atas. Peningkatan kualitas hasil ini akan menjadi modal untuk meningkatkan pelayanan publik di masa depan, dengan didukung teknologi informasi untuk mempercepat penyediaan layanan.

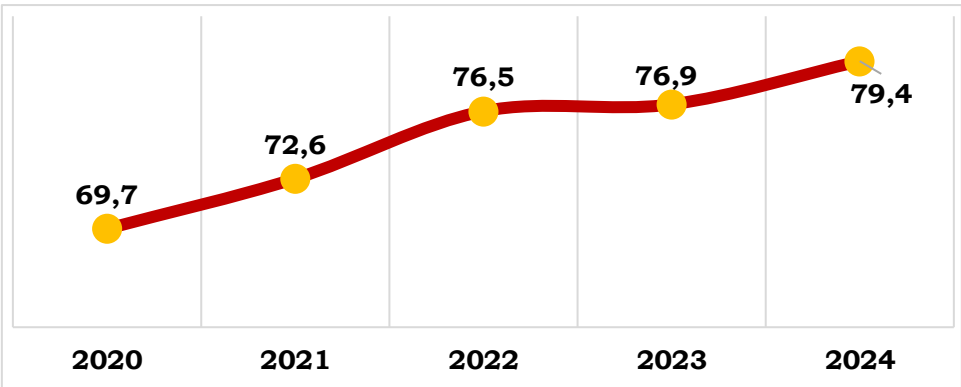
g. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Pembangunan di Kota Semarang terus mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan cermin keberhasilan pembangunan itu sendiri. Semakin tinggi persentase partisipasi, semakin besar pula kemungkinan pembangunan akan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi yang aktif dari masyarakat akan memberikan legitimasi dan keberlanjutan pada pembangunan. Pelibatan masyarakat

dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi hasil dari pembangunan tersebut, sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas pembangunan. Partisipasi masyarakat ini tidak hanya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan seperti musyawarah rencana pembangunan di tingkat wilayah maupun kota, akan tetapi juga melibatkan partisipasi aktif Lembaga Kemasyarakatan di tingkat wilayah maupun tingkat kota. Pemerintah Kota Semarang juga secara rutin mengadakan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat seperti acara Rembug Warga dengan melibatkan perwakilan RT/RW, PKK, tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan mendapatkan dukungan dan masukan dari berbagai pihak. Selain itu, melalui pertemuan ini yang nantinya akan dibawa ke musrenbang kelurahan juga memungkinkan masyarakat untuk mengawal jalannya program pembangunan agar berjalan sesuai rencana. Dengan adanya transparansi dalam perumusan kebijakan, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan, serta memberikan evaluasi terhadap program yang telah berjalan. Partisipasi dalam musyawarah tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam perencanaan, implementasi, hingga evaluasi proyek-proyek pembangunan yang didanai dari APBD, maupun dana lainnya.

Sebagai elemen pemerintahan terkecil, peran RT dan RW, termasuk PKK RT dan RW, akan terus dikembangkan melalui pemberian tambahan peran untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang. RT dan RW adalah garda terdepan yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan peran RT dan RW ini juga akan terus didorong untuk semakin menguatkan modal sosial melalui peningkatan kegiatan yang mengedepankan interaksi dan pengembangan kapasitas komunitas yang diharapkan akan memunculkan kemampuan dari komunitas untuk melakukan tindakan terhadap permasalahan yang muncul, baik permasalahan terkait dengan sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi. Sehingga *meaningful participation* dari RT dan RW akan muncul dan dapat membantu kerja-kerja Pemerintah Kota Semarang dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Semarang juga telah mengembangkan berbagai mekanisme agar musyawarah pada tingkat kelurahan dan kecamatan tidak hanya bisa dilakukan melalui pertemuan luring saja, namun musyawarah ini dapat berjalan lebih efektif, inklusif dan real-time, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital. Forum daring, serta aplikasi aduan *laporsemar* dapat menjadi sarana tambahan bagi masyarakat untuk turut serta dalam menyuarakan pendapat dan aduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan. Dengan demikian, partisipasi tidak hanya terbatas pada pertemuan fisik, tetapi juga dapat diakses oleh lebih banyak warga dari berbagai lapisan masyarakat. Adapun capaian persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan mengikuti grafik sebagai berikut.



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Gambar 2.56 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Persen)

h. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat risiko korupsi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2021. Indeks IIN di Kota Semarang dari tahun ke tahun menggambarkan kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan pemerintahan di wilayah masing-masing dan kualitas kehidupan masyarakat. Indeks ini mencerminkan sejauh mana nilai-nilai integritas seperti transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran diterapkan dalam berbagai sektor. Kenaikan IIN menunjukkan bahwa Kota Semarang semakin berhasil menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan profesional, yang bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Adapun capaian indeks IIN ini mengikuti tabel sebagai berikut.

Tabel 2.34 Indeks Integritas Nasional Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Integritas Nasional	Angka	NA	78,21	74,10	74,80	71,60

Sumber: Inspektorat Kota Semarang, 2024

Meskipun pada tahun 2024 capaian Indeks Integrasi Nasional (IIN) Kota Semarang mengalami penurunan, namun Pemerintah Kota Semarang terus berupaya menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pengelolaan anggaran secara efisien, sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat. Dengan sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan dapat diawasi dan sistem pengelolaan arsip yang baik, kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah semakin meningkat. Transparansi dalam pengambilan keputusan serta penggunaan anggaran publik yang lebih jelas dan akuntabel juga berperan besar dalam meningkatkan integritas pemerintahan.

Selain itu, peran masyarakat yang semakin aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan juga turut memperkuat integritas tersebut. Masyarakat kini lebih mudah mengakses informasi terkait kebijakan publik dan memiliki saluran yang jelas untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka. Hal ini menunjukkan adanya perubahan budaya masyarakat yang lebih peduli dan terlibat dalam pembangunan kota. Peningkatan IIN juga berkaitan erat dengan penegakan hukum yang lebih tegas dan adil. Kota Semarang semakin berkomitmen dalam memberantas praktik korupsi dan ketidakadilan melalui berbagai upaya yang melibatkan lembaga penegak hukum, baik di tingkat kota maupun provinsi. Hal ini semakin memberikan

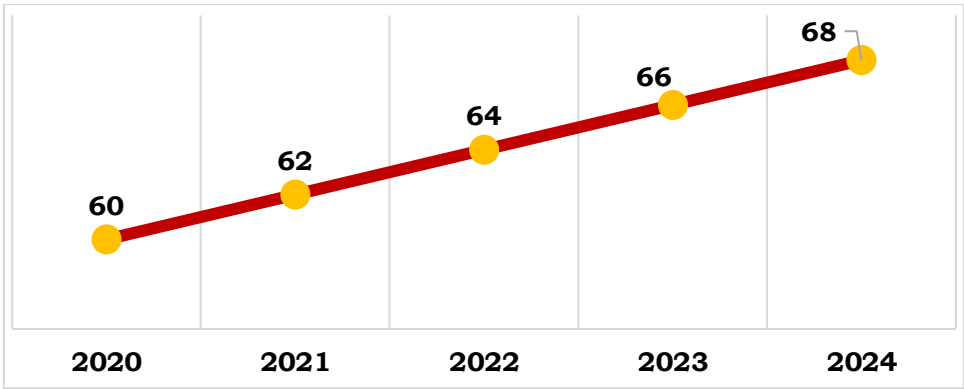
rasa aman dan nyaman bagi warga, karena mereka merasa hukum berlaku secara adil dan tanpa pandang bulu.

Dengan terus meningkatnya IIN, Kota Semarang menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel dapat menjadi kunci utama untuk membangun kota yang berkelanjutan dan berkembang. Keberhasilan ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan lembaga terkait, tetapi juga oleh seluruh masyarakat, yang dapat merasakan dampaknya dalam bentuk layanan publik yang lebih baik, kualitas hidup yang meningkat, dan peluang yang lebih merata dalam berbagai sektor kehidupan. Peningkatan IIN ini tentu menjadi modal penting bagi Semarang untuk terus maju, menarik investasi, dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pembangunan berbasis integritas.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

a. Persentase Penegakan Perda

Peningkatan persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Semarang dari tahun ke tahun mencerminkan adanya kemajuan yang sangat berarti dalam penerapan hukum dan kebijakan lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Semarang semakin mampu menjalankan peranannya dalam menciptakan ketertiban dan keadilan bagi warganya. Berbagai faktor yang saling mendukung menjadi kunci utama di balik keberhasilan ini. Salah satu faktor yang paling penting adalah peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di Semarang. Satpol PP, kepolisian, dan aparat terkait lainnya kini memiliki keterampilan dan pemahaman yang lebih baik dalam menegakkan perda. Mereka tidak hanya lebih sigap dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga lebih mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap tindakan mereka. Dengan adanya pelatihan rutin, sosialisasi, dan evaluasi yang lebih baik, aparat penegak hukum semakin terlatih dalam menghadapi berbagai situasi yang ada di lapangan. Adapun capaian Persentase Penegakan Perda dari tahun ke tahun mengikuti grafik sebagai berikut.



Sumber: Satpol PP Kota Semarang, 2025

Gambar 2.57 Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Persen)

Selain itu, peningkatan sistem administrasi dan pengawasan turut berperan penting dalam memperlancar penegakan Perda. Pemerintah Kota Semarang kini lebih fokus dalam menyusun dan memperbaiki mekanisme administrasi yang terkait dengan pelaksanaan perda. Dengan sistem yang

lebih terorganisir dan transparan, pengawasan terhadap penerapan perda menjadi lebih mudah dilakukan. Hal ini juga memudahkan pihak berwenang dalam mengambil langkah cepat dan tepat dalam menangani setiap pelanggaran yang terjadi.

Faktor lainnya yang turut mendukung adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan daerah. Melalui berbagai sosialisasi, dan program edukasi yang digelar oleh pemerintah, masyarakat kini semakin paham tentang dampak negatif dari ketidakpatuhan terhadap perda. Masyarakat mulai menyadari bahwa penegakan perda bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi juga untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bersama. Masyarakat juga semakin kooperatif dan mendukung penerapan aturan, yang berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih tertib. Sosialisasi ini juga telah menyasar mulai dari pendidikan dasar, seperti Satpol PP *Goes to School*, sosialisasi yang menyasar masyarakat umum, hingga sosialisasi langsung di lapangan terhadap masyarakat yang terindikasi melanggar perda.

Komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk menegakkan hukum secara konsisten dan tanpa pandang bulu juga merupakan faktor utama dalam peningkatan penegakan perda. Pemerintah tidak hanya menindak tegas pelanggar aturan, tetapi juga memberikan sanksi yang jelas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini memberikan efek jera dan mendorong masyarakat untuk lebih patuh pada peraturan yang ada. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) turut memperkuat pengawasan dan penerapan perda. LSM yang aktif dalam memantau pelaksanaan perda dan memberikan rekomendasi atau kritik yang konstruktif membantu pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas dan efektivitas kebijakan daerah. Kehadiran LSM juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan dan masukan terkait implementasi perda, sehingga tercipta dialog yang lebih terbuka dan partisipatif.

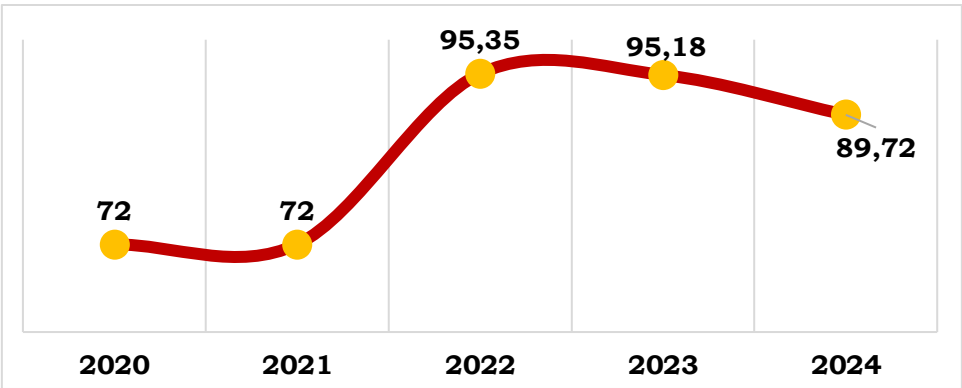
Lebih jauh lagi, adanya upaya untuk menyesuaikan perda dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat turut mendukung efektivitas penegakan aturan. Pemerintah Kota Semarang secara berkala melakukan revisi dan penyesuaian terhadap perda yang dianggap sudah tidak relevan atau perlu diperbarui, sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi yang ada. Dengan demikian, perda yang diterapkan menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat dan lebih efektif dalam menciptakan perubahan positif. Secara keseluruhan, peningkatan penegakan perda di Kota Semarang mencerminkan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan dan kualitas kehidupan masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya membuahkan hasil yang positif. Semakin tingginya tingkat penegakan perda menunjukkan bahwa Kota Semarang berhasil menciptakan lingkungan yang tertib, aman, berdikari dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

b. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana demokrasi berkembang di Indonesia. Indeks ini

mengukur tiga aspek utama yang menjadi fondasi demokrasi, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Kebebasan sipil mencakup hak individu untuk menyuarakan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi tanpa adanya intimidasi atau pembatasan yang tidak sah. Hak-hak politik, di sisi lain, mengukur seberapa besar partisipasi warga negara dalam proses politik, seperti dalam pemilihan umum, serta kebebasan untuk memilih dan dipilih. Sedangkan lembaga demokrasi mengukur kualitas dan efektivitas lembaga-lembaga yang mendukung sistem demokrasi, seperti partai politik, parlemen, dan sistem pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

Melalui indeks ini, kita dapat melihat sejauh mana demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik, serta mengetahui area yang masih perlu ditingkatkan. Skor indeks demokrasi yang lebih tinggi menunjukkan kondisi demokrasi yang lebih matang dan berkembang, sementara skor yang lebih rendah mengindikasikan adanya tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Secara keseluruhan, indeks ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana demokrasi diterapkan di berbagai daerah, serta membantu pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas demokrasi agar semakin inklusif, adil, dan transparan. Adapun capaian indeks demokrasi adalah sebagai berikut.



Sumber: Kesbangpol Kota Semarang, 2025

Gambar 2.58 Indeks Demokrasi Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

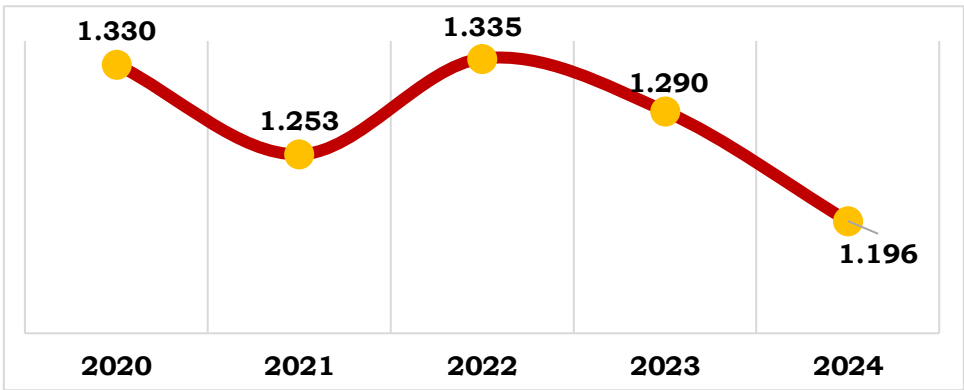
Pada tahun 2024, target Indeks Demokrasi yang ditetapkan sebesar 95,19 berhasil tercapai dengan angka 89,72, yang setara dengan 94,25% dari target yang diinginkan. Meskipun capaian ini masih tergolong dalam kategori "baik", angka ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan hasil Indeks Demokrasi tahun 2023 yang tercatat sebesar 95,18. Penurunan ini terjadi di seluruh aspek yang terdapat dalam Indeks Demokrasi tahun 2024, namun penurunan yang paling signifikan terjadi pada dua aspek utama, yaitu Aspek Kebebasan Sipil dan Aspek Lembaga Demokrasi.

Penurunan dalam aspek kebebasan sipil salah satunya disebabkan oleh terjadinya peristiwa demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan. Salah satu contoh peristiwa tersebut adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa pada Senin, 26 Agustus 2024, yang menuntut penolakan terhadap revisi undang-undang Pilkada. Aksi demonstrasi ini berakhir ricuh dan menyebabkan gangguan terhadap kebebasan sipil yang tercermin dalam penurunan skor pada aspek tersebut. Selain itu, faktor lain yang berkontribusi terhadap penurunan angka Indeks Demokrasi adalah tingginya

angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. Data yang tercatat hingga Juli 2024 menunjukkan bahwa sudah ada 59 kasus kekerasan terhadap perempuan di kota tersebut. Kota Semarang termasuk dalam lima kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang tinggi, bersama dengan Demak, Purwokerto, Banyumas, dan Pati. Keadaan ini menunjukkan tantangan besar dalam hal penegakan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap perempuan, yang turut mempengaruhi penurunan dalam Indeks Demokrasi. Oleh sebab itu, maka langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan ke depan harus bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Untuk memperbaiki aspek kebebasan sipil, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat komunikasi dan dialog, guna menciptakan ruang bagi ekspresi publik yang aman dan damai. Selain itu, reformasi dalam sistem pengelolaan demonstrasi harus diperkenalkan, dengan memastikan aparat keamanan dapat menanggapi secara bijaksana tanpa melibatkan kekerasan yang merugikan.

Penguatan lembaga-lembaga demokrasi juga menjadi prioritas utama. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem kelembagaan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan politik dan kebijakan publik sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi yang lebih inklusif. Sementara itu, dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, langkah nyata harus diambil dengan meningkatkan penegakan hukum, mempercepat penyelesaian kasus kekerasan, serta memberikan dukungan dan perlindungan yang lebih baik kepada korban. Hal ini semua adalah bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan aman bagi semua warga negara, tanpa terkecuali.

c. Angka Kriminalitas



Sumber: Satpol PP Kota Semarang, 2025

Gambar 2.59 Angka Kriminalitas Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Kasus)

Angka kriminalitas yang menurun dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perubahan positif dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Perkembangan ini tidak hanya menunjukkan peningkatan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga keberhasilan dalam upaya pencegahan kejahatan yang lebih sistematis dan terencana. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan angka kriminalitas adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan bersama, serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan tindak kriminal

yang terjadi di sekitar mereka. Secara detail, angka kriminalitas dari tahun ke tahun mengikuti tabel sebagai berikut.

Tabel 2.35 Angka Kriminalitas Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Kasus)

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kriminalitas	Kasus	1.330	1.253	1.335	1.290	1.196
	a. Pencurian dengan pemberataan	Kasus	0	14	138	162	92
	b. Pencurian ranmor	Kasus	33	31	91	40	34
	c. Pencurian dengan kekerasan	Kasus	4	7	11	23	10
	d. Penganiayaan	Kasus	19	38	115	168	23
	e. Pembunuhan	Kasus	3	1	6	5	2
	f. Perkosaan	Kasus	0	0	2	5	1
	g. Uang Palsu	Kasus	0	0	0	18	25
	h. Narkotika	Kasus	0	0	21	138	166
	i. Perjudian	Kasus	0	1	7	4	26
	j. Pemerasan/Ancaman	Kasus	3	3	16	5	12
	k. Lainnya	Kasus	1.268	1.084	928	722	805

Sumber: Satpol PP Kota Semarang, 2025

Selain aparat kepolisian, peran Satpol PP Kota Semarang juga sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan mengurangi angka kriminalitas. Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan peraturan daerah, menangani pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban umum, serta memastikan masyarakat mematuhi berbagai peraturan yang ada. Keberadaan Satpol PP di lapangan, baik dalam melakukan patroli rutin maupun mengatasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan gangguan, sangat membantu dalam mencegah munculnya tindak kriminal. Satpol PP juga sering kali bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam menangani kasus yang melibatkan kerusuhan sosial, kerusakan fasilitas umum, atau pelanggaran berat yang berhubungan dengan ketertiban. Dalam banyak kasus, peran Satpol PP yang cepat tanggap dalam menangani pelanggaran di tingkat lokal dapat mencegah berkembangnya potensi kejahatan yang lebih besar. Selain itu, mereka juga berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan disiplin terhadap peraturan yang ada.

Selain itu, program-program yang melibatkan aparat keamanan dan masyarakat, seperti patroli rutin, peningkatan kehadiran polisi di area rawan, serta edukasi hukum kepada masyarakat, telah membuahkan hasil yang signifikan. Teknologi juga berperan penting dalam membantu aparat penegak hukum untuk memantau dan mendeteksi potensi kejahatan lebih dini, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sebelum kejadian terjadi. Peningkatan kesejahteraan ekonomi juga turut berperan dalam menurunkan angka kriminalitas. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial, mereka cenderung lebih sedikit terlibat dalam kegiatan kriminal. Dengan berjalannya waktu, angka kriminalitas yang menurun ini memberi harapan bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan, ketertiban dan keamanan dapat terus terjaga dengan baik di masa depan.

Ke depan, upaya yang perlu dilakukan oleh Satpol PP sangat penting untuk mengurangi gangguan kriminalitas dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Hal ini dilakukan agar lonjakan gangguan kriminalitas

tidak terjadi di kemudian hari seperti pada tahun 2021 ke tahun 2022. Satpol PP, sebagai garda terdepan dalam penegakan ketertiban umum, memiliki peran yang krusial dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal di masyarakat. Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah intensifikasi patroli rutin di berbagai area rawan kejahatan. Dengan kehadiran Satpol PP yang lebih terlihat di tengah masyarakat, potensi terjadinya gangguan keamanan bisa diminimalisir, karena pelaku kejahatan cenderung menghindari lokasi yang diawasi dengan ketat. Selain itu, Satpol PP juga perlu terus meningkatkan penegakan peraturan daerah yang ada, baik yang berkaitan dengan ketertiban umum maupun pelanggaran-pelanggaran ringan yang dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar jika tidak ditangani dengan segera. Dengan memastikan peraturan ditaati secara konsisten, Satpol PP dapat mengurangi ruang gerak bagi tindakan kriminal. Kerjasama yang lebih erat antara Satpol PP dengan aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya juga harus diperkuat. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa penanganan gangguan keamanan dapat lebih cepat, efektif, dan terkoordinasi dengan baik. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan gangguan kriminalitas dapat berkurang secara signifikan, dan ketertiban serta keamanan masyarakat dapat terus terjaga.

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan dan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi persaingan, baik secara ekonomi, sosial, maupun sektor lainnya. IDSD mencakup berbagai faktor penting, seperti kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, kebijakan pemerintah, inovasi, iklim usaha, serta kualitas pelayanan publik. Dengan kata lain, IDSD mencerminkan sejauh mana daerah tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan warganya dalam konteks persaingan yang lebih luas. Adapun capaian IDSD dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut

Tabel 2.36 Indeks Daya Saing Daerah Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,898	NA	4,16	3,95	4,31

Sumber: BRIDA Kota Semarang, 2024

Kota Semarang terus menunjukkan tren positif dalam peningkatan IDSD dari tahun ke tahun. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, berdasarkan data terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), IDSD Kota Semarang kembali meningkat pada tahun 2024 dan mencapai angka 4,31. Capaian ini berada jauh di atas capaian IDSD rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang hanya mencapai 3,84. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah kota dalam meningkatkan daya saing daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pembangunan yang dilakukan di Kota Semarang berfokus pada empat aspek utama yang menjadi indikator IDSD, yaitu lingkungan, pendukung SDM, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat aspek ini saling berkaitan dan

menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Semarang sebagai kota yang maju, modern, dan berkelanjutan.

Dari aspek lingkungan, Semarang semakin menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan tata ruang dan infrastruktur kota. Berbagai proyek strategis telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, mulai dari pengembangan ruang terbuka hijau, hingga pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat. Selain itu, berbagai upaya mitigasi terhadap dampak perubahan iklim juga terus dilakukan untuk menjadikan Kota Semarang sebagai kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Dalam aspek pendukung SDM, Pemerintah Kota Semarang terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan vokasional, serta penguatan sektor kewirausahaan dan industri kreatif. Akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, program-program pemberdayaan yang melibatkan komunitas lokal dan pelaku usaha semakin mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Aspek pasar, Kota Semarang semakin menarik bagi para investor dan pelaku bisnis. Peningkatan kemudahan berusaha, digitalisasi layanan publik, serta pengembangan sektor perdagangan dan jasa telah menjadikan kota ini sebagai pusat ekonomi yang semakin kompetitif. Selain itu, sektor pariwisata yang terus berkembang dengan berbagai destinasi unggulan juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing daerah, menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang dan menikmati keunikan Kota Semarang.

Sedangkan aspek ekosistem inovasi, Semarang terus menunjukkan perkembangan dalam pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk mendukung berbagai sektor ekonomi dan layanan publik. Inisiatif *Smart City* yang diterapkan di berbagai bidang semakin mempermudah akses layanan bagi masyarakat dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dalam pengembangan inovasi juga semakin diperkuat, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi dan kreativitas.

Peningkatan IDSD Kota Semarang pada tahun 2024 ini menjadi bukti nyata bahwa kota ini terus bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dalam pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, penguatan sektor ekonomi, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi, Semarang tidak hanya tumbuh sebagai kota metropolitan yang modern, tetapi juga sebagai kota yang siap menghadapi tantangan masa depan dan bersaing di kancah global.

b. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian untuk mengevaluasi tingkat inovasi suatu daerah. Secara struktur, indeks ini didasarkan dua aspek, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan inovasi daerah, dengan 8 variabel, dan 36 indikator. Tujuan dari indeks ini adalah

untuk memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, dan memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai; mendorong penerapan *good governance*; meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Capaian indeks inovasi daerah Kota Semarang dari tahun ke tahun mengikuti tabel sebagai berikut.

Tabel 2.37 Indeks Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	1423*	57,49	60,79	65,80	67,92

**terdapat perbedaan antara definisi operasional pada tahun 2020 dan 2021-2024*

Sumber: BRIDA Kota Semarang, 2025

Pada tahun 2024, Kota Semarang berhasil melampaui target IID yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang, serta berhasil mempertahankan predikat sebagai Kota Terinovatif dalam ajang IGA 2024. Kota Semarang melaporkan lebih dari 90 inovasi, baik yang bersifat digital maupun non-digital, pada ajang tersebut. Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa pencapaian IID terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini mencerminkan adanya progres yang signifikan dalam hal inovasi di kota tersebut. Secara lebih rinci, jika ditelaah lebih lanjut, terlihat bahwa jumlah perangkat daerah yang memperoleh fasilitasi dan dukungan untuk melaksanakan inovasi daerah sejak tahun 2020 terus menunjukkan kinerja yang semakin baik dan positif, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi telah menjadi fokus utama dalam pembangunan Kota Semarang dan telah memberikan dampak yang positif baik secara langsung kepada masyarakat maupun terhadap perkembangan daerah itu sendiri.

Permasalahan dalam peningkatan indeks ini adalah belum lengkapnya dokumentasi inovasi OPD, dan belum lengkapnya dokumen pedoman teknis dan SOP inovasi OPD. Data terkini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari perangkat daerah yang berhasil mengimplementasikan inovasi secara optimal. Rendahnya persentase tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya dukungan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi terbaru, serta kurangnya pemahaman atau kesadaran mengenai pentingnya inovasi dalam pemerintahan daerah. Selain itu, beberapa perangkat daerah mungkin menghadapi tantangan dalam hal anggaran atau birokrasi yang menghambat implementasi ide-ide inovatif. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya strategis untuk mendorong adopsi inovasi yang lebih luas.

2.1.5. Kerjasama Daerah

Tabel 2.38 Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	JENIS	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	NA	14	39	28	25
2	Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri	0	1	3	5	2

Sumber: Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang, 2024

Kerja Sama Daerah adalah upaya kolaboratif antara beberapa wilayah untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat. Melalui sumber daya, pengetahuan, dan kemampuan, daerah dapat mengatasi tantangan bersama, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan hasil pembangunan. Kerja sama ini juga mendorong pertukaran ide dan inovasi, memperkuat hubungan antar wilayah, serta menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Secara umum, kerja sama daerah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih merata dan berkelanjutan.

2.1.6. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kota Semarang

Sebagai kota metropolitan yang terus berkembang, Kota Semarang menghadapi tantangan besar, seperti:

1. Banjir akibat sedimentasi dan sistem drainase yang belum optimal.
2. Kapasitas pompa air yang terbatas, terutama saat curah hujan tinggi.
3. Dampak perubahan iklim, yang meningkatkan risiko banjir di berbagai kawasan.
4. Kepadatan lalu lintas, yang dipicu oleh minimnya transportasi publik yang efisien.

Tanpa strategi inovatif, masalah ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kualitas hidup warga. Pemerintah Kota Semarang, sebagai penanggung jawab penyediaan layanan, memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang saat ini sebagian besar masih bergantung pada pembiayaan dari APBD. Namun, kebutuhan pembiayaan yang besar tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh kemampuan finansial Kota Semarang. Penyediaan layanan publik juga tidak dapat sepenuhnya dibiayai melalui APBD. Kondisi ini disebabkan oleh adanya kecenderungan peningkatan kebutuhan pembiayaan layanan publik yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, pemerintah Kota Semarang perlu melakukan inovasi dalam mencari alternatif pembiayaan pembangunan.

Saat ini pelaksanaan kegiatan menggunakan alternatif pembiayaan pembangunan terus dilakukan melalui penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, swasta dan masyarakat. Dengan inovasi pembiayaan tersebut mampu menjadi kunci keberlanjutan pembangunan. Tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kota Semarang meluncurkan berbagai program

strategis yang berjalan secara mandiri dengan dukungan kolaboratif dari berbagai pihak. Salah satu alternatif pembiayaan melalui bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terdapat beberapa rencana proyek strategis yang akan didanai melalui APBN untuk menyelesaikan permasalahan Kota Semarang. Adapun proyek-proyek sebagai berikut:

Tahun 1. Pengendalian Banjir dan Rob

Pemerintah Kota Semarang menjadi kota yang masuk ke dalam program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) untuk pengendalian banjir dan rob. Program tersebut merupakan Loan dari World Bank melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun lokus pekerjaan meliputi normalisasi Sungai Tenggang & Sungai Sringin (tahun 2025 Rp 682,3 miliar), Sungai Semarang, Asin, & Baru (tahun 2027 Rp 80,1 miliar), Sub-Sistem Tenggang-Sodor (tahun 2025 Rp 333 miliar) dan Sungai Silandak (tahun 2027 Rp 213 miliar). Ruang lingkup pekerjaan meliputi normalisasi sungai, peningkatan kapasitas pompa dan rencana tampungan air berupa kolam retensi dan embung.

Tahun 2. Penguatan Drainase Kota

Program ini merupakan Kerjasama antara Kementerian PU dengan Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Program D2B. Lokus pekerjaan pada Rekondisi Kartini Drain (Rp 218,4 miliar) dan Rehabilitasi Saluran Sabuk Lateral Kanal (Rp 25,2 miliar). Ruang lingkup pekerjaan meliputi rehabilitasi saluran dengan tujuan mengurangi genangan di dalam kota secara signifikan.

Tahun 3. Pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Proyek Pengolahan Sampah menjadi energi Listrik (PSEL) Kota Semarang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) serta salah satu proyek percontohan bersama dengan 12 kota lainnya di Indonesia. Proyek PSEL Kota Semarang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Tujuan dibangunnya PSEL Kota Semarang yaitu untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Semarang yang timbulan sampahnya terus meningkat. Jumlah Sampah yang masuk ke TPA Jatibarang pada tahun 2024 mencapai 309.492,31 ton/tahun atau 847,92 ton/hari. TPA Jatibarang saat ini kondisinya sudah *overload* dan diperkirakan umur pakai TPA Jatibarang tinggal 3 Tahun lagi. Diharapkan proyek PSEL ini dengan teknologinya yang akan digunakan dapat mengurangi lebih dari 80% timbulan sampah Kota Semarang. Lingkup proyek yaitu *Design, Build, Finance, Operate, Maintenance, dan Transfer* (DBFOMT) dengan masa konsesi selama 20 tahun, ditambah dengan masa konstruksi selama 2 tahun serta indikasi nilai investasi sebesar 2,6 Triliun. Pengembalian investasi mendapatkan penjaminan pemerintah (Government Guarantee) dari PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII). Mekanisme untuk pengembalian investasi adalah menggunakan *tipping fee* dengan indikasi *tipping fee* sebesar Rp 200 - 250 Miliar per tahun. Lokasi proyek berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Luas lahan yang dibutuhkan sekitar 11 Ha, dengan produksi sampah yang dihasilkan sekitar 1.000 ton/hari dari sampah padat Kota Semarang.

Tahun 4. Pembangunan SPALD-T

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kota Semarang didukung oleh pendanaan dari berbagai sumber, termasuk APBD dan bantuan pinjaman dari *Asian Development Bank* (ADB) dalam skema *Citywide Inclusive Sanitation Project*. Proyek ini akan berlokasi di Kelurahan Banjardowo dengan luas lahan $\pm 118.883 \text{ m}^2$ dan dirancang untuk melayani 10 kecamatan di Kota Semarang. Sistem pengelolaan air limbah domestik ini akan menggunakan jaringan perpipaan yang mengalirkan limbah ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara terpusat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan sanitasi perkotaan. Sebagian besar pendanaan berasal dari APBN, termasuk pinjaman ADB sebesar Rp3,2 triliun yang digunakan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Banjardowo, jaringan perpipaan utama dan jaringan perpipaan sekunder dan tersier sebagai pilot project sebanyak 4.532 sambungan rumah. Sementara itu, APBD sebesar kurang lebih Rp. 115 Miliar digunakan untuk membiayai pembangunan jaringan perpipaan sekunder dan tersier sebanyak 10.000 sambungan rumah. Direncanakan SPALD-T Banjardowo dapat beroperasi pada tahun 2030.

Tahun 5. Bus Rapid Transit (BRT) *Dedicated Lane*

Pembangunan BRT *Dedicated Lane* merupakan program pengembangan dari BRT Trans Semarang yang didukung oleh pendanaan loan KfW Jerman melalui Kementerian Perhubungan. Berdasarkan hasil *updating* FS kebutuhan anggaran sebesar Rp 2,016 triliun yang meliputi pembangunan jalur *dedicated lane*, prasarana angkutan, fasilitas pejalan kaki dan depo. Rencana jalur *dedicated lane* melewati 3 rute (impang Ngaliyan - Simpang Fatmawati/ Soetta, Stasiun Tawang - Tugu Muda, Simpang Lima - Jalan Veteran). Proses dimulai sejak tahun 2022, Progress saat ini penyusunan *updating* DED oleh Kemenhub untuk kemudian mengajukan revisi *Greenbook* dari Kemenhub ke Bappenas. Pemerintah Kota Semarang telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Perhubungan (8 Maret 2024) untuk percepatan *Greenbook* proyek ini, menandakan komitmen serius dalam mendorong sistem transportasi publik yang lebih ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi. Proyek ini bertujuan mengurangi kemacetan & emisi karbon dengan transportasi massal yang lebih cepat dan efisien.

2.1.7. BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mendukung kinerja pemerintah daerah, Pemerintah Kota Semarang mendirikan beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni:

1. PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera (PT. BPS)
2. Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (PDAM)
3. Perumda BPR Bank Pasar
4. PT. Taman Satwa Semarang

Terdapat 2 (dua) BUMD Provinsi Jawa Tengah dengan kepemilikan sahamnya dibagikan dengan Pemerintah Kota Semarang, yakni PT. BPR BKK Kota Semarang dan PT. BPD Jateng, sehingga terdapat total 6 BUMD yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Semarang. Masing-masing BUMD

hadir untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, dengan detail kinerja sebagai berikut:

1. PT. BPS merupakan perseroan daerah yang berasal dari penggabungan Perusda Percetakan dan Perusda Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Berdiri sejak tahun 2017, perusahaan ini terdiri dari 3 unit bisnis yang terdiri dari unit usaha dan pengembangan, unit percetakan, dan unit RPH. Pada unit usaha dan pengembangan, berfokus pada ekspansi dan pengembangan unit bisnis serta saat ini sedang berproses untuk kerjasama di bidang komunikasi dan informatika. Pada unit percetakan, dikarenakan evaluasi tahunan yang menunjukkan hasil yang kurang maksimal, maka saat ini sedang berproses untuk bertransformasi terhadap unit bisnis baru. Pada unit RPH, saat ini sedang berfokus dalam peningkatan penjualan daging potong, peningkatan kualitas penyembelih dan sertifikasi produk, serta kontribusi dalam pasar murah.
2. PDAM Kota Semarang bergerak pada jasa penyediaan air bersih dan air minum, dan hingga tahun 2024 telah mengatasi sebanyak 53,32% jaringan perpipaan air bersih di Kota Semarang dan mencapai 195.525 pelanggan. Cakupan wilayah dan jumlah pelanggan ini akan selalu bertambah, seiring dengan proyek strategis di Kota Semarang untuk penyediaan air minum melalui SPAM Semarang Barat dan komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan air bersih hingga air minum untuk masyarakat, sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG). Selain itu, hal ini dilakukan sebagai langkah konservasi air tanah mengingat penggunaan air dari sumur dalam untuk jangka panjang berdampak pada penurunan muka air tanah yang dapat berdampak pada penurunan muka tanah.
3. Perumda BPR Bank Pasar bergerak pada perkreditan rakyat, yang tergabung pada Perbarindo Kota Semarang. Pada tahun 2024, *Non-Performing Loan* (NPL) atau total kredit macet adalah sebesar 14,38% dari kredit yang diberikan sebesar Rp73 miliar rupiah, dengan laba bersih sebesar Rp502 juta rupiah.
4. PT. Taman Satwa Semarang mengelola Semarang Zoo, yang menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Semarang. Pada tahun 2023, pendapatan bersih dari tiket masuk di destinasi ini mencapai Rp5,3 miliar, ditambah dengan pendapatan dari tiket wahana dan kerjasama pihak ketiga sehingga total pendapatan mencapai angka Rp6,8 miliar. Namun, biaya operasional yang cukup tinggi membuat BUMD ini belum mampu untuk memberikan dividen kepada pemerintah daerah.

Berikut ini table realisasi penyertaan modal pemerintah kota semarang kepada BUMD Kota Semarang tahun 2020-2024.

Tabel 2.39 Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang kepada BUMD Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	BUMD	REALISASI PENYERTAAN MODAL (MILIAR RUPIAH)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera (BPS)	0	5	0	0	0
2	Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang	0	52,41	30,68	18,97	37,32

3	Perumda BPR Bank Pasar	0	2,50	2,50	0	1,38
4	PT. BPR BKK Kota Semarang	0	0	0	0	0
5	PT. BPD Jateng	0	0	25,00	24,00	24,00
6	PT. Taman Satwa Semarang	0	7,85	0	0	0
Total		0	67,76	58,18	42,97	62,70

Sumber: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Semarang, 2025

Salah satu kontribusi yang diberikan oleh BUMD kepada pemerintah daerah adalah pembayaran dividen, yang juga berdampak pada pembangunan kota. Selain itu, ada pula *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan dari BUMD untuk berbagai kegiatan masyarakat Kota Semarang. Salah satu BUMD yang rutin memberikan CSR adalah PT BPD Jateng. Berikut ini tabel realisasi dividen BUMD Kota Semarang kepada Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024.

Tabel 2.40 Realisasi Dividen BUMD Kota Semarang kepada Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	BUMD	REALISASI DIVIDEN (MILIAR RUPIAH)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera (BPS)	0,192	0	0	0	0
2	Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang	20,434	30,000	27,092	27,819	33,716
3	Perumda BPR Bank Pasar	1,102	1,592	1,437	0,947	1,329
4	PT. BPR BKK Kota Semarang	1,578	1,097	1,079	0,845	0,872
5	PT. BPD Jateng	30,016	34,139	37,107	43,659	47,706
6	PT. Taman Satwa Semarang	0	0,066	0	0	0
Total		53,323	66,895	66,717	73,271	83,624

Sumber: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Semarang, 2025

2.1.8. Indikator Kinerja Daerah

2.1.8.1. Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan, meningkatkan peran, prakarsa, dan keberdayaan masyarakat terlihat pada kinerja pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Aspek pelayanan umum digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator, antara lain: 1) Indikator Kinerja Daerah, yang menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, sekaligus internalisasi pencapaian 17 Indikator TPB sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kab/Kota, serta 2) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, yang diatur lebih lanjut melalui Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM yang diantaranya memuat mekanisme penghitungan Indeks Pencapaian SPM, di mana untuk capaian SPM sebelum tahun 2022 dilakukan hanya pada aspek penerima layanan, sedangkan mulai tahun 2022 Indeks Pencapaian SPM mempunyai bobot sebesar 80% dari aspek penerima layanan dan 20% lainnya dinilai dari capaian kualitas mutu layanan. Adapun sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan umum mencakup dari beberapa indikator sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dari sisi aksesibilitas maupun pembiayaan dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang. Banyak hal yang telah dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di bidang Pendidikan, diantaranya Pendampingan BOP/BOS Sekolah Swasta, Beasiswa Miskin, serta Beasiswa Miskin Berprestasi mulai jenjang Pendidikan SD/MI hingga jenjang Perguruan Tinggi. Gambaran capaian indikator pendidikan sesuai dengan kewenangan sebagaimana Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, sampai dengan tahun 2024:

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 5-6 tahun sebesar 97,57% pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 85,87%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia PAUD yang bersekolah pada jenjang tersebut. Di sisi lain persentase pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 sebesar 62,02% pada tahun 2024, persentase ini menurun jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 81,53%. Persentase guru jenjang PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV belum bisa mencapai target 98,8% disebabkan untuk guru PAUD yang saat ini berjumlah 4.974 dengan lulusan minimal S1/D-IV hanya sebanyak 3.085 guru PAUD yang terdiri dari TK, RA, KB, TPA, Pos PAUD saat ini berjumlah 1.597 satuan pendidikan.

Untuk guru TK/RA dari total guru sebanyak 2.663 orang yang merupakan lulusan minimal S1/D-IV sebanyak 2.123. Sedangkan untuk di luar TK/RA, dari jumlah guru sebanyak 2.311 orang, yang merupakan lulusan minimal S1/D-IV baru sebanyak 962. Hal ini karena untuk KB, TPA, Pos PAUD merupakan rintisan menuju TK/RA yang biasanya diawali dari kepedulian masyarakat terhadap adanya anak-anak di lingkungan.

2) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar sembilan tahun, terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu SD/MI dan SMP/MTs atau yang sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan. APK dan APM SD/MI pada tahun 2024 masing-masing sebesar 103,12% dan 91,03% sedangkan angka putus sekolah cenderung tetap ada sebesar 0,01%. Beberapa kondisi yang meningkat pada tahun 2024 terjadi pada angka kelulusan sebesar 99,83% dan persentase pendidik SD/MI berkualifikasi S1/D4 menjadi sebesar 96,83%. Selain itu, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2024 mencapai 102,47%. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 98,18%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan dasar sembilan tahun, dan semakin banyak masyarakat yang percaya terhadap kualitas pendidikan di Kota Semarang.

Di sisi lain APM SMP/MTs pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 85,18% jika dibandingkan dengan tahun 2023, demikian pula persentase Pendidik SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 96,21%. Angka kelulusan meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 100%. Sedangkan angka putus sekolah cenderung tetap ada sebesar 0,01%.

Pelayanan urusan Pendidikan di bidang sarana gedung sekolah juga menjadi perhatian bersama. Untuk tahun 2024, kondisi bangunan sekolah SD/MI mengalami peningkatan menjadi sebesar 87,00%. Hal ini disebabkan pelaksanaan perbaikan bangunan telah dilakukan sehingga proses belajar mengajar berjalan baik. Namun, fasilitas pendidikan berupa gedung SMP/MTs dengan kondisi baik sedikit mengalami penurunan 0,01% menjadi sebesar 92,46%.

3) Pendidikan Non-Formal Pendidikan

Pendidikan non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan Non formal berupa pendidikan kesetaraan yang memiliki peran membantu peningkatan APK dan APM pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu dengan diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan keterampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah. Dalam mendukung pencapaian SDG's pendidikan sepanjang hayat dan inklusi, Kota Semarang sudah memiliki sekolah yang berbasis inklusi, baik pada

jenjang sekolah dasar, maupun sekolah menengah pertama. Selain itu untuk mendukung pencapaian SDG’s pendidikan, di Kota Semarang sudah banyak LPK Swasta yang dikembangkan yaitu sebanyak 119 lembaga. Selanjutnya, di Kota Semarang juga telah terdapat kelembagaan PKBM sebanyak 42 lembaga dan yang terakreditasi B dengan jumlah sebanyak 18 lembaga. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	REALISASI CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan dasar					
a.	Rasio Ketersediaan Sekolah (%)	33,68	34,19	36,81	37,67	38,30
b.	Rasio guru/murid	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18
c.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	3:20:28	4:20:28	1:20:28	2:20:28	1:20:28
2	Pendidikan Menengah					
a.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (%)	27,92	27,86	26,86	28,64	29,54
b.	Rasio guru terhadap murid	1:17	1:17	1:17	1:18	1:15
c.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	3:17:32	4:17:32	5:17:32	1:18:32	1:15:32
3	Angka Putus Sekolah					
a.	SD/MI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
b.	SMP/MTs	0,04	0,06	0,01	0,01	0,01
4	Angka Kelulusan					
a.	Angka Kelulusan SD/MI (%)	99,98	100	97,22	98,87	99,83
b.	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	99,95	99,95	100	99,55	100
5	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	103.47	100	95,05	98,18	102,47
6	Fasilitas Pendidikan					
a.	SD/MI Kondisi Bangunan Baik	86,44	95	65	86,16	87
b.	SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	92,95	99	80	92,47	92,46
7	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)					
	- Jenjang PAUD	72,87	98	81.33	81,53	62,02
	- Jenjang SD/MI	96,43	97	93.33	96	96,83
	- Jenjang SMP/MTs	96,95	98	88.57	96,55	96,21
8	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi umum	NA	1,92	1,94	75,64	79,55
9	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi umum	NA	1,78	1,72	55,55	69,97
Indikator SDGs						
10	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (Tujuan 4 Target1)	97,66	90	90,41	89,89	91,03
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (Tujuan 4 Target 1)	84,88	80	73,11	83,41	85,18
12	APK PAUD 5–6 Tahun (Tujuan 4 Target 2)	83,01	81,5	116,76	85,87	97,57
13	APK SD/MI (%) (Tujuan 4 Target 1)	116,67	100	103,71	109,88	103,12
14	APK SMP/MTs (%) (Tujuan 4 Target 1)	115,59	100,00	98,95	114,95	105,59
15	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) (Tujuan 4 Target 1)	10,53	10,55	10,80	10,81	11,05

Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Rapor Pendidikan, Bappeda Kota Semarang, 2024

Adapun pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada Bidang Urusan Pendidikan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR SPM	2020	2021	2022	2023	2024		
						PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (B)	IP SPM = 80%(A) + 20%(B)
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD: (Jumlah Peserta Didik Usia 5-6 Tahun)/(Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun)x100x 100%	86,50% <u>44.233</u> 51.135	107,97% <u>54.234</u> 50.231	89,53% <u>44.656</u> 49.880	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dlm pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs): Jumlah Peserta Didik Usia 7-15 Th ----- x 100% Jumlah Penduduk Usia 7-15 Th	77,95% <u>185.604</u> 238.093	95,56% <u>231.952</u> 242.351	100,81% <u>242.758</u> 240.798	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dlm pendidikan dasar (SD/MI): Jml Peserta Didik Usia 7-12 Th ----- x 100% Jumlah Penduduk Usia 7-12 Th		95,59% <u>154.453</u> 161.580	103,45% <u>165.544</u> 160.018	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dlm pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs): Jml Peserta Didik Usia 13-15 Th ----- x 100% Jumlah Penduduk Usia 13-15 Th		95,51% <u>77.147</u> 80.771	95,59% <u>77.214</u> 80.780	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan: Jml Peserta Didik Kesetaraan Usia 7-18 thn ----- x 100% Jml penduduk Usia 7-18 th yang belum menyelesaikan Pend Dasar dan/atau Menengah	6% <u>1.650</u> 27.501 (dengan pembagi Jml penduduk Usia 7-18 th yang belum menyelesaikan Pend Dasar dan/atau Menengah)	26,22% <u>1.617</u> 6.166 (dengan pembagi Jml penduduk Usia 7-18 th yang belum menyelesaikan Pend Dasar dan/atau Menengah h)	84,12% <u>3.226</u> 3.835 (dengan pembagi Jml penduduk Usia 7-18 th yang belum menyelesaikan Pend Dasar dan/atau Menengah h)	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan SPM, Bag Kerjasama dan Otda, Dinas Pendidikan, 2024

Dari data tersebut, jika dilihat dari aspek capaian penerima layanan dasar, secara umum capaian SPM tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan predikatnya hampir semua mengalami peningkatan dari tuntas pratama dan tuntas madya ke tuntas utama. Permasalahan yang dijumpai di antaranya masih terdapat kekurangan guru dan tenaga kependidikan (GTK) ASN sehingga dipenuhi dengan GTK non ASN dan bahkan GTK paruh waktu yang dibiayai dengan dana BOSP. Di samping itu, juga masih terdapat anak putus sekolah meskipun kebijakan sekolah gratis dan

juga beasiswa siswa miskin dan miskin berprestasi semakin diperluas pemanfaatannya. Perlu upaya nyata dan keseriusan berbagai pihak dalam peningkatan Indeks SPM pada bidang urusan pendidikan, diantaranya koordinasi dengan berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait kewenangan jenjang SMA/MA dan juga Paket C.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pada urusan kesehatan, selain dari pencapaian indikator kinerja yang ada, Kota Semarang memperoleh beberapa penghargaan atas pencapaian keberhasilan pembangunan pada urusan kesehatan, diantaranya: Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Inovasi Pencapaian Program UHC Kota Semarang 100% didukung dengan Peran Lintas Program dan Lintas Sektor secara Gotong Royong (PANGERAN DIPONEGORO) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Selain itu, capaian ini juga didukung dengan adanya penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia atas dukungan dan kontribusi dalam program jaminan kesehatan nasional dengan pencapaian UHC. Selain itu, penghargaan lain di bidang kesehatan juga diterima oleh RSD KRMT Wongsonegoro yang masuk ke dalam Top 5 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah untuk Aplikasi Sistem Informasi Harian Terpadu (SI RINDU) Tahun 2022-2023.

Terkait percepatan penanggulangan stunting di Kota Semarang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 21,30% pada tahun 2021 menjadi sebesar 10,40% pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 capaiannya masih menunggu release dari survei status gizi Indonesia atau SSGI. Penanganan stunting ini dilakukan secara holistik dan integratif melalui inovasi program yang dilakukan di antaranya: Pelangi Nusantara yang didalamnya terdapat kegiatan Wisata Edukasi Gizi, Duta Kesehatan, Kebun Gizi, Penyusunan dan Pembuatan menu Balita dan Ibu Hamil. Selain itu juga Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting), Kegiatan *day care* di Rumah Pelita (Rumah Penanganan Stunting Lintas Sektor bagi Baduta). Selain itu Kota Semarang sudah mempunyai SK TPPS, Tim TPPS, penyelenggaraan kegiatan melalui konvergensi aksi, serta Perwal Percepatan Penurunan Stunting yang mengacu pada Perpres.

Kinerja dalam penanganan Penyakit Menular AIDS, TB dan Malaria (ATM) perlu ditingkatkan melibatkan lintas sektor dan masyarakat sipil peduli terhadap ATM, karena trennya menunjukkan kecenderungan menurun. Adapun kinerja pada urusan kesehatan selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.43 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	REALISASI CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26
2	Rasio Rumah Sakit per 100.000	2	2	1.9	1,9	0,24

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	REALISASI CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	penduduk					
3	Rasio dokter per satuan penduduk x 1000	2,16	2,21	2,43	1,82	2,01
4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000	2,96	2,94	3,36	5,21	3,04
5	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,29%	0,31%	0,32%	0,33	0,35
6	Persentase RS Rujukan tingkat kota yang terakreditasi	89,65%	78,12%	65,63%	96,90	97,30
7	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	96,11	95,9	96,98	97,35	97,5
8	Nilai Kinerja BLUD Baik	71,85	73,2	87,5	86,37	83,79
Indikator SDGs						
9	Cakupan kelurahan UCI (%) (1.4.1.(b))	98,7	100	100	100	100
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100
12	Cakupan puskesmas (%)	231,25	231,25	237,5	237,5	243,75
13	Cakupan pembantu puskesmas	21,46	21,46	26,38	21	19,77
14	Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk (Wasting: BB/TB) pada Balita (1.3.1.(a))	1,99	2,2	1,16	0,91	0,89
15	Cakupan pertolongan persalinan di faskes (1.4.1.(a))	100	100	100	100	100
16	Rasio akseptor KB per 1000 PUS (1.4.1.(c))	76,94	73,88	78	81,1	81,1
17	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting: TB/U) pada balita (Balita) (2.2.1*)	3,13	3,1	1,55	1,06	1,04
18	% kasus stunting anak dibawah dua tahun (Baduta) (2.2.1.(a))	2,48	2,81	1,27	0,54	0,52
19	Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (2.2.2.(b))	71,31	71,91	74,33	83,7	9,05
20	Persentase penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan (3.1.1*)	100	94,24	99,24	100	100
21	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (3.1.2*)	71,35	95,32	67,25	79,8	80,44
22	Jumlah kasus kematian ibu	17	21	15	16	15
23	Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (3.1.2.(a))	100	100	100	100	100
24	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)(3.2.1*)	100	100	100	100	100
25	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. (3.2.1*)	7,01	6,95	6,5	7,44	9,08
26	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir. (3.2.2*)	100	100	100	100	100
27	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. (3.2.2(a))	6,09	6,04	5,6	7,09	7,99
28	Kelurahan UCI (3.2.2.(b))	98,7	100	100	100	100
29	Prevalensi HIV (3.3.1(a))	0,387	0,413	0,451	0,415	0,459
30	Cakupan pelayanan kesehatan orang	79,18	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	REALISASI CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	dengan TB (3.3.1(b))					
31	Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (3.3.1(b))	293	260	260*	464	455,2
32	Prevalensi penduduk malaria per 1000 penduduk (3.3.3*)	0,018	0,035	0,041	0,027	0,038
33	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan Malaria	100	100	100	100	100
34	Jumlah Kasus Hepatitis B (3.3.4.(a))	441	406	406*	386	403
35	Jumlah Kasus Kusta (3.3.5*)	8	10	10*	10	23
36	Cakupan Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi (3.4.1.(b))	88,6	100	100	100	100
37	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (3.4.2(a))	100	100	100	100	100
38	Cakupan peserta KB aktif (3.7.1*)	74,99	73,88	76,08	77,72	77,73

Sumber: BPS & LKPJ Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

Capaian mengenai kesehatan ibu dan anak cenderung membaik namun masih perlu upaya penekanan kasus. Khusus untuk kematian neonatal, kematian ibu dan kematian balita, meningkat pada tahun 2024 sedangkan kasus stunting di Kota Semarang jumlahnya masih fluktuatif dalam 5 tahun terakhir, tetapi menunjukkan peningkatan kasus pada tahun 2023. Hal ini menjadi ancaman nyata bagi Kota Semarang terkait kelangsungan hidup dan kualitas tumbuh kembang anak nantinya. Pemerataan pelayanan kesehatan ibu dan anak sudah dilakukan oleh puskesmas dan posyandu yang ada, namun hal ini belum cukup.

Pada tahun 2024, Kota Semarang mencatat 0,038 per 1000 penduduk atau sebanyak 63 kasus malaria, yang terdiri atas 56 kasus baru dan 7 kasus relaps. Seluruh kasus tersebut bersumber dari luar wilayah Kota Semarang yang terbawa masuk ke dalam wilayah kota. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 46 kasus dengan nilai *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,027 per 1.000 penduduk. Meskipun terdapat peningkatan jumlah kasus pada tahun 2024, angka API tetap berada pada tingkat rendah, yaitu mendekati 0,04 per 1.000 penduduk. Dalam pengendalian kasus malaria tersebut, telah dilaksanakan berbagai upaya strategis pada tahun 2024, seperti (1) Penguatan kapasitas tenaga laboratorium melalui optimalisasi peran Asisten Tenaga Laboratorium Mikroskopis (ATLM) di seluruh puskesmas, yang diwujudkan dalam bentuk: pelatihan keterampilan pembacaan preparat mikroskopis dan peningkatan kompetensi dalam penegakan diagnosis malaria. (2) Peningkatan mutu pemeriksaan laboratorium, yang dilaksanakan melalui kegiatan uji silang sediaan darah ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Balabkespak). Pelaksanaan deteksi dini dan surveilans aktif, yang mencakup: kegiatan skrining terhadap pendatang dari wilayah endemis malaria dan pemeriksaan terhadap kontak erat pasien terkonfirmasi malaria. (3) Pelaksanaan survei entomologi pada wilayah reseptif, yakni wilayah yang memiliki potensi menjadi tempat berkembang biaknya vektor malaria.

Untuk kasus HIV/AIDS, terdapat 680 kasus pada tahun 2024, meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh peningkatan cakupan dan akses terhadap layanan deteksi dini. Selama tahun 2024, tersedia 79 titik layanan pemeriksaan HIV yang tersebar di puskesmas, rumah sakit, klinik Balkesmas, dan PKBI. Ketersediaan layanan yang luas telah meningkatkan jumlah deteksi kasus, yang mencerminkan peningkatan cakupan layanan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini HIV.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk menanggulangi permasalahan HIV pada tahun 2024 antara lain: (1) Perluasan layanan pengobatan ARV, termasuk: Layanan pengambilan obat pada malam hari (contoh: Lydia Dimari); Layanan pengantaran obat secara gratis melalui program Layar Artis; dan Layanan drive-thru untuk pengambilan obat, yang terintegrasi dengan layanan TBC. (2) Skrining terpadu dan kolaboratif terhadap kelompok prioritas, meliputi: Ibu hamil; Pasien tuberkulosis (TBC); Pasien dengan infeksi menular seksual (IMS); Populasi kunci (LSL, pengguna napza suntik); Warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang urusan kesehatan, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.44 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR SPM	2020	2021	2022	2023	2024		
						PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (B)	IP SPM = 80%(A) + 20%(B)
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil: Jml bumil yg dilayani SS ----- x 100% Jml sasaran ibu hamil	100% <u>23.885</u> 23.885	100% <u>22.040</u> 22.040	100% <u>22.872</u> 22.872	100% <u>20.698</u> 20.698	100% <u>18.192</u> 18.192	100% <u>4.716.391</u> 4.716.391	100%
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin = Jml ibu bersalin yg dilayani SS ----- x 100% Jml sasaran ibu hamil	100% <u>23.885</u> 23.885	100% <u>22.040</u> 22.040	100% <u>22.330</u> 22.330	100% <u>20.098</u> 20.098	101,18% <u>17.236</u> 17.440	100% <u>109.933</u> 109.933	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir = Jml BBL yg dilayani SS (KN1) ----- x 100% Jumlah Bayi Baru Lahir (kelahiran hidup)	100,02% <u>23.829</u> 23.825	100% <u>22.030</u> 22.030	100% <u>22.304</u> 22.304	100% <u>20.047</u> 20.047	101,15% <u>17.203</u> 17.401	100% <u>182.795</u> 182.795	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita = jml balita yg dilayani SS ----- x 100% Jml balita di wilayah kerja	88,78% <u>65.137</u> 73.369	100% <u>100.403</u> 100.403	100% <u>89.239</u> 89.239	100% <u>68.759</u> 68.759	100,59% <u>66.570</u> 66.965		100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar jml anak usia Dikdas yg dilayani SS ----- x 100% jml semua anak usia dikdas	97,81% <u>215.016</u> 219.821	100% <u>227.547</u> 227.547	100% <u>227.182</u> 227.182	100% <u>224.808</u> 224.808	100% <u>224.808</u> 224.808		100%
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif = usia pengujung 15-59 tahun ----- x 100% Jumlah warga negara usia 15-59 tahun	100% <u>1.014.944</u> 1.014.944	100% <u>1.112.58</u> 8 1.112.58 8	100% <u>1.125.43</u> 1 1.125.43 1	100% <u>1.116.1</u> 74 1.116.1 74			100%

No	INDIKATOR SPM	2020	2021	2022	2023	2024		
						PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (B)	IP SPM = 80%(A) + 20%(B)
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut = usia pengunjung >60 tahun ----- x 100% Jumlah WN usia > 60	85,98% <u>154.847</u> 180.096	100% <u>184.027</u> 184.027	100% <u>164.287</u> 164.287	100% <u>169.404</u> 169.404	100% <u>188.374</u> 188.374	100% <u>188.374</u> 188.374	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi = jml pendrt hipert > 15 tahun ----- x 100% Jml est penderita hipert >15th	88,60% <u>255.727</u> 288.619	100% <u>289.903</u> 289.914	100% <u>290.910</u> 290.910	100% <u>321.721</u> 321.721			100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) = jml penderita DM > 15 tahun ----- x 100% jml est penderita DM usia >15 th	100% <u>40.303</u> 40.303	100% <u>40.483</u> 40.483	100% <u>40.623</u> 40.623	100% <u>41.468</u> 41.468			100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) = jml ODGJ berat di wil kerja kota ----- x 100% Jml ODGJ Berat berdsr proyeksi wil kerja kota	100% <u>4.172</u> 4.172	100% <u>4.215</u> 4.215	100% <u>4.218</u> 4.218	100% <u>4.222</u> 4.222			100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) = jml orang terduga TBC yg dilak pemriksa ----- x 100% Jml orang yg terduga TBC kurun waktu 1 th	34,55% <u>7.770</u> 22.487	100% <u>15.853</u> 15.853	100% <u>37.270</u> 37.270	100% <u>38.509</u> 38.509			100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV = jml org dgn resiko terinfeksi HIV yg mendapat pelayanan sesuai standar ----- x 100% Jml orang dgn risiko terinfeksi HIV di Kab/Kota	98,81% <u>37.681</u> 38.136	99,72% <u>27.790</u> 27.869	100% <u>33.592</u> 33.592	100% <u>36.669</u> 36.669			100%

Sumber: Laporan SPM, Bag. Otda dan Kerjasama, Dinas Kesehatan, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), untuk penghitungan capaian SPM termasuk pada bidang kesehatan sejak tahun 2022 dinilai dari dua aspek, yaitu aspek capaian penerima layanan dan aspek mutu layanan. Capaian SPM tahun 2024 dari aspek penerima layanan dan capaian mutu minimal layanan dasar sudah mencapai 100% dan semua aspek masuk ke dalam kategori tuntas paripurna. Walaupun seluruh nilai SPM pada bidang kesehatan capaiannya sudah 100%, namun terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Adapun kendala dalam melaksanakan urusan kesehatan di antaranya adalah perubahan masalah kesehatan yang ditandai dengan terjadinya perubahan struktur penduduk, transisi epidemiologi dan transisi risiko akibat perubahan pola hidup. Selain itu, kesadaran masyarakat terkait kesehatan anak juga masih rendah, kebanyakan dari masyarakat masih menganggap bahwa pemeriksaan merupakan kebutuhan puskesmas saja. Selain itu, jumlah tenaga non kesehatan terlatih, kader kesehatan, sarana prasarana yang belum optimal juga merupakan tantangan tersendiri dalam menjalankan urusan kesehatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diukur diantaranya dari kemantapan jalan, pengendalian banjir, berfungsi drainase dan irigasi, menurunnya area kawasan kumuh, pengelolaan sarana prasarana persampahan, cakupan pelayanan air minum, pengelolaan air limbah domestik dan lainnya. Berbagai kondisi ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

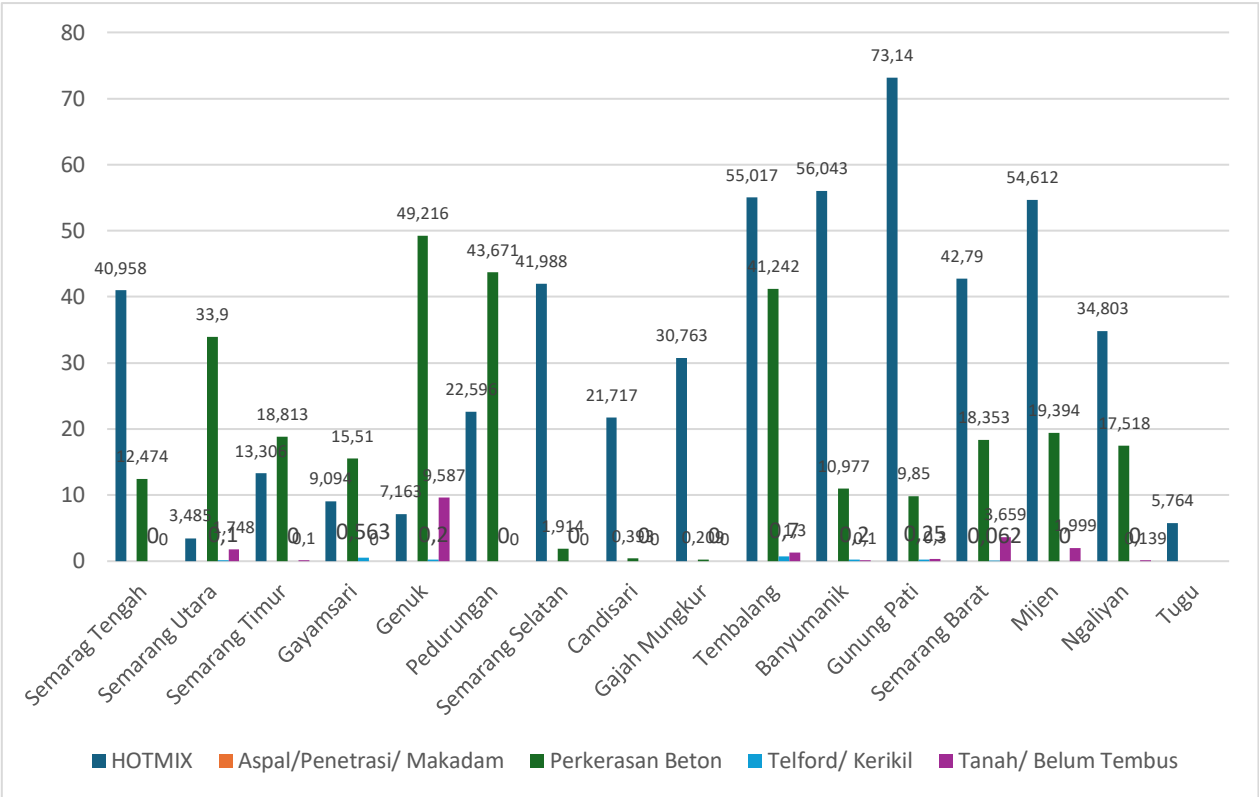
Tabel 2.45 Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	REALISASI CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (%)	NA	94,60	96,52	96,57	96,57*
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS (%)	NA	97.25	97,25*	97,25*	97,25*
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	79	80.64	81.8	83	83*
4	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	90,42% (759,42 km)	92,38% (775,88 km)	92,52% (778,12 km)	93,004% (781,141 km)	93,273% (783,404 km)
5	Rasio kepatuhan IMB (%)	55,04	55,56	51,25	62,1	95,65
6	Persentase luas sawah beririgasi (%)	43	43	43	43	65,43
7	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	NA	NA	33,60	33,60	33,62
8	Persentase areal kawasan kumuh (%)	0,21	88,01	76,62	40,55	18,78
9	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	22	24,35	26,18	27,10	27,67
10	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	80	82,5	82,5	82,5*	82,5*
11	Persentase sampah yang terangkut dari TPS ke TPA	89,5	90	90,50	91	91,50
12	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	86,51	98,93	98,94	99,04	99,04*
13	Persentase kawasan banjir dan rob (%)	1,30 (Hanya jalan dan permukiman)	2,7 (Jalan, permukiman, tambak, sawah)	1,74 (Jalan, permukiman, tambak, sawah)	1,715	1,645
14	Persentase kawasan banjir (%)	3,73	3,4	2,37	2,34	2,23

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	REALISASI CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
15	Persentase kawasan rob (%)	2	2	1,11	1,09	1,06
16	Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik (%)	95,87	96,96	97,46	100,17	101,21
	Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik	73.141	74.815	77.557	79.718	80.542
	Jumlah lampu penerangan jalan umum di wilayah Kota Semarang	76.292	77.161	77.557	79.718	79.580
Indikator SDGs						
17	Persentase rumah tangga yg terlayani air minum	96,28	97,14	98,94	99,62	99,80
18	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	96,28	96,28	96,28	96,28	96,28
19	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	91	91	91	91	91
20	Jumlah IPLT (Instalasi Pengolah limbah Tinja) yang terbangun	1	1	1	1	1
21	Indeks kualitas air	50,44	50	33,76	46	45,56
22	Rasio Ruang Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Semarang (%)	44,21	44,23	44,36	44,48	4,48*
23	Persentase kesesuaian Tata Ruang	96,73	100	100	100	100
24	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	NA	NA	54,81	54,62	54,62*

Sumber: BPS, Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim, 2024

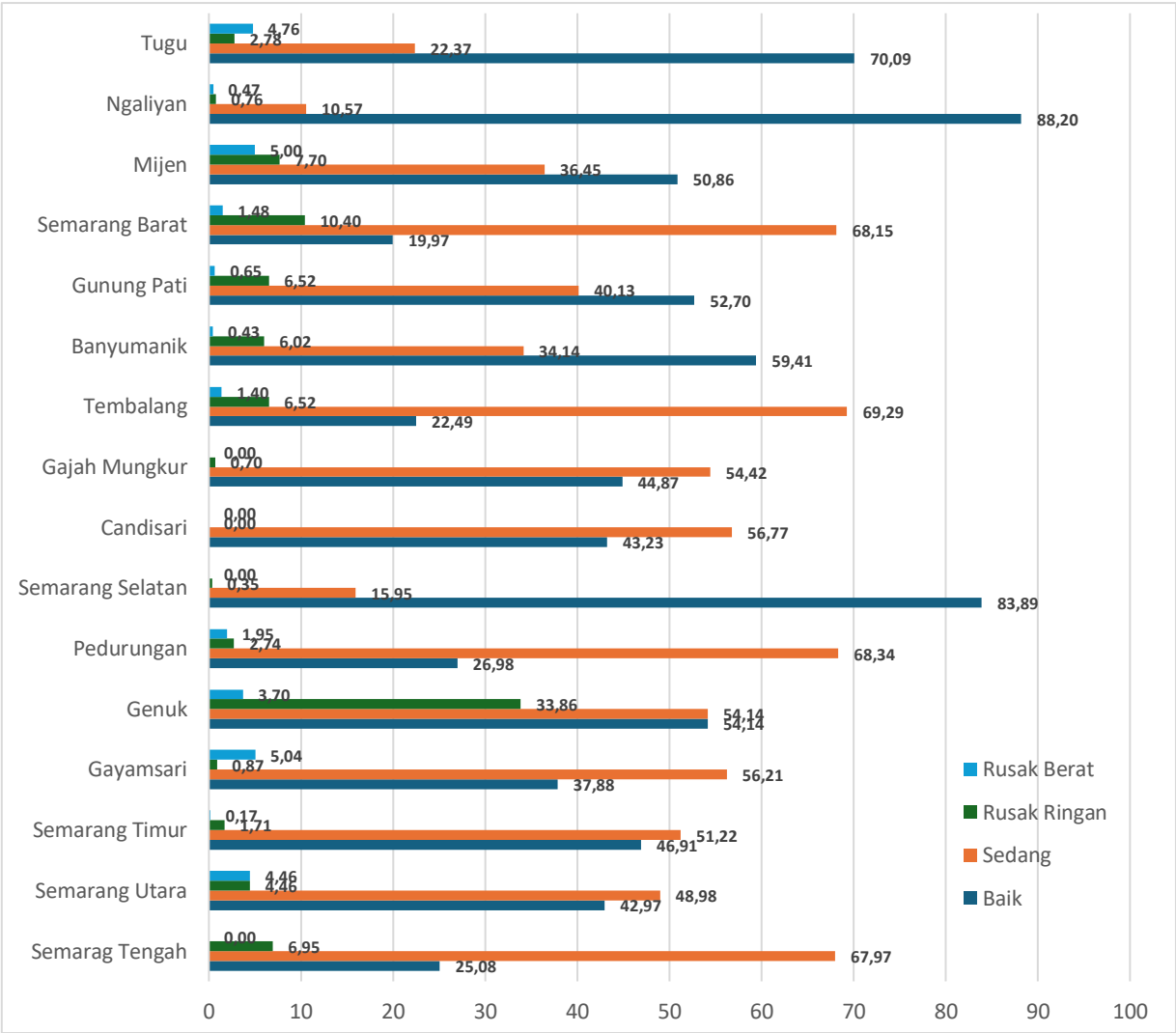
Untuk pembangunan infrastruktur bidang jalan melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 621/360 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota dan Fungsinya Sebagai Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan di Wilayah Kota Semarang, ditetapkan total panjang jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang adalah sepanjang 839.901 meter. Dari total panjang jalan tersebut terbagi atas jenis-jenis perkerasan yang berbeda dan terbanyak jalan di Kota Semarang tahun 2024 didominasi oleh perkerasan aspal *hot mix* dengan proporsi mencapai 61,11% (513,239 km); disusul dengan perkerasan jenis beton blok/rigid sebesar 36,33% (305,106 km); telford/kerikil sebesar 0,29% (2,449 km) dan tanah/belum tembus sebesar 2,27% (19,107 km). Khusus untuk jalan dengan kondisi tanah secara keseluruhan masih terdapat pada 10 kecamatan, namun yang masih dominan berlokasi di wilayah Kecamatan Genuk sepanjang 9,587 km, Kecamatan Semarang Barat sepanjang 3,659 km, Kecamatan Mijen 1,999 km. Secara lengkap kondisi tersebut terbagi ke dalam wilayah kecamatan seperti terlihat pada profil sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2024

Gambar 2.60 Jenis Perkerasan Jalan Kota Semarang Tahun 2024

Dari total panjang jalan sesuai surat keputusan Wali Kota tentang status jalan sepanjang 839,901 km, pada tahun 2024 persentase jalan dalam kondisi baik pada hampir seluruh kecamatan berada pada angka di atas 50%. Sedangkan jika dilihat secara kewilayahan, kondisi jalan rusak berat banyak terjadi di wilayah-wilayah dengan kondisi tanah yang cenderung labil antara lain adalah Kecamatan Genuk, Semarang Utara dan Semarang Barat. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Semarang dalam pengalokasian program dan kegiatan selanjutnya. Adapun data lengkapnya mengikuti gambar sebagai berikut.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2024

Gambar 2.61 Kondisi Jalan per Wilayah Kecamatan Kota Semarang Tahun 2024

Untuk penanganan rob dan banjir menjadi tugas yang sangat berat bagi Pemerintah Kota Semarang terutama saat datangnya musim penghujan. Potensi letak Kota Semarang yang berada di pinggir pantai menjadikan Kota Semarang sebagai daerah berpotensi mengalami banjir dan rob. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi kawasan banjir dan rob, diantaranya dengan penataan sungai besar, normalisasi saluran drainase, pemeliharaan jaringan irigasi, operasionalisasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir, operasionalisasi dan pemeliharaan embung/penampung air lainnya, serta pemeliharaan polder/kolam retensi. Namun demikian, dikarenakan terdapat perubahan variabel dalam perhitungan kawasan banjir dan rob, dimana untuk tahun 2022 selain jalan dan permukiman juga memperhitungkan komponen kawasan ladang dan persawahan yang terdampak banjir dan rob, mengakibatkan terjadinya penurunan persentase kawasan banjir dan rob dari sebesar 3,48% di tahun 2023 menjadi sebesar 3,29% tahun 2024 dengan rincian luasan banjir sebesar 2,23% dan rob seluas 1,06% dari seluruh luas wilayah Kota Semarang.

Kondisi infrastruktur Kota Semarang dilihat dari Penerangan Jalan Umum diharapkan menunjukkan peningkatan utamanya wilayah pinggiran karena hal ini juga sedikit banyak akan mengurangi potensi kerawanan

terhadap kejahatan. Jumlah lampu penenrangan jalan umum dalam kondisi baik sebesar 80.542 Pemenuhan 80.542 titik dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan di luar APBD. Selain dari aspek pemenuhan titik lampu, dalam rangka pengendalian emisi Gas Rumah Kaca dan juga penghematan energi, Kota Semarang secara bertahap juga melakukan retrofit terhadap PJU konvensional menjadi PJU berbasis LED.

Kinerja dalam bidang persampahan menuju “*waste to energy*” menunjukkan perkembangan yang signifikan, berkat sinergitas peran masyarakat dan *stakeholder* persampahan lainnya. Pada tahun 2023 produk sampah harian diperkirakan sebesar 1.181,06 ton, di mana yang terangkut masuk ke TPA Jatibarang lebih dari 91,00% per hari dengan komposisi material organik sebesar ±62% dan sisanya material anorganik. Mengingat sumbangan terbesar berasal dari sampah domestik, besar kiranya peran masyarakat dalam mengurangi beban TPA melalui pilah sampah/bank sampah, sedangkan sisanya menjadi tugas Pemerintah dalam mengelolanya. Dalam upaya penanganan sampah dan pengurangan sampah di Kota Semarang, telah dilakukan beberapa sebagai upaya pengelolaan sampah dari hulu ke hilir diantaranya Gerakan Implementasi Ekonomi Sirkular pengelolaan Sampah Hulu Perkotaan berbasis Entitas berkelanjutan (GERAI ESHP), Patroli Pakde Uzt, gerakan peduli TPS bersih bermanfaat, pemanfaatan sampah organik menjadi ecoenzym, budidaya manggot/BSF pemakan sampah organik, *biowash*, dan penguatan kelembagaan KSM Kebersihan pada 16 Kecamatan di Kota Semarang. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Perencanaan Tata Ruang mencapai 100%, sedangkan persentase kepatuhan bangunan ber-IMB pada tahun 2023 sebesar 62,10% dari target 62,10%. Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Urusan Pekerjaan Umum, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 2.46 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 – 2024

No	INDIKATOR SPM	2020	2021	2022	2023	2024		
						PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (B)	IP SPM = 80% (A) + 20% (B)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari Jml yang dilayani Sesuai Standar -----x 100 % Jml sasaran (1 SR melayani 8 jiwa)	96,28% <u>1.623.225</u> 1.685.909	97,14% <u>1.638.931</u> 1.687.222	98,94% <u>556.977</u> 562.943	80% (567.250 RT)	80% (573.262 RT)	20%	100.00%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Jml yang dilayani Sesuai Standar -----x 100 % Jml sasaran	86,51% <u>382.195</u> 441.814	98,93% <u>556.442</u> 562.444	98,94% <u>556.991</u> 562.943	80% (563.937 RT)	80% (569.223 RT)	20%	100.00%

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda dan Kerjasama, Dinas Perkim, 2024

Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dari tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan tren yang positif. Untuk cakupan layanan

pemenuhan air minum sebanyak 573.262 RT baik yang terlayani dengan jaringan PDAM (jaringan perpipaan) maupun melalui jaringan non perpipaan, dengan menggunakan asumsi 1 Rumah Tangga (RT) melayani 8 jiwa dengan standar mutu 60 liter/orang/hari dengan kondisi air tidak keruh, tidak berasa dan tidak berwarna.

Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan tahun 2024 (PDAM dan non PDAM) yang merujuk pada Dokumen RISPAM mencapai 66,75% dengan rincian 54,34% PDAM, 8,07% PAMSIMAS dan 4,34% NON PAMSIMAS.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja pada penyelenggaraan pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman pada tahun 2024 terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.47 Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio permukiman layak huni	98,17	98,63	98,34	98,79	99,31
2	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	0,21 (Dari 415,83 Ha)	0,14 (Dari 415,83 Ha)	76,62% (dari 431,54 Ha)(Eksist 330,65 Ha)	23,38	81,22% (dari 431,54 Ha)
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	934	1.670	1.713	1.332	1.729
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100 (9 perum)	100 (10 perum)	100 (25 perum)	100 (16 perum)	100 (17 perum)
5	Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk	45,5	41,01	40,05	39,05	37,90

Sumber: Dinas Perkim, 2024

Berdasarkan SK Wali Kota Semarang No. 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang dapat diketahui bahwa telah ditetapkan luas permukiman kumuh adalah sebesar 415,83 ha atau 4,16 km2 atau mencapai 1,11% dari wilayah Kota Semarang. Kinerja sampai dengan tahun 2021, luas lingkungan permukiman kumuh yang belum tertangani menyisakan seluas 52,85 Ha. Pada tahun 2022, dikarenakan adanya pembaharuan SK Kumuh pada tahun 2021 melalui SK Wali kota Semarang Nomor 050/275, maka didapat luas kawasan kumuh terbaru menjadi 431,54 Ha. Selain itu, pada tahun tersebut, juga terdapat perubahan definisi operasional yang menyesuaikan dengan definisi operasional sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka yang sebelumnya pembagi indikator luas lingkungan permukiman kumuh adalah luas Kota Semarang dan dengan adanya SK tersebut maka pembagi indikator luas lingkungan permukiman kumuh adalah luas berdasarkan SK Kumuh. Oleh sebab itu, capaian luas lingkungan pemukiman kumuh (%) mengalami perubahan capaian dari sebelumnya pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,14% dari 415,83 Ha menjadi 76,62% dari 431,54 Ha pada tahun 2022, atau sebesar 330,65 Ha. Pada tahun 2024 ini, kawasan kumuh yang ditangani

adalah 81,22% dari 431,54 Ha atau sebesar 350,50 Ha. Kinerja lain dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman, pada tahun 2024 persentase rumah layak huni mengalami peningkatan menjadi 99,31%. Adapun Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui tabel 2.48. Capaian SPM pada bidang Urusan Perumahan Rakyat selalu menunjukkan predikat tuntas paripurna, dengan jumlah sasaran penerima layanan yang fluktuatif. Walaupun tercapai dengan baik, terdapat beberapa kendala yang muncul dalam pencapaian SPM pada bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Kendala tersebut di antaranya adalah kesulitan dalam mengakses rumah korban bencana pada saat kendaraan mengangkut material saat pengerjaan rehabilitasi rumah korban bencana, sehingga karena harus dilakukan secara manual, sehingga waktu pengerjaan menjadi lebih lama. Selain itu, jumlah masyarakat yang terelokasi seharusnya bisa lebih meningkat, namun karena masih adanya penolakan oleh warga masyarakat akan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan umum, maka jumlah yang terelokasi hanya berjumlah 38 KK.

Tabel 2.48 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 – 2024

No	INDIKATOR SPM	2020	2021	2022	2023	2024		
						PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (B)	IP SPM = 80% (A) + 20% (B)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	100% 2 unit 2 unit	100% 17 unit 17 unit	100% 8 unit 8 unit	100% 27 unit 27 unit	100% 24 unit 24 unit	100% 24 unit 24 unit	100%
2	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100% 97 KK 97 KK	100% Tidak ada relokasi	100% 38 KK 38 KK	100% 33 unit 33 unit	100% 3 unit 3 unit	100% 3 unit 3 unit	100%

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda dan Kerjasama, Dinas Perkim, 2024

- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- Perkembangan pemerintahan pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49 Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,93	0,93	0,69	1,61	0,54
2	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	0,93	0,81	0,81*	0,57	0,49

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	30,43	30,43	30,43*	31,81	54,9
4	Partisipasi Pemilih Pada Pilpres/Pileg/Pilkada (%)	68,62	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	71,25
5	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i> / 15 Menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	77,04	79,87	79,87	88,55	89,44
6	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	62%	62%	64% (32/50 perda)	66% (33/50 perda)	68% (34/50 perda)
7	Indeks Risiko Bencana (1.5.1.(e))	115,52	108,63	103,49	99,41	94,31
Indikator SDGs						
8	Kelurahan Siaga Bencana (renja) (1.5.1.(a))	58	64	64	64	64
9	Persentase pemenuhan bagi korban bencana (1.5.1.(b))	100	100	100	100	100
10	Pendampingan psikososial korban bencana sosial. (1.5.1.(c))	90	90	90*	90*	90*
11	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) (1.5.1.(d))	16	16	16	26	26
12	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Daerah (1.5.3*)	1	1	1	1	1
13	Jumlah kota (kelurahan) tangguh bencana yang terbentuk. (11.5.1.(b))	21	22	30	34	35
14	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. (16.1.1.(a)) (angka kriminalitas)	3	1	6	5	2

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, 2024

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa tingkat waktu tanggap (*response time rate* atau 15 menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2024 sebesar 89,44% artinya dari 489 kejadian kebakaran, 433 telah dilayani sesuai dengan *response time* oleh petugas pemadam kebakaran. Hal ini disebabkan terjadinya lonjakan intensitas kebakaran musim kemarau dan waktu kejadian bencana kebakaran yang hampir bersamaan, menyebabkan personil pemadam yang tersebar di pos pemadam di 7 Kecamatan se-Kota Semarang tidak mampu memberikan pelayanan sesuai *respose time* 15 menit. Sehingga selain diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras, serta SDM pemadam kebakaran, juga perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kinerja positif juga terjadi pada capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) yang trennya menurun dari tahun ke tahun, namun demikian masih perlu selalu ditingkatkan kesadaran masyarakat, antisipasi, tindak pencegahan dan penanggulangan terhadap bencana ke depannya.

Dari data di atas, dapat dilihat pula bahwa persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan oleh Satpol PP Kota Semarang berada pada angka 68,00%. Dari 50 Perda dan Perkada yang ditegakkan terdapat 34 Perda dan Perkada yang diampu oleh Satpol PP Kota Semarang. Sedangkan dari sisi angka kriminalitas yang menjurus kepada kasus kejahatan pembunuhan, terlihat

menurun dari tahun 2023 sebanyak 5 kasus menjadi 2 kasus di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara Satpol PP Kota Semarang dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan tugas kedinasan telah dilaksanakan dengan baik. Dari 1.293 kasus yang ada tersebut, jenis kasus yang terbanyak terjadi di antaranya adalah narkoba, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ranmor. Oleh sebab itu, masih diperlukan berbagai upaya dan langkah konkrit agar jumlah kasus kriminal dapat lebih ditekan, terutama pada ketiga jenis kasus yang memiliki jumlah kejadian terbanyak.

Dalam pemenuhan pelayanan dasar pada bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.50 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 – 2024

No	INDIKATOR SPM	2020	2021	2022	2023	2024		
						PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (B)	IP SPM = 80% (A) + 20% (B)
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100% <u>0 orang</u> 0 orang	100% <u>0 orang</u> 0 orang	100%	100 %	80%	20%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100% <u>60 orang</u> 60 orang	100% <u>1.687.222</u> 1.687.222	100% <u>500 orang</u> 500 orang	100%	80%	20%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	86,3% <u>790 orang</u> 890 orang	100% <u>1.975</u> 1.975	100% <u>900</u> 900	100%	80%	20%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100% <u>59</u> 59	100% <u>1.255</u> 1.255	100% <u>1.255</u> 1.255	100%	80%	20%	100%
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100% <u>1.680.417</u> 1.680.417	97,32% <u>837</u> 860	100% <u>936</u> 936	100%	80%	19,65	99.65%
6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100% <u>100%</u> 100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan SPM, Bag Kerjasama dan Otda, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, 2024

Capaian SPM pada bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sejak tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang positif. Di antara SPM layanan di Bidang Trantibum, kinerja yang tidak mencapai paripurna terdapat pada jenis layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Kendala yang dihadapi terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di antaranya adalah belum terdapat RISPKP dan manajemen pemadaman kebakaran ditingkat Kota, selain itu juga kapasitas SDM personil pemadam yang belum optimal (36,75% belum bersertifikasi) serta sarpras pemadam kebakaran yang kurang representatif (mobil tangga/snorkel rusak, sedangkan kebutuhan pemadaman digedung bertingkat meningkat, alat pelindung diri yang jumlahnya terbatas).

Sedangkan secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinas antara lain:

- a. Belum terpenuhinya standar teknis terkait jumlah dan kualitas sarana prasarana dan juga jumlah dan kualitas personil pelaksana layanan.
 - b. Kurangnya informasi atau peringatan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.
 - c. Jumlah pos pemadam kebakaran beserta personil dan sarana pemadaman dan penyelamatan belum ada di setiap kecamatan untuk meningkatkan *respon time*.
 - d. Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang rendah.
 - e. Kurangnya sarana prasarana yang dapat membantu pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
 - f. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perda dan Perkada yang berlaku di Kota Semarang.
 - g. Belum optimalnya personil perlindungan masyarakat yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pembangunan pada Urusan Sosial ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang penanganannya bersifat multidimensional. Tingkat kemiskinan di Kota Semarang pada tahun 2024 berada pada angka 4,03%. Angka ini menurun dari persentase penduduk miskin dari tahun 2023 yang berada pada angka 4,23%, Jika ditinjau dari persentase kemiskinan, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, kondisi di Kota Semarang lebih baik jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal Ini menunjukkan bahwa indikator persentase kemiskinan pada Tujuan ke-1 Pembangunan Berkelanjutan atau TPB yaitu untuk mengakhiri kemiskinan telah dilaksanakan dengan baik.

Pada tahun 2022 jumlah PPKS mencapai 755.979 , hal ini dikarenakan komponen PPKS salah satunya adalah korban bencana, dalam konteks ini bencana yang dimaksud adalah wabah covid, dan pada tahun 2023 jumlah PPKS menurun drastis dikarenakan salah satu komponen PPKS (korban bencana/wabah covid) sudah tidak dihitung lagi maka terjadi penurunan drastis terhadap jumlah PPKS. Pada tahun 2023 hanya menghitung data jumlah PPKS yang layak bantuan sosial.

Berdasarkan Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, data awal terdapat sebanyak 21.863 KK (102.394 individu) desil 1 data P3KE yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem yang tersebar di 16 kecamatan 177 kelurahan. Setelah dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi pada data tersebut, data penduduk yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem sejumlah 518 KK/2446 individu dan telah ditetapkan dalam SK walikota nomor 050/670 tahun 2023. Pada Tahun 2025 meningkat menjadi sebanyak 1.024 KK (5.519 Individu), setelah dilakukan verifikasi dan validasi pada data tersebut, data penduduk yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem sejumlah 980 keluarga (5.093 individu) dan telah ditetapkan dalam SK walikota nomor 000.7/318 tahun 2025.

Tabel 2.51 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PPKS	518.358	501.322	755.979	192.715	40.358
2	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	516.759	501.322	755.979	192.715	40.358
3	PPKS yang memperoleh bantuan sosial	513.287	258.154	607.353	192.715	40.358
4	Jumlah sarana sosial/panti asuhan/panti jompo/panti rehabilitasi	119	105	144	164	164
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100
Indikator SDGs						
6	Persentase penduduk miskin versi Perda Kt Smg (%) (indikator 1.2.1*)	16,15	24,13	11,06	11	11*
7	Cakupan disabilitas miskin yang memperoleh bantuan kebutuhan dasar (%) (indikator 1.3.1.(c))	100	100	100	100	100
8	Persentase Rumah Tangga miskin / jiwa yang memperoleh Program PKH (%) (indikator 1.3.1.(d))	7,99	7,99	14,72	8,68	8,68*
9	Tingkat kemiskinan BPS (%) (indikator 10.1.1.(a))	4,34	4,56	4,25	4,23	4,03

Sumber: Dinas Sosial, 2024

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Urusan Sosial, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.52 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2020 – 2024

No	INDIKATOR SPM	2020	2021	2022	2023	2024		
						PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	CAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR(B)	IP SPM = 80% (A) + 20% (B)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100% <u>176 orang</u> 176 orang	100%	100% <u>150 orang</u> 150 orang	80%	80%	20%	100%
2	Persentase (%) anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100% <u>29 orang</u> 29 orang	100%	100% <u>24 orang</u> 24 orang	80%	80%	20%	100%
3	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100% <u>148 orang</u> 148 orang	100%	100% <u>102 orang</u> 102 orang	80%	80%	20%	100%
4	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	100% <u>292 orang</u> 292 orang	100%	100% <u>83 orang</u> 83 orang	80%	80%	20%	100%

	diluar panti							
5	Persentase (%) korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100% <u>510.650</u> 510.650	100%	100% <u>14.274 orang</u> 14.274 orang	80%	80%	20%	100%

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda dan Kerjasama, Dinas Sosial, 2024

Permasalahan yang dijumpai dalam penyelenggaraan layanan SPM bidang urusan sosial adalah:

- a. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang cukup tinggi, khususnya fakir miskin.
- b. Masih kurang memadainya rumah singgah/*shelter* yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah pemerlu pelayanan pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial.
- c. Masih terbatasnya sarana prasarana yang berada di rumah singgah/*shelter* dan rumah autis yang dimiliki Dinsos Kota Semarang dalam pelaksanaan pelayanan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
- d. Masih banyaknya SDM relawan sosial yang belum memiliki kompetensi atau *skill* yang tepat dalam penanganan masalah sosial.
- e. Masih kurangnya peran masyarakat atau dunia usaha melalui CSR yang dilibatkan dalam penanganan masalah sosial.
- f. Proses validasi data terhadap PPKS yang belum dilakukan secara maksimal.

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Sasaran utama pembangunan urusan tenaga kerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja yang akan bermuara pada rendahnya tingkat pengangguran terbuka. Beberapa indikator kinerja pada Urusan Tenaga Kerja tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.53 Realisasi Indikator Kinerja pada Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (BPS)	69,89%	69,41%	70,96%	69,42%	69,88%
2	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	90,43%	90,43%	92,40%	94,01%	94,18%
3	Jumlah Penduduk Usia Kerja	1.191.265	1.490.742	1.516.197	1.338.215	1.354.593
4	Angkatan Kerja			1.075.827	929.014	946.618
	Jumlah Bekerja	925.963	936.076	994.091	873.358	891.497
	Jumlah Pengangguran Terbuka	98.001	98.718	81.736	55.656	55.121
	Total Angkatan Kerja	1.023.964	1.034.794	1.075.827	929.014	946.618

INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS		2020	2021	2022	2023	2024
5	Bukan Angkatan Kerja	441.157	455.948	440.370	409.201	407.975
	Sekolah	151.538	165.797	139.678	123.051	123.051*
	Mengurus Rumah Tangga	232.208	222.279	241.445	221.193	221.193*
	Lainnya	57.411	67.872	59.247	64.957	64.957*
6	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	NA	78,94% (15 keg)	80,95% (17 keg)	80,95% (17 keg)	80,95
7	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	74%	68,14% (198150 dari 272399 TK)	72,74% (173421 dari 254511 TK)	77,09% (210904 dari 273592 TK)	79,06
8	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	50 (158 kasus, 79 PB)	50 (158 kasus, 79 PB)	50 (158 kasus, 79 PB)*	70,51 (78 kasus, 55 PB)	70,63
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (8.5.2*)	9,57	9,54	7,6	5,99	5,82

Sumber: BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2024 sebesar 69,88% meningkat jika dibandingkan dengan 2023 sebesar 69,42%. Angkatan kerja harus diimbangi dengan jumlah lowongan pekerjaan. Demikian pula yang terjadi di Kota Semarang, investasi dengan pelibatan tenaga kerja lokal menyebabkan jumlah pengangguran terbuka menurun. Selain itu dengan banyaknya program kegiatan peningkatan kompetensi pencari kerja baik pada BLK maupun LPK membuat banyak pencari kerja yang ditempatkan baik pada pekerja formal, maupun sebagai wirausaha baru. Terlihat TPT di Kota Semarang terus menurun dari tahun 2018 hingga mencapai 5,82% pada tahun 2024. Penurunan TPT ini juga mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi semakin baik dan tenaga kerja yang ditempatkan juga semakin banyak. Jika ditinjau dari UMK, dapat dilihat bahwa Kota Semarang selalu mengedepankan kesejahteraan dari setiap masyarakatnya, hal ini terlihat bahwa UMK di Kota Semarang selalu meningkat dari tahun ke tahun dan selalu menjadi Kota dengan nominal tertinggi se-Jawa Tengah. Adapun progres UMK sejak tahun 2020-2024 terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.54 UMK dan KHL Kota Semarang Tahun 2020-2024

UMK DAN KHL	2020	2021	2022	2023	2024
Upah Minimum Kota Semarang (Rp)	2.715.000	2.810.025	2.835.021	3.243.969	3.243.969

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2024

Angka penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial cukup bervariasi di tahun 2024, berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa penyelesaian dalam bentuk Persetujuan Bersama (PB) adalah sebesar 61 kasus, hal ini diartikan masih rendahnya tingkat pemahaman baik pekerja maupun pengusaha tentang regulasi hubungan industrial. Oleh sebab itu,

masih perlu banyak upaya preventif yang dilakukan oleh Disnaker Kota Semarang untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial. Adapun data kasus perselisihan hubungan industrial dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55 Data Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus yang ditangani:		150	159	108	127	123
Penyelesaian:						
1	Dalam bentuk PB	84	63	63	72	61
2	Tahap anjuran mediator	51	33	33	45	42
3	Secara bipartite usai mediasi	21	10	10	6	5
4	Diasumsikan selesai bipartite tidak melapor	3	2	2	6	3

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2024

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Semarang sangat peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Komitmen sekaligus kinerja ini terlihat dengan diterimanya Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Mentor dan predikat Kota Layak Anak kategori Utama dari Kementerian PPPA. Penyelenggaraan upaya terkait juga diperkuat dengan ditetapkannya Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Disisi lain Rasio KDRT pada tahun 2024 sebesar 0,031 mengalami peningkatan dari tahun 2023. Sedangkan dengan Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang mengalami penurunan dari tahun 2023 yang sebesar 25,08 meningkat menjadi sebesar 25,78 pada tahun 2024, dan semuanya telah dapat ditangani sebesar 100%. Hal ini menandakan adanya peningkatan kesetaraan bagi perempuan dan perlindungan terhadap anak, sehingga korban KDRT dan korban kekerasan semakin terbuka dan bangkit untuk mendapatkan pendampingan dan fasilitasi yang diperlukan.

Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang dan 16 (enam belas) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tingkat kecamatan melakukan advokasi baik litigasi maupun non litigasi terhadap kasus KDRT, Kekerasan dalam pacaran (KDP). Kekerasan terhadap Anak, Kekerasan terhadap Perempuan dan Masalah Anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu juga Pelayanan Rumah Duta Revolusi Mental RDRM yang menyediakan layanan konsultasi masalah anak, remaja dan keluarga, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Sejak 2021, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Semarang tercatat stabil di angka 70,59. Meskipun belum meningkat secara angka, sejumlah upaya strategis seperti penerbitan Perda Kota Layak Anak, serta pencapaian predikat Kota Layak Anak kategori Utama pada 2023 mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam melindungi hak anak. Dengan memperluas perlindungan berbasis masyarakat dan memprioritaskan aspek pencegahan, IPA Kota Semarang berpotensi naik signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Tabel 2.56 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	7,26%	17,14%	59,38%	48,89%	48,90%
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,01%	0,017%	0,028%	0,027%	0,03%
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	17,04	18,78	25,46	25,08	25,78
4.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100% (146 orang)	100% (160 orang)	100% (217 orang)	100% (214 orang)	100% (247 korban)
5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,67	73,64	73,93	73,86	78,71
6.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	N/A	70,59	70,59	71,80	71,36
7.	Rasio KDRT	0,029	0,02	0,025	0,025	0,031
8.	Indeks Perlindungan Anak	NA	70,59	70,59	71,80	71,36
Indikator SDGs						
9.	Cakupan program pengarusutamaan gender	97	97	98	100	100
10.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan	0,0041	0,0052	0,0092	0,01	0,0095
11	Pemberdayaan terhadap korban KDRT	100	100	100	100	100
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,67	73,64	73,93	73,86	78,71

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Inovasi pada penyelenggaraan urusan pangan dalam rangkaantisipasi inflasi dampak kenaikan bahan bakar di Kota Semarang diantaranya dengan melaksanakan pasar pangan murah dan aman melalui program Pak Rahman sebanyak 197 kali yang pelaksanaannya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di bidang pangan seperti Bulog, Indoguna, BUMP, Fresh Mart, Pengusaha Sayur, UMKM Pangan Lokal. Dan upaya ini secara efektif cukup mampu menahan inflasi dari sisi pemutusan rantai pemasokan penawaran barang pangan.

Kinerja lain adalah tercapainya pola pangan harapan pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 92,16%, dimana semakin tinggi nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) maka akan semakin beragam konsumsi pangan masyarakat dan menuju PPH. Ketersediaan pangan berupa beras berdasarkan data tahun 2024 sebesar 701.497,02 ton, sedangkan tingkat kebutuhan pangan masyarakat Kota Semarang sebesar 166.256,89 ton, sehingga cadangan pangan masyarakat sebesar 421,94%.

Distribusi Pangan didukung oleh Mekanisme dan alur distribusi pangan (terutama berupa beras) kepada warga miskin yang sesuai aturan juga telah

tercapai 100%. Demikian pula terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang. Selain itu juga berhasil menurunkan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan mencapai 0%, melalui Intervensi daerah rentan rawan pangan prioritas 1,2,3 dengan berbagai kegiatan antara lain: memberi bantuan beras melalui Anjungan Terima Mandiri Beras (ATM-Beras), penyelenggaraan Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman), peningkatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) Pelatihan pengembangan ketersediaan pangan dan Rakor dengan multistekholder lintas sektoral. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang menginisiasi Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang (Garang Asem) dan Penggunaan Pangan Lokal melalui kegiatan Promosi Pangan Lokal Enak dan Bergizi (Pisang Legi) yang telah dilegalisasi melalui Surat Edaran Wali Kota. Beberapa kinerja pada Urusan Pangan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor/hari	89,1	89,1	91,2	91,8	92,16
2	Ketersediaan Energi/ Kapita	Kkl/Kapita/ Hari	3,054	3,055	3,056	3,057	2,924
3	Tingkat Keamanan Pangan	%	91,26	91,27	84,6	84,61	87,44
4	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	252,05	252,806	367,51	409,01	421,94
5	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	7	6	3,4	0,56	0
6	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	NA	NA	99,4	98,30	96,84

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2024

j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota lebih pada dukungan pada program Reformasi Agraria bekerjasama dengan Kantor Pertanahan/BPN terutama dalam hal fasilitasi atau mediasi sengketa tanah yang terjadi di wilayahnya.

Capaian kinerja pada tertib administrasi pertanahan ditunjukkan dengan konsistennya ketertiban administrasi pertanahan dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu sebesar 90,63%. Penyelesaian kasus tanah negara cenderung konsisten dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yang selalu mencapai 100%. Terdapat 61 kasus yang diselesaikan di tahun 2024. Adapun realisasi kinerja pada urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.58 Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tertib Administrasi Pertanahan (%) (Peningkatan <i>Data Base</i> Pertanahan)	88,27	87,18	87,14	90,63	90,63

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	100% 15 kasus	100% 27 kasus	100% 61 kasus	100%* 61 kasus	100%* 61 kasus
3	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	58,00%	12,79%	12,79%	88,89%	88,89%
4	Tersedianya tanah untuk masyarakat	60,00%	11,08%	11,08%	100%	100%

Sumber: BPN dan Dinas Penataan Ruang, 2024

k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kinerja Kinerja penyelenggaraan pada urusan Lingkungan Hidup ditandai dengan diraihnya :

- Tahun 1. Penghargaan Nirwasita Tantra sebagai Entitas Pemerintah kategori Kota Besar Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
- Tahun 2. Penghargaan Apresiasi Pembinaan Proklim dengan kategori partisipasi aktif dalam melaksanakan pembinaan program kampung iklim (proklim) di daerah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
- Tahun 3. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional (SMA Karangturi Semarang dan SMA N 16 Semarang),
- Tahun 4. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi (SMA N 8 Semarang, SD N Bulu Lor Semarang, SD Petra Semarang, dan SD N Peleburan 03 Semarang),
- Tahun 5. Penghargaan Kampung Iklim (Proklim) Tingkat Nasional (Program Kampung Iklim dengan kategori Trophy Proklim Utama diberikan kepada RW 15, Kelurahan TanjungMas, Kecamatan Semarang Utara dan Program Kampung Iklim dengan kategori Trophy Proklim Lestari diberikan kepada RW 03, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik).

Proklim merupakan wujud implementasi dari adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan partisipasi masyarakat yang didampingi oleh beberapa instansi terkait melalui kegiatan pengomposan, pembuatan *eco brick*, penghijauan, wana tani, pewadahan sampah, pemanenan air hujan, sumur tadah hujan, pemanfaatan kolam retensi banjir, pemanfaatan air leri, *urban farming*, lilin daur ulang jelantah dan sebagainya. Sampai dengan tahun 2024 Kota Semarang sudah memiliki 97 Proklim dengan rincian 5 Proklim Madya, 66 Proklim Pratama, dan 24 ProKlim Utama.

Selain itu juga dilakukannya Program Strategis untuk menunjang terhadap peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, diantaranya: pembatasan penggunaan plastik, secara periodik dilaksanakan *Car Free Day*, juga penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mulai dari pemilahan, pengumpulan pengolahan dan pemrosesan akhir. Sehingga sampai dengan saat ini terdapat 497 unit bank sampah di masyarakat, juga rumah kompos, dan TPS3R, yang masih menyisakan sebanyak 3.481,14 ton sampah atau sebesar 0,81% yang belum dikelola, baik yang dikurangi maupun yang di tangani. Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Semarang tahun 2023 sesuai Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.59 Data Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Semarang Tahun 2024

NO	KETERANGAN	NILAI (TON/TAHUN)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	434.243,97
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH (27,66%)	120.152,30
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	2.487,92
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	32,51
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	117.631,87
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH (71,34%)	309.809,86
d	Pemilahan/Pengumpulan	0
e	Pengangkutan	0
f	Pengolahan	317,55
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	317,55
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0
g	Pemrosesan akhir	309.492,31
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	309.492,31
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + IIIf) = (27,74%)	120.469,85
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV) = (72,26%)	313.774,12

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan emisi GRK dalam 4 sektor sebagai berikut:

Tabel 2.60 Upaya Penurunan Emisi GRK

NO	SEKTOR	KEGIATAN	AKSI MITIGASI	PENURUNAN EMISI 2022	PENURUNAN EMISI 2023	PENURUNAN EMISI 2024*
1	Sektor Energi	<i>Efisiensi Energi</i>	penggantian lampu menjadi LED (<i>Light-Emitting Diode</i>)	11.604,10 Ton CO2eq	301,31 Ton CO2eq	301,31 Ton CO2eq
			penggantian LPJU dengan LED (<i>Light-Emitting Diode</i>)	34,59 Ton CO2eq	4.112,31 Ton CO2eq	4.112,31 Ton CO2eq
		<i>On Grid PLTS</i>	penggunaan PLTS untuk penerangan jalan umum	34,14 Ton CO2eq	6,32 Ton CO2eq	6,32 Ton CO2eq
			<i>PLTS solar home system</i>	1.891,84 Ton CO2eq	736 Ton CO2eq	736 Ton CO2eq
			Pembangunan PLTB		5,31 Ton CO2eq	5,31 Ton CO2eq
2	Sektor Transportasi	<i>Area Traffic Control System (ATCS)</i>	Pemasangan ATCS (<i>Area Traffic Control System</i>) untuk mengendalikan kemacetran di 51 simpang	18,06 Ton CO2eq		
			Pembangunan ITS/ATCS		3.846,88 Ton CO2eq	3.846,88 Ton CO2eq
			Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)		11,20 Ton CO2eq	11,20 Ton CO2eq
		<i>Reformasi Sistem Transit (Bus Rapid Transit) BRT</i>	Peningkatan semi transit (BRT)	47.743,10 Ton CO2e	355,21 Ton CO2eq	355,21 Ton CO2eq
3	Sektor Lahan	Peningkatan cadangan carbon melalui	Peningkatan fasilitasi rehabilitasi mangrove dan hutan mangrove	93,72 Ton CO2e	9.364,30 Ton CO2eq	9.364,30 Ton CO2eq

NO	SEKTOR	KEGIATAN	AKSI MITIGASI	PENURUNAN EMISI 2022	PENURUNAN EMISI 2023	PENURUNAN EMISI 2024*
		penanaman dengan melibatkan sektor pemerintahan, masyarakat dan pelaku usaha	Penanaman ruang terbuka hijau (gerakan iji royo royo) dipermukiman, perkantoran, RS, lembaga pendidikan	446,98 Ton CO2e	257.058,50 Ton CO2eq	257.058,50 Ton CO2eq
			Pengembangan hutan rakyat dan gerakan menanam pohon	84,88 Ton CO2e		
			Fasilitasi bantuan bibit		400,61 Ton CO2eq	400,61 Ton CO2eq
			Pengembangan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)		22,77 Ton CO2eq	22,77 Ton CO2eq
			Pengelolaan kawasan konservasi		2.895,72 Ton CO2eq	2.895,72 Ton CO2eq
4	Sektor Pertanian dan peternakan	Pengembangan biogas ternak	Pengelolaan kotoran ternak (pengelolaan biogas)	4.340,18 Ton CO2e	1.784,30 Ton CO2eq	1.784,30 Ton CO2eq
		Pengeolaan Tanaman Terpadu (PTT)		6.844,14 Ton CO2e		
		Varietas padi rendah emisi	Pengembangan varietas padi rendah emisi	6.268,76 Ton CO2e	5.776,21 Ton CO2eq	5.776,21 Ton CO2eq
		Subtitusi pupuk kimia dengan organik	Penggunaan pupuk organik dan kompos	147,14 Ton CO2e	0,02 Ton CO2eq	0,02 Ton CO2eq
			Peningkatan penggunaan pupuk organik dan biomasa	241,12 Ton CO2e	265,74 Ton CO2eq	265,74 Ton CO2eq
		Pembangunan rumah kompos	Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO)	124.091,54 Ton CO2e	1,11 Ton CO2eq	1,11 Ton CO2eq
5	Sektor Limbah	Optimalisasi fasilitas penanganan dan pengurangan sampah di Kota Semarang	Pembangunan TPA <i>controlled landfill system</i>	38,33 Ton CO2e		
			Pembangunan TPS 3 R	6.505,60 Ton CO2e	3.229,84 Ton CO2eq	3.229,84 Ton CO2eq
			Pengelolaan sampah 3R di rumah tangga perkotaan	0,46 Ton CO2e		
			Pembangunan bank sampah	2.859,69 Ton CO2e	89.440,20 Ton CO2eq	89.440,20 Ton CO2eq
			Pembangunan fasilitas kompos di TPA	32.007,19 Ton CO2e		
			Data sistem blank	2.517,81 Ton CO2e		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2024 yang menggunakan definisi operasional baru terlihat bahwa IKLH mengalami penurunan kinerjanya, pada tahun 2024 sebesar 59,41 sedangkan IKLH pada tahun 2023 sebesar 64,55. Capaian ini disumbangkan oleh Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKA mengalami penurunan menjadi 45,56 di tahun 2024 dari tahun 2023 yang sebesar 57,31. Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2024 sebesar 86,90 meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 82,23. Sedangkan dengan Indeks Kualitas Lahan yang mengalami penurunan menjadi 32,35 di tahun 2024 dari angka 44,29 di tahun 2023. Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup dari tahun 2020-2024, yang secara umum kondisinya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.61 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dengan menggunakan definisi operasional yang lama	66,05	59,60	51,32	56,84	NA
2	Indeks kualitas air (IKA) dengan menggunakan definisi operasional yang lama	50,44	50,00	33,76	46,00	NA
3	Indeks kualitas udara (IKU) dengan menggunakan definisi operasional yang lama	95,20	75,00	77,38	80,55	NA
4	Indeks Kualitas Lahan dengan menggunakan definisi operasional lama	55,90	47,58	33,28	31,63	NA
5	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dengan menggunakan definisi operasional baru berdasarkan SE Menteri LHK S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024	NA	NA	NA	64,55	59,41
6	Indeks kualitas udara (IKU) dengan menggunakan definisi operasional baru berdasarkan SE Menteri LHK S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024	NA	NA	NA	82,23	86,90
7	Indeks kualitas air (IKA) dengan menggunakan definisi operasional baru berdasarkan SE Menteri LHK S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024	NA	NA	NA	57,31	45,56
8	Indeks kualitas lahan (IKL) dengan menggunakan definisi operasional baru berdasarkan SE Menteri LHK S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024	NA	NA	NA	44,29	32,35
9	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	172,34	173,68	73,5	86,15	83,26
10	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi:					
	1. Persentase pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenisnya	22,00	24,35	26,18	27,10	27,67
	2. Persentase penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenisnya	75,11	74,21	72,88	72,10	71,34
11	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	85,00	85,20	86,08	88,23	88,62
Indikator SDGs						
12	persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA (11.6.1.(a))	89,50	90,00	90,50	91,00	91,50
13	Jumlah Bank Sampah yang beroperasi (11.6.1.(b))	112	125	225	497	664
14	Jumlah ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan (perush)	50	39	23	29	38

Sumber: Bappeda, DLH Kota Semarang, 2024

Untuk diketahui, terdapat penyesuaian perhitungan yang diterapkan pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) beserta komponennya. Penyesuaian perhitungan tersebut berdasarkan Surat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024 Perihal Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023. Metode perhitungan IKA dihitung dengan menggunakan rumus baru yang disebut IKA-INA yang mengacu pada NSF-WQI (*National Sanitation Foundation Water Quality Index*). Parameter untuk perhitungan IKU mengalami perubahan dengan adanya penambahan parameter baru yaitu *Particulate Matter* 2.5 mikron (PM 2.5). Rumus perhitungan IKL menjadi semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai IKL. Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup Masih belum optimalnya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Semarang.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK. Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP-el, maka capaian kepemilikan KTP-el pada tahun 2024 adalah 99,35% atau 1.280.090 orang, dari jumlah wajib KTP-el sejumlah 1.288.430 orang. Sedangkan 0,65% lainnya adalah penduduk yang belum memiliki KTP-el yaitu penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el, ataupun penduduk yang melakukan mutasi kedatangan yang belum rekam KTP-el. Capaian kinerja tersebut, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 terdapat penurunan sejumlah 0,22%. Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan kinerja di tahun 2024 adalah adanya lonjakan penambahan Wajib KTP-el dikarenakan peristiwa kependudukan seperti pindah datang atau mutasi penduduk dan peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian Wajib KTP-el.

Tabel 2.62 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio keluarga berKK (Kartu Keluarga)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	60,57%	62,05%	60,87%	66,45%	71,06%
3	Kepemilikan akta kelahiran	93,42	95	97,85	98,25	98,35%
4	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	100	100	100	100	100
5	Pemanfaatan data kependudukan (Perjanjian Kerjasama)	45	65	100	100	100
6	Perekaman KTP elektronik	98,07%	98,48%	96,93%	99,57%	99,35%

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator SDGs						
7	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran (0-5 Tahun)	97,15%	99,53%	99,48%	99,48%*	99,48%*
8	Rasio bayi berakta kelahiran (1.4.1.(j))	98,81%	99,26	99,48%	99,48%*	99,48%*
9	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dispendukcapil, 2024

Persentase capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 71,06%, ditunjukkan dengan terdapat 293.041 anak yang memiliki KIA dari jumlah penduduk usia KIA yang sebanyak 412.396 anak. Hal ini disebabkan terdapat peningkatan jumlah anak usia wajib KIA dari tahun sebelumnya dan terdapat jumlah anak yang memiliki KIA yang sudah berusia diatas 17 tahun maka sudah tidak dihitung ke dalam capaian kepemilikan KIA. Akan tetapi capaian KIA tahun 2024 sebesar 71,06% telah mencapai target nasional yang telah ditetapkan sebesar 60% pada tahun 2024.

Capaian tersebut akan terus ditingkatkan untuk tahun yang akan datang, dengan menerapkan pelayanan *online* adminduk yaitu Aplikasi SiD’nOK, melaksanakan pelayanan paket terintegrasi dengan penerbitan akta kelahiran sekaligus akan mendapatkan KIA dan Kartu Keluarga (KK) atau yang disebut Paket *3 in 1*. Selain itu dilaksanakan pula kerjasama pemanfaatan KIA dengan 9 (sembilan) Mitra KIA yaitu Toko Buku Gramedia, Toko Buku Merbabu, Toko Buku Toha Putra, English First, Halmahera Music, Klub Merby, Jungle Toon Water Park, BRT Trans Semarang dan Club House Graha Wahid. Kerjasama ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan nilai manfaat bagi anak yang memiliki KIA, selain itu untuk menarik minat warga agar membuat KIA bagi anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat. Hal ini terlihat dari capaian persentase LPM aktif di tahun 2024 sebesar 100%.

Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dapat dilihat kegiatan fasilitasi Kegiatan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, termasuk di dalamnya untuk peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kesejahteraan bagi perempuan, lansia, karang taruna dan remaja. Adapun permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu masih kurangnya pemahaman terkait fungsi lembaga kemasyarakatan sehingga terus dilakukan program dan advokasi kebijakan terkait peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.63 Kinerja Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Tahun 2020-2024 (Persen)

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase LPM aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 serta Surat Mendagri Nomor 470133761SJ dan 470133751SJ tanggal 5 Juni 2020, Kota Semarang telah menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 pilar, yang terdiri dari: Pengendalian Kuantitas Penduduk; Peningkatan Kualitas Penduduk; Pembangunan Keluarga; Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan Penataan Administrasi Kependudukan. Dan semuanya telah diinternalisasikan dalam program dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu juga telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 52 Tahun 2022 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2045.

Capaian kinerja pada indikator yang telah ditetapkan tahun 2024 sebagian besar dapat tercapai dengan baik dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebagian besar indikator terdapat peningkatan. Jumlah Kelompok Aktif Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023. Peningkatan pembinaan dan pendampingan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK Remaja, UPPKA) perlu dilakukan terus-menerus.

Skor resmi IPBK Kota Semarang belum dipublikasikan secara umum. Tetapi kualitas hidup (IPM tinggi) dan struktur/bonus demografi menunjukkan kota ini berada dalam jalur pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Tabel 2.64 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGs	2020	2021	2022	2023	2024
1	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	1,99	1,86	1,75	1,74	1,76
2	Jumlah peserta KB Aktif	194,631	175,603	181,864	185,880	180,062
3	Rasio Akseptor KB per 100 PUS	76,94	72,71	76,08	77,72	77,73
4	Jumlah PIK Remaja perjumlah kelurahan	73	73	81	76	84
5	Cakupan anggota Bina Keluarga Aktif	48,85	40,16	72,9	69,51	72,08
6	Jumlah Kelompok Aktif Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL)	BKB: 274 BKR: 124 BKL: 212	BKB: 283 BKR: 131 BKL: 218	BKB: 276 BKR: 113 BKL: 216	BKB: 286 BKR: 108 BKL: 218	BKB: 332 BKR: 121 BKL: 229
7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	75,40%	76,94%	77%	76,09%	121%
8	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	NA	NA	NA	NA	NA
Indikator SDGs						
9	Cakupan peserta KB aktif	76,94	73,88	76,08	77,72	77,73
10	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), cara modern	25,19	29,03	29,58	31,41	39,17
11	Cakupan PUS unmet need (5.6.1.(a))	10,46	10,89	9,13	8,42	5,13

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

o. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kinerja pada penyelenggaraan Urusan Perhubungan pada tahun 2024, ditandai diantaranya dengan diterimanya Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk kategori Pemerintah Kota yang dalam penilaian kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan dengan indikator paling baik. Selain itu, Kota Semarang juga menerima Anugrah Jawa Pos Radar Semarang Tahun 2024 Kategori Transportasi Ramah Disabilitas.

Pada tahun 2024 jumlah kecelakaan sebesar 5.665 kejadian, terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 748,05% dari jumlah kejadian kecelakaan tahun 2023 sebanyak 668 kasus. Sedangkan korban meninggal dunia mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 201 korban dari tahun 2023 yang sebesar 31 korban. Selain itu, korban dengan luka berat sebanyak 4 korban dan luka ringan sebanyak 1.435 korban. Demikian pula secara material terjadi peningkatan kerugian material menjadi 4.190.300.000,00 pada tahun 2024. Berdasarkan data dari Polrestabes Semarang tahun 2024 terdapat 4 titik Rawan Kecelakaan yaitu Jl. Urip Sumoharjo Mangkang Depan SDN1 Mangkang Kulon S.D RS Tugu, Jl. Brigjend Sudiarto Hotel Horison s/d GOR Manunggal Jati, Jl. Prof Hamka Tanjakan Silayur dan Jl. Perintis Kemerdekaan Depan Makodam. Beberapa penanganan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama Polresta Semarang diantaranya: Patroli & Turlalin, membentuk Tim Urai Kepadatan, Rekayasa arus lalu lintas dan mensiagakan derek, koordinasi dengan Ambulance Hebat dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan. Adapun fokus penanganan untuk blackspot di Jl. Prof Hamka Tanjakan Silayur yang merupakan jalan kewenangan kota terus dilakukan melalui penempatan petugas dan pembatasan jam operasional angkutan barang, selain pengaturan angkutan barang juga akan dilakukan upaya untuk perbaikan geometri alinyemen vertical yang aman untuk dilewati angkutan barang dan melakukan optimalisasi jalan rintisan SORR Mangkang-Mijen sebagai jalur alternatif untuk mengurai lalu lintas di Jalan Prof Hamka.

Kinerja urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Beberapa ruas jalan mengalami peningkatan volume lalu lintas kendaraan yang berpotensi pada kerawanan kemacetan lalu lintas masih menjadi isu yang harus segera dipecahkan. Indikator Jumlah titik/ruas rawan macet yang pada tahun 2020 terdapat 3 lokasi (Jl. Brigjend. Sudiarto, Jl. Setiabudi, dan Siliwangi), pada tahun 2021 bertambah 1 lokasi yaitu Jl. Elang. Hal ini disebabkan adanya bangkitan-bangkitan perjalanan baru di lokasi tersebut, berupa perumahan/permukiman baru, tempat pendidikan dan pusat ekonomi. Jumlah titik / lokasi rawan kemacetan sudah sesuai target yang ditetapkan dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami perbaikan. Lokasi rawan kemacetan pada tahun 2022 tercatat 3 lokasi yaitu Jl. Brigjend. Sudiarto, Jl. Setiabudi, dan Jl. Siliwangi. Pada Tahun 2023 ini untuk Jl. Elang yang pada tahun lalu masih padat sudah berangsur mengalami kelancaran. Hal ini didukung oleh rekayasa lalu lintas dan pemasangan perlengkapan jalan di lokasi tersebut antara lain *Traffic Light*, rambu-rambu, dan marka jalan. Salah satu indikator titik kemacetan

adalah kinerja tingkat pelayanan jalan (LOS). Berikut merupakan LOS pada tiga ruas jalan tersebut:

Tabel 2.65 Kinerja Tingkat Pelayanan Jalan (LOS) Tahun 2024

NO	RUAS JALAN	STATUS JALAN	V/C	LOS
1	Jalan Brigjend Sudiarto	Provinsi	0,89	D
2	Jalan Setiabudi	Nasional	0,97	E
3	Jalan Siliwangi	Nasional	0,87	D

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Dari data di atas ketiga ruas jalan tersebut termasuk dalam tingkat pelayanan D dan E sehingga membutuhkan penanganan. Sejauh ini Pemerintah Kota Semarang telah berupaya melakukan penanganan di ketiga ruas jalan melalui manajemen rekayasa lalu lintas dan pengaturan lalu lintas meski belum optimal menurunkan V/C rasio jalan. Dan karena ketiga ruas jalan dimaksud termasuk ke dalam kewenangan Provinsi dan Nasional sehingga membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk melakukan penanganan.

Pada Jalan Brigjend Sudiarto yang merupakan jalan utama dari Kabupaten Grobogan ke Kota Semarang sudah terdapat perencanaan pembangunan jalan layang di Simpang Fatmawati, kemajuan saat ini sudah dilakukan penyusunan DED oleh Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017. Sedangkan pada Jalan Setiabudi sudah terdapat perencanaan pembangunan jalan layang di Simpang Patung Diponegoro merupakan salah satu program penjabaran Perpres No 79 Tahun 2019 untuk mendukung perkembangan kawasan ekonomi kedungsepur dan KSPN Borobudur, dan saat ini progres perencanaan pembangunan sudah dilakukan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Jalan dan Jembatan Provinsi Jateng - DIY pada tahun 2021 oleh BBJN Wilayah Jateng DIY dan berdasarkan kajian tersebut akan dilakukan pembangunan pada tahun 2034. Selain itu pemerintah Kota Semarang juga berencana melakukan upgrade Simpang Ber-Apill di wilayah Tembalang dan sekitarnya menjadi simpang Ber-Apill terkoordinasi ATCS. Sedangkan pada ruas Jalan Siliwangi untuk mengurai kepadatan lalu lintas terdapat perencanaan Pembangunan Harbour Tol yang menyambung dari Pesisir Kendal menuju Pelabuhan Tanjung Mas dan merupakan salah satu program penjabaran Perpres No 79 Tahun 2019 untuk mendukung perkembangan kawasan ekonomi kedungsepur dan KSPN Borobudur.

Kondisi lalu lintas di Kota Semarang secara umum masih dalam kondisi normal, meski demikian untuk pelayanan transportasi diperlukan peningkatan rekayasa lalu lintas, layanan angkutan massal, serta peningkatan prasarana lalu lintas untuk mengatur arus lalu lintas.

Tabel 2.66 Kondisi Angkutan Umum Massal Tahun 2020-2024

URAIAN		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan angkutan umum massal (BRT)	koridor	8	11	12	12	12
2	Load Faktor Trans Semarang						
A	Koridor 1 (T Mangkang - T Penggaron)	%	41,53	43,46	65,68	69,72	74,15
B	Koridor 2 (T Terboyo - T Sisemut)	%	60,63	56,80	82,87	82,82	84,03

URAIAN		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
C	Koridor 3 (Tanjung Emas - Akpol)	%	34,27	50,20	94,37	101,00	94,84
D	Koridor 4 (Terminal Cangkiran – St Tawang)	%	42,91	38,08	60,93	77,42	77,45
E	Koridor 5 (Meteseh - Bandara - PRPP)	%	63,09	55,77	78,23	84,86	89,88
F	Koridor 6 (Undip - Unnes)	%	23,53	24,89	50,29	61,84	96,99
G	Koridor 7 (T. Terboyo - Soekarno Hatta - Pemuda)	%	46,45	52,44	54,47	65,04	66,21
H	Koridor 8 (T. Cangkiran - T. Gunung pati - Sp Lima)	%	45,26	45,80	76,51	86,60	79,13
I	Feeder 1 (Ngaliyan - Madukoro - Ngaliyan)	%	13,47	17,42	37,41	60,91	76,23
J	Feeder 2 (T. Terboyo - Lamper Tengah - Soekarno Hatta - T. Terboyo)	%	10,87	6,06	23,02	36,54	45,14
K	Feeder 3 (Banyumanik - Penggaron)	%			55,85	36,54	96,88
L	Feeder 4 (Terminal Gunungpati - Unnes - BSB)	%		7,50	8,74	12,38	30,24
3	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail)	%	63,13	65,09	67,71	69,32	71,99
4	Ketersediaan terminal Terminal Tipe C	unit	3	3	5	3	3
5	Ketersediaan sarana pendukung moda transportasi massal (halte BRT)	unit	376	376	437	438	432
6	Cakupan wilayah terlayani transportasi	%	70	75	75	NA	75
7	Persentase ketertiban parkir di kawasan strategis	%	83,42	90,05	86,42	NA	90,04
8	Persentase pengelolaan Parkir <i>On the Street</i>	%	NA	NA	86,42	90,06	90,04
9	Arus penumpang angkutan umum	Jumlah	10.935 .306	12.028 .837	15.869 .466	22.956 .716	20.485 .658
10	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	Titik/ruas rawan macet	3	4	3	3	2
11	Kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah	1913	1932	2191	2026	1993
Indikator SDGs							
12	Jumlah penumpang BRT (11.2.1.(a))	Penumpang	6.835 .778	6.207 .674	11.013 .922	13.146 .318	13.135 .009
13	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar (11.2.1.(b))	NA	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Pelayanan BRT saat ini terdapat 8 koridor, 4 *feeder*, dan 1 layanan malam yang sudah menjangkau ke wilayah-wilayah pinggiran Kota Semarang. Terkait rencana pengembangan rute baru, membutuhkan penambahan anggaran operasional BRT yang saat ini sudah cukup besar ±4.5% APBD Tahun 2024. Sehingga saat ini difokuskan pada peningkatan kualitas layanan seperti

peremajaan armada yang banyak mendapat sorotan publik dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan penumpang sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Selain itu beberapa terminal tipe C seperti Terminal Tipe C Cangkiran, Gunungpati dan Terboyo secara perlahan telah menjadi lokasi *park and ride* penumpang untuk sisi selatan dan utara kota Semarang. Sehingga perlu didukung untuk sisi timur yang terintegrasi dengan layanan Trans Jateng di Terminal Tipe B Penggaron yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Arus penumpang angkutan umum telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 22.308.400 penumpang dari target 16.010.382 penumpang atau tercapai 127,95%. Hal ini ditunjang oleh perbaikan pelayanan angkutan umum dan pergerakan kegiatan ekonomi yang meningkat sehingga masyarakat mulai kembali menggunakan angkutan umum. Penggunaan angkutan umum oleh masyarakat menjadikan kondisi lalu lintas lancar, dan biaya perjalanan yang murah

Kepemilikan kir angkutan umum di tahun 2024 sebesar 1.993 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 2.026. Kepemilikan kir angkutan umum telah mencapai target yang telah ditetapkan. Kir/uji laik sebagai upaya meningkatkan keamanan angkutan umum.

Persentase fasilitas perlengkapan jalan meningkat jika dibandingkan tahun 2023 dimana pada tahun 2024 berhasil mencapai 71,99%. Dampak dari pencapaian ini adalah cukup tersedianya perlengkapan jalan dalam rangka rekayasa lalu lintas, yang berguna dalam mengatur lalu lintas sehingga lalu lintas di jalan menjadi lebih tertib.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kinerja pada penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024, ditandai diantaranya dengan diterimanya predikat sangat baik untuk Sapa Mbak Ita dari Kementerian Dalam Negeri, Juara I Lomba Pertunjukan Rakyat FK Metra Jawa Tengah 2024 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Juara I Gajah Mada *Digital Transformation Governance Index* (GM-DTGI) oleh UGM, dan Badan Publik Informatif pada Penganugerahan Badan Publik Dalam Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mendukung Pelayanan Informasi Publik di Kota Semarang pada tahun 2023 terlaksana forum koordinasi PPID serta pengelolaan Pusat Informasi Publik. Dan sebagai dasar pelaksanaannya telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 485.1/122 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022.

Pengelolaan laporan layanan pengaduan yang masuk selama tahun 2024 melalui kanal-kanal yang tersedia telah diterima laporan sebanyak 5.378 menurun dari tahun 2023 sebesar 6.129. Laporan tahun 2024 yang masuk seluruhnya merupakan pengaduan. Sedangkan, tidak ada laporan terkait permintaan informasi dan aspirasi yang masuk. Dari 5.378 laporan, 4.888 laporan atau 90,89% laporan telah selesai, 55 laporan selesai bersyarat, dan

435 laporan masih dalam proses. Lima OPD yang paling banyak mendapat laporan pada tahun 2024 yaitu Dinas Perhubungan dengan 1.150 laporan, Dinas Pekerjaan Umum dengan 1.045 laporan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 763 laporan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 321 laporan, dan Satpol PP dengan 295 laporan. Topik yang paling banyak dilaporkan sepanjang tahun 2024 yaitu jalan rusak 437 laporan, pemangkasan pohon 269 laporan, lampu PJU padam 246 laporan, parkir 226 laporan, dan banjir 216 laporan.

Dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, telah dilaksanakan pengelolaan dan monitoring evaluasi Pengaduan Call Center 112 Kota Semarang. Panggilan melalui CC 112 selama tahun 2023 sebanyak 26.933, dengan rincian 12.336 yang merupakan panggilan yang valid, 5.938 merupakan prank, 4.201 merupakan ghost dan 4.458 merupakan informasi. Topik panggilan adalah Ambulance Transportasi, Ambulance Transportasi PMI, Pemeriksaan, Home Care, Kecelakaan, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Evakuasi Hewan Liar, Gangguan Lalu Lintas, Bencana Alam, Ambulance Jenazah Pmi, Kebakaran, Keamanan Dan Ketertiban Umum / Masyarakat, Balap Liar, Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar, Pohon Tumbang, Lampu PJU Padam, Tiang Listrik Rubuh (PJU/PLN/Telkom), Kabel Menjuntai, Rescue, Pipa Bocor, Evakuasi Kecelakaan, Kriminalitas, Kerusuhan/Tawuran, Penemuan Mayat, Kekerasan Perempuan/Anak/KDRT, Ambulans Jenazah Disperkim, Covid 19. Kinerja pada urusan Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67 Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	100	100	100	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	75,33	75,95	95,23	95,87	95,00
4	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/ replikasi inovasi yang mendukung <i>smart city</i> sesuai dengan <i>Masterplan</i>	75	80	100	100	100
5	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, 2024

Kinerja pada urusan komunikasi dan informatika menunjukkan kinerja yang positif, terkait akses internet di OPD, integrasi sistem, cakupan penyebaran dan penyediaan informasi publik serta implementasi masterplan *smart city*.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informasi, diantaranya: Belum maksimalnya penanganan hoaks di Kota Semarang, terkendalanya koordinasi terkait pelayanan informasi dengan

badan vertikal di Kota Semarang, ancaman keamanan informasi yang semakin meningkat seperti *hacking*, *phising*, dan *deface*, serta OPD tidak memahami proses bisnis dan tidak memiliki dokumentasi saat berkeinginan membuat aplikasi sehingga menyulitkan proses pengembangan sistem.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Dalam penyelenggaraan urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah untuk menyelesaikan permasalahan terkait kesulitan pemasaran produk dan akses permodalan bagi KUMKM, kota semarang mempunyai program kredit wibawa bagi Koperasi dan pelaku UMKM serta melaksanakan Fasilitasi kemitraan antara koperasi dan UMKM dan melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha bersama Gerai Oleh-oleh Bandara A.Yani Semarang, Hotel Santika, Supermarket *Carrefour*, Superindo, Pangan Mart dan *Sampoerna Retail Community* (SRC) untuk memperluas akses jangkauan pemasaran bagi pelaku usaha mikro di Kota Semarang.

Di samping itu juga dikembangkan sebuah sistem pendataan UMKM di kota Semarang melalui SI-UMI (Sistem Informasi Usha Mikro) untuk memperoleh data dan informasi terkait perkembangan UMKM di Kota Semarang.

Tabel 2.68 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH/ SDGS	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah UMKM yang dibina	Orang	2.822	3.575	5.220	4.006	4.987
2	Jumlah koperasi aktif	unit	637	638	561	567	571
3	Jumlah seluruh koperasi	unit	718	720	732	736	736
4	Persentase koperasi aktif	%	88,72	88,61	76,64	77,04	77,58
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	10,24	11,00	16,93	17,17	17,40
6	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	50,70	52,00	48,22	58,91	59,72
Indikator SDGs							
7	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) kelayanan keuangan. (8.3.1.(c))	%	1.899/ 16.802x 100% = 11,30% (Kredit Wibawa)	2.238/ 21.065x 100% = 10,62% (Kredit Wibawa)	2.361/ 29.611x 100% = 7,97% (Kredit Wibawa)	2.415/ 30.024 x 100% = 8,04% (Kredit Wibawa)	2.416/ 30.421 x 100% = 7,94% (Kredit Wibawa)

Sumber: Dinas Koperasi & UM, 2024

Realisasi persentase koperasi aktif pada tahun 2024 sebesar 77,58% meningkat dari tahun 2023 sebesar 77,04%. Selain itu, tidak ada perubahan jumlah koperasi dari tahun 2023 sehingga jumlah koperasi terdaftar di Kota Semarang sebesar 736 koperasi. Disisi lain terjadi peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha dari tahun 2023 sebesar 17,17%, meningkat menjadi sebesar 17,40% pada tahun 2024.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah kinerja dalam urusan penanaman modal. Di mana kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum, menjadi salah satu

indikator untuk menarik minat investor. Pada tahun 2024 pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha di Kota Semarang berjalan dengan baik, dimana persentase izin terbit sesuai Standar Pelayanan sebesar 96,71% melebihi target yang ditetapkan sebesar 95,50%. Beberapa capaian urusan wajib penanaman modal di Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.69 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Investasi (juta rupiah)	18.209.772	22.538.063	24.662.877	27.205.700	28.261.147
2	Persentase peningkatan investasi	(40,21%)	3,09%	10,24%	10,31%	10,03%
3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	344	416	675	556	550
4	Persentase ijin terbit sesuai SP	98,70%	99,33%	95,63%	95,69%	96,71%

Sumber: DPMPSTP, 2024

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) dari yang ditargetkan 492 investor mencapai 550 Investor. Namun, realisasi jumlah investor di tahun 2024 menurun dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 556 investor. Semakin banyaknya investasi yang masuk di Kota Semarang akan membawa dampak positif, beberapa diantaranya adalah adanya peningkatan tenaga kerja bagi masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat, dan terciptanya perubahan kualitas sumber daya manusia serta taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.

Nilai investasi tahun 2024 mencapai Rp 28.261.147.000.000,- berhasil melebihi target kinerja RPJMD Kota Semarang yaitu sebesar Rp 27.362.089.000.000 dan meningkat dari tahun 2023 yang sebesar Rp 27.205.700.000.000,-.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal diantaranya adanya tuntutan penyelarasan peraturan perundang-undangan sesuai amanat UU Cipta Kerja guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel; adanya tuntutan pemberian fasilitasi perizinan bagi masyarakat pelaku usaha tradisional; dan adanya isu aksesibilitas keterjangkauan lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang berada di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kota sementara pelayanan perizinan dan investasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.

s. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, karena tempat olahraga di masa pandemi ini banyak yang ditutup selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Namun karena minat masyarakat terhadap kegiatan keolahragaan sangat tinggi, sehingga pengoperasionalan dengan pengetatan dan penyediaan

sarpras untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat olah raga terbuka tidak bisa dihindari.

Organisasi kepemudaan yang aktif di tahun 2024 meningkat menjadi 48 organisasi dibanding tahun 2023 sebesar 37 organisasi. Sedangkan organisasi olahraga cenderung konsisten sebanyak 63 organisasi di tahun 2024.

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditandai dengan diraihnya kejuaraan prestasi pada tahun 2024 yaitu meraih 10 medali emas, 34 medali perak dan 52 medali perunggu dalam PON Aceh dan Sumatera Utara. Selain itu atlet Kota Semarang menyumbangkan 12 medali emas, 4 medali perak, dan 11 medali perunggu dalam kejuaraan PEPARNAS di Surakarta. Kota Semarang juga menjadi juara umum pada POPDA Tingkat Jawa Tengah dan juara umum 2 pada PEPAPERDA Jawa Tengah di Surakarta. Berikut disajikan realisasi kinerja daerah urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga tahun 2020-2024.

Tabel 2.70 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan & Olahraga Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	REALISASI CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	74	25	30	37	48
2	Jumlah organisasi olahraga	63	45	63	63	63
3	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	5	6	6	6	8
4	Jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan/ <i>life skill</i> bagi pemuda	2 keg	2 keg	2 keg	10 keg	10 keg
5	Jumlah peserta kegiatan pelatihan kewirausahaan/ <i>life skill</i> bagi pemuda (SDGs)	100 org	100 org	100 org	250 org	700 org
6	Peningkatan prestasi olahraga	NA	NA	8,92%	8,92%	9,81%
7	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,93	0,94	0,94	0,94	0,95
8	Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,035	0,035	0,04	0,04	0,04

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2024

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan jumlah Atlet prestasi dari yang ditargetkan 1212 Atlet mencapai 1118 Atlet atau berhasil mencapai target 92.24%. Hal ini disebabkan pada Tahun 2024 terdapat beberapa Kejuaraan tingkat Daerah ataupun Tingkat Nasional yang Atlet Kota Semarang mengikuti Kejuaraan tersebut. Adapun peningkatan Atlet Kota Semarang terjadi dikarenakan adanya penambahan Atlet KKO Angkatan ke 3 dan Penambahan Atlet PSE (Program Semarang Emas) serta Penambahan Cabang Olahraga POPDA dimana Kota Semarang pada Kejuaraan tersebut mengirimkan semua Atlet di semua cabang Olahraga yang dipertandingkan adapun atlet Kota Semarang juga mengikuti beberapa Kejuaraan tingkat Nasional seperti Kejuaraan PON di Aceh dan Sumatera Utara dan juga Kejuaraan PEPARNAS di Surakarta.

t. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Statistik ditandai dengan prestasi pada tahun 2024, diantaranya dengan diraihnya nilai 3,04 dengan

predikat baik pada Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik RI.

Dasar pelaksanaan pengembangan Portal Satu Data Tingkat Kota Semarang dan Penyusunan Metadata Statistik Sektoral Kota Semarang adalah Peraturan Wali Kota No.25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk memberi dukungan terhadap pencapaian sasaran, diantaranya: Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis & Diseminasi Data Statistik Sektoral, Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, Membangun Metadata Statistik Sektoral, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, Pengembangan Infrastruktur, serta Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

Tabel 2.71 Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Diskominfo, Statistik dan Persandian, 2024

Indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi mencapai 100% sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, demikian halnya integrasi sistem data dan statistik yang mengindikasikan Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Semarang telah dimanfaatkan oleh semua pihak. Capaian yang tinggi selalu dijaga dengan melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan pemahaman produsen data di OPD tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral & Penyebarluasan Informasi Geospasial dan melakukan pendampingan kepada produsen data dalam penyusunan metadata dan pengajuan rekomendasi statistik.

u. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Tingkat keamanan informasi pemerintah di tahun 2023 yaitu sebesar 100% berhasil konsisten mempertahankan prestasi dari tahun 2019. Peningkatan SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikat pada tahun 2023 yang meliputi Pelatihan Internal Audit ISO 27001:2013 dan Awareness of ISO 27001:2022, serta Surveillance I Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Data Center Kota Semarang.

Tabel 2.72 Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	NA	40,00%	50,00%	100%	100%

Sumber: Setda Kota Semarang dan Diskominfo, Statistik dan Persandian, 2024

v. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kinerja Bidang Kebudayaan dapat dilihat dari terlestarikannya cagar budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal. Terlestarikannya cagar budaya meningkat menjadi 129,22% di tahun 2024 dari angka 78,93% di tahun 2023. Sedangkan untuk apresiasi terhadap kesenian lokal tahun 2024 menurun menjadi 42,99% dibandingkan realisasi di tahun 2023 yang sebesar 64,96%. Hal ini disebabkan adanya pengaruh globalisasi, *event* yang mengapresiasi budaya modern seringkali lebih banyak daripada *event* yang mengapresiasi budaya lokal hal ini dikarenakan *event* budaya modern lebih mengedepankan teknologi, hiburan global dan tren terbaru sehingga *event* budaya lokal kurang diminati.

Tabel 2.73 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sanggar seni dan Budaya di Kota Semarang	Kelompok	813	859	929	1.031	1.081
2	Jumlah grup kesenian	Kelompok	813	859	929	1.031	1.081
3	Jumlah gedung kesenian	Gedung	14	14	15	15	18
4	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Gedung	199	199	200	202	208
5	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata	Buah	12	12	12	12	12
6	Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	336	351	400	401	524
7	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	70,96	71,30	77,78	78,93	129,22
8	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	461	461	534	578	698
9	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	4	4	8	10	11
10	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	%	23,92	25,66	45,27	64,96	42,99

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata, 2024

Adapun solusi untuk menindak lanjuti ketidaktercapaian yaitu penyelenggaraan *event* budaya lokal melibatkan generasi muda dengan menggabungkan budaya tradisional dengan menciptakan karya yang lebih modern dan didukung dengan teknologi serta dipublikasikan melalui platform media sosial. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga telah melakukan pemutakhiran dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) untuk melindungi kekayaan intelektual budaya yang ada di Kota Semarang serta

mengokohkan upaya Pemajuan Kebudayaan meliputi empat langkah strategis yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan kebudayaan diantaranya: Pengaruh seni budaya asing mengancam eksistensi seni budaya tradisional, pengaruh globalisasi komersialisasi dapat mengancam keberlanjutan cagar budaya; kurangnya regenerasi pada pembuat, pemain, penonton dan penanggap wayang; kurangnya pembaruan dan inovasi pada penyelenggaraan seni budaya tradisional; dan kurangnya media dan platform menampilkan konten seni budaya.

w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Berawal pandemi menyebabkan jumlah kunjungan *offline* pada perpustakaan Kota Semarang berkurang tajam, dan sebaliknya jumlah pengunjung pada perpustakaan digital meningkat sebagai dampak pandemi yang menerapkan *social distancing*. Untuk manajemen peminjaman *online* juga telah dikembangkan, sehingga masyarakat luas bisa meminjam buku untuk lama waktu tertentu untuk dibaca melalui *smartphone*. Koleksi *ebook* perpustakaan Kota Semarang juga akan disediakan di beberapa tempat umum yang bisa diakses tanpa menggunakan koneksi internet, tetapi cukup dengan koneksi *bluetooth* dengan aplikasi tertentu.

Sibooky merupakan aplikasi buku digital yang dikelola oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Pada pranala tersebut tersedia koleksi *ebook* baik secara *open source* atau non komersil dan koleksi *ebook* komersil dengan menggunakan sistem DRM (*Digital Right management*).

Pada jumlah pengunjung perpustakaan di tahun 2024 sebanyak 1.410.937 pengunjung, berasal dari Kunjungan Perpustakaan Digital (*SiBooky*), Kunjungan *Inlist*, Layanan Terpadu, dan Perpustakaan Keliling dan ini jauh meningkat. Terdapat peningkatan signifikan pada pengunjung perpustakaan, hal ini didukung oleh peningkatan kunjungan perpustakaan digital *SiBooky*. *SiBooky* terus meningkatkan keberagaman koleksi dan jumlah koleksi yang masih perlu ditingkatkan, selain dari sistem informasinya (baik *user interface* maupun *user experience*). *Sibooky* saat ini juga dapat diakses pada tempat-tempat transit BRT maupun mitra Perpustakaan yang telah mendaftarkan diri menjadi Mitra perpustakaan kota semarang untuk dapat mengakses layanan *SiBooky* bahkan dapat diberikan pinjaman buku.

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Semarang di tahun 2024 sebesar 69,59% meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 69,17%. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan di tahun 2024 sebesar 1.410.937 orang yang meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 1.123.815 atau naik sebesar 25,55%. Peningkatan kunjungan perpustakaan didukung oleh meningkatnya jumlah koleksi buku di perpustakaan menjadi sebesar 118.904 buku di tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 115.548 buku.

Tabel 2.74 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perpustakaan milik Pemerintah	1	1	1	1	1
	Jumlah perpustakaan milik non Pemerintah	191	193	195	195	195
2	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	10.471	10.660 (peminjam)	588.851 (dari inlist, layanan terpadu, pusling, dan SiBooky)	1.123.815	1.410.937
3	Jumlah Koleksi buku perpustakaan	101.460	106.168	108.937	115.548	118.904
4	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	42,07%	45,00%	67,00%	69,17%	69,59%
5	Pengunjung perpustakaan per tahun	22,00%	24,00%	36,00%	66,53%	83,17%
6	Indeks pembangunan literasi masyarakat	56,58	57,00	59,80	70,78	71,58

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2024

x. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Prestasi yang diperoleh pada penyelenggaraan urusan kearsipan pada tahun 2024 diantaranya: Peringkat 1 Pengawasan Kearsipan Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Peringkat 7 Lembaga Kearsipan Daerah Tingkat Nasional.

Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan/dipelihara mengalami peningkatan menjadi 37.707 arsip di tahun 2024. Klasifikasi dan rasio ketersediaan sarana/prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara cenderung konsisten dari tahun 2023 ke tahun 2024 yang masing-masing sebesar 100% dan 95%. Dari keberhasilan capaian Bidang Kearsipan yang meningkat di tahun 2024 masih terdapat permasalahan yang muncul yaitu Aplikasi SRIKANDI yang menjadi *platform* pengolahan arsip dinamis pada wilayah Pemerintahan Kota Semarang masih sering mengalami kendala pada *server* nasional yang membuat kegiatan surat menyurat terhambat. Selain itu, masih banyak OPD di Pemerintah Kota Semarang yang belum menganggarkan sarpras penunjang kegiatan kearsipan disebabkan masih ada kekeliruan penempatan belanja barang jasa. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kearsipan sebagai berikut:

Tabel 2.75 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik	28.055 arsip	29.000 arsip	30.500 arsip	31.608 arsip	27.102 arsip
2	Peningkatan klasifikasi arsip	10%	10%	100%	100%	100%
3	Rasio ketersediaan sarana/prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara	99%	100%	95%	95%	95%
	Jumlah SKPD yang dilibatkan	50	50	50	51	52

No	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
4	dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah					
5	Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan /dipelihara	37.000 Arsip	37.000 Arsip	37.500 Arsip	37.605 Arsip	37.707 Arsip
6	Jumlah dokumen yang berhasil di digitalisasi	83.491 Dokumen	83.491 Dokumen	84.991 Dokumen	85.060 Dokumen	85.162 Dokumen
7	Pameran tentang kearsipan yang diikuti	1 kali	1 kali	2 kali	3 Kali	2 Kali
8	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76,16%	76,00%	79,02%	80,76%	80,76%
9	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	55,33%	56,00%	57,05%	59,80%	64,30%
10	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	139.000 arsip	145.000 arsip	149.000 arsip	150.108 Arsip	150.108 Arsip

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2024

y. Urusan Pemerintahan Pilihan

- Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pemerintah terus berupaya memberdayakan perekonomian masyarakat pesisir melalui fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 sebesar 3.115,99 ton meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 3.067,45 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 sebesar 3.961,42 ton juga berhasil meningkat dari tahun 2023 sebesar 3.896,25 ton. Sehingga total produksi perikanan pada tahun 2024 meningkat yaitu sebesar 7.077,41 ton. Hal ini didukung oleh penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap dan pengembangan kapasitas nelayan kecil, dan pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI). Keberhasilan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu nelayan memperoleh kemudahan dalam operasional penangkapan ikan dengan adanya subsidi BBM dan meningkatnya aktivitas nelayan dengan semakin layaknya fasilitas TPI. Selain itu, dengan meningkatnya produksi perikanan budidaya memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu meningkatnya keterampilan pembudidaya ikan sehingga meningkatkan produksi perikanan budidaya serta meningkatnya teknologi budidaya ikan melalui penerapan inovasi yang telah disosialisasikan.

Selain itu, pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan angka konsumsi ikan menjadi sebesar 44,18 Kg/Kapita/Tahun dan juga meningkatkan produksi ikan olahan menjadi sebesar 17.802,22 ton/tahun jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 17.688,98 ton/tahun. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN

Tahun 2025-2029, terdapat perubahan istilah angka konsumsi ikan (AKI) menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) sehingga indikator tersebut selanjutnya akan disesuaikan beserta targetnya.

Secara umum meskipun capaian bidang kelautan dan perikanan baik, masih terjadi beberapa permasalahan yaitu pengolah dan pemasar hasil perikanan belum melakukan izin usaha bagi UPI (Unit Pengolahan Ikan) beserta perizinan produknya, ketergantungan nelayan terhadap musim dan cuaca, serta mahalanya operasional pembudidaya ikan. Berikut kinerja urusan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024.

Tabel 2.76 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan & Perikanan
Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelompok pelaku usaha perikanan	Kelompok	215	235	235	196	174
2	Produksi perikanan budidaya	Ton/Tahun	3.738,10	3.810,67	3.887,87	3.896,25	3.961,42
3	Produksi perikanan tangkap	Ton/Tahun	2.801,12	2.901,45	3.008,92	3.067,45	3.115,99
4	Produksi ikan olahan	Ton/Tahun	17.485,00	17.506,11	17.604,14	17.688,98	17.802,22
5	Konsumsi ikan	Kg/kapita/tahun	40.16	40.166	43,26	43,75	44,18
6	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	6.539,12	6.487,98	6.896,79	6.963,70	7.077,41

Sumber: Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

• Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan urusan kepariwisataan pada tahun 2024 menunjukkan kinerja positif di beberapa indikatornya dibandingkan kinerja pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi mulai membaik, sehingga destinasi dan industri kepariwisataan juga mulai meningkat. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan Persentase Kunjungan wisata di tahun 2024 sebesar 13,13% yang telah melampaui dari target 6%. Sumbangan paling tinggi dirasakan pada jumlah wisatawan domestik, meskipun wisatawan mancanegarapun juga mengalami kenaikan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang sejumlah 7.345.373 orang dengan 7.321.077 orang wisatawan domestik dan 24.296 orang wisatawan mancanegara.

Keberhasilan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang tahun 2024 didukung oleh adanya pengelolaan daya tarik wisata yang dikelola dengan baik oleh pengelola dari swasta atau pemerintah. Daya tarik wisata pada tahun 2024 sebanyak 407 yang terdiri dari daya tarik wisata budaya sebanyak 58 lokasi, daya tarik wisata kuliner sebanyak 167 lokasi, daya tarik wisata pendidikan sebanyak 3 lokasi, daya tarik wisata religi sebanyak 41 lokasi, daya tarik wisata buatan sebanyak 93 lokasi, dan daya tarik wisata alam sebanyak 45 lokasi.

Roadmap pembangunan kepariwisataan secara komprehensif disusun dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota (Ripparkot) dimulai

pada tahun 2025. Dalam upaya mencapai target kepariwisataan, Kota Semarang terus menggalakkan upaya peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai media seperti bahan cetak yang meliputi *leaflet* dengan menggunakan 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang terdiri dari, *leaflet* museum kota lama, *leaflet Hidden Gem* Kota Semarang, *leaflet* UPTD wisata Kota Semarang, *leaflet tourism map*, *leaflet* Kota Lama, dan *leaflet* gastronomi. Selain itu, media cetak yang dipublikasikan pariwisata Kota Semarang melalui surat kabar Jateng Post sebanyak 14 kali terbit serta media elektronik melalui *website*, media sosial Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu *instagram*, *youtube*, *twitter*, *live streaming* dan *facebook* serta aplikasi Konco Dolan. Upaya lain yang dilakukan yaitu mengikuti pameran kepariwisataan di Kota Yogyakarta, Kota Jakarta, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Bandung, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purworejo; pemilihan Denok Kenang Kota Semarang sebagai generasi muda yang mempromosikan daya tarik wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan; *Tourism Information Center* dan sistem informasi kepariwisataan (aplikasi); serta *Tourism Information Center* dan sistem informasi kepariwisataan (video). Berikut kinerja urusan pariwisata tahun 2020-2024.

Tabel 2.77 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kenaikan Kunjungan wisata	%	-59,77	-18,46	100,58	21,52	13,13
2	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang	Orang	3.266.931	2.663.761	5.343.151	6.492.875	7.345.373
	- Mancanegara	Orang	6.628	77	4.918	13.992	24.296
	- Domestik	Orang	3.260.303	2.663.684	5.338.233	6.478.883	7.321.077
3	Pendapatan sektor pariwisata	Juta Rupiah	190.758.295.291	207.712.087.923	357.978.839.578	447.122.505.670	468.977.857.125
4	Jumlah Destinasi Wisata	Obyek	71	200	373	381	407
5	Jumlah kunjungan wisata MICE	Orang	5.109	427.305	770.439	799.896	1.251.084
6	Lama menginap MICE	hari	1,40	1,32	1,43	1,74	1,33
7	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	%	-59,77 (3.266.931)	-18,46 (2.663.761)	100,59 (5.343.151)	21,52 (6.492.875)	13,13 (7.345.373)
8	Tingkat hunian akomodasi	%	30,32	31,74	54,01	57,11	57,48
9	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	10,17	7,96	14,13	15,50	16,55

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata, 2024

- Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pertanian di tahun 2024 digambarkan dengan diraihnya 2 penghargaan di tingkat Provinsi Jawa Tengah yaitu Pembinaan Higiene Sanitasi menuju Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Terbaik yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan ini diberikan atas

kinerja Dinas Pertanian dalam memberikan rekomendasi NKV terbanyak di Jawa Tengah serta Kabupaten/Kota yang telah Menjalin Kerjasama dengan BBPTT dalam Upaya Pengembangan pada Sektor Peternakan (Pembelian Bibit Kelinci di Taman Ternak Bandungan) yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan ini diberikan atas kinerja Dinas Pertanian dalam melakukan pembelian bibit kelinci terbanyak di Jawa Tengah.

Pada tahun 2023 wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan penyakit hewan lainnya masih menyerang beberapa ternak di Kota Semarang. Namun, pada tahun 2024 wabah dapat diatasi dengan baik dan terjadi penurunan jumlah kasus sehingga penurunannya menjadi -55,32%. Hal ini dapat dilihat pada capaian indikator persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular serta persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis. Penanganan ini secara khusus berdampak pada ternak ruminansia besar dan kecil seperti sapi, kambing, dan domba, yang sebelumnya paling rentan terhadap PMK dan *Lumpy Skin Disease* (LSD). Keberhasilan ini menunjukkan perbaikan dalam manajemen kesehatan hewan ruminansia, termasuk peningkatan cakupan vaksinasi dan pengawasan lalu lintas ternak.

Produksi hasil peternakan mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi sebesar 41.535,94 ton dibanding tahun 2023 yang sebesar 38.104,59 ton serta melebihi target tahun 2024 yang sebesar 36.219 ton. Hal ini dapat dicapai karena didukung dengan pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain, peningkatan kualitas sumber daya genetik hewan/tanaman, serta optimalnya mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil. Pada sektor ruminansia, peningkatan kualitas genetik dan distribusi pakan secara lebih merata telah membantu mendorong produktivitas, terutama dalam produksi daging dan susu.

Tabel 2.78 Hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan tahun 2020-2024

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	ton	86.525,11	87.028,62	96.657,56	90.659,06	92.110,54
Tanaman Pangan	ton	34.376,31	34.417,30	32.237,84	31.269,84	22.788,80
Hortikultura	ton	16.734,20	18.849,01	25.545,87	20.965,15	27.415,98
Perkebunan	ton	273,40	267,00	282,17	277,86	314,40
Peternakan	ton	35.141,20	33.495,31	38.591,68	38.146,21	41.591,36
Daging	ton	22.877,04	22.226,63	27.345,62	30.831,78	32.173,89
Telur	ton	8.506,71	3.269,11	8.111,46	5.930,24	7.976,85
Susu	ton	3.757,45	7.999,57	3.134,60	1.384,19	1.440,62

Secara keseluruhan, total produksi gabungan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di Kota Semarang menunjukkan tren positif selama periode 2020–2024. Pada tahun 2024, total produksi mencapai 92.110,54 ton, meningkat 1,60% dibandingkan 2023 (90.659,06 ton) dan menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, peningkatan total ini tidak merata di seluruh subsektor.

Produksi tanaman pangan mengalami penurunan cukup tajam. Dari 34.376,31 ton pada 2020, produksinya turun hingga 22.788,80 ton pada 2024, atau turun sekitar 27,14% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terkait erat dengan berkurangnya luas tanam akibat alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dan dampak rob di kawasan pesisir. Berbeda dengan tanaman pangan, produksi hortikultura menunjukkan tren kenaikan signifikan. Setelah sempat menurun di 2023 menjadi 20.965,15 ton, sektor ini melonjak menjadi 27.415,98 ton pada 2024 atau naik 30,76%. Lonjakan ini didukung oleh diversifikasi komoditas dan optimalisasi pemanfaatan lahan non-sawah. Sektor perkebunan relatif kecil kontribusinya terhadap total produksi, namun menunjukkan peningkatan stabil dari 273,40 ton (2020) menjadi 314,40 ton (2024). Sektor peternakan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan. Produksinya meningkat dari 38.146,21 ton (2023) menjadi 41.591,36 ton (2024) atau +9,02%. Peningkatan terjadi pada semua komoditas peternakan, khususnya daging (naik 4,35%), telur (naik 34,46%), dan susu (naik 4,08%). Keberhasilan ini didukung oleh penurunan kasus penyakit hewan menular strategis, peningkatan mutu genetik ternak, serta pengadaan pakan berkualitas.

Secara umum, data ini menggambarkan bahwa meski terjadi penurunan tajam pada subsektor tanaman pangan, pertumbuhan pesat di subsektor hortikultura dan peternakan mampu menjaga tren positif total produksi pertanian dan peternakan Kota Semarang.

Tabel 2.79 Populasi ternak di Kota Semarang pada periode 2020–2024

JENIS TERNAK	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
A. RUMINANSIA						
Sapi Perah	ekor	2.072	2.311	1.633	1.751	754
Sapi Potong	ekor	4.039	4.300	3.104	3.507	3.427
Kerbau	ekor	967	927	265	305	309
Kambing	ekor	7.800	8.200	7.214	7.735	10.150
Domba	ekor	3.116	3.258	2.894	2.869	3.143
B. UNGGAS						
Ayam Ras Petelur	ekor	791.298	764.465	806.854	864.200	854.486
Ayam Ras Pedaging	ekor	794.023	784.119	815.474	876.000	898.263
Ayam Buras	ekor	112.750	110.557	98.209	95.885	99.392
Itik	ekor	23.773	23.934	25.692	26.302	32.457
Entog	ekor	5.887	5.682	5.583	5.108	4.022

Data populasi ternak di Kota Semarang pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang bervariasi antara subsektor ruminansia dan unggas. Pada kelompok ruminansia, populasi sapi perah cenderung menurun signifikan, dari 2.072 ekor pada 2020 menjadi hanya 754 ekor pada 2024, yang kemungkinan disebabkan oleh tingginya biaya pemeliharaan dan terbatasnya pasar lokal susu segar. Sapi potong mengalami fluktuasi, sempat turun di 2022, lalu naik di 2023, namun sedikit menurun kembali menjadi 3.427 ekor di 2024. Populasi kerbau relatif kecil dan stabil pada kisaran 265–967 ekor, dengan sedikit peningkatan menjadi 309 ekor pada 2024. Sebaliknya, kambing mengalami pertumbuhan signifikan, dari 7.800 ekor pada 2020 menjadi 10.150 ekor pada 2024, menunjukkan tingginya permintaan dan kemudahan pemeliharaan. Populasi domba relatif stabil, naik dari 3.116 ekor (2020) menjadi 3.143 ekor (2024).

Pada kelompok unggas, populasi ayam ras petelur meningkat dari 791.298 ekor (2020) menjadi puncaknya 864.200 ekor di 2023, sebelum turun

sedikit menjadi 854.486 ekor pada 2024. Ayam ras pedaging terus menunjukkan tren positif, dari 794.023 ekor (2020) menjadi 898.263 ekor (2024), mencerminkan tingginya permintaan daging ayam. Ayam buras mengalami penurunan di 2023 namun kembali naik menjadi 99.329 ekor di 2024. Itik mengalami pertumbuhan signifikan dari 23.773 ekor (2020) menjadi 32.457 ekor (2024). Sementara itu, populasi entog cenderung menurun dari 5.887 ekor (2020) menjadi 4.022 ekor (2024).

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa subsektor unggas, khususnya ayam ras pedaging dan petelur, menjadi tulang punggung populasi ternak Kota Semarang. Pada ruminansia, kambing menjadi komoditas yang populasinya tumbuh pesat, sedangkan sapi perah justru menghadapi tren penurunan yang signifikan.

Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi sebesar 50.519,18 ton dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 52.512,85 ton serta belum mencapai target tahun 2024 sebesar 50.857,23 ton. Hal ini disebabkan berkurangnya luas tanam khususnya pada komoditas tanaman pangan padi. Berkurangnya luas tanam disebabkan karena adanya alihfungsi lahan dari sawah menjadi lahan kering. Hal ini dilaporkan terjadi di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu dengan rencana alihfungsi seluas 75 ha dan di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang yang beralih fungsi untuk menjadi kavling perumahan. Selain itu berkurangnya luas tanam juga disebabkan karena lahan sawah di Kawasan pesisir pantai terdampak rob dan ditumbuhi mangrove seluas 30 ha. Sehingga petani kesulitan untuk mengembalikan lahan tersebut menjadi lahan sawah karena keterbatasan biaya.

Berikut kinerja terkait penyelenggaraan urusan pertanian tahun 2020-2024.

Tabel 2.80 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani (orang)	10.285	9.902	10.108	10.186	10.381
2	Jumlah kelompok tani yang terbina (kelompok)	24 (gapoktan)	24 (gapoktan)	27	214 kelompok	21
3	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (kelurahan)	91	104	124	177 kelurahan	177 kelurahan
4	Jumlah Produksi Peternakan (Ton)	35.045	33.254,34	39.690,27	38.104,59	41.535,94
5	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ton)	51.379	53.527,47	58.065,88	52.512,85	50.519,18
6	Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan BAH (Sertifikat NKV)	19	22	29	15	15
7	Produktivitas pertanian pangan utama (padi dan jagung) per hektar per tahun	6,38 ton/ha/ tahun	6,38 ton/ha/ tahun	6,96 ton/ha/ tahun	6,85 ton/ha/ tahun	6,82 ton/ha/ tahun
8	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus	-44.44%	-44.49%	7108%	-88,21%	-55,32%

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
	penyakit hewan menular					
9	Sentra produk unggulan pertanian (kawasan - komoditas)	3 Kawasan	4 Kawasan	4 kawasan	5 kawasan	6 kawasan

Sumber: Dinas Pertanian, 2024

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pilihan Pertanian antara lain Wabah Zoonosis seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Lumpy Skin Disease (LSD)* dan *Avian Influenza* yang masih menjadi ancaman di tahun 2024. Wabah yang ada menimbulkan kerugian yang signifikan bagi para peternak karena menurunkan produksi dan produktivitas ternak bahkan juga menyebabkan kematian ternak sehingga menurunkan pendapatan peternak. Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yang masih terus terjadi menyebabkan keterbatasan lahan untuk produksi sehingga produksi tanaman pangan menurun dari tahun ke tahun. Selain itu, kualitas kelembagaan petani yang masih rendah dimana dari 432 kelompok tani yang ada hanya 31 kelompok (7,17%) yang kualitasnya tinggi (berada pada kelas madya dan utama). Selain itu tingkat partisipasi anggota kelompok tani juga relatif sangat rendah dimana pada sebagian besar kelompok tani hanya beberapa anggota saja yang berperan aktif.

Ditinjau berdasarkan jenis penggunaannya, lahan di wilayah Kota Semarang dibagi atas lahan pertanian sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Pada tahun 2024 luas tanah sawah sebesar 2.195,26 Ha, sedangkan lahan pertanian bukan sawah sebesar 14.576,79 Ha dan lahan bukan pertanian sebesar 20.605,95 Ha. Lahan pertanian sawah umumnya ditanami padi dan palawija, sedang lahan pertanian bukan sawah ditanami tanaman buah-buahan, kayu-kayuan dan sayuran. Sebagai daerah urban, Kota Semarang kegiatan ekonominya terutama bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa. Sementara sektor pertanian walaupun kecil kontribusinya, namun potensinya masih ada terutama di Kecamatan Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Tugu, Tembalang, Pedurungan, Genuk, dan Banyumanik. Sedangkan di daerah perkotaan pertaniannya diarahkan pada pengembangan *urban farming*. Penanaman difokuskan pada komoditas yang berbasis pertanian perkotaan seperti cabai, tomat, terong, dan bawang. Walaupun lahan pertanian sawah berkurang, namun lahan pertanian bukan sawah berjumlah 14.576,95 ha tetap dapat dioptimalkan untuk penanaman komoditas pertanian perkotaan.

Tabel 2.81 Jumlah Luas Panen dan Produksi Komoditas Padi di Kota Semarang Tahun 2024

NO	KECAMATAN	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	PRODUKTIVITAS (TON/HA)
1	Mijen	583,00	4.045,80	6,94
2	Gunungpati	515,50	3.333,25	6,47
3	Banyumanik	57,00	377,20	6,62
4	Tembalang	369,00	2.641,90	7,16
5	Pedurungan	78,00	487,20	6,25
6	Genuk	26,00	156,50	6,02
7	Semarang Barat	88,00	511,30	5,81

NO	KECAMATAN	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	PRODUKTIVITAS (TON/HA)
8	Tugu	625,00	4.335,70	6,94
9	Ngaliyan	311,00	2.188,50	7,04
10	Semarang Utara	-	-	-
11	Semarang Selatan	-	-	-
12	Semarang Tengah	-	-	-
13	Semarang Timur	-	-	-
14	Gajahmungkur	-	-	-
15	Candisari	-	-	-
16	Gayamsari	-	-	-
Total		2.652,50	18.077,35	59,23

Sumber: Dinas Pertanian, 2024

- **Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Pilihan Perdagangan dapat ditunjukkan diantaranya dengan prestasi mendapatkan penghargaan sebagai Daerah Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan. Sebanyak 13 dari 52 pasar di Kota Semarang mendapat penghargaan sebagai Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan. Selain itu, Pasar Johar mendapat penghargaan sebagai lokasi program pasar pangan segar aman dengan *rapid response* keamanan pangan terbaik dari Badan Pangan Nasional.

Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan, kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Semarang. Nilai ekspor Kota Semarang dari tahun ke tahun berfluktuasi. Nilai ekspor Kota Semarang mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 1.322.895.045,28 US\$ setelah mengalami peningkatan di tahun 2022 dan tahun 2023. Hal ini disebabkan Pada tahun 2024 bahan baku dari beberapa komoditi meningkat sehingga menyebabkan beberapa komoditi mengalami kenaikan harga dan penurunan volume ekspor; terdapat beberapa komoditi yang tidak mengekspor secara masif seperti pada waktu pandemi (APD dan Masker) sehingga beberapa komoditi tidak melakukan ekspor secara besar-besaran; serta para pemula ekspor banyak yang mengalami kesulitan ketika ingin melakukan ekspor dikarenakan ada kesulitan dalam melakukan registrasi awal.

Permasalahan yang terjadi di tahun 2023 yaitu Perkembangan teknologi dan permintaan pasar membuat alat-alat ukur digital dari luar berkembang sangat pesat sehingga menggusur penggunaan alat-alat ukur produksi dalam negeri (timbangan mekanik); berkurangnya potensi UTTP (meter taksi) yang saat ini tergantikan dengan transaksi berdasarkan aplikasi (*online*); serta kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran di beberapa kota terdapat kendala kurangnya jumlah pengunjung disebabkan beberapa faktor diantaranya cuaca hujan dan bersamaan dengan pameran sejenis di lokasi lain. Berikut disajikan capaian kinerja indikator penyelenggaraan urusan perdagangan tahun 2020-2024.

Tabel 2.82 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	66,29%	72,96%	67,32%	76,00%	84,97%
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	83,33%	86,67%	118,75%	96,26%	105,17%
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	79,87%	NA	84	90,00%	90,00%
5	Nilai Ekspor kota Semarang	3.084.439. 326,82 US\$	1.117.549. 543,14 US\$	1.242.337. 131 US\$	2.130.728. 974,61 US\$	1.322.895. 045,28 US\$

Sumber: Dinas Perdagangan, 2024

• Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian dinilai baik dengan diraihnya penghargaan Terbaik 1 kategori Kabupaten/Kota Bidang Industri Kreatif Digital Tahun 2024 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada Selasa, 29 Oktober 2024 di Museum Ronggowarsito Kota Semarang.

Pertambahan jumlah sentra IKM meningkat menjadi 24 sentra di tahun 2024. Dengan capaian ini diharapkan meningkatkan kapasitas/keterampilan SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah. Dan Optimalisasi Sentra IKM. Memperluas jaringan pemasaran/penjualan produk IKM sehingga bisa dikenal dan bersaing baik ditingkat lokal maupun nasional. Hal ini bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan pelaku IKM yang pada akhirnya membawa kesejahteraan masyarakat.

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota di tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 2,64% lebih tinggi dari capaian pada tahun 2023 yang sebesar 0,98%. Selain itu, Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan di tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi 15,61% lebih tinggi dari capaian pada tahun 2023 yang sebesar 11,77%.

Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan kinerja urusan perindustrian selama tahun 2024 yaitu pelaku IKM belum sepenuhnya memiliki keterampilan teknik produksi dan manajemen yang baik, pelaku IKM yang masih kesulitan dalam pemasaran produknya, adanya pelaku IKM yang belum peduli untuk mendapatkan legalitas usaha dan standarisasi produk

dalam menjalankan usahanya, serta pelaku industri belum sepenuhnya memberikan data yang memadai terkait usahanya. Sebagai upaya untuk optimalisasi penyelesaian masalah-masalah tersebut dan untuk arah pembangunan industri yang lebih linier dengan kebutuhan Kota Semarang, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Semarang telah dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai pedoman dalam pembangunan industri Kota Semarang.

Berikut disajikan data capaian kinerja urusan pemerintahan bidang perindustrian tahun 2020-2024.

Tabel 2.83 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	28,62	28,75	28,87	28,78	28,78
2	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHK)	3.587	3.638	3.683	3.719	3.817
3	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2.805	2.840	2.885	2.921	2.921*
4	Berkembangnya industri kreatif dan industri kecil	3.515	3.557	3.599	3.625	3.723
5	Jumlah kluster industri	10	10	10	10	10
6	Pengembangan kawasan sentra- sentra industri potensial	20 sentra	20 sentra	21 sentra	22 sentra	24 sentra
7	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	0,48%	1,42%	1,23%	0,98%	2,64%
8	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	50%	50%	50%	50%	50%
9	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	0%	3,95%	11,87%	11,77%	15,61%
10	Sentra produk unggulan (kawasan – Logam)	0	0	1	1	1
11	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0%	0%	12,50%	11,11%	25%
Indikator SDGs						
12	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	28,62	28,75	28,87	28,78	28,78

Sumber: Dinas Perindustrian, 2024

- z. Unsur Pendukung
- Sekretariat Daerah

Kinerja Unsur pendukung Sekretariat Daerah sebagai fungsi koordinatif Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah diantaranya dapat ditunjukkan dengan penghargaan dan prestasi yang diterima Kota Semarang selama tahun 2024, diantaranya : Predikat BB (Sangat Baik) SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) Tingkat Nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi dengan nilai 73,12 lebih tinggi dari tahun 2023 yang sebesar 71,32.

Hal ini menunjukkan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja.

Pada tahun 2024 terdapat kinerja yang pencapaiannya melebihi target yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,59 dari target yang ditetapkan sebesar 88,35 namun lebih rendah dari realisasi IKM tahun 2023 yang sebesar 90,72. Pemerintah Kota Semarang terus mengupayakan untuk selalu menjaga dan senantiasa meningkatkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat.

Kinerja pada bidang Penyusunan Produk Hukum Daerah pada tahun 2024 menghasilkan sebanyak 11 Peraturan Daerah Kota Semarang yang merupakan inisiatif Eksekutif, 66 Peraturan Wali Kota Semarang, dan 497 Keputusan Wali Kota Semarang. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum melalui penyediaan dan penyusunan Produk Hukum Daerah sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Permasalahan dalam penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah yaitu jumlah Raperda yang disetujui DPRD belum sesuai target dikarenakan pembahasan raperda tergantung keaktifan perangkat daerah pengusul dan Regulasi yang selalu berubah dari pemerintah pusat pada tahun berjalan. Berikut disajikan data realisasi kinerja penyelenggaraan unsur pendukung sekretariat daerah tahun 2020-2024.

Tabel 2.84 Realisasi Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan SAKIP)	Predikat	B 68,52	B 69,44	BB 70,35	BB 71,32	BB 73,12
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,68	87,35	88,63	90,72	90,59
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	69,78	71,03	72,68	84,14	89,21
4	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	3,44/ST	3,44/ST	3,43/ST	3,53/ST	3,296/ST
5	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100	100	100	100	100
6	Jumlah Produk Hukum:						
	- Peraturan Daerah	Perda,	5	13	8	10	11
	- Peraturan Wali Kota	Perwal,	94	124	77	80	66
	- Keputusan Wali Kota	SK Wali kota	426	533	620	619	497
7	Terfasilitasi dan terselesaikannya kasus pemerintahan	Kasus	28	23	28	51	92

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Jumlah raperda yang disetujui DPRD	Raperda	5 (dari target 16 Raperda)	13 (dari target 10 Raperda)	8 (dari target 15 Raperda)	10 (dari target 16 Raperda)	10 (dari target 16 Raperda)

Sumber: Sekretariat Daerah, 2024

- Sekretariat DPRD

Dalam menjalankan fungsi legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, kinerja DPRD diantaranya ditunjukkan dengan belum tercapainya pemenuhan target penetapan dari 16 Perda yang direncanakan pada tahun 2024. Namun sampai dengan akhir tahun sidang hanya 10 Raperda yang berhasil ditetapkan persetujuannya oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Semarang. Capaian ini konsisten dari tahun sebelumnya. Meskipun belum mencapai target yang diharapkan, angka ini mencerminkan adanya upaya dalam melaksanakan fungsi legislasi DPRD, sekaligus menjadi evaluasi bagi peningkatan kinerja di masa mendatang. Faktor-faktor yang memengaruhi capaian ini mencakup kualitas perencanaan, proses pembahasan, hingga koordinasi antar pihak terkait, yang dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Kinerja lain terkait nomenklatur program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan fungsi anggaran DPRD telah termuat dalam RPJMD maupun RKPD di tahun 2024 sebesar 100%, sesuai nomenklatur Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tugas pokok dan fungsi DPRD untuk memfasilitasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Semarang telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meraih beberapa penghargaan seperti peringkat terbaik ke 2 nasional dalam penghargaan Anggota JDIHN Tahun 2024 dan penghargaan terbaik ke 2 dalam lomba JDIH Tingkat Jawa Tengah Tahun 2024. Berikut disajikan data kinerja penyelenggaraan unsur pendukung sekretariat DPRD tahun 2020-2024.

Tabel 2.85 Kinerja Daerah Unsur Pendukung Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah raperda yang disetujui DPRD	5 (dari target 16 Raperda)	12 (dari target 14 Raperda)	8 (dari target 15 Raperda)	10 (dari target 16 Raperda)	10 (dari target 16 Raperda)

Sumber: Sekretariat DPRD, 2024

aa.Unsur Penunjang

- Perencanaan

Kinerja pada unsur penunjang Perencanaan dapat ditunjukkan diantaranya dengan diraihnya penghargaan, diantaranya: Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik 1 Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Award Tahun 2024 dari BKKBN Republik Indonesia diserahkan 26 Juni 2024 di Kota Semarang; 5 Besar Kota pada I-SIM For Cities 2024 dari APEKSI dan PT. Surveyor Indonesia diserahkan 19 September 2024 di DKI Jakarta; Terbaik I Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting Tingkat Provinsi Jawa Tengah dari Provinsi Jawa Tengah diserahkan 13 November 2024 di Bappeda Provinsi Jawa Tengah; Peringkat 2 Kategori Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jateng dalam rangka Gerakan Hemat Energi dan Air Tingkat Jawa Tengah pada Earth Day 2024 Jawa Tengah dari Provinsi Jawa Tengah diserahkan 22 April 2024 di Taman Syailendra Dieng Kabupaten Wonosobo; dan Kota Paling Berkelanjutan di Indonesia Bidang Penataan Ruang dan Infrastruktur pada UI Green Metric Ranking Tahun 2024 dari Universitas Indonesia diserahkan 8 Agustus 2024 di Universitas Indonesia.

Kinerja lain yang merupakan lintas sektor koordinasi ditandai dengan terbitnya regulasi terkait Dokumen Perencanaan Tahunan (Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

Capaian kinerja pada Urusan Penunjang Perencanaan pada tahun 2023 diukur dari Kesesuaian program di RPJMD dengan program di RKPD tahunan 100%, dan Kesesuaian program di RKPD tahunan dengan program di APBD tahunan 100%. Capaian ini cenderung konsisten dari tahun sebelumnya.

Beberapa dukungan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja perencanaan tersebut diantaranya: Pelaksanaan Konsultasi Publik, Forum Lintas OPD, Musrenbang Kota, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Perekonomian dan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Berikut disajikan data kinerja penyelenggaraan unsur penunjang perencanaan tahun 2020-2024.

Tabel 2.86 Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu	2	2	2	2	2
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD (%)	94,16	100	100	100	99,38
3	Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD	75,70	79,44	81,50	82,30	83,99
4	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu.	2	2	2	2	2
5	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda, 2024

Dalam penyelenggaraan unsur penunjang perencanaan terdapat permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain:

- Keuangan

Kinerja pada unsur penunjang keuangan dapat ditunjukkan dengan diraihnya penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Kota Semarang dalam meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Pada Tahun 2024 Kota Semarang menjadi pilot project dalam penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang pengukurannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan supervisi dari Kementerian Dalam Negeri dan memperoleh kategori Sangat Baik. Pada Tahun 2024 Kota Semarang telah melaksanakan penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang pengukurannya dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah dan memperoleh nilai A dengan predikat Baik. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Terbaik (TP2DD) mendapat peringkat Tingkat Kota Jawa-Bali TP2DD dimana Kota Semarang meraih Terbaik I Pemerintah Daerah dengan Program Unggulan P2DD Terbaik Tahun 2024 dimana Kota Semarang meraih Terbaik I dengan Program Gerakan Transaksi Elektronik Kota Semarang (GESIT).

Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, penyusunan APBD, serta Realisasi Belanja Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir maka pada tanggal 7 Juni 2024 Kepala Daerah telah mengirimkan Surat Permohonan Pembahasan untuk mendapat Persetujuan Bersama DPRD Kota Semarang atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Ketepatan waktu penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Telah dilakukan pembahasan bersama dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Semarang sehingga ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 tanggal 20 Desember 2024.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan per 7 Februari 2025, Belanja Daerah Kota Semarang tahun 2024 tercatat mencapai 92,37% mengalami penurunan dari 2023 sebesar 93,05%. Hal tersebut disebabkan pengadaan barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar dan menyesuaikan dengan E-Catalog, SHS dan ASB Kota Semarang serta penggunaan anggaran belanja tidak terduga hanya bisa untuk membiayai kegiatan yang bersifat darurat dan mendesak dengan klasifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 diketahui Nilai Barang Milik Daerah (BMD) Keseluruhan meliputi Aset Tetap sebesar Rp21.329.227.666.075,00 dan Properti Investasi sebesar Rp227.585.141.723,00 sedangkan Nilai BMD yang belum dikelola sebesar Rp241.388.475.079,00 terdiri dari aset tanah maupun bangunan yang belum dimanfaatkan. Sehingga diperoleh Nilai BMD yang dikelola sebesar 98,88% atau sebesar Rp21.315.424.332.719,00

Tabel 2.87 Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Keuangan
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat kemandirian keuangan daerah (Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah)	46,01%	49,47%	51,23%	52,96%	52,77%
2	Persentase Silpa Terhadap APBD	1,65%	6,50%	5,17%	6,02%	5,01%
3	Persentase pengelolaan keuangan daerah	98,11%	96,42%	97,79%	97,88%	97,46%
4	Persentase nilai aset yang dikelola	NA	89,51%	98,55%	98,54%	98,88%

Sumber: Tahun 2024 LRA dan Neraca Unaudited BPK masih dalam proses pemeriksaan BPK

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer yang ditargetkan 100% mencapai 100,54%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 98,65%. Peningkatan realisasi pendapatan dana transfer dikarenakan salur Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai 100% sesuai dengan kondisi perekonomian nasional yang semakin membaik dan pelaporan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) setiap semester oleh Pemerintah Kota Semarang semakin tertib.

Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 memiliki rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan sebesar 55,15% sedangkan rasio pendapatan transfer sebesar 44,85% terhadap total pendapatan. Hal ini menunjukkan Kota Semarang masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap pendapatan transfer digunakan untuk belanja dalam rangka peningkatan pelayanan publik

- Kepegawaian

Kinerja pada penyelenggaraan Unsur Penunjang Kepegawaian dapat ditunjukkan salah satunya dengan diraihnya Penghargaan Bangkom Jateng Award Tahun 2024 dengan tema “Transformasi Organisasi Pembelajaran melalui Jawa Tengah *Corporate University* (Jateng Corpu)” dengan peringkat III tingkat Provinsi Jawa Tengah serta Penghargaan BKN RI atas penerapan Sistem Merit tahun 2024 dengan nilai 312 dengan Predikat “Baik”.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di Kota Semarang pada tahun 2024 yang dikeluarkan oleh BKN menyebutkan bahwa nilai IP ASN adalah sebesar 85,99, indeks ini meningkat dibandingkan realisasi di tahun 2023 yang sebesar 85,99. Selain itu, Indeks Sistem Merit juga

mengalami peningkatan sebesar 0,05 menjadi 0,78 di tahun 2024. Begitu pula dengan Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Layanan Kepegawaian di tahun 2024 sebesar 92,13 meningkat sebesar 1,02 dari tahun 2023.

Beberapa isu terkait pembinaan kepegawaian dapat dilihat dari belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam unsur penunjang kepegawaian terutama dalam assesment pegawai untuk pemetaan kompetensi, belum optimalnya pengintegrasian database kepegawaian di daerah dengan database kepegawaian pusat, dan masih terdapatnya penempatan ASN yang kompetensinya tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki.

Tabel 2.88 Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	82,28	83,84	83,84	85,40	85,99
2	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Layanan Kepegawaian	NA	91,79	91,88	91,11	92,13
3	Indeks Sistem Merit	NA	0,44	0,66	0,73	0,78
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	100%	39,44%	65,41%	100%

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2024

• Pendidikan dan Pelatihan

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan jumlah yang lulus sebesar 37 orang, meningkat dari tahun 2022 yang hanya 5 orang yang lulus. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 711 orang menjadi sebesar 1.514 orang di tahun 2024. Permasalahan dalam penyelenggaraan unsur penunjang pendidikan dan pelatihan yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi yang maksimal dalam pelaksanaan diklat serta sarana prasarana yang kurang terkadang mengalami kendala.

Tabel 2.89 Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Pendidikan dan
Pelatihan Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	74 Orang (Lulus 100%)	60 Orang (Lulus 100%)	5 Orang (Lulus 100%)	37 Orang (Lulus 100%)	97,77
2	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	397 Orang	397 Orang	404 Orang	711 Orang	1514 Orang
3	Rasio pegawai Fungsional (%)*	5,60%	16,15%	18,68%	43,27%	35,95%
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%)*	100%	100%	39,44%	65,41%	100%
5	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	85%	85%	21%	24%	34,21%

*PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat, 2024

- Penelitian dan Pengembangan

Kinerja pada unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan diantaranya ditunjukkan Kota Semarang meraih penilaian dan apresiasi Pemerintah Pusat terhadap semangat dan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan cara-cara inovatif.

Indeks Inovasi Daerah menunjukkan capaian penyelenggaraan inovasi di daerah. Pada tahun 2024 indeks inovasi daerah Kota Semarang mencapai 67,92 meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 65,80 dan secara predikat Kota Semarang termasuk dalam kategori Inovatif. Secara struktur, Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel, dan 36 indikator. Jika dilihat dari cakupan perangkat daerah yang mendapatkan fasilitasi melaksanakan inovasi daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang positif, dan pada tahun 2024 mencapai 100% atau sebanyak 52 OPD secara keseluruhan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan yaitu belum disusunnya payung hukum inovasi daerah yang terintegrasi serta belum lengkapnya dokumen pedoman teknis dan SOP inovasi OPD.

Tabel 2.90 Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	21,57%	35,29%	47,06%	64,71%	100%
3	Indeks Inovasi Daerah	1.423 (DO lama)	57,49	60,79	65,80	67,92

Sumber: BRIDA, 2024

Jumlah kajian yang dilakukan pada tahun 2024 sebanyak 18 kajian, mengalami penurunan dari tahun 2023 sebanyak 21 kajian. Daftar kajian tahun 2024 tersebut adalah:

1. Sistem Informasi Rantai Pasok Pangan Dalam Mendukung Kota Semarang Mandiri Pangan;
2. Strategi Pengembangan Mijen Sebagai Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar (Peningkatan Kinerja Dan Pembelajaran Budidaya Ikan Air Tawar Di Bbi Mijen, Pemkot Semarang);
3. Riset Strategi Inovatif Pengembangan Kampung Sawah Kawasan Mijen Yang Terintegrasi Dan Beriset Strategi Inovatif Pengembangan Kampung Sawah Kawasan Mijen Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan;
4. Kajian Identifikasi Pekerja Rentan Di Kota Semarang Dalam Upaya Perlindungan Ketenagakerjaan;
5. Kajian Potensi Pengembangan Ekosistem Iptek Kota Semarang;
6. Kajian Pengaruh Penggunaan Lahan Permukiman Terhadap Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang;

7. Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Riset Dan Inovasi Kota Semarang;
8. Analisis Faktor Risiko Dan Peta Sebaran TB-HIV Di Kota Semarang;
9. Warak Ngendok Sebagai Ikon Identitas Kota Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual Untuk Pengembangan Perekonomian Daerah;
10. Kajian Pengelolaan Parkir *On The Street* Dan *Off Street* Di Kota Semarang;
11. Kajian Kecukupan Bangunan Air Dalam Upaya Pengendalian Banjir Kota Semarang;
12. Kajian Penyusunan Proses Bisnis Brista Kota Semarang;
13. Kajian Peningkatan Aksesibilitas Informasi *Website* Di Kota Semarang Melalui Integrasi Desain, Keamanan, *Copywriting* Dan *Search Engine Optimization*;
14. Strategi Penguatan Satu Data Terpadu Untuk Pengambilan Kebijakan Yang Efektif Dan Efisien Di Pemerintah Kota Semarang;
15. Kajian Implementasi Teknologi *Metaverse* Dalam Peningkatan Pengelolaan Layanan Publik Di Kota Semarang;
16. Keberlanjutan Inovasi Pemerintah Daerah Kota Semarang: Studi Kasus Keberhasilan Dan Kegagalan Inovasi Dalam 5 Tahun Terakhir 2019-2024;
17. Kajian Preferensi Pengembangan Pasar Tradisional Di Kota Semarang;
18. Kajian Penyediaan Kendaraan Dinas pada Pemerintah Kota Semarang Melalui Sistem Sewa.

Selain kajian-kajian tersebut, pada awal tahun 2025 Pemerintah Kota Semarang menyusun dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RPIJ-PID) yang diharapkan dapat menjadi arah kebijakan riset dan inovasi serta pemanfaatannya guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, serta daya saing Kota Semarang.

bb. Unsur Pengawas

- Inspektorat Daerah

Kinerja Inspektorat Daerah dapat terlihat dari diperolehnya Peringkat pertama Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2024 dari KPK RI dengan nilai 91,62 Kategori Pemerintah Kota.

Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024 nilai maturitas SPIP Pemerintah Kota Semarang sebesar 3,158 (Terdefinisi) yang artinya Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Pemerintah Kota Semarang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kota Semarang telah memperoleh WTP selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut sejak Tahun 2016.

Selanjutnya sebagai upaya mewujudkan Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Pemerintah Kota Semarang melalui Inspektorat Kota Semarang berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2024 telah melakukan pengawasan internal.

Tingkat kapabilitas pengawasan intern seringkali terkait dengan struktur tata kelola organisasi. Semakin tinggi levelnya maka semakin baik kapabilitasnya APIP. Capaian kapabilitas APIP Kota Semarang Tahun 2023 telah sepenuhnya berada pada level 3 (*integrated*).

Berdasarkan laporan BPKP Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah terkait penetapan hasil evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 Indeks Penerapan Manajemen Risiko memenuhi kriteria pada tingkat “Repeatable” atau level 2 dengan skor sebesar 2,991. Adapun target yang diharapkan adalah dapat mencapai level 3 pada tahun 2025.

Hambatan atau permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dalam Urusan Pengawasan yaitu semakin kompleksnya penugasan pengawasan di Inspektorat Kota Semarang baik yang telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan maupun penugasan mandatory menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan penugasan.

Tabel 2.91 Realisasi Kinerja Unsur Pengawas Inspektorat Daerah
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Indeks Penerapan Manajemen Resiko	1,57	2,025	2,82	2,86	2,991
3	Tingkat Maturitas SPIP (level)	3	2,639	3,012	3,086	3,158
4	Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3
5	Nilai Survey penilaian Integritas (SPI)	NA	78,21	74,1	74,8	71,6

Sumber: Inspektorat, 2024

cc. Unsur Kewilayahan

- Kecamatan

Sebagai unsur Kewilayahan, 16 Kecamatan di Kota Semarang melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu. Fungsi Penunjang Kewilayahan diarahkan pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Secara umum kinerja kecamatan dalam bidang urusan pemberdayaan masyarakat diukur melalui persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, dimana pada tahun 2024 terealisasi sebesar 98,30%, sedangkan kinerja dalam fungsi pemerintahan dan pelayanan publik diukur dengan persentase kepuasan masyarakat dalam

menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) yang realisasinya sebesar 95,89%, pada fungsi Ketentraman Dan Ketertiban Umum diukur dari persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum akibat pelanggaran perda di kewilayahan sebesar 21,01%, sedangkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diukur dari Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang terealisasi sebesar 91,31%.

Indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan adalah: Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE); Persentase Tingkat partisipasi masyarakat; Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan Wawasan Kebangsaan ditingkat kewilayahan; dan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif. Dimana keempat indikator tersebut mempunyai capaian positif pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya kesadaran masyarakat proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di wilayahnya.

Disisi lain perangkat daerah kecamatan selalu memberikan dukungan terhadap kebijakan strategis (lintas sektor) Pemerintah Daerah di wilayahnya, seperti halnya keberlanjutan Program *Urban Farming*, Percepatan Penanganan Stunting, Penanganan Kemiskinan, Operasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok, Penanggulangan dan Koordinasi Penanganan Bencana.

Adapun capaian pada tahun 2024 secara rata-rata dari 16 kecamatan sesuai dari indikator tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.92 Realisasi Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	82,17%	87,50%	90,11%	95,80%	95,90%
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	NA	82,50%	84,34%	100,00%	95,65%
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	NA	85,00%	91,00%	99,91%	95,89%
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	NA	95,00%	95,00%	100,00%	98,30%

Sumber: 16 Kecamatan, 2024 (Data diolah)

dd. Unsur Pemerintahan Umum

- Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai dalam pengukuran indeks demokrasi yang ditargetkan 72,80 tercapai 89,72 sehingga mampu mencapai hasil yang ditargetkan atau berhasil mencapai tercapai 123,24%. Indeks

Demokrasi adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Kota Semarang yang diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil, Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Jika dibandingkan dengan pengukuran indeks demokrasi tahun 2023, hasil tersebut turun sebesar 5,46 angka indeks atau sekitar 5,73%. Hal ini disebabkan pada Tahun 2024 terdapat penyelenggaraan pesta demokrasi yaitu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPRD, DPD, DPR RI dan Pemilihan Kepala Daerah. Seluruh aspek pada Indeks Demokrasi tahun 2024 mengalami penurunan dimana aspek yang mengalami penurunan signifikan adalah Aspek Kebebasan Sipil dan Aspek Lembaga Demokrasi. Penurunan pada aspek kebebasan sipil salah satunya disebabkan oleh terjadinya peristiwa demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan.

Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) pada tahun 2024 mencapai 84,34 indeks yang ditargetkan 74,00 indeks atau berhasil mencapai target 113,97%. Hasil tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2023 sebesar 83,63 indeks. Kenaikkan tersebut berupa, pemahaman masyarakat Kota Semarang mengenai Pancasila dan Wawasan kebangsaan semakin luas dan mendalam, penerapan dalam kehidupan sehari-hari sudah dilaksanakan terutama dalam interaksi dan kebiasaan masyarakat Kota Semarang ditengah keberagaman yang tinggi. Beberapa tujuan dari Gerakan Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sudah dapat diterapkan dan dirasakan oleh sebagian masyarakat Semarang. Kegiatan yang mendorong Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah kegiatan Fun Game, Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara, Dialog Kebangsaan, FGD Peningkatan Indeks Kota Toleran, FGD Penguatan Karakteristik dan Patriotik Generasi Muda, FGD Pendidikan Politik Bagi Masyarakat, FGD Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Diskusi Panel Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dn Budaya, Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila pada tahun 2024 dari yang ditargetkan 2,2 indeks tercapai 3,78 indeks atau berhasil tercapai 171,81%. Jika dibandingkan pengukuran tahun 2023 hasil yang dicapai mengalami peningkatan 0,576. Hasil tersebut secara kualitatif didorong oleh kondisi faktual di Kota Semarang yang telah mengimplementasikan berbagai program pengamalan nilai-nilai Pancasila, diantaranya FGD Pemantapan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Upacara Peringatan Hari Besar Nasional; *Fun Game*: Orientasi Pemantapan Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; FGD Penguatan Karakteristik dan Jiwa Patriotik Generasi Muda; Pembinaan Kesadaran Bela Negara; Deradikalisasi Mantan Narapidana Teroris.

Tabel 2.93 Realisasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Demokrasi	Angka	72,00	72,00	95,35	95,18	89,72
2	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Angka	72,50	72,50	82,13	83,63	84,34

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indeks kebebasan sipil dari yang ditargetkan 66,00 angka indeks mencapai 90,23 atau berhasil mencapai target 136,71%. Kebebasan sipil meliputi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan untuk berserikat, dan kebebasan untuk berkeyakinan/beribadah. Masyarakat telah diberikan ruang dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya dalam proses pembangunan di Kota Semarang.

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indeks kebebasan sipil dari yang ditargetkan 64,00 angka indeks mencapai 90,23 atau berhasil mencapai target 153,43%. Hasil tersebut turun dengan hasil yang dicapai tahun 2023. Masyarakat telah diberikan ruang dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya dalam proses pembangunan di Kota Semarang. Aspek Kebebasan Sipil menurun disebabkan adanya beberapa penggunaan kekerasan oleh masyarakat ataupun aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Indeks Kinerja Ormas dari yang ditargetkan 58,00 mencapai 65,05 atau berhasil mencapai target 112,16%. Hasil capaian 2024 jika dibandingkan hasil capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan/ sejumlah 1,59%. Indeks kinerja organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang tahun 2024 menunjukkan hasil yang berada pada kategori Cukup, dengan total nilai indeks mencapai 65,05 dalam rentang nilai 50-74. Indeks ini dibagi ke dalam dua variabel utama, yaitu sumber daya yang mencatat nilai 39,12 dan program kerja dengan nilai 25,93. Variabel sumber daya meliputi aspek keuangan, sumber daya manusia, dan fasilitas organisasi, yang menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi telah memiliki fondasi internal yang cukup baik. Namun, variabel program kerja mencatat nilai yang lebih rendah, mengindikasikan bahwa pelaksanaan program oleh organisasi kemasyarakatan masih membutuhkan penguatan, terutama dalam hal perencanaan strategis dan eksekusi yang konsisten.

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indeks kerukunan umat beragama dari yang ditargetkan 71.00 mencapai 83.86 atau berhasil mencapai target 117,75 %. Jika dibandingkan capaian tahun 2023 hasil tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,48% dimana capaian pada tahun 2023 sejumlah 81,73. Survei tentang persepsi tentang kerukunan umat beragama diperoleh skor melalui “sikap dan interaksi antar umat beragama” memiliki Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kota Semarang sebesar 83,86 dengan rincian Dimensi Toleransi sebesar 85,00 Dimensi Kesetaraan dengan skor sebesar 83,25 dan Dimensi Kerjasama antar umat beragama diperoleh skor sebesar 83. Dari hasil skor yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kerukunan antar umat beragama sudah berada pada level sangat tinggi, untuk itu pemeliharaan harus terus ditingkatkan demi tercapainya kehidupan beragama yang rukun, harmonis, dan selaras. Faktor yang Penguat Kerukunan Umat Beragama di Kota Semarang adalah Keberadaan Tempat Ibadah yang Merata dan Aksesible, Adanya Kegiatan Lintas Agama, Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Kerukunan dalam

Kehidupan Beragama, Pendidikan Multikultural dan Toleransi, Kearifan Lokal dan Tradisi Toleransi, Tingkat Keamanan yang Relatif Tinggi.

2.1.8.2. Aspek Daya Saing Daerah

a. Kemampuan Ekonomi Daerah

PDRB per kapita Kota Semarang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB per kapita di tahun 2024 yaitu sebesar 156,57 juta rupiah. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Semarang dengan asumsi kesenjangannya tidak tinggi.

Tabel 2.94 Realisasi Kinerja Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB per kapita berlaku	Juta Rp	114,18	123,04	135,33	146,87	156,57
2	Nilai Ekspor	US\$	3.084.439 .326,82	1.117.549 .543,14	1.242.337 .131,00	2.130.728 .974,61	1.322.895 .045,28

Sumber: Bappeda Kota Semarang, Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2024

b. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kota Semarang meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Semarang dalam meningkatkan daya saing daerah.

• Aksesibilitas Daerah

Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan (Yogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah. Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang antara lain:

- 1) Sarana jalan di Kota Semarang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota. Dengan kondisi jalan Kota sesuai SK Wali Kota sepanjang 839,901 km. Jalan dengan kondisi baik pada tahun 2024 yaitu sepanjang 422.677 km (50,32%), kondisi sedang sepanjang 360.727 km (42,95%), kondisi rusak ringan sepanjang 29.427 km (3,50%) dan kondisi rusak berat sepanjang 27.070 km (3,22%).
- 2) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang melayani penumpang domestik dan internasional. Pengembangan terminal baru telah beroperasi pada pertengahan tahun 2018 dan diharapkan akan makin meningkatkan kapasitas pelayanan Bandara Ahmad Yani. Pada bulan Mei 2024 Kementerian Perhubungan menurunkan status Bandara Ahmad Yani tidak lagi berstatus sebagai bandara internasional. Pada tahun 2024 terdapat 17.969 penerbangan dengan 8.696 kedatangan dan 9.007 keberangkatan serta 266 lok. Capaian penumpang pada tahun 2024 berjumlah 2.281.301 penumpang dengan 1.140.327 kedatangan, 1.139.435 keberangkatan dan 1.539 transit. Sedangkan, untuk penerbangan internasional terdapat 372 penerbangan dengan 342 kedatangan dan 30 keberangkatan dengan 145 penumpang.

- 3) Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pelabuhan pelayaran nusantara untuk melayani penumpang kapal antar Provinsi, juga beberapa kapal pesiar internasional telah singgah dipelabuhan ini. Pelabuhan Tanjung Emas melayani angkutan barang dan penumpang, ditunjang keberadaan Terminal Peti Kemas yang melayani bongkar muat muatan baik nasional maupun internasional. Jumlah penumpang kapal di tahun 2023 sebesar 373.826 orang.
- 4) Terminal bus di Kota Semarang terdapat Terminal Penumpang Tipe A Mangkang (kewenangan Pusat) berlokasi di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, Terminal Penumpang Tipe B Penggaron (kewenangan Provinsi) berlokasi di Kelurahan Penggaron Kidul di Kecamatan Pedurungan, Terminal Penumpang Tipe C (kewenangan Pemerintah Kota Semarang) ada 3 (tiga) yaitu Terminal Cangkiran yang berlokasi di Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen, Terminal Gunungpati yang berlokasi di Kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati dan Terminal Terboyo berlokasi di Kelurahan Terboyo Wetan Kecamatan Genuk yang melayani angkutan perkotaan, Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Jumlah penumpang tahun 2024 di terminal tipe C sebesar 216.383 penumpang, terminal tipe B sebesar 29.092 penumpang sedangkan untuk pengguna jasa layanan BRT sebesar 13.135.009 orang.
- 5) Stasiun kereta api di Kota Semarang untuk melayani angkutan penumpang dan barang yang dilayani oleh dua Stasiun yaitu Stasiun Tawang dan Stasiun Poncol. Untuk pelayanan angkutan kelas Eksekutif dan Bisnis pelayanan diutamakan di Stasiun Tawang, sedangkan pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi dan bisnis dipusatkan di Stasiun Poncol. Jumlah penumpang kereta api pada tahun 2024 sebesar 6.654.753 penumpang.

Rasio Konektivitas kota berhasil sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 0.88. Angka ini menunjukkan bahwa 88% trayek angkutan umum sudah terlayani guna mendukung pergerakan masyarakat dalam beraktifitas.

Tabel 2.95 Realisasi Kinerja Fungsi Aksesibilitas Daerah Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio konektivitas kabupaten /kota	Angka	0,56	0,57	0,58	0,85	0,88

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

- **Penataan Wilayah**
 Penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di

bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai berikut: kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan dan perkantoran, kawasan industri, kawasan olahraga, kawasan wisata/rekreasi, kawasan perumahan dan permukiman, kawasan pemakaman umum, kawasan khusus dan kawasan terbuka non hijau. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan kota banyak timbul pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman di daerah pinggiran kota.

Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yaitu dari angka 44,21% pada tahun 2020, meningkat menjadi 44,82% tahun 2024. Selain itu indikator persentase kesesuaian tata ruang dengan realisasi di tahun 2024 sebesar 100% berdasarkan jumlah permohonan KRK yang sesuai Tata Ruang.

Realisasi kesesuaian tata ruang tidak lepas dari Pengendalian pemanfaatan tata ruang yang sudah terdigitalisasi melalui aplikasi Tata Ruang Pro Investasi. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas dan memberikan kemudahan investasi terutama kepastian lokasi bagi investor, sehingga permohonan KRK yang diajukan investor sudah dapat diinformasikan secara pasti ketetapan terkait kesesuaian tata ruangnya, sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

Tabel 2.96 Realisasi Kinerja Fungsi Penataan Wilayah Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	44,21	44,67	44,82	45,05	44,82
2	Kesesuaian tata ruang	%	95,89	100	100	100	100

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

- Ketersediaan Air Minum

Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air minum di Kota Semarang dapat dikatakan mengalami perkembangan yang relatif meningkat tiap tahun, Jumlah pelanggan PDAM Kota Semarang pada tahun 2020 sebanyak 176.042 pelanggan, meningkat menjadi 193.062 pelanggan pada tahun 2024, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 186.091 pelanggan. Demikian pula untuk pemakaian air dan penjualan air mengalami peningkatan pada tahun 2024 masing-masing menjadi sebesar 56.986,349

m3 dan Rp. 363.009,41 juta. Secara lengkap data banyaknya pelanggan, pemakaian dan penjualan air minum PDAM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.97 Perkembangan Jumlah Pelanggan, Pemakaian, & Penjualan Air Minum PDAM Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pelanggan	176.042	177.929	181.705	187.471	193.062
2.	Pemakaian Air (Ribu m ³)	51.155,72	51.100,93	54.058,37	56.535,43	56.986,35
3.	Penjualan Air (Juta Rp)	276.735,11	293.638,47	301.868,88	328.719,54	363.009,41

Sumber: PDAM Kota Semarang 2024

- Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan pasar tradisional. Sampai dengan tahun 2024 jumlah fasilitas perdagangan dan jasa mengalami peningkatan.

Pengembangan kepariwisataan saat ini makin penting, tidak saja dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa negara, akan tetapi juga dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Pada tahun 2024, di Kota Semarang ada sebanyak 109 usaha akomodasi hotel berbintang, dengan jumlah kamar sebanyak 10.528 kamar dan 15.811 tempat tidur. Adapun rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel berbintang 1,87 malam, sedangkan tamu domestik 1,34 malam. Persentase tingkat penghunian kamar hotel berbintang tahun 2024 sebesar 57,26 persen.

Rumah makan atau restoran merupakan salah satu penunjang sektor pariwisata di Kota Semarang. Pada tahun 2024, jumlah rumah makan atau restoran sebanyak 1.722 unit. Usaha rumah makan atau restoran paling banyak dijumpai di Kecamatan Semarang Tengah yaitu sebesar 409 restoran. Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata religius. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di Kota Semarang.

c. Fasilitas Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan.

- Ketentraman dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Semarang relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Pada tahun 2024 angka kriminalitas sebesar 1.196 kejadian, menurun dibandingkan

angka kriminalitas pada tahun 2023 yang sebesar 1290 kejadian, dan keadaan ini juga membaik dari tahun-tahun sebelumnya.

Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban pada tahun 2024 mencapai 10.18% yaitu dengan angka gangguan trantibum sebesar 1.444. Dari data tersebut adanya penurunan angka gangguan trantibum dibanding dari tahun 2023 yaitu 11,28% dengan angka gangguan trantibum sebesar 1.663 sesuai data yang ada.

Tabel 2.98 Realisasi Kinerja Fungsi Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kriminalitas	Kasus	1.330	1.253	1.335	1.290	1.196
2	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	12,37	11,47	10,46	11,28	10,18

Sumber: Satpol PP Kota Semarang 2024

• Kemudahan Perijinan

Sampai dengan tahun 2023, Perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi lokal SIIMUT (Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu) dengan 27 jenis layanan. Selanjutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengajuan perizinan berusaha serta pengajuan perizinan lainnya di wilayah Pemerintah Kota Semarang dan daerah lainnya menggunakan layanan melalui OSS (*Online Single Submissions*) yang dikembangkan pemerintah pusat untuk semua proses registrasi. Adapun karakteristik izin berusaha oleh pelaku usaha adalah: berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Pada tahun 2024 pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha di Kota Semarang berjalan dengan baik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang berhasil mencapai target persentase izin terbit sesuai Standar Pelayanan sebesar 96,71% melebihi target yang ditetapkan yaitu 95,5%. Selain itu, capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 yang sebesar 95,69%.

Tabel 2.99 Realisasi Kinerja Fungsi Kemudahan Perijinan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosedur ijin terbit sesuai SP (sejak 2020: 174 jenis perijinan dari semula 52 jenis)	%	98,70	99,33	95,63	95,69	96,71

Sumber: DPMPTSP Kota Semarang 2024

d. Sumber Daya Manusia

- Kualitas Tenaga Kerja

Sejak tahun 2010 hingga 2020, persentase penduduk Kota Semarang kategori usia muda, usia produktif dan usia lansia tidak banyak berubah. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, baik ditahun 2010 sampai dengan tahun 2020, komposisi penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di Kota Semarang memiliki persentase terbesar yaitu mencapai 70,66%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Semarang sudah memasuki tahapan bonus demografi (demographic dividend). Bonus demografi adalah suatu keadaan kependudukan dimana ketergantungan penduduk berada pada rentang yang terendah. Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan penduduk tahun 2020 sebesar 31,90% yang berada di bawah 50%. Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas, dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun 2020 sampai dengan 2024 bergerak fluktuatif. TPAK mengalami peningkatan Kembali di tahun 2024 menjadi 69,88%. Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi juga mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi sebesar 79,06%.

Tabel 2.100 Realisasi Kinerja Fungsi Kualitas Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,89	69,41	70,96	69,42	69,88
2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	74,00	75,00	72,74	77,00	79,06
3	Rasio Ketergantungan Penduduk (Data Disdukcapil)	%	41,15	41,10	40,66	41,25	40,30

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Dispendukcapil Kota Semarang, 2023

2.1.8.3. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD

Secara makro, progres capaian 11 indikator tujuan dan 38 indikator sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2024 terhadap target tahun 2024, diperoleh rata-rata capaian untuk indikator tujuan sebesar 110,16% dengan predikat Sangat Tinggi (ST), dan rata rata capaian untuk 38 indikator sasaran sebesar 110,73% dengan predikat Sangat Tinggi (ST). Jika dibandingkan terhadap target tahun 2024, seluruh indikator tujuan atau sebesar 100% termasuk pada kategori kinerja Sangat Tinggi (ST). Sedangkan dari sebanyak 38 indikator sasaran, terdapat 37 indikator atau sebesar 97,37% memiliki kinerja dengan kategori kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator atau sebesar 2,63% kinerja dengan kategori kinerja Sangat Rendah (R) yaitu nilai ekspor.

Tabel 2.101 Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Pembangunan RPJMD Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
						2024	2024	%*
1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			poin	84,40 – 86,00	85,24	101,48%
		1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,60	15,57	99,81%
				Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,61	11,05	104,15%
				Usia Harapan Hidup	Tahun	77,54	78,23	100,89%
		Tingkat Kearifan Budaya Lokal			Persen	61,05	86,10	141,03%
2	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	Persen	61,05	86,10	141,03%		
2	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka			Persen	6,50 – 7,60	5,82	129,88%
		3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	Persen	94,29	95,90	101,71%
		4	Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	70,15	69,88	99,62%
				Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	78,00	79,06	101,36%
		Tingkat Kemiskinan			Persen	3,82 – 4,00	4,03	104,95%
		5	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	15,20 - 15,50	9,68	137,55%
		6	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Persentase Penanganan PPKS	Persen	99,87	100,00	100,13%
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi			ST	5,70- 6,50	5,62	98,60%
		7	Meningkatnya produk unggulan daerah	Nilai Ekspor	US\$	3.539.299.867,06	1.322.895.045,28	37,38%
				Persentase peningkatan kunjungan wisata	Persen	6,00	13,13	200,00%
		8	Meningkatnya nilai tambah ekonomi	Persentase peningkatan nilai investasi	% (Juta Rupiah)	7% (27.362.0	10,03% (28.261.148 juta Rp)	143,29%

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
						2024	2024	%*
						89 juta Rp)		
				PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	104,12	156,57	150,37%
				Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	Persen	28,84	29,70	102,98%
				Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	28,72	28,35	98,71%
4	Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan	Indeks Demokrasi			Nilai	72,80	89,72	123,24%
		9	Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	74,00	84,34	113,97%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Nilai Indeks	95,80	96,37	100,59%
		10	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai Indeks	75,20	73,86	98,22%
		Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban			Persen	9,90	10,18	97,17%
		11	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Kejadian	1.251	1.196	104,40%
5	Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Persen	56,06	59,41	105,98%
		12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks	50,01	45,56	91,10%
				Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks	74,00	86,90	117,43%
				Penurunan Emisi CO2	Ton CO2e	168.864,53	381.109,16	200,00%
				Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persen	71,00	71,34	101,42%
				Persentase ruang terbuka hijau	Persen	45,35	44,48	98,08%
		Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur			Nilai	80,62	91,61	113,63%
		13	Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu	Persen	73,00	73,70	101,96%
				Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi	Persen	79,00	78,20	98,99%
				Persentase kawasan banjir dan rob	Persen	3,19	3,29	96,87%
		14	Terwujudnya sarana dan prasarana	Persentase lingkungan permukiman sehat	Persen	98,00	99,91	101,95%

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
						2024	2024	%*
			dasar permukiman yang berkualitas	Persentase rumah layak huni	Persen	99,42	99,30	99,88%
		15	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persen	87,00	98,08	112,74%
		16	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	109,00	94,31	113,47%
		17	Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	0,5876	0,88	149,76%
				Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet	Jumlah	2	2	100,00%
6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai Indeks	76,00	89,21	117,38%
18		Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai/ Predikat	>76,00/ BB	73,12/ BB	96,21%	
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00%	
19		Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	83,50	85,99	102,98%	
			Indeks SPBE	Skor 0-5	4,30	3,95	91,86%	
			Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	>3,47/ ST	3,296/ ST	94,98%	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	88,35	90,59	102,53%	

Sumber: Bappeda Kota Semarang (data diolah), 2024
 *) ST:X>90%;T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R:65%≥X>50%; danSR :X≤50%

2.1.9. Indikator Utama Pembangunan

Terwujudnya pembangunan Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan di Tahun 2045 diukur dengan IUP sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Untuk diketahui, Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama pelaksanaan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 yang menitikberatkan fokus pada penguatan fondasi transformasi penguatan daya dukung dan daya tampung baik pada bidang sosial, ekonomi, budaya, sumber daya alam, infrastruktur, lingkungan dan tata kelola pemerintahan. Setiap bidang tersebut, kemudian pelaksanaannya akan diukur melalui capaian IUP setiap tahunnya, dan menjadi bahan evaluasi kebijakan. Adapun capaian IUP dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.102 Realisasi Indikator Utama Pembangunan Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	77,34	77,51	77,69	77,90	78,23
2	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	17,00	21,00	15,00	16,00	14,00
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	26,60	21,30	10,40	15,70	11,20
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	62,10	93,90	98,10	96,72	103,70
5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	78,40	81,80	81,80	99,80	81,50
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	94,44	95,47	99,24	100,00	100,94
7	Rerata Skor Literasi Membaca SD/Sederajat	%	NA	69,35	69,35	76,18	77,90
8	Rerata Skor Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	NA	69,90	69,90	76,76	81,63
9	Rerata Skor Numerasi SD/Sederajat	%	NA	38,78	38,78	57,32	66,28
10	Rerata Skor Numerasi SMP/Sederajat	%	NA	47,36	47,36	54,65	74,67
11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	10,53	10,78	10,80	10,81	11,05
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,52	15,53	15,54	15,55	15,57
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	18,91	20,09	19,28	18,25	18,25*
14	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	92,09	89,16	85,51	95,06	97,75
15	Tingkat Kemiskinan	%	4,34	4,56	4,25	4,23	4,03
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	38,17	41,99	41,14	55,32	41,69
17	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (40% Bawah)	%	NA	15,71	15,12	16,49	16,49*
18	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah dan mengurusutamakan kebudayaan	%	28,57	27,33	28,38	26,71	24,34
19	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	100,00	100,00	77,78	78,93	100,00
20	Jumlah pengunjung tempat bersejarah (Kumulatif)	Orang	NA	NA	2.819.236	4.641.338	3.690.645
21	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	40,34	62,05	70,72	70,13	70,21
22	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Angka	22,00	24,00	36,00	66,53	83,17
23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	28,62	28,75	28,85	28,78	28,35

NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,77	2,77	3,15	3,19	3,23
25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	6,28	0,08	4,92	13,99	24,30
26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,07	2,09	2,73	3,17	3,19
27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	NA	NA	0,14	0,20	0,30
28	Return on Asset (ROA) BUMD	%	5,67	4,58	4,94	5,75	5.75*
29	Kapabilitas Inovasi	Angka	4,56	4,54	4,61	3,46	4,04
30	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,57	9,54	7,60	5,99	5,82
31	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	60,48	59,42	58,59	60,64	60,23
32	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa dalam PDRB	%	28,64	28,18	29,75	28,98	28,35
33	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	76,20	83,45	82,22	84,40	86,56
34	Disparitas Harga	%	NA	NA	7,83	8,01	9,97
35	Penanaman Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	65,79	65,76	61,58	59,68	60,57
36	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	98,17	97,87	98,34	98,84	99,31

Sumber: Bappeda Kota Semarang (Data diolah), 2024

Ke depan, perlu adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang agar capaian IUP dapat melampaui target kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045. Langkah ini menjadi krusial dalam mendukung perwujudan visi Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan, serta sejalan dengan visi Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan. Selain itu, pencapaian IUP yang optimal juga akan berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Maju, Sejahtera, Berdaulat, dan Berdaya Saing Global pada peringatan 100 tahun kemerdekaan. Sinergi antara Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah pusat sangat penting dalam memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam mendorong integrasi kebijakan yang lebih efektif dan efisien di berbagai sektor strategis, termasuk infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan. Dengan adanya sinergi yang kuat, pembangunan yang dilakukan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh Kota Semarang serta Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.

Dalam sektor infrastruktur, sinergi ini dapat memastikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana perkotaan, seperti transportasi, jaringan jalan, sistem drainase, serta infrastruktur digital, dilakukan secara terpadu dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Konektivitas antarwilayah yang lebih baik akan mendukung pergerakan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta meningkatkan daya tarik investasi di Kota Semarang sebagai salah satu pusat pertumbuhan utama di

Jawa Tengah. Dari sisi ekonomi, kolaborasi yang erat antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat dapat menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, dan jasa, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan kebijakan yang selaras, pelaku usaha lokal dapat lebih berkembang melalui dukungan insentif, kemudahan perizinan, serta akses terhadap pasar yang lebih luas.

Selain itu, penguatan sektor UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing. Dalam aspek sosial, kerja sama lintas pemerintah memungkinkan penyediaan layanan publik yang lebih baik, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan global. Selain itu, program perlindungan sosial yang lebih efektif akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di bidang budaya, sinergi ini dapat memastikan bahwa pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah Kota Semarang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Program revitalisasi kawasan bersejarah, penguatan identitas budaya lokal, serta promosi kebudayaan di tingkat nasional dan internasional dapat semakin diperkuat dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan pusat. Dengan demikian, budaya Kota Semarang tidak hanya menjadi warisan yang dilestarikan, tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi melalui sektor pariwisata dan industri kreatif berbasis budaya. Selain itu, dalam aspek lingkungan, sinergi ini sangat penting untuk mendorong kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah yang lebih baik, konservasi sumber daya alam, serta mitigasi perubahan iklim. Dengan adanya kerja sama antar pemerintah, kebijakan lingkungan dapat lebih terpadu, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Secara keseluruhan, melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah pusat, pembangunan yang dilakukan dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya. Dengan langkah-langkah strategis yang didukung oleh kebijakan yang selaras, Kota Semarang dapat terus berkembang sebagai pusat dalam pencapaian Indonesia Emas 2045.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sementara yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pada dasarnya, kondisi keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan dan kewajiban penyelenggaraan pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan yang diharapkan, tidak hanya dibutuhkan perencanaan yang baik tetapi juga penganggaran yang tepat. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang saling terkait serta terintegrasi, sehingga pentingnya kedua hal tersebut dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan. Anggaran memberikan gambaran estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Pembangunan dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan mustahil dapat dilaksanakan apabila tidak didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencukupi kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perencanaan dan penganggaran yang tepat sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, salah satu tahap penting yang perlu dilakukan dalam menyusun rencana pembangunan daerah adalah analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai atau mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pemahaman terhadap tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah perlu dicermati pula kondisi kinerja keuangan daerah baik kinerja keuangan daerah pada masa lalu maupun kebijakan yang melandasinya.

2.2.1. Analisis Kapasitas Fiskal Daerah

Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi dan kewenangan-kewenanganyang diekspresikan dalam wujud kebutuhan fiskal, setiap daerah memiliki dan dibekali kapasitas keuangan. Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan sumber-sumber yang dimilikinya.

Otonomi fiskal daerah diukur melalui seberapa besar peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pada periode tahun 2020-2024 nilai otonomi fiskal Pemerintah Kota Semarang terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan nilai PAD Kota Semarang lebih besar dari pendapatan transfer.

Dapat dilihat bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Semarang sudah cukup baik karena rasionya sudah lebih dari 50 persen.

Tabel 2.103 Otonomi Fiskal Daerah Tahun 2020-2024

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH	OTONOMI FISKAL DAERAH
2020	4.400.500.838.480	2.024.537.808.307	46,01%
2021	4.822.887.281.737	2.385.944.758.477	49,47%
2022	4.969.436.543.013	2.545.991.747.658	51,23%
2023	5.352.871.275.779	2.835.150.144.867	52,97%
2024	5.467.826.728.481	2.885.308.677.872	52,77%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang, 2020-2024

Kualitas belanja Pemerintah Kota Semarang merupakan aspek penting dalam analisis kesehatan keuangan daerah. Kualitas ini dapat tercermin melalui rasio belanja pegawai, rasio belanja barang dan jasa, dan rasio belanja modal.

Rasio belanja pegawai Pemerintah Kota Semarang periode 2020-2024 memiliki rata-rata sebesar 34,01 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa belanja pegawai di Kota Semarang ada di atas ketentuan pemerintah mengenai batas maksimal belanja pegawai pada APBD, yakni setinggi-tingginya 30 persen dari total belanja daerah. Namun Pemerintah Kota Semarang terus berusaha menekan belanja pegawai setiap tahunnya yang ditunjukkan dengan terus menurunnya persentase rasio belanja pegawai Pemerintah Kota Semarang. Pada tahun 2024, terdapat penambahan alokasi CPNS dan PPPK sehingga terdapat peningkatan belanja pegawai sebesar 1,80%. Belanja Pegawai merupakan komponen terbesar pada belanja operasi. Meskipun demikian, proporsi Belanja Pegawai terus diupayakan untuk dapat memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Penyusunan APBD.

Tabel 2.104 Rasio Belanja Pegawai Tahun 2020-2024

TAHUN	BELANJA PEGAWAI	TOTAL BELANJA DAERAH	RASIO
2020	1.508.689.799.304	4.128.912.545.760	36,54%
2021	1.708.462.916.083	4.764.045.946.157	35,86%
2022	1.569.996.280.372	4.871.946.697.040	32,23%
2023	1.687.456.380.696	5.340.465.513.179	31,60%
2024	1.859.371.617.699	5.499.006.330.559	33,81%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang, 2020-2024

Dalam konteks belanja daerah, pemerintah daerah merupakan salah satu pelaku ekonomi di samping sektor swasta, sektor rumah tangga, dan luar negeri. Belanja pemerintah (*government spending*) dapat menjadi penggerak mesin ekonomi daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan demikian kebijakan penggunaan APBD untuk menggerakkan ekonomi menunjukkan semakin berkualitasnya belanja suatu pemerintah daerah.

Kualitas belanja pemerintah dapat diukur dari penggunaan APBD untuk belanja modal, barang, dan jasa. Penggunaan ini tercermin melalui rasio

belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap total belanja daerah. Semakin tinggi rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio belanja barang dan jasa pada periode 2020-2024 rata-rata 42 persen dari total belanja APBD. Namun rasio tersebut masih menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Penyebab fluktuasi ini karena adanya penyesuaian kebutuhan belanja daerah dan penyesuaian nilai Standar Harga Satuan (SHS).

Tabel 2.105 Rasio Belanja Barang Dan Jasa Tahun 2020-2024

TAHUN	BELANJA BARANG & JASA	TOTAL BELANJA DAERAH	RASIO
2020	1.752.139.551.600	4.128.912.545.760	42,44%
2021	1.983.309.901.739	4.764.045.946.157	41,63%
2022	2.079.157.846.809	4.871.946.697.040	42,68%
2023	2.342.511.823.419	5.340.465.513.179	43,86%
2024	2.292.957.503.574	5.499.006.330.559	41,70%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang, 2020-2024

Rasio belanja modal dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Rata-rata rasio belanja modal Pemerintah Kota Semarang periode 2020-2024 sebesar 18,86 persen dari total belanja APBD.

Tabel 2.106 Rasio Belanja Modal Tahun 2020-2024

TAHUN	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA DAERAH	RASIO
2020	506.420.330.795	4.128.912.545.760	12,27%
2021	953.669.847.702	4.764.045.946.157	20,02%
2022	1.048.844.590.189	4.871.946.697.040	21,53%
2023	1.089.358.396.203	5.340.465.513.179	20,40%
2024	1.103.981.680.801	5.499.006.330.559	20,08%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang, 2020-2024

2.2.2. Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024

Perkembangan kinerja keuangan daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara spesifik pengelolaan keuangan daerah Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kinerja keuangan daerah berkaitan erat dengan dua aspek utama yaitu aspek kinerja pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta aspek kondisi neraca daerah. Dalam pembangunan suatu daerah, penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya daerah yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pengelolaan anggaran secara baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD antara lain penyelerasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*), dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

2.2.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari struktur dan akurasi pendapatan maupun belanja daerah serta neraca daerah. Neraca daerah mencerminkan perkembangan dari kondisi aset yang dimiliki Kota Semarang serta kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana yang

tersedia. Dengan mengacu pada ketentuan terbaru (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019) mengenai pengelolaan keuangan daerah terdapat perubahan pada struktur APBD. Struktur APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 27 ayat (1) merupakan bagian kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Masing-masing komponen akan diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diartikan sebagai seluruh hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Dengan mengacu pada peraturan yang sama, terdapat perubahan pada struktur Pendapatan Daerah yaitu pada rincian pendapatan transfer. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, rincian pendapatan transfer meliputi transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Sesuai dengan peraturan tersebut dana perimbangan diatur sebagai bagian pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Selain dana perimbangan, komponen pendapatan lainnya yang juga dikelompokkan dalam jenis pendapatan transfer pemerintah pusat antara lain: dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa.

Berdasarkan Laporan Keuangan Kota Semarang, pendapatandaerah Kota Semarang meningkat setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat setiap tahun, sedangkan Pendapatan Transfer sempat turun jumlahnya pada tahun 2022. Penurunan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi. Perkembangan pendapatan daerah Kota Semarang tahun 2020-2024 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.107 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	KELEBIHAN / KEKURANGAN
2020	4.288.141.639.040	4.400.500.838.480	102,62%	112.359.199.440
2021	5.115.782.364.563	4.822.887.281.737	94,27%	(292.895.082.826)
2022	5.018.846.406.337	4.969.436.543.013	99,02%	(49.409.863.324)
2023	5.436.449.507.546	5.352.871.275.779	98,46%	(83.578.231.767)
2024	5.231.593.814.823	5.467.826.728.481	104,52%	236.232.913.658

Sumber: Bapenda Kota Semarang, 2025

Tabel 2.108 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
A.	PENDAPATAN DAERAH	4.400.500.838.480	4.822.887.281.737	4.969.436.543.013	5.352.871.275.779	5.467.826.728.481
1.	Pendapatan Asli Daerah	2.024.537.808.307	2.385.944.758.477	2.545.991.747.658	2.835.150.144.867	2.885.308.677.872
1.1.	Pajak Daerah	1.425.695.913.644	1.445.171.299.551	1.956.226.658.076	2.132.818.531.293	2.198.600.674.075
1.2.	Retribusi Daerah	88.681.866.360	96.448.844.019	101.044.938.813	128.708.007.029	539.634.310.123
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53.339.018.950	66.895.891.301	66.717.372.156	73.271.009.532	83.624.549.830
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	456.821.009.353	777.428.723.606	422.002.778.613	500.352.597.013	63.449.143.844
2.	Pendapatan Transfer	2.375.963.030.173	2.436.942.523.260	2.423.444.795.355	2.517.721.130.912	2.582.518.050.609
2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	1.784.073.320.826	1.764.434.028.103	1.843.884.236.636	1.908.875.148.905	2.001.687.134.069
2.1.1.	Dana Perimbangan	1.669.101.931.826	1.699.819.686.103	1.789.632.874.636	1.894.259.369.905	1.970.733.551.069
2.1.1.1.	Dana Transfer Umum	1.345.868.112.857	1.378.943.961.472	1.342.823.674.239	1.397.984.308.055	1.496.620.300.480
2.1.1.1.a	Dana Bagi Hasil (DBH)	162.253.291.857	211.320.991.472	189.701.697.578	189.772.317.337	219.219.888.480
2.1.1.1.b	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.183.614.821.000	1.167.622.970.000	1.153.121.976.661	1.208.211.990.718	1.277.400.412.000
2.1.1.2.	Dana Transfer Khusus (DAK)	323.233.818.969	320.875.724.631	446.809.200.397	496.275.061.850	474.113.250.589
2.1.1.2.a	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	84.623.543.225	87.398.229.538	50.558.597.601	66.329.848.159	14.632.547.321
2.1.1.2.b	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	238.610.275.744	233.477.495.093	396.250.602.796	429.945.213.691	459.480.703.268
2.1.2.	Dana Insentif Daerah	114.971.389.000	64.614.342.000	54.251.362.000	14.615.779.000	30.953.583.000
2.1.3.	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
2.1.4.	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-
2.1.5.	Dana Desa	-	-	-	-	-
2.2.	Transfer Antar-Daerah	446.350.733.837	556.101.342.025	579.265.691.767	608.845.982.007	580.830.916.540
2.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	419.569.268.392	532.561.552.641	551.844.602.271	577.657.021.099	570.096.274.220
2.2.2.	Bantuan Keuangan	26.781.465.445	23.539.789.384	27.421.089.496	31.188.960.908	10.734.642.320
2.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	145.538.975.510	116.407.153.132	294.866.952	-	-
2.3.1.	Hibah	-	-	-	-	-
2.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-
2.3.3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	145.538.975.510	116.407.153.132	294.866.952	-	-

Sumber: Bapenda Kota Semarang, 2025

b. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan pada struktur belanja yang terletak pada klasifikasi belanja daerah. Klasifikasi belanja daerah sebagai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Berikut adalah perkembangan realisasi belanja daerah Kota Semarang dalam lima tahun terakhir. Belanja Pemerintah Kota Semarang terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Belanja Operasi dan Belanja Modal juga selalu meningkat, sedangkan Belanja Tidak Terduga terus menurun. Perkembangan belanja daerah Kota Semarang tahun 2020-2024 dapat terlihat pada tabel 2.157.

Tabel 2.109 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
B.	BELANJA DAERAH	4.128.912.545.760	4.764.045.946.157	4.871.946.697.040	5.340.465.513.179	5.499.006.330.559
1.	Belanja Operasi	3.432.339.090.104	3.781.987.198.191	3.813.761.587.856	4.245.924.121.376	4.391.696.983.728
1.1.	Belanja Pegawai	1.508.689.799.304,00	1.708.462.916.083	1.569.996.280.372	1.687.456.380.696	1.859.371.617.699
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.752.139.551.600,00	1.983.309.901.739	2.079.157.846.809	2.342.511.823.419	2.292.957.503.574
1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	234.143.184.455
1.5.	Belanja Hibah	162.182.155.200,00	85.550.563.669	159.139.881.925	208.900.517.261	5.224.678.000
1.6.	Belanja Bantuan Sosial	9.327.584.000,00	4.663.816.700	5.467.578.750	7.055.400.000	
2.	Belanja Modal	1.089.358.396.203	953.669.847.702	1.048.844.590.189	1.089.358.396.203	1.103.981.680.801
3.	Belanja Tidak Terduga	190.153.124.861	28.388.900.264	9.340.518.995	5.182.995.600	3.327.666.030
4.	Belanja Transfer	-	-	-	-	-
4.1.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Semarang, 2025

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah Kota Semarang merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari beberapa komponen, antara lain:

- (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- (b) Pencairan Dana Cadangan;
- (c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- (d) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- (e) Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah; dan
- (f) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan komponen pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

- (a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
- (b) Penyertaan Modal Daerah;
- (c) Pembentukan Dana Cadangan;
- (d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan
- (e) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan juga terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2023, namun menurun jumlahnya pada tahun 2024 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.110.

Tabel 2.110 Realisasi APBD Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	2.024.537.808.307	2.385.944.758.477	2.545.991.747.658	2.835.150.144.867	2.885.308.677.872
	B. Pendapatan Transfer	2.375.963.030.173	2.436.942.523.260	2.423.444.795.355	2.517.721.130.912	2.582.518.050.609
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	145.538.975.510	116.407.153.132	294.866.952	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	4.400.500.838.480	4.822.887.281.737	4.969.436.543.013	5.352.871.275.779	5.467.826.728.481
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	3.432.339.090.104	3.781.987.198.191	3.813.761.587.856	4.245.924.121.376	4.391.696.983.728
	B. Belanja Modal	506.420.330.795	953.669.847.702	1.048.844.590.189	1.089.358.396.203	1.103.981.680.801
	C. Belanja Tak Terduga	190.153.124.861	28.388.900.264	9.340.518.995	5.182.995.600	3.327.666.030
	D. Belanja Transfer	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	4.128.912.545.760	4.764.045.946.157	4.871.946.697.040	5.340.465.513.179	5.499.006.330.559
	SURPLUS/DEFISIT	271.588.292.720	58.841.335.580	97.489.845.973	12.405.762.600	(31.179.602.078)
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	126.790.395.571	288.545.560.942	279.624.248.290	318.939.094.263	288.372.784.863
	B. Pengeluaran Pembiayaan	109.833.127.349	67.762.000.000	58.175.000.000	42.972.000.000	62.703.035.639
	PEMBIAYAAN NETTO	16.957.268.222	220.783.560.942	221.449.248.290	275.967.094.263	225.669.749.224
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	288.545.560.942	279.624.896.522	318.939.094.263	288.372.856.863	194.490.147.146

Sumber: BPKAD Kota Semarang, 2025

d. Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah pada suatu periode tertentu. Laporan neraca akan memberikan informasi penting kepada *stakeholder* internal maupun eksternal (manajemen Pemerintah Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya), di dalamnya adalah jenis akun riil dimana hasil operasional pada periode tersebut akan berpengaruh terhadap nilai neraca seperti besarnya aset, kewajiban yang harus dibayar dan ekuitas yang dimiliki.

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik ekonomi maupun sosial. Aset Kota Semarang didominasi oleh Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, dan Aset Tetap. Aset Lancar merupakan aset yang paling likuid, namun pada pos ini didominasi oleh Piutang atas Pajak Daerah. Pada Investasi Jangka Panjang didominasi oleh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan pada Aset Tetap didominasi oleh Tanah milik pemerintah.

Tabel 2.111 Neraca Daerah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
	A. ASET LANCAR	1.006.101.710.547	972.922.118.058	970.350.377.663	1.181.374.779.052	1.231.303.395.736
	B. INVESTASI JANGKA PANJANG	808.301.131.158	897.368.865.938	978.116.565.962	1.026.832.796.092	1.098.846.664.143
	C. ASET TETAP	19.041.092.600.234	19.457.310.537.540	20.294.230.122.526	21.329.227.666.075	24.321.224.917.449
	D. DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
	E. PROPERTI INVESTASI	-	-	-	227.585.141.723	232.936.357.237
	F. ASET LAINNYA	148.416.639.331	206.056.901.778	225.217.689.308	314.659.957.409	280.286.972.943
	JUMLAH ASET	63.523.204.096.306	65.086.230.332.324	67.931.425.453.723	72.636.553.902.327	82.032.067.640.781
2	KEWAJIBAN	111.173.513.013	115.236.492.308	69.572.784.902	73.626.490.185	75.529.274.089
	A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	93.726.986.564	100.177.802.894	50.894.434.486	57.564.947.714	65.064.765.042
	B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	17.446.526.449	15.058.689.414	18.678.350.416	16.061.542.471	10.464.509.047
	JUMLAH KEWAJIBAN	111.173.513.013	115.236.492.308	69.572.784.902	73.626.490.185	75.529.274.089
3	EKUITAS DANA	20.892.738.568.258	21.418.421.931.007	22.398.341.970.557	24.006.053.850.166	27.089.069.033.419
	Ekuitas Dana	20.892.738.568.258	21.418.421.931.007	22.398.341.970.557	24.006.053.850.166	27.089.069.033.419
	JUMLAH EKUITAS DANA	20.892.738.568.258	21.418.421.931.007	22.398.341.970.557	24.006.053.850.166	27.089.069.033.419
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	21.003.912.081.271	21.533.658.423.315	22.467.914.755.459	24.079.680.340.351	27.164.598.307.508

Sumber: BPKAD Kota Semarang, 2025

Analisis likuiditas diukur menggunakan rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio), dan rasio cepat (quick ratio). Current ratio dihitung dengan membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah dengan kewajiban lancar (utang jangka pendek). Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi hutang menggunakan aset lancarnya.

Dengan ini dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang selama enam tahun terakhir sangat baik. Aset lancar yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban lancarnya.

Tabel 2.112 *Current Ratio* Tahun 2020-2024

TAHUN	ASET LANCAR	KEWAJIBAN LANCAR	CURRENT RATIO
2020	1.006.101.710.547	93.726.986.564	10,73
2021	972.922.118.059	100.177.802.894	9,71
2022	970.350.377.663	50.894.434.486	19,07
2023	1.181.374.779.052	57.564.947.714	20,52
2024	1.231.303.395.736	65.064.765.042	18,92

Sumber: BPKAD Kota Semarang, 2020-2024

Selain itu, Rasio Lancar (quick ratio) membandingkan antara aktiva lancar yang telah dikurangi persediaan dibandingkan dengan kewajiban lancar. Rasio lancar mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajiban dengan cepat. Semakin tinggi nilai rasio cepat, semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang jangka pendek dari aset lancar selain persediaan. Perlu diketahui bahwa aset lancar Pemerintah Kota Semarang didominasi oleh piutang daerah, sehingga rasio ini dipengaruhi oleh kemampuan Pemerintah Kota Semarang merealisasikan piutang menjadi kas.

Tabel 2.113 *Quick Ratio* Tahun 2020-2024

TAHUN	ASET LANCAR - PERSEDIAAN	KEWAJIBAN LANCAR	QUICK RATIO
2020	950.465.304.864	93.726.986.564	10,14
2021	886.461.966.419	100.177.802.894	8,85
2022	891.762.426.341	50.894.434.486	17,52
2023	1.106.860.515.828	57.564.947.714	19,23
2024	1.146.083.677.433	65.064.765.042	17,61

Sumber: BPKAD Kota Semarang, 2020-2024

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu pemerintah daerah dikatakan solvabel apabila pemerintah daerah tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutang, berarti pemerintah daerah tersebut dalam keadaan insolvable. Rasio ini akan menggambarkan kemampuan nilai aset digunakan sebagai alternatif pelunasan hutang apabila terjadi gagal bayar. Oleh karena itu semakin besarnya nilai rasio menunjukkan semakin kecil kemungkinannya pemerintah daerah menghadapi kesulitan keuangan.

Tabel 2.114 Rasio Solvabilitas Tahun 2020-2024

TAHUN	TOTAL AKTIVA (ASET)	TOTAL UTANG (KEWAJIBAN)	RASIO SOLVABILITAS
2020	21.003.912.081.271	111.173.513.013	188,93
2021	21.533.658.423.315	115.236.492.308	186,86
2022	22.467.914.755.459	69.572.784.902	322,94
2023	24.079.680.340.351	73.626.490.185	327,05
2024	27.164.598.307.508	73.626.490.185	368,95

Sumber: BPKAD Kota Semarang, 2020-2024

2.2.3. Kerangka Pendanaan

Kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang dalam kurun waktu lima tahun mendatang untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal dalam rangka perwujudan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah pada tahun-tahun sebelumnya, serta data-data pendukung lain yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, termasuk dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun 2020-2024 berdasarkan Laporan Keuangan Kota Semarang. Pada bagian ini akan diuraikan hasil perhitungan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang.

2.2.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah dilakukan dengan menggunakan data historis lima tahun terakhir. Adapun perhitungan proyeksi dilakukan pada masing-masing komponen pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Transfer dengan menggunakan sejumlah alternatif metode perhitungan yang dianggap tepat/sesuai untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Perbedaan metode perhitungan proyeksi yang digunakan pada masing-masing komponen (sub komponen) pendapatan daerah menyesuaikan pada ketersediaan dan karakter data yang tersedia serta beberapa asumsi lain atau tambahan yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan proyeksi.

Proyeksi pendapatan asli daerah disusun dengan mempertimbangkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku mempertimbangkan adanya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menjadi komponen Pajak Daerah yang dalam penghitungannya telah diselaraskan dengan perhitungan proyeksi pendapatan. Selaras dengan ketentuan tersebut, maka pengalokasian belanja yang berasal dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB akan dialokasikan sesuai ketentuan, antara lain untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak.

Dari hasil perhitungan proyeksi masing-masing komponen pendapatan daerah, selanjutnya ditentukan proyeksi hasil perhitungan pendapatan daerah yang merupakan akumulasi (penjumlahan) dari hasil proyeksi masing-masing komponen pendapatan. Dari hasil perhitungan proyeksi yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa secara agregat pendapatan daerah Kota Semarang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (tabel 2.115). Untuk tahun 2026-2030, pendapatan daerah rata-rata meningkat sebesar 5,04%.

Jika dilihat dari masing-masing komponen, seluruh komponen pendapatan diperkirakan akan dapat meningkat. Pajak Daerah selain opsen diasumsikan sama dengan perkiraan penerimaan di tahun 2025 diperkirakan rata-rata akan dapat naik sekitar 7%. Khusus untuk opsen PKB dan BBNKB diasumsikan sama dengan perkiraan penerimaan di tahun 2025. Dari sisi PAD, proporsinya terhadap total pendapatan daerah selama lima tahun ke depan (2026-2030) rata-rata sebesar 62,64% yang menunjukkan kemandirian fiskal yang cukup baik.

Untuk pendapatan yang berasal dari Dana Transfer, proyeksi disusun dengan tetap memperhatikan kebijakan di tahun berjalan dari Kementerian Keuangan RI, khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana yang bersumber dari APBN dan bersifat *given* (pemberian), maka proyeksi kedua dana tersebut yang tercantum dalam dokumen ini bersifat dinamis serta mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat yang penyalurannya akan mengikuti dinamika perkembangan penerimaan dalam negeri.

Untuk mencapai target pendapatan daerah, terutama PAD tahun 2026-2030 dilakukan upaya melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap semua sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan dan tidak mengabaikan prinsip pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Upaya yang ditempuh antara lain melalui:

- Tahun 1. Pemetaan dan akurasi data potensi daerah untuk meningkatkan PAD, terutama dalam penentuan NJOP secara lebih berkeadilan.
- Tahun 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan pajak dan retribusi melalui peningkatan penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi sistem yang selaras dengan program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD).
- Tahun 3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi pendapatan transfer.
- Tahun 4. Meningkatkan optimalisasi sumber pendapatan yang masih belum optimal realisasinya.
- Tahun 5. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

Sedangkan dari sektor opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), terdapat upaya sebagai berikut:

- Tahun 1. Pendataan Objek Pajak PKB. Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data objek pajak daerah, khususnya kendaraan bermotor, guna memastikan akurasi data serta mengidentifikasi potensi penerimaan dari opsen PKB dan BBNKB.
- Tahun 2. Sosialisasi Penanganan PKB. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak terkait kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor, termasuk penyampaian informasi mengenai sanksi administratif atas keterlambatan

pembayaran. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Tahun 3. Penyampaian Surat Tagihan PKB. Mengirimkan surat tagihan kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari upaya penagihan aktif dan terstruktur, guna mendorong percepatan realisasi penerimaan.

Tahun 4. Penyampaian Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo PKB. Menyampaikan surat pemberitahuan jatuh tempo kepada wajib pajak sebelum masa pembayaran berakhir sebagai bentuk pengingat agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran.

Tabel 2.115 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN DAERAH	5.467.826.728.481	5.692.793.899.749	6.012.856.948.037	6.324.077.802.913	6.653.505.757.819	6.989.753.575.357
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.885.308.677.872	3.785.335.467.444	4.041.961.764.502	4.286.905.869.897	4.547.053.738.357	4.810.843.834.113
4.1.01	Pajak Daerah	2.198.600.674.075	3.052.720.727.879	3.228.611.178.830	3.416.813.961.348	3.618.190.938.643	3.833.664.304.348
4.1.02	Retribusi Daerah	539.634.310.123	598.241.264.953	640.473.428.417	685.666.831.454	733.976.964.080	785.675.033.572
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	83.624.549.830	87.688.500.368	122.633.129.731	130.306.083.692	136.495.315.418	128.462.711.698
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	63.449.143.844	46.684.974.244	50.244.027.524	54.118.993.402	58.390.520.217	63.041.784.496
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.582.518.050.609	1.907.458.432.306	1.970.895.183.535	2.037.171.933.015	2.106.452.019.462	2.178.909.741.243
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.001.687.134.069	1.615.870.957.613	1.663.308.885.843	1.712.644.926.248	1.763.981.128.746	1.817.426.019.021
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	474.113.250.589	291.587.474.692	307.586.297.691	324.527.006.767	342.470.890.716	361.483.722.223
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-

Sumber: Bapenda dan BPKAD Kota Semarang, 2025

2.2.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Analisis proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kota Semarang untuk lima tahun mendatang dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai belanja langsung atau belanja program RPJMD. Analisis proyeksi belanja juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan belanja tidak langsung daerah serta pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga. Sedangkan, belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai dan barang dan jasa. Penyusunan kerangka APBD disusun secara cermat dengan memperhatikan semua ketentuan yang ada, termasuk terkait dengan batas defisit. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 tahun 2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025.

Analisis hasil proyeksi belanja selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran yang juga berkaitan dengan kapasitas penerimaan pembiayaan daerah untuk lima tahun mendatang. Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2026-2030 diarahkan pada:

1. Mengutamakan belanja daerah yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah/Prioritas Wali Kota, pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, pencapaian Indikator Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Daerah.
2. Memprioritaskan belanja daerah yang berdampak langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Utama daerah yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
3. Mengutamakan belanja yang selaras dan mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
4. Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal (SPM).
5. Mengoptimalkan pemenuhan belanja daerah yang sudah ditentukan besaran dan penggunaannya (*mandatory spending*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Mendorong optimalisasi pemanfaatan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang bermanfaat langsung ke masyarakat.
7. Mengakomodir belanja operasional yang merupakan belanja wajib dan mengikat karena terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang merupakan belanja kebutuhan aparatur yang wajib dipenuhi. Besarannya tiap tahunnya memperhitungkan kebijakan kepegawaian serta kondisi makro ekonomi yang ada.
8. Mengoptimalkan upaya mengakomodasi masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum dan koordinasi dengan tetap

memperhatikan ketentuan yang berlaku, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

9. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial disusun secara cermat dan selektif dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pembiayaan Pemilu dianggarkan melalui mekanisme Hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Pada tahun 2028 dan 2029 dialokasikan belanja untuk menunjang pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah beserta seluruh rangkaiannya, baik di Belanja Hibah maupun belanja Operasi.
11. Menetapkan Belanja Tidak Terduga setiap tahunnya untuk membiayai kegiatan yang tidak terencana yang dapat disesuaikan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
12. Secara rata-rata Proyeksi Belanja Pegawai dalam Proyeksi Belanja Operasi tahun 2025-2030 mencapai 30,55% dari total belanja daerah. Dengan mengacu kepada cara perhitungan sesuai dengan regulasi, maka pada tahun 2027 Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar 29,48%, sehingga sesuai dengan ketentuan.
13. Kota Semarang termasuk daerah dengan kondisi fiskal sangat tinggi dengan batasan defisit sebesar 3,75%. Di tahun 2027 besaran defisit diperkirakan sebesar 5,27% dan di tahun 2028 sebesar 4,25%. Kondisi ini tahun 2027 dan 2028 ini disebabkan karena ada rencana untuk melakukan pinjaman daerah untuk pembangunan SORR Mangkang-Mijen sehingga Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD harus mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

2.2.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pembiayaan daerah Kota Semarang untuk lima tahun mendatang. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan pembiayaan daerah pada RPJMD 2025-2029 diproyeksikan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan dari sumber pendanaan di luar APBD sebagai bentuk pengembangan alternatif pembiayaan pembangunan daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan akan digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- 1 Penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000.000 yang dapat disesuaikan dengan kondisi pengelolaan keuangan tahun berjalan.

- 2 Pengembangan alternatif pembiayaan pembangunan daerah di luar APBD untuk membiayai kegiatan prioritas daerah yang tidak dapat dipenuhi dari APBD melalui mekanisme pinjaman daerah yang disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pinjaman daerah ini direncanakan digunakan untuk pembebasan lahan dan pembangunan konstruksi fisik Outer Ring Road Semarang pada segmen Mangkang-Mijen. Pemanfaatan CSR juga akan lebih didorong melalui pembentukan Forum CSR yang akan mengkonsolidasi seluruh potensi pendanaan yang berasal dari CSR.
- 3 Pembayaran cicilan pokok dan bunga hutang pinjaman dialokasikan pada pengeluaran pembiayaan.
- 4 Menyediakan pinjaman daerah berupa Dana Bergulir pada masyarakat Rp 4.000.000.000 tiap tahunnya yang pelaksanaan tiap tahunnya dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- 5 Penganggaran penyertaan modal BUMD disusun dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang. Realisasi penyertaan modal dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta hasil evaluasi kinerja BUMD untuk mendorong kemandirian.
- 6 Skema pembiayaan KPBU untuk PSEL Jatibarang yang dilakukan dengan berpedoman pada regulasi terbaru.

Dengan keterbatasan APBD, maka daerah masih dihadapkan pada kesenjangan antara kebutuhan pendanaan pembangunan dengan ketersediaan anggaran pembangunan. Kebutuhan investasi penyediaan infrastruktur daerah untuk mendorong peningkatan konektivitas wilayah serta peningkatan pelayanan publik masih sangat tinggi, namun ketersediaan APBD masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang ada. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pendanaannya, dibutuhkan adanya peningkatan pendapatan daerah serta alternatif pendanaan lain seperti penguatan pembiayaan melalui pendanaan inovatif yang berasal di luar APBD. Oleh sebab itu dalam lima tahun ke depan akan terus didorong untuk pemanfaatan potensi pendanaan di luar APBD yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, Pinjaman Daerah, CSR perusahaan, filantropi, bantuan donor dan skema pendanaan lainnya. Dengan demikian, maka pembangunan di Kota Semarang tidak sepenuhnya berasal dari APBD sehingga diharapkan akan mampu mempercepat pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.116 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026-2030

NO.	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
A	PENDAPATAN DAERAH	5.467.012.574.623	5.692.793.899.749	6.012.856.948.037	6.324.077.802.913	6.653.505.757.819	6.989.753.575.357
B	BELANJA DAERAH	5.499.006.330.559	5.723.933.899.749	6.329.501.064.230	6.593.072.081.432	6.641.486.332.045	6.755.685.522.879
1	Belanja Operasional	4.391.696.983.728	4.913.734.916.933	5.106.483.983.502	5.281.527.381.913	5.475.634.995.684	5.589.732.751.063
2	Belanja Modal	1.103.981.680.801	755.198.982.816	1.163.017.080.728	1.246.544.699.519	1.095.851.336.361	1.090.952.771.816
3	Belanja Tak Terduga	3.327.666.030	55.000.000.000	60.000.000.000	65.000.000.000	70.000.000.000	75.000.000.000
4	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-
	Surplus / (Defisit)	(31.179.602.078)	(31.140.000.000)	(316.644.116.193)	(268.994.278.519)	12.019.425.774	234.068.052.478
C	PEMBIAYAAN DAERAH	225.669.749.224	31.140.000.000	316.644.116.193	268.994.278.519	(12.019.425.774)	(234.068.052.478)
1	Penerimaan Pembiayaan	288.372.784.863	200.000.000.000	500.444.441.912	641.642.052.703	391.262.689.545	200.000.000.000
2	Pengeluaran Pembiayaan	62.703.035.639	168.860.000.000	183.800.325.718	372.647.774.184	403.282.115.318	434.068.052.478
	PEMBIAYAAN NETTO	225.669.749.224	31.140.000.000	316.644.116.193	268.994.278.519	(12.019.425.774)	(234.068.052.478)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	194.490.147.146	-	-	-	-	-

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Semarang, 2025

Tabel 2.117 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

NO.	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN						
	A. Pendapatan Asli Daerah	2.885.308.677.872	3.785.335.467.444	4.041.961.764.502	4.286.905.869.897	4.547.053.738.357	4.810.843.834.113
	B. Pendapatan Transfer	2.582.518.050.609	1.907.458.432.306	1.970.895.183.534	2.037.171.933.015	2.106.452.019.461	2.178.909.741.244
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	5.467.826.728.481	5.692.793.899.749	6.012.856.948.037	6.324.077.802.912	6.653.505.757.818	6.989.753.575.357
2	BELANJA						
	A. Belanja Operasi	4.391.696.983.728	4.913.734.916.933	5.106.483.983.502	5.281.527.381.913	5.475.634.995.684	5.589.732.751.063
	B. Belanja Modal	1.103.981.680.801	755.198.982.816	1.163.017.080.728	1.246.544.699.519	1.095.851.336.361	1.090.952.771.816
	C. Belanja Tak Terduga	3.327.666.030	55.000.000.000	60.000.000.000	65.000.000.000	70.000.000.000	75.000.000.000
	D. Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	5.499.006.330.559	5.723.933.899.749	6.329.501.064.230	6.593.072.081.432	6.641.486.332.045	6.755.685.522.879
	SURPLUS/DEFISIT	(31.179.602.078)	(31.140.000.000)	(316.644.116.193)	(268.994.278.520)	12.019.425.774	234.068.052.478
3	PEMBIAYAAN						
	A. Penerimaan Pembiayaan	288.372.784.863	200.000.000.000	500.444.441.912	641.642.052.703	391.262.689.545	200.000.000.000
	B. Pengeluaran Pembiayaan	62.703.035.639	168.860.000.000	183.800.325.718	372.647.774.184	403.282.115.318	434.068.052.478
	PEMBIAYAAN NETTO	225.669.749.224	31.140.000.000	316.644.116.193	268.994.278.519	(12.019.425.774)	(234.068.052.478)

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Semarang, 2025

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Gambaran kondisi Kota Semarang yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan. Untuk itu, tentunya diperlukan analisis yang bersifat adaptif dan solutif atas berbagai kondisi masyarakat yang belum ideal tersebut. Analisis isu strategis merupakan sebuah jawaban dimana dapat menghasilkan rumusan isu yang bersifat adaptif dan solutif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan suatu daerah. Di sisi lain, isu strategis juga merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Perumusan permasalahan dan isu-isu strategis Kota Semarang juga tidak terlepas dari kebijakan di tingkat nasional dan provinsi. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi baik di level nasional dan Provinsi Jawa Tengah turut diperhatikan agar tercipta kesinambungan terhadap isu-isu dan permasalahan yang harus diselesaikan bersama.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur di suatu wilayah dengan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Proses ini melibatkan berbagai upaya dan strategi yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan saat ini, serta menciptakan peluang baru, sehingga wilayah tersebut dapat berkembang secara lebih seimbang dan berkelanjutan. Akan tetapi, dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, sering kali dihadapi berbagai masalah dan isu yang kompleks. Salah satu permasalahan utama adalah kesenjangan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang tertinggal. Kesenjangan ini mencerminkan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan dasar, pendidikan, dan kesempatan ekonomi, yang sering kali menghambat pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah.

Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk sumber daya alam, finansial, maupun manusia, menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa sumber daya yang memadai, sulit untuk melaksanakan program-program pembangunan secara efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Tata kelola pemerintahan yang tidak optimal juga dapat memperburuk situasi. Masalah seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar lembaga sering kali mengakibatkan pemborosan sumber daya dan pelaksanaan yang tidak efisien.

Kemungkinan terjadinya bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, atau kekeringan, hingga longsor juga dapat memberikan dampak negatif yang besar terhadap proses pembangunan. Bencana alam dapat merusak infrastruktur, mengakibatkan kerugian ekonomi, dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Isu sosial budaya, seperti konflik antar kelompok, perbedaan nilai, dan ketidaksetaraan gender, juga memainkan peran penting dalam pembangunan daerah. Dalam mengatasi masalah-masalah ini dibutuhkan pendekatan yang sensitif dan inklusif agar proses pembangunan dapat diterima dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di samping itu, struktur ekonomi daerah yang tidak seimbang, misalnya ketergantungan pada satu sektor ekonomi atau kekurangan dalam diversifikasi, dapat menghambat pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam pembangunan daerah sangat diperlukan. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan langkah krusial untuk menciptakan daerah yang lebih maju, adil dan berkelanjutan.

Pembahasan mengenai permasalahan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah ini sangat penting sebagai dasar untuk merumuskan solusi yang tepat. Solusi ini kemudian dapat dituangkan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan kerjasama dari berbagai pihak, Kota Semarang dan daerah lainnya memiliki potensi untuk mengatasi tantangan yang ada, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk.

2.3.1.1. Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang Perlu Dioptimal

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Kota Semarang telah menjadi tantangan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Meskipun Kota Semarang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, masalah ini ternyata masih belum sepenuhnya teratasi. Kemiskinan di Semarang sering kali disebabkan oleh ketidakmerataan dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa daerah di kota ini berkembang pesat, sementara daerah lain tetap tertinggal. Hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam kualitas hidup dan akses terhadap peluang ekonomi.

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Kota Semarang saat ini. Fenomena ini mencerminkan tantangan besar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang terampil atau tidak memiliki pendidikan serta keterampilan yang memadai. Kelompok penduduk ini sering kali mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu penyebab utama dari tingginya angka pengangguran adalah ketidakmampuan sektor-sektor ekonomi dominan di Kota Semarang, seperti perdagangan, jasa, dan industri, untuk menyerap seluruh angkatan kerja yang ada. Meskipun sektor-sektor ini memainkan peran penting dalam perekonomian kota, kapasitas sektor-sektor tersebut dalam menciptakan lapangan kerja sering kali tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Akibatnya, banyak individu yang memiliki potensi dan kemauan untuk bekerja, tetapi tidak dapat menemukan kesempatan kerja yang sesuai dengan keterampilan atau kualifikasi mereka. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, yang pada gilirannya memperburuk masalah pengangguran di Kota Semarang.

Masalah dalam kualitas layanan kesehatan dan pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan penduduk untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan berkelanjutan. Layanan kesehatan yang tidak memadai dapat menghambat produktivitas individu, menyebabkan absensi

kerja yang tinggi, serta meningkatkan beban biaya kesehatan yang dapat membatasi potensi penduduk dalam mencari atau mempertahankan pekerjaan. Sementara itu, kualitas pendidikan yang rendah atau akses yang terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas dapat mengakibatkan kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Sebagai kota terbesar sekaligus Ibukota Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dan kota/kabupaten lain di sekitarnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang di tahun 2024 mencapai 5,62%, terjadi penurunan dari capaian tahun 2023 sebesar 5,79%. Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Semarang sebesar 5,82%.

Aktivitas ekonomi yang tinggi di Kota Semarang membawa ikutan berupa produksi sampah yang juga terus meningkat. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024, Kota Semarang menghasilkan sampah makanan (*food loss* dan *food waste*) sebanyak 264.020,334 ton/tahun yang mengalami peningkatan dari tahun 2022..

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal yang perlu dioptimalkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118 Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang Perlu Dioptimalkan

MASALAH	AKAR PERMASALAHAN
Belum optimalnya pengembangan ekonomi berbasis keunggulan lokal	Masih kurangnya kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang inovatif
	Pengembangan potensi ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan
	Kapasitas dan kualitas Usaha Mikro masih belum optimal
	Aktivitas investasi masih perlu ditingkatkan
	Pengembangan objek wisata di Kota Semarang belum optimal
	Masih kurangnya aktivitas promosi terkait pariwisata dan budaya Kota Semarang
	Keterbatasan jumlah lahan pertanian dan perikanan baik konvensional maupun pertanian dan perikanan perkotaan
	Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman akibat meningkatnya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan penambahan luas lahan
	Kesulitan memperoleh akses sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
	Belum optimalnya riset dan inovasi di bidang pertanian dan perikanan
	Masih tingginya <i>food loss</i> dan <i>food waste</i>
Masih tingginya tingkat pengangguran	Belum sesuaiya kualifikasi tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pasar kerja
	Persentase tenaga kerja terampil, kreatif, adaptif, dan inovatif di Kota Semarang masih rendah
	Jumlah fasilitasi pelatihan kerja di Kota Semarang masih rendah
	Perlindungan terhadap pekerja sektor informal belum tersedia

2.3.1.2. Kualitas Sumber Daya Manusia Perlu Terus Ditingkatkan untuk Mencapai Kesejahteraan

Sumber daya manusia merupakan subjek sekaligus objek utama dalam pembangunan daerah. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM melalui sektor pendidikan dan kesehatan adalah hal yang mutlak diperlukan dalam pembangunan di Kota Semarang. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Selanjutnya, hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM antara lain belum optimalnya layanan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua masyarakat secara berkeadilan, masih belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Permasalahan terkait pendidikan dan kesehatan terangkum dalam salah satu indikator visi, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di tahun 2024, IPM Kota Semarang mencapai nilai 85,24. Meskipun relatif tinggi, nilai IPM Kota Semarang masih perlu ditingkatkan, terutama jika dilihat dari komponen-komponen pembentuk IPM. Capaian indikator komposit IPM Kota Semarang pada tahun 2024 adalah: (1) Usia Harapan Hidup sebesar 78,23 tahun; (2) Harapan Lama Sekolah sebesar 15,57 tahun; serta (3) Rata-rata Lama Sekolah sebesar 11,05 tahun.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia Perlu Terus Ditingkatkan untuk Mencapai Kesejahteraan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.119 Kualitas Sumber Daya Manusia Perlu Terus Ditingkatkan untuk Mencapai Kesejahteraan

MASALAH	AKAR PERMASALAHAN
Masih belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata pada wilayah-wilayah tertentu
	Masih terdapat kasus kematian ibu, bayi, dan balita serta kasus gizi buruk dan stunting pada balita
	Keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan perlu ditingkatkan
	Penanganan penyakit menular dan tidak menular belum optimal
	Belum optimalnya promosi kesehatan kepada masyarakat
Belum optimalnya layanan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua masyarakat secara berkeadilan	Fasilitas pendidikan yang memadai pada pendidikan usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah perlu ditingkatkan
	Kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah perlu ditingkatkan
	Masih cukup rendahnya rerata angka literasi dan numerasi pada semua jenjang
	Masih cukup rendahnya angka rata-rata lama sekolah
	Masih kurangnya literasi digital pada semua jenjang

2.3.1.3. Kesejahteraan Masyarakat yang Perlu Dioptimalkan

Dewasa ini, tiap wilayah sudah mulai berfokus dan saling berlomba dalam penyelesaian permasalahan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan. Permasalahan ini muncul disaat terdapat kesenjangan (*gap*) antara hasil kinerja pada aspek kesejahteraan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah daerah lewat berbagai standar capaian atau pelayanan minimal yang ditetapkan. Permasalahan ini tentu harus diatasi pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab dalam peningkatan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Pada konteks Kota Semarang, permasalahan

pada aspek kesejahteraan meliputi: pemenuhan hak dasar bagi seluruh masyarakat; pemberdayaan, perlindungan dan penyelenggaraan jaminan sosial; inklusivitas dalam masyarakat; dan kondusivitas wilayah.

Secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat melalui indikator tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kota Semarang di tahun 2024 adalah sebesar 4,03%. Tingkat kemiskinan ini juga dapat kita jabarkan berdasarkan kemiskinan multidimensi yang memuat dimensi pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar/standar hidup. Dalam dimensi pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 5-6 tahun sebesar 97,57% pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 85,87%. APK dan APM SD/MI pada tahun 2024 masing-masing sebesar 103,12% dan 91,03% sedangkan angka putus sekolah cenderung tetap ada sebesar 0,01%. Pada bidang sarana prasarana, bangunan sekolah SD/MI kondisi baik sebesar 87,00%. Namun, fasilitas pendidikan berupa gedung SMP/MTs dengan kondisi baik sedikit mengalami penurunan 0,01% menjadi sebesar 92,46%.

Pada dimensi kesehatan, pada tahun 2024 angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup adalah 80,44 meningkat dari tahun sebelumnya yang 79,80. Peningkatan juga terjadi pada Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup yang masing-masing meningkat dari 7,44 menjadi 9,08 dan 7,09 menjadi 7,99. Sementara Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk (Wasting: BB/TB) pada Balita membaik dari 0,91 menjadi 0,89.

Pada dimensi standar hidup, RTLH yang berhasil ditangani pada tahun 2024 sebanyak 1.862 unit dan baru 98,48% rumah tangga di Kota Semarang yang menggunakan sumber air minum terlindung. Persentase capaian jumlah rumah tangga di Kota Semarang yang menggunakan tangki septik individu aman (yang pernah disedot dan dibuang di IPLT) hanya sebesar 2,13%. Selain itu total masyarakat yang terlayani adalah 8.819 KK atau sekitar 2,19% dari jumlah penduduk Kota Semarang.

Dalam konteks kondusivitas wilayah, masih terdapat angka kriminalitas sebanyak 1.221 kejadian. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan indeks demokrasi juga terus menurun capaiannya.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Kesejahteraan Masyarakat yang Perlu Dioptimalkan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120 Kesejahteraan Masyarakat yang Perlu Dioptimalkan

MASALAH	AKAR PERMASALAHAN
Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat masih perlu ditingkatkan	Masih adanya masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh dengan kondisi sarana prasarana lingkungan yang tidak memadai
	Penyediaan jaringan air bersih dan air minum belum mencapai standar
	Penanganan permasalahan kesejahteraan masyarakat belum optimal

MASALAH	AKAR PERMASALAHAN
	Jumlah produksi tanaman pangan mengalami penurunan
Kondusivitas wilayah perlu terus ditingkatkan	Upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masih belum optimal
	Masih adanya ancaman kerawanan sosial politik
	Masih belum maksimalnya kerukunan umat beragama
Inklusivitas dalam masyarakat belum tercapai	Pengarusutamaan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu terus ditingkatkan
Pelestarian warisan budaya masih perlu ditingkatkan	Cagar budaya yang dilestarikan di Kota Semarang belum mencapai 100%
	Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga warisan budaya
	Keterbatasan sumber daya seperti dana, sumber daya manusia dan fasilitas dalam pelestarian budaya

2.3.1.4. Infrastruktur Kota dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Perlu Ditingkatkan

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Selain itu, Kota Semarang menghadapi tantangan serius terkait peningkatan volume kendaraan bermotor yang berdampak langsung terhadap kemacetan dan keselamatan lalu lintas, khususnya di ruas-ruas jalan utama pada jam sibuk. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kondisi ini memperburuk tingkat kemacetan yang mengganggu kelancaran mobilitas warga dan menghambat aktivitas ekonomi kota. Beberapa permasalahan utama yang memicu kemacetan di Semarang meliputi dominasi penggunaan kendaraan pribadi, terbatasnya kapasitas infrastruktur jalan, serta rendahnya kualitas dan pilihan transportasi umum. Peralihan masyarakat dari transportasi massal ke kendaraan pribadi menjadi penyumbang utama kepadatan lalu lintas. Di sisi lain, infrastruktur jalan yang ada belum mampu mengakomodasi lonjakan jumlah kendaraan, terutama di kawasan dengan kepadatan tinggi. Selain itu, sistem transportasi umum yang kurang memadai dari segi kenyamanan, aksesibilitas, dan efisiensi menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi.

Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan

ekonomi, sehingga wilayah Kota Semarang akan mampu menjadi wilayah yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan.

Di sisi lain, masalah lingkungan yang serius juga semakin mempengaruhi kualitas hidup di kawasan perkotaan. Polusi udara yang merajalela, pencemaran air, penumpukan sampah, kurangnya ruang terbuka hijau dan banjir menjadi isu yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Ancaman perubahan iklim juga menambah kompleksitas tantangan ini, dengan dampak seperti cuaca ekstrem dan naiknya permukaan air laut yang semakin nyata. Hal ini ditandai dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga masih perlu perhatian dan ditingkatkan. Capaian IKLH Kota Semarang tahun 2024 adalah 59,41%.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Infrastruktur Kota dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Perlu Ditingkatkan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.121 Infrastruktur Kota dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Perlu Ditingkatkan

MASALAH	AKAR PERMASALAHAN
Penyediaan dan kualitas infrastruktur kota masih perlu ditingkatkan	Penyediaan dan pemeliharaan jalan dan perlengkapannya belum mencapai standar
	Kurangnya sarana dan prasarana transportasi publik yang nyaman (jalan raya, trotoar)
	Belum optimalnya promosi untuk menggunakan transportai umum
	Mahalnya investasi transportasi publik ramah lingkungan
	Pengembangan kawasan strategis masih belum maksimal
Pengendalian kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan masih belum optimal	Kualitas lingkungan hidup masih rendah
	Penanganan dan pengelolaan sampah secara terpadu belum optimal
	Sampah dan limbah menjadi polusi udara, air, dan tanah
Penguatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana perlu terus ditingkatkan	Penyediaan infrastruktur bagi kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana belum optimal
	Penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase belum mencapai standar

2.3.1.5. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan

Permasalahan tata kelola pemerintahan di Kota Semarang mencakup beberapa isu yang perlu ditingkatkan kinerjanya guna menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas. Melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Dalam urusan pengawasan, permasalahan yang ditemui adalah

semakin kompleksnya penugasan pengawasan di Inspektorat Kota Semarang baik yang telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan maupun penugasan mandatory menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan penugasan.

Terkait akuntabilitas kinerja pemerintah meskipun capaian setiap tahunnya selalu meningkat, tetapi juga masih perlu ditingkatkan dalam hal transformasi sistem kerja yang lebih transparan dan akuntabel, digitalisasi dan integrasi sistem dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, serta sektor swasta, akan menjadi elemen penting dalam memperkuat inovasi di bidang pelayanan publik.

Dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang biasa disebut SPBE, meskipun Indeks SPBE Kota Semarang menunjukkan tren positif, tantangan tetap ada, seperti perlunya penyempurnaan sistem yang terus berkembang, peningkatan keamanan data, serta mengatasi kesenjangan digital di kalangan masyarakat. Dengan indeks SPBE yang tahun ini masih berada di angka 3,89 menunjukkan bahwa penerapan SPBE di Kota Semarang masih tergolong sedang dan belum mencapai tingkat kematangan yang optimal, sedangkan pada tahun-tahun 2045 ditargetkan indeks SPBE mencapai 5,00.

Pelayanan publik juga menjadi tantangan bagi pemerintahan dewasa ini. Dengan capaian Indeks Pelayanan Publik yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir, upaya peningkatan pelayanan publik di Kota Semarang harus menjadi perhatian serius. Beban pelayanan yang semakin besar menuntut adanya penyesuaian dalam mekanisme kerja, baik dari segi efisiensi birokrasi, pemanfaatan teknologi, maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang menangani layanan publik secara langsung. Jika sistem tidak berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat, maka efektivitas pelayanan dapat menurun, menyebabkan ketidakpuasan dan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tabel 2.122 Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan

MASALAH	AKAR PERMASALAHAN
Penyelenggaraan manajemen pemerintahan perlu ditingkatkan.	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang transparan
	Belum optimalnya evaluasi terhadap hasil pengendalian internal pemerintah
	Sumber daya aparatur dan mekanisme pengawasan perlu ditingkatkan
Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan
	Akselerasi SPBE perlu ditingkatkan
	Inovasi dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan

2.3.2. Isu-Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Jika pemerintah daerah mampu memprioritaskan atau membaca peluang dan tantangan untuk memanfaatkan kondisi tersebut, maka tujuan pembangunan di masa depan akan semakin mudah dicapai. Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan peluang atau mengantisipasi tantangan tersebut, kemungkinan untuk mencapai tujuan pembangunan akan semakin sulit.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

2.3.2.1. Isu Strategis Global

Banyaknya isu strategis pada lingkup global dan regional menjadi tantangan sekaligus peluang tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Perubahan kinerja perekonomian, stabilitas politik dan keamanan, kondisi kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, dan lain sebagainya yang terjadi di baik Benua Eropa maupun ASEAN secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi daerah, tak terkecuali Kota Semarang. Beberapa isu global apabila direspon dengan baik akan menjadi faktor pendukung bagi percepatan pembangunan, namun sebaliknya, akan menjadi faktor penghambat apabila pemerintah daerah dan *stakeholder* lainnya gagal menemukan strategi untuk merespon isu tersebut. Berikut merupakan isu pada lingkup global dan regional yang perlu dipertimbangkan bagi pembangunan wilayah:

A. Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kemarian dan meningkatnya usia harapan hidup saat lahir. Di sisi lain, terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Dalam demografi skala mikro,

perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Selain itu, turunnya angka kelahiran disebabkan antara lain oleh fenomena tidak memiliki anak (*childfree*) dan menunda pernikahan.

Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di Kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di Kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

B. Geopolitik dan Geoekonomi

a. Geopolitik

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina yang masih terus berlanjut telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik India-Pakistan, Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan.

Persaingan geopolitik terutama di Kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan.

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik Kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi

mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

b. Geoekonomi

Perekonomian global diperkirakan akan mengalami pertumbuhan signifikan hingga tahun 2050, dengan nilai output yang meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar USD 74 triliun. Lima negara diproyeksikan menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan ini, yaitu Tiongkok, India, Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia, yang secara kumulatif akan menyumbang sekitar 55 persen dari total output global.

Negara berkembang akan memainkan peran yang semakin dominan dalam perekonomian dunia. Pada tahun 2015, negara berkembang telah berkontribusi sebesar 55 persen terhadap output global, dan diperkirakan meningkat menjadi 71 persen pada tahun 2050. Kawasan Asia menjadi pendorong utama, menyumbang hingga 54 persen dari total output dunia. Pertumbuhan ini didukung oleh institusi ekonomi yang kuat, kebijakan makroekonomi yang kredibel, serta investasi jangka panjang di bidang sumber daya manusia dan infrastruktur.

Negara-negara berkembang juga memiliki keunggulan demografis dan tingkat tabungan yang tinggi, yang jika diiringi dengan kebijakan perdagangan terbuka, iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan produktivitas dan inovasi, akan mempercepat pertumbuhan dan mengejar ketertinggalan dari negara maju.

Dalam konteks tersebut, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025, menjadikannya anggota kesepuluh dalam aliansi ekonomi strategis yang sebelumnya terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Langkah ini menandai strategi penting dalam memperluas pengaruh Indonesia di kancah global, mendiversifikasi mitra strategis, serta membuka peluang besar bagi peningkatan investasi dan kerja sama antar negara berkembang (*Global South*). Namun demikian, perlu diantisipasi pula potensi tekanan geopolitik, terutama dalam hubungan dengan negara-negara G7, seiring dinamika global yang semakin kompleks.

Secara struktural, Indonesia memiliki potensi besar untuk memainkan peran geoekonomi strategis melalui beberapa kekuatan utama: sumber daya alam yang melimpah, demografi yang produktif, serta posisi geografis yang menghubungkan jalur perdagangan internasional utama. Dalam konteks ini, Indonesia menjadi simpul penting dalam rantai pasok global, khususnya di sektor energi bersih, mineral strategis, dan manufaktur.

Namun, tantangan global seperti ketegangan perdagangan akibat kebijakan proteksi terbaru dari Amerika Serikat, fragmentasi rantai pasok, krisis pangan dan energi, serta proteksionisme baru menuntut Indonesia untuk memiliki kebijakan yang adaptif. Salah satunya adalah menghadapi

potensi dampak dari kebijakan tarif resiprokal sebesar 47% oleh Amerika Serikat, yang berpotensi menekan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Amerika dan tenaga kerja nasional dimana Industri tekstil Indonesia juga dikhawatirkan kian merosot, dilaporkan bahwa 60 perusahaan tekstil tutup dua tahun terakhir dan 24 ribu buruh tekstil terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2024. Lebih dari itu, PHK di industri kecil dan menengah (IKM) jauh lebih besar, diperkirakan mencapai 1.000 unit dengan tenaga kerja yang kehilangan mata pencaharian ratusan ribu uang.

c. Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan logi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things (IoT)*, *blockchain*, *teknoHyper Connection*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Distributed Ledger Technology (DLT)*, *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automstion (RPA)*, *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, *3D*, dan *Future Technologies*.

Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Disrupsi teknologi akan mempengaruhi banyak sektor kehidupan di masa depan, diantaranya:

1. Digitalisasi usaha pada UMKM dan koperasi dalam operasional usaha dan pemasaran produk usaha;
2. Sektor manufaktur mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri, inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi, serta teknologi hijau termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan;
3. Sektor pendidikan meliputi inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis *Artificial Intelligence (AI)* menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinyu, tanpa terbatas ruang dan waktu;
4. Tergantikannya industri media dengan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), termasuk pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) yang berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan;
5. Pengusaha properti perkantoran dan real estate dapat terdampak akibat dari perkembangan pekerjaan dengan metode jarak jauh (*remote working*) atau *work from anywhere (WFA)*;
6. Cara kerja pemerintah yang dapat terdampak dengan adanya peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya;

7. Proses pembenahan perumusan kebijakan dan penyusunan regulasi dapat terbantu dengan perkembangan teknologi menjadi lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara.

d. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada Tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Urbanisasi ini berimplikasi pada berbagai sektor, seperti perubahan guna lahan pertanian, perubahan aktivitas penduduk ke dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan, serta perkembangan teknologi informasi.

e. Konstelasi Perdagangan Global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di Kawasan Asia-Afrika. Perekonomian negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan negara maju yang tergabung dalam G7.

Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN. Selain itu peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Asia, Nigeria, dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Kerja sama kawasan menciptakan hub perdagangan strategis. Kerja sama kawasan seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di Kawasan Asia Pasifik.

f. Tata Kelola Keuangan Global

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada Tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada Tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang

ditransmisikan melalui jalur suka bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial seperti bank digital, dan keuangan terdensentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan.

g. Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new lifestyle*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerja melalui *virtual-metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi.

h. Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

i. Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global – *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple Planetary Crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business-as-usual (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, Indonesia mendeklarasikan pada Tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama.

j. Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of humankind*), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*).

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai USD469,0 miliar pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat mencapai USD1,0 triliun hingga Tahun 2040. Nilai pasar ekonomi antariksa bahkan tumbuh sebesar 6,0 persen saat krisis COVID-19. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

2.3.2.2. Isu Strategis Nasional

Beberapa fokus pembangunan nasional dalam kurun waktu lima tahun setidaknya sudah tertuang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Fokus tersebut juga menjadi isu yang berpengaruh terhadap agenda-agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Kemampuan *stakeholder* di daerah merupakan kunci dalam menerjemahkan isu-isu nasional secara baik sehingga respon yang diberikan dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan.

A. Masih Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat dan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang

menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

B. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022, angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382. Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

C. Pergeseran Struktur Kelas Menengah

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat dan jumlahnya 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, populasi kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan kerja. Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

D. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

E. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi *particular matter* 2,5 (WHO, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum

rumah tangga yang diuji tercemar (BPS, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Risiko *triple planetary crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

F. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Krisis energi dan pangan dapat memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

G. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menunjukkan tren penurunan dan Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia juga masih mengalami tantangan meskipun memiliki tren yang positif. Hal ini mencerminkan risiko dalam

pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2.3.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Selain isu global dan isu nasional, isu strategis Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 juga menjadi perhatian agar kesinambungan pembangunan dapat selaras sampai dengan level kota.

A. Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Transformasi ekonomi perlu dilaksanakan dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Di samping itu, belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah salah satunya juga disebabkan oleh belum optimalnya pembangunan desa dan perdesaan yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat miskin, pengembangan ekonomi desa, kualitas lingkungan dan pelayanan dasar, serta penguatan peran supra desa.

B. Penurunan Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang masih di atas nasional menjadi salah satu isu dan tantangan yang harus diselesaikan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi, dari permasalahan aspek layanan dasar, kualitas sumber daya manusia hingga ketidakberdayaan ekonomi. Isu ke depan adalah bagaimana menurunkan tingkat kemiskinan secara efektif dan efisien. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara utuh mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif. Mengacu pada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi meliputi: 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan 4) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

C. Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, perternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi. Ketersediaan pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi

lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan *up-skilling* SDM pertanian. Faktor penting lainnya adalah memastikan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu antarwilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjaga. Upaya yang lebih konkret dilaksanakan antara lain pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal dan peningkatan konsumsi pangan lokal. Selain itu diperlukan pengembangan pertanian dalam arti luas sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing daerah dalam provinsi yang terintegrasi dalam pengembangan kewilayahan di Jawa Tengah.

D. Penyediaan Prasarana dan Sarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Pembangunan prasarana dan sarana menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan, distribusi barang dan jasa (logistik daerah), serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Penyediaan prasarana transportasi dan fasilitas publik yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat khususnya kelompok rentan dan kelompok berkebutuhan khusus perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Pembangunan prasarana dan sarana tetap berprinsip lebih ramah lingkungan juga menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi risiko kerusakan lingkungan, kerugian akibat bencana, serta berpedoman pada rencana tata ruang. Penyediaan prasarana dan sarana bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin adalah suatu kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satunya yaitu akses terhadap infrastruktur dasar yang memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi layak, energi listrik, dan transportasi.

E. Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Penanggulangan Bencana

Isu keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana menjadi strategi yang menitikberatkan pada: 1) penanganan dan pengelolaan terhadap kerusakan lingkungan hidup seperti ahli fungsi lahan, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, kerusakan pesisir, DAS kritis, kawasan lindung/karst, pertambangan, 2) penanggulangan bencana terkait meningkatnya jumlah kejadian banjir, tanah longsor dan kekeringan akibat perubahan iklim, serta 3) isu sampah/limbah yang terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Jawa Tengah. Keberlangsungan proses pembangunan dapat terwujud apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung untuk peningkatan kualitas fungsi lingkungan sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya bencana alam.

F. Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dilakukan dengan mendorong akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin.

G. Kekuatan Budaya sebagai Karakter dan Jatidiri Masyarakat

Membangun kekuatan budaya ini adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya. Pembangunan kualitas keluarga juga masih menjadi isu yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Perubahan tren gaya hidup dan arus informasi yang semakin luas berpotensi mempengaruhi pola hubungan dan struktur keluarga. Untuk itu budaya menjadi hal penting untuk kemudian akan mampu mengembalikan karakter masyarakat Jawa Tengah pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur Jawa. Selain itu, budaya yang kuat diharapkan akan mampu menangkal segala ancaman yang sifatnya tindak kriminal, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

H. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme koreksi antaraktor dapat dioptimalkan. Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi sesuai kebutuhan dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya langkah transformatif dalam mewujudkan *collaborative governance*, juga pada proses untuk mencapai demokrasi yang lebih substantif guna peningkatan kualitas kebijakan publik. Transformasi tata kelola pemerintahan akan menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi di Jawa Tengah dalam pembangunan lima tahun ke depan.

2.3.2.4. Isu Strategis RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045

Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah, RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 juga harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan isu strategis dalam RPJMD. Isu strategis dalam RPJPD dibagi dalam beberapa aspek yaitu:

1. Sosial Budaya, mencakup rendahnya akses terhadap layanan dasar sosial dan pelestarian budaya.
2. Ekonomi, mencakup ketimpangan kesejahteraan dan rendahnya daya saing ekonomi kota.
3. Infrastruktur, mencakup rendahnya kualitas infrastruktur perkotaan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.
4. Ketahanan Kota, mencakup tingginya dampak bencana terhadap kelompok rentan.
5. Tata Kelola, mencakup belum optimalnya sistem regulasi dan birokrasi.

Kelima isu tersebut mengarah pada satu isu besar yaitu meningkatnya ketimpangan, rendahnya daya saing global, kualitas infrastruktur yang kurang merata, dan tata kelola yang lemah merupakan isu-isu yang memperparah dampak perubahan iklim dan bencana di Kota Semarang. Ketimpangan yang meningkat memperburuk kerentanan masyarakat terhadap bencana serta menghambat kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Rendahnya daya saing global, terutama dalam hal teknologi dan inovasi, menghalangi upaya untuk membangun kembali dan memperkuat infrastruktur kota agar lebih tahan terhadap bencana dan perubahan iklim. Infrastruktur yang kurang merata memperbesar kesenjangan dalam kesiapan dan aksesibilitas terhadap layanan dasar, sementara tata kelola yang lemah menyulitkan koordinasi dan implementasi kebijakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana dan menangani dampak perubahan iklim. Dengan demikian, penanganan isu-isu ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan Kota Semarang dan meningkatkan kesiapannya menghadapi tantangan bencana dan perubahan iklim di masa depan.

2.3.2.5. Telaah Isu Strategis KLHS

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain: (1) Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; (2) Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender; (3) Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah; (4) Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim; (5) Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi; (6) Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan; dan (7) Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Secara lebih rinci, isu-isu terkait lingkungan hidup yang menjadi perhatian dalam perencanaan dan pembangunan di Kota Semarang sebagaimana tertera dalam dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.123 Masalah dan Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

PILAR	MASALAH STRATEGIS	ISU STRATEGIS
Sosial	• Masih kurangnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah • Masih kurangnya kualitas pendidikan yang mengikuti kemajuan jaman dan teknologi • Masih kurangnya kualitas sarana prasarana pendidikan • Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran peneraoan pola hidup sehat	Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
	• Masih adanya kemiskinan dan ketidakcukupan konsumsi dan kualitas konsumsi pangan • Masih kurangnya kesetaraan gender • Masih kurangnya perlindungan terhadap anak dan perempuan	Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender
Ekonomi	• Belum optimalnya distribusi kesejahteraan • Masih kurangnya konsribusi sektor terhadap kesejahteraan • Belum optimalnya dukungan sektor keuangan • Masih kurangnya dukungan industri hijau	Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah
Lingkungan	• Masih kurangnya ketahanan terhadap bencana	Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim
	• Belum optimalnya pengelolaan terhadap sumber air baku dan pelayanan air bersih yang aman dan layak untuk semua • Masih kurangnya dukungan prasarana sanitasi dan limbah yang mendukung keberlanjutan lingkungan	Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi
	• Masih kurangnya dukungan terhadap energi alternatif berkelanjutan • Masih kurangnya dukungan terhadap keberlanjutan lingkungan dan ruang terbuka hijau (RTH) • Masih kurangnya dukungan terhadap transportasi publik berkelanjutan	Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan

PILAR	MASALAH STRATEGIS	ISU STRATEGIS
Tata Kelola Kelembagaan	• Belum optimalnya penerimaan pemerintah • Belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel • Belum optimalnya penegakan hukum dan perlindungan masyarakat • Belum optimalnya pelayanan aksesibilitas pitalebar	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab

Sumber: KLHS RPJMD Kota Semarang 2025-2029

2.3.2.6. Isu Strategis Daerah

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu-isu global, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan regional, maka penetapan isu-isu strategis Kota Semarang pada pelaksanaan pembangunan periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

A. Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia

Daya saing merupakan aspek yang wajib dimiliki oleh sebuah daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan yang dimiliki. Dalam hal ini, Kota Semarang memiliki beberapa potensi yang perlu dioptimalkan sebagai berikut:

- Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif di Kota Semarang dapat dikatakan masih belum optimal meskipun potensinya sangat besar. Dari segi arsitektur kota, Kota Semarang memiliki ciri khas yang jarang ditemukan di tempat lain seperti Kawasan Kota Lama, Kawasan Pecinan, Kampung Tematik,Kampung Melayu, serta beberapa ikon wisata baik alam, budaya, maupun sejarah sebagai potensi bagi pengembangan ruang kreatif (*creative hub*). Keberadaan *creative hub* ini penting sebagai sebuah ruang multifungsi bagi apresiasi karya serta lahirnya ide-ide kreatif dari para penggiatnya seperti Taman Indonesia Kaya dan Taman Budaya Raden Saleh bagi pelaku seni pertunjukan, Semarang Digital Kreatif (SDK) bagi *start-up* lokal, dan lain sebagainya.

Keuntungan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi adalah banyak diselenggarakannya pertemuan, pameran, dan *event* budaya baik skala provinsi maupun nasional di setiap tahunnya. Konsep wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) menjadi keunggulan tersendiri karena konsep ini baru diterapkan pada dua kota saja di Jawa Tengah yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta. Berdasarkan data *International Congress and Convention Association (ICCA)*, per Maret 2024, rata-rata tinggal wisatawan MICE mancanegara di Indonesia mencapai 7,37 hari sedangkan rata-rata di Kota Semarang baru mencapai 1,33 hari. Diharapkan, konsep MICE ini benar-benar didukung oleh infrastruktur seperti *venue-venue* yang lebih representatif sehingga Kota Semarang tidak lagi terlewat sebagai daftar penyelenggara pameran, pertemuan maupun konser skala nasional dan internasional di masa mendatang.

Di sisi lain, pengembangan pariwisata baik secara konvensional maupun MICE diyakini dapat menjadi daya ungkit bagi komponen-komponen ekonomi kreatif lainnya di Kota Semarang. Setiap wisatawan akan didorong untuk berkunjung ke lokasi dengan arsitektur khas maupun yang menyajikan seni pertunjukan, selain dapat membeli produk-produk ekonomi kreatif sebagai cinderamata. Sebagai informasi bahwa di Kota Semarang baru subsektor *fashion* yang mendapat predikat unggul dari Kemenparekraf. Hal ini menjadi pekerjaan tersendiri bagi semua pihak untuk lebih meningkatkan lagi kualitas dan juga promosi produk kreatif lokal Semarang yang notabene berbeda dari wilayah lainnya.

Namun perlu digarisbawahi bahwa kondisi tersebut dapat tercapai apabila permasalahan terkait kapasitas SDM juga ditingkatkan. Masih banyak pelaku usaha kreatif pemula yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena kesannya yang bebas dan informal sehingga akan menghambat keinginan dan juga perkembangan usahanya. Jumlah kursus, sanggar, maupun pelatihan penunjang juga masih kurang sehingga persentase tenaga kerja terampil di Kota Semarang juga menurun berdasarkan data statistik. Hal ini sangat disayangkan serta menjadi pekerjaan bagi pemerintah kota untuk terus mendorong jumlah dan kapasitas pelaku usaha agar dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif Kota Semarang.

- Peningkatan Produktivitas dan Kualitas UMKM

Hampir sama dengan ekonomi kreatif, pengembangan UMKM juga masih perlu mendapat perhatian oleh pemerintah kota. Keberadaan UMKM di Kota Semarang merupakan sebuah sumber ekonomi baru karena menciptakan lapangan kerja serta dinilai memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi. Namun kondisi dari pengembangan UMKM di Kota Semarang masih jauh dari kata ideal karena rendahnya capaian, khususnya terkait upaya pembinaan untuk meningkatkan kualitas UMKM.

Kesulitan UMKM dalam mengakses pelayanan keuangan, rendahnya peningkatan kualitas, serta akses pemasaran *online* yang belum optimal merupakan tiga permasalahan utama yang muncul. Pertambahan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM dengan dukungan pemerintah kota harus menjadi langkah awal dalam menyikapi permasalahan ini. Hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap sisi produktivitas, kualitas produk serta manajemen pengelolaan. Di sisi lain, pengembangan UMKM juga sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi kreatif dimana UMKM sebagai salah satu komponen dalam menghasilkan serta memasarkan produk-produk kreatif seperti seni rupa, kriya, *fashion*, kuliner, dan lain sebagainya. Sinergitas kedua strategi tersebut diharapkan dapat menjadi tulang punggung pengembangan ekonomi bagi masyarakat di Kota Semarang.

- Daya Saing Pariwisata

Secara geografis, letak Kota Semarang dekat dengan dua Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu Pulau Karimun Jawa dan Candi Borobudur. Setiap tahunnya banyak wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang mengunjungi dua destinasi tersebut baik lewat jalur darat, udara, dan juga laut. Hal ini sangat menguntungkan mengingat ketersediaan prasarana transportasi seperti bandara, pelabuhan dan stasiun membuat Kota Semarang sering dijadikan kota transit bagi wisatawan sebelum mengunjungi dua KSPN tersebut.

Namun demikian, masih banyak wisatawan yang singgah namun hanya untuk menunggu keberangkatan menuju dua destinasi tersebut tanpa berkunjung ke tempat-tempat wisata lokal di Kota Semarang. Banyak paket wisata juga masih menggabungkan antara destinasi di kota dan kabupaten, di mana Kota Semarang umumnya hanya mendapat jatah waktu singkat di akhir untuk kegiatan berbelanja atau sekedar istirahat di hotel. Hal ini menjadi sebuah kerugian karena daya tarik wisata di Kota Semarang lebih dari itu, seperti museum, situs, dan kawasan cagar budaya serta perkampungan tradisional yang pastinya tidak ditemukan di wilayah lain. Potensi inilah yang harusnya dapat dimanfaatkan bagi pengembangan sektor wisata sehingga wisatawan tertarik untuk menetap lebih lama dengan mengunjungi di tempat-tempat wisata lokal.

Pada masa libur lebaran tahun 2024, jumlah wisatawan yang mengunjungi Kota Lama tembus 289.000 pengunjung dan menjadi destinasi wisata paling diminati di Jawa Tengah. Dengan tingginya jumlah pengunjung tersebut, Kota Lama telah menjadi destinasi baru tujuan pelancong. Sejalan dengan hal tersebut, objek wisata lain di Kota Semarang harus ikut dikembangkan dan ditingkatkan promosinya agar sektor pariwisata di Kota Semarang semakin bersaing dengan destinasi wisata di kota lain.

- Pengembangan Ekonomi Biru

Sebagai kota yang terletak di pesisir, Semarang mengimplementasikan prinsip ekonomi biru dengan fokus pada optimalisasi potensi bahari dan peningkatan pembangunan budidaya perikanan secara berkelanjutan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan baik untuk pemenuhan konsumsi lokal maupun peningkatan nilai ekonomi. Program konkret yang akan dilaksanakan meliputi penumbuhan sentra-sentra budidaya perikanan sebagai pusat kolaborasi dan inovasi, serta pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan dalam ember (Budidamber) di lingkungan perkotaan. Pemerintah juga akan memberikan dukungan penuh kepada nelayan melalui fasilitasi alat tangkap dan asuransi, serta memperkuat kelembagaan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Nelayan (BUMNel). Program *Social Fishery* berupa pembagian bibit ikan kepada masyarakat juga digalakkan untuk pemenuhan gizi dan tujuan sosial, memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya bahari memberikan manfaat langsung kepada warga.

- Daya Saing Perdagangan dan Industri

Dari segi daya saing perdagangan, berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2017, Kota Semarang sebagai perkotaan inti dari Kawasan Kedungsepur memiliki peran penting sebagai pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional. Melalui kelengkapan infrastruktur perdagangan dan juga logistik di Kota Semarang, maka hal ini dipandang sebagai sebuah kesempatan emas untuk meningkatkan daya saingnya setara dengan kota-kota perdagangan di dunia. Selain itu, keberadaan kawasan industri yang modern juga sebagai modal utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, tak hanya bagi Kota Semarang namun juga Kawasan Kedungsepur sesuai amanat dari Perpres tersebut.

Peningkatan produktivitas serta kualitas produk industri dapat menjadi pemicu dari pertumbuhan aktivitas perdagangan baik skala regional maupun internasional secara bertahap. Apabila daya beli produk semakin tinggi, nantinya kontribusi terhadap ekonomi daerah juga semakin meningkat. Hal tersebut merupakan sebuah tantangan yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan juga pelaku-pelaku industri dan perdagangan.

- Kinerja Penanaman Modal

Dari sisi penanaman modal, kinerja investasi di Kota Semarang menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Nilai investasi mengalami kenaikan, namun bila dilihat secara persentase dan jumlah investor pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, permasalahan terkait penanaman modal harus segera diatasi lewat penciptaan kembali iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang.

B. Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas

Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan bahwa ketersediaan infrastruktur di wilayahnya merata untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakatnya. Dalam kondisi yang ideal, seharusnya sebuah infrastruktur direncanakan dan dibangun berdasarkan kebutuhan tiap pertambahan penduduk serta memperhitungkan juga radius pencapaian pelayanannya. Hal ini dilakukan agar setiap masyarakat dapat merasakan manfaat dari kehadiran infrastruktur, tidak ada *blank service area* atau justru *overload service*.

Beberapa pedoman teknis masih dijadikan standar dalam penyediaan infrastruktur, seperti SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Untuk capaian pelayanan minimal juga telah diatur dalam Permendagri No 100 tahun 2018, seperti pelayanan terhadap air minum, pengolahan limbah, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Pemerintah Kota Semarang juga telah berkomitmen untuk mencapai target dari TPB yang juga berfokus dalam menjamin penyediaan dan manajemen infrastruktur yang tangguh serta pelayanan yang merata di masa mendatang.

- Utilitas Perkotaan dan Pelayanannya

Capaian dari penyediaan utilitas perkotaan di Kota Semarang setiap tahun meningkat berdasarkan data statistik, meskipun masih belum mencapai kondisi yang ideal (ketersediaan 100%). Penyediaan ini meliputi unsur jalan dan perlengkapannya, jaringan drainase - sanitasi, penyediaan air minum dan persampahan. Adapun kendala yang sering dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman yaitu berkaitan dengan ketersediaan lahan. Keterbatasan lahan pemerintah dan status kepemilikan lahan yang belum jelas menjadi penghambat beberapa penyediaan seperti bank sampah, sanitasi, sekolah, dan lain sebagainya.

Sedangkan dari sisi pelayanan masih belum mencapai standar pelayanan minimal yaitu 100% penduduk terlayani. Data statistik menyebutkan bahwa pelayanan air minum baru mencapai 99.80%, penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenisnya yang baru mencapai 71,34%, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masih terdapat masyarakat Kota Semarang yang belum mendapatkan serta menikmati manfaat dari keberadaan utilitas perkotaan terkait.

Dari segi kondisi utilitas, capaian yang sama juga menunjukkan bahwa belum 100% utilitas di Kota Semarang dalam kondisi yang baik. Salah satu penyebab kondisi tersebut adalah faktor alam atau geografis yang masih mengancam keberlanjutan infrastruktur di Kota Semarang (CPL, 2016). Sebagai contoh, kasus *land subsidence* di Semarang bagian utara tentu akan mengancam kondisi infrastruktur sehingga lebih rawan rusak dibanding daerah lainnya. Perhitungan mitigasi bencana pada utilitas jalan serta penguatan maupun relokasi utilitas penyediaan air dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut.

Perlu digarisbawahi bahwa paradigma pembangunan telah bergeser dimana pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan harus lebih diutamakan. Hal ini agar pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar jumlah namun ikut mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan dan juga keberlanjutan dalam pemanfaatannya. Paradigma seperti ini juga mulai diterapkan oleh pemerintah kota sehingga diharapkan ketidakmerataan kuantitas dan kualitas dari penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur perkotaan tidak lagi menjadi isu di masa mendatang.

- Transportasi Umum Perkotaan

Terkait penyediaan transportasi umum, jumlah armada memang bertambah bahkan sistem *feeder* juga sudah diterapkan di Kota Semarang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini cukup berhasil dalam menambah jumlah penumpang transportasi umum khususnya BRT setiap tahunnya. Jumlah penumpang BRT pada tahun 2023 mencapai 13.146.318 penumpang, namun yang menjadi permasalahan ternyata hal ini juga diiringi dengan pertambahan jumlah kendaraan pribadi, baik motor dan mobil yang masing-masing naik 60.000 unit dan 3.900 unit pada tahun 2024. Penggunaan kendaraan pribadi selain menambah kemacetan juga

meningkatkan polusi udara yang disebabkan oleh peningkatan emisi yang tidak dapat dihindari.

Dari penjelasan tersebut, maka dibutuhkan adanya upaya untuk pengurangan polusi udara di Kota Semarang yang dilakukan antara lain melalui:

a. Green Transportation

Pada laporan kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara tahun 2018 tercatat bahwa pemerintah Kota Semarang menjadi satu-satunya kota yang berkomitmen dalam pelaksanaan *green transportation*. Pelaksanaan *green transportation* dinilai berkembang karena Dinas Lingkungan Hidup menyusun Rencana Aksi Daerah 2017-2025 yang sesuai perencanaan kota dan perencanaan transportasi Kota Semarang. Rencana Aksi Daerah *green transportation* dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu:

1. Penguatan Dasar Hukum dan Kelembagaan

- Penyusunan dasar hukum standar pengembangan wilayah perkotaan dalam menghadapi perubahan iklim
- Perencanaan peningkatan sarana transportasi umum
- Penguatan kelembagaan transportasi masal berbasis rel
- Penguatan kelembagaan transportasi massal dengan membentuk layanan BLUD

2. Peningkatan Tata Ruang

- Kampanye dan sosialisasi dampak pencemaran udara
- Penguatan kelembagaan transportasi dan tata ruang
- Kajian konsep *compact city* dan TOD
- Implementasi kebijakan tata ruang bertumpu pada *compact city* dan TOD
- Kajian pengembangan *park and ride hub* yang terintegrasi dengan transportasi publik
- Pengembangan dekorasi kota melalui perbaikan jalur pejalan kaki dengan desain universal, menentukan titik integrasi angkutan umum, dan sosialisasi kepada masyarakat agar berjalan kaki
- Pemeliharaan ruang manfaat jalan dengan jalur hijau
- Pembangunan jalur sepeda
- Pengembangan kawasan ramah pejalan kaki (Simpang Lima dan Kota Lama)

3. Peningkatan Layanan Angkutan Umum

- Pembangunan transportasi massal berbasis rel (LRT)
- Penambahan koridor Trans Semarang
- Pengembangan menuju BRT
- Kajian TOD bertumpu pada moda BRT dan basis rel
- Implementasi jaringan angkutan massal dan TOD
- Pemantauan uji emisi kendaraan bermotor
- Sistem satu arah
- Implementasi parkir meter

4. Pengembangan Teknologi Kendaraan

- Penerapan smart city pada program keselamatan jalan
- Penetapan teknologi *smart/eco driving*

5. Pengembangan, Pemeriksaan, dan Perawatan Emisi Kendaraan

- Konversi BBM ke BBG
- Uji emisi kendaraan
- Pengembangan dan perawatan emisi kendaraan di instansi pemerintahan dan swasta
- Monitoring baku mutu tingkat kebisingan
- Pemantauan kualitas ambien di sekitar bandara dan pelabuhan

b. Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau

Pemerintah Kota Semarang menetapkan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau sebagai salah satu strategi pengaturan pola Ruang Kawasan Strategis sebagai sebuah kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW 2011-2031)

Di sisi lain, Kota Semarang sebagai perkotaan inti dalam Kawasan Kedungsepur memiliki peran penting dalam mengupayakan keterkaitan antar kawasan perkotaan dan perdesaan serta sebagai pusat pelayanan angkutan umum penumpang. Oleh karena itu, penyediaan transportasi umum dengan konsep *green transportation* di Kota Semarang menjadi isu yang harus disikapi oleh semua pihak.

C. Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan meliputi peningkatan pelayanan kesehatan, kesiapan dalam penanganan wabah maupun penyakit menular dan tidak menular, keikutsertaan masyarakat menjadi anggota BPJS kesehatan, kondisi ibu dan anak serta promosi kesehatan. Kelima pembahasan tersebut juga sebagai bentuk bahwa pembangunan dalam aspek kesehatan sudah mulai bergeser dari aspek kuratif ke tindakan preventif dan promotif. Adapun perumusan isu juga sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk tetap menikmati dan menerima pelayanan kesehatan sesuai standar serta kondusif bagi kehidupannya.

- Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Permendagri No. 100 tahun 2018, maka setiap warga negara wajib mendapatkan layanan kesehatan. Target dari TPB juga menyatakan bahwa negara wajib memastikan kehidupan yang sehat bagi semua usia. Kedua hal ini juga menjadi dasar utama dalam pencapaian kondisi ideal dari pelayanan kesehatan di Kota Semarang dimana secara umum target 100% pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, balita gizi buruk, penderita malaria, diabetes, HIV, hipertensi dan lain sebagainya sudah tercapai. Adanya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan *Universal Health Coverage* (UHC) juga semakin mempermudah masyarakat miskin Kota Semarang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Berdasarkan laporan RPS UN Habitat, bahwa pelayanan dari fasilitas kesehatan di Kota Semarang juga belum dapat mencakup semua wilayah. Kondisi yang ada menggambarkan bahwa daerah pinggiran kota masih belum sepenuhnya terjangkau pelayanan puskesmas seperti Semarang

bagian timur, barat, dan wilayah yang berbatasan dengan pantai. Selain itu, berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2017, Kota Semarang sebagai perkotaan inti dari Kawasan Kedungsepur juga mendapat peran sebagai pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional. Hal ini mutlak membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kota untuk pemenuhan pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat daerah pinggiran.

- Kesehatan Ibu dan Anak

Dari segi kesehatan ibu dan anak, meskipun capaian Kota Semarang cenderung membaik namun masih perlu upaya penekanan kasus. Khusus untuk kematian neonatal, kematian ibu dan kematian balita, meningkat pada tahun 2024 sedangkan kasus stunting di Kota Semarang jumlahnya masih fluktuatif selama 5 tahun terakhir, namun menunjukkan peningkatan kasus pada tahun 2023. Hal ini menjadi ancaman nyata bagi Kota Semarang terkait kelangsungan hidup dan kualitas tumbuh kembang anak nantinya. Meskipun pemerataan pelayanan kesehatan ibu dan anak sudah dilakukan oleh puskesmas dan posyandu yang ada, namun hal ini belum cukup. Perlu digarisbawahi bahwa peningkatan kesehatan ibu dan anak juga merupakan pekerjaan pemerintah kota yang lintas sektor karena sampai saat ini selain terkendala oleh pengetahuan serta kesadaran gizi keluarga yang minim juga karena kondisi sosial ekonomi.

- Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Terkait kondisi penanganan penyakit menular dan tidak menular di Kota Semarang juga masih mengkhawatirkan dari sisi capaian jumlah kasus. Penyakit menular lain seperti *tuberculosis*, HIV/AIDS, kusta, hepatitis B, dan malaria jumlahnya fluktuatif tiap tahun dan jumlah kasusnya masih tergolong tinggi di Kota Semarang. Seperti pada kasus *tuberculosis*, pada tahun 2024 cakupan penemuan dan pengobatan kasus *tuberculosis* yang mencapai 103,70%, tetapi angka keberhasilan pengobatan hanya 81,50%. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kasus yang terdeteksi dan jumlah pasien yang berhasil sembuh. Sedangkan untuk penyakit tidak menular di Kota Semarang jumlah penderitanya meningkat seperti pada penyakit hipertensi dan diabetes, sedangkan bagi perempuan yang melakukan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara mengalami penurunan pada tahun 2023. Ancaman pertambahan penyakit tidak menular di Kota Semarang juga semakin jelas di kala proporsi usia dominan mulai bergeser serta gaya hidup masyarakat mulai berubah.

D. Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas

Pelayanan pendidikan yang berkualitas meliputi peningkatan kinerja sektoral, tenaga pendidik, sarana – prasarana pendidikan, serta pengoptimalan kurikulum yang sudah dilaksanakan. Perlu digarisbawahi bahwa pelayanan pendidikan tidak hanya terbatas bagi pendidikan formal jenjang dasar dan menengah namun juga nonformal sesuai dengan

kewenangan pemerintah kota. Perumusan isu ini juga sebagai bentuk dari pemenuhan hak masyarakat di Kota Semarang untuk mengakses dan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas pada jenjang dasar dan menengah; pendidikan budaya dan karakter; serta pemerataan pendidikan guna mendorong partisipasi sekolah masyarakat.

- Kinerja Sektor Pendidikan

Salah satu hal mencolok yang masih terus ditingkatkan oleh pemerintah kota terkait capaian pelayanan pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Meskipun RLS Kota Semarang sudah mencapai 10,81 tahun namun dalam konteks pelaksanaan amanat UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka kewajiban pemerintah kota masih belum terpenuhi. Pemerintah kota masih harus mendorong agar 100% anak di Kota Semarang mampu menyelesaikan pendidikan dari pendidikan usia dini formal sampai minimal menamatkan tingkat SMA/MA/ sederajat atau wajib belajar 13 tahun. Hal tersebut tentunya harus didukung lewat upaya lain seperti pencapaian 0% Angka Putus Sekolah (APS), 100% Angka Kelulusan, dan mempertahankan capaian Angka Melanjutkan Sekolah di setiap jenjang pendidikan dalam jangka 5 tahun mendatang.

Wajib belajar 13 tahun merupakan lanjutan dari wajib belajar yang dahulu hanya mencapai 12 tahun. Penambahan rentang waktu ini sangat diperlukan mengingat ilmu dan teknologi berkembang pesat sehingga membutuhkan SDM yang juga mumpuni. Salah satu kendala utama dari belum tercapainya kondisi tersebut adalah terkait biaya atau kondisi ekonomi keluarga sehingga anak putus sekolah dan lebih memilih bekerja. Hal ini tentu berpotensi menambah permasalahan baru dimana nantinya tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah di Kota Semarang menjadi bertambah.

Berdasarkan laporan RPS UN Habitat, bahwa pelayanan dari fasilitas pendidikan di Kota Semarang masih perlu ditingkatkan. Masih perlu penambahan jumlah satuan pendidikan khususnya pada beberapa daerah padat penduduk seperti Semarang bagian tenggara, selatan, dan barat daya sehingga kesempatan mengenyam pendidikan meningkat. Selain itu, berdasarkan Perpres No 78 Tahun 2017, Kota Semarang sebagai perkotaan inti dari Kawasan Kedungsepur juga mendapat peran sebagai pusat pelayanan pendidikan tinggi. Hal ini memang bukan wewenang pemerintah kota, namun dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk kepentingan penelitian bagi pengembangan kota.

- Sarana – Prasarana

Kelengkapan sarana – prasarana juga menjadi fokus lain dalam penyediaan pelayanan pendidikan di Kota Semarang. Setiap satuan pendidikan pada tiap jenjang harusnya memenuhi standar sarana dan prasarana seperti yang tercantum pada Permendikbudristek No 22 Tahun 2023 demi kemudahan dan kenyamanan guru serta anak didik dalam proses belajar mengajar meliputi layanan internet, komputer, ruang laboratorium, tempat bermain atau berolahraga, sanitasi, dan sebagainya

dengan baik. Kelengkapan sarana-prasarana ini utamanya perlu ditingkatkan pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggir kota.

- **Tenaga Pendidik**

Dari segi tenaga pendidik, rasio minimal guru dan siswa memang sudah tercapai di Kota Semarang namun dari segi kualitas masih belum mencapai kondisi ideal. 100% guru pada tiap jenjang pendidikan baik PAUD, SD, SMP, sampai dengan SMA idealnya memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV. Meskipun masih menjadi permasalahan di Kota Semarang, namun pemerintah masih terus berusaha untuk mengejar capaian tersebut mengingat dalam lima tahun terakhir masih terjadi fluktuatif. Dengan kualitas tenaga pendidik yang mumpuni maka diharapkan pelaksanaan kurikulum pendidikan serta transfer ilmu antara pendidik dengan peserta didik akan lebih maksimal.

Meskipun IPM Kota Semarang sudah tergolong tinggi dan melebihi capaian provinsi serta nasional, namun beberapa komponen pendidikan masih perlu perhatian khusus sehingga pelayanan pendidikan tetap menjadi prioritas pembangunan. Salah satu contohnya terkait sarana – prasarana dan tenaga pendidik PAUD masih perlu ditingkatkan capaiannya pada 5 tahun ke depan agar kesiapan belajar anak-anak sebelum memasuki sekolah meningkat berdasarkan potensi serta karakter bangsa. Sedangkan untuk lembaga kursus dan pelatihan perlu ditambah untuk mendukung penambahan tenaga kerja terampil dan inovatif di Kota Semarang.

- **E. Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat dalam hal ini tidak hanya dilihat dari segi kemakmuran saja, namun lebih jauh tentang pemenuhan individu akan kebutuhannya dalam hal sosial, spiritual, dan tentunya material. Adapun perumusan isu ini mutlak dibutuhkan agar masyarakat Kota Semarang dapat hidup layak serta mampu mengembangkan dirinya. Dengan demikian, maka tiap individu dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik pada tingkat masyarakat.

- **Ancaman Penurunan Tingkat Kesejahteraan**

Kondisi perekonomian saat ini yang “agak lesu” menimbulkan kekhawatiran baru yaitu penurunan tingkat kesejahteraan. Per 1 Januari 2025, sebanyak 3.909 pekerja di Kota Semarang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terjadinya deflasi selama 5 (lima) bulan di tahun 2024 menunjukkan daya beli masyarakat yang menurun.

Upah pekerja yang kenaikannya relatif kecil, berbanding terbalik dengan harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik, membuat nilai riil dari pendapatan tersebut tetap dan konsumsi masyarakat menjadi stagnan. Kondisi ini membuat beban pemerintah kota semakin berat untuk mengembalikan taraf kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya sudah tercapai.

- **Nilai Budaya dan Karakter Masyarakat**

Selain kondisi kesejahteraan itu sendiri, pembahasan juga meluas pada nilai budaya dan karakter masyarakat yang terancam luntur. Pengelolaan kebudayaan, kepustakaan, serta kepemudaan dan olahraga masih harus menjadi perhatian pemerintah kota ke depannya. Jumlah pelaksanaan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut di Kota Semarang masih sangat rendah dan cenderung stagnan setiap tahunnya. Pengenalan seni dan budaya lokal, peningkatan minat baca, serta kegiatan kepemudaan yang bermanfaat tetap dirasa penting meskipun zaman sudah bergeser sehingga segala sesuatu menjadi berbasis *online*. Pemerintah kota tentunya harus beradaptasi terhadap kondisi tersebut sehingga masyarakat khususnya generasi muda Kota Semarang tetap memegang teguh nilai budaya lokal dan karakter luhur bangsa di tengah arus globalisasi yang terjadi.

- **Inklusivitas**

Dari segi inklusivitas, dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kota Semarang masih belum mampu secara optimal untuk mengakomodasi dan menghargai perbedaan secara merata, khususnya terkait gender. Secara agregat, meningkatkan Indeks Pembangunan Gender menjadi fokus bagi Kota Semarang untuk menunjukkan keseriusan terkait upaya pengarusutamaan gender. Hal tersebut dapat terwujud apabila upaya-upaya lain dilakukan secara paralel untuk meningkatkan kinerja yang masih rendah, seperti persentase keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan serta jumlah organisasi perempuan, dan kebijakan responsif gender. Selain itu, juga masih ditemukan kasus KDRT terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang dengan jumlah yang fluktuatif tiap tahunnya. Capaian-capaian tersebut merupakan salah satu penggambaran langsung terkait pelaksanaan HAM, khususnya terkait gender yang belum optimal di Kota Semarang.

F. Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota

Pertambahan penduduk menjadi pemicu utama dari meningkatnya aktivitas dan juga kebutuhan ruang. Di kala kebutuhan naik namun ketersediaan ruang tidak mencukupi, maka penduduk akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, contohnya dengan eksploitasi kawasan permukiman secara berlebihan sehingga muncul *slum area*. Untuk kasus yang lebih parah, penduduk akan memanfaatkan kawasan seperti sempadan sungai, rel, dan sebagainya sehingga memunculkan *squatter area*. Pemanfaatan ruang yang demikian ikut menyebabkan degradasi lingkungan terus meningkat. Oleh karena itu, perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan masih terus diupayakan oleh pemerintah seiring dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah, ketidaksesuaian pemanfaatan tata ruang, dan keberadaan kawasan kumuh masih menjadi permasalahan terkait pemanfaatan ruang dan lingkungan di Kota Semarang. Beberapa capaian-capaian dalam standar pelayanan minimal dan pedoman teknis masih belum dapat terpenuhi 100%. Namun di sisi lain, komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian target-target TPB terkait ruang dan ekosistem darat yang berkelanjutan seakan menjadi jaminan yang

dimanifestasikan lewat kegiatan pencegahan pencemaran dan pengendalian pemanfaatan ruang.

- Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang

Capaian dari pemanfaatan ruang di Kota Semarang semakin membaik setiap tahunnya, bahkan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sudah mencapai 98,19%. Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah reklame berizin yang meningkat, dan kenaikan proporsi bangunan ber-IMB. Peningkatan capaian ini juga dikarenakan adanya peningkatan upaya pemerintah kota dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban tata ruang lewat rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan.

Melihat tren pertumbuhan penduduk di kota metropolitan serta kasus *urban sprawl* di Kota Semarang, maka bukan tidak mungkin capaian-capaian di atas menjadi fluktuatif bahkan cenderung menurun. Apabila hal ini terjadi, maka akan merugikan masyarakat itu sendiri karena ruang sebagai wadah sudah tidak mampu lagi untuk mendukung aktivitas atau isinya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusunan dokumen tata ruang saja belum cukup sebagai solusi untuk mencapai kondisi ideal dalam pemanfaatan ruang. Dibutuhkan pengimplementasian yang ketat dari pemerintah kota serta partisipasi masyarakat secara langsung lewat kesadaran saat pemanfaatan ruang dilakukan.

- Kualitas Lingkungan Hidup yang Rendah

Kondisi dari lingkungan hidup Kota Semarang dapat dikatakan belum memuaskan apabila dilihat berdasarkan capaian IKLH, IKA, IKU dan IKL. Beban pencemaran dari kegiatan industri dan asap kendaraan bermotor menjadi penyebab utama dari rendahnya kualitas udara di mana pencemaran udara juga berada pada skor PM_{2,5} dan menjadi perhatian bagi kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Di sisi lain, rendahnya pengendalian alih fungsi lahan khususnya kecenderungan pembangunan pada kawasan konservasi di Semarang bagian atas menjadi penyebab dari rendahnya kualitas tutupan lahan.

Kota Semarang sebagai perkotaan inti dalam kawasan Kedungsepur berdasarkan juga diberi amanat untuk mengintegrasikan kegiatan ekonomi wilayah dengan pelestarian lingkungan. Hal ini sebagai bentuk perlindungan di mana segala aktivitas ekonomi seperti industri, perdagangan, logistik, dan lain sebagainya terpusat di Kota Semarang sehingga harus dipastikan lingkungannya dapat mendukung segala aktivitas tersebut. Segala jenis aktivitas harus lebih mempertimbangkan dampak dan beban yang diterima oleh lingkungan dibandingkan keuntungan ekonomis semata.

Penjelasan di atas merupakan kondisi lingkungan hidup yang harus cepat diatasi sebelum degradasi bertambah parah. Pengetatan perizinan terkait pembuangan limbah serta memperbanyak cakupan penghijauan dan pembangunan RTH harus dilakukan sebagai salah satu upaya pengembalian kondisi kelestarian lingkungan hidup. Akan menjadi

sebuah kerugian besar bagi masyarakat Kota Semarang khususnya di masa mendatang apabila kondisi lingkungan yang berkelanjutan tidak dapat terwujud.

- Keberadaan Permukiman Kumuh

Kemunculan kawasan kumuh di Kota Semarang disebabkan oleh beberapa faktor seperti permukiman yang semakin padat serta kemunculan fenomena *urban sprawl*. Banyak rumah yang akhirnya dibangun dengan kondisi seadanya untuk memenuhi kebutuhan bermukim namun tanpa disertai perencanaan sanitasi, drainase, dan persampahan yang memadai. Di sisi lain, kurang disiplinnya masyarakat dalam hal kebersihan juga turut memperburuk citra permukiman pada beberapa lokasi di Kota Semarang.

Persentase permukiman kumuh di Kota Semarang belum mencapai 0%. Luas permukiman kumuh yang meningkat pada tahun 2021 menjadi 431,54 ha merupakan permasalahan yang harus segera diatasi. Adapun beberapa program seperti Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terus dijalankan oleh pemerintah kota dengan bantuan dana dari Ditjen Cipta Karya PUPR serta beberapa lembaga luar negeri. Di sisi lain, upaya yang terus dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengurangi luas kawasan kumuh adalah dengan meningkatkan inovasi pengurangan kawasan kumuh, menghidupkan lahan tidur, dan mempertahankan wilayah bebas kumuh yang telah terselesaikan. Penekanan luas permukiman kumuh tetap menjadi tantangan kedepan bagi pemerintah kota untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, nyaman dan adaptif terhadap kerentanan bencana, serta perubahan iklim bagi masyarakat.

G. Penyelenggaraan *Good Governance*

Penyelenggaraan *good governance* merupakan sebuah solusi juga tuntutan wajib bagi semua pemerintahan agar menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip demokrasi dan efisien dengan selalu menyertakan partisipasi semua pihak, transparansi, dan mengedepankan akuntabilitas. Masih banyak yang harus dibenahi oleh Kota Semarang dalam mencapai hal tersebut, antara lain terkait pengelolaan keuangan, pelayanan publik, manajemen kota, dan strategi kepemimpinan.

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, upaya realisasi komponen-komponen PAD harus terus dioptimalkan untuk menghindari defisit pada pos-pos yang ada. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dari masyarakat yang belum mencapai 100%, baik dalam pembayaran maupun mendaftarkan tempat usahanya. Mengingat pajak merupakan instrumen penting bagi pembiayaan daerah, maka pemerintah harus terus menggenjot lewat berbagai macam inovasi agar wajib pajak mampu dan mau membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang. Di sisi lain, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masih mendapat sorotan dimana tingkat kriminalitas kota masih tinggi karena cakupan patroli, rasio petugas linmas, sarana prasarana

pengamanan masih belum memenuhi standar minimal dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Poin terakhir yaitu strategi kepemimpinan masih perlu dioptimalkan, khususnya terkait peningkatan jumlah kerjasama antar daerah seperti yang diamanatkan dalam Perpres No. 78 Tahun 2018 dan Perpres No. 79 Tahun 2019. Hal ini penting agar peran Kota Semarang sebagai perkotaan inti dapat maksimal serta terciptanya keterpaduan dalam suatu regional Kedungsepur. Masih adanya ketidakkonsistenan dalam penerjemahan dokumen rencana jangka menengah ke dalam rencana tahunan juga menyebabkan kinerja pembangunan di Kota Semarang ikut terpengaruhi.

Tabel 2.124 Keterkaitan Isu Global, Isu Nasional, dan Isu Regional

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Lokasi Kota Semarang yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan menjadi hub bagi daerah lain. - Kota Semarang sebagai Kota MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition</i>). - Pengembangan padi biosalin, padi yang dapat ditanam pada tanah dengan kadar garam tinggi atau air payau. - Kota Semarang memiliki kawasan permukiman bersejarah yang lengkap dan unik, seperti Kauman, Kampung Melayu, Pecinan, dan kawasan Kota Lama.	- Belum optimalnya pengembangan ekonomi berbasis keunggulan lokal - Masih tingginya tingkat pengangguran	Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah	- Konstelasi Perdagangan Global - Geopolitik dan Geoekonomi - Persaingan Sumber Daya Alam - Luar Angkasa	- Masih Rendahnya Produktivitas - Geopolitik dan Geoekonomi	- Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan - Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan	Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia
- Adanya program <i>Universal Health Coverage</i> atau UHC untuk masyarakat kurang mampu yang sampai saat ini	- Masih belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, serta	Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui	Pertumbuhan Kelas Menengah	- Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	- Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia - Kekuatan Budaya sebagai	Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
capaiannya sudah 100% kepada masyarakat	peningkatan derajat kesehatan masyarakat	peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan		- Pergeseran Struktur Kelas Menengah	Karakter dan Jatidiri Masyarakat	
- Adanya beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu yang menjangkau dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dari sekolah negeri hingga sekolah swasta. - Adanya beasiswa untuk khusus anak petani dan anak nelayan. - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.	- Belum optimalnya layanan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua masyarakat secara berkeadilan					Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas
- Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin. - Adanya bantuan Raskin yang menyediakan beras dengan harga terjangkau bagi warga miskin.	- Kondusivitas wilayah perlu terus ditingkatkan - Pelestarian warisan budaya masih perlu ditingkatkan - Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender	Demografi Global	Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk peningkatan taraf hidup masyarakat

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Adanya program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal warga miskin						
- Adanya <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) yang rutanya menjangkau seluruh kota - Mulai dibangunnya Bangunan Gedung Hijau di Kota Semarang	- Penyediaan dan kualitas infrastruktur kota masih perlu ditingkatkan	- Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi - Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan - Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan	- Urbanisasi Dunia - Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	Penyediaan Prasarana dan Sarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas
- Pengembangan pembinaan program kampung iklim (proklam) di wilayah permukiman dan sekolah-sekolah Kota Semarang - Telah dilaksanakannya program pembatasan penggunaan kantong plastik, secara periodik dilaksanakan <i>Car Free Day</i> , juga penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga	- Pengendalian kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan masih belum optimal - Penguatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana perlu terus ditingkatkan				Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Penanggulangan Bencana	Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
dan sampah sejenis sampah rumah tangga mulai dari pemilahan, pengumpulan pengolahan dan pemrosesan akhir.		perubahan iklim				
- Peningkatan nilai SAKIP Kota Semarang - Opini BPK terhadap hasil laporan keuangan daerah di Kota Semarang adalah WTP - Tingkat Maturitas SPIP di Kota Semarang terus meningkat - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	- Penyelenggaraan manajemen penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan - Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab	- Perkembangan Teknologi - Tata Kelola Keuangan Global	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Penyelenggaraan <i>Good Governance</i>

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian perencanaan pembangunan daerah tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dokumen perencanaan pembangunan diawali dengan perencanaan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun, selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Sesuai dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang telah disusun melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045, telah ditetapkan visi pembangunan daerah Kota Semarang. Visi pembangunan daerah tersebut adalah “Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan.”. Visi tersebut merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kota Semarang Tahun 2005-2025 yang mengandung makna yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kota Metropolitan, mengandung makna peran dan fungsi Kota Semarang sebagai pusat aglomerasi wilayah Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi). Metropolitan Semarang diartikan sebagai metropolitan yang tidak hanya dibatasi oleh delineasi administratif tapi juga berdasarkan keterkaitan fungsi dengan daerah di sekitarnya. Dengan posisi letak Kota Semarang yang strategis yaitu di antara kota Jakarta dan kota Surabaya, berdekatan dengan Kawasan Industri Batang, Kendal, dan Brebes (pusat industri manufaktur dan teknologi di Indonesia), terhubung dengan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) nasional Candi Borobudur, dan peluang kedekatan akses dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru, di tahun 2045 Kota Semarang diharapkan dapat menjadi metropolitan yang berfungsi sebagai superhub yang didukung oleh konektivitas dan aksesibilitas yang baik. Dengan demikian perekonomian Kota Semarang akan meningkat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Pulau Jawa, yang berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045 diarahkan menjadi megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sebagai Kota Metropolitan, di tahun 2045 Kota Semarang dapat menjadi kota

yang meningkat kualitas perannya sebagai tempat bermukim, pusat kegiatan dan pelayanan ekonomi (bekerja), serta jasa pendukung lainnya (rekreasi) yang nyaman dan layak, serta dapat mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Semarang dan wilayah sekitarnya.

Kota Layak Huni, mengandung makna bahwa Kota Semarang di tahun 2045 merupakan kota yang nyaman untuk dihuni dan beraktivitas oleh seluruh warga Kota Semarang maupun oleh warga sekitar Kota Semarang, baik dari sisi fisik (fasilitas perkotaan, permukiman, prasarana, sarana, dan lain-lain) maupun aspek non fisik (hubungan sosial, karakter budaya, aktivitas ekonomi, dan lain-lain). Sebagai kota yang layak huni, Kota Semarang diharapkan akan memiliki kualitas hidup tinggi, yang didukung oleh akses yang adil ke layanan perkotaan yang efisien; infrastruktur berkualitas, cerdas dan ramah lingkungan; sistem pemerintahan yang adaptif yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari proses pengambilan keputusan; memiliki perencanaan kota yang holistik; tangguh dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim; memiliki sistem ekonomi kota yang sirkular dan inklusif; memiliki sistem transportasi cerdas berkelanjutan.

Kota yang Maju, mengandung makna berdaya saing, tangguh, modern, inovatif, dan adil. Daya Saing, Perekonomian Kota Semarang mampu tumbuh di atas nasional dan provinsi dan berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dengan pengembangan potensi sektor-sektor unggulan, terutama pada sektor jasa pendukung industri dan perdagangan, dengan sumber daya manusianya yang produktif, kreatif dan unggul serta mampu bersaing di persaingan global. Tangguh, Kota Semarang di tahun 2045 adalah kota yang mampu mengantisipasi, menghadapi dan menangani tantangan dan krisis dari alam dan non alam dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Modern, Kota Semarang yang modern adalah kota yang cerdas dengan dukungan infrastruktur mutakhir, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Pemerintah Kota Semarang dan warganya memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan layanan perkotaan yang cerdas, efisien, efektif, terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau, yang didukung oleh riset dan inovasi. Inovatif, Kota Semarang memiliki sumber daya manusia yang sebagian besar berpendidikan tinggi, yang mampu menciptakan dan memanfaatkan teknologi terbaru, yang mampu menciptakan dan memanfaatkan inovasi di berbagai sektor untuk menunjang produktivitas dan peningkatan kualitas hidup kota dan warganya. Dengan kota dan warga yang terus berinovasi, maka Kota Semarang menjadi kota yang efisien, efektif dan berkelanjutan, yang mampu menghadapi tantangan global yang kompleks dari aspek ekonomi, sosial dan budaya. Adil, Kota Semarang yang maju di tahun 2045 adalah kota yang mampu menghadirkan layanan perkotaan dan kesejahteraan yang inklusif ke seluruh masyarakat Kota Semarang secara adil dalam segala aspek tanpa diskriminasi.

Kota yang Berkelanjutan, Mengandung makna bahwa Kota Semarang menerapkan pembangunan yang menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial yang layak bagi kehidupan, dengan memperhatikan prinsip bahwa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat

juga dinikmati oleh generasi yang akan datang, memperhatikan daya dukung dan daya tampung, dan memperhatikan kearifan lokal.

Visi tersebut mencerminkan cita-cita bahwa selama 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2025 hingga 2045, Kota Semarang berkembang menjadi pusat ekonomi dan inovasi yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya, sekaligus memberikan kualitas hidup yang tinggi bagi warganya. Sebagai kota metropolitan, Semarang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, didukung oleh infrastruktur cerdas, konektivitas yang kuat, dan tata kelola yang efektif serta mampu melayani aktivitas masyarakat kota dan daerah hinterland-nya dengan baik. Keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam pembangunan, dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan. Semarang juga diarahkan menjadi kota yang inklusif dan tangguh, dengan akses yang merata terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Dengan visi ini, Kota Semarang diharapkan mampu menghadapi tantangan global, menciptakan peluang inovasi, dan menjadi contoh kota masa depan yang harmonis, modern, dan berkelanjutan, serta mendukung perwujudan visi Indonesia Emas 2045 yang dijabarkan dalam RPJPN 2025-2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi 20 tahun tersebut, kerangka kerja pembangunan jangka panjang tersebut dijabarkan dalam empat tahapan arah kebijakan lima tahunan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Arah kebijakan lima tahunan diarahkan guna penekanan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan antara satu periode dengan periode berikutnya seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Tahapan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2029

Periode RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045. Pada tahapan ini difokuskan pada langkah penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang mencakup lima aspek utama yaitu transformasi sosial, ekonomi, infrastruktur berkualitas, ketahanan kota, dan tata kelola. Fokus penguatan fondasi transformasi dilakukan melalui penguatan daya dukung dan daya tampung kota seperti peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penguatan sektor ekonomi, pembangunan

infrastruktur dasar dengan penekanan pada kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan dan penanganan bencana, serta penguatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis dan kolaboratif.

3.1.1. Visi

Berdasarkan visi dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah pada RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, dan mempertimbangkan evaluasi RPJMD Kota Semarang periode sebelumnya, serta mempertimbangkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2029, maka Visi Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah:

**“KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU,
BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI, DAN INKLUSIF”**

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob. Penjabaran visi pembangunan Kota Semarang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Pusat Ekonomi yang Maju: Kota Semarang sebagai pusat pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa, logistik, wisata, dan bisnis yang terintegrasi. Kota Semarang bertekad untuk terus mengembangkan dirinya sebagai pusat ekonomi yang maju dalam lima tahun ke depan. Dengan memanfaatkan lokasinya yang strategis di tepi Laut Jawa, Semarang akan memperkuat perannya sebagai hub perdagangan dan logistik regional maupun internasional. Pelabuhan Tanjung Emas dan bandar udara Jenderal Ahmad Yani akan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung aktivitas ekspor-impor yang semakin meningkat. Kota Semarang juga akan menjadi magnet bagi investasi di berbagai sektor, terutama yang terkait dengan sektor perdagangan dan jasa. Dukungan terhadap industri kreatif dan startup akan terus ditingkatkan untuk menciptakan inovasi dan lapangan kerja baru. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Kota Semarang siap menjadi motor penggerak perekonomian Jawa Tengah dan Nasional.

Berkeadilan Sosial: Mengarahkan pembangunan Kota Semarang yang adaptif dan kolaboratif dengan mengedepankan aspek keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain dikenal sebagai pusat ekonomi yang berkembang pesat, Kota Semarang juga diharapkan sebagai kota yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial. Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap warganya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui berbagai program sosial yang inklusif, Semarang akan terus berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan setiap warga mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan

kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat akan menjadi fokus utama, dengan memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan prinsip keadilan sosial, Semarang berusaha mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

Lestari: Pembangunan Kota Semarang dititikberatkan pada tata kelola lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, berorientasi pada upaya untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan alam, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kota Semarang, juga berkomitmen kuat untuk menjadi kota yang lestari dan ramah lingkungan. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Semarang telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidupnya dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berbagai program penghijauan akan terus digalakkan untuk menciptakan ruang hijau yang asri dan menyejukkan yang tidak hanya mendukung kelestarian alam, tetapi juga mendukung aktivitas dan rekreasi masyarakat. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan diperkuat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Semarang juga akan mendorong penggunaan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, Semarang bertekad menjadi kota yang hijau dan lestari, tempat di mana lingkungan hidup yang sehat dapat dinikmati oleh seluruh warganya.

Inklusif: Pembangunan Kota Semarang yang berkebudayaan dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan melibatkan semua orang dari berbagai kelompok dan berbagai lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan salah satunya. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Kota Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi inklusivitas dan keberagaman. Di kota ini, semua lapisan masyarakat hidup berdampingan dengan harmonis, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Semarang menjadi contoh bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan yang menyatukan dan memperkaya kehidupan kota. Setiap warga Semarang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Kota ini menawarkan lingkungan yang ramah dan terbuka, di mana setiap individu dihargai dan dihormati. Keberagaman budaya dan agama dihormati dan dirayakan bersama, menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara warganya. Di bidang ekonomi, Kota Semarang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang merata terhadap peluang dan sumber daya. Kota ini memberikan ruang bagi semua individu untuk berkembang, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan. Masyarakat yang inklusif ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang kuat, di mana semua orang bekerja sama untuk membangun kota yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan, Kota Semarang dikenal sebagai kota yang menyediakan akses pendidikan yang adil

dan merata bagi semua anak. Kota ini menanamkan nilai-nilai inklusivitas sejak dini, mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menghargai perbedaan. Semangat inklusivitas ini juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan kota lainnya, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi semua warganya. Dengan semangat inklusivitas yang kuat, Kota Semarang terus berupaya menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua warganya. Semarang menjadi contoh kota yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga mampu merangkul dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakatnya, menjadikannya tempat yang lebih baik untuk semua.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

- Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
- Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

3.1.2. Misi

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi “Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif”, selanjutnya dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi sekolah swasta gratis, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial rumah inspirasi, dan pendampingan kelompok disabilitas seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang

Misi 2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset

dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

Misi 3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program *urban farming*, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip *livability*. Akses air bersih dan sanitasi aman dan layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks.

Misi 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, *business matching* dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Misi 5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi ini diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan *bus rapid transit* (BRT), peremajaan armada BRT secara merata dan proporsional di seluruh koridor,

perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyoroti penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim.

Misi 6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatan dini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota juga menggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam adaptasi iklim ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif bagi wilayah yang berhasil mengelola ekosistem dan sumber daya secara berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.

Misi 7. Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem e-budgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. *Smart city* dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Pembangunan Kota Semarang 5 (lima) tahun dari 2025 sampai dengan 2029 merupakan perjalanan yang panjang. Terdapat berbagai macam potensi yang perlu dikembangkan maupun isu strategis, permasalahan, dan tantangan yang harus diatasi yang akan bermunculan secara dinamis selama periode tersebut. Berbagai kebijakan dan strategi akan diambil Kota Semarang dalam upayanya untuk kemajuan dan kesejahteraan Kota Semarang. Kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Keberhasilan dari semua program pembangunan ini tidak akan terwujud tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Setiap warga dari individu hingga komunitas memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan program pembangunan untuk memberi

masuk, mendukung, menjaga maupun mengevaluasi jalan pembangunan Kota Semarang. Kolaborasi ini melibatkan berbagai aspek teknis, seperti perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat, integrasi sistem pelayanan publik untuk efisiensi dan transparansi, pelibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya komunikasi yang transparan dan kerjasama yang solid, setiap tantangan dapat diatasi dan setiap potensi dapat dikembangkan. Visi dan misi Kota Semarang didukung dengan tagline:

Tabel 3.1 Tagline Visi dan Misi Kota Semarang

#SemarangBersatu
SEMARANG SEMAKIN
HEBAT!

- Bangun Infrastruktur Berkualitas*
Ekonomi Rakyat yang Berkelanjutan
Ramah Lingkungan
Sosial Harmonis Tanpa Konflik
Akses Pendidikan dan Kesehatan Terjamin
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Utamakan Kesejahteraan Bersama
- Humanis dalam Melayani*
Ekonomi Inklusif
Budaya yang Dilestarikan
Aksesibilitas Meningkat
Tangguh menghadapi Tantangan



Gambar 3.2 Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang

3.1.3. Tujuan

Ketercapaian visi selama lima tahun dirumuskan dalam tujuan yang merupakan rangkaian kinerja untuk menggambarkan arah capaian visi. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan RPJMD. Bilamana visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan, maka program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama lima tahun. Dalam perumusannya, tujuan harus bersifat *Specific, Measureable, Attainable, Relevant, and Timebound* (SMART). Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan disusun dan dirumuskan dari visi dan misi Kepala Daerah yang merupakan rangkaian kinerja untuk menggambarkan pencapaian visi yang diturunkan menjadi pokok visi. Selain itu, perumusan tujuan berpedoman dan mengacu pada RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, dan RPJMN 2025-2029.

Tujuan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 adalah “perwujudan Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan menjadi Kota Metropolitan yang Layak Huni, Kota Metropolitan yang Maju, dan Kota Metropolitan yang Berkelanjutan. Tujuan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang tercantum di dalam Peraturan Gubernur nomor 6 Tahun 2025 adalah “perwujudan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan”. Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis menjadi representasi pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Selain ibu kota Provinsi, Kota Semarang berperan sebagai Wilayah Pengembangan Kedungsepur yang bersinergi dalam potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Dengan peran di dalam Provinsi Jawa Tengah tersebut, tujuan pembangunan kota Semarang tahun 2025-2029

harus mempedomani dan mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Tujuan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 yang tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 adalah “Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Kota Semarang menjadi prioritas pembangunan nasional dalam 2025-2029. Dalam konstelasi Wilayah Metropolitan Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus dan Kota Semarang sebagai wilayah pesisir, tujuan pembangunan kota Semarang tahun 2025-2029 harus mengacu pada tujuan pembangunan RPJMN 2025-2029. Tujuan dari setiap pokok visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif, dirumuskan tujuan sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing. Tujuan ini diimplementasikan dengan meningkatkan potensi sumber daya lokal yang berdaya saing global berlandaskan riset dan inovasi potensi sumber daya lokal yang melimpah. Produk-produk unggulan, seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, dan industri kreatif, didorong untuk masuk ke pasar global melalui promosi internasional dan pengembangan jaringan perdagangan. Hal ini dapat menjadikan Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang maju.
 - b. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat. Pembangunan Infrastruktur berkualitas, merata, dan inklusif diharapkan mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Infrastruktur merupakan tulang punggung bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menciptakan konektivitas yang efisien antar wilayah, baik dalam bentuk jaringan transportasi, jalan raya, jembatan maupun utilitas publik seperti air bersih, listrik, dan internet. Konektivitas antar wilayah ditingkatkan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa secara efisien.
 - c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian. Kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan indeks pembangunan Manusia Kota Semarang sehingga sumber daya manusia Kota Semarang akan unggul, produktif dan berbudaya mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial dan meningkatkan daya saing Kota Semarang.
 - d. Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif. Penciptaan lingkungan sosial yang harmonis dan stabilitas politik yang kondusif merupakan prioritas utama. Melalui dialog terbuka, partisipasi aktif masyarakat, serta penguatan nilai-nilai kebhinekaan, Kota Semarang bertekad untuk menjaga

kerukunan antarwarga dan menghindari konflik sosial. Stabilitas politik yang terjaga akan mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan-kebijakan yang inklusif dan adil.

Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari misi kesatu, misi kedua, misi keempat, dan misi kelima.

2. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif, dirumuskan tujuan Menurunnya kemiskinan secara inklusif, Penurunan kemiskinan merupakan kunci untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penjaminan ketersediaan pangan, sandang, dan papan dan memastikan bahwa semua warga Kota Semarang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar ini, sehingga diharapkan juga akan meningkatkan kualitas keluarga.

Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari Misi ketiga.

3. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif, dirumuskan tujuan Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat, Kota Semarang berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui program penghijauan, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman bagi semua warga.

Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari Misi keenam.

4. Pada pokok visi Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Humanis, dan Inklusif, dirumuskan tujuan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat, Meningkatnya tata kelola pemerintahan menjadi prioritas untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Proses administrasi dipermudah dan dipercepat melalui digitalisasi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan lebih cepat dan mudah. Tata kelola pemerintahan yang matang dan berbasis data merupakan kunci keberhasilan pembangunan.

Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari Misi ketujuh.

Perumusan tujuan dan keterkaitannya dengan misi RPJMD Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	POKOK VISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN
1	Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif	Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%
		Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat	Angka Pemenuhan Kinerja Sistem Infrastruktur Strategis	Angka
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka
		Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif.	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Angka
2	Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif	Menurunnya kemiskinan secara inklusif	Tingkat Kemiskinan	%
			Rasio Gini	Angka
3	Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat	Nilai Pemenuhan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota	Nilai
4	Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka

3.1.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran disusun dan dirumuskan dari visi, misi, dan tujuan Kepala Daerah. Selain itu, perumusan sasaran berpedoman dan mengacu pada sasaran RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, dan RPJMN 2025-2029.

Dalam RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, ditetapkan sasaran (1) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, inklusif, dan berbudaya, (2) Terwujudnya Perekonomian Kota yang Tangguh dan Berkeadilan, (3) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel, (4) Terwujudnya Ketahanan Kota yang berbasis ketangguhan Individu, Keluarga, Komunitas, dan Masyarakat, dan (5) Perwujudan Infrastruktur berkualitas yang adaptif dan ramah lingkungan. Sasaran tersebut disusun dalam mendukung tujuan perwujudan Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan.

Dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, ditetapkan sasaran (1) Terwujudnya SDM unggul dan berdaya saing yang inklusif, (2) Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, (3) Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis, (4) Terwujudnya kondusivitas wilayah didukung stabilitas ekonomi makro daerah, (5) Terwujudnya masyarakat berkarakter dan berketahanan sosial, dan (6) Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana. Sasaran pembangunan tersebut disusun dalam mendukung perwujudan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan.

Dalam RPJPN Tahun 2025-2029, ditetapkan sasaran, (1) Meningkatnya Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju, (2) Kepemimpinan dan Pengaruh Di Dunia Internasional Meningkat, (3) Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang, (4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat, dan (5) Intensitas Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*. Sasaran tersebut disusun dalam mendukung tujuan perwujudan Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Hasil rumusan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- I. Meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
 - o Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah, melalui indikator LPE Sektor Perdagangan dan Jasa
 - o Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto, melalui PMTB terhadap PDRB.
 - o Terjaganya stabilitas harga barang dan jasa, melalui indikator tingkat inflasi

- II. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
- Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan, melalui indikator tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah.
 - Meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis, melalui indikator tingkat pengembangan kawasan strategis.
- III. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan, diukur melalui Indeks Kesehatan.
 - Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata, diukur melalui Indeks Pendidikan.
 - Meningkatnya kesetaraan gender, melalui Indeks Pembangunan Gender.
- IV. Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
- Meningkatnya kualitas demokrasi politik, melalui indikator indeks demokrasi.
 - Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila, serta wawasan kebangsaan, melalui angka kriminalitas.
- V. Menurunnya kemiskinan secara inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
- Menurunnya beban pengeluaran masyarakat, melalui Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya .
 - Meningkatnya pendapatan masyarakat, melalui PDRB per kapita.
 - Meningkatnya akses lapangan kerja, melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).
- VI. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
- Menurunnya dampak perubahan iklim, melalui indikator Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

- Meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan, melalui indikator Indeks risiko bencana.
- Menurunnya kawasan banjir dan rob, melalui indikator persentase kawasan banjir dan rob.

VII. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat . Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil, melalui indikator Nilai SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Indeks Integritas Nasional.
- Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui indikator Indeks Pelayanan Publik.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diukur melalui persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

POKOK VISI/MISI/TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI : KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF											
Pokok Visi 1: Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif											
MISI 4: Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.											
T1	Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing			Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,80-6,50	5,90-6,30	6,90-7,49	7,50-7,98	7,70-8,36	7,90-8,50
		S1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE Sektor Perdagangan dan Jasa	Persen	7,20	7,40	7,60	7,80	8,00	8,20
		S2	Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto	PMTB terhadap PDRB	Persen	60,51	59,67	59,67	59,66	59,65	59,44
		S3	Terjaganya Stabilitas harga barang dan jasa	Tingkat Inflasi	Persen	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1
MISI 5: Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan											
T2	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat			Angka Pemenuhan Kinerja Sistem Infrastruktur Strategis	Angka	0,55	0,56	0,57	0,62	0,63	0,64
		S4	Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan	Tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah	Persen	56,81	57,65	58,49	62,74	63,99	65,24
		S5	Meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis	Tingkat pengembangan kawasan strategis	Persen	51,32	52,41	53,61	59,73	61,96	62,52

POKOK VISI/MISI/TUJUAN			SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI : KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF												
MISI 1: Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian												
MISI 2: Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi												
T3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian				Indeks Pembangunan Manusia	Angka	85,47 – 85,55	86,25	86,02 – 85,10	86,30 – 86,38	86,57 – 86,65	86,84 – 86,92
			S6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan	Indeks Kesehatan	Angka	0,910	0,915	0,920	0,925	0,930	0,935
			S7	Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata	Indeks Pendidikan	Angka	0,803	0,805	0,807	0,809	0,811	0,813
			S8	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Angka	96,11	96,25	96,4	96,54	96,69	96,83
MISI 1: Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian												
T4	Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif				Indeks pembumian pancasila dan wawasan kebangsaan (IP2WK)	Angka	85,50	85,74	86,44	87,14	87,84	88,54
			S9	Meningkatnya kualitas demokrasi politik	Indeks Demokrasi	Angka	85,36	85,86	86,24	86,61	86,86	86,99
			S10	Meningkatnya internalisasi ideologi pancasila, serta wawasan kebangsaan	Angka Kriminalitas	Kasus	1.188	1.180	1.172	1.164	1.156	1.148
Pokok Visi 2: Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif												
MISI 3: Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak												
MISI 4: Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.												
T5	Menurunnya kemiskinan secara inklusif				Tingkat Kemiskinan	Persen	3,86	3,86-3,74	3,53	3,37	3,20	2,99
					Rasio Gini	Angka	0,405	0,402	0,399	0,395	0,391	0,386
			S11	Menurunnya beban pengeluaran masyarakat	Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	63,37	65,11	66,86	68,61	70,36	72,11
			S12	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per kapita	Rp Juta	168,43	205,28	242,14	278,99	315,85	351,59

POKOK VISI/MISI/TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI : KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF											
		S13	Meningkatnya akses lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,61-5,31	5,40-5,10	5,23-4,93	5,04-4,74	4,85-4,55	4,66-4,36
				Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Persen	70,08	70,13	70,43	70,78	70,88	70,96
Pokok Visi 3: Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif											
MISI 6: Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh Dan Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat											
T6	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat			Nilai pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota	Nilai	0,307	0,373	0,385	0,392	0,395	0,397
		S14	Menurunnya dampak perubahan iklim	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2Eq	569.246,19	858.546,65	1.244.280,59	1.822.881,50	2.497.915,89	3.247.290,66
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,89	64,94	64,98	65,03	65,07	65,11
		S15	Meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan	Indeks Risiko Bencana	Angka	91,62 - 90,32	90,5 - 88,66	89,38 - 87	88,25 - 85,34	87,13 - 83,68	86,01 - 82,02
		S16	Menurunnya banjir dan rob	Persentase Kawasan Banjir dan Rob	Persen	3,04	2,97	2,9	2,82	2,75	2,58
Pokok Visi 4: Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif											
MISI 7: Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas											
T7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	89,94	90,66	91,39	92,12	92,85	93,57
		S17	Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	74,09	75,89	77,69	79,49	81,29	83,09
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	78,83	79,49	80,15	80,81	81,47	82,79
				Indeks Integritas Nasional	Angka	76,43	77,25	78,06	78,88	79,69	80,50
		S18	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks pelayanan publik	Angka	4,48	4,52	4,56	4,60	4,64	4,66
		S19	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	81,90	82,58	83,71	86,33	87,66	90,28

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025–2029 merupakan momen strategis dalam menata arah pembangunan kota yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Dalam periode lima tahun ini, Pemerintah Kota Semarang menempatkan program prioritas sebagai instrumen utama untuk mewujudkan visi pembangunan yang selaras dengan aspirasi masyarakat serta dinamika regional dan global.

Program prioritas dalam RPJMD ini dirancang melalui proses yang partisipatif dan berbasis pada data serta kajian mendalam terhadap permasalahan pembangunan kota. Penekanan utamanya bukan hanya pada percepatan capaian pembangunan, tetapi juga pada upaya menciptakan fondasi kokoh untuk transformasi jangka panjang. Pendekatan pembangunan yang digunakan bersifat holistik, menysasar penguatan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan terhadap lingkungan hidup, penyediaan infrastruktur berkualitas, serta pertumbuhan ekonomi yang merata.

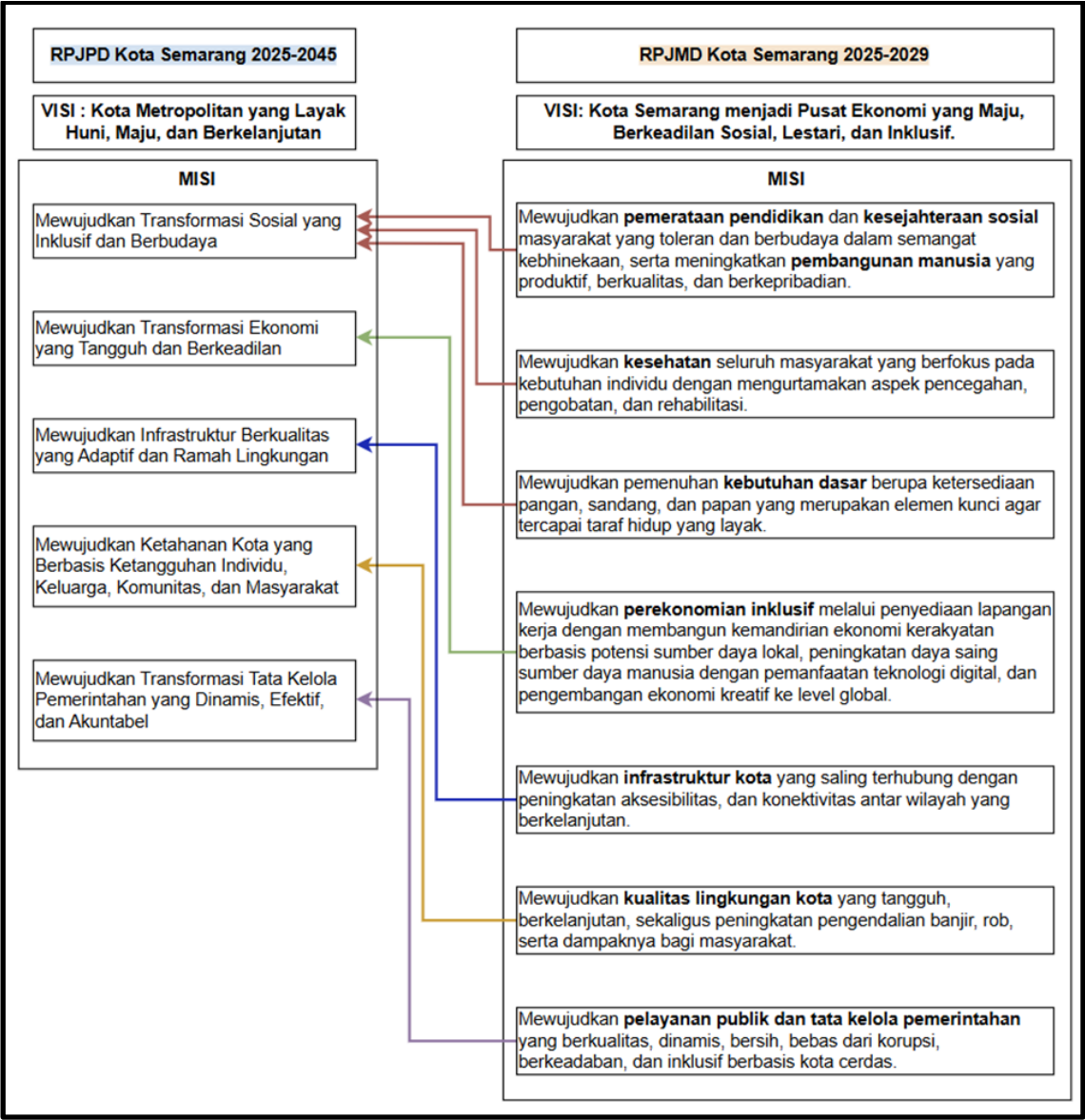
Seluruh prioritas pembangunan diarahkan untuk menjawab isu strategis yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, seperti ketimpangan antarwilayah, kerentanan sosial-ekonomi, keterbatasan daya dukung lingkungan, serta kebutuhan akan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pemerintah Kota Semarang menempatkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia sebagai pilar utama dalam perencanaan ini.

Dalam implementasinya, program prioritas juga mempertimbangkan daya saing dan karakteristik lokal Kota Semarang sebagai kota pesisir, pusat perdagangan, dan kawasan strategis nasional. Oleh karena itu, setiap langkah perencanaan tidak hanya mempertimbangkan faktor internal, tetapi juga relasi kota ini dengan wilayah sekitarnya, termasuk dalam konteks pengembangan kawasan metropolitan dan konektivitas antarwilayah.

3.1.5. Keterkaitan Visi-Misi Wali Kota Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

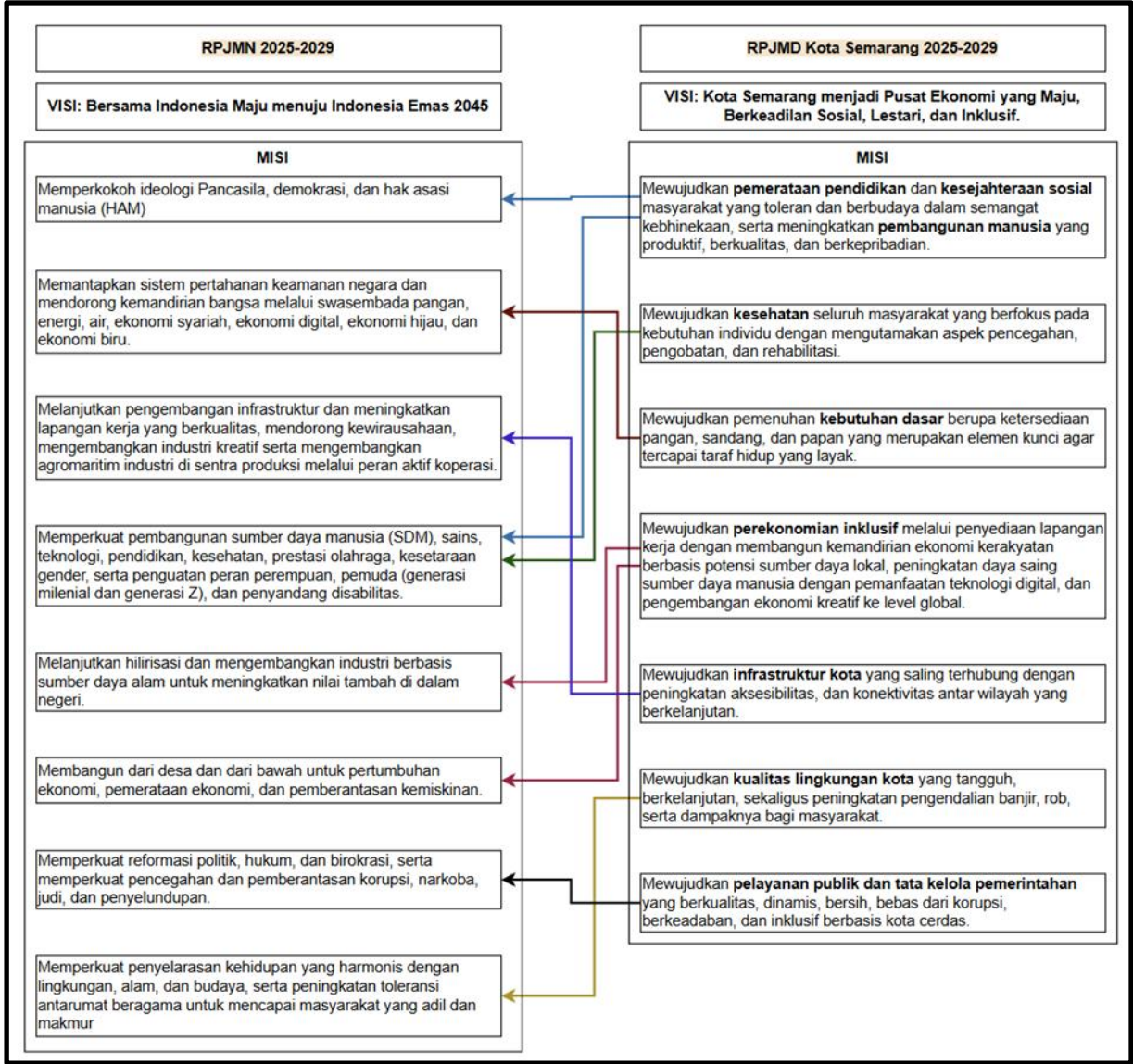
Visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang yang diuraikan diatas juga disusun memiliki keterkaitan dengan visi-misi RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, visi-misi RPJMN Tahun 2025-2029, dan visi-misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Keterkaitan Visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang dengan dokumen perencanaan lainnya bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan sinkronisasi program pembangunan sehingga dapat menciptakan pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan berkelanjutan demi kepentingan lokal dan nasional sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, yang mendukung untuk pencapaian Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan. Keterkaitan Visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029 dan visi-misi RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2029, tergambar dalam skema dibawah ini.



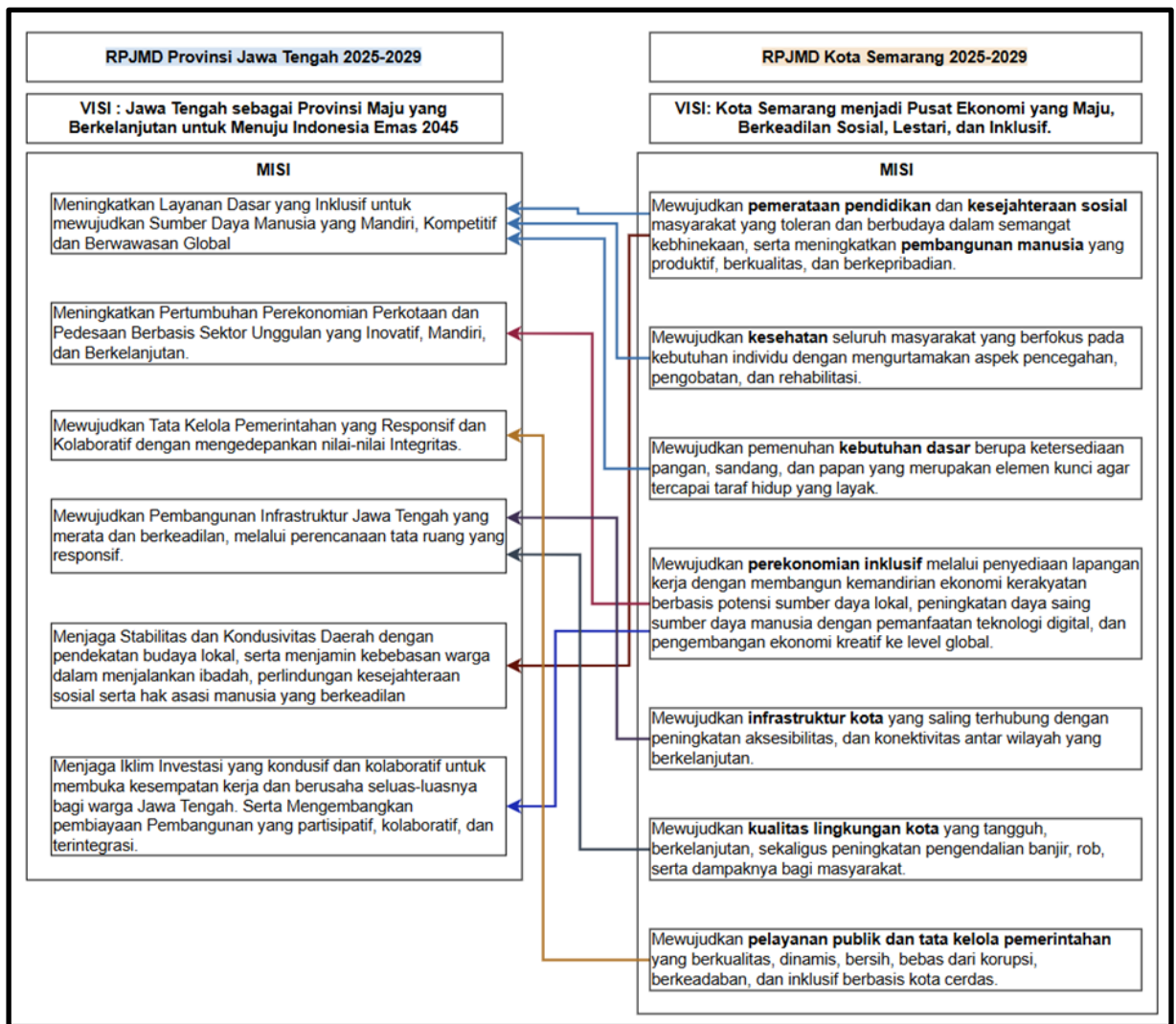
Gambar 3.3 Skema keterkaitan Visi-Misi RPJPD 2025-2045 dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029, memuat visi-misi pembangunan nasional yang menjadi cita-cita Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi acuan pembangunan nasional jangka waktu 5 tahun dari 2025 sampai 2029. Visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029 mempedomani visi-misi RPJMN 2025-2029 dalam penyusunan untuk mendukung visi "Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045" dengan 8 misi. Keterkaitan Visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029 dan visi-misi RPJMN Tahun 2025-2029, tergambar dalam skema dibawah ini.



Gambar 3.4 Skema keterkaitan RPJMN 2025-2029 dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2025-2030. Penjabaran visi dan misi daerah berdasarkan pada filosofi cita-cita untuk “Ngopeni. Nglakoni. Jateng” yang diarahkan untuk perwujudan komitmen “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045” yang memuat 8 misi. Keterkaitan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029 dan visi-misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, tergambar dalam skema dibawah ini.



Gambar 3.5 Skema keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan langkah yang penting untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam program-program pembangunan daerah sehingga tujuan dan sasaran RPJMD dapat dicapai secara terukur selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan berisi rumusan perencanaan komprehensif yang berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus, dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, dalam dokumen perencanaan ini, terdapat dua ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, yaitu perencanaan strategis yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah secara langsung, serta perencanaan operasional yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan strategis dimaksudkan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala upaya yang secara langsung dapat menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan

secara lebih rinci ke dalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

3.2.1. Strategi Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi pada tujuan dan sasaran RPJMD. seperti yang bisa dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Semarang Tahun 2025-2029

POKOK VISI/ MISI/ TUJUAN		SASARAN RPJMD	STRATEGI
Pokok Visi: Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif			
Misi 4: Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif ke level global.			
T1: Meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing	1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Penguatan kualitas produktivitas masyarakat sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital dan ekonomi syariah
	2	Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto	Peningkatan iklim investasi yang kondusif
	3	Terjaganya stabilitas harga barang dan jasa	Peningkatan ketersediaan produksi barang dan jasa serta distribusi yang terjaga
Misi 5: Mewujudkan infrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas, dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan.			
T2: Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat	4	Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan	Percepatan pemenuhan kebutuhan konektivitas, pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur hijau yang memiliki dampak ekonomi langsung ke masyarakat
	5	Meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis	Pengembangan kawasan strategis ekonomi, sejarah, dan budaya yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi
Misi 1: Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.			
Misi 2: Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.			
T3: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian	6	Meningkatnya derajat kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan	Peningkatan layanan kesehatan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat
	7	Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia yang	Pemenuhan dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan

POKOK VISI/ MISI/ TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI
		unggul, tangguh dan produktif secara merata	
	8	Meningkatnya kesetaraan gender	Peningkatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia serta pengarusutamaan gender
Misi 1: Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.			
T4: Meningkatkan lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif	9	Meningkatnya kualitas demokrasi politik	Peningkatan kondusifitas wilayah
	10	Meningkatnya internalisasi ideologi pancasila, serta wawasan kebangsaan	Pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
			Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
Pokok Visi: Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif			
Misi 3: Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang, dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak			
T5: Menurunnya kemiskinan secara inklusif	11	Menurunnya beban pengeluaran masyarakat	Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem terpadu dan terintegrasi dan perlindungan sosial adaptif integratif
			Pelaksanaan program bantuan sosial dan dan jaminan sosial yang berkeadilan
			Penyediaan infrastruktur layanan dasar
	12	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Peningkatan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan dan iklim berusaha
			Peningkatan kesempatan kerja yang merata dan inklusif
13	Meningkatnya akses lapangan kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	
Pokok Visi: Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif			
Misi 6: Mewujudkan kualitas lingkungan kota yang tangguh, berkelanjutan, sekaligus peningkatan pengendalian banjir, rob, serta dampaknya bagi masyarakat			
T6: Meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi	14	Menurunnya dampak perubahan iklim	Peningkatan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim
			Peningkatan kapasitas individu, komunitas, dan kota untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim

POKOK VISI/ MISI/ TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI
seluruh masyarakat			Peningkatan sistem pengelolaan sampah
			Penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat
	15	Meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan	Peningkatan kesiapsiagaan kota dan masyarakat dalam kebencanaan
			Peningkatan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana
	16	Menurunnya banjir dan rob	Pengendalian banjir dan rob melalui peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir
			Peningkatan konservasi sumber daya air
Pokok Visi: Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif			
Misi 7: Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas			
T7: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat	17	Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil	Peningkatan akuntabilitas kinerja daerah
	18	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan birokrasi pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan
	19	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat yang substantif dalam pembangunan secara inklusif

Berdasarkan tabel 3.4, rumusan strategi dan arah pembangunan pada tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

- I. Meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing.

Tujuan ini dijabarkan dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah, meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto, dan terjaganya stabilitas harga barang dan jasa.

Pertumbuhan sektor unggulan daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan perekonomian kota yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing. Sektor unggulan seperti perdagangan, jasa, industri kreatif, pariwisata, dan industri pengolahan memiliki potensi besar untuk menciptakan nilai tambah ekonomi kota dan lapangan pekerjaan. Sasaran tersebut dapat dicapai dengan strategi penguatan kualitas produktivitas masyarakat sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital dan ekonomi syariah.

Melalui penerapan prinsip ekonomi hijau yang ramah lingkungan, efisiensi sumber daya, dan inovasi teknologi, sektor-sektor unggulan seperti

pertanian, perikanan, pariwisata, industri kreatif, dan manufaktur dapat berkembang tanpa mengorbankan kelestarian alam. Di sektor pariwisata, pengembangan desa wisata berbasis ekologi yang melestarikan hutan dan sungai menjadi prioritas, menunjukkan komitmen untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

Kota Semarang mengimplementasikan prinsip ekonomi biru dengan fokus pada peningkatan pembangunan budidaya perikanan secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan sebagai pemenuhan konsumsi lokal maupun peningkatan nilai ekonomi. Program konkret yang akan dilaksanakan meliputi penumbuhan sentra budidaya perikanan sebagai pusat kolaborasi dan inovasi, serta pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan di lingkungan perkotaan. Pemerintah juga akan memberikan dukungan penuh kepada nelayan melalui fasilitasi alat tangkap dan asuransi, serta memperkuat kelembagaan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Nelayan (BUMNel). Program *Social Fishery* berupa pembagian bibit ikan kepada masyarakat juga digalakkan untuk pemenuhan gizi dan tujuan sosial, memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya bahari memberikan manfaat langsung kepada warga.

Dalam transformasi digital, Penguatan digitalisasi UMKM memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong inovasi produk agar mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Infrastruktur pendukung seperti optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM sebagai pusat dokumentasi dan digitalisasi produk lokal akan diperkuat. Selain itu, ekosistem ekonomi kreatif akan didorong melalui festival industri kreatif yang berfokus pada subsektor digital seperti pengembangan *game*, film, dan animasi, serta melalui pembentukan Satu Data Pelaku Usaha untuk perencanaan yang lebih akurat. Sinergi ini bertujuan menciptakan ekosistem di mana UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dapat tumbuh dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Prinsip ekonomi syariah juga diintegrasikan untuk membangun ekosistem halal yang komprehensif melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim, industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi internasional, serta keuangan syariah dan dana sosial syariah. Hal ini didukung dengan program fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi produk UMKM dan IKM secara masif, serta pendampingan bagi juru sembelih untuk menjamin kehalalan dan keamanan pangan dari hulu. Di sektor perdagangan dan jasa, akan diciptakan *halal corner* di pasar-pasar tradisional yang direvitalisasi, serta mengembangkan pariwisata ramah muslim dengan tujuan menciptakan sebuah rantai halal yang solid, dimana tahapan produksi, distribusi, dan konsumsi saling mendukung sehingga memperkuat posisi Kota Semarang sebagai destinasi halal. Dari sisi pembiayaan, akan dilakukan pengembangan keuangan syariah dan penguatan dana sosial syariah melalui peningkatan literasi dan inklusi terkait pembiayaan syariah serta akan menerapkan skema pembiayaan alternatif melalui optimalisasi dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) produktif sebagai sumber pendanaan non-APBD yang sejalan dengan upaya menyediakan akses kredit bagi masyarakat.

Sasaran kedua adalah meningkatnya nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga merupakan indikator penting dalam mendorong perekonomian kota yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing. PMTB mencerminkan besarnya investasi yang digunakan untuk membangun atau meningkatkan aset tetap seperti infrastruktur, peralatan, mesin, bangunan, serta fasilitas produksi. Semakin tinggi PMTB, semakin besar kapasitas produksi dan potensi pertumbuhan ekonomi kota. Strategi dalam rangka meningkatkan nilai PMTB, pemerintah Kota Semarang perlu penguatan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, dan insentif fiskal yang menarik bagi investor. Pengembangan infrastruktur strategis seperti jalan, pelabuhan, transportasi publik, jaringan air bersih, energi, dan telekomunikasi akan menjadi daya tarik utama bagi masuknya modal swasta. Selain itu, penguatan tata ruang kota yang terencana dengan basis teknologi hijau akan memberikan kepastian lokasi dan fungsi lahan bagi kegiatan ekonomi produktif dengan tetap menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Partisipasi sektor swasta harus dioptimalkan melalui skema kemitraan pemerintah-swasta yang transparan dan saling menguntungkan. Pemerintah juga dapat memanfaatkan pembiayaan kreatif, seperti obligasi daerah atau dana bergulir, untuk membiayai proyek-proyek strategis. Peningkatan PMTB harus bersifat inklusif, dengan memastikan investasi juga mengalir pada sektor-sektor yang melibatkan masyarakat luas, seperti UMKM, pertanian perkotaan, pariwisata berbasis komunitas, dan industri kreatif. Pelatihan tenaga kerja lokal serta penyediaan akses teknologi akan memastikan manfaat investasi dirasakan secara merata. Dengan strategi terarah, peningkatan PMTB tidak hanya akan memperluas kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat daya saing kota dalam jangka panjang. Hal ini akan mengantarkan kota menuju perekonomian yang berkelanjutan, berkeadilan, dan mampu menghadapi tantangan global.

Stabilitas harga barang dan jasa merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan perekonomian kota yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing. Harga yang stabil menciptakan kepastian bagi pelaku usaha dalam merencanakan produksi, investasi, dan pemasaran, sekaligus melindungi daya beli masyarakat agar tetap terjangkau. Ketidakstabilan harga, baik inflasi tinggi maupun deflasi, dapat mengganggu aktivitas ekonomi, menghambat pertumbuhan, dan memperlebar kesenjangan sosial. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah kota Semarang perlu memperkuat sistem pemantauan dan pengendalian inflasi daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah strategis meliputi pemetaan komoditas strategis, peningkatan kapasitas produksi lokal, serta perbaikan rantai pasok agar distribusi barang lebih efisien dan biaya logistik dapat ditekan. Pembangunan pasar induk, gudang penyimpanan, dan fasilitas rantai dingin menjadi penting untuk menjaga ketersediaan produksi barang dan jasa. Selain itu, diversifikasi sumber pasokan barang, termasuk kerja sama antar daerah, akan mengurangi risiko lonjakan harga akibat keterbatasan stok. Program subsidi atau bantuan langsung untuk komoditas tertentu juga dapat digunakan secara tepat sasaran guna menjaga keterjangkauan harga bagi kelompok rentan. Dari sisi inklusivitas, stabilitas

harga memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses barang dan jasa dengan harga wajar, sekaligus memberikan kepastian pendapatan bagi produsen lokal. Pemerintah juga dapat mendorong digitalisasi pasar dan transparansi informasi harga, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Dengan sistem pengendalian harga yang efektif, perekonomian kota akan tumbuh lebih sehat, investasi meningkat, dan daya saing terjaga. Stabilitas harga yang konsisten akan menciptakan kepercayaan pasar, memperkuat ketahanan ekonomi, dan menjadikan kota sebagai pusat pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

II. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat.

Tujuan ini dijabarkan dengan meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan dan meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis.

Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata, dan menunjang produktivitas serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat dapat dicapai melalui percepatan pemenuhan kebutuhan konektivitas, pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur hijau yang memiliki dampak ekonomi langsung ke masyarakat. Akses jalan yang memadai akan memperlancar pergerakan barang, jasa, dan manusia, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkuat keterhubungan antarwilayah. Pembangunan dan perbaikan jaringan jalan, baik jalan arteri, kolektor, maupun jalan lingkungan, harus direncanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan integrasi moda transportasi, efisiensi waktu tempuh, serta keamanan pengguna jalan. Selain itu, peningkatan kualitas konektivitas harus diiringi dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, agar tidak hanya terpusat pada kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang. Hal ini akan membuka peluang bagi masyarakat di berbagai lokasi untuk mendapatkan akses yang setara terhadap pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, konektivitas jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai penghubung kesempatan bagi semua golongan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatan inklusif dalam perencanaan akses jalan dapat diwujudkan melalui desain infrastruktur yang ramah pejalan kaki, dilengkapi jalur sepeda, fasilitas penyeberangan aman, serta aksesibilitas universal. Selain itu, dukungan teknologi seperti sistem informasi transportasi dan manajemen lalu lintas berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan. Dengan konektivitas yang baik, kawasan pengembangan akan lebih mudah diakses, sehingga mendorong masuknya investasi, meningkatkan nilai lahan, memperluas lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pada akhirnya, peningkatan konektivitas dan akses jalan akan menjadi fondasi bagi terwujudnya infrastruktur yang tidak hanya kokoh dan modern, tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata, dan menunjang produktivitas serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat dapat dicapai melalui pengembangan kawasan strategis ekonomi, sejarah, dan budaya yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan kawasan strategis ekonomi, sejarah, dan budaya menjadi penggerak penting dalam menciptakan infrastruktur berkualitas, merata, dan inklusif yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini memanfaatkan potensi ekonomi unggulan, kekayaan budaya, dan nilai sejarah sebagai daya tarik utama, sehingga mampu memperkuat konektivitas, memperlancar distribusi barang, jasa, dan wisatawan, serta membuka akses setara terhadap fasilitas publik. Peningkatan infrastruktur mencakup jaringan jalan, transportasi publik, utilitas dasar, dan infrastruktur digital yang mendukung perdagangan, pariwisata, dan industri kreatif. Pemerataan pembangunan memastikan manfaat dirasakan tidak hanya di pusat kawasan, tetapi juga wilayah penyangga. Pengembangan ini memperkuat produktivitas melalui ruang usaha, revitalisasi situs bersejarah, dan pemberdayaan UMKM. Daya tarik budaya dan sejarah memicu investasi pariwisata, sementara potensi ekonomi menggerakkan sektor pendukung. Dengan pengelolaan terpadu, kawasan strategis ini akan menjadi motor kemajuan fisik, identitas daerah, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

III. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.

Tujuan ini dijabarkan dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan, meningkatnya kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dan produktif secara merata, serta meningkatnya kesetaraan gender.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan optimal, mengurangi angka kesakitan, serta memperpanjang usia harapan hidup yang produktif. Pemerintah Kota Semarang menerapkan strategi peningkatan layanan kesehatan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk mencapai sasaran tersebut. Pelayanan kesehatan sejak dalam kandungan hingga lansia mulai dari layanan pencegahan, pengecekan kesehatan, pengobatan, hingga rehabilitasi yang mudah diakses dan merata di seluruh wilayah Kota Semarang sangat penting agar tidak ada kesenjangan pelayanan yang dapat menyebabkan ketimpangan kesehatan. Selain itu upaya preventif dan promotif harus diperkuat, seperti penyuluhan kesehatan, imunisasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga pola hidup sehat. Infrastruktur kesehatan yang memadai dan merata, ketersediaan tenaga medis profesional, termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, serta distribusi obat dan alat kesehatan harus dijaga secara berkelanjutan. Diperlukan juga sistem kesehatan yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan tantangan baru, seperti teknologi, gizi, gaya hidup, penyakit menular maupun tidak menular, serta dampak lingkungan. Pendekatan multisektoral yang melibatkan berbagai pihak, termasuk

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dapat memastikan bahwa program kesehatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Hal ini berkontribusi langsung pada pembentukan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas. Selain itu, kesehatan yang baik juga mendorong tumbuhnya kepribadian yang positif, karena kondisi fisik dan mental yang sehat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berinteraksi sosial dan mengembangkan potensi diri secara optimal. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan kesehatan masyarakat menjadi kunci strategis dalam membangun SDM unggul yang mampu mendukung kemajuan Kota Semarang.

Kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dan produktif secara merata merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian. Untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya sistematis dan terintegrasi yang mencakup pendidikan, pelatihan, serta pembinaan karakter secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Semarang menerapkan strategi pemenuhan dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Pendidikan yang merata inklusif memastikan setiap individu, tanpa terkecuali, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dasar maupun keahlian khusus sesuai kebutuhan zaman, melalui kebijakan seperti pemenuhan wajib belajar 13 tahun, optimalisasi peran pendidikan non-formal yang terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan anak tidak sekolah, perluasan layanan PAUD yang terintegrasi. Selain itu, pelatihan vokasi dan keterampilan teknis perlu diperluas untuk membekali SDM dengan keahlian yang relevan dengan perkembangan teknologi dan pasar kerja seperti program *science, technology, engineering, art and mathematics* (STEAM). Pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap perubahan ekonomi dan sosial akan menghasilkan SDM yang siap menghadapi tantangan global. Pembinaan karakter dan penguatan mental menjadi bagian penting dalam menciptakan SDM yang tangguh dan berkepribadian baik. Pendidikan nilai dan soft skills seperti kepemimpinan, kreativitas, kolaborasi, serta ketahanan mental perlu ditanamkan sejak dini. Hal ini akan memperkuat daya juang individu menghadapi berbagai situasi dan menjadikan mereka mampu berkontribusi positif di masyarakat. Pemerataan pengembangan kemampuan SDM harus dijamin agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah maupun kelompok masyarakat. Pemerintah dan berbagai pihak terkait harus menyediakan fasilitas, program, dan dukungan yang merata di semua wilayah Kota Semarang dan termasuk untuk kelompok rentan. Dengan kemampuan SDM yang unggul, tangguh, dan produktif secara merata, maka kualitas SDM yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian dapat terwujud secara optimal. SDM yang memiliki kompetensi dan karakter kuat akan mampu mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperkuat daya saing Kota Semarang di tingkat nasional maupun internasional.

Kesetaraan gender merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian. Meningkatnya kesetaraan gender dicapai dengan peningkatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia, serta

pengarusutamaan gender. Kesetaraan gender artinya laki-laki dan perempuan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan diri tanpa diskriminasi. Dengan kesetaraan, potensi seluruh individu dapat dimaksimalkan sehingga berdampak positif pada pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh. Peningkatan kesetaraan gender dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan perempuan, perlindungan hak-hak perempuan, serta penghapusan stereotip dan bias gender di masyarakat. Pendidikan inklusif yang mengedepankan kesetaraan akan membentuk generasi yang lebih sadar akan pentingnya peran dan kontribusi semua gender. Di dunia kerja, penerapan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang adil mendorong terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Dengan akses yang setara, perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial, sehingga kualitas SDM secara keseluruhan meningkat. Kesetaraan gender juga memperkuat kepribadian SDM karena mendorong rasa percaya diri, penghargaan terhadap keberagaman, serta kemampuan beradaptasi dalam lingkungan sosial yang dinamis. Oleh karena itu, penguatan pengarusutamaan gender menjadi langkah strategis dalam membangun SDM unggul yang mampu bersaing dan berkontribusi secara maksimal bagi kemajuan bangsa.

IV. Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif.

Tujuan ini dijabarkan dengan meningkatnya kualitas demokrasi politik dan meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila, serta wawasan kebangsaan.

Kualitas demokrasi politik yang tinggi menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif. Meningkatnya kualitas demokrasi politik dicapai dengan peningkatan kondusifitas wilayah. Demokrasi yang sehat memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berperan dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan bersama. Dalam konteks ini, peningkatan kondusifitas wilayah menjadi langkah strategis untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Kondusifitas wilayah tidak hanya mencakup keamanan dan ketertiban, tetapi juga terciptanya suasana sosial yang saling menghargai, toleransi antarwarga, serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Lingkungan yang aman dan damai akan mendorong partisipasi publik yang lebih aktif, memperkuat rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah, serta mengurangi potensi konflik. Kualitas demokrasi yang semakin baik akan memperkuat stabilitas politik, menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang berpihak pada seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi. Kota Semarang memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat agar ruang dialog dan perbedaan pendapat dapat dijaga dengan baik. Dengan demikian, lingkungan sosial yang inklusif tercipta, dan stabilitas politik dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Keseluruhan upaya ini akan membangun demokrasi politik

yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga mendukung kemajuan sosial dan politik bangsa.

Internalisasi ideologi Pancasila dan peningkatan wawasan kebangsaan merupakan kunci untuk meningkatnya lingkungan sosial yang harmonis dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif. Internalisasi ideologi Pancasila dan peningkatan wawasan kebangsaan menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif. Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan, keadilan, toleransi, dan gotong royong yang relevan untuk diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila dapat diwujudkan melalui pengarusutamaan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun ruang publik. Selain itu, peningkatan wawasan kebangsaan mendorong masyarakat untuk memiliki rasa cinta tanah air, menghargai perbedaan, dan menjaga keutuhan NKRI. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjadi unsur penting yang memperkuat kohesi sosial serta mencegah potensi konflik. Di sisi lain, penguatan sistem keamanan dan ketertiban akan membantu menekan angka kriminalitas, menciptakan rasa aman, dan menumbuhkan kepercayaan publik. Sinergi antara pemahaman yang mendalam terhadap Pancasila, wawasan kebangsaan yang kuat, dan partisipasi aktif masyarakat akan menghasilkan tatanan sosial yang inklusif, stabilitas politik yang terjaga, serta menjadi landasan kokoh bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

V. Menurunnya kemiskinan secara inklusif.

Tujuan ini dijabarkan dengan sasaran menurunnya beban pengeluaran masyarakat, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya akses lapangan kerja.

Menurunnya beban pengeluaran masyarakat dicapai dengan penuntasan kemiskinan dengan satu sistem terpadu dan terintegrasi dan perlindungan sosial adaptif integratif, pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial yang berkeadilan, serta penyediaan infrastruktur layanan dasar.

Menurunnya beban pengeluaran masyarakat di Kota Semarang dicapai melalui strategi penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Data Terpadu dan Terintegrasi, disertai perlindungan sosial adaptif integratif, pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial yang berkeadilan, serta penyediaan infrastruktur layanan dasar. Sistem Data Terpadu dan Terintegrasi berfungsi sebagai basis data tunggal yang mencakup seluruh informasi sosial-ekonomi penduduk, sehingga pemerintah dapat merancang, menargetkan, dan menyalurkan bantuan atau program pemberdayaan secara lebih tepat sasaran. Dengan sistem ini, intervensi terhadap kelompok rentan dapat dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi, memastikan mereka mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial yang berkeadilan, seperti subsidi pangan, energi, dan transportasi, secara langsung meringankan beban biaya hidup keluarga miskin. Program ini juga memperluas akses masyarakat terhadap barang dan

jasa penting dengan harga terjangkau. Penguatan jaringan distribusi menjadi kunci agar kebutuhan pokok dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, dengan harga yang wajar. Penyediaan infrastruktur layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan yang sangat terjangkau, akan menurunkan pengeluaran rumah tangga secara signifikan. Infrastruktur yang memadai tidak hanya menekan biaya hidup, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses terhadap layanan publik, dan mendukung aktivitas ekonomi secara tidak langsung.

Meningkatnya pendapatan masyarakat dapat dicapai dengan peningkatan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan dan iklim berusaha, serta peningkatan kesempatan kerja yang merata dan inklusif.

Pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi dirancang untuk menjadi instrumen dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan perluasan kesempatan berusaha. Penguatan kapasitas UMKM dan ekonomi kreatif, termasuk pelatihan, pendampingan, dan akses digitalisasi pemasaran, secara langsung meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola, memasarkan, dan mengembangkan produk atau jasa mereka. Dengan demikian, UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dapat meningkatkan produktivitas, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan pendapatan secara signifikan. Selain itu, pembentukan dan penguatan koperasi—baik koperasi simpan pinjam, jasa, usaha produktif, maupun ritel—mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi kolektif yang terorganisir. Koperasi menjadi wadah untuk memperoleh akses pembiayaan inklusif bagi mereka yang tidak dapat mengakses pinjaman bank konvensional, sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk memulai atau mengembangkan usaha. Hal ini menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara merata. Hal tersebut juga sejalan dengan strategi peningkatan kesempatan kerja yang merata dan inklusif. Pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi secara otomatis menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor dan wilayah, termasuk untuk kelompok yang sebelumnya kurang terlayani, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan operasional bagi RT/RW dan jejaring sinergi dengan akademisi, dunia usaha, pemerintah, media, dan komunitas memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak hanya terpusat, tetapi tersebar merata di tingkat komunitas. Dengan integrasi antara penguatan kapasitas, akses pembiayaan, digitalisasi pemasaran, dan pengembangan koperasi, strategi ini efektif meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesempatan kerja masyarakat secara inklusif, selaras dengan strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan.

Meningkatnya akses lapangan kerja dapat dicapai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Strategi ini menekankan pada penguatan keterampilan, kompetensi, dan kesiapan tenaga kerja agar mampu bersaing dan memenuhi tuntutan dunia usaha serta industri yang terus berkembang. Membangun kerjasama dengan dunia usaha dan industri menjadi langkah penting untuk memastikan pelatihan dan

pengembangan keterampilan yang dilakukan relevan dengan kebutuhan pasar kerja nyata. Kerjasama ini juga membuka peluang magang, penempatan kerja, dan pembelajaran langsung bagi tenaga kerja. Penyediaan pusat pelatihan keterampilan gratis yang inklusif dan terintegrasi dari hulu ke hilir (*link and match*) memungkinkan masyarakat memperoleh keterampilan mulai dari tahap dasar hingga lanjutan secara sistematis untuk menjamin keterampilan yang diperoleh sesuai standar industri dan dapat diterapkan secara praktis. Pengembangan program pelatihan kerja bersertifikat juga mendukung strategi kualitas tenaga kerja, karena sertifikasi kompetensi menjadi bukti resmi kemampuan yang diakui oleh pasar kerja. Perluasan program kepesertaan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal maupun informal memberikan perlindungan sosial dan rasa aman, sehingga tenaga kerja dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi. Pelatihan UMKM dan fasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM serta peningkatan kepesertaan UMKM dan industri kreatif dalam kegiatan promosi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuka kesempatan usaha baru yang menyerap tenaga kerja. Dengan integrasi antara penguatan keterampilan, sertifikasi, perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM serta industri kreatif, seluruh program secara sistematis mendukung strategi peningkatan kualitas tenaga kerja, sehingga sasaran meningkatnya akses lapangan kerja dapat tercapai secara merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

VI. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tujuan ini dijabarkan dengan sasaran menurunnya dampak perubahan iklim, meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan, dan menurunnya banjir dan rob.

Menurunnya dampak perubahan iklim dapat dicapai dengan peningkatan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, peningkatan kapasitas individu, komunitas, dan kota untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, peningkatan sistem pengelolaan sampah, dan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Peningkatan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim diperlukan melalui kegiatan yang berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ruang terbuka hijau, penghijauan kawasan perkotaan, rehabilitasi lahan kritis, dan pengelolaan sampah dan limbah yang lebih terintegrasi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Peningkatan kapasitas individu, komunitas, dan kota untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim melalui dijalankan mencakup pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah, PKK, RT/RW, serta TPS3R/TPST, yang berfungsi sebagai wadah edukasi dan praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi antar warga, termasuk sekolah, pramuka, karang taruna, dan komunitas peduli lingkungan, memperkuat kesadaran kolektif serta mendorong aksi nyata di tingkat lokal, peningkatan kontribusi masyarakat dalam penggunaan inovasi teknologi dan transportasi rendah karbon. Peningkatan sistem pengelolaan sampah melalui penguatan manajemen pengangkutan sampah, penambahan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah, dan peningkatan kawasan mandiri

pengelolaan sampah menjadi langkah penting untuk memastikan sampah dikelola secara efisien dan ramah lingkungan. Gerakan “Semarang Bersih” menjadi simbol partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan perkotaan. Penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat juga dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lestari. Gerakan Semarang Menanam, pengembangan taman, kebun, dan Taman Hutan Raya, peningkatan penghijauan wilayah, serta perbaikan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan merupakan implementasi nyata dari strategi ini. Partisipasi masyarakat melalui berbagai organisasi lokal semakin memperkuat upaya kolektif dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan integrasi strategi dan program tersebut, Kota Semarang mampu menurunkan dampak perubahan iklim secara signifikan, sekaligus menciptakan kota yang lebih hijau, bersih, dan berdaya tahan terhadap tantangan lingkungan di masa depan.

Meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan dapat dicapai melalui peningkatan kesiapsiagaan kota dan masyarakat dalam kebencanaan, peningkatan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana. Meningkatkan ketahanan Kota Semarang terhadap risiko kebencanaan menjadi fokus utama pembangunan mengingat letak geografis dan karakteristik kota yang rawan terhadap banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Untuk mencapai sasaran ini, strategi yang diterapkan mencakup peningkatan kesiapsiagaan kota dan masyarakat serta penguatan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana. Peningkatan kesiapsiagaan kota dilakukan melalui penguatan sistem manajemen risiko bencana, perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap risiko, serta pemeliharaan infrastruktur kritis yang tahan bencana. Kota juga berfokus pada pengembangan pusat-pusat evakuasi yang memadai, sistem peringatan dini yang terintegrasi, serta prosedur tanggap darurat yang jelas. Hal ini memungkinkan pemerintah kota merespons bencana secara cepat dan efektif, mengurangi potensi kerugian dan dampak sosial. Di sisi masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan diwujudkan melalui edukasi dan pelatihan mitigasi bencana, simulasi tanggap darurat, serta pemberdayaan komunitas lokal agar mampu melakukan tindakan preventif dan respons mandiri. Kegiatan ini mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan, serta membangun budaya sadar bencana di tingkat RT, RW, dan sekolah. Selain itu, kapasitas pencegahan dan mitigasi bencana diperkuat melalui pemetaan risiko berbasis data, peningkatan sarana dan prasarana mitigasi seperti tanggul, pompa air, dan drainase, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan kombinasi strategi ini, Kota Semarang mampu menurunkan kerentanan terhadap bencana, mempercepat pemulihan pasca-bencana, dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan warganya tetap terjaga.

Menurunnya banjir dan rob dapat dicapai melalui pengendalian banjir dan rob melalui peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir dan peningkatan konservasi sumber daya air. Dari sisi infrastruktur, pembangunan tanggul laut, polder, kolam retensi, serta rumah pompa berkapasitas besar mampu menahan limpasan air laut dan mengalirkan genangan ke laut secara cepat. Normalisasi sungai, revitalisasi drainase, dan

perbaikan saluran air akan mengurangi hambatan aliran, sehingga banjir dapat surut lebih cepat. Pendekatan tata ruang dilakukan dengan mengendalikan alih fungsi lahan di daerah resapan, melarang pembangunan di zona rawan, serta memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk peresapan air hujan. Sementara itu, solusi berbasis alam seperti penanaman mangrove, rehabilitasi hutan pantai, dan penguatan vegetasi bantaran sungai akan berfungsi sebagai penahan gelombang, mengurangi abrasi, dan meningkatkan kapasitas ekosistem dalam menyerap air. Ketika kawasan banjir dan rob menurun, kerusakan lingkungan dapat ditekan, kualitas tanah dan air terjaga, serta ekosistem pesisir tetap produktif.

VII. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat.

Tujuan ini dijabarkan dengan sasaran meningkatnya pemerintahan yang responsive dan berorientasi hasil, meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang.

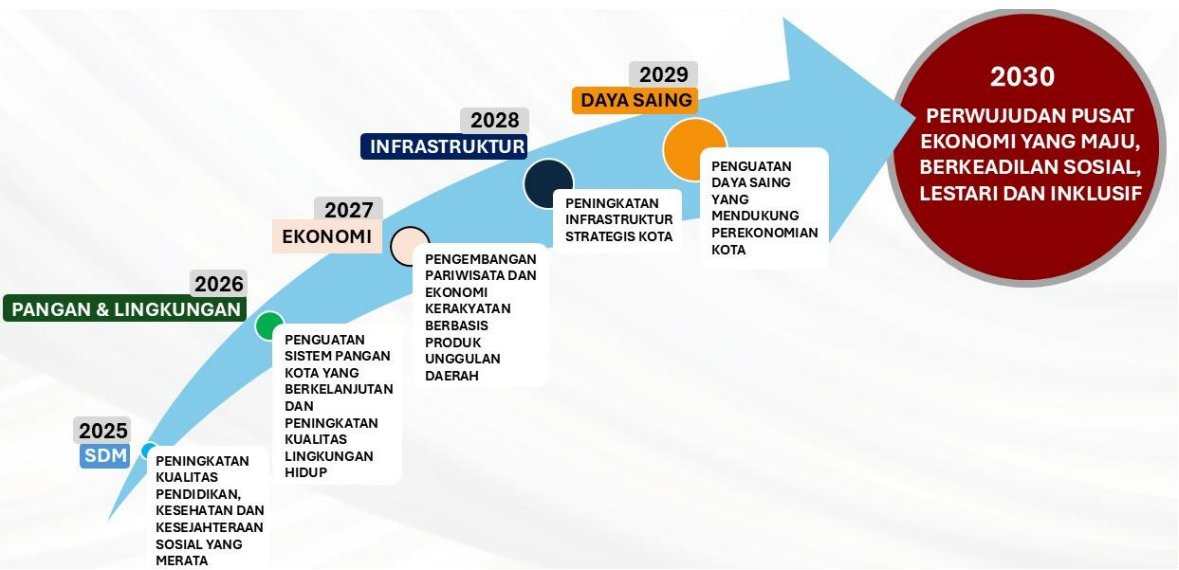
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat dicapai melalui peningkatan akuntabilitas kinerja daerah. Peningkatan akuntabilitas kinerja daerah dilakukan melalui penerapan sistem manajemen kinerja yang transparan, pemantauan indikator kinerja secara berkala, serta mekanisme evaluasi yang melibatkan partisipasi publik. Dengan adanya sistem ini, setiap instansi pemerintah dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar, tepat waktu, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan juga diwujudkan melalui digitalisasi layanan publik, penyederhanaan prosedur administrasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Langkah-langkah ini memungkinkan masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan atau ketidakefisienan dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, Kota Semarang tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hasilnya, layanan publik menjadi lebih responsif, tepat sasaran, dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat dicapai melalui meningkatkan birokrasi pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan. Peningkatan birokrasi pelayanan diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur administrasi, digitalisasi layanan publik, dan penerapan sistem manajemen yang berbasis kinerja. Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan penguatan kepemilikan admindukcapil serta tata kelola data admindukcapil. Dengan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan memastikan ketersediaan data kependudukan yang akurat, maka pelayanan publik dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Langkah ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan dengan lebih mudah dan tepat waktu, serta meminimalkan potensi kesalahan atau penyimpangan. Selain itu, transparansi dalam setiap tahapan pelayanan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, karena masyarakat dapat memantau

proses dan hasil layanan secara terbuka. Selain teknologi dan prosedur, kapasitas sumber daya manusia di birokrasi juga diperkuat melalui pelatihan, pembinaan, dan penguatan integritas aparatur. ASN diharapkan dapat membantu monitoring, surveillance, controlling, dan prevention dalam pencegahan korupsi. Aparatur yang profesional dan responsif mampu menghadirkan layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kualitas dan akuntabilitas pelayanan. Dengan kombinasi birokrasi yang cepat, tepat, dan transparan, Kota Semarang mampu meningkatkan kepuasan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas serta berdampak positif bagi kesejahteraan warga.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang dapat dicapai dengan meningkatkan partisipasi masyarakat yang substantif dalam pembangunan secara inklusif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang merupakan faktor strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan berpihak pada kepentingan publik. Keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan pembangunan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan—akan memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan serta mengurangi risiko penyalahgunaan sumber daya. Peningkatan partisipasi dapat dilakukan dengan memperluas akses informasi pembangunan melalui media digital, forum tatap muka, dan publikasi terbuka. Transparansi ini akan mendorong masyarakat memahami prioritas pembangunan, sekaligus memotivasi mereka untuk terlibat secara aktif. Melalui musrenbang yang lebih inklusif, melibatkan kelompok rentan, komunitas lokal, akademisi, dan pelaku usaha, aspirasi dapat dihimpun lebih beragam dan representatif. Selain itu, membangun kanal pengaduan dan saran yang mudah diakses, responsif, dan ditindaklanjuti secara cepat akan memperkuat hubungan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Edukasi publik mengenai hak dan kewajiban warga dalam pembangunan juga penting, sehingga partisipasi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar substantif. Dengan partisipasi yang luas, aktif, dan bermakna, proses pembangunan di Kota Semarang akan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi semua. Hal ini pada akhirnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan mampu melayani seluruh masyarakat secara adil.

3.2.2. Penahapan Pembangunan



Gambar 3.6 Tema Prioritas Penahapan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030

Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Untuk memudahkan penahapan terhadap keselarasan pembangunan Kota Semarang, maka disusun tema prioritas penahapan pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan tema penahapan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Tema prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah : (1) Tahun 2026 - Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional; (2) Tahun 2027 - Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi; (3) Tahun 2028 - Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau; (4) Tahun 2029 - Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan; (5) Tahun 2030 - Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan. Maka dirumuskan tema prioritas pembangunan daerah Kota Semarang yang selaras dengan tema prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- Tahun 2025 : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial Yang Merata.
- Tahun 2026 : Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
- Tahun 2027 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Produk Unggulan Daerah.
- Tahun 2028 : Peningkatan Infrastruktur Strategis Kota.
- Tahun 2029 : Penguatan Daya Saing yang Mendukung Perekonomian Kota.
- Tahun 2030 : Perwujudan Pusat Perekonomian yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif.

Tahun 2025 menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia Kota Semarang yang unggul dan berdaya saing. Strategi pemerintah fokus pada perluasan akses pendidikan berkualitas, mulai dari perbaikan sarana prasarana sekolah, penguatan kompetensi guru, hingga program beasiswa dan pelatihan keterampilan. Di bidang kesehatan, penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan fasilitas rumah sakit, serta promosi gaya

hidup sehat menjadi prioritas. Program perlindungan sosial adaptif diperluas untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, dengan integrasi data kesejahteraan yang lebih akurat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan kerja, dukungan UMKM, dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat. Seluruh langkah ini bertujuan menciptakan pemerataan kualitas hidup, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Semarang diarahkan menjadi kota yang ramah, inklusif, dan memanusiakan warganya, dengan SDM sebagai motor utama kemajuan berkelanjutan di masa depan.

Tahun 2026 difokuskan pada kemandirian pangan dan pelestarian lingkungan. Strategi Kota Semarang memperkuat jejaring pasokan pangan dengan daerah sekitar melalui kemitraan petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan. Sistem distribusi diperbaiki untuk menekan biaya logistik dan memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan memperpendek rantai pasok pangan. Urban farming, pertanian terpadu, dan pemanfaatan teknologi hijau didorong untuk mendukung keberlanjutan. Di sisi lingkungan, pemerintah meningkatkan ruang terbuka hijau, memperluas program penghijauan, dan mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*). Normalisasi sungai dan rehabilitasi ekosistem pesisir dilakukan untuk mengurangi risiko banjir dan rob. Edukasi lingkungan di sekolah dan komunitas menjadi strategi membangun kesadaran kolektif. Dengan integrasi program pangan dan lingkungan, Kota Semarang diarahkan menjadi kota yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan, di mana ketersediaan pangan terjamin dan kualitas lingkungan terus terjaga untuk generasi mendatang.

Tahun 2027 menjadi momentum mengangkat kekuatan ekonomi lokal dan memperluas daya tarik pariwisata. Strategi Kota Semarang berfokus pada mengembangkan destinasi wisata berbasis budaya, sejarah, dan alam yang terintegrasi dengan sektor ekonomi kreatif. Produk unggulan daerah seperti kuliner khas, batik, jamu, dan olahan perikanan dipromosikan melalui festival, pameran, dan platform digital. Dukungan pembiayaan, pelatihan manajemen usaha, dan akses pasar diberikan kepada pelaku UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional dan internasional. Infrastruktur pendukung pariwisata seperti transportasi, penunjuk arah, dan fasilitas publik diperbaiki untuk menciptakan pengalaman wisata yang nyaman. Kolaborasi dengan komunitas lokal menjadi kunci dalam menjaga keaslian dan keberlanjutan destinasi. Dengan strategi ini, Kota Semarang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif yang berbasis potensi daerah, sekaligus memperkuat identitas kota sebagai tujuan wisata unggulan di Jawa Tengah.

Tahun 2028 difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis yang menopang mobilitas, layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi. Strategi Kota Semarang dalam Pembangunan jalan, jembatan, sistem transportasi massal, dan pengelolaan air terpadu dipercepat untuk mengurangi kemacetan, memperlancar arus logistik, dan meminimalkan risiko banjir. Fasilitas publik seperti pasar modern, terminal, dan pusat pelayanan masyarakat diperbarui untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi

layanan. Infrastruktur digital diperluas untuk mendukung transformasi menuju smart city, termasuk jaringan internet cepat dan sistem informasi terintegrasi. Kawasan industri dan perdagangan dibenahi agar mampu menarik investasi baru dan menciptakan lapangan kerja. Proyek-proyek ini dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan, meminimalkan dampak lingkungan, dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan seluruh warga. Semarang diarahkan menjadi kota dengan infrastruktur modern, handal, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi masa depan.

Tahun 2029 menjadi tahap akselerasi peningkatan daya saing Kota Semarang di tingkat nasional dan global. Strategi Kota Semarang dalam penguatan iklim investasi dilakukan melalui kemudahan perizinan, insentif usaha, dan promosi peluang bisnis. Kualitas tenaga kerja ditingkatkan melalui program vokasi berbasis kebutuhan industri, sertifikasi kompetensi, dan kolaborasi dunia usaha–pendidikan. Inovasi teknologi dan riset didorong di sektor-sektor unggulan seperti manufaktur, logistik, jasa, dan ekonomi kreatif. Sistem transportasi, logistik, dan pelayanan publik dioptimalkan untuk mendukung efisiensi kegiatan ekonomi. Identitas kota sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pariwisata diperkuat melalui branding yang konsisten. Dengan daya saing yang semakin solid, Semarang diarahkan menjadi magnet investasi, pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dan pemain penting dalam jaringan ekonomi global.

Tahun 2030 merupakan perjalanan pembangunan Kota Semarang menuju visi jangka panjang. Kota ini diwujudkan sebagai pusat perekonomian yang maju dengan fondasi keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan inklusivitas. Pertumbuhan ekonomi diarahkan agar memberi manfaat merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Sektor-sektor strategis seperti perdagangan, logistik, pariwisata, industri kreatif, dan jasa keuangan berkembang dengan dukungan teknologi dan infrastruktur modern. Tata kelola kota menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, menjadikan Semarang sebagai role model kota berintegritas. Lingkungan hidup tetap terjaga melalui penerapan konsep green city dan circular economy. Ruang publik yang inklusif dan ramah disabilitas memperkuat kohesi sosial. Kota Semarang diarahkan menuju *global city* yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil, lestari, dan membahagiakan seluruh warganya.

3.2.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan, maka diperlukan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program-program unggulan yang secara langsung berhubungan dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disampaikan saat proses pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya menjadi prioritas bagi Perangkat Daerah. Berikut ini merupakan tabel Program prioritas RPJMD Kota Semarang yg disusun dengan keterkaitan antara Visi, Pokok Visi, Tujuan, Sasaran, Outcome Program, Indikator Tujuan dan Sasaran, Program Prioritas Nomenklatur dan Program Visi-Misi (Utama dan Penunjang).

Tabel 3.5 Program Prioritas RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif	Meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing			Laju Pertumbuhan Ekonomi		
		Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah		LPE Sektor Perdagangan dan Jasa		
			Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya (Sport Center, Area Kuliner dan UMKM, serta Industri Kreatif dan lain-lain)
						Optimalisasi pintu masuk di Kota Semarang sebagai simpul utama yang mendukung perdagangan, jasa dan logistik.
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Penciptaan ruang-ruang publik yang diperuntukkan bagi aktivitas budaya dengan pengelolaan yang berpihak pada seniman.
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Menyelenggarakan event nasional dan internasional dengan melibatkan potensi lokal baik sumber daya manusia dan fasilitas yang ada untuk meningkatkan jumlah wisatawan lokal, nusantara dan mancanegara.
						Pengembangan desa wisata berbasis ekologi seperti pelestarian hutan, sungai, danau, dan pantai.
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Peningkatan kesejahteraan seniman Kota Semarang melalui bantuan ekonomi dan penyelenggaraan kegiatan apresiasi seni
			Meningkatnya sistem kendali izin usaha industri yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi	Persentase jumlah penerbitan izin usaha dalam SIINas	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Penguatan berbagai industri dan pengadaan barang atau jasa di pemerintah daerah yang mengedepankan potensi lokal.
			Meningkatnya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa	Nilai pemanfaatan sistem pengadaan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Penguatan berbagai industri dan pengadaan barang atau jasa di pemerintah daerah yang mengedepankan potensi lokal.

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto		PMTB terhadap PDRB		
			Meningkatnya ekosistem penanaman modal yang berkelanjutan	Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan realisasi investasi di Kota Semarang dengan penyederhanaan regulasi investasi
						Pemberian insentif investasi
						Peningkatan angka investasi di Kota Semarang
						Digitalisasi proses perijinan dan regulasi ramah investasi
						Pelaksanaan fasilitasi promosi investasi ke pasar nasional dan internasional
			Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Optimalisasi pintu masuk di Kota Semarang sebagai simpul utama yang mendukung perdagangan, jasa dan logistik
			Meningkatnya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa	Nilai pemanfaatan sistem pengadaan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Penguatan berbagai industri dan pengadaan barang atau jasa di pemerintah daerah yang mengedepankan potensi lokal
			Meningkatnya kondisi jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
			Meningkatnya pemenuhan pelayanan pajak daerah	Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meringankan pajak bumi dan bangunan, serta pajak daerah lainnya
			Meningkatnya partisipasi perusahaan yang terlibat dalam Forum CSR serta kegiatan pengendalian perekonomian	Persentase fasilitasi dan koordinasi kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program CSR, serta kegiatan pengendalian perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan	Menerapkan skema pembiayaan alternatif untuk membantu pelaksanaan program Pemerintah Kota Semarang
		Terjaganya stabilitas harga barang dan jasa		Tingkat Inflasi		

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana dasar pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dasar pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan
			Meningkatnya produksi tanaman pangan	Jumlah produksi tanaman pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan
						Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah
						Pembentukan BUMS
						Penguatan lumbung pangan dan urban farming
			Meningkatnya produksi hortikultura dan perkebunan	Jumlah produksi hortikultura dan perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan
						Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah
						Pembentukan BUMS
						Peningkatan keterjangkauan akses pangan yang beragam dan berkualitas
			Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah produksi ternak ruminansia dan non ruminansia berupa daging	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan
						Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah
			Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah produksi ternak non ruminansia berupa telur	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan
			Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah produksi ternak ruminansia berupa susu	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah
						Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah
			Meningkatnya kapasitas SDM pertanian yang kompeten, adaptif dan berdaya saing	Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Penguatan petani milenial
			Meningkatnya kelestarian laut dan	Luasan Kawasan Konservasi	Program Pengawasan Sumber Daya	Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			keanekaragaman hayati		Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya ketahanan wilayah terhadap penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan
			Meningkatnya akses pangan bagi masyarakat	Persentase cakupan distribusi pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan potensi pasar pangan rakyat murah
			Meningkatnya daya tahan wilayah dalam menghadapi gangguan ketersediaan dan akses pangan	Persentase daerah tahan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Menggerakkan konsumsi pangan lokal dengan memperkuat petani, nelayan, dan peternak
	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat			Angka pemenuhan kinerja sistem infrastruktur strategis		
		Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan		Tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah		
			Meningkatnya kondisi jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
						Rintisan pembangunan Jalan Srandol – Sekaran
						Pembangunan Semarang Middle Ring Road
						Pengembangan Semarang Outer Ring Road
			Meningkatnya jangkauan layanan angkutan umum	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
						Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan BRT/New BRT yang rendah karbon
		Meningkatnya pemenuhan		Tingkat pengembangan kawasan strategis		Penyediaan layanan Bus Gratis bagi Siswa dan mahasiswa ber-KTP Kota Semarang

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		rencana pengembangan kawasan strategis				
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan BGN	Persentase BGN dalam kondisi baik	Program Penataan Bangunan Gedung	Pembangunan landscape dan landmark kota, terutama di batas kota
						Pengembangan kawasan strategis sejarah dan budaya
						Pengembangan kawasan strategis ekonomi
			Meningkatnya penyelenggaraan riset daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan riset sejarah dan budaya Kota Semarang
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian		Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Infrastruktur & Kewilayahan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan masterplan kawasan strategis
				Indeks Pembangunan Manusia		
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan berkesinambungan		Indeks Kesehatan		
			Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita	Angka kematian bayi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Menekan angka kematian ibu, bayi, dan balita.
						Menekan angka kematian ibu, bayi, dan balita.

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita	Persentase ibu hamil KEK	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemberian Makanan Tambahan bagi Keluarga Miskin Rawan Stunting pada Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Baduta guna Menciptakan Generasi SDM Mendatang yang Berdaya Guna
			Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita	Prevalensi wasting balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Upaya penurunan stunting
			Meningkatnya perlindungan kesehatan dan kemudahan akses layanan kesehatan	Persentase fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) terakreditasi minimal paripurna	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemberian Makanan Tambahan bagi Keluarga Miskin Rawan Stunting pada Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Baduta guna Menciptakan Generasi SDM Mendatang yang Berdaya Guna
			Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase faskes yang terpenuhi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemerataan layanan kesehatan di seluruh kelurahan
			Meningkatnya layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui pengendalian penyakit	Prevalensi wasting balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan
			Meningkatnya perlindungan kesehatan dan kemudahan akses layanan kesehatan	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemerataan akses fasilitas kesehatan dan sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas
			Meningkatnya kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan	Persentase IRTIP yang memenuhi ketentuan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Gerakan konsumsi makanan sehat dan bergizi
			Meningkatnya ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan	Persentase atlet usia dini yang berprestasi di tingkat daerah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Gerakan konsumsi makanan sehat dan bergizi
						Perluasan Program Kepesertaan Jaminan Sosial melalui BPJS Kesehatan
						Mendorong implementasi tanaman obat dan produksi tanaman obat yang bekerjasama dengan perusahaan farmasi nasional.
						Penambahan zona aktivitas gratis untuk masyarakat

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya sarana prasarana yang menunjang kualitas lingkungan	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penambahan zona aktivitas gratis untuk masyarakat
		Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata		Indeks Pendidikan		
			Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Sekolah Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta bagi yang Kurang Mampu
						Memastikan semua sekolah dasar dan menengah menerapkan disiplin ketat dan jauh dari perundungan, kekerasan dan tindak kriminal, serta menciptakan sekolah ramah anak.
						Penyelesaian ijazah tertahan
						Peningkatan mutu layanan pendidikan
			Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Program Pengelolaan Pendidikan	Sekolah Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta bagi yang Kurang Mampu
						Memastikan semua sekolah dasar dan menengah menerapkan disiplin ketat dan jauh dari perundungan, kekerasan dan tindak kriminal, serta menciptakan sekolah ramah anak.
						Peningkatan mutu layanan pendidikan
						Penyelesaian ijazah tertahan
						Beasiswa D3/D4/S1 bagi Masyarakat Miskin, Siswa Berprestasi dan Atlet
			Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Sekolah Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta bagi yang Kurang Mampu
						Peningkatan mutu layanan pendidikan
						Penyelesaian ijazah tertahan
				Tingkat partisipasi warga negara 7-18	Program Pengelolaan Pendidikan	Sekolah Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta bagi yang Kurang Mampu

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Peningkatan mutu layanan pendidikan
			Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Program Pengelolaan Pendidikan	Menambah bantuan peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter.
			Meningkatnya pemerataan distribusi guru yang proporsional	Rasio guru terhadap murid	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Memastikan tidak ada tenaga guru honorer yang memperoleh honor di bawah UMK dan memastikan adanya kesejahteraan yang lebih baik.
			Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	Program Pengembangan Kurikulum	Mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran.
						Mengintegrasikan literasi kesehatan mental
						Mengintegrasikan pendidikan lingkungan berkelanjutan ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran.
			Meningkatnya nilai-nilai kearifan lokal di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	Program Pengembangan Kurikulum	Mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran.
						Mengintegrasikan literasi kesehatan mental
						Mengintegrasikan pendidikan lingkungan berkelanjutan ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran.
						Mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran.
			Meningkatnya nilai-nilai kearifan lokal di lembaga PAUD dan non formal /kesetaraan	Persentase satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/ Kesetaraan yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	Program Pengembangan Kurikulum	Mengintegrasikan literasi kesehatan mental
						Mengintegrasikan pendidikan lingkungan berkelanjutan ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran.
			Meningkatnya kejuaraan olahraga	Persentase atlet yang mengikuti kejuaraan daerah, nasional, dan internasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyiapan Support System untuk Kompetisi Olahraga dan Seni, serta Inovator Muda
			Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender		

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kesetaraan akses dan kebijakan yang responsif gender	Persentase peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Selatan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi kegiatan pemberdayaan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender dan perlindungan anak
						Optimalisasi pelayanan kelompok disabilitas
						Penyelenggaraan Kongres Perempuan
						Penyelenggaraan Konferensi Anak
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Utara	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Barat	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Timur	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Tengah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal	Persentase kinerja pelayanan umum dan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gunungpati	kepegawaian Kecamatan Gunungpati	Daerah Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tugu	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tugu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Mijen	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Mijen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Genuk	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Genuk	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gajahmungkur	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gajahmungkur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Tembalang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tembalang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Candisari	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			kinerja Kecamatan Candisari			
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Banyumanik	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Banyumanik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Ngaliyan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Ngaliyan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gayamsari	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gayamsari	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Pedurungan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Pedurungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung pati	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	Program Pemberdayaan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			kemasyarakatan dalam pembangunan		Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
	Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif			Indeks pembumian pancasila dan wawasan kebangsaan (IP2WK)		
			Meningkatnya kualitas demokrasi politik	Indeks demokrasi		
			Meningkatnya layanan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penambahan Penerima Dana Operasional Marbot
						Penambahan Penerima Dana Operasional Penjaga Rumah Ibadah Lainnya
						Penambahan Penerima Dana Operasional TPA
						Penambahan Penerima Dana Operasional Guru Madin dan Guru Keagamaan Lainnya
						Umrah dan Perjalanan Religi Gratis bagi Masyarakat
						Supporting penyelenggaraan MTQ tingkat nasional
			Meningkatnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara	Indeks aktualisasi Pancasila	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Melindungi dan menjamin semua kelompok agama dan budaya untuk bebas menjalankan ibadah dan praktek budayanya sesuai dengan ideologi Pancasila.
			Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan	Persentase pemuda yang terlibat dalam kegiatan kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Peningkatan peran organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan
			Meningkatnya pemberdayaan pemuda yang berdaya	Persentase pemenuhan fasilitasi pengembangan potensi pemuda	Program Pengembangan	Peningkatan peran organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			saing dalam ekonomi mandiri		Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
			Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah	Indeks Kinerja Ormas	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan peran organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan
		Meningkatnya internalisasi ideologi pancasila, serta wawasan kebangsaan		Angka kriminalitas		
			Meningkatnya kejuaraan olahraga	Persentase atlet yang mengikuti kejuaraan daerah, nasional, dan internasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyiapan Support System untuk Kompetisi Olahraga dan Seni, serta Inovator Muda
			Meningkatnya ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan	Persentase atlet usia dini yang berprestasi di tingkat daerah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyiapan Support System untuk Kompetisi Olahraga dan Seni, serta Inovator Muda
			Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Persentase cakupan layanan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Optimalisasi pemanfaatan CCTV
			Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan yang menunjang fungsi hunian	Persentase sarana prasarana lingkungan dalam kondisi baik	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penambahan titik lampu penerangan jalan umum
			Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase penurunan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling)

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya perlindungan masyarakat	Persentase kelurahan yang memiliki Satlinmas aktif dan berfungsi	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling)
Pusat ekonomi yang berkeadilan sosial dan inklusif	Menurunnya kemiskinan secara inklusif			Tingkat Kemiskinan		
				Rasio Gini		
		Menurunnya beban pengeluaran masyarakat		Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
			Meningkatnya kualitas akses air minum aman	Persentase rumah tangga terlayani air minum aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik
			Meningkatnya kualitas akses sanitasi aman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pemenuhan rumah layak huni dan pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan
			Meningkatnya upaya renovasi dan perbaikan rumah, serta pengelolaan rumah susun	Persentase backlog perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik
			Meningkatnya akses pangan bagi masyarakat	Persentase cakupan distribusi pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pembangunan IPAL/SPALDT
			Meningkatkan pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi PPKS	Persentase penanganan PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Rumah Bersubsidi
			Menurunnya tingkat kerentanan sosial masyarakat melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran	Persentase anak terlantar dan warga miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemenuhan rumah layak huni dan pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan
				Persentase warga miskin yang mendapat jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan potensi pasar pangan rakyat murah
						Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah.
						Peningkatan bantuan sosial yang berkeadilan
						Peningkatan bantuan sosial yang berkeadilan

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya daya tahan wilayah dalam menghadapi gangguan ketersediaan dan akses pangan	Persentase daerah tahan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Menggerakkan konsumsi pangan lokal dengan memperkuat petani, nelayan dan peternak Peningkatan budaya konsumsi makanan pendamping beras
		Meningkatnya pendapatan masyarakat		PDRB per kapita		
			Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Penguatan dan Pengembangan Kapasitas UMKM dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya daya saing usaha mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	Program Pengembangan UMKM	Dukungan sistem digitalisasi pemasaran UMKM dan peningkatan sinergi pemasaran melalui sinergi pemasaran melalui jejaring akademisi, pelaku dunia usaha, pemerintah, media, dan komunitas
			Meningkatnya ekosistem perkoperasian yang kondusif melalui kepatuhan regulasi	Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel.
			Meningkatnya pemberdayaan koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Penguatan peran koperasi terhadap perekonomian Penyediaan akses kredit bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank konvensional namun ingin melakukan usaha, termasuk mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel.
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi sehat	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Mendorong kepesertaan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Program Pemberdayaan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			kemasyarakatan dalam pembangunan	Kecamatan Semarang Utara	Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung pati	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
		Meningkatnya akses lapangan kerja		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)		
				Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)		
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja lokal	Persentase pencari kerja lokal yang ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Membangun kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
			Meningkatnya pelatihan kerja yang inklusif dan adaptif	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Menyediakan pusat pelatihan keterampilan gratis yang inklusif dan terintegrasi dari hulu ke hilir (link and match). Pengembangan program pelatihan kerja yang bersertifikat
			Meningkatnya lingkungan kerja yang adil serta menjamin hak pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Program Hubungan Industrial	Perluasan Program Kepesertaan Jaminan Sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan baik untuk Tenaga Kerja Formal maupun Informal
			Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pelatihan UMKM dan fasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM
			Meningkatnya daya saing usaha mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina dan meningkat omsetnya	Program Pengembangan UMKM	Peningkatan kepesertaan UMKM dan Industri Kreatif dalam kegiatan promosi

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pusat ekonomi yang lestari, berkelanjutan, dan inklusif	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat			Nilai pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota		
		Menurunnya dampak perubahan iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
				Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif		
			Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Persentase pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang untuk mengolah sampah menjadi energi listrik atau refused derived fuel (RDF).
						Penguatan manajemen pengangkutan sampah
						Penambahan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah
						Peningkatan kawasan mandiri pengelolaan sampah
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati dan hutan kota	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengembangan Taman/Kebun/Taman Hutan Raya
						Peningkatan upaya penghijauan wilayah
			Menurunnya kerusakan lahan	Luasan areal yang terkonservasi	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan
						Gerakan Semarang Menanam
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Gerakan Semarang Bersih
						Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai
						Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah
						Peningkatan Gerakan Semarang Wegah Nyampah
			Meningkatnya jangkauan layanan angkutan umum	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST)
						Kolaborasi Antar Warga (Sekolah/Pramuka/Karang Taruna/Komunitas Peduli Lingkungan)
						Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan BRT/New BRT yang rendah karbon
		Meningkatnya ketahanan kota dalam		Indeks risiko bencana		

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		risiko kebencanaan				
			Meningkatnya kualitas pencegahan kebakaran	Persentase terlaksananya pencegahan kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor
			Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pengembangan sistem peringatan dini bencana di Kota Semarang
						Pemetaan risiko bencana
						Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor
						Penguatan kelembagaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat
		Menurunnya kawasan banjir dan rob		Persentase kawasan banjir dan rob		
			Meningkatnya kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin
						Normalisasi Sungai Plumbon
						Normalisasi Sungai Baru, Sungai Semarang dan Sungai Asin
						Normalisasi Sungai Ronggolawe dan Sungai Karangayu
						Normalisasi Sungai Babon
						Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Bugen
						Normalisasi Sungai Silandak dan Tugurejo
						Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Sodor
						Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur)
						Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor
			Meningkatnya kondisi sistem drainase	Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Peningkatan pemeliharaan saluran drainase
						Normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin
						Normalisasi Sungai Plumbon
						Normalisasi Sungai Baru, Sungai Semarang dan Sungai Asin
						Normalisasi Sungai Ronggolawe dan Sungai Karangayu
						Normalisasi Sungai Babon

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pusat ekonomi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, humanis, dan inklusif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat					Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Bugen
						Normalisasi Sungai Silandak dan Tugurejo
						Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Sodor
						Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur)
						Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor
			Meningkatnya kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rekondisi Kartini Drain, termasuk Stasiun Pompa
				Indeks Reformasi Birokrasi		
			Meningkatnya pemerintah yang responsif dan berorientasi hasil	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		
			Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase laporan kinerja daerah yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
			Meningkatnya penyelenggaraan riset daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penguatan kelembagaan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan substansinya
			Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	Nilai Sinergi dan Kualitas Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penguatan riset dan inovasi daerah
						Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan program dan kegiatan

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			yang sinergis dan berkualitas			
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		
			Meningkatnya pemenuhan pelayanan pajak daerah	Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meringankan pajak bumi dan bangunan, serta pajak daerah lainnya
			Meningkatnya pertumbuhan wajib pajak daerah	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya
			Meningkatnya pemenuhan pelayanan pajak daerah	Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya
			Meningkatnya partisipasi Wajib Pajak daerah dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya
			Meningkatnya capaian hasil pengawasan serta pengembangan pajak dan retribusi daerah	Tingkat ketercapaian hasil pengawasan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya
			Meningkatnya kualitas penyerapan anggaran	Persentase realisasi belanja	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Digitalisasi manajemen keuangan daerah
			Meningkatnya partisipasi perusahaan yang terlibat dalam Forum CSR serta kegiatan pengendalian perekonomian	Persentase fasilitasi dan koordinasi kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program CSR, serta kegiatan pengendalian perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan	Menerapkan skema pembiayaan alternatif untuk membantu pelaksanaan program Pemerintah Kota Semarang.
			Meningkatnya fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan tertib pertanahan	Persentase penyelesaian permasalahan tanah di Kota Semarang yang terfasilitasi melalui mediasi	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Mendorong legalisasi aset produktif milik rakyat dari perampasan, pencaplokan dan akuisisi dari pihak lain
				Indeks Integritas Nasional		

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja I	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan pengelolaan risiko di perangkat daerah.
			Meningkatnya kualitas program kerja pengawasan berbasis risiko	Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan pengelolaan risiko di perangkat daerah.
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		Indeks pelayanan publik		
			Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah	Indeks kematangan organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Penguatan Layanan Publik Gratis dari Dalam Kandungan hingga Meninggal (meliputi seluruh siklus kehidupan)
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Membangun sistem pemerintahan yang fleksibel, gesit, dan responsif terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat.
			Meningkatnya kinerja ASN yang berkualitas	Persentase penilaian kinerja ASN yang bernilai baik	Program Kepegawaian Daerah	Peningkatan sistem merit dalam manajemen ASN untuk mewujudkan ASN kelas dunia.
			Meningkatnya kapasitas ASN yang unggul, kompeten, dan adaptif	Persentase ASN yang memiliki hasil diklat dengan kriteria berkualitas	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan sistem merit dalam manajemen ASN untuk mewujudkan ASN kelas dunia.
			Meningkatnya kualitas cakupan statistik sektoral yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral yang memenuhi kaidah statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pengambilan data di tingkat organisasi pemerintahan terkecil
						Integrasi sistem data
						Pengambilan keputusan berdasarkan sistem data yang terbangun

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan		
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
						Pengembangan Musrenbang Tematik
						Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
						Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
						Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
						Pengembangan Musrenbang Tematik
						Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
						Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
						Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
						Pengembangan Musrenbang Tematik
						Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
						Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
						Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
						Pengembangan Musrenbang Tematik
						Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
						Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
						Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Program Pemberdayaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
						Pengembangan Musrenbang Tematik

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			kemasyarakatan dalam pembangunan	Kecamatan Semarang Tengah	Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung pati	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
						Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
						Pengembangan Musrenbang Tematik
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
						Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
						Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
						Pengembangan Musrenbang Tematik
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
						Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
						Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
						Pengembangan Musrenbang Tematik
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
						Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
						Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
						Pengembangan Musrenbang Tematik
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
						Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
						Pengembangan Musrenbang Tematik
						Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
						Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
						Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
						Pengembangan Musrenbang Tematik
						Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
						Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
						Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
						Pengembangan Musrenbang Tematik
						Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
						Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
						Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
						Pengembangan Musrenbang Tematik
						Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
						Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
						Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
						Pengembangan Musrenbang Tematik
						Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
						Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
						Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga		Program Pemberdayaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pengembangan Musrenbang Tematik
			Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan	Persentase fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
						Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
						Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
						Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK

Program-program prioritas yang diuraikan melalui tujuan dan sasaran daerah, mendukung perwujudan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dijabarkan sebagai berikut:

3.2.3.1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Toleran dan Berbudaya dalam Semangat Kebhinekaan, serta Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian.

Pelaksanaan pembangunan pada misi ini diprioritaskan pada program-program prioritas sebagai berikut:

1. Penambahan Penerima Dana Operasional Marbot
2. Penambahan Penerima Dana Operasional Penjaga Rumah Ibadah Lainnya
3. Penambahan Penerima Dana Operasional TPA
4. Penambahan Penerima Dana Operasional Guru Madin dan Guru Keagamaan Lainnya
5. Penambahan zona aktivitas gratis untuk masyarakat
6. Penyiapan Support System untuk Kompetisi Olahraga dan Seni, serta Inovator Muda
7. Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
8. Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
9. Umrah dan Perjalanan Religi Gratis bagi Masyarakat
10. Beasiswa D3/D4/S1 bagi Masyarakat Miskin, Siswa Berprestasi dan Atlet
11. Melindungi dan menjamin semua kelompok agama dan budaya untuk bebas menjalankan ibadah dan praktek budayanya sesuai dengan ideologi Pancasila.
12. Memastikan tidak ada tenaga guru honorer yang memperoleh honor di bawah UMK dan memastikan adanya kesejahteraan yang lebih baik.
13. Menambah bantuan peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter.
14. Mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran.
15. Memastikan semua sekolah dasar dan menengah menerapkan disiplin ketat dan jauh dari perundungan, kekerasan dan tindak kriminal, serta menciptakan sekolah ramah anak.
16. Mengintegrasikan literasi kesehatan mental
17. Mengintegrasikan pendidikan lingkungan berkelanjutan ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran.
18. Sekolah Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta bagi yang Kurang Mampu
19. Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia
20. Optimalisasi kegiatan pemberdayaan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender dan perlindungan anak
21. Peningkatan mutu layanan pendidikan
22. Penyelesaian ijazah tertahan

23. Optimalisasi pelayanan kelompok disabilitas
24. Penyelenggaraan Konferensi Anak
25. Penyelenggaraan Kongres Perempuan
26. Peningkatan peran Organisasi Masyarakat dan organisasi kepemudaan
27. Supporting penyelenggaraan MTQ tingkat nasional
28. Optimalisasi pemanfaatan CCTV
29. Penambahan titik lampu penerangan jalan umum
30. Peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling)

3.2.3.2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat yang Berfokus pada Kebutuhan Individu dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, dan Rehabilitasi.

Pelaksanaan pembangunan pada misi ini diprioritaskan pada program-program sebagai berikut:

1. Perluasan Program Kepesertaan Jaminan Sosial melalui BPJS Kesehatan
2. Pemerataan layanan kesehatan di seluruh kelurahan
3. Peningkatan pelayanan kesehatan
4. Upaya penurunan stunting
5. Pemberian Makanan Tambahan bagi Keluarga Miskin Rawan Stunting pada Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Baduta guna Menciptakan Generasi SDM Mendatang yang Berdaya Guna
6. Mengintegrasikan literasi kesehatan mental
7. Pemerataan akses fasilitas kesehatan dan sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas.
8. Menekan angka kematian ibu, bayi, dan balita.
9. Mendorong implementasi tanaman obat dan produksi tanaman obat yang bekerjasama dengan perusahaan farmasi nasional.
10. Gerakan Konsumsi Makanan Sehat dan Bergizi

3.2.3.3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, dan Papan yang Merupakan Elemen Kunci agar Tercapai Taraf Hidup yang Layak.

Pelaksanaan pembangunan pada misi ini diprioritaskan pada program-program sebagai berikut:

1. Pembangunan IPAL/SPALDT
2. Penguatan ekonomi Masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
3. Perluasan Program Kepesertaan Jaminan Sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan baik untuk Tenaga Kerja Formal maupun Informal
4. Menyediakan pusat pelatihan keterampilan gratis yang inklusif dan terintegrasi dari hulu ke hilir (link and match).
5. Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah.
6. Penyediaan akses kredit bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank konvensional namun ingin melakukan

usaha, termasuk mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel.

7. Pengembangan program pelatihan kerja yang dapat menjangkau masyarakat luas
8. Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik
9. Pemenuhan rumah layak huni dan pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan
10. Penyediaan Rumah Bersubsidi
11. Penguatan dan Pengembangan Kapasitas UMKM dan Ekonomi Kreatif
12. Dukungan sistem digitalisasi pemasaran UMKM dan peningkatan sinergi pemasaran melalui sinergi pemasaran melalui jejaring akademisi, pelaku dunia usaha, pemerintah, media, dan komunitas
13. Peningkatan budaya konsumsi makanan pendamping beras
14. Peningkatan bantuan sosial yang berkeadilan
15. Penguatan peran Koperasi terhadap perekonomian
16. Mendorong kepesertaan Masyarakat untuk menjadi anggota koperasi
17. Pengembangan program pelatihan kerja yang bersertifikat
18. Pelatihan UMKM dan fasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM
19. Membangun kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri
20. Peningkatan kepesertaan UMKM dan Industri Kreatif dalam kegiatan promosi

3.2.3.4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif melalui Penyediaan Lapangan Kerja dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif ke Level Global.

Pelaksanaan pembangunan pada misi ini diprioritaskan pada program-program sebagai berikut:

1. Peningkatan potensi pasar pangan rakyat murah
2. Menggerakkan konsumsi pangan lokal dengan memperkuat petani, nelayan, dan peternak
3. Penguatan petani milenial
4. Penguatan lumbung pangan dan urban farming
5. Pembentukan BUMP
6. Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya (Sport Center, Area Kuliner dan UMKM, serta Industri Kreatif dan lain-lain)
7. Peningkatan kesejahteraan seniman Kota Semarang melalui bantuan ekonomi dan penyelenggaraan kegiatan apresiasi seni
8. Penciptaan ruang-ruang publik yang diperuntukkan bagi aktivitas budaya dengan pengelolaan yang berpihak pada seniman.
9. Meringankan pajak bumi dan bangunan, serta pajak daerah lainnya
10. Optimalisasi pintu masuk di Kota Semarang sebagai simpul utama yang mendukung perdagangan, jasa dan logistik

11. Menerapkan skema pembiayaan alternatif untuk membantu pelaksanaan program Pemerintah Kota Semarang
12. Menyelenggarakan event nasional dan internasional dengan melibatkan potensi lokal baik sumber daya manusia dan fasilitas yang ada untuk meningkatkan jumlah wisatawan lokal, nusantara dan mancanegara.
13. Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan
14. Peningkatan angka investasi di Kota Semarang
15. Penguatan berbagai industri dan pengadaan barang atau jasa di pemerintah daerah yang mengedepankan potensi lokal.
16. Pengembangan desa wisata berbasis ekologi seperti pelestarian hutan, sungai, danau, dan pantai.
17. Peningkatan realisasi investasi di Kota Semarang dengan penyederhanaan regulasi investasi
18. Pemberian Insentif investasi
19. Pelaksanaan fasilitasi promosi investasi ke pasar nasional dan internasional
20. Penguatan berbagai industri dan pengadaan barang atau jasa di pemerintah daerah yang mengedepankan potensi lokal
21. Digitalisasi proses perijinan dan regulasi ramah investasi
22. Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah
23. Peningkatan keterjangkauan akses pangan yang beragam dan berkualitas
24. Penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan

3.2.3.5. Mewujudkan Infrastruktur Kota yang Saling Terhubung dengan Peningkatan Aksesibilitas, dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan pada misi ini diprioritaskan pada program-program sebagai berikut:

1. Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
2. Pembangunan Semarang Middle Ring Road
3. Rintisan Pembangunan Jalan Srandol – Sekaran
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan BRT/New BRT yang rendah karbon
5. Pengembangan Semarang Outer Ring Road
6. Pembangunan landscape dan landmark kota, terutama di batas kota
7. Penyediaan layanan Bus Gratis bagi Siswa dan mahasiswa ber-KTP Kota Semarang
8. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset
9. Pengembangan kawasan strategis sejarah dan budaya
10. Pengembangan kawasan strategis ekonomi
11. Pengembangan riset sejarah dan budaya Kota Semarang
12. Penyusunan masterplan kawasan strategis

3.2.3.6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Tangguh, Berkelanjutan, sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan pada misi ini diprioritaskan pada program-program sebagai berikut:

1. Normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin
2. Normalisasi Sungai Plumbon
3. Normalisasi Sungai Baru, Sungai Semarang dan Sungai Asin
4. Normalisasi Sungai Silandak dan Tugurejo
5. Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Sodor
6. Normalisasi Sungai Ronggolawe dan Sungai Karangayu
7. Normalisasi Sungai Babon
8. Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Bugen
9. Rekondisi Kartini Drain, termasuk Stasiun Pompa
10. Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur)
11. Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai
12. Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah
13. Peningkatan Gerakan Semarang Wegah Nyampah
14. Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST)
15. Kolaborasi Antar Warga (Sekolah/Pramuka/Karang Taruna/Komunitas Peduli Lingkungan)
16. Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang untuk mengolah sampah menjadi energi listrik atau refused derived fuel (RDF).
17. Pengembangan Taman/Kebun/Taman Hutan Raya
18. Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan
19. Peningkatan upaya penghijauan wilayah
20. Pengembangan sistem peringatan dini bencana di Kota Semarang
21. Gerakan Semarang Bersih
22. Penguatan Manajemen Pengangkutan Sampah
23. Penambahan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah
24. Peningkatan kawasan mandiri pengelolaan sampah
25. Gerakan Semarang Menanam
26. Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor
27. Pemetaan risiko bencana
28. Penguatan kelembagaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat
29. Peningkatan pemeliharaan saluran drainase

3.2.3.7. Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas

Pelaksanaan pembangunan pada misi ini diprioritaskan pada program-program sebagai berikut:

1. Tambahan Bantuan LPMK
2. Penguatan Layanan Publik Gratis dari Dalam Kandungan hingga Meninggal (meliputi seluruh siklus kehidupan)

3. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya
4. Mendorong legalisasi aset produktif milik rakyat dari perampasan, pencaplokan dan akuisisi dari pihak lain
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
6. Peningkatan sistem merit dalam manajemen ASN untuk mewujudkan ASN kelas dunia
7. Membangun sistem pemerintahan yang fleksibel, gesit, dan responsif terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat
8. Pengambilan keputusan berdasarkan sistem data yang terbangun
9. Peningkatan pengelolaan risiko di perangkat daerah
10. Penguatan riset dan inovasi daerah
11. Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
12. Penguatan kelembagaan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan substansinya
13. Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan program dan kegiatan
14. Digitalisasi manajemen keuangan daerah
15. Pengambilan data di tingkat organisasi pemerintahan terkecil
16. Integrasi sistem data
17. Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
18. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
19. Pengembangan Musrenbang Tematik
20. Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah Kebijakan daerah Kota Semarang pada tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 3.6 Arah Kebijakan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MISI 1: Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian	• Meningkatkan akses dan mutu pendidikan secara inklusif seperti wajib belajar 13 tahun, perluasan layanan PAUD, Optimalisasi peran non-formal untuk penanganan anak tidak sekolah, Peningkatan fasilitas pendukung pendidikan seperti program STEAM • Mendorong pengembangan pendidikan karakter dan penguatan nilai kebhinekaan dan toleransi. • Perluasan program bantuan sosial berbasis data terpadu untuk kelompok rentan dan marjinal. • Pengembangan kebudayaan lokal dan peningkatan komunitas budaya. • Fasilitasi pelatihan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.	
2	MISI 2: Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi	• Penguatan layanan kesehatan primer (Puskesmas) berbasis keluarga dan masyarakat. • Peningkatan cakupan imunisasi dan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa. • Modernisasi fasilitas kesehatan dan sistem rujukan rumah sakit berbasis digital. • Penambahan tenaga kesehatan, khususnya di wilayah kurang terlayani. • Pengembangan program rehabilitasi terpadu bagi penyandang disabilitas dan lansia.	
3	MISI 3: Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak	• Penguatan ketahanan pangan kota • Perlindungan konsumen dan stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat. • Peningkatan program perumahan layak huni dan Penurunan permukiman kumuh • Peningkatan akses air bersih dan sanitasi dasar di seluruh wilayah kota. • Penguatan UMKM berbasis potensi lokal dengan dukungan pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran digital.	
4	MISI 4: Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.	• Peningkatan ekosistem kewirausahaan melalui inkubasi bisnis dan kemitraan strategis. • Pengembangan ekonomi kreatif dan digital, termasuk talenta digital muda. • Penyediaan pelatihan kerja berbasis industri dan kebutuhan pasar tenaga kerja. • Penataan kawasan ekonomi strategis dan destinasi wisata berbasis kearifan lokal. • Pengembangan industri halal dan UMKM halal. • Penguatan ekosistem halal. • Pengembangan keuangan syariah. • Penguatan dana sosial syariah.	

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
5	MISI 5: Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan	• Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi publik. • Integrasi transportasi antarwilayah dan pengembangan sistem angkutan massal ramah lingkungan. • Pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal dan kawasan pengembangan baru. • Pengembangan infrastruktur digital (<i>smart connectivity</i>) sebagai bagian kota cerdas. • Penyediaan infrastruktur yang inklusif bagi kelompok rentan dan difabel.	
6	MISI 6: Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh Dan Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat	• Penguatan sistem drainase kota dan peningkatan pengendalian banjir dan rob. • Pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu untuk mengurangi dampak perubahan iklim. • Peningkatan ruang terbuka hijau dan pelestarian kawasan lindung. • Pengembangan sistem peringatan dini bencana dan kapasitas tanggap darurat masyarakat. • Pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular dan teknologi ramah lingkungan.	
7	MISI 7: Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas	• Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi. • Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan. • Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. • Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan sistem merit. • Pengembangan kota cerdas untuk pengelolaan kota berbasis data.	

3.2.4. Arah Pembangunan Kewilayahan

3.2.4.1. Peran Kota Semarang dalam Konstelasi KSN Kedungsepur

- A.** Arah Pengembangan Wilayah berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.



Gambar 3.7 Kawasan Pertumbuhan Jawa Tengah

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, diiringi dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan wilayah, dengan demikian pemerataan pembangunan wilayah menjadi kunci. Faktor pendorong yang dapat mengakselerasi pemerataan antarwilayah, khususnya pulau Jawa adalah” Perekonomian Jawa Didorong Melalui Penguatan Ekosistem Pemampu Ekonomi Kreatif Dan Aktivitas Pariwisata, Seperti *Borobudur As the World’s Largest Buddhist Pilgrimage Destination*, Yogyakarta Dan Prambanan, Optimalisasi Kinerja Industri Hilir Dan Berteknologi Tinggi, Dan Pengembangan Wilayah Metropolitan”. Dengan mempertimbangkan setiap wilayah memiliki potensi dan karakteristik khusus untuk tumbuh dan berkembang, maka tema pembangunan pulau Jawa bertema “Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”. Tujuan pembangunan kewilayahan adalah terciptanya pemerataan pembangunan khususnya keseimbangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia sampai Kawasan Timur Indonesia.

Pembangunan kewilayahan dalam RPJMN memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan daya saing kawasan. Salah satu fokus utama dalam pembangunan kewilayahan ini adalah pengembangan Wilayah Metropolitan, yang diakui sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, inovasi, serta konektivitas nasional dan global.

Dalam RPJMN, Wilayah Metropolitan diposisikan sebagai motor penggerak utama ekonomi nasional. Dengan jumlah penduduk yang besar, tingkat urbanisasi tinggi, serta infrastruktur yang relatif maju, wilayah metropolitan memiliki potensi untuk menjadi simpul utama jaringan logistik, industri, dan jasa. Pembangunan kewilayahan dalam RPJMN menekankan pendekatan pengembangan yang terintegrasi antara metropolitan dan wilayah hinterland-nya. Ini mencakup penguatan konektivitas transportasi, pengelolaan tata ruang yang harmonis, pengendalian *urban sprawl*, serta penyediaan infrastruktur dasar yang inklusif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di wilayah metropolitan tidak hanya dinikmati oleh inti kota, tetapi juga berdampak positif terhadap kawasan sekitarnya, mendorong pengembangan wilayah secara lebih merata.

Dalam RPJMN, Beberapa Program Pembangunan yang akan diintervensi pada WM Semarang bersama dengan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus adalah:

- Peningkatan kualitas dan penataan WM Semarang, antara lain melalui:
 - Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Semarang;
 - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu;
 - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan RTH;
 - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan;
 - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan;
 - Penyusunan metropolitan statistical area.
- Pengembangan Kawasan Perkotaan Salatiga (tematik kota pendidikan) sebagai kota satelit dari WM Semarang, antara lain melalui:
 - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu;
 - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan mangrove terbuka hijau;
 - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan;
 - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.
- Pengembangan sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di WM Semarang melalui pembangunan BRT dan peningkatan kereta komuter
- Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak
- Pembangunan jalan Tol Demak-Kudus-Pati-Rembang-Tuban
- Pembangunan TPST Regional Semarang-Demak
- Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Semarang, termasuk penerapan NBS, SIH3, dan FEWS
- Pengembangan SPAL Regional WM Semarang

- Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Gen z, dan milenial di WM Semarang (PHTC)
- Pembangunan SPAM Regional Semarang
- Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta- Surabaya
- Pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang
- Pembangunan pipa gas bumi Kalija (Kalimantan-Jawa)
- Pengembangan koridor industri Kendal.Semarang-Demak-Kudus (sektor industri prioritas: industri kimia, industri mesin dan perlengkapan, industri makanan dan minuman, industri tekstil dan alas kaki
- Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu rau sugar, GKP, molase, bagasse, serta produk hilirissi lanjutan tebu bioetanol, sirup glukosa, dan bioplastic
- Pengembangan K1 Seafer (Kab. Kendal)
- Pengembangan Kawasan sentra produksi dan/atau industry garam di Demak
- Pengembangan Pelabuhan *New Tanjung Mas-Kendal Seaport*
- Pembangunan Tanggul Pantai/Laut Kendal-Semarang-Demak dan Pengembangan Kawasan Pesisir Semarang-Demak
- Urban Renewal Kota Tua Semarang
- Pembangunan Bendungan Bodri
- Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di Kawasan perkotaan WM Semarang (PHTC)
- Pengembangan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari (Kab. Kendal)
- Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pcmbangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industry wilayah.

Sedangkan indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029 yang berlokasi di Kota Semarang adalah “Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044, Wilayah Pengembangan (WP) adalah pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki keterkaitan pengembangan dari aspek fisik alam, sosial, ekonomi dan/atau budaya sebagai dasar koordinasi pembangunan dan keterpaduan pengembangan wilayah antar Kabupaten/Kota. 10 WP di Provinsi Jawa Tengah dengan pembagian wilayah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. WP Bregasmalang meliputi: Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang;
2. WP Cibalingmas, meliputi: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas;
3. WP Petanglong, meliputi: Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan;

4. WP Kedungsepur, meliputi: Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan;
5. WP Jekuti, meliputi: Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati;
6. WP Banglor, meliputi: Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang;
7. WP Wonobanjar, meliputi: Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
8. WP Keburejo, meliputi: Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
9. WP Gelangmanggung, meliputi: Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung;
10. WP Subosukawonosraten, meliputi: Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo.

Provinsi Jawa tengah mengklasifikasikan suatu wilayah andalan yang berorientasi untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing. Wilayah andalan merupakan yang ditetapkan sebagai penggerak utama perekonomian daerah, yang memiliki kriteria sebagai wilayah yang cepat tumbuh dibandingkan lokasi lainnya dalam suatu provinsi, yang memiliki sektor basis dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar. Potensi ekonomi yang ada harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai yang diharapkan yaitu kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah. Untuk dapat membandingkan tingkat kemajuan suatu wilayah dengan wilayah lainnya, maka digunakan analisis tipologi klassen yang mengelompokkan wilayah berdasarkan dua karakteristik yang dimiliki wilayah tersebut yaitu Laju pertumbuhan dan PDRB perkapita. Kota Semarang masuk ke dalam klasifikasi Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh yang mana Pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita diatas rata-rata Jawa Tengah). Dalam Wilayah Pengembangan Kedungsepur, terdapat:

- *Quick-Wins* : Pengembangan Kawasan Industri Kendal – Demak – Semarang (Tekstil dan Pengolahan Ikan)
 - Mendorong peningkatan investasi dan ekosistem industri antar Kawasan Industri di Kota Semarang, Kawasan Industri Kendal (KIK), Kabupaten Demak, dan Kabupaten Semarang;
 - Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha;
 - Menyiapkan sistem Pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian Pendidikan PraKerja melalui membangun link and match SMK/SMA sederajat dengan dunia industri;
 - Mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa melalui optimalisasi Pelabuhan sebagai Generator Aktivitas Perekonomian Global;
 - Mendorong integrasi antar moda kereta api dan kapal (peningkatan efisiensi logistik);
 - Fasilitasi pembangunan Pelabuhan Kendal dan didorong peningkatan hierarki dari Pelabuhan regional menjadi terminal

dari Pelabuhan Tanjung Mas untuk mendukung KEK Kendal Mendorong percepatan revitalisasi alur Pelabuhan tanjung mas semarang sekarang dalam proses addendum Percepatan investasi swasta untuk pengembangan Kendal *sea port* (PT. Samudra Pelabuhan Indonesia);

- Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (, Semarang-Kendal dan Semarang-Grobogan) yang tekoneksi dengan Trans Semarang dan moda transportasi kereta api serta angkutan lanjutan lainnya termasuk terintegrasi dengan Kawasan pariwisata dan perindustrian (KEK Kendal dan KPI Kab. Semarang dan Grobogan);
- Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi Terminal Tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Penggaron (simpul integrasi Trans Jateng, Trans Semarang dan Feeder Trans Semarang).
- Program unggulan Strategis : Pengembangan Metropolitan Semarang sebagai *Global City*
 - Mendorong peningkatan status Bandara Ahmad Yani menjadi bandara internasional dan sebagai generator aktivitas perekonomian global;
 - Mendorong Perencanaan Tata Ruang serta Tata Bangunan dan Lingkungan yang baik utamanya untuk mengantisipasi *urban sprawl* serta kekumuhan;
 - Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dan industri maupun wilayah desa;
 - Mendorong inisiasi pengembangan dan penguatan sistem perkotaan berorientasi transit (TOD) yang menggabungkan sistem transportasi dan integrasi moda dengan Kawasan permukiman;
 - Pembangunan ekosistem *Smart City* dan digitalisasi layanan publik;
 - Peningkatan kerjasama antar daerah dalam lingkup WP Kedungsepur.
- Program unggulan Strategis : Pengembangan *Cultural Heritage Tourism* (Kota Lama Semarang, Candi Gedongsongo, Museum Kereta Api dsk)
 - Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui: a) Peningkatan dan standarisasi ruas jalan provinsi diantaranya: ruas Salatiga-Kedungjati Grobogan; b) Mendorong peningkatan aksesibitalitas koridor pariwisata Candi Gedongsongo dsk; c) Mendorong penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Salatiga-Kopeng dan Semarang-Bawen;
 - Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui: a) Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan budaya melalui penyediaan paket pariwisata yang terintegrasi dalam skala regional; peningkatan promosi budaya lokal dan aksesibilitas. b) Mendorong pembangunan dan pengembangan

desa wisata. c) Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis alam terutama pantai dan dataran tinggi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.

- Program unggulan Strategis : Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, jagung, tanaman perkebunan, susu, kedelai dan perikanan tangkap)
 - Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui: a) fasilitasi sarpras pada daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; penjaminan kualitas pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); dan pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa; korporasi pertanian; pemanfaatan urban farming; pencegahan alih fungsi lahan pertanian; pengembangan pelabuhan perikanan; bantuan sarpras penangkapan ikan dan garam; serta pengelolaan kawasan konservasi. b) Peningkatan sistem jaringan irigasi (DI Parean) dan Peningkatan saluran irigasi pergaraman. c) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi Embung Triharjo-Kendal;
 - Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui : a) penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inováasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian, penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan, pemasaran dan branding produk pertanian; sedangkan pada sektor perikanan melalui fasilitasi diversifikasi, kemasan, dan jejaring pemasaran produk olahan ikan, serta pengembangan pojok UMKM hasil olahan ikan.
- Indikasi Kebutuhan Rencana Program Intervensi: Lingkup Sosial dan Kependudukan
 - Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD dan Swasta serta program jambanisasi dan penyediaan rumah apung dan adaptif banjir di pesisir utara Kabupaten Demak;
 - Percepatan penanganan stunting melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil;
 - Mendorong pemenuhan puskesmas terutama di daerah yang memiliki kesulitan geografis;
 - Pengelolaan dan revitalisasi pendidikan vokasional berbasis potensi lokal;
 - Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan Disabilitas di Setiap Kecamatan.
- Indikasi Kebutuhan Rencana Program Intervensi: Lingkup Perekonomian
 - Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 - Mendorong peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang;

- Peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan;
- Mendorong rehabilitasi daerah irigasi dan embung sebagai upaya dalam mendukung peningkatan produksi pertanian;
- Optimalisasi perekonomian desa melalui peningkatan peran BUMDes, Pengembangan Kawasan Perdesaan.
- Indikasi Kebutuhan Rencana Program Intervensi: Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan
 - Mendorong pembangunan SPAM Regional Dadimuria dan SPAM Regional Jragung;
 - Mendorong percepatan pengamanan pesisir utara Semarang-Demak secara berkelanjutan;
 - Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi pesisir utara (Betahwalang);
 - Peningkatan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove;
 - Mendorong Peningkatan kualitas jalan (ruas Batas Kota Salatiga – Kedungjati/Batas Kab.Grobogan dan ruas jalan Brigjen Sudiarto (semarang) dan jembatan (jembatan Blandongan) sebagai penghubung kegiatan perekonomian;
 - Mendorong penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah.

Dalam mendukung pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru. Program unggulan penggerak pertumbuhan ekonomi difokuskan pada pengembangan Kawasan Industri Kendal–Demak–Semarang sebagai pusat produksi dan distribusi komoditas strategis. Kawasan ini diarahkan untuk memperkuat sektor tekstil, pengolahan daging, industri jamu, dan pengolahan ikan yang memiliki nilai tambah tinggi serta daya saing ekspor. Dalam Rencana Pembangunan Industri Kota, kebijakan sektor industri terbagi dalam 6 program, antara lain:

1. Pembangunan Industri Prioritas (tahapan 2026-2029 berupa Penguatan Infrastruktur, Penyerapan Tenaga kerja dan Sinergi)
2. Pengembangan Perwilayahan IKM didasarkan pada rencana struktur ruang Kota Semarang dalam RTRW (berdasarkan pembagian BWK), sehingga dapat terintegrasi dan mendukung tujuan penataan ruang Kota Semarang.
3. Pengembangan Sentra IKM tahun 2025-2029 fokus pada Penguatan IKM dilakukan melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan SDM, inovasi produk, sinergi antar pelaku, serta perluasan akses pendanaan dan insentif.
4. Pembangunan Sumber Daya Industri fokus pada peningkatan SDM, pemanfaatan SDA, penguatan pembiayaan, pengembangan teknologi dan inovasi, serta peningkatan daya saing melalui standar mutu dan keamanan.
5. Pembangunan Sarana & Prasarana Industri meliputi penyediaan fasilitas energi, telekomunikasi, air, sanitasi, transportasi, infrastruktur standardisasi, serta pengelolaan lahan yang terintegrasi.
6. Pemberdayaan IKM tahun 2025-2029 fokus pada Penguatan IKM dilakukan melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan

penyerapan tenaga kerja dengan pelatihan dan kemitraan pendidikan, serta membangun sinergi dengan lembaga pendukung untuk kolaborasi dan inovasi.

Dengan strategi ini, kawasan menjadi motor penggerak ekonomi regional sekaligus memperkuat posisi Semarang di kancah global.

Kota Metropolitan Semarang berkomitmen bertransformasi menuju *Global City* yang berdaya saing tinggi, modern, dan berkelanjutan. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, Semarang memanfaatkan posisi strategisnya sebagai kota pelabuhan, pusat perdagangan, dan simpul transportasi nasional untuk memperkuat perannya di kancah global.

Pembangunan diarahkan pada infrastruktur terintegrasi, penguatan sektor unggulan seperti industri, jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pelabuhan Tanjung Emas dikembangkan sebagai pintu gerbang ekspor-impor regional, sementara Bandara Internasional Ahmad Yani diperkuat sebagai gerbang utama wisatawan domestik dan mancanegara, menggabungkan konektivitas penerbangan, pelayanan kelas dunia, dan promosi destinasi wisata Jawa Tengah bagian utara.

Pengembangan transportasi massal perkotaan dilakukan melalui peningkatan layanan Trans Semarang dan penerapan konsep *Transit Oriented Development* pada skala kota dan kewilayahan. Wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) diarahkan untuk menarik pasar global, didukung promosi pariwisata, kuliner, dan budaya lokal seperti lumpia, dugderan, dan batik semarangan.

Transformasi digital menjadi pilar utama melalui *smart city* yang terhubung dengan jaringan kota dunia, mendorong inovasi layanan publik, tata kelola responsif, dan promosi terintegrasi. Pemerintah kota juga aktif membangun kolaborasi internasional guna memperluas jejaring investasi dan kemitraan strategis.

Dari sisi lingkungan, pengembangan kota menerapkan prinsip ramah lingkungan melalui perluasan ruang terbuka hijau, pengelolaan transportasi publik rendah emisi, dan pengurangan polusi. Seluruh strategi ini bertujuan menciptakan kota yang inklusif, berdaya saing global, dan nyaman dihuni, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dengan langkah terencana ini, Semarang menempatkan diri sebagai kota metropolitan yang tidak hanya menjadi pusat ekonomi regional, tetapi juga bagian dari jejaring global yang maju, inovatif, dan berkelanjutan.

Semarang juga memperkuat identitas budaya sebagai kota multikultural yang terbuka terhadap dunia. Selain itu Pemerintah Kota Semarang berkomitmen mengembangkan potensi warisan budaya sebagai daya tarik wisata berkelas dunia melalui *Cultural Heritage Tourism*. Fokus utama diarahkan pada pengembangan Kawasan Semarang Lama, yang mencakup:

- b. Kawasan inti Kota Lama-pusat bangunan bersejarah kolonial dengan nilai arsitektur dan sejarah tinggi.

- b. Kawasan Kampung Melayu-representasi warisan budaya pesisir dan perdagangan multietnis.
- c. Kawasan Pecinan-pusat sejarah dan budaya komunitas Tionghoa di Semarang.
- d. Kawasan Kauman-kawasan bernuansa Islam tradisional dengan masjid bersejarah.

Pengembangan akan dilakukan secara bertahap melalui intervensi penataan kawasan, yang meliputi:

- Revitalisasi bangunan bersejarah dan penyesuaian fungsi untuk kegiatan wisata dan ekonomi kreatif.
- Penataan ruang publik, jalur pedestrian, dan pencahayaan tematik.
- Penyediaan fasilitas wisata yang ramah pengunjung, termasuk pusat informasi, papan interpretasi multibahasa, dan *wayfinding system*.
- Peningkatan konektivitas antar-kawasan melalui transportasi umum ramah lingkungan seperti jalur pedestrian dan jalur sepeda.

Pengembangan Kawasan Semarang Lama juga didukung dengan penyediaan *Low Carbon Zone* di Kota Lama Semarang melalui kegiatan seperti *Car Free Day*, sarana dan prasarana penunjang pejalan kaki dan transportasi non motor, maupun implementasi bangunan gedung hijau.

Kota Semarang juga mendukung peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian sebagaimana arahan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai kota metropolitan, Kota Semarang memiliki lahan yang terbatas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, sehingga perlu penguatan kerjasama antar wilayah untuk mendukung kebutuhan pangan secara luas dari wilayah sekitar. Konsep pertanian yang dapat dilakukan kota Semarang adalah Urban Farming. pengembangan urban farming mencakup 3 aspek: 1) produksi, 2) jaringan distribusi dan promosi, dan 3) keberlanjutan dan pengembangan SDM. Pada sektor produksi telah dipasang target produksi hortikultura, dengan metode pencapaian target berorientasi pada prinsip ekonomi hijau dan keberlanjutan lingkungan. Terkait jaringan distribusi, akan ditingkatkan melalui fasilitasi distribusi, pasar tani dan event tahunan terkait pertanian. Terkait keberlanjutan dan pengembangan SDM, akan dilakukan kegiatan mengenai pengembangan bisnis pada Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani, pengembangan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S), serta akses terhadap pendanaan maupun business matching terhadap konsumen maupun mitra bisnis lainnya.

Dalam hal peningkatan sistem dan jaringan transportasi umum yang terintegrasi, sistem dan jaringan transportasi umum di Kota Semarang dikembangkan melalui layanan BRT Trans Semarang yang mengoperasikan 8 koridor utama dan 4 layanan feeder, terintegrasi dengan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, stasiun kereta api, serta terkoneksi dengan angkutan aglomerasi BRT Trans Jateng di Terminal Tipe B Penggaron dan Terminal Tipe A Mangkang.

- a. Fokus Pemerintah Kota Semarang saat ini adalah peningkatan kualitas layanan Trans Semarang, yang meliputi:
- b. Peremajaan armada untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi operasional.
- c. Peremajaan halte agar lebih modern, inklusif, dan ramah disabilitas.
- d. Rerouting rute BRT yang kurang efektif untuk mengoptimalkan jangkauan dan waktu tempuh layanan.

Dalam rencana jangka panjang yang dituangkan dalam RPJPD Kota Semarang, sektor industri dan pariwisata Kota Semarang diarahkan pada pengembangan wisata *Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition* (MICE), desa wisata, wisata sejarah, dan wisata religi. Selaras dengan hal tersebut kebijakan untuk jangka menengah, sektor Pariwisata Kota Semarang diarahkan melalui:

- a. Penetapan Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota (RIPPARKOT) Semarang yang selaras dengan visi nasional, adaptif, dan berkelanjutan.
- b. Mengintegrasikan kebijakan pariwisata dengan tata ruang, transportasi, UMKM, pendidikan, dan budaya.
- c. Mengembangkan destinasi berbasis kualitas, pengalaman, dan keberlanjutan.
- d. Memperkuat kelembagaan dan SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan forum pentahelix.
- e. Menciptakan ekosistem investasi, inovasi, dan industri kreatif berbasis budaya lokal.
- f. Melibatkan aktif masyarakat lokal di setiap tahap pembangunan.
- g. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi digital terintegrasi.

3.2.4.2. Integrasi Program RTRW dan RPJMD

Keterkaitan antara RPJMD Kota Semarang dengan RTRW Kota Semarang dapat dilihat melalui beberapa aspek, salah satunya adalah indikasi program RTRW dengan program nomenklatur yang terdapat di dokumen RPJMD. Secara garis besar, keterkaitan program antara RPJMD dengan RTRW meliputi pengembangan struktur pelayanan, rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air, rencana pengembangan sistem infrastruktur perkotaan, rencana pengembangan sistem prasarana lainnya, serta perwujudan pola ruang kawasan lindung, budidaya dan strategis. Integrasi program antara RPJMD dan RTRW secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Integrasi Program RTRW dan RPJMD

KODE				INDIKASI PROGRAM RTRW	PROGRAM NOMENKLATUR
IV				PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG	
IV	A			PENGEMBANGAN STRUKTUR PELAYANAN	
IV	A	1		Pengembangan Fasilitas Pelayanan Regional	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
IV	A	2		Pengembangan Pusat Pelayanan Kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
IV	A	3		Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
IV	A	4		Pengembangan Pusat Pelayanan Kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
IV	B			RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	
IV	B	1		Sistem Transportasi Darat	
IV	B	1	1	Sistem Transportasi Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
IV	B	1	2	Transportasi Kereta Api	
IV	B	1	3	Sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan	
IV	B	2		Sistem Transportasi Laut	
IV	B	3		Pelabuhan Udara	
IV	C			RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN ENERGI	
IV	C	1		Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya	
IV	C	2		Peningkatan dan pengembangan Jaringan infrastruktur minyak bumi	
IV	C	3		Peningkatan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas	
II	D			SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	
IV	D	1		Peningkatan dan pengembangan jaringan tetap	
IV	D	2		Peningkatan dan pengembangan jaringan bergerak	
IV	E			SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
IV	E	1		Peningkatan sumber air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
IV	E	2		Prasarana sumber air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
IV	E	3		Pengendalian rob dan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
IV	F			INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	
IV	F	1		Rencana Sistem Persampahan	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
IV	F	2		Rencana Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
IV	F	3		Rencana Prasarana Air Limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
IV	F	4		Sistem Prasarana Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
IV	F	5		Jaringan Jalan Pejalan Kaki	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
IV	F	6		Rencana Jaringan Evakuasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana

KODE			INDIKASI PROGRAM RTRW	PROGRAM NOMENKLATUR
IV	G		RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA LAINNYA	
IV	G	1	Rencana Jaringan Jalan Sepeda	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
IV	G	2	Rencana Sistem Angkutan Umum	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
IV	G	3	Rencana Pengaturan Kegiatan Sektor Informal	
II			PERWUJUDAN POLA RUANG	
II	A		KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG	
II	A	1	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
II	A	2	Kawasan perlindungan setempat;	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
II	A	3	Ruang terbuka hijau;	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
II	A	4	Kawasan cagar budaya;	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
II	A	5	Kawasan rawan bencana alam.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
II	B		KAWASAN BUDIDAYA	
II	B	1	Kawasan hutan produksi	-
II	B	2	Kawasan perumahan	Program Pengembangan Perumahan
II	B	3	Kawasan perdagangan dan jasa	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
II	B	4	Kawasan perkantoran	Program Penataan Bangunan Gedung
II	B	5	Kawasan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
II	B	6	Kawasan peruntukan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
II	B	7	Kawasan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
II	B	8	Kawasan Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
II	B	9	Kawasan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
II	B	10	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	
II	B	11	Kawasan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
II	B	12	Kawasan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
II	B	13	Kawasan Pertambangan dan energi	-
II	B	14	Kawasan Kesehatan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
II	B	15	Kawasan Peribadatan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
II	B	16	Ruang Terbuka Non Hijau	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
II	C		KAWASAN STRATEGIS	
II	C	1	Pengembangan kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II	C	2	Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II	C	3	Pengembangan Kawasan Waduk Jatibarang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II	C	4	Pengembangan Kawasan Reklamasi Pantai	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

KODE			INDIKASI PROGRAM RTRW	PROGRAM NOMENKLATUR
II	C	5	Peningkatan Kawasan Masjid Agung Semarang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II	C	6	Peningkatan Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II	C	7	Peningkatan Kawasan Pendidikan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II	C	8	Peningkatan Kawasan Gedong Batu	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II	C	9	Pengembangan Kawasan Kota Lama	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Untuk pengembangan kawasan strategis, selain yang sudah tercantum dalam RTRW, ke depan juga akan didorong pengembangan kawasan strategis lainnya, yang diantaranya adalah:

- Pengembangan kawasan Semarang Lama;
- Pengembangan Kawasan Kampung Bahari;
- Pengembangan Kawasan Perbatasan Kota;
- Pengembangan Kawasan Pariwisata.

3.2.5. Proyek Strategis Kota Semarang

Pengembangan kawasan strategis ekonomi di Kota Semarang diperkirakan akan semakin meningkat sejalan dengan adanya rencana pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi baru maupun peningkatan kawasan strategis yang sudah ada. Terdapat sejumlah proyek strategis nasional yang pelaksanaannya berlokasi di Kota Semarang selama periode lima tahun yang akan datang, antara lain:

3.2.5.1. Penanganan Banjir

Penanganan banjir dan rob merupakan prioritas utama Pemerintah Kota Semarang yang dilaksanakan secara terintegrasi dari hulu sampai hilir dengan memadukan pendekatan teknis dan ekologis melalui prinsip ekohidrologi. Sistem dan sub sistem drainase telah terbangun cukup baik dan telah dapat menurunkan banjir dan rob di Kota Semarang. Ke depan, prioritas penanganan banjir dan rob akan diprioritaskan pada wilayah Semarang Bagian Timur. Sinergi pendanaan dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan nasional terus dilakukan karena penanganan banjir dan rob tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang saja.

Potensi kerjasama dan bantuan dari Pemerintah Pusat akan terus didorong. Pemerintah Kota Semarang menjadi kota yang masuk ke dalam program *National Urban Flood Resilience Project* (NUFReP) untuk pengendalian banjir dan rob. Program tersebut merupakan Loan dari World Bank melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun lokus pekerjaan meliputi normalisasi Sungai Tenggang & Sungai Sringin (tahun 2025), Sungai Semarang, Asin, & Baru (tahun 2027), Sub-Sistem Tenggang-Sodor (tahun 2025) dan Sungai Silandak (tahun 2027). Ruang lingkup pekerjaan meliputi normalisasi sungai, peningkatan kapasitas pompa dan rencana tampungan air berupa kolam retensi dan embung.

Selain upaya penanganan banjir di sektor hilir tersebut, dibutuhkan juga penanganan di sektor hulu untuk mengurangi limpasan air, antara lain melalui penghijauan kembali wilayah hulu, menggalakkan program 1000 biopori, dan penegakan aturan *Zero Delta Q* di kawasan resapan untuk mengembalikan fungsi resapan air.

3.2.5.2. Penguatan Ketahanan Pangan

Dalam kemendesakan pencapaian SDGs nomor 2 yaitu mengakhiri kelaparan dan segala bentuk malnutrisi), ditambah dengan krisis iklim yang mengancam sumber daya alam di Kota Semarang, dibutuhkan upaya komitmen yang nyata dan mendesak untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi (makro dan mikro) juga produktivitas pangan yang berkelanjutan dalam mendukung prioritas nasional swasembada pangan pada 2027 dengan pendekatan integrasi, konsistensi, koordinasi dan progresivitas. Juga Kota Semarang menjadi bagian dalam penyusunan *FAO Global Roadmap for Achieving SDG-2 without reaching 1,5 C threshold*. Sehingga ada 10 rencana aksi yang saling berhubungan di prioritaskan dan berkontribusi untuk penguatan sistem pertanian pangan dan memobilisasi SDA yaitu:

- a. Tanah dan Air, kebutuhan peningkatan tata kelola untuk penggunaan yang efisien dan berkelanjutan (regeneratif), yaitu :
 1. Integrasi antara jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier di wilayah produktif pertanian, serta pada rencana wilayah ekstensifikasi pertanian.
 2. Penyediaan tanah yang sehat dalam mendukung keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem melalui penyediaan pupuk organik kepada KT/KWT di Kota Semarang.
 3. Praktek pertanian regeneratif baik di lahan tanaman pangan maupun hortikultura di Kota Semarang.
 4. Kebijakan lebih inklusif terkait penggunaan lahan untuk aktivitas pertanian.
- b. Tanaman Pangan dan Hortikultura, upaya meningkatkan efisiensi, ketahanan dan keberlanjutan melalui pertanian cerdas iklim, yaitu :
 1. Pertanian terintegrasi dengan peternakan dan perikanan di setiap kawasan pertanian.
 2. Pengelolaan pertanian menggunakan pendekatan ekonomi sirkular.
 3. Penguatan inovasi teknologi pertanian melalui pemuliaan tanaman dan genetika, mengubah pola taman, manajemen nutrisi tanaman.
- c. Peternakan, kebutuhan peningkatan efisiensi dan pengurangan emisi, yaitu :
 1. Meningkatkan produktivitas dengan genetika yang lebih baik.
 2. Intensifikasi produksi ternak dengan perbaikan kualitas pakan.
 3. Peningkatan layanan veteriner dan pengawasan penyakit hewan dengan klinik hewan yang lengkap fasilitasnya.
 4. Tata kelola penggembalaan (*grassing zone*).
 5. Sertifikasi kualitas ternak yang sehat halal.
- d. Perikanan (akuakultur dan tangkap), dalam mendukung pilar ekonomi biru, yaitu:
 1. Upaya konservasi kawasan pesisir kota semarang dalam mendukung produktivitas perikanan jangka panjang seperti restorasi dan penambahan luasan mangrove (penguatan biodiversitas).
 2. Upaya mendorong CBIB (cara budidaya ikan yang baik) dengan sertifikasi.
 3. Upaya perlindungan sosial dan akses inklusif bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.
 4. Inovasi teknologi yang berkelanjutan.
- e. Tata guna lahan, untuk melindungi ekosistem alami.
- f. Pangan sehat, mendorong upaya akses dan konsumsi sehat dan berkelanjutan, yaitu:

1. Kampanye isi piringku dan pedoman diet berbasis pangan (FBDG) untuk anak-anak di sekolah-sekolah dan usia remaja serti posyandu dan PKK.
 2. Kampanye tentang informasi umum tentang diet dan hasil gizi, pelabelan pangan.
 3. Peningkatan konsumsi pangan lokal.
 4. Subsidi pangan untuk pendukung POU.
 5. Penguatan teknologi untuk mengurangi ultra proses dan penambahan nilai gizi (fortifikasi dan biofortifikasi).
- g. Kehilangan pangan, dengan meminimalkan kerugian di seluruh rantai nilai pangan, yaitu:
1. Kampanye ubah perilaku konsumsi pangan yang bertanggung jawab seperti garang asem yang lebih intensif dan masif.
 2. Meningkatkan kegiatan produksi, distribusi dan pasca panen yang bertanggung jawab.
 3. Menerapkan praktek ekonomi sirkular.
- h. Energi bersih, transisi ke sumber energi terbarukan, yaitu efisiensi penggunaan energi dalam sistem agrifood, melalui penghematan energi di unit produksi pangan primer melalui *close loop system* untuk perikanan, pertanian dan peternakan.
- i. Kebijakan yang inklusif, dengan membuat payung hukum yang melindungi kelompok rentan
- j. Data, dengan penguatan data dan informasi.
- k. Upaya peningkatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung, antara lain melalui pembangunan dan rehabilitasi daerah-daerah irigasi, serta pembangunan embung-embung untuk mendukung sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan.

3.2.5.3. Kota Inklusif

Proses pembangunan dengan prinsip inklusif terus digaungkan. Sebuah Kota yang Inklusif adalah sebuah kota dengan desain yang universal. Desain universal artinya menghapus semua hambatan sehingga memungkinkan semua orang untuk memiliki akses terhadap layanan publik dan fasilitas publik, serta berpartisipasi dalam kehidupan komunal tanpa ada yang tertinggal. Dapat disimpulkan kota inklusif adalah kota yang mengakomodasi dan menghargai kebutuhan penduduknya secara merata.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi

manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Di Kota Semarang, pada tahun 2021 telah terbit Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah ini didasarkan pada upaya untuk melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas.

Seiring dengan hal tersebut di atas, pada periode pembangunan tahun 2025-2030 Pemerintah Kota Semarang memiliki prioritas untuk mewujudkan Kota Semarang Sebagai Kota Inklusif. Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, Semarang tidak melupakan pentingnya memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan hak, akses, dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan kota, contohnya adalah untuk penyandang disabilitas. Upaya pemenuhan hak yang didorong meliputi: hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak pendataan, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan, dan berkoperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, hak hidup secara mandiri, hak dilibatkan dan aktif dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi aksesibel, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Konsep inklusivitas di Semarang tidak hanya sebatas penyediaan fasilitas fisik yang ramah bagi penyandang disabilitas, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Semarang aktif mendorong keterlibatan komunitas marjinal, perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan.

Beberapa program prioritas yang direncanakan dilaksanakan meliputi Penyelenggaraan Sekolah Inklusi, Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan, Rumah Duta Revolusi Mental, Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Perwujudan Rumah Inspirasi di 16 Kecamatan se-Kota Semarang.

Konsep Lansia, penduduk lanjut usia (lansia) adalah penduduk yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Penduduk tersebut sering kali sudah tidak dapat melakukan aktivitasnya secara produktif dan hanya mampu melakukan aktivitas yang terbatas. Meskipun memiliki keterbatasan dalam beraktivitas, lansia tetap membutuhkan tempat dan lingkungan yang nyaman dan aman untuk melakukan aktivitasnya. Berikut adalah hak untuk lansia : Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, Pelayanan kesehatan, Pelayanan kesempatan kerja, Pelayanan pendidikan dan pelatihan, Kemudahan dalam penggunaan fasilitas,

sarana, dan prasarana umum, Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, Perlindungan sosial, Bantuan sosial.

Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat Kota Semarang semakin meningkat di tahun 2024, yaitu hingga 78,23 tahun dari 77,90 tahun di tahun 2023. Jumlah dan persentase penduduk Lansia (penduduk usia 60 tahun ke atas) di Kota Semarang akan terus bertambah sejalan dengan meningkatnya UHH. Bertambahnya lansia ini menjadi fokus pembangunan Pemerintah Kota Semarang agar para lansia dalam kondisi bugar, bahagia dan produktif serta tidak menjadi beban bagi masyarakat yang masih dalam rentang usia produktif.

Perpres Nomor 88 Tahun 2021 tentang Stranas Kelanjutusiaan menyebutkan 5 strategi kelanjutusiaan yakni; peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu; peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lanjut usia; pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia; penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan; dan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia. Menindaklanjuti Perpres tersebut Kota Semarang telah menyusun RAD Lansia 2023-2026 yang didalamnya menjabarkan Rencana Aksi Kota Semarang dalam mencapai Kota Ramah Lansia melalui 7 program, yakni : Peningkatan keterlibatan Lansia dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan dan pembangunan, Penyediaan Bantuan untuk lansia kurang mampu, Pemberian perlindungan sosial untuk lansia dalam berkegiatan, Peningkatan akses informasi bagi lansia, Penyediaan informasi dan jasa layanan kesehatan bagi lansia, Peningkatan layanan transportasi umum dan penunjangnya, Pengembangan lingkungan inklusif untuk lansia.

Sebagai wujud nyata pelayanan sosial dan kesehatan pada kelompok lansia, pemerintah telah mencanangkan pelayanan pada lansia melalui beberapa jenjang. Pelayanan kesehatan di tingkat Masyarakat adalah posyandu lansia, tingkat dasar ada Puskesmas, tingkat lanjutan ada Rumah Sakit. Guna membantu lansia lebih berdaya, tangguh dan aktif, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan program Bina Keluarga Lansia, dan program Pemberdayaan Lansia yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

3.2.5.4. Peningkatan Gizi Masyarakat

Pembangunan bidang kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan harus dilakukan secara kolaboratif oleh Pemerintah, sektor swasta, dunia akademik dan seluruh elemen masyarakat. Pembangunan kesehatan menjadi sangat penting mengingat kondisi masyarakat yang sehat adalah modal dasar yang penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Kota Semarang terkait kesehatan adalah belum meratanya pemerataan kualitas pada fasilitas kesehatan. Dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2030, Misi yang

terkait Kesehatan terletak pada Misi ke-2 yaitu “Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang melihat pembangunan bidang kesehatan menjadi prioritas utama.

Seiring dengan hal tersebut di atas, beberapa hal yang akan menjadi fokus dalam pembangunan bidang kesehatan di Kota Semarang meliputi:

- a. Penguatan infrastruktur kesehatan, dapat dilakukan dengan penambahan maupun revitalisasi Puskesmas dan atau Puskesmas Pembantu, modernisasi alat kesehatan yang disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang kesehatan;
- b. Perbaikan status gizi masyarakat, dengan meningkatkan peran lintas sektor dalam upaya skrining, intervensi, dan pemantauan perbaikan status gizi masyarakat, serta mendorong pola makan sehat, antara lain melalui dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi dukungan nyata terhadap program pemerintah pusat, terutama bagi anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan. Selain itu, edukasi pola makan sehat terus digalakkan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.
- c. Promosi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, dengan mengidentifikasi akar penyebab dari penyakit tidak menular (Hipertensi, DM, dst), serta menyusun media edukasi untuk dibagikan melalui sosial media terkait promosi, pencegahan, dan pengendalian penyakit tidak menular untuk semua kelompok usia.
- d. Promosi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dengan mengidentifikasi akar penyebab dari setiap penyakit menular (HIV/AIDS, TB, Demam Berdarah, dst), serta mengedukasi masyarakat tentang pencegahan penyakit menular melalui media yang efektif.
- e. Kesehatan mental, dengan melaksanakan kampanye kesehatan mental terpadu, mengedukasi masyarakat tentang isu kesehatan mental melalui media yang efektif, mengedukasi mengenai upaya pencegahan dan deteksi dini masalah kesehatan mental, serta mengedukasi masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif terkait penanganan masalah kesehatan mental.
- f. Pengendalian penyakit berbasis lingkungan, dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesehatan lingkungan;
- g. Peningkatan kualitas sanitasi masyarakat, dengan meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak, serta optimalisasi peran masyarakat untuk perubahan perilaku terkait perilaku hidup bersih dan sehat.
- h. Adaptasi terhadap pemanasan global, dengan mengembangkan strategi terhadap upaya pencegahan dan penanganan perubahan iklim, serta mengedukasi masyarakat tentang dampak perubahan iklim serta cara mengurangi resiko kesehatan yang diakibatkan oleh perubahan iklim;

- i. Mitigasi bencana dan kesiapsiagaan, dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam (banjir dan tanah longsor), mengembangkan sistem peringatan dini dan rencana evakuasi, serta meningkatkan kapasitas respon cepat dan pemulihan pascabencana.
- j. Penguatan peran masyarakat dan kolaborasi antar sektor, dengan membangun kerjasama dengan sektor swasta, lembaga non-profit, dan komunitas lokal, menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam program kesehatan, serta mengintegrasikan program kesehatan dengan program pembangunan lainnya.
- k. Penelitian dan pengembangan, dengan melakukan penelitian tentang masalah kesehatan spesifik serta mengembangkan inovasi dalam pelayanan kesehatan berdasarkan hasil penelitian.
- l. Penguatan Pelaksanaan Kota Sehat, meliputi penguatan kelembaan Forum Kota Sehat, Tim Pembina, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, dan Forum Kesehatan Kelurahan serta penguatan pelaksanaan 9 Tatanan Kota Sehat meliputi: (1) Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, (2) Tatanan Permukiman dan Fasilitas Umum, (3) Tatanan Satuan Pendidikan, (4) Tatanan Pasar, (5) Tatanan Perkantoran dan Perindustrian, (6) Tatanan Pariwisata, (7) Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan, (8) Tatanan Perlindungan Sosial, dan (9) Tatanan Penanggulangan Bencana.

3.2.5.5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi tersebut memerlukan intervensi dari pemerintah secara bersama-sama dengan masyarakat. Meskipun terus menurun, tingkat kemiskinan di Kota Semarang diupayakan untuk terus menurun menuju nol persen di tahun 2045 sesuai dengan target di RPJPD.

Strategi utama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat melalui program-program pemberian Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, Subsidi, Stabilitas Harga, beasiswa bagi warga miskin, dan program lain yang dapat mengurangi beban pengeluaran Masyarakat.
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui program-program Peningkatan Produktivitas Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Akses Pekerjaan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Pembentukan dan penguatan koperasi di tingkat kelurahan sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan program lain yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Penurunan Jumlah Kantong-kantong Kemiskinan melalui program-program Peningkatan Infrastruktur Jalan, Rehab Rumah Tidak Layak Huni, Peningkatan Akses Sanitasi Lingkungan dan Akses Air Bersih, Peningkatan Sarana Transportasi, Peningkatan Akses Komunikasi dan Informasi, Peningkatan Akses dan Layanan Sarana Pendidikan

dan Kesehatan, dan program lain yang dapat mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

Dalam penanganan kemiskinan, penanganan kemiskinan ekstrem menjadi fokus dalam kebijakan pembangunan tahun 2026-2030. Kemiskinan ekstrem adalah suatu kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu: makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Presiden Republik Indonesia menyampaikan arahan agar kemiskinan ekstrem di Indonesia terhapuskan pada tahun 2024 (kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024 dan terbit Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dimana Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Indonesia.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, disebutkan bahwa tugas Bupati/Wali Kota dalam PPKE, yaitu:

- a. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;
- b. Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;
- c. Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*);
- d. Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Guna mendukung Sasaran Visi Indonesia Emas khususnya sasaran ke - 2, Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang, Pemerintah Kota Semarang berkomitmen dalam melaksanakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Semarang, dan melakukan percepatan target bahwa kemiskinan ekstrem harus berada pada posisi 0 %. Pemerintah Kota Semarang juga dalam hal ini berkomitmen dalam pelaksanaan TPB, khususnya Tujuan 1 yaitu Menghapus Kemiskinan Dalam Segala Bentuk.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, program penanggulangan kemiskinan juga menjadi prioritas pembangunan di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang setelah melalui pemetaan program/kegiatan yang ada di Perangkat Daerah, menetapkan 13 (tiga belas) program intervensi, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Kelompok Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, meliputi:

1. Fasilitasi Administrasi Kependudukan dengan bentuk intervensi yaitu penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (eKTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
 2. Bantuan Permakanan dengan bentuk intervensi yaitu bantuan permakanan (bantuan paket sembako dan atau bantuan beras).
 3. Fasilitasi Jaminan Kesehatan dengan bentuk intervensi yaitu kepesertaan dalam Program *Universal Health Coverage* (UHC) yaitu fasilitasi kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui APBD Kota Semarang.
 4. Penanganan Stunting dengan bentuk intervensi yaitu pemberian makanan tambahan dan pemberian makanan tambahan berbahan ikan.
 5. Alat Bantu Penyandang Disabilitas dengan bentuk intervensi yaitu kursi roda, alat bantu dengar dan alat bantu jalan
 6. Layanan Pendidikan dengan bentuk intervensi yaitu beasiswa sekolah dan penanganan anak putus/tidak sekolah.
 7. Program Keluarga Berencana dengan bentuk intervensi yaitu MOW, Pil KB, Suntik, IUD, dan Implant.
- b. Kelompok Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat, meliputi:
1. Layanan Ketenagakerjaan dengan bentuk intervensi yaitu fasilitasi rekrutmen ke akses pekerjaan dan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi di BLK.
 2. Pengembangan Ekonomi/UMKM dengan bentuk intervensi yaitu pelatihan-pelatihan dan fasilitasi perijinan usaha, serta penguatan ekonomi hijau pada sektor UMKM dan industri kota.
 3. Pengembangan Pertanian/Perikanan/Peternakan dengan bentuk intervensi bantuan bibit tanaman, bibit ternak dan sarana prasarana, serta alat bantu tangkap ikan bagi nelayan.
 4. Mendorong pembentukan dan penguatan koperasi di tingkat kelurahan yang terintegrasi dan multifungsi seperti penyediaan , sembilan bahan pokok (sembako), klinik, apotek, maupun simpan pinjam yang mendukung permodalan usaha warga, dan lain sebagainya
- c. Kelompok Pengurangan Kantong-kantong Kemiskinan, meliputi :
1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang diampu dengan bentuk intervensi yaitu rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
 2. Fasilitasi Sumber Air Bersih dengan bentuk intervensi yaitu akses air bersih.
 3. Fasilitasi Sanitasi Permukiman dengan bentuk intervensi yaitu akses sanitasi.

Pelaksanaan program intervensi tersebut kepada masyarakat miskin ekstrem yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Semarang (setelah melalui proses verifikasi dan validasi) dan dilaksanakan secara tuntas sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, upaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan tahun 2025-2030. Upaya tersebut telah

diuraikan dalam sasaran pembangunan yang diarahkan pada upaya untuk meningkatkan investasi, menjaga stabilitas harga serta pada upaya peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah terutama yang terkait dengan sektor perdagangan dan jasa serta peningkatan kunjungan wisata. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi ini juga akan didorong melalui pengembangan ekonomi syariah yang merupakan embrio dari aktivitas ekonomi syariah yang tersebar baik di wilayah Kota Semarang maupun berada di *hinterland* Kota Semarang. Pengembangan ekonomi syariah berorientasi pada pengembangan ekosistem dan mekanisme ekonomi syariah, dengan arah kebijakan antara lain melalui pengembangan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Pengembangan produk dan jasa ekonomi syariah dapat diarahkan pada perluasan akses pembiayaan dan investasi syariah, peningkatan literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip dan mekanisme ekonomi syariah, difokuskan pada pemanfaatan instrumen Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) secara produktif, pemahaman akad syariah dalam kegiatan usaha, serta pengenalan instrumen investasi syariah seperti sukuk dan reksa dana syariah.

Pengembangan konektivitas digital dan transportasi berbasis ekonomi syariah juga berkontribusi besar terhadap pemberdayaan masyarakat miskin di daerah tertinggal dan pedesaan. Ekonomi Syariah dapat diarahkan juga untuk mendorong percepatan sertifikasi halal bagi produk UMKM serta pengembangan destinasi wisata ramah muslim, sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi. Dengan pendekatan ini, ekonomi syariah diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan yang inklusif dan memperkuat daya saing daerah.

3.2.5.6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memegang peranan penting dalam mewujudkan generasi emas bangsa. Pendidikan adalah landasan bagi kekuatan dan kesejahteraan sebuah negara, dan berdampak pada bidang pembangunan lainnya seperti: pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, penguatan sosial, peningkatan kesetaraan gender, serta stabilitas dan ketenteraman.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Kota Semarang terkait pendidikan adalah pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, Misi yang terkait Pendidikan terletak pada Misi ke-1 yaitu “Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang melihat pembangunan bidang pendidikan menjadi prioritas utama.

Untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, beberapa prioritas strategis yang akan dilakukan meliputi:

- a.** Pelaksanaan sekolah swasta gratis jenjang TK, SD dan SMP;
Perluasan sekolah swasta gratis jenjang TK, SD dan SMP adalah dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Maksud dari penyelenggaraan program ini adalah sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas di Kota Semarang, serta untuk melaksanakan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Adapun tujuannya adalah untuk membantu biaya operasional sekolah sehingga dapat membantu meringankan dan/atau membebaskan pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada orang tua, wali murid/siswa dan/atau masyarakat lainnya. Dengan pelaksanaan program ini diharapkan meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan bermutu. Pada tahun 2025, jumlah sekolah swasta yang mengikuti program ini sejumlah 41 TK, 47 SD dan 44 SMP.
- b.** Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan oleh Sekolah Swasta
Penyelenggaraan pendidikan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tapi juga oleh swasta sebagai mitra untuk mencerdaskan bangsa. Untuk itu Sekolah swasta harus terus didorong untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara berkelanjutan. Untuk menjamin keberlanjutan operasional sekolah swasta tersebut, maka diupayakan melalui pemberian keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pembebasan sewa dan retribusi untuk sekolah swasta yang menempati aset milik Pemerintah Kota Semarang.
- c.** Beasiswa siswa miskin jenjang SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK;
Tujuan pelaksanaan program beasiswa adalah untuk membantu siswa agar dapat memperoleh pendidikan tanpa terhambat faktor ekonomi. Program ini menyasar kepada siswa yang berada pada jenjang SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK yang (yang merupakan penduduk Kota Semarang dan bersekolah di satuan pendidikan yang berada di Kota Semarang). Beasiswa ini masuk ke dalam kategori bantuan sosial sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan. Upaya lain yang akan dilaksanakan adalah melalui pembayaran SPP siswa yang tertunda atau belum dibayar. Melalui pelunasan SPP ini diharapkan jika menjadi penyebab ada ijasah yang belum terambil, maka siswa dapat mengambil ijasah yang merupakan haknya setelah menyelesaikan pendidikan.
- d.** Beasiswa siswa miskin dan berprestasi jenjang perguruan tinggi;
Tujuan pelaksanaan program beasiswa mahasiswa miskin dan berprestasi adalah untuk membantu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat memperoleh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi tanpa terhambat faktor ekonomi. Selain dari keluarga tidak mampu, juga melihat dari prestasi akademik

mahasiswa tersebut yaitu nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang baik. Beasiswa siswa miskin dan berprestasi ini masuk ke dalam kategori bantuan sosial sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan.

- e.** Fasilitasi siswa kurang mampu yang masuk ke sekolah swasta pada saat penerimaan siswa baru jenjang SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK

Fasilitasi kepada siswa kurang mampu juga dilakukan dalam tahapan awal saat proses penerimaan peserta didik. Untuk siswa kurang mampu yang saat mendaftar sekolah negeri tidak diterima, akan dilakukan fasilitasi untuk dapat masuk ke sekolah swasta secara gratis, khusus untuk peserta didik yang orang tuanya memiliki KTP Kota Semarang.

- f.** Peningkatan sarana dan prasarana sekolah negeri dan swasta
Peningkatan sarana dan prasarana sekolah negeri dan swasta dilakukan dalam rangka menunjang upaya peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Peningkatan sarana sekolah meliputi: meubelair, buku pelajaran, buku bacaan, alat tulis, fasilitas laboratorium, media pembelajaran, komputer, alat elektronik penunjang pembelajaran, dan lain-lain. Peningkatan prasarana sekolah meliputi: ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, UKS, KM/WC, pagar, laboratorium, lapangan olahraga, dan lain-lain. Untuk sekolah swasta, peningkatan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan melalui mekanisme hibah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g.** Peningkatan Kompetensi Guru, Tenaga Kependidikan dan Pustakawan di Sekolah Negeri dan Swasta

Kualitas pendidikan dari sekolah akan ditentukan oleh bagaimana kualitas dari tenaga pengajar atau guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Dibangun dari kesadaran tersebut, upaya peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan akan terus didorong dalam lima tahun ke depan. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah negeri, tapi juga bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah swasta agar peningkatan kualitas juga terjadi di sekolah-sekolah swasta. Selain itu, peningkatan tenaga pustakawan juga menjadi upaya yang terus didorong dalam rangka meningkatkan literasi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan.

- h.** Peningkatan Literasi dan Numerasi

Literasi dan numerasi merupakan dua pilar utama dalam dunia pendidikan yang menjadi bekal dasar bagi seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Literasi pada dasarnya adalah kemampuan membaca dan menulis termasuk pemahaman, interpretasi, analisis dan mengolah informasi yang diperoleh untuk pengambilan keputusan. Sedangkan numerasi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan konsep bilangan dan keterampilan matematika dasar

meliputi pemahaman terhadap angka, pengukuran, pola, statistik, hingga kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah berbasis matematika. Dalam konteks abad ke-21 yang dipenuhi tantangan global dan teknologi, kedua kemampuan ini sangat penting untuk membentuk individu yang kritis, kreatif, dan mampu beradaptasi.

Rendahnya tingkat literasi dan numerasi memiliki dampak serius bagi individu maupun negara. Pada level individu, kekurangan kemampuan membaca, memahami informasi, serta berhitung berdampak pada terbatasnya akses terhadap pendidikan lanjutan, kesempatan kerja, hingga partisipasi sosial. Seseorang dengan kemampuan literasi dan numerasi rendah rentan terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena kesulitan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada skala nasional, rendahnya literasi dan numerasi akan berdampak pada produktivitas tenaga kerja yang rendah, kualitas demokrasi yang minim (karena masyarakat sulit memahami informasi politik secara kritis), serta menghambat daya saing bangsa di kancah global. Di era digitalisasi seperti saat ini, kemampuan literasi juga berkaitan erat dengan literasi digital, yaitu kemampuan menyaring informasi yang benar di tengah maraknya hoaks dan informasi palsu. Tanpa kecakapan dasar ini, masyarakat mudah terpapar disinformasi yang berpotensi merusak tatanan sosial.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 ini untuk Sekolah Dasar, rerata kemampuan literasi di Kota Semarang mencapai 75,305, sedangkan rerata kemampuan numerasi mencapai 69,84. Untuk Sekolah Menengah Pertama, rerata kemampuan numerasi pada tahun 2024 mencapai 79,015, sedangkan kemampuan numerasi SMP Kota Semarang mencapai 70,10. Angka literasi dan numerasi di kota Semarang meningkat setiap tahun. Pemerintah kota Semarang perlu terus menaikkan angka literasi dan numerasi untuk menciptakan masyarakat Kota Semarang yang unggul dan berdaya saing tinggi. Peningkatan literasi dan numerasi memerlukan peran aktif dari guru, siswa, orang tua, dan masyarakat melalui berbagai strategi, di antaranya:

- Revitalisasi Perpustakaan Sekolah dan Umum: Perpustakaan bukan hanya tempat meminjam buku, tetapi juga menjadi pusat aktivitas literasi, dengan menyediakan ruang baca yang nyaman, akses buku digital, dan program diskusi atau bedah buku.
- Pelatihan Guru Berbasis Literasi dan Numerasi: Peningkatan kompetensi guru melalui workshop dan pelatihan berkelanjutan agar mereka mampu mengintegrasikan literasi dan numerasi dalam pembelajaran semua mata pelajaran.
- Peningkatan Komunitas Literasi: Pemerintah Kota Semarang menggandeng komunitas seperti TBM (Taman Bacaan

Masyarakat) dan kelompok relawan literasi untuk menjangkau masyarakat di kampung-kampung.

- Pemanfaatan Teknologi Digital: Melalui aplikasi perpustakaan digital dan platform pembelajaran daring, diharapkan akses literasi dan numerasi bisa merata di seluruh lapisan masyarakat, bahkan di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.
- Gerakan Literasi Keluarga: Orang tua dilibatkan melalui program penyuluhan pentingnya membaca di rumah dan mendampingi anak belajar berhitung secara menyenangkan.
- Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga pustakawan di sekolah

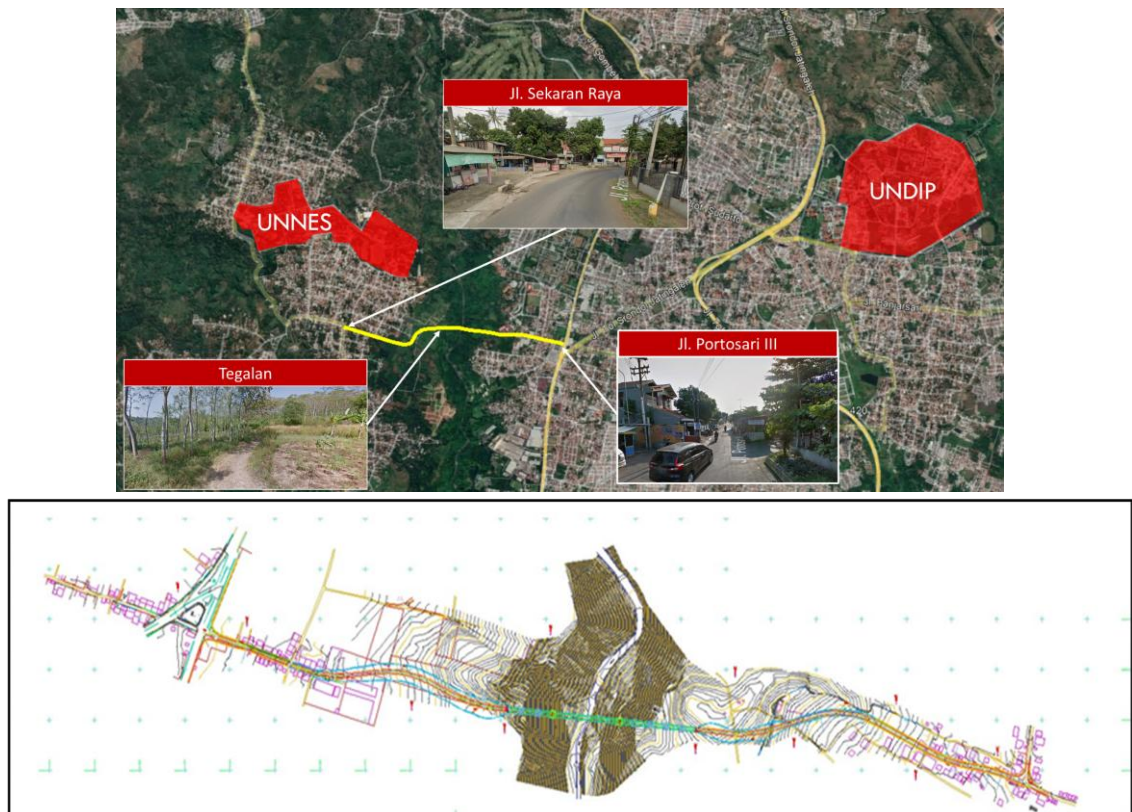
i. Penyediaan Sarana Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al Quran Gratis

Pendidikan tidak hanya tentang pendidikan formal di sekolah, tapi juga mencakup aspek pendidikan di luar jam belajar di sekolah. Pembelajaran di sekolah dengan keterbatasan jam belajar perlu didukung oleh pembelajaran yang dilakukan di luar jam sekolah, terutama terkait dengan aspek agama. Minimnya jam pelajaran agama di sekolah perlu ditambah dengan upaya lain di luar jam sekolah, yang salah satunya akan didorong melalui penyediaan bimbingan belajar dan lembaga pembelajaran Al Quran Gratis yang direncanakan akan dilaksanakan pada ruang-ruang publik (*community center*) di 177 Kelurahan.

3.2.5.7. Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Infrastruktur, Aksesibilitas Dan Konektivitas Wilayah

a. Pengembangan Semarang *Middle Ring Road*

Jalan Srandol-Sekaran merupakan trase dari rencana *Middle Ring Road* Kota Semarang. Rencana trase ini meliputi Simpang Jl. Pantura - SMA 8 Semarang - Kedungpane - Sekaran - Srandol - Meteseh - Fatmawati - Wolter Mongonsidi - Kaligawe. Kondisi eksisting *Middle Ring Road* sudah terhubung namun masih terkendala pada segmen Srandol-Sekaran. Rencana rintisan pembangunan Jalan akses Srandol – Sekaran ditujukan sebagai jalan tembus yang menghubungkan wilayah kampus terbesar di Kota Semarang yaitu Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang. Dengan adanya akses jalan tersebut, diharapkan ekonomi akan tumbuh, terutama di area Kecamatan Gunungpati dan Banyumanik. Selain itu juga mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan eksisting seperti Jl. Pawiyatan Luhur V/C 0,7, Jl. Kolonel H. R. Hadijanto V/C 0,94.



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2019

Gambar 3.8 Usulan Kegiatan Pembangunan Jalan Spondol - Sekaran

b. Pengembangan Semarang Outer Ring Road

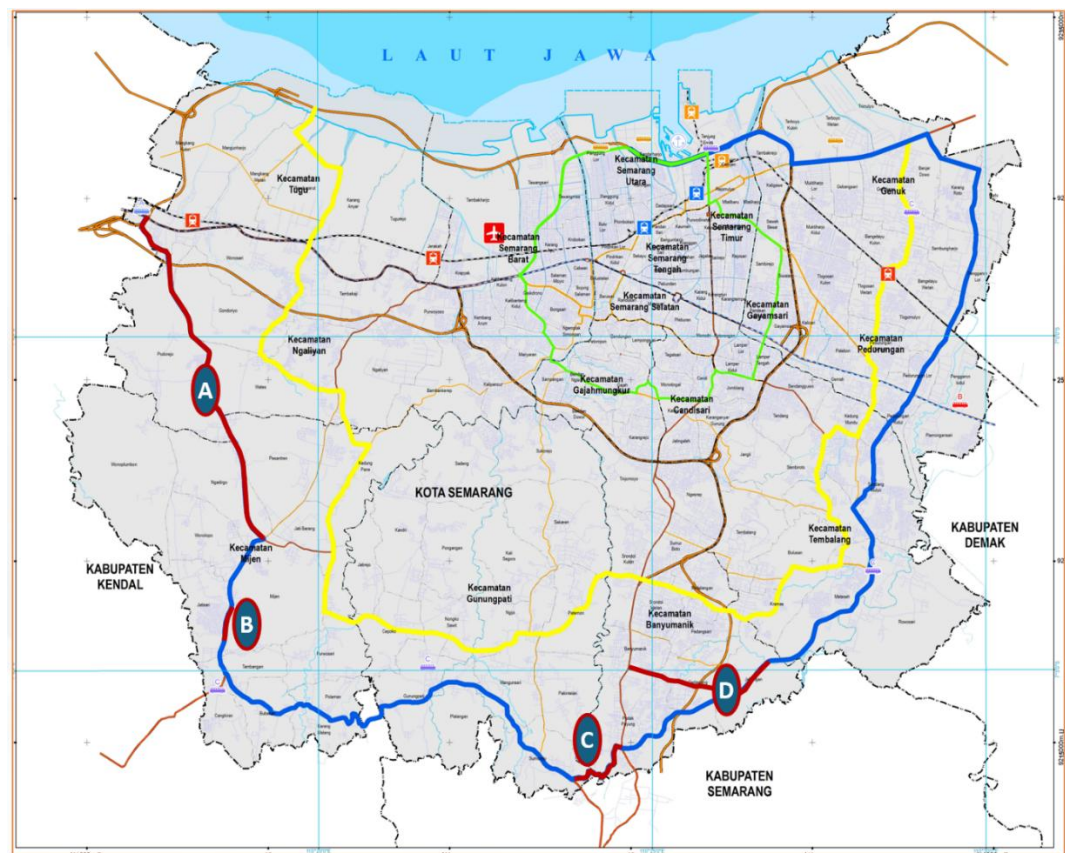
Rencana Jaringan Lingkar Luar (*Outer Ring Road*), merupakan rencana sistem jaringan jalan yang dimaksudkan untuk mengarahkan dan mencegat pergerakan regional/nasional yang bersifat lintasan (*traffic trough*) agar pergerakannya tidak membebani ruas-ruas jalan di kawasan perkotaan wilayah Kota Semarang. Ruas-ruas jalan outer ringroad tersebut adalah ruas jalan outer ringroad menyisir pantai dari kawasan pantai Kabupaten Kendal, kawasan Tugu, kawasan pelabuhan, kawasan Genuk sampai Kawasan Pantai Kabupaten Demak dan outer ringroad selatan dan Kawasan Tugu, Kawasan Mijen, Kawasan Gunungpati-Kawasan Banyumanik-Kawasan Tembalang, kawasan Pedurungan sampai Kawasan Genuk. Realisasi pembangunan jalan ini diharapkan akan mampu mengurangi beban arus transportasi di kawasan pusat kota yang diakibatkan lalu lintas regional/nasional menerus yang tidak memiliki kepentingan masuk kota.

Untuk pengembangan SORR membutuhkan pembebasan lahan yang besar sehingga perlu adanya strategi untuk menghubungkan embrio jalan yang sudah ada melalui:

1. Pembangunan SORR segmen Mangkang-Mijen.
2. Pelebaran Jalan R.M. Hadi Subeno (Simpang Wonolopo – Pasar Ace).
3. Peningkatan Jalan Pramuka.
4. Peningkatan jalan Empu Sendok-Jabungan.

Karena kebutuhan anggaran yang besar, maka pengembangan SORR akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2025-2030,

maka akan difokuskan pada pengembangan segmen Mangkang-Mijen dengan pendanaan yang berasal dari pinjaman daerah yang direncanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah untuk membayar pinjaman daerah tersebut.

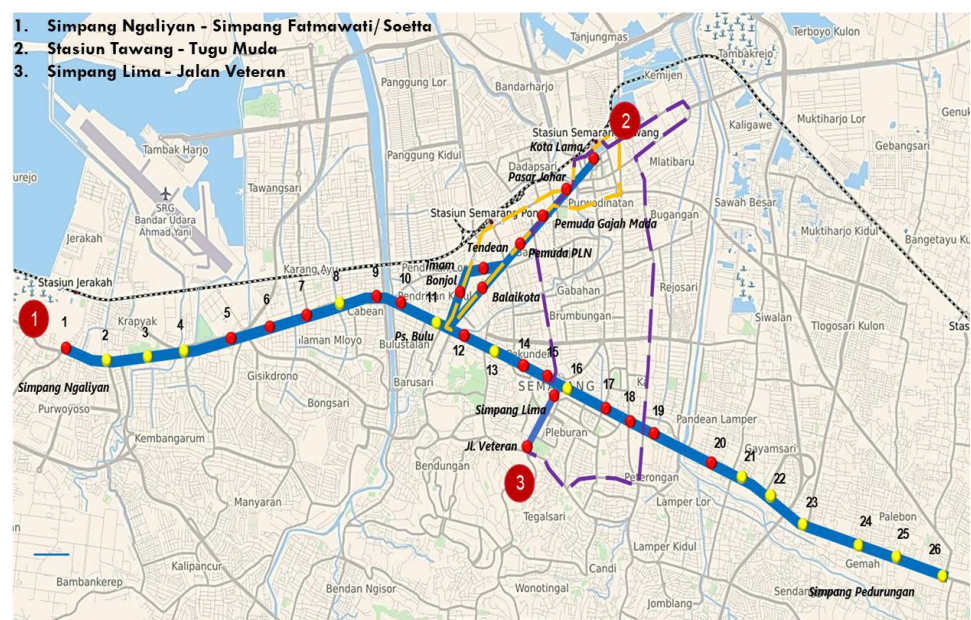


Sumber: Profil Usulan Program Prioritas Melalui Pembiayaan Non APBD Kota Semarang, 2019
Gambar 3.9 Usulan Kegiatan Pengembangan Semarang Outer Ring Road pada Tahun 2025-2029

- c. **Pemerataan Peyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum**
Untuk memberikan rasa keadilan dan untuk memastikan bahwa pembangunan di Kota Semarang harus dilakukan secara berkeadilan dan merata, maka salah satu sektor yang akan didorong adalah melalui pemerataan penyediaan sarana penerangan jalan umum terutama di wilayah perbatasan dengan kabupaten/kota lain. Upaya ini dilakukan juga untuk meningkatkan penyediaan sarana kelengkapan sarana transportasi serta untuk meningkatkan pencegahan kriminalitas. Penyediaan sarana penerangan jalan umum ini dilakukan juga dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dimana penggunaan lampu hemat energi menjadi prioritas untuk dilakukan dalam lima tahun ke depan.
- d. **Pengembangan Infrastruktur Hijau**
Kota Semarang, sebagai kota Metropolitan mengalami pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang sangat pesat. Hal ini menimbulkan permasalahan seperti peningkatan suhu udara (*urban heat island*), banjir, polusi udara, serta konsumsi energi dan air yang tinggi. Pengembangan infrastruktur hijau, antara lain dilakukan melalui penerapan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Semarang.

BGH adalah bangunan yang dirancang, dibangun, dan dioperasikan dengan memperhatikan prinsip efisiensi energi, konservasi air, kualitas udara dalam ruang, penggunaan material ramah lingkungan, serta kenyamanan dan kesehatan penghuninya.

- e. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan BRT/*New BRT* yang rendah karbon



Gambar 3.10 Kegiatan Peningkatan kualitas dan Kuantitas BRT/*New BRT* yang Rendah Karbon

Saat ini Kota Semarang telah memiliki layanan transportasi BRT, namun perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan BRT agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Selain itu terdapat manfaat lain, salah satunya mengurangi polusi atau emisi. Karena berdasarkan inventasasi status GRK Kota Semarang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang total emisi pada tahun 2023 adalah 3.928,81 Ton CO₂eq. Emisi terbesar berasal dari sektor energi (industri energi, industri manufaktur & konstruksi, transportasi, dan residential) dengan proporsi dari sektor transportasi 44%. Untuk itu perlu strategi untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layanan BRT melalui pengembangan BRT *Dedicated Lane* dan penggunaan armada BRT yang rendah karbon.

Program BRT *Dedicated Lane* merupakan salah satu proyek strategis yang terdapat di Semarang dan tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan di Jawa Tengah. Layanan BRT saat ini belum bisa dikategorikan kedalam sistem BRT karena belum memenuhi salah satu indikator sistem BRT, yaitu memiliki jalur khusus. *Dedicated line* dibutuhkan pada layanan BRT sebagai angkutan massal agar tidak terpengaruh dengan kepadatan lalu lintas yang terjadi. Dengan adanya jalur khusus berupa dedicated line, diharapkan waktu tempuh armada menjadi lebih akurat dan stabil. Hal ini akan menurunkan risiko keterlambatan akibat kecelakaan, pengalihan jalur, dan penutupan

jalan. Rencana pembangunan BRT *Dedicated Lane* ini akan mendapat pembiayaan Loan dari KfW *Development Bank* melalui Kementerian Perhubungan RI berupa pembangunan infrastruktur BRT *Dedicated Lane* yang progresnya saat ini dalam tahap penyiapan *readiness criteria*.

Selain layanan BRT masih *mix traffic* terdapat permasalahan lain yaitu armada BRT yang sudah berumur menimbulkan polusi polusi atau emisi. Rata-rata armada BRT menggunakan EURO 2 yang sudah tertinggal secara teknologi emisi. Sehingga kedepan akan diupayakan untuk peremajaan secara merata di seluruh koridor menggunakan teknologi rendah karbon seperti penggunaan armada dengan EURO 4 atau *Electric Bus*.

Peningkatan layanan BRT ini juga didorong dilaksanakan melalui penyediaan kartu gratis naik BRT bagi pelajar dan mahasiswa di Kota Semarang serta peningkatan kualitas pengelolaan layanan BRT, peremajaan armada BRT secara merata dan proporsional di seluruh koridor.

f. Pembangunan SPALD-T dan Penguatan Pengelolaan Air Limbah di Kota Semarang

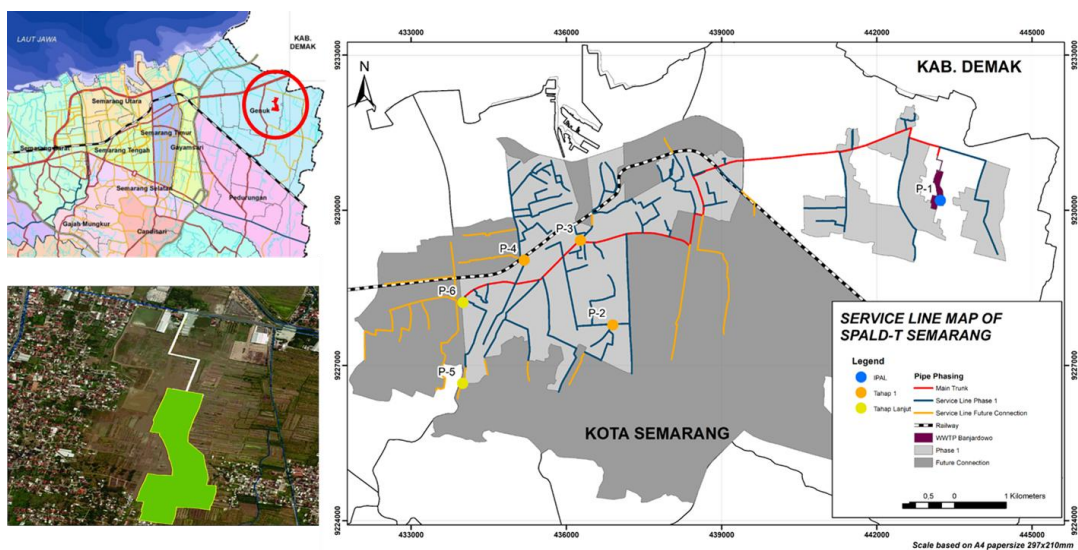
Pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang merupakan salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Semarang mendapatkan dukungan pendanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dalam rangka percepatan pengelolaan sanitasi daerah. Dukungan ini diberikan melalui Program *Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services Project* (ESP) guna mendukung pencapaian target RPJMN terkait akses sanitasi aman sebesar 15%.

Bantuan tersebut dialokasikan untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Perkotaan dengan pendekatan *Citywide Inclusive Sanitation Project* (CISP) yang bertujuan memperluas cakupan layanan pengolahan air limbah di wilayah perkotaan. Sistem ini dirancang untuk melayani 10 kecamatan di Kota Semarang, yaitu *Kecamatan* Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Utara, Semarang Barat, Genuk, Gayamsari, Pedurungan, Candisari, dan Gajahmungkur. Hingga tahun 2041, SPALD-T ini ditargetkan dapat melayani 764.287 jiwa dengan 191.000 sambungan rumah (SR) yang dibangun secara bertahap guna memastikan akses pengelolaan air limbah yang lebih luas dan berkelanjutan.

Sebagai upaya mendukung sistem pengolahan air limbah yang lebih optimal, Pemerintah Kota Semarang juga merencanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) baru untuk melayani wilayah yang belum terjangkau oleh sistem perpipaan

SPALD-T. Pembangunan IPLT ini akan dilaksanakan dengan penyusunan dokumen teknis, termasuk studi kelayakan, penyelidikan tanah, serta dokumen lingkungan. Selain itu, dilakukan revitalisasi IPLT Tanggung Rejo guna meningkatkan kapasitas pengolahan lumpur tinja yang telah beroperasi. Revitalisasi ini akan dilengkapi dengan pengadaan armada truk tinja untuk memperkuat layanan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari masyarakat ke IPLT, sehingga memastikan sistem pengolahan air limbah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Untuk memastikan keberlanjutan sistem pengolahan air limbah, Pemerintah Kota Semarang juga mengalokasikan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan air limbah yang aman dan penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). Dengan pelaksanaan program ini, diharapkan sistem pengelolaan air limbah di Kota Semarang dapat lebih efektif dalam mengurangi pencemaran lingkungan serta mendukung peningkatan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 3.11 Usulan Kegiatan Pembangunan SPALD-T dan Penguatan Pengelolaan Air Limbah

g. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Bersih, Asri, Ramah, Tangguh, dan Nyaman

Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah terus berbenah untuk menjadi kota metropolitan yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga nyaman, bersih, dan ramah lingkungan salah satunya melalui transformasi sistem pengelolaan sampah kota. Kondisi timbunan sampah terolah di pengolahan sampah mengalami peningkatan secara signifikan sejak tahun 2020 sampai 2024, dari 4,64% sampai 27,16%. Akan tetapi angka tersebut masih belum menunjukkan pengolahan sampah yang optimal. Dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat, penanganan sampah menjadi isu krusial.

Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang meluncurkan Program Strategis "Semarang Bersih", sebuah inisiatif pengelolaan sampah

berkelanjutan yang bertujuan mewujudkan "Pengelolaan Sampah menuju Kota Semarang Bersih, dan Memberi Manfaat Ekonomi Bagi Semua.". Program ini dirancang secara komprehensif, tidak hanya fokus pada penanganan sampah, tetapi juga memperhatikan aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengolahan sampah menjadi produk bernilai tambah. Tidak hanya itu, "Semarang Bersih" mengintegrasikan semua lapisan masyarakat, mulai dari rumah tangga, pengelola kawasan, hingga Pemerintah Kota, dalam sebuah kolaborasi dan ekosistem pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, efektif, dan produktif.

Selain menjaga kebersihan kota dan menanggulangi banjir dan rob, "Semarang Bersih" juga dapat menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Salah satu wujud konkret manfaat ekonomi tersebut adalah pengembangan bisnis kreatif berbasis barang tidak terpakai, seperti kerajinan tangan dari limbah plastik, tekstil daur ulang, hingga produk *eco-friendly* dari bahan bekas. Program ini juga mendorong pertumbuhan sektor daur ulang di Semarang, membuka peluang kerja di bidang pengumpulan, pengolahan, dan distribusi hasil daur ulang. UMKM yang bergerak di bidang daur ulang didukung penuh untuk berkembang melalui pelatihan, akses permodalan, serta kemitraan dengan perusahaan besar. Selain itu, potensi pengembangan energi terbarukan dari pengelolaan sampah seperti biogas dari sampah organik, maupun energi listrik dari instalasi WtE di TPA, menjadi sumber pendapatan tambahan bagi kota dan memberikan kontribusi terhadap ketahanan energi lokal.

Dalam pelaksanaannya "Semarang Bersih" mengusung 7 tahapan yang menjadi panduan dalam implementasinya di seluruh wilayah Kota Semarang, yaitu:

a) Pilah Sampah dari Rumah Tangga.

Tahapan pertama adalah pondasi utama dari program ini, yaitu mengajak seluruh rumah tangga di Kota Semarang untuk memilah sampah dari hulu. Masyarakat diedukasi untuk memisahkan sampah organik dan anorganik, serta mengenali kategori sampah yang bisa didaur ulang, sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), dan sampah residu. Pemilahan sampah ini bertujuan agar proses pengolahan di tahap berikutnya menjadi lebih mudah, efektif, dan bernilai ekonomi. Melalui berbagai kampanye sosial, workshop, dan penyuluhan lingkungan di tingkat RT dan RW, warga diharapkan memiliki kesadaran dan keterampilan dalam memilah sampah. Dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang terus digalakkan, rumah tangga menjadi aktor utama dalam mengurangi timbulan sampah yang tidak terkelola.

b) Tingkat RT terpilah, Pengambilan terjadwal.

Setelah sampah dipilah di tingkat rumah tangga, tahapan kedua memastikan bahwa di tingkat RT sudah tersedia sistem pengumpulan sampah terpilah dengan jadwal pengambilan yang teratur. Petugas pengangkut sampah telah dibekali

pelatihan khusus untuk memastikan bahwa sampah organik, anorganik, dan residu diangkut secara terpisah sesuai jadwal. Selain itu, RT juga didorong untuk memiliki bank sampah skala kecil atau posko pengumpulan sampah terpilah yang memudahkan warga dalam menyalurkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis, seperti plastik, kertas, dan logam, untuk dijual kembali.

c) Titik TPS dan Bank Sampah Tingkat RW.

Di tingkat RW pengelolaan sampah diperkuat dengan penentuan titik TPS sementara dan pendirian Bank Sampah yang melayani beberapa RT. Bank Sampah ini berfungsi sebagai tempat penampungan sampah yang telah dipilah untuk kemudian dijual kepada pihak ketiga atau didaur ulang. RW berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pelaku usaha daur ulang, koperasi, atau UMKM kreatif berbasis barang bekas. Dengan demikian, warga tidak hanya sekedar membuang sampah, melainkan dapat memperoleh keuntungan finansial dari hasil penjualan sampah terpilah.

d) Tanggung jawab pengelolaan sampah di area publik dan lahan tidak berpenghuni menjadi kewenangan Kelurahan. Pemerintah kelurahan wajib memastikan kebersihan di jalan-jalan besar, taman, saluran air, serta lahan kosong yang berpotensi menjadi tempat pembuangan sampah liar. Kelurahan juga memiliki peran strategis dalam melakukan koordinasi dengan komunitas masyarakat, relawan, dan instansi terkait dalam kegiatan bersih-bersih massal atau gotong royong rutin, sehingga seluruh wilayah tetap terjaga kebersihannya dan bebas dari sampah liar.

e) Kawasan Mandiri Menjadi Tanggung Jawab Pengelola. Kawasan mandiri seperti kantor, pasar, kawasan industri, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan, diwajibkan mengelola sampahnya secara mandiri. Setiap pengelola kawasan harus memiliki sistem pengelolaan sampah internal, mulai dari pemilahan, pengumpulan, hingga pengangkutan ke tempat pengolahan atau pemrosesan akhir. Pengelola kawasan diharuskan memiliki kemitraan dengan pihak ketiga seperti perusahaan daur ulang atau penyedia jasa pengangkutan sampah, agar sampah di kawasan mereka tidak membebani fasilitas umum kota.

f) Kecamatan Bertanggung Jawab terhadap Distribusi Sampah Tidak Termanfaatkan ke TPA. Sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat dimanfaatkan, seperti sampah residu dan sampah B3 yang tidak terolah, menjadi tanggung jawab Kecamatan untuk didistribusikan ke TPA. Kecamatan memastikan bahwa distribusi sampah dilakukan secara teratur, aman, dan sesuai ketentuan pengelolaan lingkungan. Selain itu, kecamatan juga melakukan monitoring terhadap TPS-TPS di wilayahnya, memastikan tidak terjadi penumpukan sampah yang dapat menimbulkan pencemaran.

- g) Tahapan terakhir adalah pengelolaan di tingkat TPA yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Pengelolaan sampah di hilir ini menjadi perhatian yang didorong untuk dapat tuntas. Hal ini terkait dengan kondisi timbunan sampah yang ada.

Timbunan sampah di Kota Semarang pada tahun 2024 mencapai 1.189 ton per hari, dengan 849 ton di antaranya masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang. Saat ini, kapasitas TPA Jatibarang telah melebihi daya tampung (*overload*) dengan sisa umur operasional diperkirakan hanya tiga tahun. Selain itu, sistem pengelolaan yang masih menggunakan metode *open dumping* berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti kebakaran, longsor, dan pencemaran udara. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sistem pembuangan terbuka (*Open Dumping*) sudah tidak diperbolehkan, sehingga pengelolaan sampah harus beralih ke sistem *sanitary landfill* atau *controlled landfill*.



Gambar 3.12 Usulan Kegiatan Pembangunan TPST dan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Semarang merencanakan pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah di TPA Jatibarang menggunakan teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif dengan skema kerjasama dan pembiayaan seefisien mungkin, serta pengolahan sampah organik seperti Composting, dan lain sebagainya yang dibutuhkan sehingga dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.

Kota Semarang juga akan melakukan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di hulu, termasuk optimalisasi Bank Sampah, TPS3R, dan TPST yang sudah ada. Langkah ini akan

didukung dengan berbagai program pengurangan sampah, seperti peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah, pembatasan penggunaan plastik, serta penguatan Gerakan "Semarang Wegah Nyampah" sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sebagai bagian dari upaya pengelolaan limbah secara berkelanjutan, akan dilakukan pula pembangunan Instalasi Pengolahan Lindi (IPL) serta perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah lainnya. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan persampahan dan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat timbunan sampah di Kota Semarang.

h. Peningkatan Akses Air Minum Perpipaan Aman

Dalam periode 2025–2029, Pemerintah Kota Semarang menargetkan peningkatan signifikan akses air minum layak dari 54,34% pada tahun 2024 menjadi 68,84% pada akhir RPJMD. Untuk mencapai target tersebut, berbagai strategi disusun melalui pembiayaan APBD dan dukungan pendanaan eksternal. Melalui APBD, Pemkot akan mengoptimalkan kinerja Instalasi Pengolahan Air (IPA), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta sumur produksi W1–W9. Selain itu, perluasan jaringan pipa akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau layanan air bersih.

Di sisi lain, Pemkot Semarang juga aktif mendorong pendanaan dari pemerintah pusat melalui APBN, seperti optimalisasi SPAM Jatisari dan program Pamsimas untuk kawasan perdesaan. Tak hanya itu, Kota Semarang menjadi salah satu penerima manfaat dari program kerja sama luar negeri melalui proyek *Climate Resilient Water Supply* di wilayah Semarang Utara yang berfokus pada ketahanan air menghadapi perubahan iklim. Sebagai langkah jangka menengah, Kota Semarang juga akan mendapatkan suplai air dari proyek SPAM Regional Waduk Jragung dengan alokasi 500 liter per detik atau setara 40.000 sambungan rumah (SR), yang akan memperkuat sistem distribusi air kota. Proyek-proyek ini menjadi fondasi penting menuju kota yang berketahanan dan inklusif dalam akses air bersih.

i. Angkutan Massal Berbasis Listrik

Pengembangan angkutan massal berbasis listrik di Kota Semarang menjadi langkah strategis dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, penguatan konektivitas wilayah, dan mendukung sektor pariwisata. Kota Semarang menghadapi tantangan polusi udara, kemacetan, dan ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil, sehingga transisi menuju sistem transportasi rendah emisi menjadi kebutuhan mendesak. Melalui penyediaan angkutan masal berbasis listrik, pembangunan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya, serta integrasi dengan sistem transit eksisting, pemerintah kota menargetkan penurunan emisi karbon sekaligus peningkatan kenyamanan dan aksesibilitas transportasi publik. Kebijakan ini

juga mencerminkan komitmen Kota Semarang terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-11 tentang kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Program ini dirancang melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, mitra swasta, serta dukungan pendanaan dari skema hijau nasional maupun internasional. Dengan pendekatan terencana dan berkelanjutan, angkutan massal listrik diharapkan menjadi fondasi mobilitas masa depan Kota Semarang yang modern, hijau, dan berdaya saing tinggi.

Proyek Strategis Kota Semarang diatas tidak lepas dari Program Strategis Nasional, sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia nomor 100.2.4/3207/SJ dan nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Juni 2025, tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mendukung keberhasilan pencapaian target Program Strategis Nasional dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Program Strategis Nasional merupakan penerjemah program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mencakup Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Strategis Nasional tersebut meliputi:

- a. Penanggulangan Kemiskinan dengan proyek/kegiatan:
 1. Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 2. Sekolah Rakyat; dan
 3. Pembangunan 3 Juta Rumah.
- b. Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
- c. Kesehatan Untuk Semua dengan proyek/kegiatan
 1. Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 2. Makan Bergizi Gratis.
- d. Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
- e. Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan:
 1. Pengendalian Inflasi;
 2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 3. Kemudahan perizinan di daerah

- f. Proyek Strategis Nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

Pemerintah Kota Semarang mendukung Program Strategis Nasional tersebut melalui Program Prioritas dan Program Unggulan Kota Semarang maupun Program Kerja Perangkat Daerah.

Selain itu, Program Pembangunan Daerah Kota Semarang tidak lepas dari arah kebijakan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 35 Program Prioritas dan 16 Program Pendukung Penumpu Pangan yang didelegasikan Provinsi Jawa Tengah untuk didukung oleh Kota Semarang melalui program prioritas dan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota maupun program kegiatan perangkat daerah Kota Semarang yang terkait.

Tabel 3.8 Program Dukungan Terhadap Program Provinsi yang didelegasikan kepada Kota Semarang

No	PROGRAM DELEGASI KE KABUPATEN/KOTA	PROGRAM DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM DELEGASI
(1)	(2)	(3)
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) aset dari pemerintah kab/kota	• Pembentukan Rumah Inspirasi untuk layanan disabilitas, perempuan dan anak, serta pemuda • Fasilitasi kegiatan Karang Taruna Kelurahan dan Kecamatan melalui alokasi anggaran untuk Karang Taruna Kelurahan dan Kecamatan • Fasilitasi kegiatan PKK RT/RW, Kelurahan, dan Kecamatan melalui alokasi anggaran untuk PKK RT/RW, Kelurahan, dan Kecamatan • Fasilitasi kegiatan Forum Kesehatan Kelurahan dan Kecamatan, termasuk untuk lansia • Penyiapan Support System untuk Kompetisi Olahraga dan Seni, serta Inovator Muda dan Zona Aktivitas Gratis untuk mewadai aktivitas bagi pemuda, perempuan, anak, dan lansia • Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya (Sport Center, Area Kuliner dan UMKM, serta Industri Kreatif dan lain-lain) • Penguatan dan Pengembangan Kapasitas UMKM dan Ekonomi Kreatif. • Program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan (pelatihan kerja)
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional -> Pembangunan RTLH 30% menjadi kewenangan Kabupaten/kota, dan 20% desa	• Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik. • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik • Pemenuhan rumah layak huni dan pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) • Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana • Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) • Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha • Penyediaan Rumah Bersubsidi.

No	PROGRAM DELEGASI KE KABUPATEN/KOTA	PROGRAM DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM DELEGASI
(1)	(2)	(3)
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK	• Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih • Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah • Sosialisasi Anti Korupsi ASN, Pelajar, dan Masyarakat • Peningkatan pengelolaan risiko di perangkat daerah. • Penyusunan dokumen pengelolaan risiko OPD jangka menengah (RTP RSO)
4	Pelayanan kesehatan keliling, Puskesmas pembantu dan Pelayanan kesehatan di setiap desa	• Pemerataan layanan kesehatan di seluruh kelurahan • Penyediaan layanan kesehatan <i>mobile</i> antara lain melalui Ambulan Hebat, Ambulan Transport, Ambulan Motor, • Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu • Penyediaan layanan dokter keliling melalui program Spesialis Keliling
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	• Pembangunan demplot dan sarana prasarana budaya perikanan, misal untuk demplot ikan nila saline dan bandeng.
6	Sekolah unggulan perkecamatan	• Penyelenggaraan Kelas Khusus Olahraga (KKO)
7	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	• Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia. • Pembentukan Rumah Inspirasi untuk layanan disabilitas, perempuan dan anak, serta pemuda
8	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	• Pengembangan desa wisata ekologi terintegrasi (10 Kandri Baru) seperti pelestarian hutan, sungai, danau, dan pantai.
9	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	• Penyediaan akses kredit bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank konvensional namun ingin melakukan usaha, termasuk mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel.
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	• Pengembangan sistem peringatan dini bencana di Kota Semarang. • Pembentukan KATANA (Kelurahan Tangguh Bencana) dan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) • Pembentukan Relawan Kebakaran untuk penguatan pencegahan dan penanganan bencana kebakaran berbasis masyarakat
11	Cek Kesehatan Gratis	• Penguatan Layanan Publik Gratis dari Dalam Kandungan hingga Meninggal (meliputi seluruh siklus kehidupan) • Pelayanan Cek Kesehatan Gratis bagi masyarakat melalui program Layanan Warga Semarang Sehat Setiap Waktu (Lawangsewu) • Pelayanan Cek Kesehatan Gratis bagi pelajar melalui program Pelayanan dan Edukasi Kesehatan Terpadu Pelajar Kota Semarang (PITERPAN)
12	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu.	• Penyediaan dokter dan bidan di setiap puskesmas pembantu • Penyediaan layanan dokter keliling melalui program Spesialis Keliling
13	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan	• Implementasi dan peningkatan sistem merit dalam manajemen ASN untuk mewujudkan ASN kelas dunia pada aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan

No	PROGRAM DELEGASI KE KABUPATEN/KOTA	PROGRAM DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM DELEGASI
(1)	(2)	(3)
	Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa.	karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian dan pemberian tunjangan kinerja, penghargaan dan disiplin, aspek perlindungan, dan sistem informasi di lingkungan pemerintah Kota Semarang
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	• Pendampingan korban kekerasan bagi perempuan dan anak berupa layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum • Pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum • Pembentukan Rumah Inspirasi untuk layanan disabilitas, perempuan dan anak, serta pemuda
15	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru. QW: (Pengembangan Kawasan Industri Kendal – Demak – Semarang (Tekstil dan Pengolahan Ikan). PUS: Pengembangan Metropolitan Semarang sebagai Global City • Pengembangan Cultural Heritage Tourism (Kota Lama Semarang, Candi Gedongsongo, Museum Kereta Api dsb) • Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, jagung, tanaman perkebunan, susu, kedelai dan perikanan tangkap)	• Penguatan produksi pangan lokal (pertanian, perikanan, dan peternakan) • Penguatan petani milenial • Penguatan lumbung pangan dan urban farming • Penguatan berbagai industri dan pengadaan barang atau jasa di pemerintah daerah yang mengedepankan potensi lokal. • Pengembangan Kawasan strategis sejarah dan budaya • Pemeliharaan Kawasan Kota Lama serta Insentif Perizinan PBG dan Keringanan PBB untuk bangunan cagar budaya di Situs Kota Lama (Untuk Kota Lama Semarang) • Pengembangan Kawasan Semarang Lama.
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	• Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah. • Peningkatan pelayanan rehabilitasi pada Panti Among Jiwo, • Penertiban PGOT, anak jalanan berkolaborasi dengan dinas sosial
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	• Penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim. • Fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi produk UMKM dan IKM secara masif, serta pendampingan bagi Juru Sembelih Halal (Juleha) • Program halal corner di pasar-pasar tradisional yang direvitalisasi. • Peningkatan literasi dan inklusi terkait pembiayaan syariah dan juga akan menerapkan skema pembiayaan alternatif dengan mengoptimalkan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) produktif sebagai sumber pendanaan non-APBD, yang sejalan dengan upaya menyediakan akses kredit bagi masyarakat.
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan	• Fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi produk UMKM dan IKM secara masif, serta pendampingan bagi Juru Sembelih Halal (Juleha)

No	PROGRAM DELEGASI KE KABUPATEN/KOTA	PROGRAM DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM DELEGASI
(1)	(2)	(3)
	P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	• Pendampingan sertifikasi Halal, P-IRT dan HAKI secara Gratis
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	• Pelatihan dan sertifikasi juru sembelih halal • Pendampingan bagi juru sembelih halal (Juleha) • Peningkatan kualitas rumah pemotongan hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem 20 Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana.	• Pengembangan desa wisata ekologi terintegrasi (10 Kandri Baru) seperti pelestarian hutan, sungai, danau, dan pantai. • Pembentukan BUMP • Penguatan lumbung pangan dan urban farming • Pembentukan KATANA (Kelurahan Tangguh Bencana) dan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana)
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	• Pengembangan energi alternatif antara lain melalui PLTA, PLTS, maupunm fasilitasi energi pada Kampung Tematik
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	• Program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan (pelatihan kerja)
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	• Penyediaan <i>support system</i> dan kompetisi bagi konten kreator dan inovator
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	• Penyediaan akses kredit bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank konvensional namun ingin melakukan usaha, termasuk mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel.
25	Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	• Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis ekonomi hijau seperti pengembangan produk Batik <i>Ecoprint</i>
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	• Peningkatan upaya penghijauan wilayah dan rehabilitasi lahan kritis. • Pengawasan dan pengendalian kawasan dengan fungsi kawasan Hijau • Pembangunan dan pemeliharaan taman kota • Pengelolaan keanekaragaman hayati • Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau termasuk untuk gedung dan bangunan pemerintah dan perkantoran.
27	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	• Penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi melalui program <i>Fun Game</i> Kebangsaan dan Mba Was dan Mas Id Goes To School • Penguatan Moderasi Beragama
28	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	• Pemberian hibah kepada FPK dan FKUB
29	Peningkatan operasional kader Posyandu	• Fasilitasi anggaran bagi Forum Kesehatan Kecamatan dan Kelurahan • Optimalisasi posyandu melalui pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita

No	PROGRAM DELEGASI KE KABUPATEN/KOTA	PROGRAM DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM DELEGASI
(1)	(2)	(3)
		• Peningkatan program Lansia Berdaya (SiDaya) yang diaplikasikan pada Sekolah Lansia, Bina Keluarga Lansia (BKL)
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	• Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia. • Peningkatan program Lansia Berdaya (SiDaya) yang diaplikasikan pada Sekolah Lansia, Bina Keluarga Lansia (BKL)
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	• Menyediakan pusat pelatihan keterampilan gratis yang inklusif dan terintegrasi dari hulu ke hilir (<i>link and match</i>). • Fasilitasi kegiatan Karang Taruna Kelurahan dan Kecamatan melalui alokasi anggaran untuk Karang Taruna Kelurahan dan Kecamatan • Penyiapan Support System untuk Kompetisi Olahraga dan Seni, serta Inovator Muda dan Zona Aktivitas Gratis untuk mewadai aktivitas bagi pemuda, perempuan, anak, dan lansia
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	• Penyediaan akses kredit bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank konvensional namun ingin melakukan usaha, termasuk mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel. • Fasilitasi Koperasi Merah Putih
33	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	• Beasiswa D3/D4/S1 bagi Masyarakat Miskin, Siswa Berprestasi dan Atlet. • Pemberian bonus atlet berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional. • Insentif atlet yang dibina
34	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	• Penyelenggaraan Sekolah Inklusi
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana.	• Pengembangan sistem peringatan dini bencana di Kota Semarang.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Rencana Program Perangkat Daerah dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2025-2030

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang memuat indikasi program serta pagu indikatif program untuk mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030, serta sebagai acuan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif sesuai periodisasi RPJMD. Kerangka pendanaan merupakan kemampuan/kapasitas riil Keuangan Daerah Pemerintah Kota Semarang periodisasi tahun 2025-2030, sedangkan Belanja Daerah merupakan kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan selama periodisasi tahun 2025-2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal RPJMD periode tahun berikutnya belum tersusun, penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD yang mengacu pada RPJPD dan RPJMN.

Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan pemerintah bidang wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kota Semarang, APBD Provinsi, APBN maupun sumber-sumber lain.

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.1.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dan Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar; (2) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama; (3) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD; (4)

Tingkat partisipasi warga negara 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan; dan (5) Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada Peningkatan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan, Peningkatan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, dan Peningkatan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang melaksanakan kurikulum muatan lokal; (2) Persentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang melaksanakan kurikulum muatan lokal; dan (3) Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan kurikulum muatan lokal.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemerataan distribusi guru yang proporsional.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja (1) Rasio guru terhadap murid dan (2) Persentase tenaga pendidik yang berkualifikasi sesuai standar.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada Meningkatnya kepatuhan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap ketentuan perizinan yang berlaku, Peningkatan kepatuhan satuan pendidikan dasar terhadap ketentuan perizinan yang berlaku, dan kepatuhan satuan pendidikan sekolah menengah pertama terhadap ketentuan perizinan yang berlaku.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Total Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang Berizin dan (2) Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Berizin; (3) Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Berizin.

4.1.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat, Peningkatan ketersediaan obat PKD, obat Program, dan Vaksin serta perbekalan di fasilitas pelayanan kesehatan, Peningkatan

penanganan kesehatan bagi lanjut usia, Peningkatan perlindungan kesehatan dan kemudahan akses layanan kesehatan, Peningkatan kualitas pemenuhan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif di RSUD Mijen, Peningkatan kualitas manajemen informasi kesehatan, Pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk upaya kesehatan perorangan, dan Pemenuhan alat kesehatan rumah sakit untuk upaya kesehatan perorangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia; (2) Angka kematian bayi; (3) Persentase ibu hamil KEK; (4) Prevalensi wasting balita; (5) Indeks kesehatan lingkungan; (6) Persentase kelurahan mencapai sanitasi total berbasis masyarakat; (7) Persentase lanjut usia yang mandiri; (8) Angka Incident Rate (IR) HIV; (9) Treatment Success Rate (TSR) TBC; (10) Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis; (11) Persentase fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) terakreditasi minimal paripurna; (12) Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional; (13) Proporsi faskes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar; (14) Proporsi fasilitas layanan kesehatan terintegrasi SIKN; (15) Cakupan pelayanan kesehatan RSUD Mijen terhadap penduduk Kota Semarang; (16) Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Mijen; (17) Rasio alat kesehatan berfungsi dengan baik di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro; (18) Persentase tingkat penggunaan sarana prasarana sesuai standar.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase faskes yang terpenuhi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Proporsi apotek, toko obat, dan usaha mikro obat tradisional (UMOT) sesuai standar dan (2) Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase rumah tangga yang beraktivitas fisik cukup.

4.1.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada Peningkatan kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota, Ketersediaan dokumen perencanaan teknis sumber daya air, dan Peningkatan pemanfaatan ruang sungai.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir; (2) Persentase peningkatan perlindungan kawasan abrasi dan banjir rob; (3) Persentase dokumen teknis sumber daya air yang tersusun dan dilaksanakan; dan (4) Persentase sungai yang termanfaatkan.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas akses air minum aman.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase rumah tangga terlayani air minum aman.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas akses sanitasi aman.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada Peningkatan kondisi sistem drainase, dan Ketersediaan dokumen perencanaan teknis perencanaan sistem drainase.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik dan (2) Persentase dokumen teknis sistem drainase perkotaan yang tersusun dan dilaksanakan.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelenggaraan penataan dan perijinan bangunan gedung, dan Peningkatan kualitas penyelenggaraan BGN.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Rasio kepatuhan PBG dan (2) Persentase BGN dalam kondisi baik.

f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase reklame yang berizin.

g. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada Peningkatan kondisi jalan, Ketersediaan dokumen perencanaan teknis kebinamargaan, dan Peningkatan ruang milik jalan yang dipelihara.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase jalan dalam kondisi baik; (2) Persentase dokumen teknis kebinamargaan yang tersusun dan dilaksanakan; dan (3) Persentase ruang milik jalan kondisi baik yang dipelihara.

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengembangan jasa konstruksi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penerbitan KRK.

4.1.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada Peningkatan upaya renovasi dan perbaikan rumah, serta pengelolaan rumah susun.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase backlog perumahan.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada Peningkatan rumah yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, dan Peningkatan kawasan permukiman yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Rumah Layak Huni dan (2) Persentase Kawasan yang Tertata.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas sarana prasarana lingkungan yang menunjang fungsi hunian, Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum, Peningkatan sarana prasarana yang menunjang kualitas lingkungan, dan Peningkatan kualitas penyediaan pemakaman umum.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase sarana prasarana lingkungan dalam kondisi baik; (2) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU; (3) Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola; dan (4) Rasio ketersediaan tempat pemakaman umum per 1000 penduduk.

4.1.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada Perwujudan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peningkatan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dan Peningkatan perlindungan masyarakat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang berhasil ditangani; (2) Persentase penurunan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; (3) Persentase tindak lanjut terhadap hasil evaluasi SOP dan layanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; (4) Tingkat penerimaan masyarakat terhadap hasil penegakan perda dan perkara; (5) Persentase keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan perda dan perkara; dan (6) Persentase kelurahan yang memiliki Satlinmas aktif dan berfungsi.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, Peningkatan pelayanan kedaruratan dan logistik bencana, dan Peningkatan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana; (2) Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana; dan (3) Persentase Penanganan Pasca Bencana.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas pencegahan kebakaran, Peningkatan kesiapan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, dan Peningkatan kesiapan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase terlaksananya pencegahan kebakaran; (2) Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; (3) Persentase pemberdayaan masyarakat, pembinaan aparatur dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi serta penyelenggaraan kerjasama; dan (4) Persentase standar dan kesiapan sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

4.1.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas PSKS dalam mengatasi permasalahan sosial.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase efektivitas penguatan pemberdayaan Sosial.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negara migran korban tindak kekerasan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase PPKS warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi PPKS.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penanganan PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada Penurunan kerentanan anak terlantar melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan Penurunan kerentanan warga miskin melalui jaminan sosial yang tepat sasaran.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial dan (2) Persentase warga miskin yang mendapat jaminan sosial.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial pasca bencana.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.1.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada Peningkatan keselarasan kebijakan ketenagakerjaan lokal dengan dinamika dunia usaha dan dunia industri.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase program dan kegiatan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada Peningkatan pelatihan kerja yang inklusif dan adaptif, dan Peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dan (2) Persentase produktivitas tenaga kerja.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada Peningkatan penempatan tenaga kerja lokal, Peningkatan wirausaha baru, dan lowongan pekerjaan yang berkualitas.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase pencari kerja lokal yang ditempatkan; (2) Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru; dan (3) Persentase lowongan pekerjaan yang berkualitas.
- d. Program Hubungan Industrial
Program ini diarahkan pada Peningkatan lingkungan kerja yang adil serta menjamin hak pekerja.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak.

4.1.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program ini diarahkan pada Peningkatan kesetaraan akses dan kebijakan yang responsif gender.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG).
- b. Program Perlindungan Perempuan
Program ini diarahkan pada Penurunan kekerasan terhadap perempuan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada Peningkatan ketahanan keluarga.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Presentase kelurahan yang menerapkan kebijakan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA) dan (2) Persentase layanan peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas pengelolaan sistem data gender dan anak yang akuntabel.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase dokumen analisis gender dan anak yang ditetapkan.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada Peningkatan akses pemenuhan hak-hak anak.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Nilai Pemenuhan Hak Anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada upaya Penurunan kekerasan terhadap anak.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Nilai Perlindungan Khusus Anak.

4.1.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada Peningkatan optimalisasi sumber daya ekonomi lokal dalam menunjang kemandirian pangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase kecamatan yang memenuhi sarana prasarana mendukung kemandirian pangan.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada Peningkatan ketersediaan pangan yang berkelanjutan, Peningkatan akses pangan bagi masyarakat, dan Peningkatan konsumsi pangan yang berkualitas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Angka Ketersediaan Energi; (2) Persentase Cakupan Distribusi Pangan; dan (3) Angka Konsumsi Energi.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada Peningkatan daya tahan wilayah dalam menghadapi gangguan ketersediaan dan akses pangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase daerah tahan pangan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada Peningkatan peredaran pangan yang aman, layak konsumsi dan bebas dari cemaran.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan.

4.1.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelesaian sengketa tanah garapan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penyelesaian permasalahan tanah di Kota Semarang yang terfasilitasi melalui mediasi.

b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah.

c. Program Penatagunaan Tanah

Program ini diarahkan pada Peningkatan perencanaan penggunaan tanah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase pemanfaatan aset tanah BMD.

4.1.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada Peningkatan efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak kebijakan rencana dan program (KRP).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada Penurunan pencemaran udara, Peningkatan cakupan pelayanan laboratorium lingkungan, Penurunan kerusakan lahan, Peningkatan cakupan informasi lingkungan hidup, dan Perwujudan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berbasis pada data dan informasi yang valid.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase pelaksanaan program pengendalian

- pencemaran udara; (2) Kontribusi penurunan Emisi GRK Kumulatif; (3) Persentase pelayanan laboratorium lingkungan; (4) Luasan areal yang terkonservasi; (5) Persentase cakupan informasi lingkungan hidup; dan (6) Persentase pemenuhan dokumen pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati dan hutan kota.
 - d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Program ini diarahkan pada Peningkatan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase limbah B3 yang terkelola.
 - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program ini diarahkan pada Peningkatan kinerja pengawasan lingkungan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan, dan Peningkatan kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase kegiatan dan atau usaha yang dilakukan pengawasan dan (2) Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH.
 - f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya.
 - g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada Peningkatan kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penyelesaian kasus/sengketa lingkungan hidup.

i. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada Peningkatan tata kelola persampahan masyarakat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Volume sampah masuk ke TPA per tahun dan (2) Persentase pengelolaan sampah.

4.1.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada Peningkatan aksesibilitas pendaftaran penduduk yang cepat, akurat dan ramah pengguna. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase perekaman KTP elektronik dan (2) Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan melalui layanan pencatatan sipil yang inklusif.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun dan (2) Persentase kepemilikan akta kematian.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, dan Peningkatan pemanfaatan data kependudukan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan (2) Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemanfaatan profil kependudukan yang dikelola.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah.

4.1.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas proses administrasi kelurahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase kelurahan yang menyelenggarakan mekanisme administrasi pemerintahan yang berkualitas.

b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada Peningkatan peran aktif lembaga kemasyarakatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan.

4.1.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada Pengendalian angka kelahiran penduduk.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu *Age Specific Fertility Rate/ASFR* (15-19 tahun).

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada Penurunan kehamilan tidak direncanakan, dan Peningkatan penggunaan kontrasepsi oleh pasangan usia subur (PUS).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase kehamilan tidak direncanakan (KTD) dan (2) *Demand Satisfied*.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Indeks Lansia Berdaya; (2) Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja.

4.1.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada Peningkatan jangkauan layanan angkutan umum, Peningkatan pengendalian dan pengawasan parkir on the street, Peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan, dan Peningkatan kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan laik fungsi kendaraan bermotor.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk;

(2) Persentase pengelolaan *Parkir On the Street*; (3) Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota; dan (4) Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan umum dan barang;

4.1.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada Peningkatan peran komunitas teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebarluasan informasi, dan Peningkatan penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi publik.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase peningkatan jumlah anggota komunitas teknologi informasi dan komunikasi dan (2) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap saluran informasi dan komunikasi publik.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada Peningkatan cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan Peningkatan cakupan layanan pengelolaan *e-government*.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan (2) Persentase aplikasi yang memenuhi standar Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE).

4.1.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada Peningkatan ekosistem perkoperasian yang kondusif melalui kepatuhan regulasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian.

b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada upaya Peningkatan kinerja pengelolaan koperasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase koperasi sehat.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada Peningkatan koperasi dengan sumber daya manusia yang kompeten.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan.

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemberdayaan koperasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase koperasi yang berkualitas.

- e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada upaya Peningkatan pelaku usaha mikro yang berdaya saing.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (*Feasible*).

- f. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada Peningkatan daya saing usaha mikro.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya.

4.1.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada Peningkatan ekosistem penanaman modal yang berkelanjutan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Peningkatan Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA).

- b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada Peningkatan eksposur potensi daerah kepada calon investor.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Kepeminatan Pelaku Usaha Untuk Berinvestasi di Kota Semarang Terhadap Target yang Ditetapkan.

- c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada Peningkatan kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Peningkatan kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan pada Bidang Perekonomian, Peningkatan kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan pada perizinan dasar dan Bidang Pembangunan, dan Peningkatan kemudahan pelayanan pengaduan penanaman modal, perizinan dan non perizinan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan; (2) Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Perekonomian yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan; (3) Persentase Pelaku Usaha Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang

Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan; (4) Persentase pengaduan penanaman modal dan perizinan yang ditindaklanjuti.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada Peningkatan kepatuhan perizinan dan penanaman modal yang tertib dan akuntabel.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada Peningkatan sistem informasi penanaman modal yang terpadu dan terintegrasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

4.1.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan, dan Peningkatan pemberdayaan pemuda yang berdaya saing dalam ekonomi mandiri.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase pemuda yang terlibat dalam Kegiatan kepemudaan dan (2) Persentase pemenuhan fasilitasi pengembangan potensi pemuda.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada Peningkatan kejuaraan olahraga, dan Peningkatan ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase atlet yang mengikuti kejuaraan daerah, nasional, dan internasional dan (2) Persentase atlet usia dini yang berprestasi di tingkat daerah.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada Peningkatan peran pramuka dalam pembinaan karakter pemuda.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepramukaan.

4.1.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas cakupan statistik sektoral yang terintegrasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektor yang Memenuhi Kaidah Statistik.

4.1.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada Peningkatan perlindungan data dan informasi sesuai dengan standar manajemen keamanan informasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Keamanan Informasi Sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

4.1.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan.

c. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada Peningkatan warisan budaya yang dilestarikan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan; (2) Persentase Warisan Budaya Benda yang Ditetapkan; (3) Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan; dan (4) Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan.

4.1.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada Peningkatan layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dan Peningkatan layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Tingkat pemanfaatan perpustakaan dan (2) Rasio koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada Peningkatan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan.

4.1.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada Peningkatan ketersediaan arsip dan kesesuaian pengelolaan arsip.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Tingkat ketersediaan arsip dan Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Arsip.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada Peningkatan cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip dan Peningkatan penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang digabung/dibubarkan/pemekaran yang telah diautentifikasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip dan Persentase kegiatan penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang digabung/dibubarkan/Pemekaran yang telah di autentikasi.

c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini diarahkan pada Peningkatan akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

4.1.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada Peningkatan produksi perikanan tangkap.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Jumlah produksi perikanan tangkap.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada Peningkatan produksi perikanan budidaya.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Jumlah produksi perikanan budidaya.

- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Program ini diarahkan pada Peningkatan kelestarian laut dan keanekaragaman hayati.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Luasan Kawasan Konservasi.

- d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program ini diarahkan pada Peningkatan preferensi masyarakat akan konsumsi pangan bergizi berbasis ikan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Konsumsi Ikan Masyarakat.

4.1.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program ini diarahkan pada Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan.
- b. Program Pemasaran Pariwisata
Program ini diarahkan pada Peningkatan jangkauan pemasaran pariwisata.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata.
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi.

4.1.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program ini diarahkan pada Peningkatan produksi tanaman pangan, Peningkatan produksi hortikultura dan perkebunan, Peningkatan produksi peternakan, dan Peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Jumlah produksi tanaman pangan; (2) Jumlah produksi hortikultura dan perkebunan; (3) Jumlah produksi ternak ruminansia dan non ruminansia berupa daging; (4) Jumlah produksi ternak non ruminansia berupa telur; (5)

Jumlah produksi ternak ruminansia berupa susu; dan (6) Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian.

- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program ini diarahkan pada Peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dasar pertanian.

- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada Peningkatan ketahanan wilayah terhadap penyakit hewan menular strategis dan zoonosis.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.

- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada Peningkatan perlindungan lahan dan produksi pertanian dari bencana pertanian pada tanaman pangan, dan Peningkatan perlindungan lahan dan produksi pertanian dari bencana pertanian pada hortikultura dan perkebunan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada tanaman pangan dan (2) Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada hortikultura dan perkebunan.

- e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas SDM pertanian yang kompeten, adaptif dan berdaya saing.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase peningkatan kapasitas SDM Pertanian.

4.1.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi.

- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan, Peningkatan pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan, dan Peningkatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase sarana distribusi perdagangan yang

- ditingkatkan; (2) Persentase pengelola sarana distribusi yang dibina; dan (3) Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang diberdayakan.
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Program ini diarahkan pada Peningkatan iklim perdagangan yang stabil dan adil.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Koefisien harga antar waktu.
 - d. Program Pengembangan Ekspor
Program ini diarahkan pada Peningkatan akses produk lokal ke pasar internasional.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Nilai ekspor non migas.
 - e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program ini diarahkan pada Peningkatan hak dan keamanan konsumen.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.
 - f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Program ini diarahkan pada Peningkatan konsumsi dan apresiasi terhadap produk lokal.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi di dalam negeri.

4.1.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Program ini diarahkan pada Peningkatan sentra IKM sebagai pusat produksi dalam mendukung perekonomian lokal, dan Peningkatan pelaku IKM yang berkontribusi pada peningkatan perekonomian lokal.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase pertambahan jumlah sentra IKM dan (2) Persentase pertambahan IKM.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Program ini diarahkan pada Peningkatan sistem kendali izin usaha industri yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase jumlah penerbitan izin usaha dalam SIINas.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program ini diarahkan pada Peningkatan efisiensi integrasi sistem pengelolaan industri nasional untuk mendukung daya saing dan pertumbuhan sektor industri lokal.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase IKM yang terdaftar di SIINas.

4.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

4.1.4.1. Sekretariat Daerah

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah, Peningkatan kualitas produk hukum yang dihasilkan, Peningkatan layanan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan, dan Peningkatan kolaborasi lintas sektor, harmonisasi kebijakan, dan penguatan peran pemerintah daerah pada kerangka otonomi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik; (2) Persentase produk hukum yang dihasilkan; (3) Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi; dan (4) Tingkat efektivitas kerjasama daerah dan kebijakan otonomi daerah.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada Peningkatan ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah, Peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa, dan Peningkatan partisipasi perusahaan yang terlibat dalam Forum CSR.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah; (2) Nilai pemanfaatan sistem pengadaan; (3) Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ; dan (4) Nilai tingkat kematangan UKPBJ; (5) Persentase capaian target dividen BUMD; (6) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan BUMD; (7) Persentase Peningkatan Partisipasi pembiayaan CSR dari perusahaan yang tergabung dalam forum CSR; dan (8) Persentase pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang.

4.1.4.2. Sekretariat DPRD

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada upaya Peningkatan kualitas layanan keprotokolan dan kehumasan dalam mendukung kinerja DPRD dan Peningkatan kualitas layanan persidangan dan perundang-undangan dalam mendukung kinerja DPRD.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap

layanan keprotokolan dan kehumasan dan (2) Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan persidangan dan perundang-undangan.

4.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

4.1.5.1. Perencanaan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada Perwujudan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkualitas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Nilai Sinergi dan Kualitas Perencanaan.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada Perwujudan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia; (2) Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Perekonomian & SDA; (3) Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Infrastruktur & Kewilayahan.

4.1.5.2. Keuangan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas dan ketepatan penyusunan APBD, Peningkatan kualitas penyerapan anggaran, dan Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD; (2) Persentase Realisasi Belanja; dan (3) Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Ketentuan;

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan barang milik daerah yang efisien dan akuntabel.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Tercapainya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan pertumbuhan wajib pajak daerah, Peningkatan pemenuhan pelayanan pajak daerah, Peningkatan partisipasi Wajib Pajak daerah dalam mendukung pembangunan daerah, dan Peningkatan capaian hasil pengawasan serta pengembangan pajak dan retribusi daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah, (2) Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah, (3) Persentase kepatuhan wajib pajak daerah, dan (4) Tingkat ketercapaian hasil pengawasan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah.

4.1.5.3. Kepegawaian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan manajemen ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan jabatan, Peningkatan kompetensi dan kesempatan ASN secara adil dan objektif, Peningkatan kinerja ASN yang berkualitas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi; (2) Persentase Pengembangan Karir ASN; dan (3) Persentase penilaian kinerja ASN yang bernilai baik.

4.1.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas ASN yang unggul, kompeten, dan adaptif.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial, dan Fungsional dan (2) Persentase ASN yang memiliki hasil diklat dengan kriteria berkualitas.

4.1.5.5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelenggaraan riset daerah, Peningkatan penyelenggaraan inovasi daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah dan (2) Persentase Hasil Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah.

4.1.6. Unsur Pengawas

4.1.6.1. Inspektorat Daerah

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja I, wilayah kerja II, wilayah kerja III, wilayah kerja IV, wilayah kerja V, dan Peningkatan pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu I; (2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu II; (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu III; (4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV; (5) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu V; dan (6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP lainnya, dan BPK yang ditindaklanjuti.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja I, wilayah kerja II, wilayah kerja III, wilayah kerja IV, dan Peningkatan kualitas program kerja pengawasan berbasis risiko.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I; (2) Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu II; (3) Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu III; (4) Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV; (5) Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT.

4.1.7. Unsur Kewilayahan

4.1.7.1. Kecamatan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada Peningkatan tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan yang tepat waktu;

- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program ini diarahkan pada Peningkatan keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan aktif di Kecamatan.
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan pada Peningkatan pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan.
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini diarahkan pada Peningkatan cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan.

4.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

4.1.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini diarahkan pada Peningkatan penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Indeks Aktualisasi Pancasila.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program ini diarahkan pada Peningkatan kepastian hukum dan jaminan kebebasan bagi masyarakat untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Angka kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan.
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Indeks Kinerja Ormas.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan pada Peningkatan aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni di daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Indeks Harmoni Indonesia.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada Peningkatan kewaspadaan dini di daerah dalam rangka memelihara stabilitas sosial dan politik dalam negeri.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator 1) Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas dan 2) Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah. Serta, penambahan Indikator pada Sekretariat Daerah 1) Persentase perencanaan kinerja Sekretariat Daerah yang berkualitas; 2) Indeks kematangan organisasi; 3) Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah; 4) Persentase kinerja Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah; 5) Persentase laporan kinerja daerah yang berkualitas; 6) Nilai kepuasan pimpinan daerah terhadap layanan keprotokolan, peliputan, dan publikasi; dan 7) Persentase pelaporan keuangan Sekretariat Daerah yang berkualitas. Selanjutnya, Dinas Kesehatan 1) Persentase ketercapaian indikator Nasional Mutu (INM) di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro; 2) Persentase ketercapaian kinerja pelayanan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro; 3) Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan; 4) Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian RSUD KRMT Wongsonegoro; 5) Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian RSUD Mijen; 6) Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas; 7) Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang berkualitas, dan (8) Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSUD Mijen yang berkualitas.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.860.705.559.057		3.188.094.614.999		3.330.589.571.066		3.356.763.869.689		3.418.503.619.582	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						872.580.080.326		969.978.212.465		1.012.370.413.146		1.020.157.258.035		1.038.524.812.505	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						126.293.365.009		139.654.650.495		145.470.103.864		146.538.320.013		149.058.020.684	
	Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	101,5	100	51.988.365.009	100	60.699.650.495	100	60.295.103.864	100	59.618.320.013	100	60.598.020.684	DINAS PENDIDIK AN
	Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	99,5	100	41.925.000.000	100	44.525.000.000	100	45.525.000.000	100	48.785.000.000	100	51.000.000.000	DINAS PENDIDIK AN
	Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	97,75	100	22.850.000.000	100	25.125.000.000	100	29.675.000.000	100	28.025.000.000	100	27.175.000.000	DINAS PENDIDIK AN
	Meningkatnya kualitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	83,58	100	5.430.000.000	100	5.200.000.000	100	5.850.000.000	100	5.975.000.000	100	6.135.000.000	DINAS PENDIDIK AN
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1 /DIV	%	85,02	86,97	4.100.000.000	89,37	4.105.000.000	90,07	4.125.000.000	91,17	4.135.000.000	91,43	4.150.000.000	DINAS PENDIDIK AN
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						687.945.401		760.727.014		792.404.960		798.223.749		811.949.066	
	Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan non formal/kesetaraan	Persentase satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	%	100	100	262.450.401	100	290.200.000	100	302.200.960	100	303.019.749	100	306.400.000	DINAS PENDIDIK AN
	Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	%	100	100	325.495.000	100	350.527.014	100	370.204.000	100	375.204.000	100	385.549.066	DINAS PENDIDIK AN
	Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	%	100	100	100.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	DINAS PENDIDIK AN
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						71.233.087.227		78.769.236.212		82.049.319.034		82.651.823.640		84.073.007.229	
	Meningkatnya pemerataan distribusi guru yang proporsional	Rasio guru terhadap murid	rasio	1:18	1:18	71.233.087.227	1:18	78.769.236.212	1:18	82.049.319.034	1:18	82.651.823.640	1:18	84.073.007.229	DINAS PENDIDIK AN
	Meningkatnya pemerataan distribusi guru yang proporsional	Persentase tenaga pendidik yang berkualifikasi sesuai standar	%	61,71	72,13		79,57		87,4		88,45		89,56		DINAS PENDIDIK AN
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						401.719.942		444.220.154		462.718.225		466.116.058		474.130.842	
	Meningkatnya kepatuhan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap	Persentase Total Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang Berizin	%	100	100	281.719.942	100	324.220.154	100	342.718.225	100	346.116.058	100	354.130.842	DINAS PENDIDIK AN

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	ketentuan perizinan yang berlaku														
	Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan sekolah dasar terhadap ketentuan perizinan yang berlaku	Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Berizin	%	100	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan sekolah menengah pertama terhadap ketentuan perizinan yang berlaku	Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Berizin	%	95	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						673.963.962.747		750.349.378.590		783.595.867.063		789.702.774.575		804.107.704.684	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pendidikan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan yang berkualitas	%	100	100	673.963.962.747	100	750.349.378.590	100	783.595.867.063	100	789.702.774.575	100	804.107.704.684	DINAS PENDIDIKAN
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pendidikan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan	%	100	100		100		100		100		100		DINAS PENDIDIKAN
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						968.289.509.776		1.076.364.544.930		1.123.403.830.778		1.132.044.279.174		1.152.425.307.553	
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						220.030.064.693		243.308.282.911		253.440.047.005		255.301.108.100		259.690.965.808	
	Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia	%	79	83	3.706.719.000	85	4.098.879.000	88	4.269.550.000	90	4.300.875.000	100	4.374.799.000	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita	Angka kematian bayi	per 1000 KH	7,99	7,87	-	7,82	-	7,76	-	7,77	-	7,64	-	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita	Persentase ibu hamil KEK	%	16	14	-	13	-	12	-	11	-	10	-	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita	Prevalensi wasting balita	%	4,8	4,7	-	4,6	-	4,5	-	4,4	-	4,3	-	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat	Indeks kesehatan lingkungan	Angka	61,5	72	23.379.580.000	74	25.853.049.000	78	26.929.499.000	80	27.127.047.000	82	27.593.294.000	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat	Persentase kelurahan mencapai sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya penanganan kesehatan bagi lanjut usia	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	40	77	38.529.000	79	42.606.000	81	44.381.000	83	44.708.000	85	45.477.000	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Angka Incident Rate (IR) HIV	per 1000 penduduk	0,23	0,21	1.624.509.000	0,2	1.796.383.000	0,19	1.871.188.000	0,18	1.884.922.000	0,17	1.917.327.000	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Treatment Success Rate (TSR) TBC	%	89	90,5	-	91	-	91,5	-	92	-	92,5	-	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	30	40	-	50	-	60	-	70	-	80	-	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya perlindungan kesehatan dan kemudahan akses layanan kesehatan	Persentase fasilitas layanan kesehatan (fasyankes)	%	95	95	115.720.148.049	95	127.962.869.900	95	133.290.865.275	95	134.268.626.650	95	136.576.351.758	DINAS KESEHATAN

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		terakreditasi minimal paripurna													
	Meningkatnya perlindungan kesehatan dan kemudahan akses layanan kesehatan	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	%	83,74	85,5	-	86	-	86,5	-	87	-	87,5	-	DINAS KESEHATA N
	Meningkatnya ketersediaan obat PKD, obat program, dan vaksin serta perbekalan di fasilitas pelayanan kesehatan	Proporsi faskes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	83	86	22.436.983.000	89	24.810.729.000	92	25.843.780.000	95	26.033.363.000	98	26.480.813.000	DINAS KESEHATA N
	Meningkatnya kualitas manajemen informasi kesehatan	Proporsi fasilitas layanan kesehatan terintegrasi SIKN	%	63,08	67,6	1.425.006.000	70,7	1.575.767.000	72,4	1.641.378.000	74,3	1.653.420.000	76,43	1.681.839.000	DINAS KESEHATA N
	Meningkatnya kualitas pemenuhan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif di RSUD Mijen	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD Mijen terhadap penduduk Kota Semarang	%	5	7	13.000.000	8	14.300.000	9	15.730.000	10	17.303.000	11	19.033.300	DINAS KESEHATA N
	Meningkatnya kualitas pemenuhan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif di RSUD Mijen	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Mijen	%	80	82	-	84	-	86	-	88	-	90	-	DINAS KESEHATA N
	Meningkatnya ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan yang sesuai standar di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Rasio alat kesehatan berfungsi dengan baik di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	%	100	100	51.685.590.644	100	-	100	-	100	59.970.843.450	100	61.002.031.750	RSUD KRMT WONGSON EGORO
	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana prasarana RSUD K.R.M.T Wongsonegoro dalam mendukung layanan kesehatan perorangan	Persentase tingkat penggunaan sarana prasarana sesuai standar	%	100	100	-	100	57.153.700.011	100	59.533.675.730	100	-	100	-	RSUD KRMT WONGSON EGORO
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						584.426.711		646.256.500		673.167.703		678.110.908		689.770.906	
	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase faskes yang terpenuhi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	%	21	26	584.426.711	34	646.256.500	43	673.167.703	53	678.110.908	55	689.770.906	DINAS KESEHATA N
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						288.234.058		318.727.961		332.000.327		334.438.271		340.188.879	
	Meningkatnya kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan	Proporsi apotek, toko obat, usaha mikro obat tradisional (UMOT) sesuai standar	%	81	83	288.234.058	85	318.727.961	89	332.000.327	91	334.438.271	95	340.188.879	DINAS KESEHATA N
	Meningkatnya kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan	Persentase IRTP yang memenuhi ketentuan	%	75	78		80		85		88		90		DINAS KESEHATA N
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						329.410.353		364.260.527		379.428.945		382.215.167		388.787.290	
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase rumah tangga yang beraktivitas fisik cukup	%	80	82	329.410.353	84	364.260.527	86	379.428.945	88	382.215.167	90	388.787.290	DINAS KESEHATA N
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						747.057.373.961		831.727.017.031		868.579.186.798		875.348.406.728		891.315.594.670	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	%	100	100	412.332.932.198	100	473.420.754.345	100	485.025.264.724	100	464.762.867.009	100	451.787.939.760	DINAS KESEHATA N
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DINAS KESEHATA N

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang berkualitas	%	100	100	221.506.899.753	100	237.012.382.735	100	253.603.249.527	100	271.355.476.994	100	290.350.360.384	RSUD KRMT WONGSON EGORO
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	RSUD KRMT WONGSON EGORO
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja RSUD Mijen	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSUD Mijen yang berkualitas	%	100	100	5.037.000.000	100	5.540.700.000	100	6.094.770.000	100	6.704.247.000	100	7.374.671.700	RSUD KRMT WONGSON EGORO
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja RSUD Mijen	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSUD Mijen yang berkualitas	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	RSUD KRMT WONGSON EGORO
	Meningkatnya pelayanan, keperawatan, dan kebidanan yang berkualitas di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase ketercapaian kinerja pelayanan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	%	100	100	108.180.542.010	100	115.753.179.951	100	123.855.902.547	100	132.525.815.725	100	141.802.622.826	RSUD KRMT WONGSON EGORO
	Meningkatnya pelayanan, keperawatan, dan kebidanan yang berkualitas di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase ketercapai Indikator Nasional Mutu (INM) di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	RSUD KRMT WONGSON EGORO
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						541.975.850.426		600.049.939.697		625.326.486.511		629.969.428.988		640.921.168.768	
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						51.995.455.166		57.496.346.844		59.890.590.951		60.330.379.572		61.367.749.851	
	Meningkatnya kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	%	97,77	98,12	48.795.455.166	98,28	52.796.346.844	98,36	55.690.590.951	98,44	57.130.379.572	98,52	48.167.749.851	DINAS PEKERJAA N UMUM
	Meningkatnya kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perlindungan kawasan abrasi dan banjir rob	%	98,94	98,95		98,97		98,98		98,99		99		DINAS PEKERJAA N UMUM
	Tersedianya dokumen perencanaan teknis sumber daya air	Persentase dokumen teknis sumber daya air yang tersusun dan dilaksanakan	%	100	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	DINAS PEKERJAA N UMUM
	Meningkatnya pemanfaatan ruang sungai	Persentase sungai yang termanfaatkan	%	100	100	2.000.000.000	100	3.500.000.000	100	3.000.000.000	100	2.000.000.000	100	12.000.000.000	DINAS PEKERJAA N UMUM
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						946.150.894		1.046.249.519		1.089.817.100		1.097.819.845		1.116.696.665	
	Meningkatnya kualitas akses air minum aman	Persentase rumah tangga terlayani air minum aman	%	44,14	48,66	946.150.894	51,09	1.046.249.519	53,65	1.089.817.100	56,33	1.097.819.845	59,15	1.116.696.665	DINAS PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKI MAN
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						1.648.769.176		1.823.201.741		1.899.122.913		1.913.068.553		1.945.963.431	
	Meningkatnya kualitas akses sanitasi aman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman	%	3,19	3,32	1.648.769.176	3,39	1.823.201.741	3,45	1.899.122.913	3,52	1.913.068.553	3,59	1.945.963.431	DINAS PERUMAH AN DAN KAWASAN

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															PERMUKI MAN
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					122.956.754.320		135.965.040.994		141.626.852.848		142.666.847.233		145.119.978.611		
	Meningkatnya kondisi sistem drainase	Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	%	60,57	61,17	120.056.754.320	62,37	133.765.040.994	62,97	138.226.852.848	63,57	140.666.847.233	64,17	143.119.978.611	DINAS PEKERJAA N UMUM
	Tersedianya dokumen perencanaan teknis perencanaan sistem drainase	Persentase dokumen teknis sistem drainase perkotaan yang tersusun dan dilaksanakan	%	100	100	2.900.000.000	100	2.200.000.000	100	3.400.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	DINAS PEKERJAA N UMUM
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					121.974.434.920		134.878.796.498		140.495.375.314		141.527.061.033		143.960.593.987		
	Meningkatnya penyelenggaraan penataan dan perijinan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG	%	83,51	86	2.439.488.698	87	2.697.575.929	88	2.809.907.507	89	2.830.541.221	90	2.879.211.879	DINAS PENATAAN RUANG
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan BGN	Persentase BGN dalam kondisi baik	%	100	100	119.534.946.222	100	132.181.220.569	100	137.685.467.807	100	138.696.519.812	100	141.081.382.108	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					619.134.178		684.635.866		713.145.249		718.382.017		730.734.470		
	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan	Persentase reklame yang berizin	%	84,7	85,5	619.134.178	86	684.635.866	86,5	713.145.249	87	718.382.017	87,5	730.734.470	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					141.363.704.631		156.319.366.117		162.828.766.134		164.024.450.421		166.844.822.034		
	Meningkatnya kondisi jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	50,34	50,64	125.263.704.631	51,24	140.519.366.117	51,54	149.228.766.134	51,84	150.924.450.421	54,24	153.744.822.034	DINAS PEKERJAA N UMUM
	Tersedianya dokumen perencanaan teknis kebinamargaan	Persentase dokumen teknis kebinamargaan yang tersusun dan dilaksanakan	%	100	100	4.100.000.000	100	3.800.000.000	100	3.600.000.000	100	3.100.000.000	100	3.100.000.000	DINAS PEKERJAA N UMUM
	Meningkatnya ruang milik jalan yang dipelihara	Persentase ruang milik jalan kondisi baik yang dipelihara	%	66,08	67,88	12.000.000.000	71,48	12.000.000.000	73,28	10.000.000.000	75,08	10.000.000.000	76,88	10.000.000.000	DINAS PEKERJAA N UMUM
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					539.493.759		596.569.839		621.412.005		625.975.158		636.738.691		
	Meningkatnya pengembangan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	rasio	53,94	56	539.493.759	57	596.569.839	58	621.412.005	59	625.975.158	60	636.738.691	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.421.482.302		2.677.664.535		2.789.166.968		2.809.648.380		2.857.959.791		
	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penerbitan KRK	%	89,95	92	2.421.482.302	94	2.677.664.535	96	2.789.166.968	98	2.809.648.380	100	2.857.959.791	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					97.510.471.080		108.562.067.744		113.372.237.029		114.255.796.776		116.339.931.237		
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang berkualitas	%	100	100	70.201.748.314	100	73.891.660.488	100	76.972.353.410	100	78.577.077.077	100	81.312.032.988	DINAS PEKERJAA N UMUM
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum	%	100	100		100		100		100		100		DINAS PEKERJAA N UMUM
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penyiapan lahan	Persentase terlaksananya kegiatan penyiapan lahan	%	84	85	1.000.000.000	87,5	5.379.918.639	90	5.811.591.712	92,5	4.852.039.769	95	3.638.910.342	DINAS PEKERJAA N UMUM
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penataan Ruang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Penataan Ruang yang berkualitas	%	100	100	26.308.722.766	100	29.290.488.617	100	30.588.291.907	100	30.826.679.930	100	31.388.987.907	DINAS PENATAAN RUANG

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penataan Ruang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Penataan Ruang	%	86,96	87		87		88		88		88		DINAS PENATAAN RUANG
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						346.913.813.788		396.274.246.898		417.758.204.959		421.704.502.775		431.013.002.064	
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						6.599.943.901		7.298.189.091		7.602.097.899		7.657.921.628		7.789.598.245	
	Meningkatnya upaya renovasi dan perbaikan rumah, serta pengelolaan rumah susun	Persentase backlog perumahan	%	24,11	24,12	6.599.943.901	24,12	7.298.189.091	24,13	7.602.097.899	24,13	7.657.921.628	24,13	7.789.598.245	DINAS PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKI MAN
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						17.420.675.675		19.263.706.946		20.065.879.943		20.213.227.724		20.560.790.624	
	Meningkatnya rumah yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan	Persentase Rumah Layak Huni	%	94,63	95,09	16.549.641.891	95,32	18.300.521.598	95,55	19.062.585.945	95,78	19.202.566.337	96,01	19.532.751.092	DINAS PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKI MAN
	Meningkatnya kawasan permukiman yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan	Persentase Kawasan yang Tertata	%	81,22	10	871.033.784	30	963.185.348	50	1.003.293.998	70	1.010.661.387	100	1.028.039.532	DINAS PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKI MAN
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						275.118.862.994		316.523.394.591		334.544.573.991		337.854.808.572		345.662.966.416	
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan yang menunjang fungsi hunian	Persentase sarana prasarana lingkungan dalam kondisi baik	%	60,82	68	222.681.207.707	72	256.194.035.582	76	270.780.378.188	80	273.459.682.058	84	279.779.605.017	DINAS PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKI MAN
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	22,75	27,75	13.755.943.150	30,25	15.826.169.729	32,75	16.727.228.700	35,25	16.892.740.429	37,75	17.283.148.321	DINAS PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKI MAN
	Meningkatnya sarana prasarana yang menunjang kualitas lingkungan	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	%	100	100	29.602.789.658	100	34.057.917.258	100	35.996.996.161	100	36.353.177.402	100	37.193.335.186	DINAS PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKI MAN
	Meningkatnya kualitas penyediaan pemakaman umum	Rasio ketersediaan tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	%	0,014	0,015	9.078.922.479	0,015	10.445.272.022	0,015	11.039.970.942	0,015	11.149.208.683	0,015	11.406.877.892	DINAS PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKI MAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						47.774.331.218		53.188.956.270		55.545.653.126		55.978.544.851		56.999.646.779	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100	100	47.774.331.218	100	53.188.956.270	100	55.545.653.126	100	55.978.544.851	100	56.999.646.779	DINAS PERUMAH AN DAN KAWASAN

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Permukiman yang berkualitas													PERMUKI MAN
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	79	80		85		87		89		90		DINAS PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKI MAN
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						94.774.923.352		105.322.030.820		109.912.622.925		110.755.849.463		112.744.846.241	
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13.945.295.045		15.420.646.250		16.062.787.768		16.180.740.040		16.458.965.023	
	Meningkatnya ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang berhasil ditangani	%	100	100	1.137.093.979	100	1.494.736.304	100	1.637.245.288	100	1.653.245.056	100	1.669.283.660	SATPOL PP
	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase penurunan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	5	5	1.176.977.062	5	1.214.566.552	5	1.205.640.396	5	1.091.776.316	5	1.188.503.409	SATPOL PP
	Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase tindak lanjut terhadap hasil evaluasi SOP dan layanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	80	81	202.644.727	82	181.715.335	83	195.720.697	84	148.720.697	85	168.720.697	SATPOL PP
	Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Tingkat penerimaan masyarakat terhadap hasil penegakan perda dan perkara	%	79	81		82		83		84		85		SATPOL PP
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan perda dan perkara	%	40	41	1.203.253.915	42	1.197.894.013	43	1.294.346.281	44	1.295.529.797	45	1.505.619.762	SATPOL PP
	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Persentase kelurahan yang memiliki Satlinmas aktif dan berfungsi	%	100	100	10.225.325.362	100	11.331.734.046	100	11.729.835.106	100	11.991.468.174	100	11.926.837.495	SATPOL PP
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						2.730.090.303		3.018.921.913		3.144.634.874		3.167.726.558		3.222.195.060	
	Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	100	1.430.090.303	100	1.573.921.913	100	1.660.000.000	100	1.677.726.558	100	1.708.235.560	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
	Meningkatnya pelayanan kedaruratan dan logistik bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	655.000.000	100	700.000.000	100	719.634.874	100	725.000.000	100	716.025.000	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	645.000.000	100	745.000.000	100	765.000.000	100	765.000.000	100	797.934.500	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						7.330.929.660		8.693.405.435		9.036.515.684		7.851.058.099		7.505.093.626	
	Meningkatnya kualitas pencegahan kebakaran	Persentase terlaksananya pencegahan kebakaran	%	100	100	788.869.728	100	855.000.000	100	820.000.000	100	835.000.000	100	717.287.613	DINAS PEMADAM KEBAKARA N

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya kesiapan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	%	132,25	100	1.192.100.000	100	1.405.337.813	100	1.486.000.000	100	1.518.000.000	100	1.260.890.997	DINAS PEMADAM KEBAKARA N
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Persentase pemberdayaan masyarakat, pembinaan aparaturn dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi serta penyelenggaraan kerjasama	%	112,45	100	1.450.000.000	100	1.715.000.000	100	2.000.000.000	100	1.605.671.897	100	1.800.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARA N
	Meningkatnya kesiapan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	Persentase standar dan kesiapan sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	%	100	100	3.899.959.932	100	4.718.067.622	100	4.730.515.684	100	3.892.386.202	100	3.726.915.016	DINAS PEMADAM KEBAKARA N
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						70.768.608.344		78.189.057.222		81.668.684.599		83.556.324.766		85.558.592.532	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Satpol PP	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Satpol PP yang berkualitas	%	84	100	28.098.266.371	100	31.282.854.687	100	32.668.935.755	100	32.923.539.151	100	33.524.095.836	SATPOL PP
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Satpol PP	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Satpol PP	%	83	84		84,5		85		85,5		86		SATPOL PP
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkualitas	%	100	100	10.651.443.100	100	11.858.651.431	100	12.384.084.688	100	12.480.599.311	100	12.708.257.319	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	100		100		100		100		100		BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran yang berkualitas	%	100	100	32.018.898.873	100	35.047.551.104	100	36.615.664.156	100	38.152.186.304	100	39.326.239.377	DINAS PEMADAM KEBAKARA N
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	%	88,44	100		100		100		100		100		DINAS PEMADAM KEBAKARA N
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						36.171.381.389		40.105.640.189		41.818.012.747		42.132.551.254		42.874.482.451	
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						6.694.457.818		7.402.702.167		7.710.963.074		7.767.586.222		7.901.148.503	
	Meningkatnya kapasitas PSKS dalam mengatasi permasalahan sosial	Persentase efektivitas penguatan pemberdayaan Sosial	%	100	100	6.694.457.818	100	7.402.702.167	100	7.710.963.074	100	7.767.586.222	100	7.901.148.503	DINAS SOSIAL
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						30.451.149		33.672.747		35.074.937		35.332.499		35.940.035	
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase PPKS warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	100	100	30.451.149	100	33.672.747	100	35.074.937	100	35.332.499	100	35.940.035	DINAS SOSIAL
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						8.672.516.999		9.590.031.355		9.989.376.310		10.062.730.304		10.235.757.184	
	Meningkatkan pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi PPKS	Persentase penanganan PPKS yang terpenuhi kebutuhannya	%	100	100	8.672.516.999	100	9.590.031.355	100	9.989.376.310	100	10.062.730.304	100	10.235.757.184	DINAS SOSIAL

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						5.544.985.618		6.131.620.837		6.386.951.791		6.433.852.459		6.544.481.421	
	Menurunnya kerentanan anak terlantar melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran	Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial	%	100	100	203.324.125	100	241.620.837	100	281.951.791	100	298.852.459	100	354.481.421	DINAS SOSIAL
	Menurunnya kerentanan warga miskin melalui jaminan sosial yang tepat sasaran	Persentase warga miskin yang mendapat jaminan sosial	%	100	100	5.341.661.493	100	5.890.000.000	100	6.105.000.000	100	6.135.000.000	100	6.190.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA						977.292.793		1.080.686.095		1.125.687.672		1.133.953.823		1.153.451.960	
	Meningkatnya pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial pasca bencana	Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial	%	100	100	977.292.793	100	1.080.686.095	100	1.125.687.672	100	1.133.953.823	100	1.153.451.960	DINAS SOSIAL
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14.251.677.012		15.866.926.988		16.569.958.963		16.699.095.947		17.003.703.348	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Sosial	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Sosial yang berkualitas	%	100	100	14.251.677.012	100	15.866.926.988	100	16.569.958.963	100	16.699.095.947	100	17.003.703.348	DINAS SOSIAL
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Sosial	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Sosial	%	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.001.339.839.310		1.109.982.207.548		1.157.268.423.160		1.165.954.229.048		1.186.442.246.350	
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						21.906.315.604		24.345.625.572		25.407.326.814		25.602.346.245		26.062.356.697	
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						46.963.727		51.932.283		54.094.831		54.492.060		55.429.041	
	Meningkatnya keselarasan kebijakan ketenagakerjaan lokal dengan dinamika dunia usaha dan dunia industri	Persentase program kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	80,95	90	46.963.727	90	51.932.283	90	54.094.831	90	54.492.060	90	55.429.041	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						3.469.728.705		3.836.810.822		3.996.582.045		4.025.929.749		4.095.154.904	
	Meningkatnya pelatihan kerja yang inklusif dan adaptif	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	79,06	80	3.349.444.776	81	3.693.610.617	81,5	3.837.765.087	82	3.857.703.083	82,5	3.924.035.610	DINAS TENAGA KERJA
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase produktivitas tenaga kerja	%	100	100	120.283.929	100	143.200.205	100	158.816.958	100	168.226.666	100	171.119.294	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						1.314.057.709		1.453.079.265		1.513.587.918		1.524.702.497		1.550.919.489	
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja lokal	Persentase pencari kerja lokal yang ditempatkan	%	72	73	365.016.030	75	410.760.097	76	439.509.766	77	446.434.775	78	454.111.142	DINAS TENAGA KERJA
	Meningkatnya wirausaha baru	Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	%	66	70	481.339.820	72	528.648.775	74	586.013.021	76	588.298.835	78	598.414.531	DINAS TENAGA KERJA
	Meningkatnya lowongan pekerjaan yang berkualitas	Persentase lowongan pekerjaan yang berkualitas	%	76	78	467.701.859	79	513.670.393	80	488.065.131	81	489.968.887	82	498.393.816	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						936.738.595		1.035.841.440		1.078.975.612		1.086.898.746		1.105.587.779	
	Meningkatnya lingkungan kerja yang adil serta menjamin hak pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	89	89,3	936.738.595	89,4	1.035.841.440	89,5	1.078.975.612	89,6	1.086.898.746	89,7	1.105.587.779	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						16.138.826.868		17.967.961.762		18.764.086.408		18.910.323.193		19.255.265.484	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Tenaga Kerja yang berkualitas	%	100	100	16.138.826.868	100	17.967.961.762	100	18.764.086.408	100	18.910.323.193	100	19.255.265.484	DINAS TENAGA KERJA

U BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Tenaga Kerja	%	67	67,5		68,5		69		69,5		70		DINAS TENAGA KERJA
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						20.506.473.627		22.793.469.143		23.788.876.044		23.971.718.147		24.403.004.803	
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						1.380.912.301		1.527.006.781		1.590.593.899		1.602.273.949		1.629.824.768	
	Meningkatnya kesetaraan akses dan kebijakan yang responsif gender	Persentase peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	48,89	68,63	1.380.912.301	68,78	1.527.006.781	68,93	1.590.593.899	69,08	1.602.273.949	69,23	1.629.824.768	DINAS PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						1.350.895.506		1.493.814.340		1.556.019.269		1.567.445.431		1.594.397.379	
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	4	0,03	1.350.895.506	0,03	1.493.814.340	0,03	1.556.019.269	0,03	1.567.445.431	0,03	1.594.397.379	DINAS PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						557.213.881		616.164.672		641.822.800		646.535.833		657.652.903	
	Meningkatnya ketahanan keluarga	Presentase kelurahan yang menerapkan kebijakan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA)	%	1,13	4,52	557.213.881	9,04	616.164.672	13,56	641.822.800	18,08	646.535.833	22,6	657.652.903	DINAS PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
	Meningkatnya ketahanan keluarga	Persentase layanan peningkatan kualitas keluarga	%	100	100		100		100		100		100		DINAS PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						283.610.935		313.615.731		326.675.215		329.074.056		334.732.427	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem data gender dan anak yang akuntabel	Persentase dokumen analisis gender dan anak yang ditetapkan	%	50	50	283.610.935	52	313.615.731	54	326.675.215	57	329.074.056	60	334.732.427	DINAS PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						1.012.733.443		1.119.876.211		1.166.509.730		1.175.075.645		1.195.280.865	
	Meningkatnya akses pemenuhan hak-hak anak	Nilai Pemenuhan Hak Anak	angka	69,29	66,34	1.012.733.443	66,34	1.119.876.211	66,36	1.166.509.730	66,38	1.175.075.645	66,38	1.195.280.865	DINAS PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															NGAN ANAK
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						341.461.951		377.587.131		393.310.491		396.198.649		403.011.215	
	Menurunnya kekerasan terhadap anak	Nilai Perlindungan Khusus Anak	angka	83,86	89,76	341.461.951	89,76	377.587.131	89,78	393.310.491	89,8	396.198.649	89,8	403.011.215	DINAS PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.579.645.610		17.345.404.277		18.113.944.640		18.255.114.584		18.588.105.246	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkualitas	%	100	100	15.579.645.610	100	17.345.404.277	100	18.113.944.640	100	18.255.114.584	100	18.588.105.246	DINAS PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100	100		100		100		100		100		DINAS PEMBERD AYAAN PEREMPU AN DAN PERLINDU NGAN ANAK
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						18.129.431.850		20.148.944.015		21.027.929.709		21.189.386.892		21.570.230.948	
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN						25.107.496		25.107.496		28.919.889		29.132.254		29.633.178	
	Meningkatnya optimalisasi sumber daya ekonomi lokal dalam menunjang kemandirian pangan	Persentase kecamatan yang memenuhi sarana prasarana mendukung kemandirian pangan	%	100	100	25.107.496	100	25.107.496	100	28.919.889	100	29.132.254	100	29.633.178	DINAS KETAHANA N PANGAN
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						3.372.250.327		3.786.965.703		3.941.894.417		3.870.840.538		3.839.118.444	
	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Angka ketersediaan energi	Kkal/kapita/hari	3.063	3.065	400.000.000	3.066	550.000.000	3.067	600.000.000	3.068	600.000.000	3.069	600.000.000	DINAS KETAHANA N PANGAN
	Meningkatnya akses pangan bagi masyarakat	Persentase Cakupan Distribusi Pangan	%	100	100	2.272.250.327	100	2.486.965.703	100	2.591.894.417	100	2.520.840.538	100	2.439.118.444	DINAS KETAHANA N PANGAN
	Meningkatnya konsumsi pangan yang berkualitas	Angka konsumsi energi	kkal/kapita/hari	1.895	1.910	700.000.000	1.920	750.000.000	1.930	750.000.000	1.940	750.000.000	1.950	800.000.000	DINAS KETAHANA N PANGAN
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						199.787.580		220.924.232		230.123.886		231.813.732		235.799.728	
	Meningkatnya daya tahan wilayah dalam menghadapi gangguan ketersediaan dan akses pangan	Persentase daerah tahan pangan	%	100	100	199.787.580	100	220.924.232	100	230.123.886	100	231.813.732	100	235.799.728	DINAS KETAHANA N PANGAN
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						1.024.480.824		1.132.866.413		1.180.040.866		1.188.706.143		1.209.145.736	
	Meningkatnya peredaran pangan yang aman, layak konsumsi dan bebas dari cemaran	Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan	%	93,4	93,6	1.024.480.824	93,7	1.132.866.413	93,8	1.180.040.866	93,9	1.188.706.143	94	1.209.145.736	DINAS KETAHANA N PANGAN

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.507.805.623		14.983.080.171		15.646.950.651		15.868.894.225		16.256.533.862	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang berkualitas	%	100	100	13.507.805.623	100	14.983.080.171	100	15.646.950.651	100	15.868.894.225	100	16.256.533.862	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	%	90	92,5		93		93,5		94		94,5		DINAS KETAHANAN PANGAN
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						179.895.098.386		199.456.190.883		207.970.088.844		209.533.970.919		213.222.844.865	
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						328.707.343		363.483.141		378.619.188		381.399.464		387.957.561	
	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian permasalahan tanah di Kota Semarang yang terfasilitasi melalui mediasi	%	94	96	328.707.343	97	363.483.141	98	378.619.188	98	381.399.464	98	387.957.561	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						179.549.349.079		199.073.862.812		207.571.839.992		209.132.797.647		212.814.773.488	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah	Persentase kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah	%	25	50	179.549.349.079	50	199.073.862.812	50	207.571.839.992	50	209.132.797.647	50	212.814.773.488	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						17.041.964		18.844.930		19.629.664		19.773.808		20.113.816	
	Meningkatnya perencanaan penggunaan tanah	Persentase pemanfaatan aset tanah BMD	%	50	60	17.041.964	70	18.844.930	70	19.629.664	70	19.773.808	75	20.113.816	DINAS PENATAAN RUANG
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						141.777.987.762		157.128.188.592		163.809.310.496		165.036.537.653		167.931.312.365	
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						1.260.000.000		1.404.500.000		1.424.025.000		1.284.819.658		1.664.630.576	
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak kebijakan rencana dan program (KRP)	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	1.260.000.000	100	1.404.500.000	100	1.424.025.000	100	1.284.819.658	100	1.664.630.576	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						4.611.046.434		5.098.874.974		5.311.200.661		5.350.201.873		5.442.197.655	
	Menurunnya pencemaran udara	Persentase pelaksanaan program pengendalian pencemaran udara	%	100	100	3.600.756.367	100	4.031.584.907	100	4.233.084.907	100	4.270.586.119	100	4.348.586.119	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Menurunnya pencemaran udara	Kontribusi penurunan Emisi GRK Kumulatif (sektor persampahan)	ton CO2eq	114.017,03	38.810,30	3.600.756.367	63.941,43	4.031.584.907	103.083,25	4.233.084.907	150.310,49	4.270.586.119	206.118,21	4.348.586.119	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Menurunnya kerusakan lahan	Luasan areal yang terkonservasi	Ha	21,23	22,23	468.219.851	22,73	518.219.851	23,23	524.545.538	23,73	524.545.538	24,23	530.545.538	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya cakupan informasi lingkungan hidup	Persentase cakupan informasi lingkungan hidup	%	100	100	442.070.216	100	449.070.216	100	453.570.216	100	455.070.216	100	463.065.998	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Terwujudnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berbasis pada data dan informasi yang valid	Persentase pemenuhan dokumen pengelolaan lingkungan hidup daerah	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						2.282.474.817		2.523.950.667		2.629.052.196		2.648.357.854		2.693.895.902	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati dan hutan kota	%	100	100	2.282.474.817	100	2.523.950.667	100	2.629.052.196	100	2.648.357.854	100	2.693.895.902	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						257.012.158		284.202.919		296.037.605		298.211.468		303.339.162	

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	68	72	257.012.158	74	284.202.919	76	296.037.605	78	298.211.468	80	303.339.162	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						496.171.071		548.663.800		571.511.079		575.707.799		585.606.994	
	Meningkatnya kinerja pengawasan lingkungan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan	Persentase kegiatan dan atau usaha yang dilakukan pengawasan	%	100	100	248.231.785	100	275.724.514	100	285.724.514	100	285.724.514	100	285.724.514	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH	%	88,62	88,69	247.939.286	88,71	272.939.286	88,73	285.786.565	88,75	289.983.285	88,77	299.882.480	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							2.628.621.450		2.906.718.099		3.027.758.705		3.049.992.145		3.102.436.224
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	70	75,25	2.628.621.450	75,5	2.906.718.099	75,75	3.027.758.705	76	3.049.992.145	76,25	3.102.436.224	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							249.262.484		275.633.364		287.111.199		289.219.514		294.192.591
	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	30,26	34,52	249.262.484	35,94	275.633.364	37,36	287.111.199	38,78	289.219.514	40,2	294.192.591	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							96.278.347		106.464.174		110.897.521		111.711.863		113.632.729
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian kasus/sengketa lingkungan hidup	%	100	100	96.278.347	100	106.464.174	100	110.897.521	100	111.711.863	100	113.632.729	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							83.345.652.472		92.157.350.137		96.035.979.242		96.891.220.102		98.200.388.684
	Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Volume sampah masuk ke TPA per tahun	ton	311.968,24	308.858,56	83.345.652.472	308.550,90	92.157.350.137	307.514,34	96.035.979.242	306.375,23	96.891.220.102	305.713,57	98.200.388.684	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Persentase pengelolaan sampah	%	99,01	99,11		99,16		99,21		99,26		99,31		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							46.551.468.529		51.821.830.458		54.115.737.288		54.537.095.377		55.530.991.848
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang berkualitas	%	100	100	46.551.468.529	100	51.821.830.458	100	54.115.737.288	100	54.537.095.377	100	55.530.991.848	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	%	89	90,25		90,5		90,75		91		91,25		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							19.914.164.419		22.162.797.398		23.141.507.137		23.321.282.210		23.745.334.373
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							342.077.818		378.268.154		394.019.873		396.913.240		403.738.093
	Meningkatnya aksesibilitas pendaftaran penduduk yang cepat, akurat dan ramah pengguna	Persentase perekaman KTP elektronik	%	99,35	99,4	342.077.818	99,45	378.268.154	99,5	394.019.873	99,55	396.913.240	99,6	403.738.093	DINAS KEPENDUDUKAN DAN

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															PENCATAT AN SIPIL
	Meningkatnya aksesibilitas pendaftaran penduduk yang cepat, akurat dan ramah pengguna	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak	%	71,06	73		75		76		77		77		DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATAT AN SIPIL
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL						127.656.273		141.161.749		147.039.960		148.119.704		150.666.596	
	Meningkatnya pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan melalui layanan pencatatan sipil yang inklusif	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	98,35	98,45	127.656.273	98,5	141.161.749	98,55	147.039.960	98,6	148.119.704	98,6	150.666.596	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATAT AN SIPIL
	Meningkatnya pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan melalui layanan pencatatan sipil yang inklusif	Persentase kepemilikan akta kematian	%	100	100		100		100		100		100		DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATAT AN SIPIL
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						507.438.166		561.122.904		584.489.001		588.781.021		598.905.007	
	Meningkatnya pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi Kependudukan	%	100	100	243.244.945	100	255.407.192	100	263.487.504	100	266.729.449	100	269.143.822	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATAT AN SIPIL
	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	80	100	264.193.221	100	305.715.712	100	321.001.497	100	322.051.572	100	329.761.185	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATAT AN SIPIL
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						135.194.925		149.497.956		155.723.301		156.866.809		159.564.106	
	Meningkatnya pemanfaatan profil kependudukan yang dikelola	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	%	100	100	135.194.925	100	149.497.956	100	155.723.301	100	156.866.809	100	159.564.106	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATAT AN SIPIL
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						18.801.797.237		20.932.746.635		21.860.235.002		22.030.601.436		22.432.460.571	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkualitas	%	100	100	18.801.797.237	100	20.932.746.635	100	21.860.235.002	100	22.030.601.436	100	22.432.460.571	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATAT AN SIPIL
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	100		100		100		100		100		DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATAT AN SIPIL
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						3.687.533.916		4.077.658.871		4.247.459.411		4.278.649.357		4.352.219.981	
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						744.736.278		823.526.118		857.819.124		864.118.261		878.976.623	

U BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya kualitas proses administrasi kelurahan	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan mekanisme administrasi pemerintahan yang berkualitas	%	100	100	744.736.278	100	823.526.118	100	857.819.124	100	864.118.261	100	878.976.623	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						2.942.797.638		3.254.132.753		3.389.640.287		3.414.531.096		3.473.243.358	
	Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan	Persentase fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan	%	100	100	2.942.797.638	100	3.254.132.753	100	3.389.640.287	100	3.414.531.096	100	3.473.243.358	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						17.435.604.667		19.356.464.100		20.192.511.533		20.346.081.567		20.708.321.473	
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						1.307.718.540		1.491.032.581		1.570.819.384		1.585.475.086		1.620.044.852	
	Terkendalnya angka kelahiran penduduk	Age specific fertility rate/ASFR (15-19 tahun)	angka	8,5	7,2	1.307.718.540	6,6	1.491.032.581	6,1	1.570.819.384	5,7	1.585.475.086	5,3	1.620.044.852	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						4.472.350.299		4.945.505.395		5.151.444.516		5.189.272.606		5.278.501.237	
	Menurunnya kehamilan tidak direncanakan	Persentase kehamilan tidak direncanakan (KTD)	%	15	14,3	3.061.715.299	14	3.256.505.395	13,7	3.391.044.516	13,5	3.295.872.606	13,2	3.249.501.237	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Meningkatnya penggunaan kontrasepsi oleh pasangan usia subur (PUS)	Demand satisfied	%	77,4	77,6	1.410.635.000	77,7	1.689.000.000	77,7	1.760.400.000	77,9	1.893.400.000	78	2.029.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						1.120.535.311		1.239.083.045		1.290.680.536		1.300.158.262		1.322.514.255	
	Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Indeks lansia berdaya	angka	58,65	58,66	1.120.535.311	58,67	1.239.083.045	58,68	1.290.680.536	58,69	1.300.158.262	58,7	1.322.514.255	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															BERENCA NA
	Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	Angka	91,69	91,7		91,71		91,72		91,73		91,74		DINAS PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARG A BERENCA NA
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.535.000.517		11.680.843.079		12.179.567.097		12.271.175.613		12.487.261.129	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkualitas	%	100	100	10.535.000.517	100	11.680.843.079	100	12.179.567.097	100	12.271.175.613	100	12.487.261.129	DINAS PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARG A BERENCA NA
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	100	100		100		100		100		100		DINAS PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARG A BERENCA NA
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						357.072.597.366		395.416.451.867		412.105.482.131		415.171.019.845		422.401.988.455	
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						281.874.708.973		311.695.819.985		324.675.355.576		327.059.511.829		332.683.242.684	
	Meningkatnya jangkauan layanan angkutan umum	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	Rasio	5,53	5,65	256.012.380.990	5,89	281.677.309.150	6,01	298.837.730.850	6,13	301.837.730.850	6,25	304.820.914.701	DINAS PERHUBU NGAN
	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan parkir on the street	Persentase pengelolaan <i>Parkir On the Street</i>	%	90,04	94	2.450.000.000	95,00	2.850.000.000	96,00	2.450.000.000	98,00	2.450.000.000	100,00	2.450.000.000	DINAS PERHUBU NGAN
	Meningkatnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	71,99	72,99	18.717.183.523	73,99	22.153.366.375	74,99	18.692.480.266	75,99	18.076.636.519	76,99	20.717.183.523	DINAS PERHUBU NGAN
	Meningkatnya kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan laik fungsi kendaraan bermotor	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan umum dan barang	%	1,83	1	4.695.144.460	1,00	5.015.144.460	1,00	4.695.144.460	1,00	4.695.144.460	1,00	4.695.144.460	DINAS PERHUBU NGAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						75.197.888.393		83.720.631.882		87.430.126.555		88.111.508.016		89.718.745.771	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan yang berkualitas	%	100	100	75.197.888.393	100,00	83.720.631.882	100,00	87.430.126.555	100,00	88.111.508.016	100,00	89.718.745.771	DINAS PERHUBU NGAN
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan	%	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS PERHUBU NGAN

U BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						71.289.704.909		78.986.941.630		82.337.137.333		82.952.520.679		84.404.082.548	
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						5.499.851.716		6.081.711.966		6.334.964.630		6.381.483.546		6.491.212.035	
	Meningkatnya peran komunitas teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebarluasan informasi	Persentase peningkatan jumlah anggota komunitas teknologi informasi dan komunikasi	%	10	40	893.393.000	60	1.297.832.900	80	1.445.027.732	90	1.466.787.289	100	1.531.580.666	DINAS KOMUNIKA SI, INFORMAT IKA, STATISTIK DAN PERSANDI AN
	Meningkatnya penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap saluran informasi dan komunikasi publik	%	87,48	88,01	4.606.458.716	89,5	4.783.879.066	89,75	4.889.936.898	90,01	4.914.696.257	90,25	4.959.631.369	DINAS KOMUNIKA SI, INFORMAT IKA, STATISTIK DAN PERSANDI AN
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						45.225.064.681		50.009.678.665		52.092.165.380		52.474.688.598		53.376.981.650	
	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Persentase cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	100	100	40.209.129.521	100	43.493.743.505	100	45.276.230.220	100	45.458.753.438	100	45.961.046.490	DINAS KOMUNIKA SI, INFORMAT IKA, STATISTIK DAN PERSANDI AN
	Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan e-government	Persentase aplikasi yang memenuhi standar Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE)	%	100	100	5.015.935.160	100	6.515.935.160	100	6.815.935.160	100	7.015.935.160	100	7.415.935.160	DINAS KOMUNIKA SI, INFORMAT IKA, STATISTIK DAN PERSANDI AN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						20.564.788.512		22.895.550.999		23.910.007.323		24.096.348.535		24.535.888.863	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkualitas	%	100	100	20.564.788.512	100	22.895.550.999	100	23.910.007.323	100	24.096.348.535	100	24.535.888.863	DINAS KOMUNIKA SI, INFORMAT IKA, STATISTIK DAN PERSANDI AN
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	%	100	100		100		100		100		100		DINAS KOMUNIKA SI, INFORMAT IKA, STATISTIK DAN PERSANDI AN

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						26.648.801.775		29.564.166.794		30.833.069.351		31.066.148.721		31.615.934.683	
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						506.488.503		560.072.771		583.395.138		587.679.126		597.784.165	
	Meningkatnya ekosistem perkoperasian yang kondusif melalui kepatuhan regulasi	Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian	%	50	55	506.488.503	61	560.072.771	62	583.395.138	63	587.679.126	64	597.784.165	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						396.015.519		437.912.228		456.147.626		459.497.210		467.398.184	
	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi sehat	%	44	44,1	396.015.519	44,2	437.912.228	44,3	456.147.626	44,4	459.497.210	44,5	467.398.184	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						604.287.223		668.218.167		696.043.890		701.155.080		713.211.318	
	Meningkatnya koperasi dengan sumber daya manusia yang kompeten	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	41,3	41,35	604.287.223	41,4	668.218.167	41,45	696.043.890	41,5	701.155.080	41,55	713.211.318	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						2.101.350.498		2.323.664.187		2.420.425.453		2.438.199.122		2.480.123.528	
	Meningkatnya pemberdayaan koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	%	59,72	59,74	2.101.350.498	59,75	2.323.664.187	59,76	2.420.425.453	59,77	2.438.199.122	59,78	2.480.123.528	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						6.484.300.570		7.170.311.202		7.468.894.960		7.523.740.554		7.653.109.951	
	Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (<i>Feasible</i>)	%	63	67	6.484.300.570	69	7.170.311.202	71	7.468.894.960	73	7.523.740.554	75	7.653.109.951	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						3.822.403.681		4.226.797.268		4.402.808.180		4.435.138.884		4.511.400.318	
	Meningkatnya daya saing usaha mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	%	53,28	20	3.822.403.681	26	4.226.797.268	27	4.402.808.180	28	4.435.138.884	30	4.511.400.318	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12.733.955.781		14.177.190.971		14.805.354.104		14.920.738.745		15.192.907.219	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang berkualitas	%	100	100	12.733.955.781	100	14.177.190.971	100	14.805.354.104	100	14.920.738.745	100	15.192.907.219	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	%	89,5	90		90,5		90,75		91		91,25		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						19.644.829.946		21.828.422.875		22.778.824.158		22.953.399.368		23.365.186.137	
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						945.046.164		1.045.027.913		1.088.544.625		1.096.538.026		1.115.392.805	
	Meningkatnya ekosistem penanaman modal yang berkelanjutan	Persentase Peningkatan Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	%	1	2,5	945.046.164	3	1.045.027.913	3,5	1.088.544.625	4	1.096.538.026	4	1.115.392.805	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															N TERPADU SATU PINTU
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						1.406.764.362		1.555.593.877		1.620.371.409		1.632.270.122		1.660.336.720	
	Meningkatnya eksposur potensi daerah kepada calon investor	Persentase Kepeminatan Pelaku Usaha Untuk Berinvestasi di Kota Semarang Terhadap Target yang Ditetapkan	%	50	70	1.406.764.362	75	1.555.593.877	80	1.620.371.409	85	1.632.270.122	90	1.660.336.720	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						3.063.508.947		3.387.614.791		3.528.680.740		3.554.592.550		3.615.713.145	
	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	96,91	100	1.039.815.546	100	1.148.717.819	100	1.159.553.691	100	1.167.810.713	100	1.181.704.374	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan pada Bidang Perekonomian	Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Perekonomian yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	100	905.913.177	100	963.459.763	100	1.009.829.739	100	1.011.301.083	100	1.020.206.385	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan pada perizinan dasar dan Bidang Pembangunan	Persentase Pelaku Usaha Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	100	824.336.857	100	945.108.147	100	1.002.151.361	100	1.012.160.321	100	1.026.247.662	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
	Meningkatnya kemudahan pelayanan pengaduan penanaman modal, perizinan dan non perizinan	Persentase pengaduan penanaman modal dan perizinan yang ditindaklanjuti	%	94	95	293.443.367	95	330.329.062	95	357.145.949	95	363.320.433	95	387.554.724	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						138.593.380		153.255.953		159.637.788		160.810.040		163.575.140	
	Meningkatnya kepatuhan perizinan dan penanaman modal yang tertib dan akuntabel	Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	%	103,29	100	138.593.380	100	153.255.953	100	159.637.788	100	160.810.040	100	163.575.140	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															SATU PINTU
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						134.792.750		149.053.233		155.260.059		156.400.165		159.089.438	
	Meningkatnya sistem informasi penanaman modal yang terpadu dan terintegrasi	Persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	97	100	134.792.750	100	149.053.233	100	155.260.059	100	156.400.165	100	159.089.438	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.956.124.343		15.537.877.108		16.226.329.537		16.352.788.465		16.651.078.889	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkualitas	%	100	100	13.956.124.343	100	15.537.877.108	100	16.226.329.537	100	16.352.788.465	100	16.651.078.889	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	100		100		100		100		100		DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						58.883.300.190		65.222.393.341		67.981.461.745		68.488.263.405		69.683.703.565	
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						2.963.173.892		3.276.664.726		3.413.110.529		3.438.173.684		3.497.292.476	
	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan	Persentase pemuda yang terlibat dalam Kegiatan kepemudaan	%	0,77	1,29	1.300.000.000	1,29	1.744.655.600	1,29	1.811.655.600	1,29	1.827.164.558	1,29	1.886.283.350	DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAH RAGA
	Meningkatnya pemberdayaan pemuda yang berdaya saing dalam ekonomi mandiri	Persentase pemenuhan fasilitas pengembangan potensi pemuda	%	100	100	1.663.173.892	100	1.532.009.126	100	1.601.454.929	100	1.611.009.126	100	1.611.009.126	DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAH RAGA
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN						38.890.830.394		43.005.310.103		44.796.123.189		45.125.070.106		45.900.987.759	
	Meningkatnya kejuaraan olahraga	Persentase atlet yang mengikuti kejuaraan daerah, nasional, dan internasional	%	28,35	94,67	9.697.329.614	29,59	12.838.190.677	37,84	14.400.000.000	29,59	14.431.569.326	94,67	15.150.000.000	DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAH RAGA
	Meningkatnya ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan	Persentase atlet usia dini yang berprestasi di tingkat daerah	%	36,9	36,9	29.193.500.780	36,9	30.167.119.426	36,9	30.396.123.189	36,9	30.693.500.780	36,9	30.750.987.759	DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAH RAGA
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						2.510.749.638		2.776.375.965		2.891.988.907		2.913.225.361		2.963.317.760	

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya peran pramuka dalam pembinaan karakter pemuda	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepramukaan	%	7,1	7,1	2.510.749.638	7,1	2.776.375.965	7,1	2.891.988.907	7,1	2.913.225.361	7,1	2.963.317.760	DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14.518.546.266		16.164.042.547		16.880.239.120		17.011.794.254		17.322.105.570	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yang berkualitas	%	100	100	14.518.546.266	100	16.164.042.547	100	16.880.239.120	100	17.011.794.254	100	17.322.105.570	DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAH RAGA
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	%	100	100		100		100		100		100		DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAH RAGA
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						839.803.332		928.650.851		967.321.426		974.424.662		991.179.722	
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						839.803.332		928.650.851		967.321.426		974.424.662		991.179.722	
	Meningkatnya kualitas cakupan statistik sektoral yang terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Memenuhi Kaidah Statistik	%	100	100	839.803.332	100	928.650.851	100	967.321.426	100	974.424.662	100	991.179.722	DINAS KOMUNIKA SI, INFORMAT IKA, STATISTIK DAN PERSANDI AN
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						1.052.918.031		1.164.312.152		1.212.796.059		1.221.701.864		1.242.708.813	
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						1.052.918.031		1.164.312.152		1.212.796.059		1.221.701.864		1.242.708.813	
	Meningkatnya perlindungan data dan informasi sesuai dengan standar manajemen keamanan informasi	Persentase Keamanan Informasi Sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi	%	100	100	1.052.918.031	100	1.164.312.152	100	1.212.796.059	100	1.221.701.864	100	1.242.708.813	DINAS KOMUNIKA SI, INFORMAT IKA, STATISTIK DAN PERSANDI AN
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						25.592.524.187		28.426.647.722		29.660.190.204		29.886.774.431		30.421.239.694	
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						3.324.269.718		3.675.962.910		3.829.036.158		3.857.153.539		3.923.476.616	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	57,92	63,74	3.324.269.718	66,29	3.675.962.910	68,83	3.829.036.158	72,7	3.857.153.539	76,58	3.923.476.616	DINAS KEBUDAY AAN DAN PARIWISAT A
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						4.745.940.199		5.248.039.908		5.466.577.073		5.506.719.245		5.601.406.315	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	26,88	29,3	4.745.940.199	31,03	5.248.039.908	32,1	5.466.577.073	33,13	5.506.719.245	34,12	5.601.406.315	DINAS KEBUDAY AAN DAN PARIWISAT A
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						743.222.065		821.851.708		856.074.988		862.361.319		877.189.470	
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan	%	75,07	84,24	743.222.065	87,39	821.851.708	90,54	856.074.988	93,69	862.361.319	96,84	877.189.470	DINAS KEBUDAY AAN DAN

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab					
					2026		2027		2028		2029		2030							
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)					
															PARIWISAT A					
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya Benda yang Ditetapkan	%	42,55	43,12		43,4		43,69		43,98		44,26		DINAS KEBUDAY AAN DAN PARIWISAT A					
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	%	85,58	86,78		87,38		87,98		88,58		89,18		DINAS KEBUDAY AAN DAN PARIWISAT A					
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	3,3	4,5		5,1		5,7		6,3		6,9		DINAS KEBUDAY AAN DAN PARIWISAT A					
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						16.779.092.205			18.680.793.196			19.508.501.985			19.660.540.328			20.019.167.293		
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkualitas	%	100	100	16.779.092.205		100	18.680.793.196		100	19.508.501.985		100	19.660.540.328		100	20.019.167.293		DINAS KEBUDAY AAN DAN PARIWISAT A
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	%	94,25	94,98		95,33		95,9		96,73		97,56						DINAS KEBUDAY AAN DAN PARIWISAT A	
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						15.622.241.936			17.381.974.953			18.147.892.672			18.288.580.873			18.620.435.205		
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						1.238.492.897			1.369.520.027			1.426.549.133			1.437.024.569			1.461.733.954		
	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	Angka	84	84,83	733.672.540		85,67	807.039.794		86,5	841.569.692		87,33	869.989.829		88,05	899.494.348		DINAS ARSIP DAN PERPUSTA KAAN DAERAH
	Meningkatnya layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat	Rasio koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang	Rasio	0,07	0,07	504.820.357		0,07	562.480.233		0,07	584.979.441		0,07	567.034.740		0,07	562.239.606		DINAS ARSIP DAN PERPUSTA KAAN DAERAH
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						200.586.801			221.808.008			231.044.464			232.741.070			236.743.012		
	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	%	100	100	200.586.801		100	221.808.008		100	231.044.464		100	232.741.070		100	236.743.012		DINAS ARSIP DAN PERPUSTA KAAN DAERAH
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14.183.162.238			15.790.646.918			16.490.299.075			16.618.815.234			16.921.958.239		
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang berkualitas	%	100	100	14.183.162.238		100	15.790.646.918		100	16.490.299.075		100	16.618.815.234		100	16.921.958.239		DINAS ARSIP DAN PERPUSTA KAAN DAERAH
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		DINAS ARSIP DAN PERPUSTA	

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															KAAN DAERAH
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						1.440.507.407		1.592.906.789		1.659.238.093		1.671.422.210		1.700.162.023	
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						643.738.049		711.842.719		741.485.041		746.929.914		759.773.243	
	Meningkatnya ketersediaan arsip	Tingkat ketersediaan arsip	%	80,76	84	397.888.940	85	438.950.209	86	457.676.830	87	462.253.599	88	466.876.135	DINAS ARSIP DAN PERPUSTA KAAN DAERAH
	Meningkatnya kesesuaian pengelolaan arsip	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Arsip	%	79	80	245.849.109	81	272.892.510	82	283.808.211	83	284.676.315	84	292.897.108	DINAS ARSIP DAN PERPUSTA KAAN DAERAH
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						701.114.808		775.289.687		807.574.047		813.504.225		827.492.288	
	Meningkatnya cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	%	64,3	64,5	341.960.548	64,6	379.576.209	64,7	394.759.257	64,8	398.706.850	64,9	405.543.799	DINAS ARSIP DAN PERPUSTA KAAN DAERAH
	Meningkatnya penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang digabung/dibubarkan/Pemekaran yang telah di autentikasi	Persentase kegiatan penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang digabung/dibubarkan/Pemekaran yang telah di autentikasi	%	60	70	359.154.260	80	395.713.478	90	412.814.790	100	414.797.375	100	421.948.489	DINAS ARSIP DAN PERPUSTA KAAN DAERAH
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP						95.654.550		105.774.383		110.179.005		110.988.071		112.896.492	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	82,46	84	95.654.550	85	105.774.383	86	110.179.005	87	110.988.071	88	112.896.492	DINAS ARSIP DAN PERPUSTA KAAN DAERAH
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						161.416.585.241		179.088.891.738		186.780.702.116		188.193.578.386		191.526.260.907	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						14.423.203.139		16.006.454.937		16.695.559.815		16.822.138.588		17.120.711.702	
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						1.650.263.513		1.824.854.173		1.900.844.155		1.914.802.435		1.947.727.126	
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	3.115,99	3.201,00	1.650.263.513	3.233,00	1.824.854.173	3.265,00	1.900.844.155	3.297,00	1.914.802.435	3.329,00	1.947.727.126	DINAS PERIKANA N
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						3.313.626.110		3.664.193.255		3.816.776.395		3.844.803.749		3.910.914.474	
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton/ta hun	3.961,42	4.120,00	3.313.626.110	4.161,00	3.664.193.255	4.202,00	3.816.776.395	4.244,00	3.844.803.749	4.286,00	3.910.914.474	DINAS PERIKANA N
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						170.681.113		188.738.428		196.597.812		198.041.469		201.446.757	
	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan kawasan konservasi	hektar	0,5	0,5	170.681.113	0,5	188.738.428	0,5	196.597.812	0,5	198.041.469	0,5	201.446.757	DINAS PERIKANA N
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						1.685.785.284		1.864.133.992		1.941.759.651		1.956.018.381		1.989.651.774	
	Meningkatnya preferensi masyarakat akan konsumsi pangan bergizi berbasis ikan	Konsumsi Ikan Masyarakat	kg/ka pita/t ahun	N/A	16	1.685.785.284	16,5	1.864.133.992	17	1.941.759.651	17,5	1.956.018.381	18	1.989.651.774	DINAS PERIKANA N
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.602.847.119		8.464.535.089		8.839.581.802		8.908.472.554		9.070.971.571	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perikanan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perikanan yang berkualitas	%	100	100	7.602.847.119	100	8.464.535.089	100	8.839.581.802	100	8.908.472.554	100	9.070.971.571	DINAS PERIKANA N

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perikanan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perikanan	%	100	100		100		100		100		100		DINAS PERIKANAN
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						16.363.797.060		18.095.015.197		18.848.521.913		18.986.930.390		19.313.407.324	
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						11.931.769.582		13.194.098.603		13.743.522.950		13.844.444.395		14.082.497.185	
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	13,13	8,5	11.931.769.582	8,5	13.194.098.603	8,5	13.743.522.950	8,5	13.844.444.395	8,5	14.082.497.185	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						3.528.157.608		3.901.421.247		4.063.882.957		4.093.724.865		4.164.115.745	
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	8,5	8,5	3.528.157.608	8,5	3.901.421.247	8,5	4.063.882.957	8,5	4.093.724.865	8,5	4.164.115.745	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						903.869.870		999.495.347		1.041.116.006		1.048.761.130		1.066.794.394	
	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	25	35	903.869.870	40	999.495.347	45	1.041.116.006	50	1.048.761.130	55	1.066.794.394	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						39.357.181.513		43.691.365.427		45.577.804.008		45.924.315.972		46.741.665.930	
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						10.534.774.064		11.649.307.070		12.134.403.712		12.223.509.074		12.433.690.163	
	Meningkatnya produksi tanaman pangan	Jumlah produksi tanaman pangan	ton	22.788,80	27.536,00	1.526.288.074	27.604,84	1.687.762.675	27.673,85	1.758.043.938	27.743,04	1.770.953.607	27.812,39	1.801.404.843	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya produksi hortikultura dan perkebunan	Jumlah produksi hortikultura dan perkebunan	ton	27.730,38	26.226,30	5.799.893.524	26.486,04	6.413.496.884	26.748,37	6.680.565.628	27.013,33	6.729.622.361	27.280,93	6.845.337.035	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah produksi ternak ruminansia dan non ruminansia berupa daging	ton	32.173,89	32.495,63	1.512.257.863	32.820,59	1.672.248.129	33.148,79	1.741.883.339	33.480,28	1.754.674.337	33.815,08	1.784.845.654	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah produksi ternak non ruminansia berupa telur	ton	7.976,85	8.016,73		8.056,82		8.097,10		8.137,59		8.178,28		DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah produksi ternak ruminansia berupa susu	Liter	1.440,62	1.587,98		1.667,38		1.750,75		1.838,29		1.930,20		DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian	Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian	%	77,7	78	1.696.334.603	79	1.875.799.382	80	1.953.910.807	81	1.968.258.769	82	2.002.102.631	DINAS PERTANIAN
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						3.910.388.297		4.324.090.271		4.504.152.626		4.537.227.522		4.615.244.353	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dasar pertanian	%	20,26	22,7	3.910.388.297	24,52	4.324.090.271	26,48	4.504.152.626	28,6	4.537.227.522	31,88	4.615.244.353	DINAS PERTANIAN
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						1.089.413.139		1.204.668.283		1.254.832.686		1.264.047.175		1.285.782.244	
	Meningkatnya ketahanan wilayah terhadap penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-53,92	-5	1.089.413.139	-5	1.204.668.283	-5	1.254.832.686	-5	1.264.047.175	-5	1.285.782.244	DINAS PERTANIAN
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						204.525.666		226.163.586		235.581.417		237.311.337		241.391.866	

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya perlindungan lahan dan produksi pertanian dari bencana pertanian pada tanaman pangan	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada tanaman pangan	%	100	100	143.167.966	100	158.314.511	100	164.906.992	100	166.117.936	100	168.974.306	DINAS PERTANIA N
	Meningkatnya perlindungan lahan dan produksi pertanian dari bencana pertanian pada hortikultura dan perkebunan	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada hortikultura dan perkebunan	%	100	100	61.357.700	100	67.849.075	100	70.674.425	100	71.193.401	100	72.417.560	DINAS PERTANIA N
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						1.028.810.079		1.137.653.685		1.185.027.488		1.193.729.383		1.214.255.350	
	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian yang kompeten, adaptif dan berdaya saing	Persentase peningkatan kapasitas SDM Pertanian	%	1	2	1.028.810.079	2	1.137.653.685	2	1.185.027.488	2	1.193.729.383	2	1.214.255.350	DINAS PERTANIA N
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						22.589.270.268		25.149.482.532		26.263.806.079		26.468.491.481		26.951.301.954	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pertanian	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pertanian yang berkualitas	%	100	100	22.589.270.268	100	25.149.482.532	100	26.263.806.079	100	26.468.491.481	100	26.951.301.954	DINAS PERTANIA N
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pertanian	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pertanian	%	100	100	22.589.270.268	100	25.149.482.532	100	26.263.806.079	100	26.468.491.481	100	26.951.301.954	DINAS PERTANIA N
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						73.345.710.583		81.396.118.088		84.900.030.157		85.543.649.014		87.061.812.609	
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						117.123.448		129.514.596		134.907.801		135.898.456		138.235.206	
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	100	100	117.123.448	100	129.514.596	100	134.907.801	100	135.898.456	100	138.235.206	DINAS PERDAGA NGAN
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						28.388.573.603		31.391.960.491		32.699.174.263		32.939.290.857		33.505.676.178	
	Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan	%	10	10	21.388.573.603	10	23.891.960.491	10	24.199.174.263	10	24.439.290.857	10	25.005.676.178	DINAS PERDAGA NGAN
	Meningkatnya pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Persentase pengelola sarana distribusi yang dibina	%	100	100	5.500.000.000	100	6.000.000.000	100	6.500.000.000	100	6.500.000.000	100	6.500.000.000	DINAS PERDAGA NGAN
	Meningkatnya pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang diberdayakan	%	100	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	DINAS PERDAGA NGAN
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						3.769.436.933		4.168.226.869		4.341.798.812		4.373.681.512		4.448.886.197	
	Meningkatnya iklim perdagangan yang stabil dan adil	Koefisien harga antar waktu	koefisi en	9,55	10±1	3.769.436.933	10±1	4.168.226.869	10±1	4.341.798.812	10±1	4.373.681.512	10±1	4.448.886.197	DINAS PERDAGA NGAN
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						499.916.947		552.805.973		575.825.739		580.054.143		590.028.072	
	Meningkatnya akses produk lokal ke pasar internasional	Nilai ekspor non migas	US\$	1.443.742. 642,19	1.561.55 2.042,00	499.916.947	1.624.01 4.123,00	552.805.973	1.688.97 4.688,00	575.825.739	1.756.53 3.676,00	580.054.143	1.826.79 5.023,00	590.028.072	DINAS PERDAGA NGAN
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						1.143.381.928		1.264.346.733		1.316.996.247		1.326.667.215		1.349.479.024	
	Meningkatnya hak dan keamanan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	84,97	92,12	1.143.381.928	93,24	1.264.346.733	94,36	1.316.996.247	95,49	1.326.667.215	96,61	1.349.479.024	DINAS PERDAGA NGAN
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						875.754.294		968.405.267		1.008.731.283		1.016.138.599		1.033.610.924	

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya konsumsi dan apresiasi terhadap produk lokal	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi di dalam negeri	%	80	100	875.754.294	100	968.405.267	100	1.008.731.283	100	1.016.138.599	100	1.033.610.924	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						38.551.523.430		42.920.858.159		44.822.596.012		45.171.918.232		45.995.897.008	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perdagangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perdagangan yang berkualitas	%	100	100	38.551.523.430	100	42.920.858.159	100	44.822.596.012	100	45.171.918.232	100	45.995.897.008	DINAS PERDAGANGAN
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perdagangan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perdagangan	%	100	90		90,5		90,75		91		91,25		DINAS PERDAGANGAN
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						17.926.692.946		19.899.938.089		20.758.786.223		20.916.544.422		21.288.663.342	
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						4.944.436.249		6.064.636.498		6.097.184.401		6.018.682.682		5.874.741.626	
	Meningkatnya sentra IKM sebagai pusat produksi dalam mendukung perekonomian lokal	Persentase pertambahan jumlah sentra IKM	%	80	87	2.526.936.249	90	3.497.558.909	93	3.415.540.651	97	3.220.594.244	100	2.979.599.452	DINAS PERINDUSTRIAN
	Meningkatnya pelaku IKM yang berkontribusi pada peningkatan perekonomian lokal	Persentase pertambahan IKM	%	0,35	0,65	2.417.500.000	0,78	2.567.077.589	0,9	2.681.643.750	1,02	2.798.088.438	1,13	2.895.142.174	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						523.000.000		553.750.000		585.737.500		619.024.375		653.822.750	
	Meningkatnya sistem kendali izin usaha industri yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi	Persentase jumlah penerbitan izin usaha dalam SIINas	%	6,72	6,73	523.000.000	6,74	553.750.000	6,75	585.737.500	6,76	619.024.375	6,77	653.822.750	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						546.252.267		631.740.813		656.663.529		661.068.013		659.468.588	
	Meningkatnya efisiensi integrasi sistem pengelolaan industri nasional untuk mendukung daya saing dan pertumbuhan sektor industri lokal	Persentase IKM yang terdaftar di SIINas	%	2,31	2,32	546.252.267	2,33	631.740.813	2,34	656.663.529	2,35	661.068.013	2,36	659.468.588	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						11.913.004.430		12.649.810.778		13.419.200.793		13.617.769.352		14.100.630.378	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perindustrian	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perindustrian yang berkualitas	%	100	100	11.913.004.430	100	12.649.810.778	100	13.419.200.793	100	13.617.769.352	100	14.100.630.378	DINAS PERINDUSTRIAN
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perindustrian	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perindustrian	%	89	90		90,5		90,75		91		91,25		DINAS PERINDUSTRIAN
4 UNSUR PENDUKUNG						390.190.362.997		432.362.795.068		450.718.200.495		454.089.827.652		462.042.797.859	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH						253.970.452.131		281.168.043.479		293.005.701.193		295.180.110.710		300.309.092.442	
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						72.989.727.596		80.711.721.447		84.072.692.605		84.690.055.249		86.146.285.873	
	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah	Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik	%	100	100	4.480.785.439	100	4.954.832.935	100	5.161.160.471	100	5.199.059.907	100	5.288.456.829	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang dihasilkan	%	100	100	6.008.825.712	100	6.644.533.184	100	6.921.222.666	100	6.972.046.592	100	7.091.929.709	BAGIAN HUKUM
	Meningkatnya layanan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	100	100	54.189.060.965	100	59.922.026.539	100	62.417.280.008	100	62.875.622.614	100	63.956.757.900	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

U BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya kolaborasi lintas sektor, harmonisasi kebijakan, dan penguatan peran pemerintah daerah pada kerangka otonomi	Tingkat efektivitas kerjasama daerah dan kebijakan otonomi daerah	%	60	85	8.311.055.480	90	9.190.328.789	95	9.573.029.460	100	9.643.326.136	100	9.809.141.435	BAGIAN KERJASA MA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN		PEMBANGUNAN				10.300.135.665		11.389.844.955		11.864.137.160		11.951.257.900		12.156.757.680	
	Meningkatnya ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah	Persentase ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah	%	80	82	988.461.133	83	1.093.035.996	84	1.138.551.844	85	1.146.912.459	86	1.166.633.417	BAGIAN ADMINIST RASI PEMBANG UNAN
	Meningkatnya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa	Nilai pemanfaatan sistem pengadaan	angka	24,79	24,89	3.504.135.305	24,94	3.874.857.489	24,99	4.036.213.040	25,04	4.065.851.762	25,09	4.135.763.369	BAGIAN PENGADA AN BARANG/J ASA
	Meningkatnya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa	Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	angka	24,71	24,81		24,86		24,91		24,96		25,01		BAGIAN PENGADA AN BARANG/J ASA
	Meningkatnya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa	Nilai tingkat kematangan UKPBJ	angka	40	40		40		40		40		40		BAGIAN PENGADA AN BARANG/J ASA
	Meningkatnya kualitas kebijakan BUMD yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada good governance	Persentase capaian target dividen BUMD	%	95,29	98,5	1.147.138.141	99	1.346.942.222	100	1.433.082.490	100	1.446.456.291	100	1.484.078.696	BAGIAN PEREKON OMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	Meningkatnya kualitas kebijakan BUMD yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada good governance	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan BUMD	Angka	86,38	87,18		87,6		88		88,4		88,8		BAGIAN PEREKON OMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	Meningkatnya partisipasi perusahaan yang terlibat dalam Forum CSR serta kegiatan pengendalian perekonomian	Persentase fasilitasi dan koordinasi kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program CSR, serta kegiatan pengendalian perekonomian	%	100	100	1.062.472.133	100	1.262.276.214	100	1.348.416.483	100	1.361.790.284	100	1.398.412.689	BAGIAN PEREKON OMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang	Persentase pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang	%	100	100	3.597.928.953	100	3.812.733.034	100	3.907.873.303	100	3.930.247.104	100	3.971.869.509	BAGIAN PEREKON OMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						170.680.588.870		189.066.477.077		197.068.871.428		198.538.797.561		202.006.048.889	
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Sekretariat Daerah	Persentase perencanaan kinerja Sekretariat Daerah yang berkualitas	%	100	100	116.930.481	100	129.301.215	100	134.685.534	100	135.674.557	100	138.007.457	BAGIAN ADMINIST RASI

U BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															PEMBANG UNAN
	Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah	Indeks kematangan organisasi	Angka	42,25	42,27	3.385.355.195	42,28	3.743.510.964	42,29	3.899.397.025	42,3	3.928.031.080	42,31	3.995.572.884	BAGIAN ORGANISA SI
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah	%	100	100	34.836.605.594	100	39.640.587.872	100	41.186.169.057	100	40.651.703.033	100	40.705.291.162	BAGIAN TATA USAHA
	Meningkatnya kualitas layanan rumah tangga Sekretariat Daerah	Persentase kinerja Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah	%	100	100	59.698.241.864	100	67.930.654.037	100	70.579.261.094	100	69.663.365.830	100	69.755.197.887	BAGIAN RUMAH TANGGA
	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase laporan kinerja daerah yang berkualitas	%	100	100	775.069.093	100	857.068.012	100	892.757.759	100	899.313.458	100	914.776.995	BAGIAN KERJASA MA DAN OTONOMI DAERAH
	Meningkatnya kinerja keprotokolan, peliputan dan publikasi secara efektif	Nilai kepuasan pimpinan daerah terhadap layanan keprotokolan, peliputan, dan publikasi	Status	87	89	23.582.168.612	90	26.077.058.879	91	27.162.951.253	92	27.362.414.252	93	27.832.906.158	BAGIAN KOMUNIKA SI PIMPINAN DAN PROTOKOL
	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan Sekretariat Daerah	Persentase pelaporan keuangan Sekretariat Daerah yang berkualitas	%	100	100	48.286.218.031	100	50.688.296.098	100	53.213.649.706	100	55.898.295.351	100	58.664.296.346	BAGIAN KEUANGA N
4.02 SEKRETARIAT DPRD						136.219.910.866		151.194.751.589		157.712.499.302		158.909.716.942		161.733.705.417	
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						61.521.335.455		68.030.023.593		70.862.907.628		71.383.268.171		72.610.690.929	
	Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan kehumasan dalam mendukung kinerja DPRD	Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keprotokolan dan kehumasan	%	95	95,3	7.154.199.747	95,75	7.911.082.781	96,25	8.240.513.508	96,5	8.301.025.251	96,75	8.443.759.922	SEKRETAR IAT DPRD
	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan perundang-undangan dalam mendukung kinerja DPRD	Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan persidangan dan perundang-undangan	%	95	95,3	45.564.871.608	95,75	50.385.435.680	96,25	52.483.569.545	96,5	52.868.966.922	96,75	53.778.039.522	SEKRETAR IAT DPRD
	Meningkatnya kualitas layanan penyerapan aspirasi masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	%	80	81	8.802.264.100	82,25	9.733.505.132	83,25	10.138.824.575	84	10.213.275.998	85	10.388.891.485	SEKRETAR IAT DPRD
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						74.698.575.411		83.164.727.996		86.849.591.674		87.526.448.771		89.123.014.488	
	Terwujudnya perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	%	91,41	95	57.989.087.169	95,5	64.561.427.505	95,5	67.422.015.940	95,5	67.947.465.389	95,5	69.186.891.818	SEKRETAR IAT DPRD
	Terwujudnya pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD yang berkualitas	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD	%	91,41	95	16.709.488.242	95,5	18.603.300.491	95,5	19.427.575.734	95,5	19.578.983.382	95,5	19.936.122.670	SEKRETAR IAT DPRD
5 UNSUR PENUNJANG						348.939.667.056		386.963.698.390		403.513.526.713		406.553.495.009		413.724.150.654	
5.01 PERENCANAAN						31.939.955.416		35.417.065.243		36.930.465.275		37.208.455.357		37.864.176.386	
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						4.544.958.993		5.025.795.781		5.235.078.319		5.273.520.549		5.364.197.803	
	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkualitas	Nilai Sinergi dan Kualitas Perencanaan	nilai	43,21	44,6	4.544.958.993	45,3	5.025.795.781	45,99	5.235.078.319	46,69	5.273.520.549	47,4	5.364.197.803	BADAN PERENCAN AAN PEMBANG

U BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															UNAN DAERAH
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						14.400.643.636		15.924.168.730		16.587.277.767		16.709.081.474		16.996.391.195	
	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	nilai	46,55	46,69	4.520.000.000	46,77	5.300.000.000	48,84	5.530.000.000	49,91	5.260.000.000	49,99	6.450.000.000	BADAN PERENCAN AAN PEMBANG UNAN DAERAH
	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Perekonomian & SDA	nilai	46,55	46,69	4.124.643.636	46,77	4.574.168.730	48,84	4.767.277.767	49,91	4.849.081.474	49,99	4.446.391.195	BADAN PERENCAN AAN PEMBANG UNAN DAERAH
	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Infrastruktur & Kewilayahan	nilai	46,55	46,69	5.756.000.000	46,77	6.050.000.000	48,84	6.290.000.000	49,91	6.600.000.000	49,99	6.100.000.000	BADAN PERENCAN AAN PEMBANG UNAN DAERAH
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12.994.352.787		14.467.100.732		15.108.109.189		15.225.853.334		15.503.587.388	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	%	100	100	12.994.352.787	100	14.467.100.732	100	15.108.109.189	100	15.225.853.334	100	15.503.587.388	BADAN PERENCAN AAN PEMBANG UNAN DAERAH
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	96,67	96,83		96,92		97		97,08		97,17		BADAN PERENCAN AAN PEMBANG UNAN DAERAH
5.02 KEUANGAN						275.077.445.079		305.019.557.857		318.051.759.049		320.445.589.225		326.092.138.859	
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						60.091.407.455		65.919.837.339		71.456.641.320		76.522.616.164		81.821.754.320	
	Meningkatnya kualitas dan ketepatan penyusunan APBD	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	%	100	100	3.231.586.697	100	3.754.497.524	100	4.092.684.032	100	4.134.248.183	100	4.322.705.222	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	Meningkatnya kualitas penyerapan anggaran	Persentase Realisasi Belanja	%	92,37	93,43	55.688.797.044	93,53	60.803.777.227	94,93	65.878.929.785	95,74	70.888.166.263	96,55	75.930.045.605	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Ketentuan	%	100	100	1.171.023.714	100	1.361.562.588	100	1.485.027.503	100	1.500.201.718	100	1.569.003.493	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															ASET DAERAH
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						3.581.394.446		3.960.290.310		4.125.203.427		4.155.495.623		4.226.948.640	
	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah yang efisien dan akuntabel	Persentase Tercapainya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	100	3.581.394.446	100	3.960.290.310	100	4.125.203.427	100	4.155.495.623	100	4.226.948.640	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						15.621.514.952		21.022.736.779		23.867.392.570		24.723.697.878		25.445.184.619	
	Meningkatnya pertumbuhan wajib pajak daerah	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	%	1	1,12	2.246.787.370	1,13	3.348.748.337	1,14	3.716.905.401	1,16	3.870.127.387	1,18	4.021.095.294	BADAN PENDAPAT AN DAERAH
	Meningkatnya pemenuhan pelayanan pajak daerah	Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah	%	94	96	7.264.040.403	97	8.733.726.674	98	9.650.381.572	99	10.058.546.799	100	10.281.069.969	BADAN PENDAPAT AN DAERAH
	Meningkatnya partisipasi Wajib Pajak daerah dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	%	67	69	3.989.811.040	70	5.113.515.661	70,5	5.789.155.177	71	5.867.807.875	72	5.970.000.000	BADAN PENDAPAT AN DAERAH
	Meningkatnya capaian hasil pengawasan serta pengembangan pajak dan retribusi daerah	Tingkat ketercapaian hasil pengawasan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah	%	80	82	2.120.876.139	83	3.826.746.107	84	4.710.950.420	85	4.927.215.817	86	5.173.019.356	BADAN PENDAPAT AN DAERAH
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						195.783.128.226		214.116.693.429		218.602.521.732		215.043.779.560		214.598.251.280	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	%	100	100	109.558.560.908	100	121.975.658.404	100	124.380.157.211	100	120.772.886.845	100	118.914.530.464	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	92	92,5		92,83		93,17		93,5		93,83		BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang berkualitas	%	100	100	86.224.567.318	100	92.141.035.025	100	94.222.364.521	100	94.270.892.715	100	95.683.720.816	BADAN PENDAPAT AN DAERAH
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah	%	89	90,25		90,5		90,75		91		91,25		BADAN PENDAPAT AN DAERAH
5.03 KEPEGAWAIAN						24.641.696.181		27.376.829.553		28.567.286.909		28.785.957.008		29.301.754.489	
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						7.650.021.280		8.459.360.063		8.811.621.973		8.876.327.480		9.028.954.372	
	Meningkatnya manajemen ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan jabatan	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	95	95,5	1.647.004.199	96	1.720.646.297	96,5	2.135.125.902	97	1.992.259.933	97,5	2.235.125.902	BADAN KEPEGAW AIAN, PENDIDIK

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															AN DAN PELATIHA N
	Meningkatnya kompetensi dan kesempatan ASN secara adil dan objektif	Persentase Pengembangan Karir ASN	%	95	95	4.005.259.997	96	4.773.956.682	96	4.678.738.987	97	4.386.310.463	98	4.796.071.386	BADAN KEPEGAW AIAN, PENDIDIK AN DAN PELATIHA N
	Meningkatnya kinerja ASN yang berkualitas	Persentase penilaian kinerja ASN yang bernilai baik	%	95	95	1.997.757.084	96	1.964.757.084	96	1.997.757.084	97	2.497.757.084	98	1.997.757.084	BADAN KEPEGAW AIAN, PENDIDIK AN DAN PELATIHA N
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						16.991.674.901		18.917.469.490		19.755.664.936		19.909.629.528		20.272.800.117	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang berkualitas	%	100	100	16.991.674.901	100	18.917.469.490	100	19.755.664.936	100	19.909.629.528	100	20.272.800.117	BADAN KEPEGAW AIAN, PENDIDIK AN DAN PELATIHA N
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	%	100	100		100		100		100		100		BADAN KEPEGAW AIAN, PENDIDIK AN DAN PELATIHA N
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						7.423.935.916		8.209.355.856		8.551.207.173		8.614.000.402		8.762.116.626	
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						7.423.935.916		8.209.355.856		8.551.207.173		8.614.000.402		8.762.116.626	
	Meningkatnya kapasitas ASN yang unggul, kompeten, dan adaptif	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial, dan Fungsional	%	35	55	7.423.935.916	60	8.209.355.856	65	8.551.207.173	70	8.614.000.402	75	8.762.116.626	BADAN KEPEGAW AIAN, PENDIDIK AN DAN PELATIHA N
	Meningkatnya kapasitas ASN yang unggul, kompeten, dan adaptif	Persentase ASN yang memiliki hasil diklat dengan kriteria berkualitas	%	95	95	7.423.935.916	96	8.209.355.856	96	8.551.207.173	97	8.614.000.402	98	8.762.116.626	BADAN KEPEGAW AIAN, PENDIDIK AN DAN PELATIHA N
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						9.856.634.464		10.940.889.881		11.412.808.307		11.499.493.017		11.703.964.294	
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						4.358.478.152		4.819.586.072		5.020.281.702		5.057.146.638		5.144.103.386	
	Meningkatnya penyelenggaraan riset daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	%	50	50	2.714.548.665	50	3.001.736.038	50	3.126.733.351	50	3.149.693.580	50	3.203.852.009	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Meningkatnya penyelenggaraan inovasi daerah	Persentase Hasil Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	%	100	100	1.643.929.487	100	1.817.850.034	100	1.893.548.351	100	1.907.453.058	100	1.940.251.377	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.498.156.312		6.121.303.809		6.392.526.605		6.442.346.379		6.559.860.908	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas	%	100	100	5.498.156.312	100	6.121.303.809	100	6.392.526.605	100	6.442.346.379	100	6.559.860.908	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	100	100		100		100		100		100		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
6 UNSUR PENGAWAS						30.109.282.184		33.453.199.431		34.908.627.866		35.175.969.389		35.806.572.675	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH						30.109.282.184		33.453.199.431		34.908.627.866		35.175.969.389		35.806.572.675	
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						4.147.241.509		4.586.001.516		4.776.970.295		4.812.048.546		4.894.790.875	
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	%	88	88,2	948.000.000	88,4	1.047.000.000	88,6	1.060.000.000	88,8	1.070.500.000	89	1.081.500.000	INSPEKTO RAT
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	%	88	88,2	288.000.000	88,4	317.000.000	88,6	323.000.000	88,8	325.500.000	89	329.500.000	INSPEKTO RAT
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	%	88	88,2	443.000.000	88,4	489.000.000	88,6	503.000.000	88,8	507.500.000	89	521.500.000	INSPEKTO RAT
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	%	88	88,2	288.000.000	88,4	317.000.000	88,6	323.000.000	88,8	325.500.000	89	329.500.000	INSPEKTO RAT
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu V	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu V	%	88	88,2	737.241.509	88,4	801.001.516	88,6	845.970.295	88,8	853.048.546	89	865.790.875	INSPEKTO RAT
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh BPK dan APIP lainnya yang ditindaklanjuti	%	88	88,2	1.443.000.000	88,4	1.615.000.000	88,6	1.722.000.000	88,8	1.730.000.000	89	1.767.000.000	INSPEKTO RAT
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						4.947.885.111		5.471.349.709		5.699.185.867		5.741.036.132		5.839.752.240	
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	%	100	100	332.000.000	100	367.000.000	100	382.000.000	100	385.000.000	100	389.000.000	INSPEKTO RAT
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	%	100	100	2.880.000.000	100	3.000.000.000	100	3.100.000.000	100	3.115.000.000	100	3.120.000.000	INSPEKTO RAT

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	%	100	100	570.000.000	100	630.000.000	100	650.000.000	100	655.000.000	100	660.000.000	INSPEKTO RAT
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	%	100	100	872.000.000	100	880.000.000	100	900.000.000	100	905.000.000	100	910.000.000	INSPEKTO RAT
	Meningkatnya kualitas program kerja pengawasan berbasis risiko	Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	%	100	100	293.885.111	100	594.349.709	100	667.185.867	100	681.036.132	100	760.752.240	INSPEKTO RAT
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						21.014.155.564		23.395.848.206		24.432.471.704		24.622.884.711		25.072.029.560	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Inspektorat	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat yang berkualitas	%	100	100	21.014.155.564	100	23.395.848.206	100	24.432.471.704	100	24.622.884.711	100	25.072.029.560	INSPEKTO RAT
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Inspektorat	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Inspektorat	%	100	100		100		100		100		100		INSPEKTO RAT
7 UNSUR KEWILAYAHAN						901.094.306.543		966.164.717.694		994.486.389.453		999.688.678.115		1.011.959.799.696	
7.01 KECAMATAN						901.094.306.543		966.164.717.694		994.475.375.478		999.688.678.118		1.011.959.799.697	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						43.421.002.269		48.597.185.765		51.129.389.889		50.928.054.456		51.964.175.283	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	%	100	100	3.605.282.380	100	3.986.705.483	100	4.152.718.572	100	4.183.212.817	100	4.255.142.426	KECAMAT AN SEMARAN G SELATAN
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	%	96,78	100	1.066.426.980	100	1.141.076.869	100	1.220.952.249	100	1.306.418.907	100	1.397.868.230	KECAMAT AN SEMARAN G UTARA
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	%	100	100	1.648.200.000	100	1.758.574.000	100	1.881.674.180	100	1.862.857.438	100	1.864.720.295	KECAMAT AN SEMARAN G BARAT
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	%	95,03	100	1.582.516.449	100	1.979.732.756	100	2.036.908.463	100	2.073.593.524	100	2.153.332.019	KECAMAT AN SEMARAN G TIMUR
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di	%	100	100	1.896.812.327	100	2.297.000.000	100	2.381.050.706	100	2.216.710.319	100	2.268.733.777	KECAMAT AN SEMARAN G TENGAH

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	responsif pada kebutuhan masyarakat	Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu													
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	%	100	100	4.575.415.720	100	5.059.474.686	100	5.270.159.680	100	5.308.859.519	100	5.400.144.426	KECAMAT AN GUNUNG PATI
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	%	100	100	2.221.472.602	100	2.456.494.684	100	2.558.787.234	100	2.577.576.922	100	2.621.897.905	KECAMAT AN TUGU
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	%	100	100	2.358.703.685	100	2.608.754.719	100	2.788.823.745	100	2.854.836.875	100	2.938.832.837	KECAMAT AN MIJEN
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	%	100	100	4.531.229.589	100	5.010.613.855	100	5.219.264.202	100	5.257.590.306	100	5.347.993.648	KECAMAT AN GENUK
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	%	100	100	1.891.960.000	100	2.450.750.000	100	2.751.422.105	100	2.372.130.000	100	2.514.320.500	KECAMAT AN GAJAHMU NGKUR
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	%	96,62	100	2.836.802.900	100	3.120.363.190	100	3.182.770.454	100	3.182.770.454	100	3.182.770.454	KECAMAT AN TEMBALA NG
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Candisari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masvarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	%	95,81	100	2.738.659.267	100	3.028.397.435	100	3.154.504.973	100	3.177.669.136	100	3.232.308.598	KECAMAT AN CANDISARI
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	%	100	100	3.687.389.146	100	4.077.498.785	100	4.247.292.659	100	4.278.481.381	100	4.352.049.116	KECAMAT AN BANYUMA NIK
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	%	100	100	3.982.011.267	100	4.403.290.637	100	4.586.651.029	100	4.620.331.727	100	4.699.777.520	KECAMAT AN NGALIYAN
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	%	100	100	825.000.000	100	825.000.000	100	1.120.000.000	100	1.045.000.000	100	1.045.000.000	KECAMAT AN GAYAMSA RI
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	%	100	100	3.973.119.957	100	4.393.458.666	100	4.576.409.638	100	4.610.015.131	100	4.689.283.532	KECAMAT AN PEDURUN GAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						538.771.716.458		564.509.020.386		574.092.227.288		573.555.345.801		574.970.527.100	

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	%	93	95	25.025.398.351	96	26.162.997.373	97	26.658.133.419	98	26.749.082.875	99	26.963.613.807	KECAMAT AN SEMARAN G SELATAN
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	%	99	100	35.082.690.000	100	37.769.532.578	100	38.272.606.655	100	37.376.149.865	100	36.821.176.012	KECAMAT AN SEMARAN G UTARA
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	%	99	100	48.155.792.358	100	52.035.624.746	100	52.860.828.692	100	52.204.554.412	100	51.938.440.849	KECAMAT AN SEMARAN G BARAT
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	%	99	100	29.402.106.927	100	29.913.909.000	100	30.124.929.000	100	30.131.900.000	100	30.050.909.000	KECAMAT AN SEMARAN G TIMUR
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	%	99	100	25.008.485.974	100	26.232.441.600	100	26.696.622.016	100	26.740.675.377	100	26.498.941.600	KECAMAT AN SEMARAN G TENGAH
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	%	89	91	28.530.503.054	92	29.917.960.102	93	30.521.845.990	94	30.632.771.247	95	30.894.420.956	KECAMAT AN GUNUNG PATI
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	%	89	91	10.139.355.275	92	10.646.915.634	93	10.867.829.527	94	10.908.408.270	95	11.004.125.122	KECAMAT AN TUGU
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	%	100	100	26.640.374.770	100	27.804.972.338	100	28.284.788.509	100	28.383.564.142	100	28.616.670.860	KECAMAT AN MIJEN
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	%	100	100	38.149.621.220	100	39.885.433.444	100	40.640.939.720	100	40.779.715.488	100	41.107.058.783	KECAMAT AN GENUK
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	%	100	100	17.506.740.000	100	17.586.969.490	100	17.626.740.000	100	17.506.740.000	100	17.506.740.000	KECAMAT AN GAJAHMU NGKUR
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	%	99	100	59.257.400.000	100	62.850.484.000	100	64.107.493.680	100	64.107.493.680	100	64.107.493.680	KECAMAT AN TEMBALA NG
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	%	100	100	22.784.933.574	100	23.784.483.611	100	24.219.534.313	100	24.299.446.945	100	24.487.944.295	KECAMAT AN CANDISARI
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	%	100	100	42.438.745.666	100	44.293.739.248	100	45.101.118.798	100	45.249.422.949	100	45.599.241.728	KECAMAT AN BANYUMA NIK
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	%	100	100	47.235.346.576	100	49.404.722.533	100	50.348.935.927	100	50.522.374.511	100	50.931.480.211	KECAMAT AN NGALIYAN
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	%	99	100	24.255.773.033	100	24.519.190.000	100	24.954.190.000	100	24.954.190.000	100	24.954.190.000	KECAMAT AN

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pembangunan Kecamatan Gayamsari														GAYAMSA RI
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	%	100	100	59.158.449.680	100	61.699.644.689	100	62.805.691.042	100	63.008.856.040	100	63.488.080.197	KECAMAT AN PEDURUN GAN
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.952.444.988		2.152.128.414		2.239.039.933		2.255.004.345		2.292.661.085	
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Selatan	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Selatan	%	100	100	107.929.996	100	119.348.518	100	124.318.390	100	125.231.285	100	127.384.615	KECAMAT AN SEMARAN G SELATAN
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Utara	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Utara	%	100	100	125.782.129	100	139.089.328	100	144.881.241	100	145.945.133	100	148.454.634	KECAMAT AN SEMARAN G UTARA
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Barat	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Barat	%	100	100	38.803.334	100	42.908.557	100	44.695.342	100	45.023.548	100	45.797.720	KECAMAT AN SEMARAN G BARAT
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Timur	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Timur	%	100	100	183.113.993	100	202.486.652	100	210.918.535	100	212.467.352	100	216.120.691	KECAMAT AN SEMARAN G TIMUR
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Tengah	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Tengah	%	100	100	33.744.475	100	37.314.493	100	38.868.331	100	39.153.749	100	39.826.991	KECAMAT AN SEMARAN G TENGAH
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Gunung Pati	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gunung Pati	%	100	100	111.607.197	100	123.414.750	100	128.553.947	100	129.497.944	100	131.724.639	KECAMAT AN GUNUNG PATI
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Tugu	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tugu	%	100	100	75.864.811	100	83.890.976	100	87.384.337	100	88.026.018	100	89.539.609	KECAMAT AN TUGU
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Mijen	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mijen	%	100	100	87.374.087	100	96.617.885	100	100.641.214	100	101.380.243	100	103.123.458	KECAMAT AN MIJEN
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Genuk	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Genuk	%	100	100	109.933.183	100	121.563.633	100	126.625.746	100	127.555.584	100	129.748.880	KECAMAT AN GENUK
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Gajahmungkur	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gajahmungkur	%	100	100	195.352.391	100	216.019.819	100	225.015.246	100	226.667.578	100	230.565.087	KECAMAT AN GAJAHMU NGKUR
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Tembalang	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tembalang	%	100	100	60.257.991	100	66.633.023	100	69.407.734	100	69.917.409	100	71.119.626	KECAMAT AN TEMBALA NG

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Candisari	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Candisari	%	22,22	100	53.529.182	100	59.192.336	100	61.657.203	100	62.109.965	100	63.177.935	KECAMAT AN CANDISARI
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Banyumanik	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Banyumanik	%	100	100	45.645.428	100	50.474.515	100	52.576.358	100	52.962.437	100	53.873.117	KECAMAT AN BANYUMA NIK
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Ngaliyan	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ngaliyan	%	100	100	176.839.961	100	195.548.855	100	203.691.836	100	205.187.586	100	208.715.751	KECAMAT AN NGALIYAN
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Gayamsari	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gayamsari	%	100	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	KECAMAT AN GAYAMSA RI
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Pedurungan	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pedurungan	%	100	100	481.666.830	100	532.625.074	100	554.804.473	100	558.878.514	100	568.488.332	KECAMAT AN PEDURUN GAN
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							1.504.523.645		1.656.737.046		1.747.774.910		1.734.701.907		1.763.240.187
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Selatan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Selatan	%	80	82	30.832.006	84	34.093.897	86	35.513.624	88	35.774.407	90	36.389.542	KECAMAT AN SEMARAN G SELATAN
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Utara	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Utara	%	80	82	157.172.927	84	173.801.135	86	181.038.506	88	182.367.908	90	185.503.692	KECAMAT AN SEMARAN G UTARA
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Barat	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Barat	%	80	82	80.341.176	84	88.840.921	86	92.540.406	88	93.219.949	90	94.822.849	KECAMAT AN SEMARAN G BARAT
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Timur	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Timur	%	80	82	99.923.366	84	110.494.821	86	115.096.011	88	115.941.184	90	117.934.772	KECAMAT AN SEMARAN G TIMUR
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Tengah	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Tengah	%	80	82	82.754.308	84	91.509.352	86	95.319.954	88	96.019.908	90	97.670.953	KECAMAT AN SEMARAN G TENGAH
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Gunung Pati	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gunung Pati	%	80	82	114.691.043	84	126.824.854	86	132.106.053	88	133.076.135	90	135.364.355	KECAMAT AN GUNUNG PATI
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Tugu	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tugu	%	80	82	88.077.097	84	97.395.269	86	101.450.971	88	102.195.946	90	103.953.187	KECAMAT AN TUGU
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan	%	80	82	92.395.587	84	102.170.636	86	106.425.192	88	107.206.693	90	109.050.094	KECAMAT AN MIJEN

U BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Mijen	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Mijen													
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Genuk	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Genuk	%	80	82	103.607.952	84	114.569.220	86	119.340.074	88	120.216.412	90	122.283.512	KECAMAT AN GENUK
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Gajahmungkur	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gajahmungkur	%	80	82	82.327.481	84	91.037.368	86	120.000.000	88	95.524.660	90	97.167.189	KECAMAT AN GAJAHMU NGKUR
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Tembalang	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tembalang	%	80	82	96.714.076	84	106.946.002	86	111.399.413	88	112.217.441	90	114.147.000	KECAMAT AN TEMBALA NG
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Candisari	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Candisari	%	80	82	74.468.834	84	82.347.311	86	85.776.391	88	86.406.264	90	87.892.005	KECAMAT AN CANDISARI
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Banyumanik	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Banyumanik	%	80	82	224.561.448	84	248.319.066	86	258.659.488	88	260.558.876	90	265.039.140	KECAMAT AN BANYUMA NIK
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Ngaliyan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Ngaliyan	%	80	82	81.448.718	84	90.065.636	86	93.816.120	88	94.505.031	90	96.130.028	KECAMAT AN NGALIYAN
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Gayamsari	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gayamsari	%	80	82	74.117.329	84	75.000.000	86	75.000.000	88	75.000.000	90	75.000.000	KECAMAT AN GAYAMSA RI
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Pedurungan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Pedurungan	%	80	82	21.090.297	84	23.321.558	86	24.292.707	88	24.471.093	90	24.891.869	KECAMAT AN PEDURUN GAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						315.444.619.183		349.249.646.083		365.277.957.433		371.215.571.609		380.969.196.042	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Selatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang berkualitas	%	100	100	15.741.243.179	100	17.525.316.917	100	18.301.828.851	100	18.444.463.059	100	18.780.907.617	KECAMAT AN SEMARAN G SELATAN
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Selatan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Selatan	%	96	96,67		97		97,33		97,67		98		KECAMAT AN SEMARAN G SELATAN
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Utara	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Utara	%	100	100	18.331.983.921	100	19.301.141.404	100	20.341.944.453	100	21.451.194.852	100	22.618.253.572	KECAMAT AN SEMARAN G UTARA

BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Semarang Utara yang berkualitas													
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Utara	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Utara	%	100	100		100		100		100		100		KECAMAT AN SEMARAN G UTARA
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Barat	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Barat yang berkualitas	%	100	100	25.588.249.776	100	26.841.879.537	100	28.175.936.987	100	29.270.265.399	100	30.523.410.286	KECAMAT AN SEMARAN G BARAT
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Barat	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Barat	%	96	96,67		97		97,33		97,67		98		KECAMAT AN SEMARAN G BARAT
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Timur	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang berkualitas	%	100	100	17.294.541.718	100	19.882.360.111	100	21.136.150.534	100	21.372.061.699	100	22.032.755.391	KECAMAT AN SEMARAN G TIMUR
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Timur	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Timur	%	100	100		100		100		100		100		KECAMAT AN SEMARAN G TIMUR
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Tengah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang berkualitas	%	100	100	24.517.449.783	100	27.025.271.987	100	28.275.464.581	100	28.726.096.490	100	29.695.021.972	KECAMAT AN SEMARAN G TENGAH
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Tengah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah	%	100	100		100		100		100		100		KECAMAT AN SEMARAN G TENGAH
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gunung Pati	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gunung Pati yang berkualitas	%	100	100	26.571.094.804	100	29.582.597.256	100	30.893.343.298	100	31.134.108.721	100	31.702.024.492	KECAMAT AN GUNUNG PATI
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gunung Pati	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gunung Pati	%	100	100		100		100		100		100		KECAMAT AN GUNUNG PATI
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tugu	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Tugu yang berkualitas	%	100	100	13.832.693.762	100	15.400.457.209	100	16.082.820.835	100	16.208.161.337	100	16.503.813.624	KECAMAT AN TUGU
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tugu	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tugu	%	100	100		100		100		100		100		KECAMAT AN TUGU
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Mijen	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Mijen yang berkualitas	%	100	100	25.905.907.150	100	28.917.364.269	100	30.183.926.305	100	30.372.998.524	100	30.890.580.619	KECAMAT AN MIJEN
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Mijen	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Mijen	%	96	96,33		97		97,33		97,67		98		KECAMAT AN MIJEN

U BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Genuk	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Genuk yang berkualitas	%	100	100	21.535.471.044	100	23.976.248.299	100	25.038.588.171	100	25.233.724.910	100	25.694.012.066	KECAMAT AN GENUK
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Genuk	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Genuk	%	100	100		100		100		100		100		KECAMAT AN GENUK
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gajahmungkur	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gajahmungkur yang berkualitas	%	100	100	16.681.750.466	100	18.913.115.187	100	19.796.825.706	100	20.550.772.711	100	20.949.885.593	KECAMAT AN GAJAHMU NGKUR
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gajahmungkur	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gajahmungkur	%	96	96,67		97		97,33		97,67		98		KECAMAT AN GAJAHMU NGKUR
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tembalang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Tembalang yang berkualitas	%	100	100	22.501.971.261	100	24.055.751.959	100	25.099.908.740	100	25.534.063.647	100	26.558.145.162	KECAMAT AN TEMBALA NG
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tembalang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tembalang	%	100	100		100		100		100		100		KECAMAT AN TEMBALA NG
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Candisari	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Candisari yang berkualitas	%	100	100	12.650.183.082	100	14.083.923.681	100	14.707.954.325	100	14.822.579.887	100	15.092.957.850	KECAMAT AN CANDISARI
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Candisari	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Candisari	%	96	96,67		97		97,33		97,67		98		KECAMAT AN CANDISARI
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Banyumanik	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Banyumanik yang berkualitas	%	100	100	19.686.329.310	100	21.917.529.394	100	22.888.651.527	100	23.067.032.863	100	23.487.797.494	KECAMAT AN BANYUMA NIK
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Banyumanik	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Banyumanik	%	100	100		100		100		100		100		KECAMAT AN BANYUMA NIK
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Ngaliyan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Ngaliyan yang berkualitas	%	100	100	19.965.450.054	100	22.228.284.996	100	23.213.176.091	100	23.394.086.590	100	23.820.816.992	KECAMAT AN NGALIYAN
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Ngaliyan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Ngaliyan	%	96	96,67		97		97,33		97,67		98		KECAMAT AN NGALIYAN
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gayamsari	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gayamsari yang berkualitas	%	100	100	13.362.288.142	100	15.908.794.696	100	16.402.188.385	100	16.701.908.422	100	17.231.976.450	KECAMAT AN GAYAMSA RI
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gayamsari	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gayamsari	%	91	92		92,5		93		93,5		94		KECAMAT AN GAYAMSA RI

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Pedurungan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Pedurungan yang berkualitas	%	100	100	21.278.011.731	100	23.689.609.181	100	24.739.248.644	100	24.932.052.498	100	25.386.836.862	KECAMAT AN PEDURUN GAN
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Pedurungan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Pedurungan	%	100	100		100		100		100		100		KECAMAT AN PEDURUN GAN
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						30.138.297.361		33.390.939.362		34.806.640.563		35.066.684.757		35.680.075.155	
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						30.138.297.361		33.390.939.362		34.806.640.563		35.066.684.757		35.680.075.155	
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						5.262.242.766		5.818.965.029		6.061.276.471		6.105.785.640		6.210.773.551	
	Meningkatnya penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara	Indeks Aktualisasi Pancasila	Angka	74,75	75,25	5.262.242.766	75,5	5.818.965.029	75,75	6.061.276.471	78	6.105.785.640	78,25	6.210.773.551	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						6.712.950.010		7.423.150.752		7.732.263.173		7.789.042.732		7.922.973.954	
	Meningkatnya kepastian hukum dan jaminan kebebasan bagi masyarakat untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Angka kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Angka	59,75	60,25	6.712.950.010	60,5	7.423.150.752	60,75	7.732.263.173	61	7.789.042.732	61,25	7.922.973.954	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						2.739.712.872		3.029.562.507		3.155.718.560		3.178.891.635		3.233.552.118	
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah	Indeks Kinerja Ormas	Angka	65,05	65,3	2.739.712.872	65,5	3.029.562.507	65,7	3.155.718.560	65,9	3.178.891.635	66,1	3.233.552.118	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						2.980.183.735		3.295.474.135		3.432.703.194		3.457.910.222		3.517.368.380	
	Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni di daerah	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	0	6,1	2.980.183.735	6,2	3.295.474.135	6,3	3.432.703.194	6,4	3.457.910.222	6,5	3.517.368.380	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						3.938.469.152		4.355.141.958		4.536.497.358		4.569.809.768		4.648.386.844	
	Meningkatnya kewaspadaan dini di daerah dalam rangka memelihara stabilitas sosial dan politik dalam negeri	Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka	76	77	3.938.469.152	78	4.355.141.958	79	4.536.497.358	80	4.569.809.768	81	4.648.386.844	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.504.738.826		9.468.644.981		9.888.181.807		9.965.244.760		10.147.020.308	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkualitas	%	100	100	8.504.738.826	100	9.468.644.981	100	9.888.181.807	100	9.965.244.760	100	10.147.020.308	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan	%	100	100		100		100		100		100		BADAN KESATUAN BANGSA

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET PAGU DAN INDIKATIF TAHUN										PD Penanggun g Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik													DAN POLITIK
JU ML AH						5.723.933.899.749		6.329.501.064.230		6.593.072.081.432		6.641.486.332.045		6.755.685.522.878	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah, dan indikator utama pembangunan untuk mengukur pencapaian tujuan pembangunan daerah dan kontribusi terhadap pembangunan nasional, memastikan pembangunan berjalan sesuai visi dan misi, serta menjadi pedoman bagi proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Selain itu penetapan Indikator Kinerja Utama disajikan pada Tabel 4.2, penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 4.3. Indikator Utama Pembangunan yang merupakan indikator di dalam RPJPD menjadi target pembangunan dalam RPJMD yang disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.2 Target Indikator Kinerja Utama Kota Semarang Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	85,47-85,55	86,25	86,02-85,10	86,30-86,38	86,57-86,65	86,84-86,92	
2	Indeks Pendidikan	Angka	0,803	0,805	0,807	0,809	0,811	0,813	
3	Indeks Kesehatan	Angka	0,91	0,915	0,92	0,925	0,93	0,935	
4	Tingkat Kemiskinan	%	3,86	3,86-3,74	3,53	3,37	3,2	2,99	
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80-6,50	5,90-6,30	6,90-7,49	7,50-7,98	7,70-8,36	7,90-8,50	
6	Angka Pemenuhan Kinerja Sistem Infrastruktur Strategis	Angka	0,55	0,56	0,57	0,62	0,63	0,64	
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,89	64,94	64,98	65,03	65,07	65,11	
8	Persentase Kawasan Banjir dan Rob	%	3,04	2,97	2,9	2,82	2,75	2,58	
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	89,94	90,66	91,39	92,12	92,85	93,57	

Tabel 4.3 Target Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	92,82	92,9	92,97	93,05	93,13	93,21
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	4,04	3,92	3,81	3,69	3,58	3,34
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,89	64,94	64,98	65,03	65,07	65,11
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	14,17	17,96	21,76	25,55	29,34	33,13
5	Indeks Risiko Bencana	Angka	91,62 - 90,32	90,5 - 88,66	89,38 - 87,00	88,25 - 85,34	87,13 - 83,68	86,01 - 82,02
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80-6,50	5,90-6,30	6,90-7,49	7,50-7,98	7,70-8,36	7,90-8,50
2	Tingkat Kemiskinan	%	3,86	3,7	3,53	3,37	3,2	2,99
3	PDRB Per Kapita	Juta Rp	168,43	205,28	242,14	278,99	315,85	351,59
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,61-5,31	5,40-5,10	5,23-4,93	5,04-4,74	4,85-4,55	4,66-4,36
5	Rasio Gini	Angka	0,405	0,402	0,399	0,395	0,391	0,386
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	85,47 - 85,55	86,25	86,02 - 85,10	86,30 - 86,38	86,57 - 86,65	86,84 - 86,92
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	78,38	78,52	78,67	78,82	78,96	79,3
8	Prevalensi Stunting	%	10,64	8,88	7,72	6,56	5,4	5,16
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,06	11,17	11,34	11,53	11,83	11,93
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,62	15,64	15,67	15,69	15,71	15,73
11	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp/thn	16.682	17.064	17.446	17.828	18.210	18.523
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	73	73,1	73,2	73,3	73,4	73,5
13	Indeks Perlindungan Anak	Angka	71,37	71,38	71,39	71,4	71,41	71,42
14	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Angka	66	70,4	74,8	79,2	83,6	88
15	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,135	0,13	0,125	0,12	0,115	0,11
16	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	66,58	67,56	68,54	69,52	70,5	71,2
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Angka Ketergantungan	%	41,2	40,99	40,78	40,56	40,35	40,14
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	29,42	29,52	29,62	29,72	29,94	30,24
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,44	3,52	3,59	3,67	3,74	3,81
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,08	70,13	70,43	70,78	70,88	70,96

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Indeks Inovasi Daerah	Angka	68	70,61	73,22	75,82	78,43	81,04
6	Angka pemenuhan kinerja sistem infrastruktur strategis	%	0,55	0,56	0,57	0,62	0,63	0,64
7	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	98,84	98,84	98,84	98,84	99,07	99,07
8	Tingkat Inflasi	%	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1
9	Kontribusi PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	%	3,31	3,45	3,59	3,73	3,88	4,03
10	Total Kredit/PDRB	%	41	43,47	45,95	48,42	50,89	53,36
11	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	60	60,87	61,74	62,61	63,48	64,35
12	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (40% Bawah)	%	17,1	17,54	17,98	18,41	18,85	19,25
13	Nilai Ekspor	US\$	1.528.240.547,42	1.604.652.574,79	1.684.885.203,53	1.769.129.463,71	1.857.585.936,89	1.950.465.233,74
14	Persentase Pengembangan Kawasan Strategis	%	52,76	55,06	57,36	59,66	61,96	64,26
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,92	98,03	98,12	98,33	98,42	98,52
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintahan Digital	Angka	4	4,04	4,07	4,09	4,11	4,13
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,48	4,52	4,56	4,60	4,64	4,66
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	76,43	77,25	78,06	78,88	79,69	80,50
5	Indeks Demokrasi	Angka	85,36	85,86	86,24	86,61	86,86	86,99
6	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Angka	75	76	77	78	79	80
7	Angka Kriminalitas	Angka	1.188	1.180	1.172	1.164	1.156	1.148
INDIKATOR KINERJA KUNCI								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)							
	a.Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	b.Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
4	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	80,13	80,13	81,9	83,1	85,3	86,72
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	70,5	71,48	72,46	73,43	74,41	75,39
6	Angka Partisipasi Kasar							
	a. PAUD (3-6 tahun)	%	97,93	98,62	98,97	99,35	99,7	100
	b. SD/MI	%	100	100	100	100	100	100
	c. SLTP/MTs	%	100	100	100	100	100	100
7	Angka Partisipasi Murni :							
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	91,44	92,01	92,73	93,11	93,44	93,75
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	86,44	86,76	87,1	87,38	87,7	88,01
8	Angka Putus Sekolah:							
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
9	Angka Kelulusan:							
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100
10	Angka Melanjutkan (AM):							
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100
11	Fasilitas Pendidikan:							
	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	97	97,33	97,66	97,99	98,32	98,65

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99,4	99,41	99,43	99,44	99,45	99,46
12	Rasio Guru/Murid perkelas Rata-rata							
	a. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18
	b. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	1:18:28	1:18:28	1:18:28	1:18:28	1:18:28	1:18:28
	c. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	%	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	%	1:15:32	1:15:32	1:15:32	1:15:32	1:15:32	1:15:32
13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							
	a. Jenjang PAUD	%	64,2	65,3	67	69,5	72	75
	b. Jenjang SD/MI	%	97	97,3	97,7	98	98,2	98,5
	c. Jenjang SMP/MTs	%	96,45	96,75	97,6	97,9	98,4	98,7
12	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97
13	Rerata Skor Literasi Membaca SD/Sederajat	%	79	80,2	81,6	83	84,50	86,2
14	Rerata Skor Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	81,97	83,07	84,17	85,27	86,37	87,47
15	Rerata Skor Numerasi SD/Sederajat	%	67,5	68,4	70,6	71,8	73,8	74,63
16	Rerata Skor Numerasi SMP/Sederajat	%	76,1	77,6	78,1	81,5	82,70	84,1
17	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11,06	11,17	11,34	11,53	11,83	11,93
18	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,62	15,64	15,67	15,69	15,71	15,73
19	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	21,22	21,69	22,16	22,63	23,1	23,57
20	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	97,92	98,21	98,81	99,4	100	100
21	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah dan mengarusutamakan kebudayaan	%	24,55	25,2	27,1	28,3	29,55	29,93

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,39	0,41	0,42	0,44	0,45	0,47
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	%	99,21	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
4	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
8	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
9	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
13	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
15	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	74,71	68,96	63,21	57,47	57,47	57,47
16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	7,93	7,87	7,82	7,76	7,7	7,64

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	9,02	8,97	8,91	8,85	8,79	8,74
18	<i>Net Death Rate</i> (NDR) RSUD Mijen	Permil	35	33	30	28	26	24
19	<i>Net Death Rate</i> (NDR) RSUD KRMT Wongsonegoro	Permil	28	27,5	27,05	26,5	26,05	25
20	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	80,00	85,00	90,00	93,00	95,00	95,00
21	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	13	13	13	12	12	12
22	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	10,64	8,88	7,72	6,56	5,4	5,16
23	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	90	90,5	91	91,5	92	92,5
24	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	100	100	100	100	100	100
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	85,5	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. (SPM) (1 SR melayani 4 jiwa)	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
4	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	94,5	95,21	95,93	96,64	97,35	98,06
5	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	85	86	87	88	89	90
6	Persentase luas sawah beririgasi	%	71,04	76,65	82,25	87,86	93,47	99,08
7	Persentase areal kawasan kumuh	%	5	90	70	50	30	0
8	Kesesuaian tata ruang	%	100	100	100	100	100	100
9	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	54,62	54,84	55,06	55,27	55,49	55,71
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	95	10	30	50	70	100
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	Unit	1749	1769	1789	1809	1829	1849
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	25,25	27,75	30,25	32,75	35,25	37,75
6	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	/1000 penduduk	40	40	40	40	40	40
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	12,8	16,91	21,02	25,13	29,24	33,35
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	56,05	58,25	60,45	62,64	64,84	67,04
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	70	72	74	76	78	80
3	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	9,63	9,09	8,54	7,99	7,44	6,9
4	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase warga Negara yang meperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
8	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15	15	15	15	15	15
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
	a. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
	b. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
	c. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
	d. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
	a. Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100	100	100	100	100	100
	b. Jumlah Korban Bencana sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
1	Persentase program kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	90	90	90	90	90	90
2	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	70,75	70,87	70,99	71,11	71,23	71,35
3	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	80,0	80,5	81,0	81,5	82,0	82,5

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	55,32	56,83	58,34	59,85	61,36	62,87
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	60,64	61,24	61,84	62,44	63,23	63,88
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	68,75	69,2	69,5	69,7	69,9	70
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Rasio	36	35,9	35,8	35,7	35,6	35,5
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	78,71	78,71	78,71	78,72	78,72	78,72
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	71,37	71,38	71,39	71,4	71,41	71,42
7	Rasio KDRT	Rasio	0,046	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	107,5	107,75	108	108,25	108,5	108,75
2	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	92,19	92,2	92,21	92,22	92,23	92,24
3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	93,5	93,6	93,7	93,8	93,9	94
4	Tingkat Keamanan Pangan	%	88	88,5	89	89,5	90	90,5
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100
2	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	100	100	100	100	100	100
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,89	64,94	64,98	65,03	65,07	65,11
	a. Indeks Kualitas Air	Angka	57,71	57,81	57,91	58,01	58,11	58,21
	b. Indeks Kualitas Udara	Angka	82,63	82,64	82,65	82,66	82,67	82,68
	c. Indeks Kualitas Lahan	Angka	44,43	44,44	44,45	44,46	44,47	44,48

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi:							
	a. Persentase pengurangan timbunan sampah	%	30	31,57	33,15	34,72	36,29	37,86
	b. Persentase penanganan timbunan sampah	%	70	68,43	66,86	65,28	63,71	62,14
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	88,67	88,69	88,71	88,73	88,75	88,77
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%	36,54	36,55	38,02	39,49	40,97	43,18
5	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	30	30,75	32,2	33,36	33,73	34,83
6	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	TonCO2Eq	569.246,19	858.546,65	1.224.280,59	1.822.881,50	2.497.915,89	3.247.290,66
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	73	74	75	76	77	78
2	Kepemilikan akta kelahiran	%	98,4	98,5	98,6	98,7	98,8	98,9
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100
4	Pemanfaatan data kependudukan (Perjanjian Kerjasama)	%	100	100	100	100	100	100
5	Perekaman KTP elektronik	%	99,37	99,4	99,45	99,5	99,55	99,6
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Persentase LPM aktif	%	100	100	100	100	100	100
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2	2	2	2	2	2
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	4,78	4,42	4,07	3,71	3,36	3

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	77,74	77,76	77,77	77,78	77,9	77,91
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
1	Proporsi penduduk pengguna angkutan umum	%	1,104	1,106	1,154	1,177	1,229	1,284
2	Persentase ruas jalan rawan macet	%	36,25	36,15	36,05	35,96	35,86	35,75
3	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	76,25	77,20	78,15	79,10	80,05	81,00
4	Tingkat Fatalitas Kecelakaan	%	11,97	11,18	10,51	9,81	9,12	8,75
5	Rasio Konektivitas	%	0,89	0,90	0,90	0,91	0,92	0,93
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100
2	Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	%	95,64	96,28	96,92	97,56	98,2	98,84
4	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	87	87,2	87,42	87,67	87,94	88,23
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
1	Persentase koperasi aktif	%	77,82	78,05	78,29	78,52	78,76	78,99
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	17,52	17,64	17,75	17,87	17,99	18,11

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	61,98	64,23	66,49	68,74	71	73,25
4	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Angka	7.500	8.500	9.500	10.500	11.500	12.500
5	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,84	1,86	1,90	1,97	2,02	2,04
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	595	610	629	652	679	707
2	Persentase peningkatan investasi	%	0,38%	0,75%	1,50%	2,25%	3,00%	3,75%
3	Nilai investasi	Juta Rp	9.900.000	9.974.250	10.123.863,75	10.351.650,684375	10.662.200,204906	11.062.032,71259
4	Persentase jumlah izin terbit sesuai Standar Pelayanan (SP)	%	98,50	98,77	99,04	99,31	99,58	99,85
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Peningkatan prestasi olahraga	Medali Emas	270	715	279	275	280	720
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,96	0,97	0,97	0,98	0,98	0,99
3	Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,043	0,044	0,046	0,047	0,048	0,049
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100	100	100	100	100
2	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	100	100	100	100	100	100
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	131,21	133,21	135,2	137,19	139,18	141,18

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	524	524	524	524	524	524
3	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	700	700	700	700	700	700
4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	14	14	14	14	14	14
5	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	%	44,9	46,8	48,71	50,62	52,53	54,43
6	Tingkat kearifan budaya lokal	%	89,84	90,87	91,9	92,94	93,97	95
7	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	75,09	75,59	76,09	76,59	77,09	77,59
8	Jumlah pengunjung tempat bersejarah (Kumulatif)	Orang	4.641.338	6.645.650	8.649.962	10.654.274	12.658.586	14.662.898
9	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	70,25	70,95	71,65	72,35	73,05	73,78
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	70	71	72	73	74	75
2	Pengunjung perpustakaan per tahun	%	84	84,83	85,67	86,5	87,33	88,16
3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Angka	73	73,1	73,2	73,3	73,4	73,5
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
1	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	arsip	75	80	85	90	95	100
2	Indeks Lembaga Kearsipan Daerah	Angka	75	76	76,5	77	77,5	78
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	7.249,54	7.321	7.394	7.467	7.541	7.615
2	Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/Kapita /thn	-	16	16,5	17	17,5	18

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Produksi Ikan Olahan	Ton/ tahun	17852,25	17.887,95	17.959,50	18.067,25	18.211,80	18.393,91
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	%	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
2	Tingkat hunian akomodasi	%	57,57	57,67	57,76	57,85	57,94	58,04
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	28,79	41,58	54,37	67,16	79,95	92,74
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,22	3,4	3,58	3,76	3,94	4,12
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha/ta hun	6,93	7,04	7,15	7,26	7,37	7,48
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-5	-5	-5	-5	-5	-5
3	Produktivitas Sentra unggulan pertanian	Kawasan	7	8	9	9	10	11
4	Jumlah kawasan/kelurahan yang melaksanakan <i>integrated urban farming</i> di wilayahnya	Kelurahan	48	64	80	96	112	128
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	91	92,12	93,24	94,36	95,49	96,61
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	91,27	92,53	93,8	95,07	96,33	97,6
5	Disparitas Harga	%	±10,00	±10,00	±10,00	±10,00	±10,00	±10,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	3,18	3,72	4,26	4,8	5,34	5,88
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	18,16	22,35	26,95	31,94	37,3	40,74
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	31,25	37,5	43,75	50	56,25	62,5
4	UNSUR PENDUKUNG							
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	89,94	90,66	91,39	92,12	92,85	93,57
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90,65	90,7	90,75	90,8	90,85	90,9
3	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	74,09	75,89	77,69	79,49	81,29	83,09
4	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	3,62	3,71	3,8	3,89	3,99	4,08
5	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	%	6,03	6,04	6,04	6,05	6,05	6,05
6	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,83	0,83	0,84	0,84	0,84	0,84
7	Return on Asset (RoA) BUMD	%	4,58	5,18	5,79	6,39	6,99	7,59
4.02	SEKRETARIAT DPRD							
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100	100	100	100	100	100
5	UNSUR PENUNJANG							
5.01	PERENCANAAN							

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu.	Dokumen	2	2	2	2	2	2
2	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu.	Dokumen	2	2	2	2	2	2
3	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	%	100	100	100	100	100	100
4	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	%	100	100	100	100	100	100
5.02	KEUANGAN							
1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	54,57	56,24	57,91	59,57	60,24	61,24
2	Persentase Silpa terhadap APBD	%	3,27	3,17	3,07	3,02	2,97	2,92
3	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,16	1,26	1,36	1,45	1,55	1,65
5.03	KEPEGAWAIAN							
1	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	85	85,62	86,24	87	87,8	88,7
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	315,73	355,92	396,11	436,3	476,49	516,68
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	21,88	21,88	22,4	23	23,75	24,65
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	76,45	76,46	76,47	76,48	76,5	76,52
2	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	97,78	97,79	97,8	97,81	97,82	97,83
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100	100
3	Kapabilitas Inovasi	Angka	4,07	4,1	4,12	4,15	4,18	4,22
6	UNSUR PENGAWAS							
6.01	INSPEKTORAT DAERAH							
1	Managemen Risiko Indeks	Nilai	3,05	3,06	3,07	3,08	3,09	3,1
2	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai	3,16	3,19	3,22	3,26	3,30	3,35
3	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN							
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	97,19	98,49	99,79	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	99,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
1	Indeks Demokrasi	Angka	85,36	85,86	86,24	86,61	86,86	86,99
2	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Angka	84,5	84,7	84,9	85,1	85,3	85,5

Tabel 4.4 Target Indikator Utama Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	78,38	78,52	78,67	78,82	78,96	79,3	Dinas Kesehatan
2	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	13	13	13	12	12	12	Dinas Kesehatan
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	10,64	8,88	7,72	6,56	5,4	5,16	Dinas Kesehatan
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	90	90,5	91	91,5	92	92,5	Dinas Kesehatan
5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	90	90,5	91	91,5	92	92,5	Dinas Kesehatan
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
7	Rerata Skor Literasi Membaca SD/Sederajat	%	79	80,2	81,6	83	84,50	86,2	Dinas Pendidikan
8	Rerata Skor Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	81,97	83,07	84,17	85,27	86,37	87,47	Dinas Pendidikan
9	Rerata Skor Numerasi SD/Sederajat	%	67,5	68,4	70,6	71,8	73,8	74,63	Dinas Pendidikan
10	Rerata Skor Numerasi SMP/Sederajat	%	76,1	77,6	78,1	81,5	82,70	84,1	Dinas Pendidikan
11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11,06	11,17	11,34	11,53	11,83	11,93	Dinas Pendidikan
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,62	15,64	15,67	15,69	15,71	15,73	Dinas Pendidikan
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	21,22	21,69	22,16	22,63	23,1	23,57	Dinas Pendidikan
14	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	97,92	98,21	98,81	99,4	100	100	Dinas Pendidikan
15	Tingkat Kemiskinan	%	3,86	3,86-3,74	3,53	3,37	3,2	2,99	BAPPEDA
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	55,32	56,83	58,34	59,85	61,36	62,87	Dinas Tenaga Kerja
17	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (40% Bawah)	%	17,1	17,54	17,98	18,41	18,85	19,25	BAPPEDA
18	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah dan mengarusutamakan kebudayaan	%	24,55	25,2	27,1	28,3	29,55	29,93	Dinas Pendidikan
19	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	75,09	75,59	76,09	76,59	77,09	77,59	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
20	Jumlah pengunjung tempat bersejarah (Kumulatif)	Orang	4.641 .338	6.645 .650	8.649 .962	10.654 .274	12.658 .586	14.662 .898	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	70,25	70,95	71,65	72,35	73,05	73,78	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Angka	84,00	84,83	85,67	86,5	87,33	88,05	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	29,42	29,52	29,62	29,72	29,94	30,24	Dinas Perindustrian
24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,22	3,4	3,58	3,76	3,94	4,12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	28,79	41,58	54,37	67,16	79,95	92,74	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,44	3,52	3,59	3,67	3,74	3,81	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,84	1,86	1,90	1,97	2,02	2,04	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
28	Return on Asset (ROA) BUMD	%	4,58	5,18	5,79	6,39	6,99	7,59	Bag. Perekonomian
29	Kapabilitas Inovasi	Angka	4,07	4,1	4,12	4,15	4,18	4,22	Brida
30	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,61-5,31	5,40 - 5,10	5,23-4,93	5,04-4,74	4,85-4,55	4,66-4,36	Dinas Tenaga Kerja
31	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	60,64	61,24	61,84	62,44	63,23	63,88	Dinas Tenaga Kerja
32	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa dalam PDRB	%	28,98	29,06	29,15	29,23	29,31	29,39	Bappeda
33	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	87	87,2	87,42	87,67	87,94	88,23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
34	Disparitas Harga	%	±10,00	±10,00	±10,00	±10,00	±10,00	±10,00	Dinas Perdagangan
35	PMTB (% PDRB)	%	60,51	59,67	59,67	59,66	59,65	59,44	DPM PTSP
36	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	98,84	98,9	98,96	99,01	99,07	99,13	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
37	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kab/Kota	%	93,45	93,62	93,8	93,98	94,33	94,66	Dinas Pekerjaan Umum
38	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	72,5	73	73,5	74	74,5	75	Dinas Perhubungan
39	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Rp Juta	168,43	205,28	242,14	278,99	315,85	351,59	Bappeda
40	Tingkat Pemenuhan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	%	56,81	57,65	58,49	62,74	63,99	65,24	Dinas Pekerjaan Umum
41	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,16	1,26	1,36	1,45	1,55	1,65	Badan Pendapatan Daerah
42	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	60	60,87	61,74	62,61	63,48	64,35	Bag. Perekonomian
43	Total Kredit/PDRB	%	41	43,47	45,95	48,42	50,89	53,36	Bag. Perekonomian
44	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	12,8	16,91	21,02	25,13	29,24	33,35	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
45	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	64,89	64,94	64,98	65,03	65,07	65,11	Dinas Lingkungan Hidup
46	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	14,17	17,96	21,76	25,55	29,34	33,13	Dinas Lingkungan Hidup
47	Persentase Kawasan Banjir dan Rob	%	3,04	2,97	2,9	2,82	2,75	2,58	Dinas Pekerjaan Umum
48	Persentase Pengembangan Kawasan Strategis	%	52,76	55,06	57,36	59,66	61,96	64,26	Bappeda
49	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,135	0,13	0,125	0,12	0,115	0,11	DP3A
50	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,58	67,56	68,54	69,52	70,5	71,2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
51	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	4,04	3,92	3,81	3,69	3,58	3,34	Dinas Ketahanan Pangan
52	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	92,82	92,9	92,97	93,05	93,13	93,21	Dinas Ketahanan Pangan
53	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	56,05	58,25	60,45	62,64	64,84	67,04	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
54	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	54,62	54,84	55,06	55,27	55,49	55,71	Dinas Pekerjaan Umum
55	Indeks Risiko Bencana	Angka	91,62 - 90,32	90,5 - 88,66	89,38 - 87,00	88,25 - 85,34	87,13 - 83,68	86,01 - 82,02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
56	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2Eq	569 .246,19	858 .546,65	1.224 .280,59	1.822 .881,50	2.497 .915,89	3.247 .290,66	Dinas Lingkungan Hidup
57	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	89,94	90,66	91,39	92,12	92,85	93,57	Bag. Organisasi
58	Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,92	98,03	98,12	98,33	98,42	98,52	Bag. Hukum
59	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintahan Digital	Angka	4	4,04	4,07	4,09	4,11	4,13	Dinas Komunikasi, informatika, Statistik, dan Persandian

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran *milestone* pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang tahun 2025-2045. Dokumen RPJMD ini juga merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Wali Kota/Wakil Wali Kota yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion* (FGD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sedangkan pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan secara berjenjang di daerah hingga nasional, serta dengan penyelarasan kebijakan dan program nasional dan provinsi.

RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk menjamin pelaksanaan RPJMD, maka diperlukan penjabaran secara teknis dalam rencana strategis perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD. Sedangkan untuk penjabaran dalam pelaksanaan tahunan, RPJMD ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) secara sinergi dan berkesinambungan.

5.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kota Semarang, maka pedoman transisiditetapkan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Tahun 2025

Penyusunan RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 karena dokumen RPJMD 2025-2029 belum ditetapkan. Dikarenakan RKPD Tahun 2025 harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada visi, misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Semarang. Selanjutnya, Perubahan RKPD 2025 tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. RKPD Tahun 2026

Dikarenakan saat penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dokumen RPJMD 2025-2029 belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2025 masih berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk penyusunan tahapan selanjutnya akan mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029.

3. RKPD Tahun 2030

Penyusunan RKPD Tahun 2030 disusun tetap dengan berpedoman pada dokumen RPJMD 2025-2029 dan RPJPD Tahun 2025-2045, serta memperhatikan rancangan RPJMN Tahun 2029-2034.

Pedoman transisi seperti diuraikan di atas bersifat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2029.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
4. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMD Tahun 2026-2029 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja RPJMD tahun 2025-2029, maka dokumen RPJMD ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
5. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001